

Diterbitkan untuk  
Ujian Tahap II

**Disertasi**

**BAHASA DAN KEKUASAAN:  
Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid  
dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian**



**Oleh:**

**Mudjia Rahardjo**

**NIM 099913720/D**


**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2005**

# **DISERTASI**

**BAHASA DAN KEKUASAAN:**  
Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid  
dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian

**Mudjia Rahardjo**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



*Speech is what makes man political being  
(Hannah Arendt, 1958: 3)*

**BAHASA DAN KEKUASAAN:  
Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid  
dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian**

**DISERTASI**  
Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga  
dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka

Oleh:  
**Mudjia Rahardjo**  
NIM 099913720/D

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Tanggal 20 Januari 2005

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Revisi Naskah Disertasi telah Disetujui untuk Diajukan  
dalam Ujian Tahap II (Terbuka)

Tanggal, 13 Desember 2004

Oleh

Promotor,

**Prof. RAMLAN SURBAKTI, Drs., M.A., Ph.D.**

Ko-promotor I,

**Dr. NASIKUN**

Ko-promotor II,

**Prof. Dr. HOTMAN M. SIAHAAN, MA**

### **PANITIA PENGUJI UJIAN TAHAP I (TERTUTUP)**

- Ketua : Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
- Anggota : 1. Prof. Ramlan Surbakti, Drs., M.A., Ph.D.  
2. Dr. Nasikun  
3. Prof. Dr. Hotman M.Siahaan, MA.  
4. Prof. Dr. Abd. Syukur Ibrahim  
5. Dr. L. Dyson, Drs., M.A.  
6. Dr. F.X. Eko Armada Riyanto, CM.

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga

Nomor : **7928/103/PP/2004**

Tanggal : **21 Oktober 2004**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, saya memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa menulis disertasi sungguh bukan pekerjaan ringan. Diperlukan kerja keras, kesabaran, ketekunan, keuletan agak ekstra, dan tentu kecerdasan. Secara jujur saya mengakui bahwa selama studi di Program Doktor (S3) Universitas Airlangga dan lebih-lebih ketika menulis disertasi, saya menemui banyak kendala. Satu di antaranya adalah latar belakang pendidikan saya sebelumnya yang tidak linier: dari Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Teknik Sipil ke S1 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, Pascasarjana (S2) Program Studi Sosiologi Pedesaan, dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Sosial. Untung, saya memperoleh bimbingan dan dukungan dari banyak pihak sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan doktor ini. Untuk itu, sudah sepatutnya saya menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang tulus kepada:

Prof. Ramlan Surbakti, Drs., M.A., Ph.D., selaku promotor yang di tengah kesibukan beliau yang amat sangat padat (saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum) berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengoreksi naskah disertasi saya dengan penuh kesabaran, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sesuai prinsip dan prosedur akademik yang berlaku. Menyadari kesibukan beliau yang sangat tinggi, saya sering merasa “tidak sampai” hati sekadar menanyakan hasil koreksinya. Tetapi di luar dugaan

saya, beliau tetap meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan sabar dan penuh jiwa kebpakan walau saya harus menemuinya di kantor KPU Jakarta.

Dr. Nasikun, selaku ko-promotor I, yang juga dengan sabar, telaten dan selalu memberikan alternatif-alternatif pemecahan atas masalah yang saya hadapi selama proses penulisan disertasi. Dua pertanyaan khas beliau kepada saya adalah: apa tahap selanjutnya dan kapan bisa segera ujian. Pertanyaan khas beliau tersebut ternyata menancap dalam di hati saya dan memberi semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan studi. Beliau juga sering menghubungi saya untuk menanyakan perkembangan studi saya baik lewat teman, telepon maupun pesan melalui *sms*, yang kesemuanya menjadikan hubungan kekerabatan yang sangat hangat.

Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, selaku ko-promotor II, sekaligus juga Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Sosial, Pascasarjana, Universitas Airlangga, yang sering mempertemukan jalan dan arah pikiran saya dengan ide-ide dan gagasan promotor dan ko-promotor I sehingga saya tidak mengalami kesulitan berarti selama proses pembimbingan. Beliau menunjukkan kepada saya kekurangan disertasi saya melalui catatan kritisnya terutama pada bagian-bagian akhir yang beliau sebut “masih ada lubang menganga” dan mengontrol uraian ide agar tidak melebar ke sana ke mari sebelum akhirnya mengijinkan saya untuk ujian, baik ujian tertutup maupun terbuka.

Saya sangat yakin hanya karena komitmen dan integritas akademik yang sangat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, beliau bertiga berkenan membimbing saya hingga mulai awal hingga selesainya penulisan disertasi ini.



Sungguh saya sangat beruntung memperoleh bimbingan beliau bertiga dalam kehidupan akademik saya.

Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., selaku Rektor Universitas Airlangga beserta para Pembantu Rektor dan Staf, dan Prof. H. Soedarto. DTM&H., Ph.D., selaku mantan Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengikuti pendidikan doktor di Universitas Airlangga. Pada masa kepemimpinan beliau saya menempuh pendidikan doktor ini.

Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga beserta para Asisten Direktur dan staf.

Tidak ketinggalan pula Ketua Program Studi (KPS) S3 Ilmu Sosial PPS Universitas Airlangga Prof. Dr. Hotman M. Siahaan dan Ketua Program Studi (KPS) sebelumnya Prof. Ramlan Surbakti, Drs., MA., Ph.D., dan seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu saya dalam berbagai urusan administratif.

Begitu juga Dr. L. Dyson, Drs., MA, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Airlangga dengan sikapnya yang senantiasa *helpful and friendly* sehingga saya bisa memperoleh jalan keluar jika menemui kendala.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang (d/h STAIN Malang)--- tempat saya mengabdikan --- Prof. Dr. H. Imam Suprayogo yang tidak henti-hentinya menanyakan perkembangan studi saya dan masalah yang saya hadapi agar saya segera menyelesaikan studi. Selain memberikan dorongan semangat, Rektor UIN Malang juga memberikan dukungan finansial baik berupa biaya pendidikan

maupun biaya penulisan disertasi. Lebih dari itu semua, di waktu senggang atau dalam perjalanan dinas, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, yang juga alumni Program Doktor Ilmu Sosial, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, juga merupakan *partner* diskusi saya yang sangat produktif. Tidak berlebihan pula jika Pak Imam, begitu panggilan akrabnya, yang memberikan inspirasi awal tentang tema disertasi saya dan beliau pula yang “mengakhiri” disertasi saya dengan pertanyaan “kajian Pak Mudji ini masuk ilmu apa, sebab di sini ada sosiologi, linguistik, dan ada pula politik?”. Saya agak bingung menjawabnya. Beliau yang menggiring saya untuk menjawab “ini bidang sosio-politikolinguistik”, sebuah cabang ilmu sosiolinguistik. Tidak terduga pertanyaan Pak Imam tersebut muncul pada saat Ujian Terbuka. Tentu saja saya dapat menjawabnya dengan lancar.

Tidak terlupakan juga para Pembantu Rektor I, Prof. Dr. H. Muhaimin, MA., Pembantu Rektor II, H. Baharuddin, Drs., M.Pd.I., dan Pembantu Rektor III, H. Muhtadi Ridwan, Drs., M.Ag. atas segala pengertian, dukungan, dan dorongan sekaligus fasilitas untuk kelancaran studi saya.. Tidak ketinggalan pula para Dekan dan Pembantu Dekan, para pejabat struktural, para Kepala Unit dan rekan-rekan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada saya selama studi.

Departemen Agama, dalam hal ini Direktorat Kelembagaan Agama Islam yang memberikan bantuan finansial pada masa-masa awal studi sehingga menjadi sangat berharga bagi kelancaran studi saya.

Para dosen saya Prof. H. Soetandyo Wignjosuebrotto, M.PA., yang sering menggoda saya dengan kalimat “Saya kira sudah doktor”, Dede Oetomo, Ph.D.,

selaku pembimbing Mata Kuliah Penunjang Disertsi (MKPD) untuk Mata Kuliah Sociolinguistik, dan Romo Budi Susanto, Ph.D., dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, untuk Mata Kuliah Antropologi Bahasa, Daniel T. Sparringa, Ph.D., Dr. L. Dyson Drs., M.A, Dr. Sanapiah Faisal, Widodo J. Pudjihardjo, dr., M.Sc., M. PH., Dr. PH. yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup saya selama kuliah di Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Tak terlupakan pula Prof. Dr. H. Abdul Syukur Ibrahim, dari Universitas Negeri Malang (UM- dahulu IKIP Malang) yang penuh ketelatenan dan ketelitian mengoreksi naskah disertasi mulai halaman awal sampai akhir, Romo Dr. FX. Eko Armada Riyanto CM, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang, yang memberi catatan kritis dan mengingatkan saya bahwa “studi hermeneutika yang sosial filosofis semacam ini memang tidak mudah, dan karenanya perlu kerja keras dengan membanca banyak literatur--- terutama tentang filsafat tafsir”, dan Dr. A. Habib, Drs., MA atas saran dan masukan serta buku-buku referensi beliau yang saya pinjam pada masa-masa awal penulisan disertasi.

Teman-teman sejawat, H. Turmudi, Drs., M.Si., Sakban Rosidi, Drs., S.Pd., M. Si, Ahmad. Samudji, Drs., M.Si, Agus Suryono, Drs., M.S., Agus Bambang Purnomo, Drs., M.Si., M.Pd, H. Imam Kabul, Drs., M.Si., M.Hum., H. Muhadjir Effendy., Drs., MPA., H. Budi Siswanto, Drs., M.Si, Hj. Ruminiati, Dra., M.Si, M. Saleh Soeaidy, Drs., MA., H. Soenyono, SH., M.Si., I.B. Putera Manuaba, Drs., M.Hum., Ali Sjahbana, Ir., M.Sc., Ya’kub Cikusin, Drs., M.Si, Dr. A. Fatchan, M.Pd., M.Si., Dr. Warsono, Dr. H. Basrowi, Eka Suaib, Drs., M.Si, H.

Wahyu Santoso, Drs., SH., M.Si., H. Rusman, dr. DSKJ , Shofwan, Drs., M.Si, Andi Mappiare AT, Drs. M.Pd., Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si., dan lain-lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini yang telah memberi masukan kepada saya mulai pemilihan tema, penyusunan proposal sampai berakhirnya penulisan disertasi.

Teman-teman sejawat dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Malang, Wahyu Santoso, Drs., SH, M.Si, selaku Ketua BPH Yayasan STIBA Malang, Eko Ediyono, Drs., M.Si, selaku Ketua STIBA Malang beserta para Pembantu Ketua yang memberikan semangat yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian studi saya.

Saudara Moh. In'am Esa, Drs., M.Ag., Fathul Qorib, S.Ag, I Gusti Nyoman Budiasa, dan Sidratahta Muhtar, SS., M.Si, yang membantu saya mengetik dan menranskrip naskah-naskah pidato para tokoh politik yang menjadi subjek penelitian sebagai data penelitian dan mencari data dan referensi pendukung untuk penyelesaian disertasi. Saudara Lukmanul Hakim, SS, yang membantu saya mencarikan referensi tambahan di toko-toko buku dan universitas-universitas di Yogyakarta, khususnya tentang karya-karya Gadamer yang memang langka. Juga Saudara Roy Mastur dari RRI Malang yang memberikan rekaman pidato politik subjek penelitian saya. Tri Kustono Adi, S. Si., Bambang Hariyanto, SS., yang membantu penggandaan naskah. Pak Totok dan Pak Ismail yang sering mengantar saya selama proses pembimbingan.

Ayah saya H. Zaenuri dan Ibu saya Katiyah, kakek saya Sidas (alm) dan nenek saya Sikin (alm) serta Bapak (Pak De) saya Sitam (alm) dan Ibu (Bu De) saya Kartini, yang telah dengan tulus ikhlas mengasuh, mendidik, membesarkan

dan membiayai pendidikan saya mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi kendati dalam kondisi ekonomi keluarga petani desa yang pas-pasan. Tak lupa pula ayah mertua saya Supeno dan ibu mertua Sulastri yang dengan kesederhanaan dan kepolosannya memberikan dukungan kepada saya dengan sering menanyakan perkembangan studi saya.

Secara khusus kepada istri saya Hj. Puji Hariwati, Dra., M.Pd., anak saya Anita Restu Puji Raharjeng, Rofyka Yuli Puji Raharjeng yang saat ini sedang belajar di *International Business and Management Studies (IBMS)* di Saxon Hogeschool, Deventer, Belanda, dan Fajar Maulana, yang dengan sabar dan penuh pengertian menemani dan selalu memberi dukungan semangat kepada saya sejak awal menempuh pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga sampai berakhirnya studi saya.

Masih banyak pihak, baik secara institusional maupun personal, yang telah turut membantu saya menyelesaikan studi, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu di sini. Mudah-mudahan kemurahan hati mereka dicatat Allah SWT sebagai kesempurnaan kesalehan ibadah mereka.

Akhirnya, dengan kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam saya memohon do'a kepada Allah SWT semoga semua pihak yang saya sebutkan di atas memperoleh pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan jerih payahnya dalam membantu saya selama menempuh pendidikan doktor di Universitas Airlangga. Selain itu, saya berharap seraya memohon ridha Allah SWT semoga ilmu yang saya peroleh dari pendidikan doktor ini di tengah samudera ilmu yang terbentang sangat luas dapat bermanfaat

bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pula ilmu tersebut berguna bagi diri saya dan masyarakat luas. Amin.

## **Ringkasan**

### **BAHASA DAN KEKUASAAN: Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian**

Mudjia Rahardjo

Kejatuhan rejim Orde Baru Soeharto 21 Mei 1998 mengakibatkan pergeseran struktur kekuasaan di Indonesia, dari pola konsensus ke kompetisi. Ketika Sidang Umum MPR RI tgl 3-20 Oktober 1999 melakukan pemilihan presiden, tiga orang calon, yaitu B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Abdurrahman Wahid bersaing cukup ketat. Dengan dukungan partai-partai politik berbasis Islam yang tergabung dalam “Poros Tengah”, KH. Abdurrahman Wahid, tokoh yang dinilai memiliki visi kenegaraan yang luas, komitmen tinggi dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia serta berisiko paling kecil di antara calon-calon lainnya, akhirnya terpilih menjadi Presiden RI ke-4 berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Duet kepresidenan ini memperoleh sambutan positif dari banyak pihak dan menjadi tumpuan harapan bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia sejak pertengahan 1997.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid bukan hanya tidak berhasil mengentaskan Indonesia dari krisis multidimensional, tetapi juga gagal menciptakan stabilitas sosial politik sebagaimana diharapkan. Sebab, Abdurrahman Wahid tidak saja sering melontarkan ungkapan-ungkapan kontroversial, tetapi juga membuat banyak kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik antarelit politik hampir sepanjang masa pemerintahannya. Berbagai tindak kekerasan dan kerusuhan serta ancaman disintegrasi sosial pun terjadi di beberapa wilayah. Dalam konteks ini, para elit politik menggunakan rangkaian pernyataan politik yang membentuk wacana (*discourse*) dan kontra wacana (*counter-discourse*) sebagai piranti perjuangan.

Secara hipotetik, konflik politik tersebut terjadi karena wacana politik yang dikembangkan Abdurrahman Wahid, baik sengaja maupun tidak, telah ditafsir secara berbeda oleh pesaing-pesaing politiknya: Amien Rais, Akbar Tandjung, dan Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, dengan menggunakan perspektif hermeneutika, maka pertanyaan umum dan penting untuk dijawab dalam penelitian ini adalah: apakah makna wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid dalam perspektif hermeneutika Gadamerian? Secara lebih spesifik rumusan masalah yang diajukan adalah; (1) apakah makna wacana politik Abdurrahman Wahid bagi Megawati Soekarnoputri?, (2) apakah makna wacana politik Abdurrahman Wahid bagi Amien Rais?, dan (3) apakah makna wacana politik Abdurrahman Wahid bagi Akbar Tandjung?

Mengacu perspektif hermeneutika Gadamerian, diasumsikan bahwa sesuai hakikat dan fungsi bahasa, suatu wacana atau wicara lebih banyak kepada khalayak penafsirnya daripada kepada diri produsennya. Karena perbedaan konteks historis, budaya, tradisi, kepentingan praktis dan prasangka antara produsen dengan penafsir wacana, maka diproposisikan bahwa makna wacana politik seseorang tidak terletak pada, atau sama dengan keniatan (*intention*) produsennya, tetapi justru lebih bergantung pada penerimaan (*perception*) oleh masyarakat penafsirnya. Makna wacana politik Abdurrahman Wahid tidak sama dengan keniataannya sendiri, melainkan ditentukan oleh para pesaing politiknya, yaitu: Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Akbar Tandjung.

Analisis data perolehan menunjukkan bahwa bagi Megawati Soekarnoputri, kelemahan wacana politik Abdurrahman Wahid tidak tergesa-gesa dijadikan peluang untuk menggantikannya sebagai presiden, tetapi dengan bergaya wacana feminin-minimalis, Megawati Soekarnoputri menunggu saat yang tepat untuk bersedia menggantikannya sebagaimana amanat Kongres. Bagi Amien Rais, wacana politik Abdurrahman Wahid tidak memenuhi syarat koherensi dan korespondensi, karena selain sering berubah-ubah juga tidak didukung oleh penalaran logik-empirik. Selain itu, dalam wacana politik Abdurrahman Wahid tidak terkandung kebenaran, melainkan sekadar membenaran atas ucapan dan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, wacana politik Abdurrahman Wahid merupakan wilayah paling strategis untuk diserang. Sedangkan bagi Akbar Tandjung, wacana politik Abdurrahman Wahid dinilai tidak dibangun di atas logika rasional-empirik dan banyak melanggar konstitusi. Akbar Tandjung segera menarik dukungan politiknya ketika Abdurrahman Wahid membekukan Partai Golkar melalui Dekrit Presiden.

Temuan penelitian ini mendukung tesis dasar Gadamer bahwa tidak bisa ada pemahaman tunggal terhadap suatu wacana. Bagi masyarakat interpretif yang berbeda kepentingan, produsen wacana benar-benar telah mati (*the author is dead*). Memang benar bahwa bahasa bisa digunakan sebagai piranti pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan, tetapi diprasyarati oleh kesamaan kepentingan antara produsen wacana (*the author*) dan khalayak penafsirnya (*its interpreter*). Perspektif Gadamerian menyumbangkan semacam *ceteris paribus* terhadap kekuatan persuasif dan hegemonik bahasa.

Persoalan pemanfaatan wacana untuk kepentingan kekuasaan tidak sesederhana seperti sering diproposisikan. Ketika politik wacana ditujukan terhadap masyarakat penafsir yang berbeda kepentingan, dia bisa memberikan akibat yang berlawanan, karena wacana tersebut akan diolah oleh masyarakat penafsirnya sehingga tampak sebagai penipuan melalui bahasa.

Ungkapan apa pun yang digunakan sebagai inti suatu wacana, bisa dipahami secara berbeda oleh masyarakat penafsir yang memiliki sejarah berbeda. Ketidak-samaan sejarah (*tambo*) dan lebih-lebih prasangka dan kepentingan antara bagian-bagian masyarakat menyulitkan usaha membangun integrasi sosial dan politik. Konflik, baik antarelit maupun antara elit dengan massa, bisa dipahami sebagai cermin rendahnya fusi horison antarmereka.

Ada titik temu penting antara pendekatan Gadamerian dengan sosiologi fungsionalis taraf menengah. Sebagai tindak bertujuan, praktik berwacana



(*discursive practice*) tidak hanya memunculkan akibat yang diharapkan, tetapi juga menghadirkan sejumlah akibat yang tidak disadari dan tidak disengaja. Selanjutnya, karena tugas ilmu-ilmu sosial antara lain adalah menganalisis konsekuensi tindakan sosial yang tak terantisipasi, maka bila status epistemologi praktik wacana diidentikkan dengan tindakan sosial, justru pendekatan Gadamer yang lebih memiliki signifikansi bagi kajian ilmu sosial dibanding dengan pendekatan Hirschian. Kajian terhadap makna wacana berdasarkan perspektif hermeneutika Gadamerian bisa memberikan “pintu masuk” alternatif bagi identifikasi akibat-akibat laten dari praktik berwacana seseorang.

Diletakkan dalam teori kekuasaan Althusser (1971), maka Abdurrahman Wahid telah gagal memanfaatkan baik Aparat Represif Negara (RSA) maupun Aparat Ideologik Negara (ISA) karena telah mengembangkan wacana supremasi sipil yang tentu tidak populer di kalangan militer. Selain itu, karena sejumlah cacat dalam wacana politiknya, pikiran-pikiran Abdurrahman Wahid tidak mampu menjadi arus utama di lembaga perwakilan rakyat. Temuan studi ini juga menghaluskan tipologi upaya penguasaan Gramsci, yang semula terdiri atas upaya koersif dan hegemonik, menjadi koersif, intimidatif, dan hegemonik. Dilihat dari dua sumber pokok kekuasaan menurut Galtung, wacana politik Abdurrahman Wahid telah gagal baik dalam mengarahkan sumber-sumber ideologik maupun punitif. Konseptualisasi dan teoretisasi kekuasaan dan kekerasan ala Bourdieu juga ditengarai tidak berlaku manakala pihak-pihak yang terlibat berada dalam posisi setara, sehingga apa yang berlangsung bukan kekerasan simbolik, melainkan perselisihan simbolik.

Kajian ini juga sampai pada kesimpulan reflektif bahwa dinamika wacana dan kontra-wacana antaraktor politik mencerminkan dengan jelas dinamika sosial-politik masyarakatnya. Lebih dari itu, bangsa yang terintegrasi dan harmonis tampak bisa diupayakan di antaranya melalui pengembangan wacana yang memenuhi kaidah kejernihan dan ketaat-asasan (*fidelity and coherence*), yang ditampilkan melalui praktik wacana yang efektif.

Akhirnya, sejauh menyangkut substansi tentang pemaknaan, temuan-temuan penelitian ini memang mengukuhkan tesis Gadamer. Namun demikian, berkenaan dengan metodologi kajian, pendekatan Gadamer tidak memberi protokol analisis yang operasional. Oleh karena itu, diperlukan keberanian berspekulasi secara metodologik bagi peneliti yang bermaksud menggunakan pemikirannya sebagai perspektif teoretik suatu penelitian.

## SUMMARY

### LANGUAGE AND POWER:

#### A Study on Abdurrahman Wahid's Political Discourses in the Gadamerian Hermeneutic Perspective

Mudjia Rahardjo

The fall of Soeharto's New Order May 21, 1998 has shifted the political power structure in Indonesia, from a pattern of consensus to that of competition. When the People's Consultative Assembly (MPR) held its General Session from 3 – 20 October, 1999, three presidential candidates, namely BJ. Habibie, Megawati Soekarnoputri, and KH. Abdurrahman Wahid were in close competition. But since BJ. Habibie's end-of-term accountability speech was rejected by the People's consultative Assembly (MPR), he finally withdrew from the candidacy, and therefore only KH. Abdurrahman Wahid and Megawati Soekarnoputri were running for the candidates of the president.

Supported by Islamic-based political parties under the so-called the Central Axis (*Poros Tengah*), KH. Abdurrahman Wahid, one of Indonesia's prominent figures with a broad national vision, great commitment to democracy and human rights, and the least risky political option among other candidates, was finally elected as Indonesia's fourth president in partnership with Megawati Soekarnoputri as his Vice President.

Given the prominence and enormous popularity, it was not surprising that many, including political observers, expected that Abdurrahman Wahid would be able to solve numerous problems faced by Indonesia since Soeharto's fall. However, his presidency proved to be deeply disappointing. By his competitors his presidency is considered not only to have failed to lift Indonesia from the multidimensional crises which happened since the mid-1997, but also to establish national political stability as expected since it was marked with various conflicts and competitions, especially among political elites. Moreover, Abdurrahman Wahid's political discourses were not only controversial, but also were assumed by many to have caused the social riots and political conflicts among the political elites seen during the course of his presidency. In addition, social violence, chaos and separatist movements were almost prevalent in many parts of Indonesia. This was dangerous for Indonesian national unity. In this context, the political elites were actively engaged to attack each other by using language and political discourses.

Hypothetically, the political conflicts during Abdurrahman Wahid's presidency occurred due to the fact that Abdurrahman Wahid's political discourses were, with or without intention, differently interpreted by his political rivals: Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, and Akbar Tandjung. Hence, applying a hermeneutic perspective, the general question to be answered in this study is: what do Abdurrahman Wahid's political discourses mean in the Gadamerian hermeneutics? More specifically, the question can be further stated as follows: (1) what do Abdurrahman Wahid's political discourses mean to Megawati Soekarnoputri?, (2) what do Abdurrahman Wahid's political discourses mean to Amien Rais, and (3) what do Abdurrahman Wahid's political discourses mean to Akbar Tandjung?

Referring to the Gadamerian hermeneutic perspective, it is assumed that according to the nature and the function of language, a discourse or speech is more directed to the interpreters than to the author. Due to their different historicity, culture, tradition, practical interest, and presupposition between the author and the interpreters, it is propositioned that the signification of one's political discourses are not located in, or identical to the author's intention, but in the interpreter's perception. The signification of Abdurrahman Wahid's political discourses are not the same as his own intentions, but rather than as determined by his political competitors, namely Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, and Akbar Tandjung.

From the analysis, it can be seen that for Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid's political discourses, due to their weaknesses, were not used as opportunities for her to contest him for the presidency, but rather as opportunities to be used when the right political moment arrived for her to declare her readiness to be President as her Party's Congress mandate. For Amien Rais, Abdurrahman Wahid's political discourses did not fulfill the principles of coherence and fidelity since they changed frequently and were not supported by logical empirical reasoning. Besides, Abdurrahman Wahid's discourses did not contain truth, but were a means of justifying all he had said and done. Therefore, for Amien Rais Abdurrahman Wahid's discourses were vehicles for political attacks. From Akbar Tandjung's perspective, Abdurrahman Wahid's political discourses were not based on rational-empirical logic and in most cases unconstitutional. For this matter and the additional reason that Abdurrahman Wahid had issued a Decree to dismiss Akbar Tandjung's Golkar Party, Akbar Tandjung finally deserted Abdurrahman Wahid and turned to support Megawati Soekarnoputri as president.

The findings of this research support Gadamer's primary thesis that there is no single understanding of a discourse. It is true that for the interpreters with different interest, the author is really dead. It is true that language may be functioned as a means of power struggle, but it requires for the author and the interpreters to have the same interest. Here, the Gadamerian perspective contributes to the principle of *ceteris paribus* for the language and discourse to be functional.

The problem of using discourses in power struggle is not as simple as is often propositioned. When political discourses are directed to the interpreters of opposing interest, they may result in an opposite impact since the discourses will be manipulated by the interpreters so that they appear to be a deception through the use of language. Whatever utterances are used as the core of discourses, they may be differently understood by the interpreters with different historicity. Different historicity, and moreover presupposition and interest among the elements of society make political elites difficult to establish political and social integration. Conflicts, either among elites or between elites and masses, can be interpreted as the reflection of a lack of fusion among their horizons.

There is a significant point of convergence between the Gadamerian perspective and the theory of middle-range sociology. Seen as an intended action, discursive practice not only reveals manifest consequences, but also results in a number of latent consequences. Furthermore, since one of the tasks of social sciences is to analyze unanticipated consequences of social actions, therefore, if the epistemological status of discursive practice is identical to social actions, the Gadamerian perspective seems to offer a more significant value for social inquiry than the Hirschian perspective (Intensionalism Perspective) does. A study on the signification of discourses based on the Gadamerian hermeneutic perspective may function as an alternative entry point to identification of latent functions of one's discursive practice.

Using Althusser's power perspective (1971), it can be inferred that Abdurrahman Wahid's discourses failed to make use of both the State Repressive Apparatus (SRA) and the State Ideological Apparatus (SIA) as well, because he developed civil-supreme discourses which were unpopular among TNI/POLRI. In addition, his failure was also due to his discourse weaknesses being equally unpopular with most members of the House of Representatives (DPR). In Gramsci's perspective (1971), this finding contributes to refine one more kind of coercive and hegemonic power, namely intimidating power. Seen from two basic sources of power in Galtung's perspective (1973), Abdurrahman Wahid's discourses failed both in applying ideological as well as punitive power. In Bourdieu's (1994), this finding gives another different perspective. Bourdieu's perspective on power and violence is no longer relevant when those involved in the conflict are, more or less, of equal status or rank. In this case, what appears is not symbolic violence, but rather symbolic conflict.

This study comes to a reflective conclusion that the dynamics of discourses and counter-discourses among political actors reflect apparently the socio-political dynamics of society. Moreover, the fulfillment of cohesion and coherence principles performed in mutually discursive practices make harmonious and integrated society possible.

Finally, in terms of the substance of interpretation, the findings of this research confirm Gadamer's thesis. Methodologically, Gadamer's perspective, however, does not provide an operational protocol for analyses. Hence, it is necessary for hermeneutic researchers to have intellectual bravery to develop their

own speculative method to apply Gadamer's ideas. This study has made an effort to offer an alternative way for analyses in using Gadamer's ideas of hermeneutics.

## ABSTRACT

### **LANGUAGE AND POWER: A Study on Abdurrahman Wahid's Political Discourses in the Gadamerian Hermeneutic Perspective**

Mudjia Rahardjo

**Key words:** hermeneutics, Gadamerian hermeneutics, political elite, language, power, political discourses

Abdurrahman Wahid was elected as Indonesia's fourth President through a democratic political process in the General Session of the People's Consultative Assembly (MPR) held on the 3rd up to 20th October, 1999. His presidency, however, is considered not only to have failed to lift Indonesia from the multidimensional crises which happened since the mid-1997, but also to establish the national political stability as expected since it was marked with various conflicts and competitions. In this context, the Indonesian political elites were engaged to attack each other by using language and political discourses.

Applying a hermeneutic perspective, the general question to be answered in this study is: what do Abdurrahman Wahid's political discourses mean in the Gadamerian hermeneutics? More specifically, the question can be further stated as follows: what do Abdurrahman Wahid's political discourses mean to his political rivals?

The findings of this research support Gadamer's primary thesis that there is no single understanding of a discourse. It is true that for the interpreters with different interests; the author is really dead. It is reasonable to infer that language may function as a means of power struggles, but it requires that the author and the interpreters have the same interests.

The effectiveness of discursive practices in power struggles is not as simple as often propositioned. When political discourses are directed to the interpreters of the opposing interests, they may result in opposite impacts since the discourses will be abused by the interpreters. Consequently, they appear as deception through language. Different historicity, moreover presupposition, and interests among the elements of society make political elites difficult to establish political and social integration.

This study comes to a reflective conclusion that the dynamics of discourses and counter-discourses among political actors reflect apparently the socio-political dynamics of the society. The fulfillment of cohesion and coherence principles performed in discursive practices make harmonious and integrated society possible. At last, the findings of this research substantially confirm Gadamer's thesis.

It is obvious that Gadamer's works do not offer any operational protocol for analyses. It is needed for the hermeneutic researchers, therefore, to have an intellectual bravery to develop their own speculative method to apply Gadamer's ideas. This study has tried to offer an alternative protocol for analyses in using Gadamer's ideas of hermeneutics.

## ABSTRAK

### **BAHASA DAN KEKUASAAN: Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian**

Mudjia Rahardjo

Kata kunci: hermeneutika, hermeneutika Gadamerian, elit politik, bahasa, kekuasaan, wacana politik.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang terpilih secara demokratik pasca Orde Baru, bukan hanya tidak berhasil mengentaskan Indonesia dari krisis multidimensional sejak pertengahan tahun 1997, tetapi juga gagal menciptakan stabilitas sosial politik sebagaimana diharapkan karena masa itu penuh persaingan dan pertikaian. Dalam konteks itu, para elit politik aktif menggunakan bahasa dan wacana (*language and discourses*) sebagai piranti persaingan dan pertikaian.

Dengan menerapkan perspektif hermeneutika, pertanyaan umum yang dijawab melalui penelitian ini adalah: apakah makna wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid dalam perspektif hermeneutika Gadamerian? Secara lebih spesifik rumusan masalah yang diajukan adalah apakah makna wacana politik Abdurrahman Wahid bagi para pesaing politiknya?

Temuan penelitian ini mendukung tesis dasar Gadamer bahwa tidak bisa ada pemahaman tunggal terhadap suatu wacana. Bagi masyarakat interpretif yang berbeda kepentingan, produsen wacana benar-benar telah mati (*the author is dead*). Memang benar bahwa bahasa bisa digunakan sebagai piranti pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan, tetapi diprasyarati oleh kesamaan kepentingan antara produsen wacana (*the author*) dan khalayak penafsirnya (*its interpreter*).

Persoalan pemanfaatan wacana untuk kepentingan kekuasaan tidak sesederhana seperti sering diproposisikan. Ketika politik wacana ditujukan terhadap masyarakat penafsir yang berbeda kepentingan, dia bisa memberikan akibat yang berlawanan, karena wacana tersebut akan diolah oleh masyarakat penafsirnya sehingga tampak sebagai penipuan melalui bahasa. Ungkapan apa pun yang digunakan sebagai inti suatu wacana, bisa dipahami secara berbeda oleh masyarakat penafsir yang memiliki sejarah berbeda. Konflik, baik antarelit maupun antara elit dengan massa, bisa dipahami sebagai cermin rendahnya fusi horizon antarmereka.

Akhirnya, sejauh menyangkut substansi tentang pemaknaan, temuan-temuan penelitian ini memang mengukuhkan tesis Gadamer. Namun demikian, berkenaan dengan metodologi kajian, pendekatan Gadamer tidak memberi protokol analisis yang operasional. Oleh karena itu, diperlukan keberanian berspekulasi secara metodologik bagi peneliti yang bermaksud menggunakan pemikirannya sebagai perspektif teoretik suatu penelitian.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Refleksi .....	iii
Prasyarat Gelar .....	iv
Persetujuan .....	v
Penetapan Panitia .....	vi
Ucapan Terimakasih .....	vii
Ringkasan .....	xiii
Summary .....	xvi
Abstrak .....	xix
Abstract .....	xx
Daftar Isi .....	xxi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian</b> .....	20
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	20
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	22
1. Manfaat Teoretik .....	22
2. Manfaat Praktik .....	24
<b>E. Penjelasan Konsep Kunci</b> .....	24
1. Bahasa dan Bahasa Politik .....	25
2. Kekuasaan .....	26
3. Wacana Politik .....	30
4. Perspektif Hermeneutika Gadamerian .....	32
5. Makna .....	35
6. Elit Politik .....	38
7. Komunikasi Politik .....	40



<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	43
<b>A. Bahasa dan Kekuasaan</b> .....	43
<b>B. Bahasa dan Kajian Politik</b> .....	49
1. Bahasa dan Wacana .....	49
2. Wacana Politik .....	53
3. Kajian Wacana Politik .....	62
<b>C. Bahasa dan Kajian Politik</b> .....	68
1. Beberapa Kajian Terkait .....	68
2. Studi Wacana Politik di Indonesia .....	74
3. Posisi dan Keaslian Penelitian .....	81
<b>D. Hermeneutika dan Kajian Wacana Politik</b> .....	85
1. Konsep Dasar Hermeneutika .....	89
2. Bahasa Sebagai Pusat Kajian Hermeneutika .....	94
<b>E. Bahasa dan Kajian Politik</b> .....	49
1. Bahasa dan Wacana .....	49
2. Wacana Politik .....	53
3. Kajian Wacana Politik .....	62
<b>F. <i>State of the Arts</i> Kajian Terkait</b> .....	68
1. Beberapa Kajian Terkait .....	68
2. Studi Wacana Politik di Indonesia .....	74
3. Posisi dan Keaslian Penelitian .....	81
<b>G. Hermeneutika dan Kajian Wacana Politik</b> .....	85
1. Konsep Dasar Hermeneutika .....	89
2. Bahasa Sebagai Pusat Kajian Hermeneutika .....	94
3. Perkembangan Gagasan Hermeneutika .....	98
4. Beberapa Varian Hermeneutika .....	106
5. Signifikansi Hermeneutika bagi Kajian Politik .....	118
<b>H. Hermeneutika Gadamerian</b> .....	123
1. Sejarah Intelektual Gadamer .....	123
2. Pokok-Pokok Hermeneutika Gadamer .....	126
3. Penerapan Hermeneutika Gadamerian dalam Kajian Teks .....	133

### **BAB III**

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>136</b>
<b>1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>136</b>
<b>2. Sumber Data, Keabsahan Data dan Unit Analisis Penelitian .....</b>	<b>139</b>
<b>3. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>141</b>
<b>4. Proses Analisis Data .....</b>	<b>141</b>
a. Mengumpulkan Wacana Terpublikasi .....	143
b. Menetapkan Wacana Interaktif .....	143
c. Menelusuri dan Menelaah Wacana Pendahuluan .....	145
d. Menelusuri dan Menelaah Proses Diadik Pemaknaan .....	146
e. Menelaah dan Mengungkap Keceroba-maknaan Wacana .....	146
f. Mengembangkan Pemahaman Teoretik Substantif .....	146
g. Mengembangkan Pemahaman Teoretik Formal .....	147
<b>5. Lingkup Penelitian .....</b>	<b>147</b>
<b>6. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>148</b>

### **BAB IV**

#### **LATAR DAN PELAKU UTAMA POLITIK**

<b>PASCA ORDE BARU .....</b>	<b>150</b>
<b>A. Indonesia, Negara Demokrasi Berciri Persaingan .....</b>	<b>150</b>
<b>1. Kecenderungan Suksesi Penuh Konflik .....</b>	<b>151</b>
<b>2. Konflik Politik Sepanjang Masa Kepresidenan .....</b>	<b>178</b>
a. Masa Kepresidenan Soekarno .....	181
b. Masa Kepresidenan Soeharto .....	184
c. Masa Kepresidenan B.J. Habibie .....	191
d. Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid .....	197
<b>B. Sosok Pribadi Abdurrahman Wahid dan Elit Pendukungnya .....</b>	<b>217</b>
<b>1. Sosok Pribadi Abdurrahman Wahid .....</b>	<b>219</b>
a. Masa Kecil Abdurrahman Wahid .....	220
b. Masa Belajar Abdurrahman Wahid .....	225
c. Masa Dewasa Abdurrahman Wahid .....	235
<b>2. Keunikan Kiprah dan Bahasa Politik Abdurrahman Wahid .....</b>	<b>241</b>
a. Keunikan Kiprah Politik Abdurrahman Wahid .....	241
b. Kekhususan Bahasa Politik Abdurrahman Wahid .....	247
<b>3. Abdurrahman Wahid dalam Pandangan Para Pendukungnya ....</b>	<b>256</b>
a. Pandangan Said Agil Siradj .....	257
b. Pandangan Muhammad AS Hikam .....	261
c. Pandangan Mohammad Mahfud MD .....	269
b. Pandangan Muhammad AS Hikam .....	261

<b>C. Para Pesaing Utama Abdurrahman Wahid .....</b>	<b>277</b>
1. Wakil Presiden dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri ...	278
2. Ketua MPR RI dan Ketua Umum PAN, M. Amien Rais .....	288
3. Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung .....	304
 <b>BAB V</b>	
<b>NARASI REALIS KONTEKSTUAL WACANA</b>	
<b>POLITIK EMPAT ELIT POLITIK INDONESIA .....</b>	<b>315</b>
A. Wacana Politik Abdurrahman Wahid .....	316
B. Wacana Politik Megawati Soekarnoputri .....	363
C. Kontra-Wacana Politik Amien Rais .....	375
D. Kontra-wacana Politik Akbar Tandjung .....	406
 <b>BAB VI</b>	
<b>REKONSTRUKSI DAN DISKUSI .....</b>	<b>315</b>
A. Rekonstruksi Makna Wacana Politik Abdurrahman Wahid .....	427
B. Diskusi Implikasi Teoretik .....	455
 <b>BAB VII</b>	
<b>BEBERAPA KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>447</b>
A. Beberapa Kesimpulan .....	467
B. Beberapa Implikasi .....	471
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>477</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>496</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejatuhan pemerintahan Orde Baru 21 Mei 1998 mengakibatkan pergeseran struktur kekuasaan, dari pola *consensual elite* ke *competitive elite* (Agger, Goldrich, and Swanson, 1973: 322-342), sekaligus telah menandai babak baru kehidupan sosial politik di Indonesia yang lebih demokratis. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, Soeharto hampir tidak memiliki pesaing, bahkan selalu terpilih sebagai presiden melalui proses musyawarah untuk mufakat. Fenomena selama masa Orde Baru tersebut berbeda secara mencolok dari fenomena pasca-Orde Baru.

Ketika dalam Sidang Umum (1999), MPR RI melakukan pemilihan presiden, tiga orang calon masing-masing B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Abdurrahman Wahid terlibat dalam persaingan yang cukup ketat. Dalam sidang yang dinilai sebagai paling demokratis sejak Konstituante 1957 itu, Amien Rais tidak bisa ikut meramaikan bursa pemilihan presiden karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpinnya memperoleh jumlah suara sekaligus kursi yang kurang signifikan (hanya 7, 12% suara) (Young, 1999: 69; Haris, 2000: 30-49). Demikian pula Hamzah Haz dan Yusril Iha Mahendra tidak memiliki jumlah wakil rakyat yang memadai untuk pencalonan sebagai presiden.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang Pemilu dengan perolehan 153 kursi di DPR mencalonkan Megawati

Soekarnoputri sebagai presiden sebagaimana hasil salah satu keputusan kongres PDI Perjuangan di Bali bahwa ketua umum terpilih adalah calon presiden dari partai (Forum, No. 08/30/5/1999: 29). Dalam proses pencalonan itu, PDIP kurang melakukan kerjasama dan koalisi dengan partai-partai lain. Konsekuensinya, muncul koalisi partai-partai berbasis Islam Poros Tengah yang mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai alternatif di luar Megawati Soekarnoputri dan B.J. Habibie. Puncaknya, persaingan elit politik pada 20 Oktober 1999 mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan memperoleh dukungan 373 suara dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden memperoleh 313 suara dari 691 anggota MPR yang menggunakan hak pilihnya. Lima suara dinyatakan abstain (Kompas, 21/10/1999).

Setelah Sidang Paripurna DPR/MPR 20 Oktober 1999 mengesahkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4, gemuruh takbir dan salawat mengumandang di gedung wakil rakyat tersebut. Menurut Hidayat (2001: 4) tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai simbol kiai nomor wahid seiring dengan lantunan salawat dan teriakan takbir secara spontan mengekspresikan perasaan dan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia serta memperoleh dukungan kuat untuk memimpin republik yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Selain itu, di mata banyak pengamat Abdurrahman Wahid adalah sosok yang sangat cerdas, memiliki visi kenegaraan yang cemerlang, dan kredibilitas tinggi perihal perjuangannya menegakkan demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia. Dia adalah pribadi yang menelurkan harapan tinggi bagi

penyelesaian berbagai persoalan bangsa, terutama ancaman disintegrasi (Tempo, 23/7/2000: 17).

Sementara kegagalan Megawati Soekarnoputri melakukan lobi politik, fanatisme massa pendukungnya yang dikhawatirkan akan bentrok dengan massa pendukung B.J. Habibie, isu dominasi kalangan non-Muslim dalam susunan calon anggota legislatif (caleg) PDIP dan realitas bahwa Megawati Soekarnoputri seorang perempuan, yang secara kontroversial dipandang tidak boleh menjadi *imam* dalam Islam, dipolitisasi oleh para penentangannya sehingga memuluskan jalan Abdurrahman Wahid menjadi presiden (Haris, 2000: 30-49). Menurut Rais (2000: 186), pengangkatan Abdurrahman Wahid dianggap sebagai sebuah kompromi politik terbaik di antara para elit politik, karena ia dipandang berisiko terkecil di antara calon-calon lainnya. Tempo (23/7/2000: 17) menyebutkan sebagai visioner, Abdurrahman Wahid merupakan pilihan tepat untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi.

Tetapi, menurut hasil jajak pendapat majalah Tempo kekalahan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden adalah disebabkan antara lain oleh tingkah para pembantunya (orang-orang terdekatnya) yang terlalu asyik dengan wacana yang memabukkan. Jargon “pemenang pemilu” yang mulanya dimaksudkan sebagai unsur penekan (*pressure*) malah berubah menjadi *blunder*. Akhirnya, pernyataan-pernyataan orang-orang dekat Megawati Soekarnoputri menjadi kontraproduktif. Artinya, argumentasi yang dibangun selama ini, yakni pemenang pemilu harus menjadi presiden tidak menimbulkan simpati, melainkan justru antipati. Akhirnya, parti-partai lain, seperti partai Islam dengan solid bersatu mengalahkan PDI

Perjuangan lewat Poros Tengah. Sebagian besar peserta jajak pendapat menganggap Abdurrahman Wahid mampu meraih kemenangan karena dukungan Poros Tengah. Selain itu, kekalahan Megawati Soekarnoputri juga disebabkan oleh masalah gender, karena perempuan, dan kurang bisa menjalin lobi (Tempo, 31/10/1999: 12-13).

Dalam konteks sejarah Indonesia modern, sejumlah pengamat menilai Pemilu 1999 sebagai paling demokratis. Oleh karena itu, pemilihan Abdurrahman Wahid sebagai presiden pun dinilai paling demokratis (Mietzner, 2001: 31; Ibrahim, 2000: 3) dan sebenarnya dapat dikatakan sebagai awal harapan akan segera pulihnya kehidupan nasional pasca-krisis serta merupakan modal utama yang luar biasa berharga bagi bangsa Indonesia (Tandjung, 2000: 2). Berbagai tanggapan baik dari dalam maupun luar negeri umumnya berharap kepemimpinan Abdurrahman Wahid akan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis yang dihadapi bangsa ini sejak pertengahan 1997 dan harapan-harapan positif lainnya. PM. Singapura Goh Chok Tong, misalnya, menyatakan terpilihnya Abdurrahman Wahid merupakan awal rekonsiliasi nasional yang menjadi langkah krusial menuju pemulihan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik Indonesia serta pemulihan ekonominya (Kompas, 21/10/1999: 6).

Segera setelah dilantik, Abdurrahman Wahid membentuk kabinet yang relatif mewakili berbagai kekuatan politik. Ini merupakan konsekuensi kompromi politik dengan pemimpin kekuatan politik besar di DPR, termasuk Panglima TNI (Barton, 2002: 286; Haris, 2002: ii; Fatah, 2000: 299). Selama tiga bulan pertama masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri

disebut-sebut sebagai pasangan dwi-tunggal yang ideal karena merefleksikan perpaduan dua kekuatan besar bangsa Indonesia, yaitu Islam yang direpresentasikan oleh sosok Abdurrahman Wahid dan golongan nasionalis yang diwakili Megawati Soekarnoputri. Pasangan ini diasosiasikan sebagai bentuk kelahiran kembali semangat kepemimpinan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta yang legendaris, sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia (Barton, 2002: 376; Machfud MD, 2003; Alhumami, 2000; Kompas, 22/10/1999).

Agenda utama pemerintahan baru tersebut segera diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang a lain: (1) memulihkan kehidupan ekonomi, (2) menciptakan stabilitas politik, dan (3) menjaga integritas nasional dengan meredam berbagai gejolak di daerah, utamanya Aceh dan Papua (Mietzner, 2001: 29). Menurut Barton (2002: xx) amanat merupakan tugas amat berat yang harus diselesaikan Abdurrahman Wahid.

Tetapi sayang, pemerintahan Abdurrahman Wahid dinilai oleh para pesaingnya bukan hanya gagal dalam memulihkan kehidupan ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan stabilitas sosial politik sebagaimana diharapkan. Lebih parah lagi malah banyak kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai kontroversial dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian politik yang semakin mempersulit upaya pemulihan ekonomi (Tandjung, 2000: 3), konflik -elit politik, indeks harga saham bergerak fluktuatif, dan investasi (asing) tidak kunjung tiba, ditambah dengan berbagai tindak kekerasan dan kerusakan serta ancaman disintegrasi sosial di beberapa wilayah (Sairin, 2002: 58). Sebagai



manajer, Abdurrahman Wahid bukannya menghasilkan solusi, malah menjadi akar permasalahan itu sendiri (Tempo, 23/7/2000: 17).

Wajar jika banyak warga masyarakat sangat kecewa terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid (Liddle, 2000; Mietzner, 2001: 29). Penting dicatat, meskipun Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih melalui proses yang sama di majelis, secara spesifik kemerosotan kepercayaan dan legitimasi lebih dialami Presiden Abdurrahman Wahid ketimbang Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri (Haris, 2002: 3).

Abdurrahman Wahid, yang berlatarbelakang politik jauh dari birokrasi, semula diharapkan akan dapat membawa banyak perubahan. Ternyata pemerintahan Abdurrahman Wahid semakin terjebak ke dalam jaringan kesulitan yang sebagian timbul karena tindakan Abdurrahman Wahid sendiri (Kleden, 2000; Fatah, 2000: 299; Tempo, 23/7/2000: 17). Ini mulai dari keinginannya melakukan normalisasi hubungan dagang dengan Israel, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, ide pencabutan TAP MPRS XXV 1966 tentang pelarangan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia, pembubaran institusi Bakorstanas dan mekanisme penelitian khusus (litsus), proyek desakralisasi lembaga kepresidenan, supremasi sipil, hingga seringnya melakukan *reshuffle* kabinet.

Bukan hanya itu, di beberapa kesempatan Abdurrahman Wahid juga melontarkan ancaman politik. Misalnya, jika ia dijatuhkan beberapa daerah akan memisahkan diri dari NKRI dan akan terjadi pemberontakan. Selain itu, Abdurrahman Wahid mengusulkan pembagian wewenang dengan wakil presiden,

menonaktifkan Kapolri Jenderal Bimantoro dan mengangkat Wakapolri Chaeruddin Ismail sebagai Pejabat Sementara Kapolri tanpa persetujuan DPR. Terakhir, Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat/Dekrit Presiden untuk membubarkan DPR dan MPR, menetapkan percepatan Pemilu, dan membekukan partai Golkar. Beberapa kebijakan Abdurrahman Wahid demikian tentu saja semakin “memanaskan” kondisi perpolitikan nasional.

Di saat yang sama, Abdurrahman Wahid juga banyak memproduksi pernyataan-pernyataan kontroversial, seperti *"biang kerok dari banyak persoalan akhir-akhir ini ada di MPR/DPR; sekarang banyak intelektual bergelar MA tetapi bukan Master of Arts melainkan maling; DPR kok seperti Taman Kanak-kanak; DPR memble aja"*, dan sebagainya. Berbagai pernyataan Abdurrahman Wahid tersebut berdampak besar terhadap kehidupan sosial-politik dan ekonomi (Tandjung, 2000: 3; Alhumami, 2000). Mencermati berbagai tindakan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pidato politiknya pada Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIM) Partai Golkar di Jakarta 18 Juni 2000, Akbar Tandjung menyatakan:

Dalam perjalanannya kepemimpinan nasional yang *legitimate* ini ternyata tidak mampu menangkap pesan yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pemerintahan ini belum mampu menerjemahkan pesan tersebut menjadi visi kepemimpinannya. Yang muncul adalah kebijakan-kebijakan dan statemen-statemen yang penuh *kontroversi* dan berpotensi untuk menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian politik yang pada gilirannya justru semakin mempersulit pemulihan ekonomi. Presiden Abdurrahman Wahid cenderung *menyia-nyiakan* modal politiknya dan terkesan kurang terfokus dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan program pemulihan ekonomi, sebagaimana yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia.

Tentu terdapat penjelasan logik-teoretik terhadap pernyataan tersebut. Sekurang-kurangnya, menurut Berger (1976: 7), "...the words of the strong carry more weight than the words of the weak". Dengan ungkapan lain, kekuatan kata atau ucapan bukan hanya terletak pada kata dan ucapan itu sendiri, tetapi juga pada siapa yang mengucapkannya (Bourdieu (1994: 170). Abdurrahman Wahid, dalam sorotan teoretik ini, jelas tidak bisa digolongkan sebagai "*the weak*". Pun, dia bukan sembarang siapa, tetapi seorang presiden sebuah negara yang masyarakatnya sangat majemuk.

Menanggapi berbagai pernyataan Abdurrahman Wahid tersebut, pesaing-pesaing politiknya membalasnya dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan tandingan (*counter discourse*), seperti "*presiden gila; syaraf memori presiden ada yang tidak beres; Abdurrahman Wahid jangan pethentang-pethenteng; presiden selingkuh dengan Aryanti*" dan sebagainya. Baik pernyataan Abdurrahman Wahid maupun pernyataan tandingan pesaing-pesaing politiknya semuanya menggambarkan hubungan tidak mesra antara Abdurrahman Wahid dan DPR (Mietzner, 2001: 29-44).

Dalam perspektif sosiolinguistik, ujaran-ujaran di atas bukan sekadar kata-kata lepas (Barthes, 1977: 146), tetapi harus dipahami sebagai bahasa politik, yakni bahasa yang digunakan sebagai alat politik (Anwar, 1989: 55-56). Menggunakan perspektif sosiolinguistik Chaika (1982: 195-224), kita bisa membayangkan kondisi batin macam apa yang terjadi pada penutur bahasa seperti itu. Sebab, bahasa menurut Claude Lancelot dan Antoine Arnauld, adalah cermin pikiran pemakainya. "Language is a mirror of thought" (Baert, 1998: 16).

Sedangkan dalam perspektif komunikasi, pernyataan-pernyataan di atas dipandang sebagai bentuk komunikasi yang tidak ideal, sebab menurut Johannesen (1996: 50) komunikasi harus lebih meningkatkan kerjasama sosial dan bukan konflik sosial. Yang terjadi adalah para elit politik negeri ini memproduksi pernyataan (wacana) politik yang dampaknya adalah terjadinya berbagai konflik baik yang bersifat horisontal maupun vertikal.

Dari sudut retorika, menurut Weaver dan Burke (dalam Johannesen, 1996: 4), pemilihan kata-kata seperti itu dengan sendirinya mengekspresikan pilihan, sikap, dan kecenderungan komunikator. Menurutnya, kita tidak bisa menggunakan kata-kata tanpa bermaksud mempengaruhi orang lain. Menurut Hikam (1996: 81), sejauh bahasa adalah proses produksi simbol, maka ia tidak bisa dipisahkan dari maksud sang pembicara. Jika ungkapan-ungkapan seperti itu dipahami sebagai teks (Halliday and Hasan, 1976; dan Valdes, 1991: 304), maka dalam perspektif studi wacana, di dalamnya diduga terdapat dimensi kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi di dalam struktur linguistik (Fairclough (1995); Lee (1992); dan Hindess (1996). Sedangkan menurut Barthes (dalam Eco, 1986: 240), kekuasaan modern muncul melalui mekanika sosial, di anyal lewat wacana (*discourse*).

Mencermati sejarah Abdurrahman Wahid di panggung kekuasaan (20 Oktober 1999-22 Juli 2001), tampak bahwa kekuasaan memang tidak selalu menggunakan pakem-pakem yang mutlak dan kaku, tetapi bagaimana membuat manuver dan meraih dukungan politik. Oleh karena itu, visi, tekad, dan keyakinan saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan akomodasi dan trik-trik politik. Abdurrahman Wahid sebagai presiden lebih mengandalkan visi, tekad, dan

keyakinannya untuk membangun bangsa yang ia dambakan, tetapi melupakan modal politik yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Abdurrahman Wahid, menurut Barton (dalam Zada, 2002: xiii-xiv), adalah seorang figur yang heroik: yang meyakini kekuatan kata-kata yang muncul dari dirinya sendiri dan siap menanggung akibat dari kata-katanya itu, tanpa bergantung pada orang lain.

Kepercayaan diri yang sangat berlebihan itu mendasari ucapan dan pernyataan kontroversial serta pilihan dan tindakan-tindakan politiknya (Haris, 2002: 205). Karenanya, meskipun banyak pihak menentangnya, *toh* Abdurrahman Wahid selalu percaya diri dengan kebenarannya. Karena sikapnya itu, menurut Hotman M. Siahaan (Kompas, 12/7/2000) masa pendek kepemimpinan Abdurrahman Wahid diwarnai wacana pertarungan elit politik yang sangat tajam sehingga kinerja kabinetnya sangat rendah.

Menurut Mosca (1939) sebuah pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik dan stabil serta berhasil apabila terjadi koalisi atau kerja sama antara satu atau lebih kekuatan politik. Dalam pandangan Surbakti (1992: 18-19), koalisi itu tidak selalu berarti kerja sama antara satu golongan dan golongan lain yang masing-masing memiliki ideologi dan kepentingan berbeda, tetapi dapat juga terjadi di antara kelompok di dalam satu golongan politik tertentu. Dengan perolehan kursi di DPR yang hanya 12,62% (Haris, 2000: 30-49), Abdurrahman Wahid bukannya membangun relasi yang harmonis dengan berbagai kekuatan politik yang ada, malah sebaliknya terlibat konflik verbal berkepanjangan sehingga pemerintahannya tidak berlangsung efektif.

Sebagaimana dilaporkan Tempo (5/8/2001: 18), dalam soal berkoalisi Abdurrahman Wahid dinilai punya satu kelemahan utama: ia mengira perkawanan akan mengatasi perbedaan kepentingan politik. Tampaknya ia lupa membangun aliansi politik yang kukuh dengan kekuatan yang mungkin tidak disukainya, baik secara pribadi maupun kelompok. Maka, seiring dengan melunturnya perkawanan dengan Amien Rais, Hamzah Haz, Akbar Tandjung, dan Megawati Soekarnoputri meluntur pula keeratn hubungan aliansi Poros Tengah-Golkar-PDIP plus TNI yang dulu mendukungnya. Dalam konteks ini, memang agak membingungkan bagaimana Abdurrahman Wahid justru mendekati Rachmawati Soekarnoputri yang tidak memiliki pengaruh di DPR---dan tidak mencoba dengan sekuat tenaga merangkul kembali Megawati Soekarnoputri yang memiliki basis massa cukup kuat.

Perkembangan politik semakin tidak kondusif karena ambisi-ambisi pribadi pemegang kekuasaan mendorong terjadinya konflik mereka, yang secara hipotetik menjadi salah satu penyebab merebaknya konflik-konflik komunal di beberapa daerah. Menurut Nasikun (1995: 19) kepentingan yang saling berlawanan kelompok secara potensial akan menimbulkan konflik. Realitas demikian mengakibatkan masa transisi politik mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi (Kristiadi, 1999: x), yang menurut Barton (dalam Zada, 2002: xxiii) karena Abdurrahman Wahid gagal memahami pentingnya modal politik.

Sebagaimana dijelaskan di muka, dengan modal politik di DPR yang tidak begitu besar, menurut Barton, maka agar kekuasaannya tetap *survive* Abdurrahman Wahid seharusnya melakukan kompromi-kompromi politik dengan

faksi Wiranto di TNI, faksi Taufik Kiemas dan Arifin Panigoro di PDI-P, Fuad Bawazir di PAN, Akbar Tandjung di Golkar, dan Hamzah Haz di PPP serta Yusril Ihyia Mahendra di PBB. Sebab, mereka adalah tokoh-tokoh kunci di sekitar Istana pada saat bulan-bulan pertama kepresidenannya dan yang dulu mendukungnya menjadi presiden. Abdurrahman Wahid bukannya merawat legitimasi untuk memperluas basis dukungan politik, tetapi sebaliknya justru mengambil pilihan politik kontroversial yang bersifat delegitimatif serta mempersempit basis dukungan politik baginya (Haris, 2002: 15).

Selain itu, manuver dan aksi politik Abdurrahman Wahid terhadap pesaing-pesaing politiknya juga dilakukan secara terbuka, mulai dari konfliknya dengan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi (PDI-P) dan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla (Golkar) dengan alasan keduanya terlibat KKN. Sebelumnya Abdurrahman Wahid juga telah mencopot Wiranto sebagai Menko Polkam. Konflik Abdurrahman Wahid dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebabkan keluarnya Memorandum I (2/2/2001), yang diikuti dengan Memorandum II (30/4/2001) menyusul terbongkarnya penggunaan dana Yayasan Karyawan Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam yang bermuara pada Sidang Istimewa MPR yang menjatuhkannya dari jabatan presiden pada 23 Juli 2001.

Mengamati realitas politik demikian, banyak tokoh menyuarakan keprihatinannya. Ichlasul Amal, guru besar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa kehidupan politik nasional selama 21 bulan masa

pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat buruk, tercermin dari persaingan dan konflik elit politik yang makin tak berkualitas (Kompas, 17/11/2000). Tak ketinggalan pula Hubert Neiss, mantan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Wilayah Asia Pasifik, menyatakan kesulitan yang amat berat untuk memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia, terutama disebabkan oleh ketidakmampuan elit politik mengatasi perbedaan pendapat (baca: berkonflik) (Kompas, 10/7/2000). Ketua Umum PP Muhammadiyah A. Syafi'i Maarif bahkan mengatakan "elit politik kita telah kehilangan akal sehat dengan saling menjatuhkan" (Kedaulatan Rakyat, 29/10/2000).

Menurut Anderson, krisis multi dimensi yang melanda bangsa ini semakin parah karena para elit politik tidak mempunyai *a kind of political shame*, rasa malu politik. Mirip dengan itu, Magnis-Suseno mengatakan elit politik kita kehilangan *sense of decency*, perasaan sopan dan santun serta kepantasan berdemokrasi. Donald K Emmerson juga mengingatkan bahwa "dengan pertikaian elit politik yang terjadi saat ini bangsa Indonesia memasuki periode yang sangat berbahaya. Karenanya, upaya pemulihan ekonomi semakin sulit" (Kompas, 23/4/2001).

Kekhawatiran Emmerson ternyata menjadi kenyataan. Selain belum mampu menciptakan stabilitas sosial politik, kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam bidang ekonomi terus merosot. Jajak pendapat Litbang Kompas yang diadakan pada 14-15 Maret 2001 menunjukkan hasil yang mengejutkan. Pada masa 3 bulan pertama pemerintahan Abdurrahman Wahid, 50,3% responden mengatakan tidak puas, 6 bulan pertama rasa tidak puas meningkat



menjadi 57,9%, 12 bulan menjadi 74,5%, 15 bulan menjadi 77%, dan 18 bulan menjadi 83,1%. Seperti halnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang lainnya seperti sosial-politik, keamanan, dan hukum, rasa tidak puas masyarakat juga terus meningkat sehingga tidak ada lagi yang diharapkan dari pemerintahan ini (Kompas, 18/3/2001).

Mengapa pemerintahan hasil pemilu yang relatif adil dan demokratis (Fatah, 2000: 299),---yang lazimnya merupakan momentum bagi peralihan dari transisi menuju konsolidasi demokrasi---terperangkap ke dalam konflik politik yang berkepanjangan? Studi Haris (2002) menemukan beberapa alasan mendasar. *Pertama*, tidak ada *platform* politik dan visi bersama di antara elit politik sipil menyusul berakhirnya kekuasaan Orde Baru untuk membangun kehidupan yang demokratis. *Kedua*, sistem multipartai tanpa kekuatan mayoritas di DPR tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan, terutama menyangkut hubungan kekuasaan Presiden, DPR, dan MPR, sehingga praktik politik DPR cenderung mengarah pada sistem parlementer, bukan presidensil sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. *Ketiga*, koalisi longgar, meminjam istilah Fatah (2000: 299), dan kompromi partai dalam kelompok “Poros Tengah” yang bersifat semu demi kepentingan sesaat. *Keempat*, personalisasi kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid seperti seringnya bongkar pasang kabinet, indikasi keterlibatan dalam kasus Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam, dan penerbitan Dekrit Presiden yang justru mempercepat kejatuhannya. *Kelima*, kecenderungan partai-partai besar non-PKB untuk memanfaatkan personalisasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid demi kepentingan kelompok masing-

masing. *Keenam*, pembangkangan politik TNI/Polri karena kecewa terhadap Presiden Abdurrahman Wahid yang dianggap intervensi terlalu jauh dalam tubuh TNI/Polri. *Ketujuh*, sikap oposisionalisme elit politik terhadap pemerintah. Dalam konsep ilmu politik, oposisionalisme berbeda secara fundamental dengan oposisi. Jika oposisi merupakan salah satu instrumen politik demokratis guna menciptakan mekanisme *check and balance* dan membangun sikap kritisme, maka oposisionalisme justru sekadar alat untuk menjatuhkan pemerintah. Bagi kelompok oposisionalisme, sikap kritis lebih dimaksudkan untuk mencela, mengecam, mengganggu, dan jika mungkin mengganti pemerintah.

Perjalanan meninggalkan pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratik seperti dilalui pemerintahan Abdurrahman Wahid memang tidak mudah, sebagaimana diakui Abdurrahman Wahid sendiri dalam pidatonya sesaat setelah diambil sumpahnya sebagai presiden pada 20 Oktober 1999. Sebab, ia merupakan sebuah proses transisi sosial-kultural panjang yang biasanya diwarnai oleh berbagai konflik. Barton (2002: 374) menyatakan sejarah telah membuktikan bahwa sebuah transisi menuju demokrasi di negara mana pun di dunia ini baik di Amerika Latin, Eropa Timur, Asia, yang telah sekian lama berada dalam cengkeraman rejim militer akan berlangsung dengan tingkat kesulitan luar biasa. Pengalaman menunjukkan diperlukan waktu minimal satu dekade untuk benar-benar berubah menjadi masyarakat demokratis yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut Fatah (2000: 32) dengan menggunakan kerangka teori transisi yang umum dipakai untuk memahami transisi dari otoritarianisme di berbagai negara, Indonesia sesungguhnya baru saja memulai proses transisi tersebut.

Sebuah transisi demokrasi yang utuh (*consolidated democracy*) menurut Linz dan Stepan (1998: 6-7) sekurang-kurangnya menuntut lima kondisi yang saling menguatkan, yaitu: kondisi bagi perkembangan masyarakat madani yang bebas dan bergairah; masyarakat politik yang swatantra, mandiri, dan bermutu; *rule of law* sebagai jaminan hukum kebebasan warga negara dan independensi kehidupan berserikat; birokrasi negara yang impartial dan bisa mendukung penyelenggaraan pemerintahan baru yang demokratis; dan kelembagaan masyarakat ekonomi yang baik.

Berdasarkan realitas di atas, Indonesia pasca-Orde Baru tampaknya belum mampu memenuhi seluruh kondisi prasyarat bagi pencapaian demokrasi yang utuh. Hampir seluruh kondisi tersebut belum bisa diwujudkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ketiga cabang kekuasaan: eksekutif yang terwakili oleh sosok Abdurrahman Wahid---belakangan Megawati Soekarnoputri---, legislatif yang terwakili oleh sosok Akbar Tandjung, dan MPR yang terwakili oleh sosok Amien Rais, justru terus bertikai mulai dari persoalan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketidakmampuan administratif, pelanggaran hukum, sampai hal-hal yang menyangkut masalah pribadi elit, dan tidak mencapai kompromi yang berakhir dengan kejatuhan pemerintahan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001 melalui Sidang Istimewa MPR 2001. Laporan Akhir Tahun 2001 *Kompas* (2002:164) menyebutkan konflik dan pertikaian elit politik terjadi sepanjang perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Swasono (2001: 486), kekacauan di negeri ini terjadi karena pertikaian elit politik.

Dalam konteks pertikaian itu pula, para elit politik mengerahkan berbagai sumber dan strategi (*resources and strategies*). Sumber dan strategi ini tidak hanya mencakup sumber ekonomi dan jumlah suara di MPR/DPR, tetapi juga sumber dan strategi dalam bentuk rangkaian pernyataan politik yang membentuk wacana (*discourse*) dan kontra wacana (*counter discourse*) atau wacana-tanding, menurut Heryanto (2000: 206). Tampak jelas bagaimana bahasa telah dimanfaatkan sebagai sumber dan strategi dalam persaingan elit politik Indonesia. Ini berarti bahwa untuk memperoleh dukungan berupa suara di MPR/DPR, legitimasi elit politik Indonesia juga didasarkan pada keterpercayaan wacana politik mereka melalui rekayasa bahasa.

Kekuasaan Abdurrahman Wahid telah berakhir dengan meninggalkan banyak polemik dan kontroversi. Sejarah kekuasaannya diwarnai dengan gambaran paradoks. Seorang Abdurrahman Wahid yang menghabiskan seperempat abad lebih waktunya sebagai pejuang demokrasi dalam waktu yang pendek masa kekuasaannya dipaksa turun dari singgasana kekuasaan justru oleh para pendukung dan sahabat seperjuangannya sendiri. Kekuasaannya berakhir di saat-saat yang ia impikan telah hadir (Barton, 2002: 31; Mubarak, 2002: 10). Pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang semula dimaksudkan untuk menghindari konflik di kalangan elit politik dan *grass root* a pendukung partai Golkar dan PDIP (Rais, 2000: 186), ternyata justru menimbulkan konflik baru di tingkat elit politik yang sebagian akibat wacana yang dikembangkan Abdurrahman Wahid sendiri (Fatah, 2000: 299). Demikian pula ketika dia

mengeluarkan Dekrit Presiden, banyak kalangan bertanya di mana watak demokrat Abdurrahman Wahid.

Dalam masa kekuasaannya yang singkat penting untuk dipahami secara mendalam apa yang telah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid dan apa makna tindakan-tindakan politiknya bagi negeri ini. Menurut Barton (2002) bagaimana pun Abdurrahman Wahid selama berkuasa telah memberikan wacana yang cukup signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Wacana perbincangan politik tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh negara seperti selama Orde Baru dan wacana masyarakat sipil pun kian menguat (Ibrahim, 2000: 3). Selain itu, konflik di spektrum politik kekuasaan masa kepresidenan Abdurrahman Wahid juga melibatkan pertarungan tafsir politik dan menjadi wacana politik yang bukan hanya menarik tetapi juga penting untuk dikaji dari berbagai sudut pandang.

Sehubungan dengan maksud tersebut, sebagai sebuah kajian politik penelitian ini berusaha memahami (*to understand*) wacana politik Abdurrahman Wahid lewat pendekatan kebahasaan (*verbal approach*) dengan menggunakan metode hermeneutika Gadamerian. Hal ini dilakukan karena (1) pendekatan kebahasaan masih jarang dipakai untuk memahami dinamika kekuasaan (Boulding, 1962: 97), sebab umumnya dinamika kekuasaan disoroti dengan menggunakan pendekatan perilaku (*behavioral approach*), yang memfokuskan pada tindakan-tindakan politik yang membentuk realitas sosial-politis, sementara pendekatan kebahasaan membentuk realitas simbolis (Saryono, 1993: 1); (2) kegiatan politik sangat jauh terlibat dalam problematika bahasa (Pabottingi (1991: 17). Karena praktisi politik adalah juga pemakai bahasa, maka kita tidak hanya

perlu melihat hasil rumusan-rumusan politiknya tetapi juga wacana resmi yang dihasilkannya (Fairclough, 1989: vi); (3) memandang bahasa sebagai sebuah pranata, bukan struktur, menurut Benjamin (dalam Hooker, 1996: 59), akan membuka jalan bagi pengembangan kajian sosiolinguistik; (4) pada masa transisi, Indonesia menjadi kancah persaingan berbagai wacana yang diperjuangkan oleh para elit politik, baik elit politik pemerintah (*governing elites*) maupun elit politik bukan pemerintah (*non-governing elites*); dan (5) pendekatan baru dalam ilmu politik menyadarkan kita bagaimana kekuasaan (*power*) disebarkan dalam praktik berbahasa yang membentuk wacana. Dengan kata lain, sebagaimana dinyatakan Hindess (1996), Fairclough (1989: 17), Pabottingi (1991: 17) dan Piliang (1998: 294) *discourse* merupakan arena berlangsungnya praktik kekuasaan.

Pendekatan demikian sejalan dengan pendapat Easton (dalam Kebschull, 1968: 18), bahwa realitas politik bisa dipahami dari berbagai sudut dan perspektif, termasuk perspektif hermeneutika. Dalam perspektif hermeneutika, setiap ungkapan atau wacana niscaya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (Fowler, 1991: 41-42). Gejala ini yang kemudian melahirkan pragmatika (*pragmatics*). Makna suatu ungkapan, menurut tafsir pragmatika harus ditelusur dalam dunia gagasan penutur atau penulisnya. Bila pengkaji berupaya mengungkap makna wacana bertolak dari penutur atau penulisnya, berarti menggunakan penggolongan yang oleh Fay (1996) pengkaji tersebut telah menerapkan perspektif pragmatika, yang dalam khasanah ilmu-ilmu sosial dan humaniora disebut hermeneutika-intensional (*intentional-hermeneutics*).

Persoalannya, walaupun suatu wacana ditulis atau dituturkan oleh seseorang, sesuai dengan hakikat bahasa, bagian terbesar dari wacana tidak ditujukan untuk diri sendiri. Dengan demikian, makna sebenarnya suatu wacana justru harus dipahami sebagaimana ditafsirkan oleh pasangan komunikasinya. Kenyataan bahwa makna sebenarnya tidak niscaya terletak dalam keniatan pelaku ini yang menarik perhatian Gadamer, sehingga dia pun mengajukan perspektif hermeneutikanya sendiri. Berdasarkan pemaknaan yang diberikan terhadap wacana yang dilontarkan oleh pasangan komunikasinya, maka menurut hermeneutika Gadamerian (*Gadamerian Hermeneutics*) makna wacana bukan lagi sekadar maksud (*intention*) penutur, tetapi juga penerimaan (*perception*) pendengar.

## **B. Rumusan Masalah**

Secara hipotetik, konflik politik elit selama pemerintahan Abdurrahman Wahid terjadi karena, antara lain, wacana politik yang dia kembangkan, baik secara sengaja maupun tidak, telah ditafsir secara berbeda oleh pesaing-pesaing politiknya. Makna wacana politik Abdurrahman Wahid benar-benar ada pada pesaing-pesaing politiknya. Menggunakan perspektif hermeneutika, pemahaman demikian digolongkan mengikuti aliran pemikiran hermeneutika Gadamerian, yakni makna teks tidak pada produsernya, melainkan pada orang yang membaca atau memahaminya. Asumsi dasarnya ialah begitu teks selesai ditulis dan kemudian dibaca atau didengar orang lain, maka pada saat itu pula makna baru muncul. Dalam konteks penelitian ini, makna baru yang dimaksudkan adalah makna yang diberikan oleh para pesaing Abdurrahman Wahid atas wacana yang

diproduksi. Oleh karena itu, pertanyaan umum yang kemudian menjadi sangat penting untuk dijawab adalah: Apakah makna wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid dalam perspektif hermeneutika Gadamerian? Secara lebih spesifik, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah makna wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid bagi Megawati Soekarnoputri?
2. Apakah makna wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid bagi Amien Rais?
3. Apakah makna wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid bagi Akbar Tandjung?

Selain menjadi piranti perjuangan, wacana politik yang dikembangkan Abdurrahman Wahid juga telah menjadi sasaran serangan pesaing-pesaing politiknya, yaitu: Amien Rais, Akbar Tandjung, dan dalam batas tertentu Megawati Soekarnoputri.

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh pemahaman interpretif tentang wacana politik Abdurrahman Wahid menurut perspektif hermeneutika Gadamerian. Secara khusus tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan pemahaman interpretif tentang wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid menurut penafsiran Megawati Soekarnoputri.



2. Untuk menghasilkan pemahaman interpretif tentang wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid menurut penafsiran Amien Rais.
3. Untuk menghasilkan pemahaman interpretif tentang wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid menurut penafsiran Akbar Tandjung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretik**

Hubungan dunia simbolik dan kekuasaan telah lama menarik perhatian para ilmuwan sosial. Penguasaan dunia simbolik, yang oleh Althusser (1971) dilakukan dengan menggunakan aparat ideologik negara (ISA), akan menghasilkan jenis dominasi khusus yang oleh Gramsci (1971) disebut hegemoni. Hegemoni, menggunakan konseptualisasi kekerasan menurut Galtung (1973), merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural.

Lebih menukik lagi, Bourdieu (1994) menelaah mekanisme kekuasaan simbolik (*symbolic power*). Konteks teoretik telaah ini adalah pasangan interaksi antara dua pihak yang berbeda hirarkhi politiknya. Kekuasaan simbolik, bagi Bourdieu, tidak lain adalah kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang dalam ungkapan Althusser merupakan bagian dari *Ideological State Apparatus* (ISA) dan menghasilkan kekuasaan hegemonik ala Gramsci, atau kekerasan struktural ala Galtung.

Konteks pembahasan Bourdieu (1994: 23) tersebut adalah pasangan interaksi kekuasaan antara dua pihak yang berbeda hirarkhi. Kekuasaan simbolik adalah kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang dilakukan oleh elit politik terhadap massa. Justru jenis kekuasaan simbolik ini, menurut Bourdieu, sangat

lazim terjadi dibanding dengan kekuasaan yang dipertahankan melalui kekuatan fisik. *Modus operandi* yang berlangsung adalah melalui penstrukturan dunia simbolik massa (Bourdieu, 1994: 165).

Sebegitu jauh, Bourdieu (1994) telah memperjelas konseptualisasi dan teoretisasi yang dibangun baik oleh Althusser, Gramsci maupun Galtung. Apa yang masih tersisa dari telaah teoretik Bourdieu adalah fenomena interaksi setara elit politik, sehingga yang berlangsung bukan praktik kekerasan simbolik melainkan pertikaian simbolik (*symbolic conflict*). Bourdieu belum menyinggung fenomena interaksi setara elit politik dalam pola struktur kekuasaan *competitive elite* (Agger, Goldrich, and Swanson, 1973: 322-342) sebagaimana telah dikemukakan di depan.

Akhirnya, bisa dikemukakan bahwa secara formal kontribusi teoretik yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengisi kekosongan teori tentang hubungan bahasa dan kekuasaan dalam konteks struktur kekuasaan *competitive elites*. Benarkah proposisi yang menyatakan bahwa bahasa dan atau praktik wacana bisa digunakan sebagai piranti pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan? Bila benar, prasyarat apa yang harus dipenuhinya? Perspektif hermeneutika Gadamerian dipilih karena dipandang berpotensi untuk mengoreksi proposisi simplisistik tentang hubungan bahasa dan kekuasaan.

Secara substantif, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman interpretif terhadap wacana politik Abdurrahman Wahid sebagaimana ditafsirkan oleh para pesaing politiknya. Lebih spesifik, kajian ini menambah berbagai studi tentang Abdurrahman Wahid seperti karya: Douglas E. Ramage (1995), Maskuri

Abdillah (1995), Greg Fealy & Greg Barton (1997), Arief Affandi (1997), Dedy Djamaluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim (1998), Ma'mun Murod Al-Brebesy (1999) dan Greg Barton (2002).

## **2. Manfaat Praktik**

Meskipun ada sejumlah ilmuwan sosial yang menilai bahwa konflik merupakan keniscayaan sosial, tetap harus dibedakan antara konflik yang bersifat produktif dan fungsional dengan konflik yang bersifat kontra-produktif dan disfungsional. Dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, memang tampak begitu banyaknya energi baik di tingkat elit maupun di tingkat massa, telah dibelanjakan untuk memenangkan atau menyelesaikan konflik sosial. Penelitian ini memberikan pelajaran kepada elit dan bangsa Indonesia tentang konflik elit politik yang kontra produktif dan disfungsional. Oleh karena itu, secara praktis penelitian ini bermanfaat tidak hanya sebagai bahan perenungan elit politik, tetapi juga bagi seluruh bangsa untuk tidak lagi melanjutkan konflik yang kontra produktif, termasuk tidak memancing konflik dengan pernyataan-pernyataan kontroversial.

## **E. Penjelasan Konsep Kunci**

Terdapat beberapa istilah kunci yang digunakan secara intensif dalam studi ini. Untuk menghindari salah tafsir istilah-istilah kunci tersebut, disajikan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Bahasa dan Bahasa Politik

Dari berbagai sumber linguistik, bahasa didefinisikan sebagai sistem simbol bunyi bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran (Bandingkan, Bloomfield, 1995: 1; Sobur, 2003: 274; Hornby, 1989: 699; Thomas and Wareing, 1999: 5; Wibowo, 2001: 3). Dalam penelitian ini bahasa yang dimaksudkan adalah Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulis yang dipakai sebagai alat komunikasi politik oleh empat elit politik, yakni Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Akbar Tandjung.

Dalam praktik politik, kekuasaan menyebar bukan saja lewat alat-alat produksi termasuk di dalamnya birokrasi, tetapi juga melalui bahasa. Bahasa yang dipakai politisi seringkali mencerminkan bangunan dan proses kekuasaan yang dominan. Mengadopsi pemikiran Habermas, sebagai tokoh teori kritis dan postmodernisme, bahasa adalah kepentingan. Kepentingan dari siapa yang memakainya. Mereka yang memiliki kekuasaan juga menguasai bahasa, yakni bahasa yang membawa kepentingan kekuasaannya.

Hikam (1996: 83-84) yang mengutip pemikiran kaum poststrukturalisme, mengemukakan bahwa bahasa dipahami bukan lagi sebagai medium netral yang berada di luar pembicara, sebagaimana yang diyakini oleh kaum empiris positivis dan fenomenologi. Bahasa sebagai representasi berperan pula dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Bila dikaitkan dengan wacana politik, menurut Shapiro, bahasa tidak

lagi alat atau medium “netral”, melainkan merupakan representasi dalam dirinya sendiri dari hubungan-hubungan politis dan merupakan ruang bagi penggelaran kekuasaan-kekuasaan tertentu.

Pengertian bahasa yang digunakan dalam penelitian ini melampaui pengertian yang lazim digunakan. Bahasa tidak hanya diartikan sebagai sarana mengekspresikan individualitas atau menyampaikan pesan kepada orang lain, tetapi lebih dari itu merupakan sarana menenangkan tujuan. Dalam konteks persaingan politik, bahasa politik diartikan sebagai ucapan atau tulisan yang diproduksi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh, menggunakan, mempertahankan dan atau mengendalikan kekuasaan.

## **2. Kekuasaan**

Dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan diartikan sebagai setiap kemampuan, kapasitas dan hak yang dimiliki seseorang, lembaga atau institusi untuk mengontrol perilaku dan kehidupan orang atau kelompok lain (Bandingkan, Fowler, 1985: 61; Fairclough, 1995; Hindess, 1996: 1; Veeger, 1993: 214; Santoso, 2001: 64). Dalam kajian ini, kekuasaan yang dimaksudkan adalah kemampuan, kapasitas dan hak yang dimiliki oleh Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Akbar Tandjung untuk saling mengontrol bahkan menjatuhkan satu sama lain.

Sebagai pembanding, berbeda dengan penjelasan teoretisi-teoretisi yang lain, Foucault memandang kekuasaan dengan mengkritik penjelasan hakikat “kuasa” dari pendapat-pendapat sebelumnya. Ilmu sejarah, misalnya, sering berbicara tentang kuasa, tetapi yang dibahas adalah orang-orang yang berkuasa

seperti raja-raja dan panglima-panglima atau tentang lembaga-lembaga yang memiliki kuasa seperti negara, parlemen, dan gereja. Mereka kurang mempelajari mekanisme-mekanisme kuasa atau strategi kuasa. Foucault ingin menganalisis strategi kuasa yang faktual. Foucault tidak menyajikan suatu metafisika tentang kuasa (pertanyaan tentang apakah kekuasaan itu), tetapi yang ingin disajikan adalah mikrofisika tentang kuasa (pertanyaan tentang bagaimana berfungsinya kuasa pada suatu bidang tertentu). Kekuasaan, menurut Foucault, sama dengan serba banyak relasi kuasa yang bekerja di salah satu tempat atau waktu.

Beberapa pokok pikiran Foucault (dalam Bertens, 1985: 487-490) tentang kuasa sebagai berikut. Pertama, kuasa bukan milik melainkan fungsi. Dalam pandangan Foucault kuasa tidak dimiliki, tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana banyak posisi yang secara strategi berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kedua, kuasa tidak dapat dilokalisasi, tetapi terdapat di mana-mana. Menurutnya, di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu dengan yang lainnya dan dengan dunia, di situpun kuasa sedang bekerja. Ketiga, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi. Kuasa tidak bersifat subjektif. Kuasa tidak dapat dilihat dari perspektif dialektif bahwa seorang menguasai orang lain. Kuasa juga tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Kuasa dapat memproduksi realitas; kuasa memproduksi lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran. Keempat, kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif. Kuasa itu produktif; kuasa itu memungkinkan segala

sesuatu. Hanya melalui analisis yang berpangkal pada kuasa sebagai kekuatan yang positif dan produktif, seseorang dapat mengubah sesuatu dalam tatanan sosiopolitik yang faktual. Hanya saja, Foucault sangat menolak anarkisme.

Seperti sudah menjadi dalil umum bahwa setiap penguasa selalu ingin mengamankan kekuasaannya. Pengamanan ini diwujudkan dalam bentuk pemertahanan, pemapanan, dan pengukuhan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap elit penguasa selalu terus menerus melakukan konsolidasi kekuasaan dalam segala bidang yang bersentuhan dan bergayut dengan kekuasaannya dan dalam segala cara sejauh itu efektif untuk konsolidasi. Usaha-usaha konsolidasi tersebut umumnya tidak hanya terbatas pada bidang politik dan militer, tetapi juga merambah ke wilayah kesadaran publik (Bandingkan, Saryono, 1993: 2; Moedjanto, 1987: 41; Eriyanto, 2000: 63).

Secara halus dan tak kasat mata serta mungkin tak disadari, konsolidasi kekuasaan tampaknya juga dilakukan pada bidang simbol-simbol sekaligus simbolik. Oleh karena itu, rekayasa simbolik selalu masuk dalam program setiap kekuasaan karena penguasa tidak akan lestari di tempatnya kalau kehilangan kontrol atas dunia simbolik. Bagaimana pun simbol-simbol yang dimiliki dan beredar di masyarakat harus dikuasai supaya masyarakat atau rakyat tetap terkuasai. Tak mengherankan kalau setiap penguasa senantiasa memproduksi dan mereproduksi simbol-simbol---baik simbol verbal maupun simbol non verbal---yang dapat memperkuat, memapankan, dan mengukuhkan kekuasaannya. Bersamaan dengan hal itu, penguasa selalu melakukan pengawasan atau kontrol terhadap simbol-simbol yang diproduksi dan direproduksi oleh masyarakat dan

yang beredar di masyarakat. Simbol-simbol yang tidak terawasi atau terkontrol dapat membahayakan kekuasaan.

Kekuasaan, khususnya kekuasaan politik, tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyederhanaan partai-partai politik, pembentukan lembaga perwakilan yang tanggap, tetapi juga melalui penguasaan ruang kesadaran dan memori kolektif masyarakat. Lewat upaya terus menerus, penguasa membangun keabsahan kekuasaannya. Upaya itu berarti pencarian basis kultural dalam masyarakat, agar kehadirannya mendapat semacam legitimasi kultural. Salah satu wilayah dunia simbolik yang tidak lepas dari jaring kekuasaan sekaligus menjadi sarana strategi hegemoni penguasa adalah bahasa. Menurut Pabottingi (1991: 3), dan juga Thomas (1999: 11) bahasa bukan semata-mata alat komunikasi penguasa kepada rakyatnya, tetapi ia juga sarana strategis untuk berkuasa. Bahasa adalah ekspresi kekuasaan, praktik bahasa menentukan bagaimana individu atau warganegara “didekte” dalam berbahasa. Bahasa merupakan ruang bagi pergelaran kuasa, kekuasaan terukir sejelas-jelasnya dalam bahasa. Menurut Pabottingi (1996: 213) memilih memakai bahasa atau kata-kata tertentu menekankan pengertian tertentu atas kata, bahkan memilih dialek tertentu tak lain adalah berpolitik dalam maknanya yang paling dalam dan luas.

Secara operasional penelitian ini membatasi kekuasaan dalam arti kekuasaan formal atau kewenangan (*authority*) yang melekat dalam jabatan Presiden dan jabatan kenegaraan yang lain. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi jalannya penggunaan kewenangan Presiden.



### 3. Wacana Politik

Secara teoretik, wacana politik menunjuk pada teks yang di dalamnya terkandung makna ideologis yang berkaitan dengan hubungan dominasi atau kekuasaan dari suatu kelompok/kelas atau suatu lembaga atas kelompok/kelas atau lembaga lainnya (Bandingkan, Santoso, 2001: 3; Warsono, 2002: 37). Dalam kajian ini, wacana politik yang dimaksudkan adalah tulisan dan ujaran yang diproduksi oleh seseorang. Selanjutnya, karena politik secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan seseorang untuk memperoleh, menggunakan, mempertahankan atau mengendalikan kekuasaan, maka wacana politik adalah ujaran atau tulisan yang diproduksi --- atau tepatnya digunakan --- oleh seseorang untuk memperoleh, menggunakan, mempertahankan dan atau mengendalikan kekuasaan. Sedangkan empat elit politik Indonesia yang dimaksudkan dalam paparan ini adalah Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Kajian tentang wacana sebagai teks tidak bisa dipisahkan dari pandangann Derrida sebagai kelompok kritis. Menurut Derrida, setiap “teks” atau “tenunan” menunjuk pada suatu jaringan teks-teks lain; setiap bagian dalam suatu diskursus menunjuk pada bagian-bagian lain (Bartens, 1995:494). Kata-kata menunjuk kepada kata-kata lain. Derrida menggunakan kata “teks” itu dalam arti yang lebih jauh lebih luas daripada arti yang biasa. Menurut Derrida segala sesuatu yang “ada” mempunyai ”status teks”. Segala sesuatu yang ada ditandai tekstualitas. Tidak ada sesuatu di luar teks. Jika fenomenologi dulu banyak berbicara tentang

intersubjektivitas, Derrida sekarang berbicara tentang tekstualitas karena suatu teks tidak pernah terisolasi, tetapi selalu hadir dengan teks-teks lain.

Menurut Derrida setiap teks adalah “daerah yang diperjuangkan” (*a contested terrain*) dalam pengertian bahwa yang muncul dalam struktur lahir tidak dapat dipahami tanpa referensi kepada persembunyian dan kontekstualisasi makna yang berlangsung secara simultan dengan markah makna teks (Agger, 1991:112). Derrida menekankan bahwa setiap teks menyembunyikan konflik antara suara otoritas yang berbeda (teks dan subjek). Persembunyian dan kontekstualisasi mungkin saja dipandang sebagai “asumsi-asumsi” yang membuat setiap teks dalam dugaan ketika akan dipahami. Akan tetapi, asumsi-asumsi itu ditekan sehingga perhatian pembaca dialihkan dari asumsi-asumsi itu. Memproduksi makna hanya dapat dilaksanakan dalam referensi makna-makna lainnya yang berhadapan. Dengan demikian, kita tidak pernah dapat menetapkan makna yang stabil melalui usaha korespondensi antara usaha dengan dunia yang dibicarakan melalui bahasa. Dalam banyak karangannya, Derrida bersama dengan para pemikir madzab Frankfurt menyerang aliran positivisme.

Sementara itu, menurut Foucault wacana atau diskursus (*discourse*) dilihat dalam hubungannya dengan “kuasa” (*power*). Menurut Foucault, wacana selalu berhubungan dengan “kesatuan”. Kesatuan suatu diskursus berpangkal pada kesatuan-kesatuan yang ada dan menganggapnya sebagai suatu kumpulan pernyataan-pernyataan. Foucault tidak mengandaikan bahwa di belakang pernyataan-pernyataan itu terdapat intensi seorang pengarang yang mengakibatkan kesatuan itu (Bertens, 1985:482). Ada berbagai relasi yang

mungkin antara beberapa pernyataan atau antara beberapa kelompok pernyataan. Foucault lebih senang berbicara tentang “bentuk diskursif” daripada tentang “ilmu”, “teori”, dan sebagainya. Untuk mengungkapkannya seseorang harus menyelidiki aturan-aturan pembentukannya. Dalam rangka menyelidiki diskursus-diskursus Foucault menggunakan tiga konsep yang saling berkaitan, yakni: positivitas, apriori historis, dan arsip (Bertens, 1985: 482).

Secara analitik, gejala bahasa menampak dalam berbagai wujud, mulai dari yang terkecil berupa fonem, morfem, kata, frase, kalimat, makna, dan wacana. Penelitian ini menempatkan wacana sebagai wujud paling luas dari gejala bahasa. Sejalan dengan pengertian bahasa politik, secara operasional penelitian ini mengartikan wacana politik sebagai ucapan atau tulisan yang diproduksi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh, menggunakan, mempertahankan dan atau mengendalikan kekuasaan.

#### **4. Perspektif Hermeneutika Gadamerian**

Hermeneutika Gadamerian merupakan sebuah metode tafsir dalam aliran filsafat yang memandang bahwa makna suatu tindak (teks atau praktik) bukan sesuatu yang ada pada tindak itu sendiri; namun makna justru ditelusur melalui orang lain sebagai pasangan komunikasinya dan bersifat relatif bagi penafsirnya. Sebab, walaupun suatu wacana atau wicara ditulis atau dituturkan oleh seseorang, sesuai dengan hakikat bahasa, bagian besar wacana itu tidak ditujukan untuk diri sendiri. Dengan demikian, makna sebenarnya dari wacana atau wicara itu justru sebagaimana ditafsirkan oleh pasangan komunikasinya (Bandingkan, Fay, 1996: 136-141; Hirsch, 2000: 65).

Sebagai metode tafsir, hermeneutika menjadikan bahasa sebagai tema sentral, kendati di kalangan para filsuf hermeneutika sendiri terdapat perbedaan dalam memandang hakikat dan fungsi bahasa, mulai dari “Bapak Hermeneutika” Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer (yang dianggap hermeneut sejati karena cakupan dan pandangannya yang sangat luas mengenai hakikat bahasa), Jurgen Habermas, Paul Ricoeur, Jacques Derrida sampai tokoh post-strukturalisme dan penggagas wacana post-modernisme Jacques Derrida. Namun demikian, diperoleh kesamaan di antara tokoh-tokoh tersebut mengenai bahasa sebagai pusat studi hermeneutika, sehingga seiring dengan perkembangan hermeneutika kini filsafat sedang mengalami “pembalikan”, ke arah bahasa. Semula filsafat memusatkan perhatian pada akal, pengalaman dan kesadaran.

Tampaknya, perkembangan aliran filsafat hermeneutika mencapai puncaknya ketika muncul dua aliran pemikiran yang berlawanan, yakni Intensionalisme dan Hermeneutika Gadamerian. Intensionalisme memandang makna sudah ada karena dibawa oleh pengarang/penyusun teks sehingga tinggal menunggu interpretasi penafsir. Sementara Hermeneutika Gadamerian sebaliknya memandang makna dicari, dikonstruksi dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai konteksnya di mana penafsiran dibuat, sehingga makna teks tidak pernah baku, ia senantiasa berubah tergantung bagaimana, kapan dan siapa pembacanya. Dengan demikian, kontekslah yang menentukan makna teks.

Sebagai aliran pemikiran filsafat, masing-masing sebenarnya memiliki kelemahan. Intensionalisme gagal menjelaskan tentang peran yang dimainkan

penafsir dalam menguraikan niat agen. Begitu pula, hermeneutika Gadamerian tidak mencukupi sebagai teori makna yang dipahami sebagai sesuatu yang utama karena memandang terlalu berlebihan peran penting intensionalitas atau kemauan pelaku tindakan dalam menjawab tentang signifikasi suatu tindakan bagi orang lain. Maka, jalan tengahnya adalah intensionalisme perlu dilengkapi dengan menggunakan wawasan dari hermeneutika Gadamerian, dan sebaliknya hermeneutika Gadamerian harus memasukkan wawasan dari intensionalisme untuk memperoleh makna tindak intensional dan signifikannya. Dengan demikian, kedua jenis aliran tersebut tidak perlu bersaing.

Harus diakui kedua aliran teori itu bukan merupakan teori makna yang lengkap, namun memiliki fokus pada aspek-aspek makna yang berbeda: intensionalisme memusatkan perhatiannya pada makna yang dipahami berdasarkan niatnya yang lalu, sedangkan hermeneutika Gadamerian pada signifikansi suatu tindakan saat ini.

Hermeneutika hadir kembali untuk merespons pengaruh strukturalisme dan positivisme yang mengkaji bahasa hanya dari struktur empiriknya belaka, sehingga kajian bahasa dari segi hakikatnya dalam mengungkapkan dunia manusiawi kurang memperoleh perhatian. Filsafat hermeneutika menguak seluruh realitas bahasa sebagai ungkapan hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan menjadikan bahasa sebagai pusat berawal dan berakhirnya segala persoalan manusia. Para filsuf menyadari bahwa lewat analisis bahasa dapat dijelaskan berbagai persoalan konseptual yang terkandung dalam teks.

Sebagaimana pada banyak aliran pemikiran, Hermeneutika Gadamerian tidak berarti sama persis dengan Hermeneutika Gadamer. Penggunaan istilah Hermeneutika Gadamerian menyiratkan arti bahwa perspektif yang digunakan dalam penelitian ini secara umum mengacu kepada buah pemikiran Gadamer. Namun demikian juga tampak jelas bahwa peneliti melakukan modifikasi terhadap langkah metodologis yang dilakukan.

Kalau dalam hermeneutika Gadamer hanya ada dua pihak yang terlibat dalam proses pemaknaan, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hermeneutika Gadamerian adalah penggunaan prinsip dan metode untuk memperoleh makna wacana yang diproduksi seseorang dengan cara meneliti penerimaan dan tanggapan pasangan komunikasinya.

## 5. Makna

Makna diartikan sebagai objek, arti, pikiran, gagasan, konsep atau maksud yang diberikan oleh penulis, pembaca atau pembicara terhadap suatu bentuk kebahasaan baik berupa kata, kalimat maupun wacana (teks) (Bandingkan, Odgen and Richards (1972: 186-187); Shipley, 1962: 263); Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1993: 619; Pateda, 2001: 82; Kempson, 1977: 11).

Terdapat bermacam-macam definisi mengenai makna. Menurut Odgen dan Richards (1972: 186-187) terdapat tidak kurang dari 22 batasan mengenai makna. Dalam upaya menjelaskan arti makna, menurut Kempson (dalam Pateda, 2001: 79) para filsuf membaginya menjadi tiga: (1) menjelaskan makna secara alamiah, (2) mendeskripsikan kalimat secara alamiah, dan (3) menjelaskan makna dalam proses komunikasi.

Dalam linguistik, setidaknya terdapat dua pendekatan mengenai makna, yakni *pendekatan analitik* atau *referensial* dan *pendekatan operasional*. Pendekatan analitik mencari makna dengan cara menguraikannya atas segmen-segmen utama, sedangkan pendekatan operasional mengkaji kata dalam penggunaannya. Misalnya, kata *istri*, dari pendekatan analitik dapat diuraikan menjadi: *perempuan, telah bersuami, mungkin telah beranak, manusia, lemah lembut, pendamping suami, berambut panjang* dan sebagainya. Sementara dengan pendekatan operasional, kata *istri* dilihat dari kemungkinan kemunculannya dalam sebuah kalimat.

Dalam konteks wacana, menurut Kerap (1994: 25) makna kata dibatasi sebagai “hubungan antara bentuk dengan hal atau barang yang diwakilinya (*reference*-nya). de Saussure (1966) menyebut makna sebagai tanda linguistik. Tiap tanda terdiri atas dua unsur, yakni yang diartikan (unsur makna) dan yang mengartikan (unsur bunyi). Kedua unsur tersebut disebut sebagai intralingual dan merujuk pada suatu referen yang merupakan unsur ekstralingual. Maksud digolongkan sebagai gejala ekstralingual.

Lebih jauh, para teoretisi bahasa mengemukakan bahwa kata umumnya memiliki makna majemuk. Setiap kata memiliki makna denotatif, yakni makna yang tidak mengandung arti tambahan, dan makna konotatif, yakni makna yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar yang umum (Kerap, 1994: 27-31). Itu sebabnya makna sebuah teks bisa lebih luas daripada maksud penulisnya sekalipun. Sebab, tafsir atas teks nyaris tak terbatas dan tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh si penulis sendiri.

Bahkan, Ricoeur menegaskan, maksud si penulis pun bukan satu-satunya tafsir terbaik atas teks (Gibbons, 2002: xv).

Kalaupun kita memandang perlu melihat konteks asli di balik sebuah teks dalam rangka melakukan penafsiran “objektif”, yang akhirnya muncul adalah “konteks” yang tak lain adalah hasil rekonstruksi berdasar teks-teks yang ada. Artinya, semua adalah hasil kreativitas atau buatan kita sendiri juga, dugaan-dugaan, dan tak akan pernah persis objektif seperti aslinya. Berger (1967) menyebutnya sebagai konstruksi penafsir atas realitas.

Berdasarkan jenisnya, menurut Brodbeck (dalam Fisher, 1986: 344-345) paling tidak terdapat tiga jenis makna: (1) makna referensial, yakni makna suatu istilah berupa objek, pikiran, ide, atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah itu sendiri, (2) arti istilah itu sendiri, yakni lambang atau istilah itu “berarti” sejauh ia berhubungan dengan istilah dan konsep yang lain, dan (3) makna intensional, yakni arti suatu istilah, lambang, atau teks tergantung pada maksud produsennya sendiri. Dalam perspektif hermeneutika, maka makna demikian tidak lain adalah hermeneutika Intensionalisme.

Untuk kepentingan studi ini, makna yang dimaksudkan adalah arti, pikiran, gagasan, konsep, maksud, responss dan interpretasi yang diberikan oleh pesaing-pesaing politik Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Amien Rais, Akbar Tandjung, dan Megawati Soekarnoputri, terhadap wacana politik yang diproduksi oleh Abdurrahman Wahid.

Karena menggunakan perspektif Hermeneutika Gadamerian, maka peneliti tidak menelusuri makna wacana ke produsen wacana yaitu Abdurrahman Wahid,



tetapi justru pada para pembaca wacana Abdurrahman Wahid, yang tidak lain adalah para pesaing-pesaing politiknya.

## 6. Elit politik

Elit politik dalam kajian ini diartikan sebagai praktisi politik, yang mencakup mereka yang terpilih dalam pemilihan umum, yang diangkat dalam jabatan tinggi, dan juga para pemimpin partai politik (Almond, dalam Haris, 2002: 14; Usman, 1990: 25; Alatas, 1993: 369; Nashir, 1999: 76). Dalam banyak hal mereka merupakan sumber perubahan. Dengan mengacu pada Almond dan untuk kepentingan studi ini, maka elit politik yang dimaksudkan adalah Abdurrahman Wahid sebagai elit pemerintah, Megawati Soekarnoputri sebagai elit pemerintah yang dalam beberapa hal berseberangan dengan Presiden Abdurrahman Wahid, Amien Rais sebagai elit bukan pemerintah, dan Akbar Tandjung elit bukan pemerintah yang keduanya menunjukkan sikap oposisi terhadap Presiden Abdurrahman Wahid.

Sementara itu, dalam sosiologi, kata elit lazim didefinisikan sebagai anggota suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang tergolong disegani, dihormati, kaya serta berkuasa. Kelompok elit adalah kelompok minoritas superior yang posisinya berada pada puncak strata, memiliki kemampuan mengendalikan aktivitas perekonomian, dan sangat dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan-keputusan penting. Itu sebabnya mudah dimengerti apabila dalam banyak hal kelompok elit tidak hanya ditempatkan sebagai pemberi legitimasi, tetapi juga menjadi panutan sikap dan acuan tindakan, serta senantiasa diharapkan dapat berbuat banyak dan nyata bagi kepentingan masyarakat luas.

Di masyarakat yang struktur sosialnya diwarnai oleh budaya patrimonial dan feodal seperti Indonesia, posisi dan peran elit sangat penting. Sebab, tokoh atau pemimpin berkedudukan dan berperan sebagai layaknya bapak yang melindungi dan mengayomi anak buah. Sedangkan masyarakat adalah sebagai anak buah yang dilindungi. Karena itu pula, ketika elit politik era Abdurrahman Wahid saling bertikai dampak sosialnya sangat luas. Bahkan bisa diduga berbagai konflik komunal yang terjadi di Indonesia sepanjang pemerintahan Abdurrahman Wahid disebabkan oleh pertikaian elit politik yang berujung pada kejatuhan pemerintahan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001.

Dalam sorotan Pareto, elit tidak saja muncul sebagai produk kekuatan ekonomi maupun perjuangan membangun dominasi dalam sebuah *setting* sosial. Selain itu, elit tidak selalu terdiri atas orang-orang yang berprestasi karena memiliki kemampuan *skill* yang tinggi dibanding orang-orang kebanyakan, tetapi juga bisa berasal dari orang yang tidak memiliki prestasi apa-apa. Menurut Pareto, sistem dan situasi yang korup memungkinkan figur biasa menaiki jenjang elit berkuasa (*the governing elites*) (Maliki, 2001: 7).

Atas dasar sorotan Pareto di atas, maka dalam konteks Indonesia negeri ini merupakan suatu kawasan yang dalam waktu cukup lama dikelola atas dasar prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh elit ketimbang massa. Begitu sentralnya peranan elit, maka boleh dikatakan bahwa sejarah negeri ini sejak awal kemerdekaan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia modern ini merupakan tapak-tapak sejarah perjalanan kaum elit dan kaum aristokrat.

Akhirnya, dalam penelitian ini elit politik yang dimaksudkan dibatasi hanya pada empat tokoh sentral politik nasional era kepresidenan Abdurrahman Wahid, yaitu: Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Akbar Tandjung.

## **7. Komunikasi Politik**

Komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berasal dari sumber (selaku pihak yang memprakarsai komunikasi) kepada khalayak, dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. (Bandingkan, Schudson, 1997: 311; Nasution, 1990: 42; Nimmo, 1989: 8; Suwardi, 1997: 29)). Dalam studi ini komunikasi politik yang dimaksudkan adalah penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Akbar Tandjung dengan menggunakan media bahasa (Indonesia) untuk mencapai tujuan politik mereka.

Dalam ilmu komunikasi dengan mendasarkan pandangan fenomenologi komunikasi yang ideal, termasuk dalam komunikasi politik, sering diidealkan memenuhi beberapa syarat pragmatik universal. Proses komunikasi hanya akan berhasil apabila syarat-syaratnya terpenuhi, antara lain: keterpahaman secara kognitif, kebenaran perkataan, kejujuran dari pembicara dan pendengar, dan kesesuaian dengan basis-basis normatif para pembicara (Bandingkan, Hikam, 1996: 82). Meskipun menggunakan nama “universal”, agaknya syarat tidak berlaku pada masyarakat secara umum. Syarat-syarat pragmatik universal itu tampaknya hanya cocok dengan komunikasi dalam masyarakat rasional dan telah dewasa. Akan tetapi, dalam masyarakat yang penuh dengan ketimpangan dan

krisis sosial, ekonomi, politik dan *life word*, komunikasi dalam masyarakat sering distortif dan semu.

Sementara menurut Hidayat (2000: 4) dalam komunikasi dikenal ada tiga macam cara menyampaikan gagasan, yaitu agresif, permisif, dan asertif. Tipe pertama, seseorang menyampaikan gagasan namun selalu menimbulkan korban karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan tersebut. Komunikasi model ini sering menimbulkan banyak lawan dan berimplikasi memperbesar persoalan. Tipe kedua, orang yang selalu bersikap kalah dan mengalah sehingga memungkinkan orang lain untuk menginjak-injak hak-haknya. Adakalanya sikap demikian diperlukan, akan tetapi secara tidak langsung akan mengondisikan munculnya sikap tiran. Tipe ketiga adalah tipe yang paling sehat, yaitu seseorang mengomunikasikan pikirannya secara jelas dan tegas, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan direndahkan atau disakiti.

Mengamati tindakan verbal elit politik dalam kajian ini dengan mengacu pada tiga model komunikasi politik di atas, maka dapat dikatakan bahwa perilaku verbal elit politik pada era Abdurrahman Wahid menggunakan tipe pertama, yakni menyampaikan pernyataan dengan ada pihak lain yang merasa dirugikan atas pernyataan tersebut. Perang kata-kata dan teror kata-kata elit politik untuk saling menjatuhkan menjadi tontonan publik sehari-hari dan meramaikan wacana politik nasional. Itu sebabnya, wacana politik Indonesia era Abdurrahman Wahid sarat dengan konflik karena dilihat dari sisi komunikasi politik memang tidak sehat.

Dalam penelitian ini, istilah komunikasi politik digunakan untuk menunjuk pada rangkaian kegiatan penyampaian kepada orang lain pesan-pesan tertentu, dengan media tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu pula.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Secara berturut-turut, bab ini menguraikan: (A) Bahasa dan Kekuasaan (B) Bahasa dan Kajian Politik, yang mencakup uraian tentang: (1) Bahasa dan Wacana, (2) Wacana Politik, dan (3) Kajian Wacana Politik, (C) *State of the Arts* Kajian Terkait, yang mencakup uraian tentang: (1) Beberapa Kajian Terkait, (2) Studi Wacana Politik di Indonesia, dan (3) Posisi serta Keaslian Penelitian ini, (D) Hermeneutika dan Kajian Wacana Politik, yang mencakup telaah tentang: (1) Perkembangan Gagasan Hermeneutika, (2) Beberapa Varian Hermeneutika, dan (3) Signifikansi Hermeneutika bagi Kajian politik, dan (E) Hermeneutika Gadamerian, yang mencakup uraian ringkas tentang: (1) Sejarah Intelektual Gadamer, (2) Pokok-Pokok Hermeneutika Gadamerian, dan (3) Penerapan Hermeneutika Gadamerian dalam Kajian Teks.

#### **A. Bahasa dan Kekuasaan**

Sekilas tidak ada hubungan sama sekali antara bahasa dan kekuasaan. Keduanya merupakan dua hal terpisah. Ini tentu tidak salah jika bahasa dimaknai secara konvensional, yakni sebagai sistem lambang yang terurai mulai dari unit yang paling kecil, yakni bunyi (*phones*), yang dikaji oleh *phonology*, morfem (*morphemes*) dan kata (*words*) yang dikaji oleh *morphology*, yang kodifikasinya dikembangkan lebih lanjut melalui leksikologi dan leksikografi, frase (*phrases*), klausa (*clauses*) dan kalimat (*sentences*), yang dikaji oleh *syntax*, makna

(*meanings*) yang dikaji oleh *semantics*, tanda (*signs*) yang dikaji oleh *semiotics*, hingga teks (*texts*) yang dikaji lewat analisis teks (*reading analysis*), sedangkan kekuasaan dimaknai sebagai praktik politik oleh para politisi.

Oleh para ahli, pemilahan demikian melahirkan apa yang kemudian disebut dengan linguistik deskriptif (*descriptive linguistics*) yang pusat kajiannya adalah *behaviour*, *contents* dan *elements* bahasa yang kemudian dikenal sebagai “*pure linguistics (micro linguistics)*”. Selain makna bahasa terasa sempit, pemilahan tersebut melahirkan formalisme dalam linguistik, sehingga linguistik seolah hanya berjalan di atas satu rel saja. Sayangnya, formalisme begitu mendominasi para linguis di Indonesia dalam waktu yang cukup lama hingga awal 1960’an.

Jika bahasa dimaknai seperti itu, maka tidak mungkin antara bahasa dan kekuasaan dapat bertemu, karena dari sudut pandang disiplin ilmiah bahasa adalah wilayah kajian linguistik, sedangkan kekuasaan adalah wilayah kajian ilmu politik. Namun, perjumpaan antara bahasa dan kekuasaan dimulai setelah para kaum post-strukturalisme seperti Jurgen Habermas, Jean Baudrillard, Antonio Gramsci, Michel Foucault dan lain-lain menegaskan betapa pentingnya relasi antara bahasa dan kekuasaan. Bahkan Jean Baudrillard (dalam Latif dan Ibrahim, 1996) menegaskan bahwa “*The real monopoly is never that of technical means, but that of speech*”. Sejak saat itu, diskusi tentang relasi antara bahasa dan kekuasaan sangat semarak. Sebelumnya kehadiran karya Fairclough (1989) “*Language and Power*”, Benedict Anderson (1990) “*Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*”, Pierre Bourdieu (1984) “*Language*

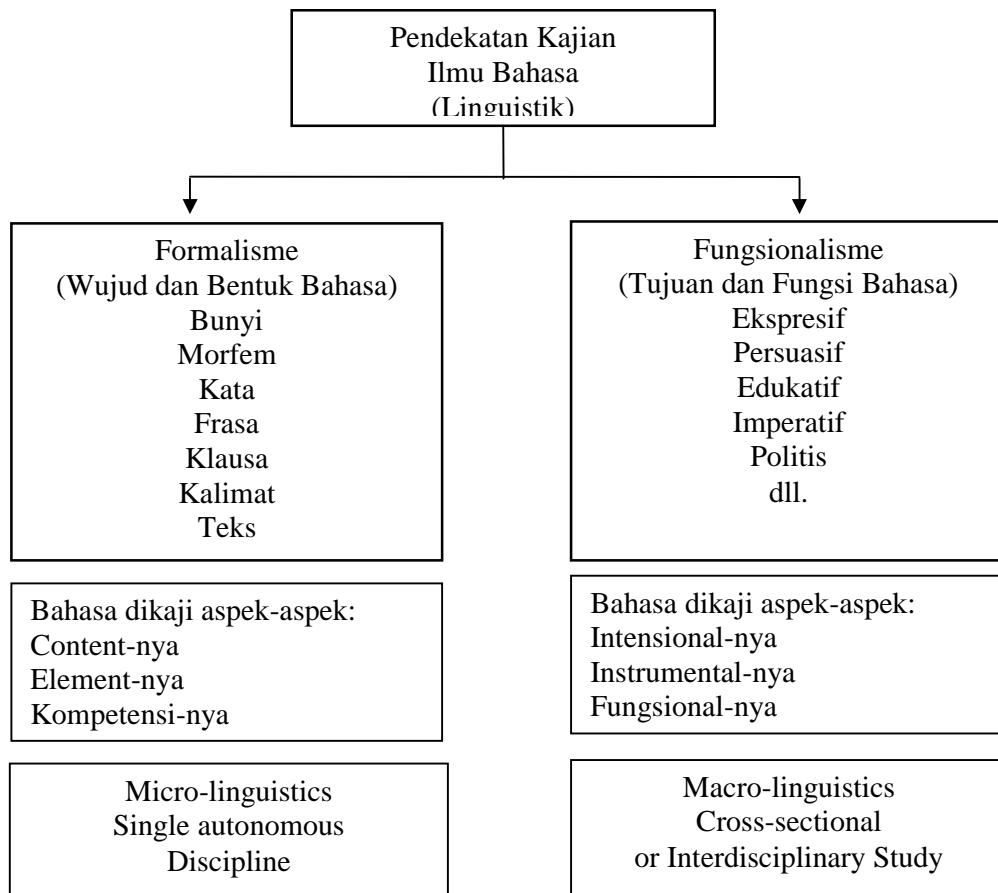
*and Symbolic Power*” juga telah membuka ruang diskusi ilmiah tentang relasi bahasa dan kekuasaan. Dampaknya, penelitian tentang relasi bahasa dan kekuasaan berkembang sehingga melahirkan karya-karya akademik yang cukup banyak berupa makalah, buku-buku ilmiah, tesis, dan bahkan disertasi.

Lebih lanjut, kaum post-strukturalis, juga membuka diri memasuki ranah lain dengan melihat bahasa dari sisi fungsi (*language in use*). Di sini bahasa tidak dilihat sebagai objek yang dideskripsikan semata, melainkan dilihat fungsinya dalam komunikasi, dan dalam kehidupan sosial serta budaya. Menurut saya, justru para kaum post-strukturalis tersebut mengembalikan bahasa pada hakikat dan fungsi yang sesungguhnya. Implikasinya, ilmu bahasa (linguistik) dapat membawa kita ke berbagai ranah kehidupan tempat bahasa digunakan. Misalnya, sebagai teks bahasa hadir dalam ranah seni, budaya, sastra, politik, psikologi, agama, komunikasi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Di sini terjadi apa yang disebut sebagai fungsionalisme dalam linguistik, yang disusul dengan kelahiran disiplin-disiplin baru seperti sosiolinguistik, antropinguistik, psikolinguistik, politikolinguistik, sosiopolitikolinguistik, geolinguistik, neurolinguistik, komunikasi politik dan seterusnya. Disiplin-disiplin tersebut sering disebut *inter-disciplinary linguistics (macro linguistics)*.

Perkembangan linguistik fungsional juga menuntut para pengkaji bahasa untuk memahami disiplin-disiplin lain seperti sosiologi, bagi pengkaji sosiolinguistik, psikologi bagi pengkaji psikolinguistik, neurologi bagi pengkaji neurolinguistik, antropologi bagi pengkaji antropinguistik, ilmu politik bagi pengkaji politikolinguistik, teori-teori tentang ideologi media dan teori kritik bagi



pengkaji media, semiotika bagi pengkaji komik dan seterusnya. Berikut disajikan pemetaan wilayah kajian bahasa antara formalisme (yang berisi tentang wujud dan bentuk bahasa) dan fungsionalisme (yang berisi tujuan dan fungsi bahasa).



Formal Linguistics	Interdisciplinary studies (Sociolinguistics)
The goal is to understand & explain language structure through genetically-shared language universals	The goal is to understand & explain language variation through (linguistic & social) context
Adopts model of Linguistics as a 'physical science'; metaphors are computers, genes; primarily qualitative methods; interested in predictions and invariant laws (e.g. in physics, factors affecting friction are same everywhere)	Adopts model of social sciences: studies behavior, uses both quantitative and qualitative methods (incl. statistics); ethnographic & sociological research paradigms; explanation does not imply ability to predict or apply laws.
Focuses on biological capacity for language, the property separating humans from animals; concentrates on language universals all humans share; asks, "What is Universal Grammar (UG)?"	Focuses on diversity-- variation-- of language use in different social groups (cultures, ethnicities, societies, nations, genders, ages, occupations, cities, and so forth); asks, "How does social context determine language use?", and "What are the social functions of linguistic diversity?"
Investigates genetically-programmed ability to learn language structures	Investigates socially-constituted and -learned patterns of language use and their interface /language structure
Takes any normal person as a source of linguistic data on "their" language, through introspection and intuitions	Requires systematic methods of data collection: since every speaker has complex social identity, it must take account of social context & history
Principally concerned with informational/communication function of language	Concerned with both informational and expressive functions of language
Evidence from "marginal" data: child speech, mistakes, aphasia, 'Genie', deaf/signers; interested in how they shed light on nature of UG	Evidence from communities and coherent social settings; also interested in "margins" (e.g. deaf signers, minorities); takes their social/historical context and needs into account

Perspektif fungsionalisme mengantar kajian bahasa untuk tidak lagi sekadar mengkaji bahasa, tetapi juga wacana (*discourse*), yaitu bahasa dalam konteks yang beraneka ragam untuk memahami maknanya. Saat ini kita dihadapkan dengan situasi multikulturalisme yang harus kita pahami secara lebih

baik. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sebab, bahasa yang digunakan manusia makin terserap oleh pergaulan antarbudaya, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional, yang dalam studi budaya (*cultural studies*) disebut fenomena diaspora. Akibatnya, bahasa bukan lagi objek tunggal, melainkan sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Sampai saat ini sudah hampir 50 (lima puluh) tahun bahasa telah dikaji melebihi batas-batas linguistik, yakni wacana dengan memahami makna di balik bahasa. Menurut teori wacana, tidak ada produk linguistik yang hadir dalam ruang hampa dan tiba-tiba, apalagi tanpa makna. Ia hadir dengan tujuan tertentu dan bahkan kuasa tertentu pula. Tidak ada kata yang tidak bermakna. Bahkan, wacana merupakan arena beroperasinya kekuasaan dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, menjadi agak mudah bagi kita untuk memahami dua macam kekuasaan menurut Gramsci, yaitu: koersi dan hegemoni, atau dua jenis piranti penguasaan menurut Althusser, yaitu: aparat represif kekuasaan (*Repressive state apparatus*), dan aparat ideologis kekuasaan (*Ideological state apparatus*).

Sebagai kekuasaan hegemonik yang dibangun melalui kerja aparat ideologis, maka kebanyakan kekuasaan kontemporer beroperasi dalam atau dibangun dan dipelihara melalui praktik wacana (*discursive practice*). Untuk memahaminya diperlukan analisis interteks. Lewat kajian wacana, kita dapat melihat jenis kekuasaan yang beroperasi.

## E. Bahasa dan Kajian Politik

### 1. Bahasa dan Wacana

Meskipun disepakati bahwa bahasa pada dasarnya merupakan sistem lambang (*symbol*), sebagai gejala khas manusia, bahasa bukan sembarang lambang (*symbol*), sembarang isyarat (*code*), ataupun sembarang tanda (*sign*), tetapi rangkaian lambang suara dan terucap (*vocal and verbal symbol*), yang kemudian berkembang menjadi lambang tertulis. Gejala paling konkrit bahasa berupa ujaran (*parole*). Gejala lebih abstrak, karena meyangkut kaidah-kaidah bahasa tertentu secara tepat, berupa *langue*. Bahasa Inggris dengan segala kaidahnya, misalnya, merupakan *langue*. Sedangkan yang paling abstrak adalah *langage*, yang mencakup tidak hanya kaidah satu bahasa, tetapi kaidah umum berbagai bahasa (Rosidi, 2003).

Ada lima wujud gejala *langage*. Karena kelahiran bahasa bermula dari ujaran (*speech*), maka gejala terkecil bahasa adalah bunyi (*sound, phone*). Gejala ini dipelajari oleh cabang kajian fonetik atau fonologi (*phonetics or phonology*). Gejala bahasa terkecil kedua berupa morfem (*morpheme*) dan kata (*word*). Serba-serbi kata dipelajari oleh morfologi (*morphology*), perbendaharaan kata ini dipelajari oleh leksikologi (*lexicology*), sedangkan kata sebagai tanda dikaji oleh semiotika (*semiotics*). Gejala bahasa berupa kelompok kata dengan susunan terpola (*patterned order of words*), baik frasa (*phrase*) maupun kalimat (*sentence*) dipelajari oleh cabang kajian sintaksis (*syntax*). Karena bahasa niscaya digunakan untuk bertukar pesan, maka unsur sangat penting bahasa berikutnya adalah makna (*meaning*). Gejala bahasa ini dipelajari oleh cabang kajian semantika (*semantics*).

Selanjutnya, gejala bahasa berupa percakapan dan atau wacana (*conversation and or discourse*) dipelajari baik oleh cabang kajian pragmatika (*pragmatics*), hermeneutika (*hermeneutics*) maupun analisis wacana (*discourse analysis*).

Istilah wacana diperkenalkan dan digunakan oleh para linguis di Indonesia dan negeri-negeri berbahasa Melayu lainnya sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris *discourse*. Maka *discourse analysis* pun diterjemahkan menjadi analisis wacana (Oetomo, 1993: 4). Terkait penggunaan analisis wacana dalam kajian politiko-linguistik, berikut disajikan tinjauan terhadap perdebatan konseptual wacana politik, perdebatan hermeneutika Hirschian dan Gadamerian, perkembangan terakhir (*state of the arts*) kajian terkait, serta posisi penelitian ini dalam konteks perkembangan terakhir kajian wacana politik di Indonesia.

Dalam perkembangannya istilah wacana juga dipakai oleh berbagai disiplin ilmu, mulai dari politik, sosiologi, linguistik, sastra, psikologi, komunikasi, dan sebagainya. Masing-masing kadang-kadang memiliki perbedaan dalam konsep dan pendekatan yang dipakai. Dalam sosiologi, wacana merujuk terutama pada hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa. Tetapi umumnya para sosiolog lebih banyak menggunakan istilah diskursus beserta adjektivanya, yakni *diskursif*. Para ilmuwan Indonesia mulai memperhatikan diskursus sejak pertengahan 1980-an dengan naik daunnya ancaman pascastrukturalis dalam antropologi, sosiologi, dan ilmu politik.

Dalam linguistik, Oetomo (1993: 4), dan Kartomihardjo (1993: 23) mengartikan istilah wacana sebagai suatu rangkaian sinambung bahasa (khususnya lisan) yang lebih besar daripada kalimat. Jadi, unit itu bisa berupa

paragraf, undangan yang ditulis dalam kartu undangan atau media tulis lainnya, percakapan, cerita pendek dan lain sebagainya. Konsep ini merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan unit kata, frase atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur-unsur tersebut. Dalam psikologi, wacana diartikan sebagai pembicaraan. Wacana di sini agak mirip dengan struktur dan bentuk wawancara dan praktik dari pemakainya.

Dalam politik, istilah wacana yang diterjemahkan dari kata *discourse* tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Foucault (1972) yang melihat realitas sosial sebagai arena diskursif (*discursive field*) yang merupakan kompetisi tentang bagaimana makna dan pengorganisasian institusi serta proses-proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara khas. Dalam pengertian demikian, wacana merujuk pada berbagai cara yang tersedia untuk berbicara atau menulis untuk menghasilkan makna yang di dalamnya melibatkan beroperasinya kekuasaan untuk menghasilkan objek dan efek tertentu (Sparringa, 2001: 1).

Dengan demikian, telaah wacana memusatkan pada penggunaan bahasa. Sebab, bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya. Menurut Rakhmat (1996: 50) tak berlebihan dikatakan bahwa ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa. Karena itu selain bahasa, ideologi juga merupakan konsep sentral dalam Analisis Wacana. Sebab, teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan ideologi tertentu (Eriyanto, 2001: 13).

Dalam praktik, istilah *wacana* acapkali dipertukarkan dengan istilah *teks*. Dalam tradisi berbahasa Inggris, teks lebih mengacu pada bahasa tulis, sedangkan

wacana pada bahasa lisan, walaupun perbedaannya terletak pada soal penekanan. Dari sudut lain, *wacana* kerap kali menyiratkan wacana interaktif, sedangkan *teks* menyiratkan monolog noninteraktif. Perbedaan lain dilakukan oleh Halliday dan Hassan (1976), yakni bahwa wacana cenderung panjang, sedangkan teks dapat singkat sekali, seperti tanda “Pintu Darurat”. Lain lagi halnya dengan Widdowson (1979), yang membedakan keutuhan (kohesi) wacana, yang berlaku antara tindak-tanduk wicara yang mendasarinya (batin). Sebaliknya, van Dijk (1977) menggunakan teks untuk merujuk pada konstruk teoretik yang abstrak, yang diwujudkan dalam wacana, sedangkan bagi Halliday, justru teks yang mengacu pada perwujudan lahir (Oetomo, 1993: 4).

Menurut Kartomihardjo (1993: 23-24), wacana lisan biasanya diiringi oleh berbagai faktor termasuk faktor-faktor non-bahasa seperti situasi dan suasana di mana para peserta ujaran berinteraksi, hubungan pribadi sehingga banyak pengetahuan bersama yang dipahami bersama, variasi bahasa yang digunakan dengan intonasi tertentu dan berbagai macam piranti para-linguistik. Dengan demikian, wacana lisan sering pendek-pendek dan terdiri atas unit-unit yang juga pendek-pendek dan sering kurang lengkap dan kurang gramatikal. Sebaliknya, wacana tulis biasanya lengkap dan lebih gramatikal, penuh informasi penjelas agar tidak disalahtafsirkan oleh pembaca. Apabila wacana lisan penuh dengan bentuk-bentuk informal, wacana tulis lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk baku, kecuali wacana yang memang disengaja oleh penulisnya untuk menonjolkan bentuk-bentuk yang informal untuk efek tertentu, seperti dialog di dalam cerita pendek atau novel, surat kepada keluarga dekat atau teman akrab, wacana yang

mengungkapkan kelucuan dan sebagainya. Walaupun demikian, terdapat pula wacana tulis yang bentuknya sangat mirip dengan bentuk wacana lisan, seperti label advertensi, label berbagai hasil produksi pabrik obat-obatan dan makanan, manual, pemberitahuan atau peringatan yang dipasang di tempat tertentu dan lain sebagainya. Untuk kepentingan studi ini wacana yang dimaksudkan adalah baik wacana lisan berupa ujaran-ujaran elit politik maupun wacana tulis berupa naskah-naskah pidato, ceramah, hasil wawancara dan sebagainya.

## 2. Wacana Politik

Menurut Collins (1975: 114) secara umum, semua percakapan adalah negosiasi. Dalam telaahnya, terdapat enam jenis percakapan, yaitu: percakapan praktis, percakapan ideologis, diskusi intelektual, percakapan hiburan, gosip dan percakapan pribadi. Di antara sejumlah percakapan tersebut, maka yang paling serius dan menekan adalah percakapan ideologis (*ideology of legitimizing talks*).

Percakapan ideologis membuat masyarakat terpilah menjadi dua kubu. Karena itu, orang akan cenderung memilih untuk berbicara dengan orang lain yang memiliki kemiripan dengan dirinya, serta menghindarkan diri dari berbicara dengan orang lain yang memiliki pandangan bertentangan (Collins, 1975: 121). Dalam percakapan ideologis itu pula, ada kecenderungan untuk terjadi persaingan antarberbagai pandangan.

Terkait dengan persaingan antarberbagai pandangan tersebut, Michel Foucault, salah satu tokoh penting dalam pendekatan post-strukturalis, melihat realitas sosial sangat baik dipahami sebagai arena diskursif (*discursive field*) yang di dalamnya terjadi persaingan bahkan pertikaian makna-makna, serta bagaimana



proses ataupun institusi sosial diberi makna tertentu. Dengan demikian, menurut Weedon, 1987 (dalam Sparringa, 2001). "wacana merujuk pada berbagai cara yang tersedia untuk berbicara atau menulis untuk menghasilkan makna yang di dalamnya melibatkan beroperasinya kekuasaan untuk menghasilkan objek dan efek tertentu.

Karena itu, wacana bisa pula dipandang sebagai perekat antara pengetahuan (*knowledge*) dan kekuasaan (*power*). Melalui metode genealogi, Foucault (1972) ingin mengungkap hubungan timbal balik antara sistem kebenaran dengan mekanisme kuasa. Teknologi kuasa, misalnya, menurut Foucault, semakin mencapai sasarannya dalam rejim disiplin. Pendisiplinan merupakan cara kuasa melaksanakan kontrol terhadap individu agar patuh dan berguna. Secara ringkas, semakin individu diketahui, maka semakin mudah ditaklukkan. Demikian pula sebaliknya, semakin individu ditaklukkan maka semakin individu itu diketahui. Secara unik, Foucault merasa hanya perlu memberi tanda garis miring (/) antara kuasa dan pengetahuan, sehingga tertulis kuasa/pengetahuan.

Dalam dalil perspektif kuasa/pengetahuan Foucault, mustahil menyelenggarakan kekuasaan tanpa suatu entitas pengetahuan, sebagaimana halnya mustahil entitas pengetahuan tidak mengandung efek kuasa. Pengetahuan di sini salah satunya termanifestasikan dalam wacana, sehingga menurut Foucault mustahil pula suatu kekuasaan terselenggara tanpa berfungsinya suatu wacana kebenaran (Sudibyo, 2001: 124-125). Dalam konteks ini Aditjondro (1994: 59-64) menyimpulkan bahwa untuk melihat dinamika suatu kekuasaan diperlukan kajian

mendalam terhadap bentuk-bentuk wacana resmi yang menjadi produk kekuasaan itu.

Bagi Foucault (1972), kekuasaan adalah relasi yang dibentuk dan disebarluaskan melalui banyak saluran, dalam cara yang kadang-kadang bersifat kontradiktif dan penuh persaingan, serta pada umumnya tumpang tindih. Kekuasaan, dengan demikian, tidaklah semata mekanisme yang berfungsi melayani ‘reproduksi relasi produksi’---sebagaimana yang digambarkan Althusser (1971)---, akan tetapi kekuasaan itu sendiri bersifat produktif (Ritzer, 2001: 325), kekuasaan menghasilkan dan menyebabkan munculnya objek-objek pengetahuan baru, serta mengakumulasi kawasan informasi baru. Karena itu, kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Tidak ada kekuasaan tanpa menghasilkan pengetahuan, sebaliknya tidak ada pengetahuan yang tidak secara terus-menerus memberikan efek pada kekuasaan.

Pandangan Foucault (1972) di atas sejalan dengan Barthes bahwa kekuasaan modern telah lahir dengan begitu lembut melalui mekanika sosial dan sangat mungkin masuk dalam relung-relung kepentingan, tidak hanya negara, kelas, grup, tetapi juga di dalam fashion, opini publik, hiburan, olahraga, berita, informasi, keluarga dan hubungan pribadi. Realitas demikian oleh Barthes disebut sebagai wacana kekuasaan (*discourse of power*). Barthes menyatakan: “You carry out a revolution to destroy power, and it will be reborn, within the new state of affairs” (Eco, 1986: 240).

Itu sebabnya ketika melihat wacana, permasalahan yang penting bukan sekadar memahami bagaimana satu peristiwa dan objek wacana dipahami

maknanya sebagaimana dikemukakan van Dijk dan Stubbs di muka---walaupun ini merupakan bagian dari studi wacana dengan menyingkap kode-kode yang tersembunyi---tetapi juga memahami jenis kekuasaan apa yang beroperasi dan apa efek dari kekuasaan tersebut (Piliang, 1999: 58-61). Di sini menjadi jelas bahwa wacana merupakan tempat beroperasinya relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Dengan demikian studi wacana hakikatnya adalah upaya memahami apa yang dikatakan orang (Stubbs, 1983: 30).

Karena merupakan penghubung antara kuasa dan pengetahuan, maka wacana pun bisa berperan sebagai rejim diskursif (*discursive regime*). Sebagai rejim kekuasaan, suatu wacana berfungsi seperti struktur. Hasilnya, menurut Flax (dalam Sparringa, 2001), setiap wacana selalu memuat sesuatu yang memungkinkan (*enabling*) dan membatasi (*limiting*). Dengan memahami wacana yang bisa memberdayakan sekaligus mengendala, tampak bahwa analisis wacana telah menerapkan sejumlah pandangan mutakhir tentang fungsi struktur, dan meninggalkan pandangan strukturalis Durkheimian yang hanya menempatkan struktur sebagai semata-mata kendala.

Menurut Easton (1990), misalnya, struktur bisa diartikan dalam dua cara, yaitu: (1) sebagai sifat dasar yang melekat pada sesuatu, dan (2) sebagai kenyataan fisik yang dapat dipisahkan dari unsur lain. Sebagai sifat dasar yang melekat pada sesuatu, maka struktur dapat dipisahkan dari kenyataan hanya secara analitik. Sedangkan sebagai kenyataan fisik, struktur dipandang benar-benar memiliki status ontologik tersendiri. Bagi Giddens, struktur bukan sesuatu yang di luar, bukan pula kekuatan yang mengendala yang membuat manusia menjadi

robot dan penurut. Struktur tersertakan di dalam, dan direproduksi oleh keajekan sehari-hari interaksi antarmanusia.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, teori strukturasi Giddens didasarkan pada proposisi bahwa struktur bisa memberdayakan maupun mengendala, sebagai sifat yang melekat dalam hubungan antara struktur dengan agensi. Mirip dengan penggambaran teori strukturasi, menurut Easton (1990), struktur bisa berfungsi: (1) sebagai penentu (*as determinant*), (2) sebagai kendala (*as constraint*), dan (3) sebagai pelancar (*as facilitative*) tindakan agen.

Struktur berfungsi sebagai penentu tindakan apabila struktur diperlakukan sebagai faktor penjelas, atau memiliki pengaruh kuat dan langsung, terhadap peristiwa sosial. Struktur berfungsi sebagai kendala apabila struktur ternyata membatasi pilihan tindakan individu dan kelompok. Sebaliknya, struktur berfungsi sebagai pelancar apabila struktur justru memberi peluang atau kemungkinan bagi individu atau kolektiva untuk bertindak (Easton, 1990).

Flax (dalam Sparringa, 2001), melihat bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam sebuah wacana memungkinkan orang memproduksi sebuah pernyataan dan menghasilkan klaim kebenaran atasnya. Implikasinya, setiap wacana berpotensi untuk memasukkan atau mengeluarkan (*inclusion/exclusion*). Secara sistematis, operasi proses ini akan menjadi penentu apakah sesuatu itu dianggap baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau keliru. Akhirnya, ketika suatu wacana menjadi begitu dominan, maka wacana itu pun menjadi rejim kekuasaan. Pada titik ini pula ada titik temu antara analisis wacana menurut pendekatan post-strukturalis dengan berbagai pendekatan strukturalis lain.

Ditinjau dari perspektif Marxian, maka rejim wacana tidak lain adalah super-struktur atau ideologi dominan yang telah bekerja secara efektif, yang menghasilkan "kesadaran palsu". Ditilik dari perspektif Althusserian, maka rejim wacana setali tiga uang dengan aparat ideologis yang berfungsi melestarikan kekuasaan. Demikian pula, bila ditilik dari perspektif Gramscian, rejim wacana akan menghasilkan hegemoni.

Memang, permasalahan kurang menarik lagi bila salah satu elit politik berhasil menundukkan berbagai tema sentral yang diperjuangkan oleh elit politik lain. Justru karena dalam masa transisi, Indonesia menjadi kancah persaingan antarberbagai wacana yang diperjuangkan oleh para elit politik. Tidak bisa dihindari, dalam dunia politik Indonesia telah dan sedang berlangsung persaingan wacana.

Satu wacana (*prior discourse*) mengajukan klaim kebenaran, sedangkan wacana lain melakukan kritik atau penyerangan (*counter-discourse*), untuk selanjutnya dibalas lagi oleh wacana pertama dalam bentuk pembelaan (*apologetic discourse*), atau malah serangan balik (*counter-counter discourse*). Karena perang wacana tersebut dilakukan oleh para elit politik yang relatif memiliki massa, maka bisa diramal bahwa kejadian tersebut pun membawa akibat-akibat tertentu bagi massanya.

Mengingat wacana adalah ucapan atau tulisan sebagai ungkapan pemikiran (Alvesson, 2000: 203), maka bahasa merupakan sarana dalam proses wacana, dan kalimat merupakan bagian terkecil dalam wacana (Stubbs, 1983: 1; Baso, 1994: 44). Wacana selalu mengandaikan adanya pembicara atau penulis, objek yang

dibicarakan, dan pendengar atau pembaca. Ini berarti wacana mengandaikan adanya subjek (pembicara, penulis), objek yang dibicarakan, dan bahasa yang digunakan. Melalui kerangka kerja semiotika sosialnya sebagai pisau analisis wacana, Halliday (1992: 12) telah memberi sumbangan yang berharga untuk membedah interaksi antara teks dan situasi (konteks) yang didasarkan pada tiga konsep, yaitu medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), dan mode wacana (*mode of discourse*).

*Medan wacana* merujuk pada tindakan sosial yang sedang terjadi atau dibicarakan, aktivitas di mana para pelaku terlibat di dalamnya, serta praktik-praktik yang terlibat dalam teks. *Pelibat wacana* mengidentifikasi pihak-pihak---pembicara dan sasaran---yang terlibat dalam pembicaraan, serta hubungan dan kedudukan di antara mereka. Sedangkan *mode wacana* merujuk pada pilihan bahasa, termasuk apakah gaya bahasa yang dipergunakan bersifat eksplanatif, deskriptif, persuasif, metaforis, hiperbolis, dan lain-lain, serta bagaimana pengaruhnya. Dengan kata lain, *medan wacana* merupakan jawaban atas pertanyaan “Apa yang sedang terjadi atau dibicarakan dalam teks?”, *Pelibat wacana* merupakan jawaban pertanyaan “Siapa yang sedang berbicara dan siapa sasarannya?”, sedangkan *mode wacana* merupakan jawaban pertanyaan “Bagaimana gaya bahasa yang dipergunakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya?” (Sudibyo, 2001: 129).

Berkaitan dengan konsep di atas, studi wacana adalah kajian tentang bahasa dalam fungsinya sebagai sarana untuk mengomunikasikan pemikiran, ideologi, dan tindakan sosial dalam interaksi sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh

Harbermas (dalam Waters, 1994: 24) masyarakat manusia berkembang dalam komunitas yang harus berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Bahasa adalah simbol yang terpenting dalam interaksi sosial. Begitu penting peran dan keberadaan bahasa dalam interaksi sosial, Heidegger (dalam Gibbons, 2002: xiv) menyatakan “we think with and within the language, and therefore there is nothing beyond the language”. Apa yang bisa dipetik dari uraian Heidegger adalah tanpa bahasa manusia tak mungkin bisa berpikir dan memahami realitas di sekitarnya.

Dalam komunikasi sosial yang ditandai oleh kesenjangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, bahasa adalah alat dalam mereproduksi kesenjangan tersebut, sehingga bahasa bukan hanya merupakan alat komunikasi, tetapi juga media dominasi dan kekuatan sosial. Bahasa memberikan legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat serta media untuk menanamkan ideologi. Pemilihan dan penggunaan kata-kata tertentu dalam komunikasi sosial dapat menunjukkan adanya kekuasaan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial dapat menunjukkan hubungan kekuasaan (Warsono, 2002: 35-36).

Bahasa juga memperoleh perhatian serius Antonio Gramsci. Dalam pandangannya, tindakan manusia, termasuk tindakan politik, dilakukan dengan menggunakan bahasa. Dalam kenyataannya bahasa tidak lagi hanya sebagai alat dan medium yang netral untuk menjelaskan realitas sosial, tetapi bahasa juga tampil sebagai representasi dari berbagai macam kuasa. Dalam komunikasi sosial, bahasa adalah alat kekuasaan dalam mereproduksi kesenjangan sosial. Bahasa

juga sebagai salah satu ruang tempat terjadinya konflik berbagai kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni dan hegemoni tandingan (*counter hegemony*). Pandangan Gramsci di atas dipertegas Foucault (1972: 216) bahwa bahasa sebagai “wacana” tidak pernah netral. Menurutnya “Language as a discourse is never neutral and is always laden with rules, privileging a particular group of knowledge while excluding others”.

Dalam konsep hegemoni Gramsci, penanaman ideologi secara terus-menerus untuk menghasilkan kepemimpinan (dominasi) intelektual dan moral dilakukan lewat bahasa, terutama bahasa lokal. Menurut Rakhmat (1996: 50) ideologi adalah serangkaian preferensi yang dimiliki bersama oleh komunitas politik. Karena ideologi itu “*socially shared*”, maka ia pasti terbentuk melalui proses sosial. Ia harus dirumuskan secara jelas oleh elit intelektual dan disebarluaskan kepada anggotanya. Dalam perumusan dan penyebaran ideologi tersebut, peranan bahasa sangat menentukan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa. Dengan ideologi, orang memaknai sebuah realitas. Untuk memudahkan penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan, dan penyimpanan makna diperlukan bahasa. Pada gilirannya, bahasa tertentu---yang ditampakkan pada pemilihan kata dan kalimat---membentuk realitas sosial tertentu.

Selain itu, menurut Gramsci setiap bahasa mengandung unsur-unsur budaya dan filosofi yang dipahami dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahasa sebagai simbol di dalamnya mengandung makna dan nilai-nilai kultural, yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat pemakainya. Dengan demikian,



penggunaan bahasa “lokal” untuk menanamkan ideologi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Itu sebabnya para pemimpin Indonesia pasca-kemerdekaan sangat aktif memproduksi idiom-idiom lokal untuk menanamkan ideologi politiknya.

### 3. Kajian Wacana Politik

Terlepas dari afiliasi politiknya, sebagian besar tindakan manusia, termasuk tindakan-tindakan politiknya, dilakukan lewat dan dipengaruhi oleh penggunaan dan artikulasi kebahasaan (Hikam, 1996: 77). Karena itu, sangat wajar menurut dia bila bahasa menempati posisi penting dalam telaah ilmu-ilmu sosial. Khususnya dalam telaah politik, maka akhir-akhir ini pemahaman lewat wacana bahasa (*discourse*) semakin diakui pentingnya, terutama setelah munculnya pascamodernisme dan pascastrukturalisme dalam lapangan filsafat dan epistemologi modern.

Bahasa dan praktik kebahasaan tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan sosial dan politik. Namun semakin disadari bahwa bahasa, di dalam dirinya, tampil sebagai representasi dari *deployment* (pagelaran) berbagai macam kekuatan. Oleh karena itu, bahasa lantas dilihat pula sebagai salah satu *space* (ruang) di mana konflik berbagai kepentingan, kekuatan, proses hegemoni dan *counter-hegemony* (hegemoni tanding) terjadi (Hikam, 1996: 77).

Untuk kepentingan kajian politik, analisis wacana mengkaji makna ideologis dalam suatu teks yang berkaitan dengan hubungan dominasi dari suatu kelompok/kelas atau suatu lembaga atas kelompok/kelas atau lembaga lainnya. Menurut van Dijk (1985: 43-44; dan Stubbs, 1983: 30) fokus analisis wacana

politik adalah makna ideologis dalam suatu teks, yaitu studi mengenai cara-cara bagaimana makna tersebut digunakan untuk membenarkan hubungan dominasi melalui bahasa. Karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Harbermas bahwa bahasa juga berfungsi sebagai media dominasi dan kekuasaan sosial, serta membantu melegitimasi kekuasaan (Warsono, 2002: 38).

Malah dalam pandangan Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995), wacana politik tidak hanya terfokus pada bagaimana dan apa makna ideologis yang terkandung dalam teks sebagaimana dikemukakan van Dijk (1985), tetapi juga terutama sekali mengkaji bagaimana kekuasaan disalahgunakan, atau bagaimana dominasi dan ketidakadilan dijalankan dan diproduksi melalui teks (bahasa) dalam sebuah konteks sosial politik. Dengan demikian, kajian wacana politik tidak dipusatkan pada kebenaran/ketidakbenaran struktur tata bahasa, tetapi lebih pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dipandang sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

Bahasa juga tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri pembicara, tetapi bahasa merupakan representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Dengan demikian, dalam kajian wacana politik bahasa dipandang selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Fairclough (1995), setiap wacana---baik lisan maupun tulis---, dipandang sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektik di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Dengan demikian, praktik wacana bisa menampilkan efek ideologi: ia dapat memroduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas, yang berkuasa dan tidak berkuasa yang kesemuanya menurut Fairclough dan Wodak (1997) ditampilkan melalui bahasa.

Melalui bahasa, situasi dan kehidupan di masyarakat yang tidak stabil dan kacau bisa digambarkan menjadi sesuatu yang menyenangkan seolah tidak terjadi apa-apa. Sebagai realitas simbolik, bahasa memang bisa mengungkap realitas samar-samar menjadi jelas, tetapi pada saat yang sama bisa menyembunyikannya erat-erat sesuai maksud penggunaannya (Rahardjo, 2001: 9). Kajian wacana politik, dengan demikian, memandang bahasa sebagai faktor penting untuk melihat bagaimana praktik dan ketimpangan kekuasaan antarkelompok atau antarindividu terjadi, baik berupa pertikaian, persaingan, maupun konflik. Karena itu, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi dan sebagainya. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

Dalam kajian politik, setiap wacana yang muncul tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan

kekuasaan. Wacana merupakan arena berlangsungnya kekuasaan. Melalui wacana terlihat jelas siapa mendominasi siapa, dengan maksud apa, dan jenis kekuasaan apa yang beroperasi serta melalui apa kekuasaan dijalankan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konsep kekuasaan merupakan salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat, seperti laki-laki dalam wacana mengenai seksisme, kekuasaan kulit putih terhadap kulit hitam mengenai wacana rasisme, kekuasaan penguasa terhadap rakyat mengenai wacana dominasi dan sebagainya. Implikasinya adalah wacana selalu dihubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Foucault (1972) menyebutnya hubungan demikian sebagai relasi kekuasaan (*power relation*), bahwa di balik pengucapan atau pengungkapan terdapat kekuasaan tertentu yang beroperasi yang menentukan eksistensi dan bentuknya.

Dalam relasi kekuasaan tersebut, menurut Foucault (1972), orang atau sekelompok orang mengontrol orang atau kelompok orang lain. Kontrol di sini tidak harus secara fisik dan langsung, melainkan secara mental atau psikis lewat wacana. Kelompok yang dominan membuat kelompok lain bertindak seperti yang diinginkan olehnya, karena kelompok yang dominan lebih memiliki akses berupa pengetahuan, kekuasaan, ekonomi, dan sebagainya ketimbang kelompok yang didominasi.

Bentuk kontrol terhadap wacana pun bisa bermacam-macam, bisa berbentuk kontrol atas konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapa yang boleh dan harus berbicara dan siapa yang hanya mendengar saja. Dalam wacana politik akan tampak sangat jelas bahwa politisi yang memiliki kekuasaan politik

kuat akan menentukan dan mengontrol struktur wacana politik yang diproduksi. Melalui penonjolan pemakaian kata-kata dan ungkapan tertentu akan dilihat besar dan jenis kekuasaan yang beroperasi (Eriyanto, 2001: 12). Hal ini mempertegas pernyataan Habermas (1990: 18) bahwa “language is a medium of domination and a social power, it serves to legitimate relations of organized force...language is also ideological”. Artinya, menurut Habermas, bahasa tidak hanya memunculkan bias dan kepentingan untuk terjadinya distorsi pseudo komunikasi, tetapi juga membawa unsur dominasi dan paksaan-paksaan (Nasir, 2004: 35).

Sejalan dengan Habermas, Vedung sebagaimana dikutip Riga A. Suprpto (2002: 87) menyatakan “manipulation of language occurs in all contexts in all countries, but the dictatorship tends to be particularly systematic in these machinations”

Kajian Riga A. Suprpto (2002: 87) tentang tali-temali wacana politik dengan penggunaan bahasa (Indonesia) menemukan bahwa bahasa merupakan salah satu mesin penyangga kekuatan sebuah rejim penguasa dengan motivasi dan tujuan politik tertentu. Misalnya, pada masa Indonesia menjelang kemerdekaan ditandai oleh kesibukan mendewasakan bahasa Indonesia dalam kancah politik dengan menciptakan istilah-istilah baru agar dapat mengomunikasikan gagasan-gagasan politik.

Memasuki kemerdekaan, Soekarno terus-menerus melakukan eksperimentasi dengan bahasa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa politik dan makin menjauhkan bahasa Indonesia dari kata-kata ‘pinjaman’ dari bahasa Belanda. Pada saat yang sama, Soekarno memproduksi

istilah-istilah yang bernafaskan ‘revolusi’ seperti ‘ganyang’, ‘antek-antek’, ‘merdeka atau mati’ dan sebagainya. Hooker (1996) menyebut bahasa Soekarno menunjukkan kekuatan karismatik dirinya atas rakyat. Selain itu, bahasa Soekarno menunjukkan kekuatan berbahasa lisannya yang sangat kuat.

Berbeda dengan rejim sebelumnya, rejim Orde Baru dengan Soeharto sebagai penguasanya membangun politik bahasa Indonesia dengan wacana militeristik yang sangat menekankan pada kebijakan yang bersifat ‘*command and control*’. Wacana politik Soeharto menunjukkan struktur negara birokrasi yang berbentuk hubungan ‘*patron-client*’ dengan paradigma ‘pembangunanisme’. Kebenaran mutlak berada pada patron; patron dianggap sebagai ‘maha tahu’ dan selalu memiliki ‘jawaban’ pasti atas setiap permasalahan. Di sini negara memerlukan dukungan ‘teknokrat’ sebagai para ahli. Segala sesuatu diolah dan diproduksi oleh para teknokrat dan hasilnya disampaikan kepada rakyat untuk dijalankan.

Riga A. Suprpto (2002: 98) menyebutkan Soeharto lebih piawai daripada Soekarno dalam menggunakan mesin birokrasi untuk menginstitusikan kehendak politiknya. Jika Soekarno cenderung menggunakan massa dan rakyat untuk mendukung kehendak politiknya sehingga orasi sangat penting dalam pemerintahannya dan bertopang pada manipulasi kekuatan bahasa, maka Soeharto sebaliknya bertopang pada kekuatan birokrasi. Semua bentuk kegiatan harus dilegalisir sampai tingkat terbawah dalam bentuk Keppres, Inpres, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang dan sebagainya, sehingga birokratisasi menjadi pembeda tindakan politik Pemerintah.

Dari dua contoh di atas, sebagaimana dinyatakan Rakhmat (1996: 50) bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap rejim penguasa melahirkan struktur wacananya masing-masing sesuai dengan ideologi yang dikembangkan. Oleh karena itu, dalam kajian wacana politik permasalahan yang penting bukan saja mengungkap bagaimana suatu peristiwa politik dipahami maknanya, lewat kode-kode linguistik yang tersembunyi, tetapi juga mengungkap permasalahan jenis kekuasaan apa yang beroperasi di balik wacana dan apa efek yang diakibatkan olehnya. Bentuk dan jenis kekuasaan yang berbeda melahirkan wacana yang berbeda pula.

## **F. *State of the Arts* Kajian Terkait**

### **1. Beberapa Kajian Terkait**

Iedema dan Wodak (1999: 1) menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir studi wacana telah menarik perhatian para pakar ilmu sosial, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Jurnal *Discourse & Society* (1999: 6) memuat hasil studi wacana politik yang dilakukan Strachle, Muntigl, Wodak, Sedlak dan Weiss mengenai pidato-pidato politik para pemimpin Uni Eropa tentang upaya penyelesaian pengangguran yang melanda kawasan itu. Studi ini menemukan bahwa logika semiotika dan metafor sangat menentukan keberhasilan perjuangan politik (*political struggle*). Menurut Chilton (1996: 74) dalam wacana politik metafor memiliki banyak manfaat, antara lain untuk persuasi, legitimasi, solidaritas kelompok, dan untuk memroduksi konsep-konsep baru tentang masalah yang dihadapi. Selain itu, metafor dipakai untuk menjelaskan hal-hal

yang sangat rumit menjadi sederhana dan untuk membangkitkan emosi dan mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks diplomasi dan politik, metafor digunakan untuk menghindarkan rujukan langsung yang bisa merugikan individu. Dalam perspektif linguistik, metafor digunakan untuk mengkonstruksi dan merefleksi dunia sosial (Lakoff and Johnson, 1980). Dalam perspektif wacana politik dan kebijakan politik, metafor dipandang sebagai ekspresi kekuasaan di mana sebuah realitas didefinisikan. Dari kajian ini disimpulkan bahwa pengangguran sebagai isu politik tidak hanya diselesaikan dari pendekatan ekonomi semata, tetapi juga linguistik dengan menggunakan metafor di mana suatu konsep dipahami lewat konsep lain.

Sebelumnya, Wodak (1990) pernah melakukan studi wacana politik di Austria. Dalam kajiannya Wodak menemukan retorika anti-semitik, sistem kepercayaan anti-semitik dan persoalan populasi serta rasisme sebagai aspek-aspek dominan yang membentuk wacana politik Austria. Karena itu, memahami sebuah wacana politik diperlukan pengetahuan eksternal yang berlangsung di masyarakat. Temuan Wodak ini paralel dengan tesis Alvesson (2000) mengenai lingkaran hermeneutika bahwa untuk memahami suatu wacana diperlukan pengetahuan mengenai konteks di luar wacana tersebut. Karena itu, dipertegas oleh Wodak bahwa studi wacana merupakan studi interdisipliner.

Jika Wodak dan kawan-kawan melakukan studi wacana politik dalam hubungannya dengan konteks lokal, maka Kelly (1997) menghubungkan wacana politik dengan konteks global dengan mengambil kasus di Filipina di era Presiden Fidel Ramos dengan pendekatan analisis isi. Menurut Kelly, globalisasi



tidak saja melahirkan seperangkat proses yang bersifat material, tetapi juga wacana politik yang dipakai penguasa untuk melegitimasi kekuasaan. Kelly menyatakan istilah globalisasi, sistem global dan sebagainya akhirnya merupakan terminologi politik yang dipakai secara luas oleh para politisi, akademisi, dan media, tetapi tidak mengacu kepada persoalan material. Oleh para elit politik Filipina, terminologi tersebut digunakan untuk melegitimasi kekuasaan atau melakukan perjuangan politik (baca: mengegolkan kebijakan) dengan merujuk ke pengalaman-pengalaman masyarakat global, seperti kebijakan perdagangan bebas, dan strategi berbasis investasi asing, ekspor kebutuhan pokok, produk barang-barang industri, dan tenaga kerja. Dengan demikian, globalisasi merupakan konstruksi sosial yang dipakai penguasa sebagai metafor untuk memahami, menjelaskan, dan melegitimasi kekuasaan.

Temuan Kelly mempertegas studi sebelumnya yang dilakukan oleh Leslie (1995), McHuffie (1997), dan Mattelart (1994) yang menemukan bahwa terminologi globalisasi sebagai konstruksi sosial telah dipakai bukan hanya dalam wacana politik, tetapi juga dalam strategi bisnis dan periklanan.

Sementara Heinen dan Krasuska (1989) pernah melakukan studi wacana politik dikaitkan dengan aspek-aspek sosial dan medis praktik aborsi di Polandia. Dengan mewancarai 30 orang ahli dari berbagai latar belakang---yang separo setuju aborsi dan sisanya menolak dan semuanya aktif dalam menyusun rancangan undang-undang aborsi---, Heinen menemukan bahwa wacana politik tentang undang-undang aborsi itu sangat sarat dengan manipulasi makna kata (*semantic manipulation*) dengan menghilangkan kata-kata netral dan

menggantinya dengan sinonim yang bagus, dan redefinisi kata-kata kunci. Dari studi ini, dapat disimpulkan bahwa wacana politik dibentuk bukan hanya melalui argumentasi ilmiah, tetapi juga religius dan ideologis. Selain itu, secara linguistik wacana dibentuk melalui penggunaan istilah-istilah yang dipilih secara cermat, dan manipulasi kata dengan teknik eliminasi, seleksi, negasi, ilustrasi dan minimisasi.

Kajian wacana politik dengan menggunakan teks lisan sebagai data dilakukan oleh Blum-Kulka, Blondheim, dan Hachohen (2002) di Israel dengan menggunakan perspektif pragmatik-historis. Studi wacana ini dilakukan dengan membandingkan teks peristiwa-peristiwa politik mutakhir dengan peristiwa politik klasik. Sebagaimana dinyatakan Blum-Kulka, perdebatan politik Israel yang menghasilkan wacana politik berlangsung sangat keras dan konfrontatif. Menurut Blum-Kulka, selain menggambarkan budaya masyarakatnya, debat politik adalah representasi dari keadaan dan kehidupan masyarakat Israel yang sulit. Salah satu temuan studi ini adalah perdebatan politik para politisi Israel diwarnai oleh kompleksitas permainan logika dan gramatika yang sangat tinggi.

Secara terpisah studi wacana politik dikaitkan dengan persoalan rasial khususnya warga kulit hitam Amerika pernah dilakukan oleh Grant dan Orr (1996). Dengan menggunakan perspektif historis-psikologis, studi ini menemukan bahwa perubahan nama dari “Black” menjadi “African-American” ternyata memiliki implikasi sosial, politis, dan psikologis yang sangat luas. Perubahan tersebut tidak sekadar persoalan linguistik semata, melainkan masalah politik yang akhirnya membentuk wacana politik. Secara politis, pergeseran istilah dari

“Black” menjadi “African-American” berimplikasi terhadap perubahan persoalan rasial ke persoalan etnik.

Bagi warga kulit hitam, sebagaimana diakui tokoh kulit hitam Jessie Jackson, perubahan istilah tersebut mengandung arti kultural yang sangat dalam dan bisa mengurangi beberapa konotasi negatif yang selama ini menempel pada istilah “Black”, seperti malas, apatis, bodoh, miskin, tak terdidik dan sebagainya. Temuan studi ini mempertegas teori Berger (1967) bahwa realitas, termasuk di dalamnya realitas politik, bukan sesuatu yang objektif, melainkan hasil konstruksi bahkan rekonstruksi melalui bahasa. Pergantian istilah tersebut ternyata dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memperbaiki perilaku warga kulit hitam di masyarakat.

Terkait dengan pilihan bahasa, studi wacana politik pernah dilakukan oleh Edwards (1986) mengenai bentuk wacana politik tokoh politik sebelum dan sesudah kebijakan politik diambil. Studi dilakukan pada masa kepresidenan Ronald Reagan. Dengan menggunakan analisis isi, Edwards menemukan bahwa ada perbedaan sangat mencolok pada pilihan kata pidato politik sebelum dan sesudah kebijakan politik diambil. Karena itu, terdapat hubungan sangat erat antara tipe bahasa yang dipakai dengan konteks atau situasi di mana bahasa tersebut dipakai.

Studi sangat mendalam tentang wacana politik dan bahasa dilakukan oleh Oduori (2002) di Kenya. Menurut Oduori, masyarakat Kenya yang secara umum berpendidikan rendah, miskin, terbelakang, banyak yang buta huruf dimanfaatkan oleh para pemimpin politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka melalui

politik makna. Menyadari kondisi sosial masyarakat seperti itu, para pemimpin politik memilih terminologi-terminologi khusus dan memanipulasi maknanya untuk mempertahankan status *quo*. Misalnya, tema-tema tentang perubahan, demokratisasi, multipartai, demonstrasi, kedamaian dan sebagainya sebagai implikasi langsung dari transformasi politik diambangkan maknanya sehingga masyarakat tidak begitu mengerti makna sesungguhnya, sehingga tuntutan transformasi politik berhenti. Menurut Oduori, bahasa menjadi salah satu penyebab kemandekan transformasi politik Kenya. Secara longgar, Oduori (2002: 437) menyatakan gambaran politik di Kenya tersebut juga terjadi di negara-negara belahan Afrika yang lain seperti Tanzania di bawah rejim J. Nyerere.

Sementara kajian tentang “wacana dan kekuasaan” yang dilakukan Fairclough (1989) menemukan bahwa ada dua model beroperasinya kekuasaan lewat wacana: (1) kekuasaan “dalam” wacana dan (2) kekuasaan “di belakang” wacana. Kekuasaan “dalam” wacana berkenaan dengan wacana sebagai “arena” relasi-relasi kekuasaan dan diperankan secara aktual. Sedangkan kekuasaan “di belakang” wacana menitikberatkan pada bagaimana urutan-urutan wacana sebagai arena diskursif sosial. Dalam pandangan Fairclough, kekuasaan tidak selalu dipegang oleh satu orang atau kelompok sosial tertentu karena kekuasaan hanya dapat diperoleh dan dijalankan lewat perjuangan sosial.

Temuan Fairclough tersebut relevan dengan kajian Fowler (1985) bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang alamiah, tetapi artifisial dan harus diperjuangkan. Dengan demikian, kekuasaan “dalam” wacana berarti bahwa wacana adalah arena perjuangan (*an arena of struggle*), sedangkan kekuasaan “di belakang” wacana

berarti bahwa wacana adalah sesuatu yang dipertaruhkan dalam perjuangan politik. Keberhasilan membentuk wacana sangat menentukan keberhasilan perjuangan politik.

Masih dalam konteks hubungan bahasa dan kekuasaan, sebelumnya de Kadt (1993) (dalam Hayashi dan Hayashi, 1995: 199) yang mengkaji tentang “bahasa, kekuasaan, dan emansipasi di Afrika Selatan” menemukan ada dua jenis kekuasaan yang dimanifestasikan dalam bahasa: (1) kekuasaan yang jelas (*the overt power*) dan (2) kekuasaan yang samar (*the covert power*). Studi Santoso (2001: 68) menjelaskan lebih lanjut bahwa kekuasaan yang jelas dibagi menjadi dua sub tipe, yakni (a) kekuasaan pragmatis (*the pragmatic power*) dan (b) kekuasaan simbolis (*the symbolic power*). Kekuasaan pragmatis bahasa didasarkan pada dominasi komunikatif dan urusan pragmatis dari kaidah wacana, yakni *who speaks what, to whom, in what situation, in what ways, and with what linguistic codes*. Tipe kekuasaan seperti ini berasal dari struktur sosial hirarkhis yang menentukan peran dan status seseorang dan melibatkan bentuk “konstitutif” bahasa.

## 2. Studi Wacana Politik di Indonesia

Realitas sosial politik di Indonesia sudah banyak memperoleh perhatian para ahli melalui berbagai pendekatan. Melalui beragam pendekatan, Studi Kahin (1952) tentang diskursus nasionalisme dan revolusi Indonesia, yang merupakan karya penting pertama orang Amerika tentang Indonesia, menemukan antara lain bahwa tumbuhnya kesadaran politik nasional adalah akibat kebijakan pendidikan

kolonial Belanda. Selain itu, Kahin menemukan bahwa realitas sosial politik Indonesia tak bisa dihindari merupakan gambaran wilayah kontrol sosial politik Hindia Belanda

Studi Kahin tersebut menarik Feith (1962) untuk melihat diskursus Pan-Indonesia. Melalui pendekatan historis, Feith menemukan bahwa rintangan etnis merupakan hambatan besar mewujudkan negara bangsa Indonesia. Selain itu, Feith melihat bahwa kondisi geografis justru merupakan faktor penting dalam perkembangan sejarah nasionalisme Indonesia.

Diskursus tentang keindonesiaan ternyata mengundang perhatian ahli lain, seperti Crouch. Melihat wacana politik dari sisi lain, yakni militer dan politik di Indonesia, Studi Crouch (1978) menemukan bahwa persaingan politik di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh kultur dan tradisi lokal, khususnya Jawa. Karena itu, kultur dan tradisi sekaligus merupakan medan yang diperebutkan oleh para politisi Indonesia.

Jika studi Kahin (1952), Feith (1962) dan Crouch (1978) tentang wacana politik Indonesia mengasumsikan gabungan dari ekonomi, politik, budaya dan struktur negara sebagai hal yang menentukan beroperasinya kekuasaan, maka studi Anderson (1972) melihat secara berbeda. Dengan menggunakan perspektif hermeneutika dan memfokuskan kajiannya pada konsep kekuasaan dalam kosmologi Jawa, Anderson menemukan perbedaan yang mencolok antara konsep kekuasaan dalam tradisi Jawa dan Barat. Berbeda dengan konsep modern tentang kekuasaan, dalam tradisi Jawa kekuasaan bersifat homogen, konkret, dan konstan dalam keseluruhan dan tidak berimplikasi moral.

Sebaliknya, dalam tradisi Barat kekuasaan merupakan abstraksi yang dideduksi dari pola-pola interaksi sosial yang diamati, berasal dari sumber heterogen dan secara inheren tidak membatasi diri dan secara moral bersifat ambigu. Secara lebih tegas Anderson menyatakan bahwa konsep tentang kekuasaan Jawa yang abstrak memberikan pengaruh sangat dalam pada wacana politik Indonesia. Bagi para pengkritik, kajian Anderson justru melanggengkan perbedaan antara 'Jawa' dan 'Barat', antara 'tradisional' dan 'modern'. Namun demikian, meski tidak diterima secara universal, karya Anderson merupakan referensi sangat berharga bagi berbagai kajian tentang diskursus politik Indonesia.

Selain mengkaji tentang konsep kuasa dalam tradisi Jawa dan membandingkannya dengan konsep Barat, Anderson (1966) (dalam Hooker, 1996: 59) juga pernah melakukan kajian mendalam tentang bahasa (Indonesia) dalam wacana politik Indonesia. Karya Anderson "The Language of Indonesian Politics" merupakan salah satu karya yang pertama kali mengkaji tentang bahasa politik Indonesia dan sampai sekarang menjadi model untuk menjelaskan alam pikiran Indonesia kontemporer melalui analisis pemakaian, penyebaran, dan perkembangan historis dari istilah-istilah yang dianggap krusial.

Kajian Anderson diteruskan oleh Michael van Langenberg dengan mengidentifikasi 40 kata kunci yang mengekspresikan ideologi Orde Baru di seputar masalah kekuasaan, akumulasi, legitimasi, budaya, dan penentangannya. Wacana yang menginformasikan 40 kata kunci Orde Baru mengartikulasikan suatu bentuk negara yang bersifat otoriter, berketuhanan, berlandaskan hukum,

berdasarkan undang-undang dan mengalami perubahan struktural besar-besaran (Hooker, 1996: 59).

Belakangan kajian mengenai wacana politik Indonesia sudah memperoleh perhatian secara serius dari intelektual Indonesia sendiri seperti Ariel Heryanto (1993) mengenai wacana negara dan Daniel T. Sparringa (1997) tentang peranan intelektual dalam wacana politik dan demokrasi di Indonesia era Orde Baru. Dengan menggunakan pendekatan behaviorisme, studi Heryanto menemukan bahwa wacana developmentalisme yang dikembangkan oleh rejim Orde Baru yang sangat hegemonik dianggap telah menghancurkan hampir seluruh sendi-sendi dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks wacana komunisme nyata sekali negara Orde Baru mempunyai akses yang luar biasa besarnya dalam menjangkau khalayak. Secara efektif, Orde Baru berhasil menggunakan perangkat-perangkat kekuasaannya (institusi kebudayaan, pendidikan, ekonomi, agama, politik, militer, dan lain-lain) untuk terus-menerus mengkampanyekan ideologi antikomunis dalam berbagai sektor dan tingkatan sosial. Dengan kekuasaannya yang tak terbantahkan, rejim Orde Baru secara reguler dan sistematis memproduksi versi pengetahuannya tentang komunis atau komunisme sebagai ideologi anti Tuhan, penentang agama, pemberontak, pengkhianat bangsa, pembuat onar, pemburuh berdarah dingin dan gambaran-gambaran negatif lainnya. Penerimaan masyarakat atas versi pengetahuan negara ini tak jarang diwarnai dengan praktik kekerasan seperti intimidasi, stigmatisasi, teror, bahkan kekerasan fisik oleh unsur aparaturnegara dan militer. Wacana alternatif mengenai komunisme di luar yang digariskan



negara Orde Baru bukan hanya tidak muncul, tetapi juga dilarang dan bahkan dianggap subversif.

Sementara itu, studi Sparringa (1997) tentang peranan dan posisi intelektual dalam wacana demokrasi di Indonesia dengan menggunakan metode etnografi dengan perspektif konsep ideologi Marx, teori hegemoni Gramsci, wacana kekuasaan/pengetahuan Foucault, Orientalisme Said, dan pola hegemoni Foulcher, mengemukakan bahwa secara umum terdapat tiga macam kelompok intelektual di Indonesia; kelompok Ortodok yang mendukung wacana resmi negara, kelompok Revisionis, merupakan kelompok dengan jumlah terbesar, yang mendukung tetapi juga mempertanyakan beberapa persoalan wacana negara, dan kelompok Oposisi yang terang-terangan menentang wacana resmi negara dengan memberikan wacana alternatif sebagai cara pemecahan masalah.

Menyangkut peran intelektual dalam pemberdayaan masyarakat sipil, studi ini menemukan pesimisme bahwa intelektual dapat melakukan terobosan secara cepat dan berperan secara signifikan dalam membangun wacana demokrasi di Indonesia. Namun demikian, Sparringa juga menemukan ada sekelompok elit intelektual Indonesia yang bisa menjembatani intelektual Orde Baru dan intelektual muda untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis.

Studi paling akhir mengenai wacana politik dilakukan oleh Warsono (2002) dengan fokus pada sikap politik kiai NU era Abdurrahman Wahid dalam menghadapi dominasi negara. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana, Warsono menemukan bahwa tidak semua kiai bertindak sebagai intelektual organik untuk mempertahankan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Ada sekelompok kiai yang bertindak selaku intelektual tradisional, ada kiai yang tetap menjalankan peran profetik, tetapi ada pula kiai yang bertindak sebagai intelektual organik dan tradisional sekaligus. Menurut Warsono, perbedaan tersebut karena beragamnya motivasi masing-masing kelompok kiai terkait dengan kekuasaan negara. Tak bisa dihindari variasi fungsi dan motivasi kiai tersebut akhirnya berpengaruh pada wacana politik yang dikembangkan oleh masing-masing kiai.

Sebelumnya, studi wacana politik dan pilihan bahasa (Indonesia) elit politik dalam wacana politik di Indonesia dilakukan oleh Santoso (2001) yang menemukan bahwa dalam membangun wacana politik---baik lisan maupun tulis---elit politik menggunakan tiga macam fitur linguistik, yakni fitur pengalaman, fitur relasi, dan fitur ekspresif.

Secara metodologis, yakni dengan menggunakan perspektif hermeneutika, ada beberapa studi yang memiliki kesamaan yang dapat disebutkan di sini, antara lain oleh Poespoprodjo (1985) tentang Relevansi dan Perspektif Hermeneutika Filsafati bagi Kebudayaan Indonesia, Komaruddin Hidayat (1996) mengenai Bahasa Agama dalam Kajian Hermeneutika, Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim (1998) tentang Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, Jalaluddin Rakhmat dengan Pendekatan Hermeneutika Sosial, Sam Mukhtar Chanisgo (2000) tentang Bahasa dalam Diskursus Kebijakan Publik: Sebuah Kajian Hermeneutika Historis terhadap Teks Dokumen Kebijakan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) semasa Rejim Orde Baru,

1974-1982, dan Fakhruddin Faiz (2002) tentang Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi sekaligus sebagai *state of the arts* studi ini.

Apa yang bisa dipetik dari berbagai kajian tentang wacana politik di Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas adalah dominasi perspektif negara dalam wacana sejarah Indonesia dapat dijelaskan bahwa setiap rejim pada dasarnya berkepentingan untuk melestarikan kekuasaannya. Dalam rangka itu, mereka selalu berusaha memanfaatkan wacana resmi negara untuk menjaga legitimasi kekuasaannya, serta sebaliknya mendeligitimasi pihak-pihak yang menghendaki perubahan kekuasaan. Hal ini bisa dilihat pada studi Leigh (1991) yang mengkaji buku *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka* berisikan konstruksi sejarah yang sangat *legitimate* tentang Soeharto dan Orde Baru. Menurut Leigh, buku tersebut sarat dengan konstruksi yang sangat mendiskreditkan Soekarno dan tak sedikitpun mengungkap kontribusi-kontribusi positif Soekarno dalam sejarah Indonesia. Orde Lama digambarkan sebagai sebuah tatanan sistem politik yang kacau balau dan penuh penyelewengan. Sebaliknya, Orde Baru diidentikkan sebagai sistem politik yang meluruskan perjuangan sejarah bangsa yang telah diselewengkan Orde Lama dan bersih dari tindak korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemborosan dan lain-lain.

Kajian Leigh (1991) tersebut sekaligus mempertegas kajian-kajian wacana politik yang lain bahwa politik wacana merupakan strategi politik yang sangat efektif bagi kelangsungan suatu rejim penguasa. Sebagai akhir dari uraian wacana politik di atas, khususnya bagaimana kekuasaan beroperasi dalam wacana, bisa dikemukakan bahwa kajian wacana politik bukan saja mengungkap bagaimana

sebuah peristiwa politik dipahami maknanya, tetapi juga jenis kekuasaan apa yang beroperasi di baliknya dan efek apa yang dihasilkannya. Dengan demikian, kajian wacana (*discourse*) tidak dapat disamakan dengan kajian bahasa dan semiotika. Sebab, sebagaimana dinyatakan Piliang (1999: 58), bahwa kajian bahasa tidak akan mampu menyingkap masalah ‘kekuasaan’ dan relasi diskursif lainnya, karena ia bergerak pada struktur kalimat, pilihan kosa kata, jenis, variasi bahasa dan sebagainya.

### 3. Posisi dan Keaslian Penelitian

Dari hasil pelacakan secara intensif terhadap berbagai kajian mengenai wacana sebelumnya, baik secara substantif maupun formal, sejauh ini belum ditemukan kajian wacana politik dengan pendekatan kebahasaan melalui perspektif hermeneutika, apalagi Gadamerian. Kendati telah ada beberapa kajian lewat pendekatan hermeneutika sebagaimana dipaparkan, semuanya menggunakan perspektif hermeneutika Intensionalisme atau Hirschian, bukan Gadamerian. Jadi, semua kajian belum menempatkan hermeneutika sebagai pespektif yang relevan bagi kajian ilmu-ilmu sosial. Potensi tersebut menjadi kekhususan penelitian ini. Karena itu, selain untuk memperkaya kajian-kajian sejenis sebelumnya penelitian ini diharapkan menjadi varian lain kajian politik.

Tabel berikut memaparkan posisi penelitian ini dalam deretan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya.

Tabel 2.1. Tabel Kajian Wacana Politik

No	Peneliti dan tahun terbit	Tema dan Tempat Penelitian	Variabel Penelitian	Pendekatan dan Lingkup Penelitian	Temuan Penelitian
1	2	3	4	5	6
1	Strachle, dkk (1999)	Pidato Politik dan Isu Pengangguran di Eropa	-Konsep perjuangan - Kehidupan sosial dan manifestasinya dalam wacana	Kualitatif/ Interdisipliner/mikro	Logika semiotika dan metafora pidato politik menyumbang besar dalam keberhasilan perjuangan politiki
2	Wodak (1990)	Wacana politik di Austria	-Retorika anti-Semetik - Sistem kepercayaan anti-Semetik - Populasi dan rasisme	Kualitatif/ Historis/ Mikro	Retorika dan prasangka anti-Semetik, rasisme dan masalah kependudukan masih dominan dalam wacana politik Austria
3	Leigh (1991)	Konstruksi Sejarah Orde Lama dan Orde Baru	-Deligitimasi Kekuasaan Orde Lama -Legitimasi Kekuasaan Orde Baru	Kualitatif/ Historis/ Interpretif Mikro	-Orde Baru mengembangkan wacana sejarah penuh penyelewengan Orde Lama sebagai piranti legitimasi kekuasaan
4	Kelly (1997)	Wacana politik dalam konteks global di Filipina	-Konsep globalisasi -Kebijakan ekonomi - Tenaga Kerja	Kuantitatif/ Analisis Isi/Makro	Wacana globalisasi merupakan piranti legitimasi kebijakan politik para penguasa Filipina.
5	Heinen/Krasuska (1989)	Wacana politik dan praktik aborsi di Polandia	-Undang-undang aborsi - manipulasi semantik	Kualitatif/ Diskriptif/ Mikro	Wacana politik dibentuk bukan hanya melalui argumentasi ilmiah, tetapi juga religius dan ideologis
6	Blum-Kulka, et al (2002)	Wacana politik dan budaya masyarakat Israel	-Teks-teks peristiwa politik lama dan baru - Budaya masyarakat Israel	Kualitatif/ Pragmatik/ Historis/ Mikro	Wacana politik merupakan cerminan kehidupan sosial dan budaya masyarakat
7	Grant & Orr (1996)	Wacana politik dan rasisme di Amerika	-Wacana politik dan opsi politik -bahasa dan politik -Ras dan etnik	Kualitatif/ Hitoris Psikologis/ Mikro	Perubahan sebutan 'Black' menjadi 'African-American' bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi juga masalah pembentukan wacana politik
8	Edwards (1986)	Bentuk Wacana politik sebelum dan sesudah kebi-	-Kebijakan politik presiden - Bahasa	Kuantitatif/ Analisis Isi Makro	Pilihan kata pidato politik berubah secara signifikan sejalan kebijakan politik.

		jakan diambil Presiden di Amerika	kepresidenan - Reportase Media massa		
9	Kahin (1952)	Nasionalisme dan revolusi Indonesia	-Ekonomi politik - Perubahan Sosio-Psikologis -Distorsi hubungan sosial akibat kolonialisme -Tumbuhnya kesadaran politik nasional	Kualitatif/ Historis- Interdisipliner Mikro	Identitas nasional dan realitas sosial Indonesia sebagian merupakan ciptaan dan mencerminkan wilayah kontrol kolonial Belanda.
10	Feith (1962)	Nasionalisme Pan-Indonesia	-Kegagalan demo-krasi liberal -Sejarah dan Kultur Politik -Elit sebagai unit analisis -Peran elit dlm demokrasi konstitusional	Kualitatif/ Historis Mikro	Wacana dan sejarah nasionalisme Indonesia dipengaruhi oleh persoalan etnik dan geografik.
11	Crouch (1978)	Militer dan Politik di Indonesia	-Dominasi Angkatan Darat dlm wacana politik di Indonesia -Pengaruh Kultur dan Tradisi Jawa dalam wacana politik	Kualitatif/ Historis Mikro	Wacana politik Indonesia menempatkan superioritas kelompok TNI-AD dan budaya Jawa.
12	Anderson (1972)	Kekuasaan dalam Budaya Jawa	-Makna kekuasaan dalam tradisi pemukiman Jawa tradisional -Faktor geografis dalam kajian politik	Kualitatif/ hermeneutik mikro	Ungkapan-ungkapan dalam tradisi Jawa menggambarkan wacana dan makna kekuasaan yang berciri homogen, konkret, dan konstan serta tanpa implikasi moral
13	Heryanto (1993)	Wacana politik dan terorisme negara Orde Baru	-Kekerasan politik - Kekuasaan dominatif: ide-material, budaya-kekerasan, dan konsen-koersi	Kualitatif/ Behaviorisme/ mikro	Wacana pembangunan Orde Baru menjadi pembenar politik kekerasan terhadap sebagian unsur masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan negara
14	Sparringa	Peranan	-Posisi	Kualitatif/	Tipologi kelompok

	(1997)	intelektual Indonesia dalam membangun wacana demokrasi	intelektual Indonesia - Proses pembangunan sosial di Indonesia - Negara dan masyarakat sipil	Grounded Research/ Etnografi/ Mikro	intelektual. Ortodok, pendukung wacana negara. Revisionis, mitra kritis bagi wacana negara. Oposisiionis, penentang wacana negara dan pencetus wacana alternatif.
15	De Kadt (1993)	Bahasa, Kekuasaan, dan Emansipasi di Afrika Selatan	-Kekuasaan linguistik -Bentuk wacana	Kualitatif/ Mikro	Tipologi manifestasi kekuasaan melalui bahasa: (1) kekuasaan yang jelas ( <i>the overt power</i> ) dan (2) kekuasaan yang samar ( <i>the covert power</i> ).
16	Fairclough (1989)	Wacana dan Kekuasaan di Amerika	-Relasi antara wacana dan kekuasaan -Bentuk wacana dalam kekuasaan	Kualitatif/ Mikro	Terdapat dua model beroperasinya kekuasaan lewat wacana: (1) kekuasaan “dalam” wacana dan (2) kekuasaan “di belakang” wacana.
17	Santoso (2001)	Wacana politik dan pilihan bahasa elit politik	-Variasi bahasa politik	Kualitatif kritis/Analisis Wacana kritis model Fairclough/mikro	Dalam membangun wacana politik---baik lisan maupun tulis---elit politik menggunakan tiga macam fitur linguistik, yakni fitur pengalaman, fitur relasi, dan fitur ekspresif.
18	Oduori (2002)	Bahasa dan Wacana Politik di Kenya	-Terminologi politik sebagai piranti perjuangan politik politisi Kenya	Kualitatif/ Analisis Wacana/ Mikro	-Manipulasi bahasa sebagai piranti penguasaan dan menjadi penyebab kemandekan transisi politik Kenya
19	Warsono (2002)	Wacana politik Kiai NU era Abdurrahman Wahid	-Sikap politik Kiai NU - Wacana Kiai ttg politik - Kategorisasi sikap politik kiai	Kualitatif/ Analisis Wacana Mikro	Tipologi sikap politik kiai. Kiai intelektual organik, kiai tradisional, kiai profetik, dan kiai intelektual organik tetapi tradisional.

**Tabel 1.2. Posisi Penelitian dan Temuan Terprakira**

1	2	3	4	5	6
20	Rahardjo (2003)	Bahasa dan kekuasaan: Studi Wacana Politik Abd. Wahid dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian	Makna wacana dan tindakan politik Abdurrahman Wahid	Kualitatif/ hermeneutik Gadamerian/ mikro	Makna wacana dan tindakan politik Abdurrahman Wahid sebagaimana ditafsirkan dan direaksi oleh elit politik bukan pemerintah.

### **G. Hermeneutika dan Kajian Wacana Politik**

Dalam tinjauannya tentang praktik wacana (*discursive practice*), Hikam (1999) menyebut ada dua penghampiran utama dalam kajian bahasa dan politik. Penghampiran pertama adalah empirisisme-positivisme, yang memandang bahasa sebagai refleksi kategori-kategori mental-kognitif manusia yang dianggap sebagai salah satu unsur alaminya. Berdasarkan atas cara pandang epistemologi seperti ini, maka bahasa berperan sebagai jembatan antara manusia dengan obyek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala dan distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman-pengalaman empiris. Salah satu ciri filsafat positivisme adalah pemisahan yang tegas antara pikiran dan realitas sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan analisis bahasa dan wacana, maka konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah bahwa orang tak perlu lagi untuk mengetahui makna-makna .....tif atau nilai-nilai yang mendasari setiap pernyataan. Yang penting dalam suatu analisis bahasa dan wacana adalah menentukan apakah pernyataan-pernyataan itu dilontarkan secara



benar mengikuti kaidah sintaksis dan semantis. Penafsiran (*hermeneutik*), dengan demikian, dianggap tidak relevan sebagai metoda sejauh diterima premis dasar bahwa setiap orang akan memahami statemen yang dikeluarkan secara ‘benar’ dalam arti semantis dan sintaksis. Bahasa dan wacana, menurut empirisisme-positivisme, dalam dirinya tidak dianggap kontroversial atau memiliki masalah selama ia mematuhi prasyarat-prasyarat yang ditetapkan oleh gramatika (Hikam, 1996: 78-79).

Penghampiran kedua adalah fenomenologi yang berupaya mengoreksi kegagalan empirisisme-positivis dalam memahami *locus* dan hubungannya dengan obyek dalam wacana. Dalam perspektif epistemologi ini, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas obyektif belaka dan yang terpisahkan dari sebagai penyampai beragam pernyataan. Kunci pokok kerangka kerja epistemologi fenomenologi dalam mencari perkaitan antara bahasa dan tindakan sosial adalah intertivitas, karena lewat hubungan ini pula pembentukan makna atau konstruksi sosial atas realitas terus-menerus dilakukan oleh anggota masyarakat.

Fenomenologi justru menganggap peran subjek sangat sentral dalam kegiatan-kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud (*intentionality*) tertentu dalam setiap wacana, termasuk maksud-maksud yang tidak transparan dan memerlukan interpretasi. Bahasa dan wacana, menurut pemahaman fenomenologi, justru “diatur dan dihidupkan oleh pengucapan-pengucapan yang bertujuan”. Setiap pernyataan adalah tindakan “penciptaan makna”, yakni “tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri sang pembicara” (Hikam, 1996: 80). Dengan demikian, berbahasa tidak saja bentuk ekspresi gagasan atau ide untuk disampaikan kepada orang lain, tetapi juga

ekspresi tentang diri penuturnya (*to express intention, ideas, or meanings, but also to express oneself*). Atas dasar itu, tidak berlebihan jika disebutkan bahwa cara seseorang berbahasa menggambarkan dengan jelas siapa dia sesungguhnya. Berbagai atribut sosial (pangkat, jabatan, status, kekayaan, gelar) dan lain sebagainya bisa disembunyikan rapat-rapat, tetapi tidak berbahasa. Justru, atribut sosial seseorang tergambar sangat jelas dari bahasa.

Selanjutnya terkait dengan pemahaman wacana, menurut Hikam, kunci pokok mencari kaitan antara bahasa dan tindakan sosial adalah intersubjektivitas. Sebab, lewat hubungan ini pembentukan makna, termasuk di dalamnya pembentukan kenyataan secara sosial terus menerus dilakukan oleh anggota masyarakat.

Dalam konteks studi wacana, subjektivitas dan agen tidak diragukan lagi telah menjadi pangkal utama bagi para fenomenolog sebagai pintu masuk memahami wacana sosial. Bahasa, bagi para penganut fenomenologi, bukan hanya diterima secara apa adanya (*face value*), tetapi ditanggapi sebagai perantara bagi pengungkapan-pengungkapan maksud-maksud (*intentions*) dan makna-makna (*meanings*) tertentu. Bagi mereka, wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari suatu pernyataan.

Dari pandangan itu dapat diketahui mengapa interpretasi (*hermeneutik*) sebagai metode pengungkapan makna yang terdapat dalam wacana, perilaku, dan tindakan manusia menjadi begitu penting dalam rangka mengetahui subjektivitas dan intersubjektivitas tadi. Menurut Alferd Schutz, untuk dapat memahami tindakan manusia dengan baik, kita harus memahami pula motif dasarnya dengan

cara menempatkan diri kita pada posisi sang pembicara. Pengucapan tidak dapat diterima secara apa adanya kendati barangkali ia telah memenuhi kaidah-kaidah sintaksis dan semantik. Tetapi ia masih memerlukan penafsiran-penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara.

Berbeda dengan Schutz, Geertz berpendapat memandang bahasa sebagai salah satu simbol kultural yang berfungsi memberikan orientasi, komunikasi, dan pengendalian diri kepada manusia. Dengan demikian, bagi Geertz, bahasa tidak hanya dimengerti dalam fungsi kognitif belaka, tetapi lebih penting lagi dalam kapasitas penghasil dan penghasil kembali kenyataan-kenyataan sosial. (Hikam, 1996: 81). Pendapat Geertz tentu ada benarnya, sebab dia memang seorang antropolog yang melihat segala sesuatu, termasuk bahasa dari sudut pandang budaya. Bagi Geertz, bahasa adalah inti sebuah budaya, dan sebaliknya budaya merupakan bagian dari bahasa. Oleh karenanya, tidak pernah ada peristiwa bahasa tanpa melibatkan peristiwa budaya.

Sejauh ini kajian terhadap teks memang melahirkan beragam aliran dan pendekatan. Apa yang diutarakan oleh Hikam, dengan meminjam pandangan Schultz dan Geertz di atas, sejauh mengikuti aliran pemikiran hermeneutika, dapat dikategorikan sebagai hermeneutika intensionalisme, yang lebih mengedepankan maksud dan makna sebagaimana dikehendaki oleh penutur wacana daripada maksud dan makna sebagaimana ditangkap oleh penerima wacana. Padahal, praktik wacana niscaya tidak berlangsung dalam kesendirian. Demikian pula, merupakan keniscayaan pula bahwa setiap pelaku praktik wacana --- selain sebagai penutur wacana --- adalah juga penerima wacana. Karena itu, kajian

terhadap makna sebagaimana ditangkap oleh penerima wacana yang justru menggambarkan bahwa praktik wacana berlangsung dalam situasi interaktif dan melibatkan intersubjektivitas.

Terkait dengan aliran hermeneutika yang dipandang cocok dan peka terhadap persoalan interaksi dan intersubjektivitas tersebut, berikut secara umum diuraikan perkembangan gagasan hermeneutika, beberapa varian hermeneutika dan signifikansi hermeneutika bagi kajian politik. Selanjutnya, telaah lebih rinci ditujukan pada hermeneutika Gadamerian dan penerapannya.

### 1. Konsep Dasar Hermeneutika

Hermeneutika yang dalam bahasa Inggris adalah *hermeneutics* berasal dari kata Yunani *hermeneuine* dan *hermenia* yang masing-masing berarti “menafsirkan” dan “penafsiran”. Istilah tersebut dalam berbagai bentuknya dapat dibaca dalam sejumlah literatur peninggalan Yunani Kuno seperti yang digunakan oleh Aristoteles dalam sebuah karyanya yang berjudul *Peri Hermeneias* (Tentang Penafsiran). Lebih dari itu, sebagai sebuah terminologi, hermeneutika juga bermuatan pandangan hidup (*world view*) dari para penggagasnya.

Dalam tradisi Yunani, istilah hermeneutika diasosiasikan dengan Hermes (Hermeios) seorang utusan (dewa) dalam mitologi Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan Dewa ke dalam bahasa manusia. Menurut mitos itu, Hermes bertugas menafsirkan kehendak dewata (Orakel) dengan bantuan kata-kata manusia. Hermes dianggap sebagai perantara yang bertugas menyampaikan pesan dewa kepada manusia melalui bahasa manusia.

Dengan demikian, fungsi Hermes sangat penting, sebab bila terjadi kesalah-pahaman tentang pesan dewa akan berakibat sangat fatal bagi seluruh kehidupan manusia. Untuk itu, Hermes harus mampu menginterpretasikan pesan Tuhan ke dalam bahasa pendengarnya. Sejak itu, Hermes merupakan simbol seorang duta yang dibebani dengan misi khusus. Berhasil tidaknya misi tersebut sangat tergantung pada cara bagaimana Hermes menyampaikannya dalam bahasa manusia (Bleicher, 1980: 11). Pengertian dari mitologi ini kerap kali dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-teks kitab suci yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung di dalam ayat-ayat kitab-kitab suci.

Ebeling (dlm. Grondin, 1994: 20) membuat interpretasi yang banyak dikutip mengenai proses penerjemahan yang dilakukan Hermes. Menurutnya, proses tersebut mengandung tiga makna hermeneutis yang mendasar, yaitu: (1) mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih dalam pikiran melalui kata-kata sebagai medium penyampaian; (2) menjelaskan secara rasional sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar sehingga maknanya dapat dimengerti; dan (3) menerjemahkan sesuatu bahasa yang asing ke dalam bahasa lain yang lebih dikuasai pemirsa. Tiga pengertian tersebut, akhirnya terangkum dalam pengertian “menafsirkan” (*interpreting, understanding*). Hal ini karena segala sesuatu yang masih membutuhkan pengungkapan secara lisan, penjelasan yang masuk akal, dan penerjemahan bahasa, pada dasarnya mengandung proses ‘memberi pemahaman’ atau dengan kata lain menafsirkannya.

Dengan demikian, hermeneutika merupakan “proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Sumaryono, 1999: 24). Dalam

definisi yang agak berbeda dikatakan bahwa hermeneutika sebagai suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, di mana metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang (Faiz, 2003: 9).

Istilah *hermeneutika* sebagai “ilmu tafsir” pertama kali muncul pada sekitar abad ke-17 dengan dua pengertian, yaitu hermeneutika sebagai seperangkat prinsip metodologis penafsiran dan hermeneutika sebagai penggalian filosofis dari sifat dan kondisi yang tak bisa dihindarkan dari kegiatan memahami. Carl Braathen merupakan filsuf yang mengakomodasi kedua pengertian tersebut menjadi satu dan menyatakan bahwa hermeneutika adalah “ilmu” yang merefleksikan bagaimana satu kata atau satu peristiwa di masa dan kondisi yang lalu bisa dipahami dan menjadi bermakna secara nyata di masa sekarang sekaligus mengandung aturan-aturan metodologis untuk diaplikasikan dalam penafsiran dan asumsi-asumsi metodologis dari aktivitas pemahaman (Faiz, 2003: 10).

Semula hermeneutika berkembang di kalangan gereja dan dikenal sebagai gerakan eksegesis (penafsiran teks-teks agama) dan kemudian berkembang menjadi “filsafat penafsiran” kehidupan sosial. Adalah F.D.E. Schleiermacher seorang protestan yang bertanggungjawab membawa hermeneutika dari ruang *Biblical studies* ke ruang lingkup filsafat, sehingga apa saja yang berbentuk teks bisa menjadi objek hermeneutika. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai filsuf yang membangkitkan kembali hermeneutika dan membakukannya sebagai metode interpretasi yang tidak hanya terbatas pada teks kitab suci, tetapi juga pada seni,

sastra dan sejarah. Selanjutnya, hermeneutika dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Wilhelm Dilthey yang menggagas hermeneutika sebagai landasan bagi ilmu-ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaften*), lalu Hans-Georg Gadamer yang mengembangkannya menjadi metode filsafat yang diteruskan oleh filsuf-filsuf kontemporer seperti Paul Ricoeur, Jurgen Habermas, Jacques Derrida, Foucault, Lyotard, Baudrillard dan seterusnya.

Meskipun hermeneutika bisa dipakai sebagai alat untuk “menafsirkan” berbagai bidang kajian keilmuan, maka dengan melihat sejarah kelahiran dan perkembangannya, harus diakui bahwa peran hermeneutika yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks sebagaimana dikemukakan Roger Trigg (dalam Faiz, 2003: 11):

*The paradigm for hermeneutics is the interpretation of a traditional text, where the problem must always be how we can come to understand in our own context something which was written in a radically different situation.*

Hermeneutika, sebagai sebuah metode penafsiran, tidak hanya memandang teks, tetapi hal yang tidak dapat ditinggalkannya adalah juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Lebih dari itu, ia berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison-horison yang melingkupi teks tersebut baik horison pengarang, horison pembaca, dan horison teks itu sendiri.

Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut diharapkan upaya pemahaman atau penafsiran yang dilakukan akan menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks. Selain melacak bagaimana satu teks itu dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks, sebuah aktivitas penafsiran sesungguhnya juga berusaha

melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Dengan kata lain, sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam kegiatan penafsiran, yakni *teks*, *konteks*, dan *kontekstualisasi*.

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap suatu teks keberadaan konteks di seputar teks tersebut tidak bisa dinafikan. Sebab, kontekslah yang menentukan makna teks, bagaimana teks tersebut harus dibaca, dan seberapa jauh teks tersebut harus dipahami. Teks yang sama dalam waktu yang sama dapat memiliki makna yang berbeda di mata “penafsir” yang berbeda; bahkan seorang “penafsir” yang sama sekalipun dapat memberikan pemaknaan teks yang sama secara berbeda-beda ketika ia berada dalam ruang dan waktu yang berbeda.

Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga pemahaman tentang hermeneutika yang dapat diperoleh, yaitu: *Pertama*, hermeneutika dipahami sebagai teknik praksis pemahaman atau penafsiran. Pemahaman ini lebih dekat dengan tindakan eksegesis yakni kegiatan memberi pemahaman tentang sesuatu. Kegiatan untuk mengungkapkan makna tentang sesuatu agar dapat dipahami. *Kedua*, hermeneutika dipahami sebagai sebuah metode penafsiran. Dalam konteks ini maka ia berisi perbincangan teoretis tentang *the conditions of possibility* sebuah penafsiran. Ia menyangkut hal-hal apa yang dibutuhkan atau langkah-langkah bagaimana yang harus dilakukan untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap teks. *Ketiga*, hermeneutika dipahami sebagai filsafat penafsiran. Dalam pemahaman ini hermeneutika menyoroti secara kritis bagaimana



bekerjanya pola pemahaman manusia dan bagaimana hasil pemahaman manusia tersebut diajukan, dibenarkan, dan bahkan disanggah.

Secara kronologis, setidaknya terdapat 6 (enam) bentuk definisi makna hermeneutika sebagai berikut: (1) sebagai teori eksegesis *Bible*, (2) metodologi filologi secara umum, (3) ilmu pemahaman linguistik, (4) fondasi metodologis *geisteswissenschaften*, (5) fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial, dan (6) sistem interpretasi, baik re-kolektif maupun *iconoclastic*, yang digunakan manusia untuk meraih makna di balik mitos dan simbol (Palmer, 2003: 38).

Selanjutnya, masing-masing definisi tersebut merupakan tahapan-tahapan historis; ia menunjuk suatu “peristiwa” atau pendekatan penting dalam persoalan interpretasi. Secara esensial, masing-masing definisi tersebut merepresentasikan sudut pandang dari mana hermeneutika dilihat; ia melahirkan suatu pandangan berbeda tetapi melegitimasi kisi-kisi tindakan interpretasi, khususnya interpretasi teks.

## **2. Bahasa Sebagai Pusat Kajian Hermeneutika**

Karena objek utama hermeneutika adalah teks dan teks adalah hasil atau produk praksis berbahasa, maka antara hermeneutika dengan bahasa terjalin hubungan sangat dekat, sehingga kajian hermeneutika tidak lain adalah juga kajian terhadap bahasa secara filosofis. Karena merupakan kajian filosofis, maka kajian hermeneutika jauh lebih luas daripada kajian dengan hanya satu perspektif, misalnya, linguistik saja. Sebab, kajian hermeneutika selalu terkait dengan ruang sosial di mana penafsir (pembaca) berada. Sudah menjadi dalil umum bahwa

tidak ada teks, apapun bentuknya, yang hadir di ruang hampa. Karenanya itu, teks selalu kompleks. Satu teks menandakan adanya jejaring teks-teks lain di sekitarnya. Dengan kata lain, sebuah teks hakikatnya sebuah tenunan atau rajutan dari teks-teks sebelumnya.

Dikaitkan dengan peran dan posisi bahasa dalam kajian hermeneutika, maka bagi pengkaji hermeneutika, bahasa tidak saja sebagai pusat objek kajian, tetapi juga representasi diri penggunanya. Dengan demikian, kajian hermeneutika tidak bisa lepas dari kajian tentang sosok diri manusia yang melahirkan teks. Dari bahasa akan terlihat dunia batin penggunanya. Sebab, manusia berpikir, menulis, berbicara, membuat karya seni, mengapresiasi karya seni dan sebagainya melalui bahasa. Adalah Gadamer yang dengan jelas dan tegas menyatakan peran penting bahasa sebagai pusat untuk memahami dan pemahaman manusia. Dalam *Gadamer's Philosophical Hermeneutics* dinyatakan “*Gadamer places language at the core of understanding*” (Grondin, 1994).

Apa yang dimaksudkan Gadamer bahwa bahasa adalah pusat pemahaman (*understanding*) dan pusat memahami (*to understand*) ialah melalui bahasa kita bisa memahami fenomena kehidupan, dan melalui bahasa kita juga bisa mengerti sosok manusia macam apa dan dunia batin yang dimilikinya. Lebih dari itu, sejatinya bahasa juga bisa menjadi pusat kesalahpahaman (*misunderstanding*) antarsesama. Sering terjadi orang salah paham karena bahasa yang diucapkan. Hebatnya, lewat bahasa pula kesalahpahaman bisa diselesaikan.

Bahasa merupakan *turning point* atau titik tolak studi-studi antropolinguistik, sosiolinguistik, filsafat bahasa, fenomenologi, dan pasca-

modernisme. Antropolinguistik sebagaimana dirintis Sapier dan Whorf percaya bahwa bahasa menggambarkan pandangan dunia atau pandangan hidup pemiliknya, sebab bahasa dan pikiran saling melekat (Wardhaugh, 1986). Sociolinguistik, seperti dikemukakan Chaika (1982), percaya bahwa bahasa merupakan cermin masyarakat pemakainya. Apa yang terjadi di masyarakat tampak pada perilaku berbahasanya. Filsafat bahasa berpandangan bahwa seluk beluk kehidupan manusia dapat diketahui melalui bahasa, sebab bahasa merepresentasikan hakikat pengetahuan konseptual tentang manusia (Gadamer, 1977). Karena bahasa, pengetahuan dan peradaban manusia berkembang. Lebih jauh, menurut filsuf bahasa Wittgenstein “batas bahasaku adalah batas duniaku”. Artinya, kemampuan berbahasa seseorang sangat menentukan sejauh mana dia mampu menembus batasan-batasannya sendiri.

Para tokoh post-modernisme seperti Derrida, Foucault, Lyotard dan Baudrillard bahkan mengembalikan semua persoalan keberadaan dan kehidupan manusia kepada bahasa, sebab bahasa merupakan pusat kegiatan ada dan hidup manusia (Sugiharto, 1996: 79-100).

Sehubungan dengan itu, secara tegas Jean Baudrillard (1981: 237) menyatakan bahwa “*The real monopoly is never that of technical means, but of speech*”. Dalam perspektif teori hegemoni Gramsci dikatakan bahwa keberadaan dan profil kehidupan manusia dalam hegemoni bahasa (Hendarto, 1993). Dalam konteks inilah profil manusia dibentuk oleh bahasa, profil manusia merupakan konstruksi bahasa---menurut istilah sosiologi pengetahuan Berger dan Luckman (1967)---merupakan konstruksi sosial melalui bahasa. Senada dengan Berger dan

Luckman, Gumperz (1982) menegaskan bahasa memiliki kekuatan dalam rangka proses konstruksi sosial. Karenanya, menurut Halliday (1976) bahasa lebih sebagai sumber (*resource*) daripada kaidah (*rules*).

Demikian penting keberadaan bahasa bagi kehidupan manusia sehingga manusia tidak mungkin berbuat apa-apa tanpa bahasa. Menurut Gadamer, bahasa bukan dipandang sebagai sesuatu yang mengalami perubahan, melainkan sesuatu yang memiliki ketertujuan di dalam dirinya. Maksudnya, kata-kata atau ungkapan tidak pernah tidak bermakna. Kata atau ungkapan selalu mempunyai tujuan (*telos*). Jadi, kata atau ungkapan penuh dengan makna (Sumaryono, 1999: 27). Hermeneutika merupakan ilmu untuk memahami atau mengerti makna tersebut. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan mengerti atau memahami itu? Menurut Gadamer, memahami itu artinya memahami melalui bahasa. Inilah awalnya Gadamer memandang peran penting bahasa dalam proses “memahami” .

Menurut Gadamer, asal mula bahasa adalah bahasa tutur, yang kemudian disusul bahasa tulis untuk efektivitas dan kelestarian bahasa tutur. Perubahan bahasa tutur menjadi bahasa tulis, menurut Gadamer, mengandung beberapa kelemahan, antara lain bahasa terlepas dari konteks peristiwa kebahasaannya dan kehilangan daya ekspresinya sehingga menjadi tidak hidup (Sumaryono, 1999: 210), walau harus diakui berkat bahasa tulis ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat.

Pendapat Gadamer berbeda dengan tokoh post-strukturalis dan penggagas wacana post-modernisme Derrida yang mengembangkan pemikirannya bahwa menurut kodratnya bahasa adalah “tulis”, sebab yang menjadi asal mula arti

adalah gagasan yang didasarkan atas jejak, bukan sebaliknya. Tulisan merupakan barang asing yang masuk ke dalam sistem bahasa, sehingga tulisan merupakan asal dan sebab dari bahasa yang diucapkan.

Menurut Derrida meskipun orang belum mengucapkan kata-kata, tulisan sudah siap dicurahkan. Tulisan dibatasi oleh bahasa yang diucapkan, dan karena ucapan maka makna tertunda dalam tulisan. Dengan demikian, menurut Derrida tulisan merupakan *fait accompli*, sesuatu yang sudah selesai pada saat orang berbicara. Tulisan sebenarnya bersifat impersonal, karena jauh dari kehadiran diri pembicara. Sedangkan ucapan penuh kehidupan dan makna, sebab pembicara hadir sendiri sehingga makna yang diucapkan menjadi jelas. Kendati berbeda pemikirannya tentang awal mula bahasa, keduanya sepakat bahwa bahasa tulis menjadikan bahasa teralienasi, tidak hidup dan jauh dari konteks karena ketidakhadiran pembicaranya.

### 3. Perkembangan Gagasan Hermeneutika

Secara etimologis, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuein*, yang berarti mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata. Kata kerja itu juga berarti ‘menerjemahkan’ dan juga bertindak sebagai ‘penafsir’. Ketiga pengertian itu sebenarnya mau mengungkapkan bahwa hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang.

Istilah hermeneutika memiliki asosiasi etimologis dengan nama dewa dalam mitologi Yunani, Hermes, yang bertugas menyampaikan dan

menerjemahkan pesan-pesan Tuhan kepada manusia ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia (Gadamer, 1977: 98-99; Vollmer, 1990: 1) dengan bantuan kata-kata manusia (Hardiman, 1991: 3). Dengan demikian, fungsi Hermes sangat penting, sebab bila terjadi kesalah-pahaman tentang pesan dewa akan berakibat sangat fatal bagi seluruh kehidupan manusia. Untuk itu, Hermes harus mampu menginterpretasikan pesan Tuhan ke dalam bahasa pendengarnya. Sejak itu, Hermes merupakan simbol seorang duta yang dibebani dengan misi khusus. Berhasil tidaknya misi tersebut sangat tergantung pada cara bagaimana Hermes menyampaikannya dalam bahasa manusia (Bleicher, 1980: 11).

Oleh karena itu, hermeneutika diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Latief, 2000: 46; Sumaryono, 1999: 24). Dalam definisi lain Habermas (dalam Vollmer, 1990: 294) menyatakan hermeneutika sebagai suatu seni memahami makna komunikasi linguistik dan menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, di mana metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.

Istilah hermeneutika sebagai “ilmu tafsir” pertama kali diperkenalkan oleh seorang teolog Jerman bernama Johann Konrad Dannhauer (1603-1666) pada sekitar abad ke-17 dengan dua pengertian, yaitu hermeneutika sebagai seperangkat prinsip metodologis penafsiran dan hermeneutika sebagai penggalian filosofis dari sifat dan kondisi yang tak bisa dihindarkan dari kegiatan memahami (Grondin, 1994: 1). Carl Braathen (Faiz, 2002: 10) dikatakan sebagai filosof yang

mengakomodasi kedua pengertian tersebut menjadi satu dan menyatakan bahwa hermeneutika adalah “ilmu” yang merefleksikan bagaimana satu kata atau satu peristiwa di masa dan kondisi yang lalu bisa dipahami dan menjadi bermakna secara nyata di masa sekarang sekaligus mengandung aturan-aturan metodologis untuk diaplikasikan dalam penafsiran dan asumsi-asumsi metodologis dari aktivitas pemahaman.

Semula hermeneutika berkembang di kalangan gereja dan dikenal sebagai gerakan eksegesis (penafsiran teks-teks agama) dan kemudian berkembang menjadi “filsafat penafsiran” kehidupan sosial (Babbie, 1999: 260). Adalah F.D.E. Schleiermacher yang selanjutnya dianggap sebagai “Bapak Hermeneutika” karena membangkitkan kembali hermeneutika dan membakukannya sebagai metode interpretasi yang tidak hanya terbatas pada kitab suci, tetapi juga seni, sastra dan sejarah. Selanjutnya, hermeneutika dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Wilhelm Dilthey yang menggagas hermeneutika sebagai landasan bagi ilmu-ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaften*), lalu Gadamer yang mengembangkannya menjadi metode filsafat yang diteruskan oleh filosof-filosof kontemporer seperti Paul Ricoeur, Jurgen Habermas, dan Jacques Derrida.

Pada prinsipnya di antara para filosof tersebut terdapat beberapa kesamaan pemikiran, terutama dalam hal bagaimana hermeneutika jika dikaitkan dengan studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Tetapi, di antara mereka juga terdapat perbedaan dalam cara pandang dan aplikasinya. Perbedaan tersebut terjadi karena pada dasarnya mereka menitikberatkan pada hal yang berbeda atau beranjak dari titik tolak yang berbeda (Manuaba, 2001: 2).

Meskipun hermeneutika bisa dipakai sebagai alat untuk “menafsirkan” berbagai bidang kajian keilmuan, melihat sejarah kelahiran dan perkembangannya, harus diakui bahwa peran hermeneutika yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks sebagaimana dikemukakan Trigg (1985: 197):

“The paradigm for hermeneutics is the interpretation of a traditional text, where the problem must always be how we can come to understand in our own context something which was written in a radically different situation”.

Sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika tidak hanya memandang teks, tetapi juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Lebih dari itu, hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison-horison (cakrawala) yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison pengarang, dan horison pembaca.

Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, yang selain melacak bagaimana satu teks itu dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks, juga berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Dengan kata lain, sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran, yakni *teks*, *konteks*, kemudian melakukan upaya *kontekstualisasi*.



Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap suatu teks keberadaan konteks di seputar teks tersebut tidak bisa dinafikan. Sebab, justru konteks yang menentukan apa makna teks; bagaimana teks harus dibaca, dan seberapa jauh teks harus dipahami. Teks yang sama dalam waktu yang sama dapat memiliki makna yang berbeda di mata “penafsir” yang berbeda; bahkan seorang “penafsir” yang sama sekalipun dapat memberikan pemaknaan teks yang sama secara berbeda-beda ketika ia berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Di sini fokus perhatian hermeneutika sebagai metode menafsir teks.

Hermeneutika menempatkan bahasa sebagai bagian sangat penting dalam kajiannya. Sebab, bahasa dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia berpikir, menulis, berbicara, mengapresiasi karya seni dan sebagainya melalui bahasa. Habermas sebagaimana dikutip Wolff (1975: 21) menyatakan bahwa untuk memahami makna hanya bisa diperoleh melalui pemahaman bahasa. Sedangkan Gadamer dengan jelas dan tegas menyatakan peran penting bahasa sebagai pusat untuk memahami dan pemahaman manusia (Ricoeur, 1991). Dalam *Gadamer's Philosophical Hermeneutics* (1994) dinyatakan “Gadamer places language at the core of understanding”. Selain itu Gadamer juga mengatakan “language is the house of Being” dan “discourse is the extential foundation account of language”. Namun, bahasa pun tidak diartikan dengan makna definitif yang merujuk pada buku, teks, atau dokumen. Bahkan dalam pengertian ini, kita pun dapat berubah posisi menjadi bahasa, dan bahkan juga “teks” (Nasir, 2004: 35).

Hal ini merupakan titik tolak studi-studi antropolinguistik, sosiolinguistik, filsafat bahasa, fenomenologi, dan pasca-modernisme. Antropolinguistik sebagaimana dirintis Sapir dan Whorf percaya bahwa bahasa menggambarkan pandangan dunia atau pandangan hidup pemiliknya, sebab bahasa dan pikiran saling melekat (Wardhaugh, 1988). Sosiolinguistik, seperti dikemukakan Chaika (1982), percaya bahwa bahasa merupakan cermin masyarakat pemakainya. Apa yang terjadi di masyarakat tampak pada perilaku berbahasa masyarakatnya. Filsafat bahasa berpandangan bahwa seluk-beluk kehidupan manusia dapat diketahui melalui bahasa, sebab bahasa merepresentasikan hakikat pengetahuan konseptual tentang manusia (Gadamer, 1977). Karena bahasa, pengetahuan dan peradaban manusia berkembang. Kata filosof bahasa Wittgenstein “batas bahasaku adalah batas duniaku”. Artinya, kemampuan berbahasa seseorang sangat menentukan sejauh mana dia mampu menembus batasan-batasannya sendiri.

Sebagai sebuah praksis interpretasi, hermeneutika sesungguhnya sudah muncul sangat-sangat awal dalam sejarah berbagai peradaban manusia. Berbagai peradaban besar yang pernah berkembang pada zaman kuno umumnya mempunyai kitab suci, yang tentu saja berwujud teks tertulis. Karena kitab suci tidak mungkin bisa bicara sendiri, maka penerapannya dalam kehidupan bersama memerlukan serangkaian penafsiran dan penafsiran ulang yang pada umumnya dilakukan oleh para agamawan, pujangga keraton, atau kelas bangsawan. Dengan kata lain, hermeneutika telah dipraktikkan oleh orang-orang kuno jaman dahulu jauh sebelum hermeneutika dibakukan menjadi sebuah disiplin keilmuan sendiri atau sebagai metodologi penafsiran. Setelah ditempa di berbagai medan

pengujian, melalui kajian-kajian filosofis yang mendalam dan teorisasi yang lebih kokoh, barulah hermeneutika muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan baru.

Menurut Howard (2001: 23), hermeneutika tidak muncul tiba-tiba sebagai suatu daftar khusus dalam khasanah ilmu pengetahuan, tetapi merupakan suatu subdisiplin teologi yang sudah muncul sangat-sangat awal dalam sejarah peradaban manusia yang mencakup kajian metodologis tentang otentikasi dan penafsiran teks. Namun, dalam kurun berikutnya, lingkupnya berkembang dan mencakup masalah penafsiran secara menyeluruh (Eagleton, 1983: 66). Sebab, tekstualitas yang menjadi arena beroperasinya kerja hermeneutika telah diperluas maknanya. Teks bukan lagi semata merujuk pada pengertian teks ajaran agama (kitab suci), tetapi juga mencakup teks-teks lain. Bahkan, definisi teks dalam perkembangan hermeneutika lebih lanjut juga kian meluas, bukan lagi teks tertulis tetapi juga lisan dan isyarat-isyarat dengan bahasa tubuh. Karena itu, sikap ‘diam’ seseorang, misalnya, juga bisa dianggap sebagai teks, karena mengundang banyak interpretasi.

Maulidin (2003: 5) berupaya menggambarkan evolusi gagasan hermeneutika dengan mengacu pada tema-tema garapannya. Pada awal perkembangannya, sekitar awal abad pertengahan, hermeneutika digagas sebagai praksis murni yang menggarap tema keagamaan. Hermeneutika, pada tahapan ini, lebih merupakan piranti penafsir ayat suci (eksegesis), khususnya Bible. Perkembangan tahap kedua dari gagasan hermeneutika tampak dari semakin dibutuhkannya metodologi, tidak hanya untuk menggarap tema-tema keagamaan tetapi juga tema-tema kemanusiaan (*humaniora*). Pertanyaan hermeneutika yang

diangkat pun juga bergeser menjadi bagaimana menangkap realitas yang terkandung dalam kitab suci seperti Bible dan bagaimana menerjemahkan realitas tersebut ke dalam bahasa yang dipahami oleh manusia modern.

Hermeneutika, pada tahapan ini juga menggarap persoalan-persoalan estetika, termasuk pengalaman “memahami” karya seni. Perkembangan ketiga berupa peninjauan kembali (*theoretical re-evaluation*) yang lebih banyak menggarap tema-tema filsafat. Hermeneutika, pada tahapan ini, semakin dipandang sebagai metodologi filosofis. Persoalan epistemologi menjadi pokok masalah yang banyak dibahas. Belakangan, hermeneutika yang semula merupakan praksis murni untuk menggarap tema-tema keagamaan (eksegesis), telah menarik perhatian kalangan di luar agama dan filsafat. Tahap ini sering disebut sebagai praksis ilmiah dengan tema garapan sangat luas, yang mencakup masalah agama, filsafat, sosiologi, dan humaniora.

Dalam perkembangan terakhir ini, hermeneutika dipahami sebagai sebuah teori, metodologi dan praksis penafsiran, yang digerakkan ke arah penangkapan makna dari sebuah teks atau sebuah analog teks, yang secara temporal atau secara kultural berjarak jauh, atau dikaburkan oleh ideologi dan kesadaran palsu (Maulidin, 2003: 6). Apa pun definisi yang digunakan, upaya hermeneutika bermuara pada pemerolehan makna suatu teks atau analog-teks.

#### 4. Beberapa Varian Hermeneutika

Sejak hermeneutika mengalami re-evaluasi teoretik, hingga sekarang telah berkembang beberapa varian hermeneutika. *Pertama*, hermeneutika romantis dengan eksemplar Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834), seorang filosof, teolog, filolog dan tokoh sekaligus pendiri Protestantisme Liberal. Schleiermacher merupakan filosof Jerman pertama yang terus menerus memikirkan persoalan hermeneutika. Karena itu, ia dianggap sebagai Bapak hermeneutika modern, sebab di milieu pemikirannya makna hermeneutika berubah dari sekadar kajian teologi (teks Bible) menjadi metode memahami dalam pengertian filsafat.

Filsafat hermeneutika Schleiermacher bermula dari pertanyaan universal: bagaimana pemahaman manusia dan bagaimana ia terjadi. Dalam hal ini ia mengajukan dua teori pemahaman hermeneutikanya. Pertama, pemahaman ketatabahasaan (*grammatical understanding*) terhadap semua ekspresi. Kedua, pemahaman psikologis terhadap pengarang. Dari bentuk kedua ini Schleiermacher lalu mengembangkan apa yang ia sebut *intuitive understanding* yang operasionalisasinya merupakan suatu kerja rekonstruksi. Artinya, hermeneutika bertugas untuk merekonstruksi pikiran pengarang. Tujuan pemahaman bukan makna yang diperoleh dari dalam materi subjek, tetapi lebih merupakan makna yang muncul dalam pandangan pengarang yang telah direkonstruksi tersebut. Jadi interpretasi yang benar, menurut Schleiermacher, tidak saja melibatkan pemahaman konteks kesejarahan dan budaya pengarang, tetapi juga pemahaman terhadap subjektivitas pengarang (Zarkasyi, 2004: 25).

Menurut perspektif ini, ada lima unsur yang terlibat dalam upaya memahami wacana (Thiselton, 1992: 204-205). Masing-masing adalah penafsir, teks, maksud pengarang, konteks historis, dan konteks kultural. Penafsir yang hendak memahami suatu wacana selain mencermati teks, juga meletakkannya dalam konteks historis dan kultural sehingga menurut Gadamer (1977: 7) hermeneutika Schleiermacher disebut romantisme historis (*historical romanticism*). Hanya dengan cara demikian, menurut hermeneutika ini, seorang penafsir benar-benar sampai kepada makna teks. Makna teks, sejauh mengikuti perspektif ini, diidentikkan dengan maksud pengarang. Dengan demikian, bagi Schleiermacher, di samping faktor gramatikal (tata bahasa), faktor kondisi dan motif pengarang sangat penting untuk memahami makna suatu teks sebagaimana dinyatakan Linge (dalam Gadamer, 1977: xiii):

For Schleiermacher, therefore, what the text really means is not at all what it “seems” to us directly. Rather, its meaning must be recovered by a disciplined reconstruction of the historical situation or life-context in which it originated.

Hermeneutika romantis Schleiermacher mengandaikan tujuannya untuk bisa menangkap kembali kebenaran dari teks, yang ditetapkan dalam kaitannya dengan maksud penulis aslinya seperti dinyatakan Thiselton (1992: 204):

He is often credited with being the first to formulate as a clear hermeneutical goal the aim of re-living and re-thinking the thoughts and feelings of an author. The way of construing the goals of hermeneutics is central to the romanticist model to which Schleiermacher was a contributor. But Schleiermacher’s own formulation of this principle is carefully qualified and occurs in a particular context of thought.

Proses penafsiran, dengan demikian, berawal dari penafsir hingga ke teks, dan dari penafsir ke teks melalui konteks sejarah dan kultural untuk menangkap

kembali maksud penulis aslinya. Menurut Schleiermacher, hasil interpretasi akan semakin baik jika penafsir mengetahui latar belakang sejarah pengarang teks sebagaimana dinyatakan Thiselton (1992: 221) “The more we learn about an author, the better equipped we are for interpretation”.

*Kedua*, hermeneutika metodis dengan eksemplar Wilhelm Dilthey (1833-1911). Pokok-pokok pikiran hermeneutika Schleiermacher sebagaimana dipaparkan di atas memperoleh kritik tajam dari seorang filosof, kritikus sastra, dan ahli sejarah dari Jerman, Wilhelm Dilthey.

Menurut perspektif ini, manusia bukan sekadar makhluk berbahasa sebagaimana sangat ditonjolkan oleh Schleiermacher, tetapi makhluk eksistensial. Karena itu, proses pemahaman bermula dari pengalaman, kemudian mengekspresikannya. Koreksi utamanya terhadap hermeneutika Schleiermacher adalah penolakannya atas hipotesis linguistik yang digagas Schleiermacher bahwa manusia semata-mata adalah makhluk berbahasa. Menurut Dilthey, sejak awal manusia tidak pernah hidup hanya sebagai makhluk linguistik yang hanya mendengar, menulis dan membaca untuk kemudian memahami dan menafsirkan. Lebih dari itu, manusia adalah makhluk yang memahami dan menafsirkan dalam setiap aspek kehidupannya (Maulidin, 2003: 14). Namun demikian dalam proses memahami teks, sebagaimana pendahulunya Schleiermacher, Dilthey berpandangan bahwa makna teks harus ditelusur dari maksud subjektif pengarangnya sebagaimana dinyatakan Linge (dalam Gadamer, 1977: xiii):

“Dilthey identified the meaning of the text or action with the subjective intention of its author. Starting from the documents, artifacts, actions, and so on that are the content of the historical world, the task of understanding is

to recover the original life-world they betoken and to understand the other person (the author or historical agent) as he understood himself”.

Berbeda dari kaum positivis, menurut Dilthey, bukan metode penjelasan (*explanatory method*) yang kita butuhkan untuk bisa mengerti manusia, melainkan metode pemahaman (*interpretive method*). Bagi Dilthey, pengalaman hidup manusia merupakan sebuah nexus struktural yang mempertahankan masa lalu sebagai sebuah kehadiran di masa kini.

Bagi Dilthey, hermeneutika adalah “teknik memahami ekspresi tentang kehidupan yang tersusun dalam bentuk tulisan”. Oleh karena itu, ia menekankan pada peristiwa dan karya-karya sejarah yang merupakan ekspresi dari pengalaman hidup di masa lalu. Untuk memahami pengalaman tersebut interpreter harus memiliki kesamaan yang intens dengan pengarang. Bentuk kesamaan dimaksud merujuk pada sisi psikologis Schleiermacher. Tetapi ia menolak asumsi Schleiermacher yang bahwa setiap kerja pengarang bersumber dari prinsip-prinsip yang implisit dalam pikiran pengarang. Ia menganggap asumsi seperti ini anti-historis. Sebab, ia tidak mempertimbangkan pengaruh eksternal dalam perkembangan pikiran pengarang. Padahal, menurut Dilthey (1990: 149-150) pikiran seseorang selalu berkembang karena situasi eksternal dan pengalaman-pengalaman barunya. “The ship of our life is, as it were, carried forward on a constantly moving stream...”.

Selain itu, Dilthey juga mencoba mengangkat hermeneutika menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam dan mengembangkannya menjadi metode-metode dan aturan-aturan yang menentukan objektivitas dan validitas setiap ilmu (Zarkasyi, 2004: 25). Karena



mengedepankan masa lalu (sejarah) pengarang dalam menafsirkan teks, maka gagasan hermeneutika Dilthey juga sering disebut hermeneutika historis.

*Ketiga*, hermeneutika fenomenologis dengan eksemplar Edmund Husserl (1889-1938) (Thomson, 1990: 36). Berbeda dengan hermeneut-hermeneut sebelumnya, Husserl menganggap bahwa pengetahuan dunia objektif itu bersifat tidak pasti. Menurutnya apa yang kita andaikan sebagai dunia objektif sesungguhnya adalah dunia yang sudah diwarnai oleh aparatus sensor yang tak sempurna dari tubuh manusia dan dari aktivitas-aktivitas rasional maupun abstraksi pikiran. Dengan begitu, ketika kita tengah berupaya meraih pengetahuan yang pasti tentang “dunia objektif” sesungguhnya kita sedang memastikan “dunia persepsi kita---dunia fenomena” (Maulidin, 2003: 16-17).

Husserl menawarkan sebuah “ilmu” tentang kesadaran untuk melacak keteraturan sistemik dalam persepsi dan pemahaman melalui mana kepastian terhadap pengetahuan dunia objektif menjadi niscaya. Melalui fenomenologi orang harus memiliki keberanian untuk menerima apa yang sebenarnya terlihat dalam fenomena secara tepat sebagaimana ia menghadirkan dirinya lebih daripada menafsirkannya, dan kemudian menggambarannya dengan penuh kejujuran. Karena berangkat dari kerangka dasar fenomenologi, maka menurut hermeneutika Husserl proses penafsiran harus kembali pada data, bukan pada pemikiran, yakni pada halnya sendiri yang harus menampakkan dirinya. Interpreter harus melepaskan semua pengandaian dan kepercayaan pribadinya serta dengan simpati melihat objek yang mengarahkan diri kepadanya. Jadi bagi hermeneutika Husserl

pengetahuan sejati adalah kehadiran data dalam kesadaran budi, bukan rekayasa pikiran untuk membentuk teori.

Dengan begitu, menurut perspektif ini, proses pemahaman yang benar harus mampu membebaskan diri dari prasangka, dengan membiarkan teks “berbicara sendiri”. Berbeda dengan hermeneutika romantis (Schleiermacher) dan historis (Dilthey), hermeneutika fenomenologis ini berpendapat bahwa teks merefleksikan kerangka mentalnya sendiri, dan karenanya penafsir harus netral dan menjauhkan diri dari unsur-unsur subjektifnya atas objek, sebagaimana dinyatakan Husserl (1990: 178):

To understand an expression means, on this view, to meet with pertinent mental pictures. Where these are absent, an expression is void of sense. These mental pictures are themselves often said to be the meanings of words, and those who say so, claim to be getting at what ordinary speech means by the “meaning of an expression”

Karena itu, menafsirkan sebuah teks berarti secara metodologis mengisolasi teks dari semua hal yang tak ada hubungannya ---termasuk bias-bias subjek penafsir dan membiarkannya mengomunikasikan maknanya sendiri pada subjek. Untuk itu, menurut Maulidin (2003: 18), ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu: (1) melakukan reduksi fenomenologis yang dikerjakan dengan menempatkan dunia dalam tanda kurung, (2) melakukan reduksi eidetik yang dikerjakan dengan memusatkan perhatian dan pengamatan kita pada esensi sesuatu yang dicoba untuk dipahami, dan (3) melakukan rekonstruksi dengan menghubungkan hasil reduksi fenomenologis dengan hasil reduksi eidetik.

*Keempat*, hermeneutika dialektis dengan eksemplar Martin Heidegger (1889-1976). Kendati pernah menjadi murid Husserl, Heidegger merupakan

filosof hermeneutika yang menentang keras gagasan hermeneutika fenomenologis Huserl karena sangat tidak bisa menerima gagasan Husserl mengenai netralitas sang penafsir. Sebab, kerja penafsiran hanya bisa dilakukan dengan didahului oleh prasangka-prasangka mengenai objek. Menurut Heidegger, prasangka-prasangka historis atas objek merupakan sumber-sumber pemahaman karena prasangka adalah bagian dari eksistensi yang harus dipahami. Tesis Heidegger ditegaskan kembali oleh Connolly (dalam Gadamer et al, 1988; 17) bahwa “[U]nderstanding is made possible by the prejudices of the interpreter’s time or epoch which disclose and constitute being (and therefore a text)”.

Lebih jauh, menurut perspektif ini, pemahaman adalah sesuatu yang muncul dan sudah ada mendahului kognisi sebagaimana dinyatakan Heidegger (1990: 215):

“[U]nderstanding is in the sense of one possible kind of cognizing among others (as distinguished, for instance, from ‘explaining’), must, like explaining, be interpreted as an existential derivative of that primary understanding which is one of the constituents of the Being of the “there” in general”.

Untuk memahami teks, kita tidak mungkin bisa mencapainya dengan cara melacak makna tertentu yang ditempatkan di sana oleh pengarang. Dengan demikian, harus dikaitkan antara keberadaan kita dengan apa yang bisa ditunjukkan oleh teks. Implikasinya, tidak ada lagi makna yang tunggal dan tetap, sebaliknya yang ada adalah keragaman makna dan dinamika eksistensial. Dengan demikian, pembacaan atau penafsiran selalu merupakan pembacaan-ulang atau penafsiran ulang, yang dengan demikian akan memahami lagi teks yang sama secara baru dengan makna baru pula.

*Kelima*, hermeneutika dialogis dengan eksemplar Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Sebagai penerus Heidegger yang telah mengembangkan interpretasi ontologis, Gadamer tidak memaknai hermeneutika sebagai penerjemah eksistensi tetapi pemikiran dalam tradisi filsafat. Sebenarnya, ia tidak menganggap hermeneutika sebagai metode (Weinsheimer, 1985: 1), sebab baginya pemahaman yang benar adalah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis, bukan metodologis. Artinya, kebenaran dapat dicapai bukan melalui metode, tetapi melalui dialektika dengan mengajukan banyak pertanyaan. Dengan begitu, bahasa menjadi medium sangat penting bagi terjadinya dialog (Zarkasyi, 2004: 26).

Menurut perspektif ini, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab tersendiri, dalam proses memahami teks, pikiran penafsir juga menceburkan diri ke dalam pembangkitan kembali makna teks. Dengan demikian, proses pemahaman adalah proses peleburan horison-horison. Tindakan pemahaman adalah suatu kehendak yang sejauh mungkin bisa melahirkan proses peleburan antara sekurang-kurangnya dua horison. Pengarang dan konteks historis dari sebuah teks dipertimbangkan dalam proses interpretif bersama dengan prasangka-prasangka penafsir seperti tradisi, kepentingan praktis, bahasa dan budaya.

*Keenam*, hermeneutika kritis dengan eksemplar Jurgen Habermas (L: 1929). Istilah teori kritis (Critical Theory) pertama dikenalkan oleh Max Horkheimer dan pada mulanya hanya merujuk secara khusus kepada tradisi Mazhab Frankfurt yang di antara tokohnya adalah Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979) dan Jurgen Habermas (1929-) sendiri. Tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu sosial istilah tersebut mempunyai

konotasi yang lebih luas, termasuk di dalamnya tradisi teori post-modernisme dan feminisme, yang bermazhab tradisi filsafat Perancis (Agger, 1992: 278-306).

Dalam karya-karyanya Habermas tidak pernah membicarakan secara utuh hermeneutika dalam arti definitif, baik sebagai sains untuk memahami maupun maupun sebagai sebuah gagasan tunggal. Namun jika hermeneutika diartikan sebagai cara atau seni memahami makna komunikasi baik yang menggunakan simbol-simbol linguistik maupun non-linguistik (Habermas, 1990: 294), maka Habermas mempunyai gagasan yang unik, yakni bagaimana cara dia memahami. Ia dianggap unik karena ia membawa karakter yang khas aliran Frankfurt, yaitu teori kritis. Maka dari itu, hermeneutika Habermas dapat disebut sebagai hermeneutika kritis (Thiselton, 1992: 380).

Kendati cukup problematik untuk memberikan definisi secara tepat apa yang dimaksud dengan teori kritis --- karena ia bukan merupakan konsep tunggal, tetapi plural---, maka disebut hermeneutika kritis karena teori ini tidak saja mengkritisi (yaitu menemukan kesalahan dan kekurangan pada) kondisi yang ada, tetapi juga mempertautkan antara beragam domain realitas, antara yang partikular dan yang universal, antara kulit dan isi, dan antara teori dan praktik (Maulidin, 2003: 222).

Menurut perspektif kritis ini, hermeneutika dialogis Gadamer sebagaimana dipaparkan di atas oleh Habermas dianggap kurang memiliki kesadaran sosial yang kritis. Kalau bagi Gadamer pemahaman didahului oleh pra-penilaian (*pre-judgement*), maka bagi Habermas pemahaman didahului oleh kepentingan. Yang menentukan horison pemahaman adalah kepentingan sosial (*social interest*) yang

melibatkan kepentingan kekuasaan (*power interest*) sang interpreter dan khususnya komunitas-komunitas interpreter yang terlibat dalam interpretasi.

Hermeneutika ini lebih mengedepankan refleksi kritis penafsir, dan menolak kehadiran prasangka dan tradisi. Karena itu, untuk memahami suatu teks, seorang penafsir harus mampu mengambil jarak atau melangkah keluar dari tradisi dan prasangka. Hanya dengan cara demikian hermeneutika mampu mengemban tugas untuk mengembangkan masyarakat komunikatif yang universal.

Secara metodologis, hermeneutika kritis Habermas dibangun di atas klaim bahwa setiap bentuk penafsiran dipastikan ada bias-bias dan unsur-unsur kepentingan politik, ekonomi, sosial, termasuk bias strata kelas, suku dan gender. Dengan menggunakan metode ini, maka konsekuensinya kita harus curiga dan waspada---atau dengan kata lain kritis---terhadap bentuk tafsir atau pengetahuan atau jargon-jargon yang dipakai dalam sains dan agama (Zarkasyi, 2003; 33).

*Ketujuh*, teori hermeneutika lain muncul dari seorang Katolik kelahiran Perancis bernama Paul Ricoeur (L: 1913-). Keterlibatannya dalam filsafat fenomenologi di Perancis membuat gebrakannya dalam bidang hermeneutika dianggap sebagai pemersatu filsafat Eropa dan Anglo-Amerika. Garis besar teori hermeneutika Ricoeur adalah ia mencoba mencari integrasi dialektis dari dikotomi Dilthey yaitu penjelasan (*explanation*) dan pemahaman (*understanding*) sebagaimana dinyatakan Thiselton (1992: 357) “We come full circle, and return to Ricoeur’s insistence, as against Gadamer, that hermeneutics calls for both explanation and understanding”.

Selain itu, Ricoeur berangkat dari perbedaan yang fundamental antara paradigma interpretasi teks tertulis dan (*discourse*) dan percakapan (*dialogue*). Menurut Ricoeur, teks berbeda dengan percakapan, karena ia terlepas dari kondisi asal yang menghasilkannya, niat penulisnya sudah kabur, audiennya lebih umum dan referensinya tidak dapat lagi dideteksi. Konsep yang utama dalam pandangan Ricoeur adalah bahwa begitu makna objektif diekspresikan dari niat subjektif sang pengarang, maka berbagai interpretasi yang dapat diterima menjadi mungkin. Makna tidak diambil hanya menurut pandangan hidup (*worldview*) pengarang, tetapi juga menurut pengertian pandangan hidup pembacanya (Zarkasyi, 2004: 27).

*Kedelapan*, hermeneutika dekonstruksionis dengan eksemplar Jacques Derrida (L: 1930-) Derrida dikenal sebagai salah seorang filosof post-strukturalisme. Terminologinya tentang dekonstruksi merupakan istilah yang sangat kuat untuk menjelaskan gagasan post-strukturalisme. Lewat gagasannya, Derrida ingin menunjukkan bahwa bahasa, demikian juga sistem simbol yang lain, merupakan sesuatu yang tidak stabil. Karena itu, makna tulisan (teks), menurut Derrida, selalu mengalami perubahan tergantung pada konteks dan pembacanya sebagaimana dinyatakan Waters (1994: 125) “[M]eaning is contextualized to the relationship between the text and its reader”.

Perspektif ini menghindari, dan bahkan menolak ambisi untuk menangkap makna esensial yang tunggal dan utuh. Sebaliknya, hermeneutika dekonstruksionis menghendaki agar kita lebih menekankan pada pencarian makna eksistensial, makna yang di sini dan sekarang. Dekonstruksi Derrida

mengingatkan bahwa setiap upaya untuk menemukan makna selalu menyelipkan tuntutan bagi upaya membangun relasi sederhana antara petanda dan penanda. Karena bahasa hanya merujuk pada dirinya sendiri, maka makna-makna adalah arbitrer dan tidak bisa dipastikan begitu saja.

Dari uraian di atas jelas bisa ditarik kesimpulan bahwa hermeneutika sebagai aliran filsafat telah mengikuti pandangan hidup tokoh-tokohnya. Dimulai dari Schleiermacher yang berlatarbelakang pendeta Protestan Liberal dengan hermeneutika romantisismenya telah mengubah makna hermeneutika dari sekadar kajian teks keagamaan (Bible) menjadi kajian pemikiran filsafat. Wilhelm Dilthey yang ahli metodologi ilmu-ilmu sosial dan sejarah mengubah makna hermeneutika menjadi metode kajian historis. Edmund Husserl juga menggeser hakikat kebenaran dengan menganggap bahwa pengetahuan dunia objektif itu bersifat tidak pasti karena pengetahuan itu sesungguhnya diperoleh dari aparatus sensor kita yang tak sempurna. Martin Heidegger dengan latar belakang filsafat fenomenologinya membawa hermeneutika kepada kajian ontologis. Hans-Georg Gadamer sebagai filosof yang besar di lingkungan filsafat fenomenologi Jerman juga menekankan kajian ontologis Heidegger, tetapi dalam konteks tradisi pemikiran filsafat Barat yang menekankan pentingnya dialektika sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran sehingga hermeneutikanya juga disebut hermeneutika dialogis. Namun, Habermas dengan teori kritisnya menggeser makna hermeneutika kepada pemahaman yang diwarnai oleh kepentingan (*interest*), khususnya kekuasaan (*power*). Itu sebabnya, ia mengkritik Gadamer yang dianggap kurang menekankan kesadaran sosial yang kritis. Sedangkan Paul



Ricoeur dengan milieu filsafat fenomenologi dan eksistensialisnya mensyaratkan adanya aspek pandangan hidup interpreter sebagai faktor utama dalam pemahaman hermeneutiknya. Selain itu, ia berupaya mencari integrasi dialektis dari dikotomi Dilthey yaitu penjelasan (*explanation*) dan pemahaman (*understanding*). Derrida dengan gagasan dekonstruksionisnya menyatakan peran penting sistem lambang atau simbol (bahasa) untuk menyingkap makna yang selalu arbitrer.

Sudah barang tentu pergeseran makna dan fokus kajian masing-masing hermeneutika sebagaimana dipaparkan di atas juga melibatkan pergeseran objek materi pemahaman, cara dan sikap mental subjek yang memahami objek dan juga subjek. Karena itu, pemilihan hermeneutika sebagai sebuah perspektif dalam penelitian juga sangat tergantung pada jenis objek, tujuan dan metode penelitiannya.

### **5. Signifikansi Hermeneutika bagi Kajian Politik**

Gibbons (2002: xxiii) menyatakan sejarah ilmu politik mencatat perdebatan panjang antara aliran ilmu politik positivistik dan aliran ilmu politik interpretif. Sebagai aliran terdahulu, pendekatan positivistik menguatkan bangunan ilmunya dengan mendasarkan keberhasilan metode ilmu alam. Maka, sebagai sistem pemikiran, positivisme didukung lima asumsi dasar, yakni logika-empirisme, realitas objektif, reduksionisme, determinisme, dan asumsi bebas nilai (Bailey, 1987: 60; Neuman, 2000: 123; Denzin et al, 1994: 109; Nunan, 1992: 4; Silverman, 1993: 21). Tetapi, bagi penganut interpretif, yang muncul belakangan, justru sebagai metode, positivistik memiliki beberapa kelemahan.

Dalam konteks kajian politik, pendekatan positivistik meremehkan hubungan internal antara kehidupan sosial dan politik dengan bahasa yang tersimpan di dalamnya. Menurutnya, karena bahasa politik itu bersifat samar, ambigius, dan mengandung nilai-nilai, maka harus diganti dengan bahasa yang ilmiah yang lebih tepat dan jelas. Oleh karena itu, pendekatan positivistik dianggap kurang memadai untuk menjelaskan hal-hal yang fundamental dalam kajian politik (Gibbons, 2002).

Pendekatan positivistik menghasilkan keterputusan hubungan antara kehidupan politik dan bahasa yang digunakan oleh pelaku politik. Padahal, dalam praktik politik bahasa memiliki fungsi beragam. Bahasa adalah cara beroperasi fundamental dari keberadaan manusia di dunia dan merupakan sebuah konstitusi yang luas, sehingga bahasa mendapatkan arti dari praktik politik yang menjadi tempat tumbuhnya. Menurut Foucault (1972), dalam bahasa terdapat bentuk relasi sosial dan praktik kekuasaan yang beroperasi.

Berangkat dari keterbatasan yang dimiliki pendekatan positivistik seperti diuraikan di atas, dengan mendasarkan pada tujuan, dan bentuk (wujud) data yang dianalisis, maka studi ini lebih tepat menggunakan metode interpretif ketimbang positivistik, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, sebab---sebagai sebuah pendekatan---hermeneutika dipandang menampilkan sebuah struktur yang fleksibel, konkret, objektif, dan tetap menampilkan segi subjektivitasnya, serta tidak membekukan pemikiran filosofis.

Seperti ditegaskan oleh Vollmer (1990: ix) dan Gibbons (2002: vi) beberapa dekade terakhir para akademisi berusaha menghidupkan kembali metode

hermeneutika, sebuah topik tua tetapi muncul sebagai sesuatu yang menarik dan baru dalam aliran filsafat, dengan alasan bahwa penyelidikan terhadap politik dan sains sosial pada dasarnya bersifat interpretif. Mempertegas Vollmer dan Gibbons, Foss et al (1985: 196) menyatakan:

Hermeneutics, then has expanded beyond the analysis of literal texts; it now is considered applicable to all situations-events, and phenomena that can be subjected to interpretation. All of these kinds of phenomena are "texts" that offer clues about how humans give meaning to their world.

Dengan semakin luasnya penggunaan metode hermeneutika dalam kajian ilmiah yang melibatkan penafsiran, Palmer (1969) mengklasifikasikan cabang-cabang hermeneutika sebagai berikut; (1) interpretasi terhadap Bible disebut *exegesis*, (2) interpretasi terhadap teks kesusastaan lama disebut *philology*, (3) interpretasi terhadap penggunaan dan pengembangan aturan-aturan bahasa disebut *technical hermeneutics*, (4) suatu studi tentang proses pemahamannya itu sendiri disebut *philosophical hermeneutics*, (5) pemahaman di balik makna-makna dari setiap sistem simbol disebut *dream analysis*, (6) interpretasi terhadap pribadi manusia beserta tindakan-tindakan sosialnya disebut *social hermeneutics*. Berdasarkan pengelompokan tersebut, studi ini menurut Grondin (1994: 2) termasuk *philosophical hermeneutics*.

Sebagai sebuah mazhab pemikiran dan metode filsafat, hermeneutika memang belum berlaku secara universal, tetapi metode ini sangat berguna untuk mendukung pemahaman kita tentang kebenaran dan interpretasi teks secara filosofis, khususnya dalam filsafat ilmu sosial, seni, sejarah, psikologi, teologi, bahasa dan sastra (Gadamer, 1975; xiii; Bleicher, 1980: 1; Sumaryono, 1999: 23).

Karena dikembangkan dalam dataran filsafat, lengkap dengan refleksi radikal dan analisisnya yang sistematis, hermeneutika dipandang sebagai “metode penafsiran” yang cukup representatif dan komprehensif serta memiliki tingkat akurasi tinggi untuk mengolah teks (wacana) termasuk di dalamnya wacana politik. Belakangan, sejalan dengan semakin populernya perspektif post-modernisme, hermeneutika telah menarik minat para ahli di berbagai bidang seperti sastra, linguistik, sosiologi, sejarah, teologi, filsafat, agama, dan lain sebagainya.

Sejumlah tokoh post-modernisme seperti Derrida, Foucault, Lyotard dan Baudrillard mengembalikan semua persoalan keberadaan dan kehidupan manusia kepada bahasa, sebab bahasa merupakan pusat kegiatan ada dan hidup manusia (Sugiharto, 1996: 79-100). Ini menunjukkan betapa penting kedudukan bahasa dalam memahami atau mungkin malah mengendalikan manusia lain.

Sehubungan dengan itu, secara tegas Jean Baudrillard (1981: 237) menyatakan bahwa “*The real monopoly is never that of technical means, but of speech*”. Dalam perspektif teori hegemoni Gramsci dikatakan bahwa keberadaan dan profil kehidupan manusia dalam hegemoni bahasa (Hendarto, 1993). Dalam konteks inilah profil manusia dibentuk oleh bahasa, profil manusia merupakan konstruksi bahasa---menurut istilah sosiologi pengetahuan Berger dan Luckman (1990)---merupakan konstruksi sosial melalui bahasa. Senada dengan Berger dan Luckman, Cook-Gumperz (1981) menegaskan bahasa memiliki kekuatan dalam rangka proses konstruksi sosial. Menurut Halliday (1976) bahasa lebih sebagai sumber (*resource*) daripada kaidah (*rules*).

Demikian penting keberadaan bahasa bagi kehidupan manusia sehingga manusia tidak mungkin berbuat apa-apa tanpa bahasa. Menurut Gadamer, bahasa bukan dipandang sebagai sesuatu yang mengalami perubahan, melainkan sesuatu yang memiliki ketertujuan di dalam dirinya. Maksudnya, kata-kata atau ungkapan tidak pernah tidak bermakna. Kata atau ungkapan selalu mempunyai tujuan (*telos*). Jadi, kata atau ungkapan penuh dengan makna (Sumaryono, 1999: 27). Hermeneutika merupakan ilmu untuk memahami atau mengerti makna tersebut. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan mengerti atau memahami itu? Menurut Gadamer, memahami itu artinya memahami melalui bahasa. Inilah awalnya Gadamer memandang peran penting bahasa dalam proses “memahami”.

Menurut Gadamer, asal mula bahasa adalah bahasa tutur, yang kemudian disusul bahasa tulis untuk efektivitas dan kelestarian bahasa tutur. Perubahan bahasa tutur menjadi bahasa tulis, menurut Gadamer, mengandung beberapa kelemahan, antara lain bahasa terlepas dari konteks peristiwa kebahasaannya dan kehilangan daya ekspresinya sehingga menjadi tidak hidup (Sumaryono, 1999: 210). Menurut Gadamer, kelemahan bahasa tulis adalah bahasa mengalami alienasi.

Pendapat Gadamer berbeda dengan tokoh post-strukturalis dan penggagas wacana post-modernisme Derrida yang mengembangkan pemikirannya bahwa menurut kodratnya bahasa adalah “tulis”, sebab yang menjadi asal mula arti adalah gagasan yang didasarkan atas jejak, bukan sebaliknya. Tulisan merupakan barang asing yang masuk ke dalam sistem bahasa, sehingga dengan demikian tulisan merupakan asal dan sebab dari bahasa yang diucapkan.

Derrida berkeyakinan bahwa meskipun orang belum mengucapkan kata-kata, tulisan sudah siap dicurahkan. Tulisan dibatasi oleh bahasa yang diucapkan, dan karena ucapan maka makna tertunda dalam tulisan. Dengan demikian, menurut Derrida tulisan merupakan *fait accompli*, sesuatu yang sudah selesai pada saat orang berbicara. Suatu tulisan sebenarnya bersifat impersonal, karena jauh dari kehadiran diri pembicara. Sedangkan ucapan penuh kehidupan dan makna, sebab pembicara hadir sendiri sehingga makna yang diucapkan menjadi jelas. Kendati berbeda pemikirannya tentang awal mula bahasa, keduanya sepakat bahwa bahasa tulis, atau bahasa lisan yang telah ditulis, menjadikan bahasa teralienasi dan jauh dari konteks karena ketidakhadiran pembicaranya.

## **H. Hermeneutika Gadamerian**

### **1. Sejarah Intelektual Gadamer**

Hans-Georg Gadamer lahir di Marburg (1900). Ia belajar filsafat, antara lain dari Nikolai Hartman, Martin Heidegger dan Rudolf Bultmann pada universitas kota asalnya. Gelar doktor filsafat dia peroleh tahun 1922. Pada tujuh tahun setelah kelulusannya (1929), Gadamer mulai mengajar di Marburg, hingga pada tahun 1937 menjadi guru besar di tempat yang sama. Pernah mengajar di Leipzig (1939), kemudian Frankfurt (1947), dan sejak 1949 mengajar di Heidelberg hingga pensiun.

Karya terbesar Gadamer (*Truth and Method*) ditulis semula dalam bahasa Jerman (*Wahrheit und Methode*) terbit pertama kali menjelang dia pensiun (1960). Karya ini, pada dasarnya merupakan dukungan sangat berharga bagi karya salah satu gurunya, Heidegger (*Being and Time*). Meskipun jelas-jelas merupakan karya

filsafat, tulisan Gadamer tersebut telah dibaca tidak hanya oleh para ahli filsafat tetapi juga diminati dan memberikan pengaruh terhadap ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu sosial, dan bahkan ilmu alam.

Namun demikian, sebagaimana banyak dikemukakan oleh para komentatornya, sangat sulit untuk memahami karya-karya Gadamer. Menurut Palmer (1969: 166), salah satu penyebab sulitnya memahami karya Gadamer adalah karena argumen-argumen Gadamer sangat mengandalkan analisis kritisnya terhadap bahasa, kesadaran sejarah, serta pengalaman estetik. Membaca *Truth and Method* (edisi 1975), misalnya, bukan usaha yang gampang. Ini seolah mencerminkan pemikirannya tentang perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*) antara pemikiran Kant, Dilthey dan Aquinas, serta tentu saja gagasan Gadamer sendiri.

Pertanyaan dan permasalahan seringkali menjadi sub-judul dari tiga bagian besar buku *Truth and Method*. Ini menunjukkan bahwa dalam menguraikan pikirannya, Gadamer tidak mengandalkan proposisi-proposisi yang serba pasti, melainkan justru dengan mengajukan pertanyaan. Gadamer berpikir melalui bertanya. Demikian pula, walaupun Gadamer memberi judul bukunya *Truth and Method*, buku itu ternyata tidak bermaksud menjadikan hermeneutik sebagai metode dan berada jauh dari klaim kebenaran. Gadamer tidak berupaya mencapai kebenaran melalui metode, melainkan melalui dialektika, sebab dalam proses dialektik kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara bebas lebih banyak kemungkinannya daripada dalam proses metodik.

Seperti judul yang diberikan terhadap bukunya, persoalan hermeneutik pertama yang dikritik oleh Gadamer (1975) adalah tentang hubungan antara metode dan kebenaran. Dia menolak pendapat sangat umum, sejak masa Descartes, bahwa metode merupakan jalan emas menuju kebenaran. Telah diterima begitu saja bahwa prosedur-prosedur metodik bisa menghilangkan gangguan dari unsur-unsur lain, termasuk subjektivitas seorang pengkaji. Alih-alih menerima begitu saja pendapat tersebut, Gadamer (1975) memperkenalkan pandangan hermeneutik filosofisnya.

He argues that this tradition erred in restricting the problem of understanding to methods for ascertaining an agent's or author's intentions; rather, understanding remains primarily a historically situated understanding of the possible validity of texts or such "text-analogous" as actions, practices and social norms. In this critique of the hermeneutic tradition, Gadamer already introduces two of the important tenets of his own "philosophical hermeneutics": the possible "truth" of texts or text-analogous and the historically conditioned or prejudice character of understanding (Warnke, 1987: ix).

Pemikiran tersebut dibangun di atas landasan “matinya sang pengarang”, sebuah idiom yang jika dilacak ke belakang akan ditemukan referensinya pada gagasan Friedrich Nietzsche tentang kematian Tuhan. Konsep hermeneutika ini menemukan titik kulminasinya pada Hans-Georg Gadamer yang menyatakan bahwa sekali teks hadir di ruang publik, ia telah hidup dengan nafasnya sendiri. Hermeneutika tidak lagi bertugas menyingkap makna objektif yang dikehendaki oleh pengarangnya, tetapi adalah untuk memproduksi makna yang seluruhnya memusat pada kondisi historisitas dan sosialitas pembaca (Hamdi, 2003: 48).

Harus diakui bahwa konsep pemikiran ini telah menggeser secara revolusioner perlakuan atas teks. Makna teks tidak lagi terbatas pada pesan yang



dikehendaki pengarangnya, sebab teks bersifat terbuka bagi pemaknaan pembacanya. Dengan demikian, penafsiran merupakan kegiatan produktif, memberikan makna atau lebih tepatnya mengaktualisasikan makna yang potensial dalam teks itu.

## 2. Pokok-Pokok Hermeneutika Gadamer

Salah satu persoalan penting---yang menjadikan pemikiran Gadamer relevan --- dalam ilmu-ilmu sosial adalah jawaban yang tepat terhadap pertanyaan mengapa (*why*). Problema ini melahirkan dua aliran utama filsafat ilmu sosial. Kelompok pertama, yang sering disebut sebagai aliran positivisme, mengajukan jawaban berupa penjelasan tindakan manusia (*explaining human actions*). Kelompok kedua, yang sering disebut sebagai aliran interpretivisme, mengajukan jawaban berupa pemahaman tindakan manusia (*understanding human actions*). Kaum positivis berupaya mengenali sejumlah penyebab (*causes*) perilaku, sedangkan kaum interpretivis berupaya menggali alasan (*reasons*) tindakan.

Throughout his work, however, he emphasizes the necessity of distinguishing between two forms of understanding: the understanding of truth-content and the understanding of intentions. The first form of understanding refers to the kind of substantive knowledge one has when one is justified in claiming that one understands Euclidean geometry or an ethical principle, for example. Here understanding means seeing the "truth" of something, grasping that the sum of the sequence of the two sides of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse, that the validity of Euclidean geometry is relativized by the discovery of other forms of geometry or that murder is wrong. Understanding in this sense involves insight into a subject-matter or, as Gadamer puts it, an understanding of *die Sache*. The second sense of understanding, in contrast, involves a knowledge of conditions: the reasons why a particular person says that murder is wrong or the intention behind someone's claiming that a geometrical proposition is true. This kind of understanding thus involves an understanding of the claim or action as opposed to a

substantive understanding of the claim or action itself. What is understood is not the truth-content of a claim or the point of an action but the motives behind a certain person's making certain claim or performing a given action (Warnke, 1987: ix).

Menurut pandangan Gadamer, pemahaman yang sebenarnya lebih menunjuk pada bentuk pemahaman pertama, yakni sebagai suatu pemahaman substantif terhadap kebenaran dan bukan pemahaman intensional. Pemahaman intensional, yang mengacu pada keniatan produsen wacana belum bisa dinyatakan sebagai pemahaman yang sebenarnya. Hal ini merupakan ciri utama hermeneutika Gadamer. Jadi, pemahaman bukan sekadar keniatan pelaku tindakan, melainkan kesepakatan bersama.

Understanding (Verstandnis) is first of all agreement (Einverstandnis). So human beings usually understand one another immediately or they communicate (sich verstandigen) until they reach an agreement. Reaching an understanding (Verstandigung) is thus always: reaching an understanding about something (Gadamer, 1975: 156).

Tampak jelas bahwa suatu makna bersifat baik multivalen atau diadik: multivalen karena tindak intensional atau produknya akan memiliki banyak makna tergantung pada penafsir yang terlibat; dan diadik karena makna hanya muncul dari hubungan antara dua subjek, pelaku dan penafsirnya.

This sharply contrasts with intentionalism, according to which meaning is both univalent (each act has a specific meaning) and monadic (this meaning results from just one subject, namely, the agent). Notice that according to intentionalism the meaning of the act is already contained in it by virtue of the intentionality it embodies. Meaning is something already present waiting to be grasped, a meaning which exists independently of those who seek to discover it (Fay, 1996: 142-143).

Dalam hermeneutika Intensionalisme sebenarnya makna sudah menanti, tinggal ditemukan oleh penafsirnya. Tidak diperlukan kegiatan lain, terutama

kegiatan penafsiran agar sesuatu tindakan bermakna, sebab *locus* makna ada pada kegiatan penciptanya, bukan dari kegiatan khalayak penafsirnya.

Penegasan *locus* makna bukan pada keniatan pelaku tindakan, tetapi sebagai hasil komunikasi --- ada yang menyebut dialog, dialektika, dan kadang-kadang Gadamer menyebut kesepakatan --- antara pelaku tindakan dengan khalayak penafsirnya merupakan "pembaharuan" yang dilakukan oleh Gadamer terhadap sejumlah kecenderungan hermeneutika sebelumnya.

Implikasi lebih lanjut dari penempatan *locus* makna ini adalah makna selain niscaya majemuk, makna niscaya juga membarui. Majemuk karena tergantung pada hasil komunikasi antara produsen teks dengan penafsir. Membarui karena walaupun bisa saja teksnya tidak mengalami perubahan, tentu ada perubahan pada diri penafsir teks tersebut. Implikasi ini dijelaskan oleh Grondin (1994: 115) sebagai berikut:

This can best be seen by means of a negative example, non-understanding. Whenever we cannot understand a text, the reason is that it says nothing to us or has nothing to say. So there is nothing to be surprised or complain about if understanding occurs differently from one period to another, or even from one individual to another. Motivated by a particular question of the moment, understanding is not just reproductive but because it involves application, always also a productive activity.

Makna tindak intensional dan produknya tidak bisa merupakan peninjauan kembali atau penemuan kembali niat masa lalu para agen atau menemukan intensionalitas pada tindak-tanduk itu sendiri. Tindak yang bermakna menjadi bermakna hanya jika ditempatkan dalam suatu konteks interpretif tertentu oleh seorang interpreter khusus yang melakukannya guna menanggapi maknanya. Bila horizon interpretif berbagai interpreter berubah, dimensi-dimensi

baru makna akan muncul. Hal ini menyiratkan bahwa makna tindak dan produknya tidak hanya akan berubah di sepanjang waktu namun tidak akan pernah disadari secara pasti. Makna tindak intensional atau produknya akan berbeda bagi orang yang berbeda. Dalam ungkapan lebih ringkas, "... meaning only emerges when it is interpreted, and continues to reemerge with each new interpretation (Fay, 1996: 143).

Unsur penting lainnya dari hermeneutika Gadamer (1975) menyangkut hakikat penafsiran. Penafsiran bukan proses psikologis empati, namun proses membiarkan signifikansi suatu objek atau tindak intensional mengemuka sendiri. Gadamer menguraikan interpretasi sebagai suatu "fusi horison-horison" di mana suatu objek atau tindak yang bermakna yang berasal dari satu dunia konseptual diterjemahkan ke dalam pengertian yang sesuai bagi orang lain.

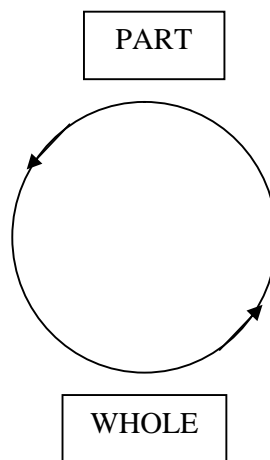
Hence an essential part of the concept of situation is the concept of "horizon." The horizon is the range of vision that includes everything that can be seen from a particular vantage point. Applying this to the thinking mind, we speak of narrowness of horizon, of the possible expansion of horizon, of the opening up of new horizons etc. (Gadamer, 1990: 269)

Horison, bagi Gadamer adalah "kepenempatan" (*situatedness*) semua penafsiran yang terjadi dalam suatu wacana. Horison bergerak sewaktu mereka yang memandang horison itu juga bergerak. Dengan "fusi" (*verschmelzung*), Gadamer bermaksud menunjuk pada proses penuturan objek asing atau masa lalu kepada penafsir tertentu di tempat atau lingkungan budaya mereka. Jadi penafsiran lebih mudah dan lebih baik dipahami sebagai proses penerjemahan. Penafsir menerjemahkan teks yang diproduksi oleh pelaku.

"Fusi" menunjuk pada pertemuan dua horison sehingga menyatu, yakni ketika perbedaan antara kedua horison telah dihilangkan. Di sini pembaca Gadamer perlu waspada. Hermeneutika Gadamer bukan bersifat subjektivis, yang menyatakan bahwa suatu teks adalah apapun yang dikatakan oleh seorang penafsir mengenai teks tersebut. Ini berarti bahwa meskipun Gadamer mengakui peran aktif penafsir dalam proses aktualisasi makna (Bertens, 1981: 231) tidak berarti bahwa penafsir sekadar membaca secara sendiri terhadap peristiwa-peristiwa dan objek-objek, atau dengan ungkapan lagi sekadar melakukan refleksi-diri. Sebab dalam proses penafsiran ini, penafsir menyertakan semacam cadangan makna yang tersembunyi dalam diri mereka, sehingga dikatakan oleh Fay (1996: 144) bahwa dalam konteks baru, aspek-aspek berbeda dari makna mengemuka.

In this it is the interpreted speaking to interpreters in their own tongue, not the interpreters speaking to themselves using the interpreted as a mere stimulus for their own self-enclosed conversation. Interpretation, according to Gadamer, is not a hall of mirrors in which interpreters only see themselves in different poses and shapes depending on the shape and angle of the mirror which confronts them. Rather, interpretation is a process of listening to what others through their words and deeds have to say to us (in full recognition that what an act or its product says to us may well differ from what it says to others in different interpretive situations) (Fay, 1996: 144).

Pokok pikiran penting berikutnya dari Gadamer (1975) berkenaan dengan siklus hermeneutika (*hermeneutic circle*). Sebelumnya lazim diterima bahwa pemahaman kita terhadap suatu bagian akan mengubah pemahaman kita pada keseluruhan (Gadamer, 1988: 68). Sebaliknya, pengubahan pada pemahaman kita terhadap keseluruhan akan mengubah pemahaman kita pada bagian, dan seterusnya. Lingkaran hermeneutika sering digambarkan sebagai logika bagian-keseluruhan (*part-whole*) sebagai berikut (Alvesson and Skoldberg, 2000: 53):



Bagan 2.1: Lingkaran Hermeneutik

Siklus hermeneutika Gadamer digambarkan agak berbeda, yang pada dasarnya justru merupakan salah satu kekhususan hermeneutikanya. Bagian-bagiannya terdiri dari objek-objek yang ditafsirkan, sedangkan keseluruhannya terdiri atas hubungan antara objek-objek dan berbagai khalayak penafsirnya. Dengan kata lain, dalam hermeneutika Gadamer, siklus hermeneutika terdiri atas pencabangan terus-menerus antara sesuatu yang diinterpretasikan dan interpretnya, karena makna bukan sifat suatu objek namun bidang tempat suatu objek dalam interpretasi. Hanya dengan berhubungan dengan penafsirnya, maka makna objek atau peristiwa teraktualisasi. Keseluruhan, dalam hermeneutika Gadamer adalah gabungan antara yang objek yang ditafsirkan (*the interpreted*) dan yang menafsirkan (*the interpreter*). Mengacu pemikiran ini, maka ketika pemahaman atas "keseluruhan teks" menurut Hirsch tercapai, sebenarnya menurut Gadamer itu baru sebagian, sebab makna sejati adalah suatu bahasa bersama, yang di depan diistilahkan sebagai mencapai kesepakatan.

The view separates him not only from Hirsch but from so-called "reception" theorists and reader-response critics as well. For, if textual meaning cannot be located in the author's intentions, neither can it be identified with a reader's --- even an informed or ideal reader's --- experience. Rather, when a text is understood its meaning cannot be attributed to either writer or reader. The meaning of the text is a shared language, shared in the sense that it is no one person's possession but is rather a common view of a subject-matter (Warnke, 1987: 48).

Kalau varian-varian hermeneutika yang lain, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya cenderung *menegasi* atau cenderung mengabaikan kenyataan bahwa setiap penafsir niscaya memiliki prasangka-prasangka, tradisi, kepentingan praktis, bahasa dan budaya masing-masing, maka Gadamer justru menempatkan hal ini sebagai bagian (*part*) dari keseluruhan (*whole*) siklus hermeneutika. Lebih dari itu, interaksi antara objek yang bermakna dengan masyarakat interpretif bukan peristiwa yang terjadi sekali saja.

Pemahaman menuntut partisipasi (*understanding as participation*). Tidak ada pemahaman terhadap buku, bila tidak ada partisipasi dari para pembacanya. "No text and no book speaks if it does not speak the language that reaches the other person", (Gadamer, 1981: 50). Karena pada dasarnya penafsir berpartisipasi dalam menciptakan makna, maka makna pun niscaya bukan sekadar cerminan, seperti teori mimesis, juga bukan sekadar ulangan, seperti dalam teori reproduksi, melainkan hasil penciptaan kembali.

Interpretation is probably in a certain sense recreation. This recreation, however, does not follow a preceding creative act; it rather follows the figure of the created work that each person has to bring to representation in accord with the meaning he finds in it (Gadamer, 1975: 107).

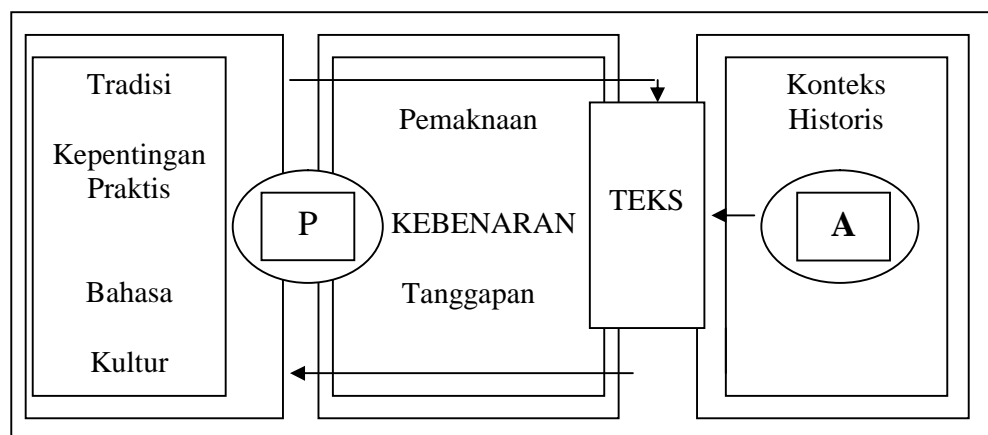
Sebagai hasil penciptaan ulang, maka makna selain berbeda antara satu orang penafsir dengan penafsir lain, juga bisa berubah-ubah. Ini semua akan

membentuk suatu proses pertukaran terus-menerus, sehingga ada perubahan pada makna objek dan hakikat masyarakat interpretif. Lingkaran hermeneutik akan membentuk suatu spiral keberulangan karena interpretasi baru atas objek-objek bermakna di masa lalu mengubah hakikat penafsirnya (Gadamer, 1988: 68). Masyarakat mengubah penafsiran atas objek-objek yang bermakna, dan terus terjadi seperti itu sampai tak terhingga. Tampak bahwa siklus hermeneutika Gadamer membentuk semacam spiral pemahaman yang menautkan objek penafsiran dengan subjek penafsirnya.

Hal yang sama juga berlaku pada peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah. Makna suatu kejadian sejarah terus berubah dan apresiasi terhadap cara perubahan makna itu merupakan salah satu faktor penyumbang pada perubahan-perubahan di masyarakat.

### 3. Penerapan Hermeneutika Gadamerian dalam Kajian Teks

Dalam proses interpretif, menurut Gadamer, terjadi interaksi antara penafsir dan teks, di mana penafsir mempertimbangkan konteks historisnya bersama dengan prasangka-prasangka sang penafsir seperti tradisi, kepentingan praktis, bahasa dan budaya. Secara ringkas, Maulidin (2003: 27) meng gambarkannya sebagai berikut (Periksa bagan 2.2).



Bagan 2.2: Hermeneutika Dialogis Gadamer



Sebagaimana tampak dalam bagan 2.2., kerangka pemikiran Gadamer mengandaikan ada dua pihak yang terlibat dalam penafsiran, antara wacana (*text*) dengan penafsir (*intepreter*). Kerangka demikian, sejauh hanya diperlukan oleh seseorang untuk menafsirkan karya orang lain memang cukup memadai. Namun demikian, bila seorang peneliti bermaksud menggunakan perspektif Gadamer, maka peneliti yang tentu saja harus melaporkan hasil penelitiannya, tidak bisa dihindari harus melakukan modifikasi agar perspektif tersebut menjadi aplikatif.

Dengan ungkapan lain, sejauh peneliti hanya bermaksud memahami wacana politik Abdurrahman Wahid, maka cukup bagi peneliti untuk memakai kerangka pemikiran Gadamer. Justru yang harus banyak dilaporkan adalah tradisi, kepentingan praktis, bahasa, dan kultur peneliti, serta konteks historis ketika wacana politik yang ditafsirkan muncul.

Akan halnya bila peneliti bermaksud menjangkau pemaknaan yang diberikan oleh orang lain, maka peneliti harus mengumpulkan datanya dari orang lain yang bersangkutan. Dalam hal ini, apa yang sangat diperlukan oleh peneliti adalah tetap peka dan mempertimbangkan tradisi, kepentingan praktis, bahasa, dan kultur orang lain tersebut, serta konteks historis ketika wacana politik yang ditafsirkan muncul. Secara metodologis, ini tampak pada bagan sebagaimana disajikan pada bab pendahuluan.

Karena menggunakan perspektif Gadamer yang sudah dimodifikasi, alih-alih menggunakan istilah Hermeneutika Gadamer, peneliti memilih istilah Hermeneutika Gadamerian. Kerangka dasar yang digunakan tetap mengedepankan pokok-pokok pemikiran Gadamer, tetapi dilakukan penyesuaian

agar kerangka tersebut aplikatif untuk kepentingan studi ini. Secara metodologik, modifikasi yang dilakukan untuk menerapkan perspektif Gadamer telah disajikan pada bagian metode kajian.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian**

Studi ini berparadigma interpretif dengan acuan dasar fenomenologi hermeneutik, yakni studi tentang teks melalui interpretasi atau penafsiran teks untuk mengungkap makna yang paling dalam dari teks tersebut. Berbeda dari tradisi paradigma positivistik yang tujuannya untuk menjelaskan perilaku manusia yang teramati dan terukur, sebaliknya tradisi fenomenologi hermeneutik bertujuan untuk memahami perilaku dan mengedepankan eksistensi manusia (subjek) sebagai sesuatu yang ditafsirkan. Asumsi dasarnya adalah yang tampak (baca: fenomena) hakikatnya merupakan bungkus dari sesuatu yang inti yang berada di dalam. Jadi yang tampak bukan realitas yang sesungguhnya, tetapi merupakan pantulan dari yang tidak tampak.

Penganut paradigma interpretif memahami fenomena sebagai gejala yang mengiringi peristiwa tertentu. Oleh karena itu, adalah tugas peneliti untuk membongkar sesuatu di balik yang tampak secara komprehensif. Asumsi dasarnya ialah setiap ujaran (baca: wacana) pasti memiliki makna atau tujuan tertentu, dan makna tidak pernah tunggal. Apalagi wacana politik: Tidak ada ujaran yang tidak bermakna. Dalam teori Analisis Wacana makna ujaran tidak hanya pada ujaran itu sendiri, tetapi juga pada konteks: kapan, di mana, dan kepada siapa wacana disampaikan.

Dalam konteks studi ini, yang dimaksudkan sebagai sesuatu yang tampak adalah komunikasi verbal atau ujaran para elit politik era Abdurrahman Wahid baik secara lisan maupun tulis. Namun demikian, karena kajian ini tidak bertujuan memahami wacana politik sebagaimana dipahami oleh pelakunya, tetapi oleh para pesaing politiknya, maka perspektif yang digunakan ialah hermeneutika Gadamerian, bukan hermeneutika intensionalisme.

*Hermeneutical phenomenology* chiefly stems from the method set forth in Heidegger's *Sein und Zeit*, according to which human existence is interpretative. The first manifestation of this fourth tendency is Hans-Georg Gadamer's *Platons dialektische Ethik* (1931), and it reemerged after Germany's National-Socialist period with his *Wahrheit und Methode* (1960). Other leaders include Paul Ricoeur, Patrick Heelan, Don Ihde, Graeme Nicholson, Joseph J. Kockelmans, Calvin O. Schrag, Gianni Vattimo, and Carlo Sini. The issues addressed in hermeneutical phenomenology include simply all of those that were added to the agenda in the previous tendencies and stages. What is different is the emphasis on hermeneutics or the method of interpretation. This tendency has also included much scholarship on the history of philosophy and has had extensive influence on the human sciences (Anonim, 2000: 5).

Sedikit telah disinggung sebelumnya, perspektif hermeneutika Gadamerian (Fay, 1996) menempatkan makna wacana bukan pada maksud (*intention*) penutur seperti pada hermeneutika intensionalisme (*pragmatics*) atau Hirschian, tetapi pada penerimaan (*perception*) pendengar atau pembaca. Walaupun suatu wacana diproduksi oleh seseorang, sesuai dengan hakikat bahasa, wacana tidak ditujukan kepada diri penutur atau penulis sendiri. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang otonom, yang sudah terlepas dari penyampainya. Menurut Valdes (1991: 398) ketika teks sudah hadir, maka produser teks sudah lepas dari teks itu sendiri dan interpretasi atas teks diserahkan sepenuhnya kepada pembacanya. Selanjutnya Valdes menyatakan: "...we see an author take a stand in relation to his text and,

in doing this, set a place the variability of interpretations". Sehubungan dengan itu, sebagai penganut post-strukturalisme, Piliang (1999: 70) memandang pengarang teks tidak lagi hadir dalam wacana: pengarang tak lagi bicara. Meminjam istilah Barthes (1976), *the author is dead*, sebab bahasalah yang bicara. Dengan demikian, peneliti perspektif hermeneutika Gadamerian, sebagaimana dinyatakan Valdes (1991) di atas, hanya akan berdialog dengan teks. Jelas Valdes (1991: 303), "With written texts, the discourse must speak by itself".

Pernyataan tentang kematian *author* dalam pemikiran Barthes di atas tidak mengacu kepada pengertian *writer ansich*. Definisi yang lebih memuaskan tentang *author*, menurut Fasya (2002: 43) adalah kompetensi atau wewenang yang dimiliki para pihak atau lembaga untuk menentukan makna final atau paling absah dari seluruh tulisan/teks. Dengan demikian, analisis teks digambarkan Barthes sebagai ruang terbuka karena tak ada yang berhak mengganggu. Pembaca belajar mendewasakan diri di hadapan teks untuk menjadi *author* baru. Ia bukan lagi pribadi-pribadi *nomina*, tetapi telah menjadi seseorang yang telah menduduki wilayah okupasi dengan seluruh jejak yang tertinggal dari tulisan dalam teks tersebut. Ia merupakan korektor dan pemersatu fungsi teks yang heterogen. Konsep yang dibangun Barthes adalah posisi di sela-sela (*in-betweeness*) antara pembaca dan teks.

Dalam analisis teks, Barthes dengan tegas mengingatkan bahwa teks bukan untaian kata-kata yang siap melepaskan makna tunggalnya semata, yaitu pesan dari sang penciptanya saja, tetapi berasal dari ruang multidimensi yang ada

tersebar dalam tulisan. Teks tidak lain merupakan sejumlah kutipan yang tergambar dari pusat-pusat budaya yang jumlahnya tidak terbatas.

“We know a text is not a line of words releasing a single theological’ meaning (the message of Author-God but a multi-dimensional space in which a variety of writing, none of original, blend, and clash. The text is a tissue of quotations drawn from the innumerable centres of culture” (Barthes, 1977: 146).

Butir penting gagasan Barthes tersebut bagi pengkaji hermeneutika Gadamerian adalah teks akan dikupas maknanya jauh lebih dalam daripada penciptanya sendiri. Otoritas sebuah tulisan berada di tangan pembaca (Fasya, 2002: 43).

## **2. Sumber Data, Keabsahan Data dan Unit Analisis Penelitian**

Data penelitian ini bersumber dari pernyataan-pernyataan keempat tokoh politik Indonesia era Presiden Abdurrahman Wahid, baik yang bersifat memulai (*prior discourse*) maupun yang bersifat menanggapi wacana (*counter discourse*) pihak lain. Keempat tokoh politik tersebut adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Akbar Tandjung.

Satuan kajian atau unit analisis penelitian ini adalah wacana lisan dan tulis dari empat elit politik yang saling bersaing dan bertikai selama masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yakni Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, yang menurut Smelser (1976) keduanya disebut *governing elites*, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua DPR Akbar Tandjung yang menurut Smelser disebut *non-governing elites*.

Keempat elit politik tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan atas nama lembaga yang dipimpinnya yang diperoleh melalui prosedur resmi dalam lembaga yang bersangkutan. Karena mereka adalah elit politik dan pejabat resmi pemerintah, maka perilakunya, baik verbal maupun non-verbal, sengaja maupun tidak, akan selalu diarahkan untuk kepentingan politiknya. Dalam kajian ini, perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku verbal berbentuk wacana.

Jumlah keseluruhan teks dimaksud mencakup 155 (seratus lima puluh lima) berita Abdurrahman Wahid, 113 (seratus tigabelas) berita Megawati Soekarnoputri, 86 (delapan puluh enam) berita Amien Rais, dan 97 (sembilan puluh tujuh) berita tentang Akbar Tandjung, serta sebanyak 14 (empat belas) naskah berupa salinan pidato keempat tokoh politik tersebut. Seluruh bahan yang dianalisis ini disebut korpus.

Upaya meningkatkan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup naskah pidato resmi, sambutan yang sengaja direkam, serta petikan pernyataan dalam berbagai media massa. Terdapat 16 (enam belas) media massa yang memuat atau menyiarkan berbagai pernyataan keempat tokoh politik yang dikaji dalam penelitian ini, yakni koran Kompas, Republika, Jawa Pos, Surya, Kedaulatan Rakyat. Dari Majalah data diperoleh dari: Tempo, Forum, Forum Keadilan, Gatra, Aula, Majalah D&R, Panji, Majalah Retorika dan Tabloid Nasional. Dari media elektronik meliputi rekaman dari SCTV, dan RRI.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter dan rekaman pidato para elit politik. Dokumen yang dikumpulkan berupa teks-teks lisan dan tulis keempat elit politik sebagaimana disebut di atas, baik yang langsung disampaikan kepada masyarakat maupun yang muncul melalui media cetak dan elektronik. Peneliti juga melakukan rekaman dengan alat bantu berupa *tape recorder* terhadap ujaran keempat elit politik dimaksud dari berbagai peristiwa komunikasi. Data berupa hasil rekaman kemudian segera ditranskrip ke dalam data tulis.

Data penelitian juga diperoleh lewat bantuan wartawan berupa kaset hasil wawancara dan pidato keempat elit politik dimaksud berupa ujaran, naskah pidato, dan hasil wawancara dengan elit politik di berbagai kesempatan dan peristiwa komunikasi. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran data lewat lembaga-lembaga resmi pemerintah, teman sejawat, dan kantor-kantor partai politik di mana keempat elit politik berafiliasi.

### 4. Proses Analisis Data

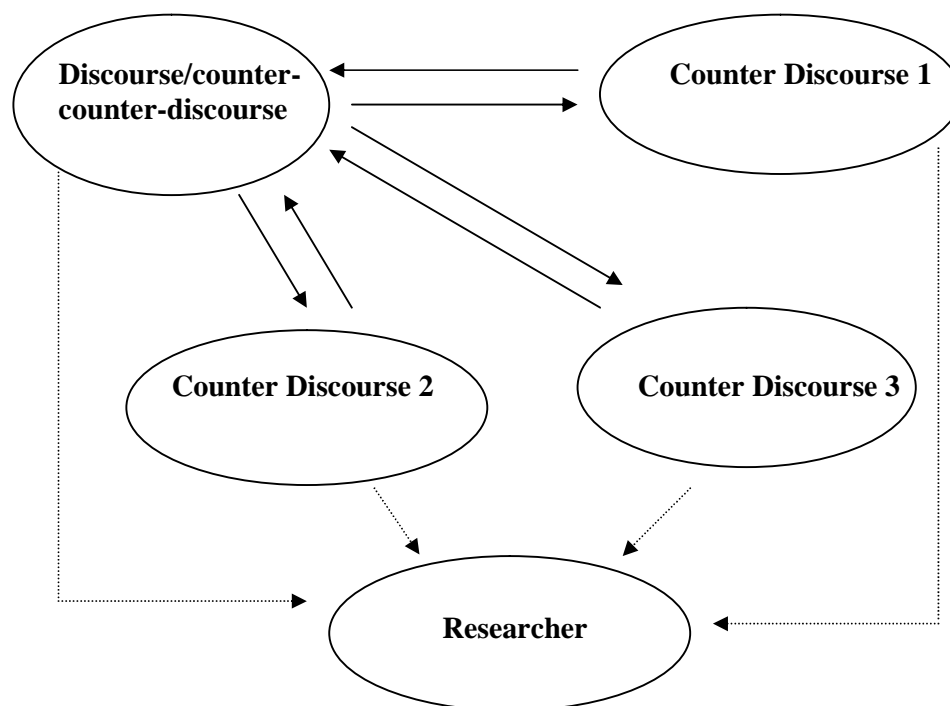
Dengan menggunakan kategorisasi menurut Smelser (1967), elit politik dikategorikan menjadi dua, yaitu: (1) elit politik pemerintah (*governing elites*), yaitu Abdurrahman Wahid, dan dalam batas tertentu Megawati Soekarnoputri yang menghasilkan wacana (*discourse*), dan (2) elit bukan pemerintah (*non-governing elites*) yang memproduksi wacana tandingan (*counter discourse*).

Seperti telah diuraikan, selama Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden, dunia politik Indonesia menjadi kancah persaingan elit politik. Dalam

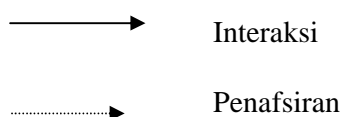


persaingan itu, para elit menggunakan bahasa atau lebih tepatnya wacana politik sebagai piranti perjuangan mereka. Satu wacana (*prior discourse*) mengajukan klaim kebenaran, sedangkan wacana lain melakukan kritik atau penyerangan (*counter-discourse*), untuk selanjutnya dibalas lagi oleh wacana pertama dalam bentuk pembelaan (*apologetic discourse*), atau malah serangan balik (*counter-counter discourse*).

Dengan demikian, dalam penelitian ini ada tiga unsur penting yang terlibat, yakni *discourse*, yang menghasilkan *counter discourse* yang merespons *discourse* dan peneliti yang menafsirkan *counter discourse* untuk memperoleh makna *discourse* sebagaimana digambarkan berikut:



Keterangan:



Dengan mengacu pada hasil pembahasan terhadap asumsi, konsepsi, dan strategi hermeneutika Gadamerian, secara berturut-turut peneliti mengembangkan langkah operasional sebagai berikut:

#### **a. Mengumpulkan Wacana Terpublikasi**

Langkah pertama, mengumpulkan wacana terpublikasi (*published discourses*), dilakukan dengan cara mengumpulkan salinan (*hardcopy*) seluruh berita yang berisi kutipan pernyataan empat orang elit politik era kepresidenan Abdurrahman Wahid, yaitu: (1) Abdurrahman Wahid, (2) Megawati Soekarnoputri, (3) Amien Rais, dan (4) Akbar Tandjung. Diasumsikan bahwa ada hubungan antara tingkat kebermaknaan suatu pernyataan elit politik dengan tingkat kepentingan pernyataan tersebut. Menggunakan perspektif sosiolinguistik, dapat dikatakan bahwa tidak ada kata yang tidak bermakna, apalagi wacana. Setiap kata dan wacana pasti niscaya bermakna sesuai kepentingan produsernya.

#### **b. Menetapkan Wacana Interaktif**

Langkah penetapan wacana interaktif (*interactive discourse*) ini harus dilakukan karena, sesuai dengan pilihan perspektif hermeneutika Gadamerian yang menegaskan bahwa makna merupakan produk interaksi antara dua subjek, peneliti berusaha mengungkap makna wacana bukan berdasarkan pemahaman penutur atau penulis, melainkan justru menurut pasangan interaksinya. Dengan demikian, hanya pernyataan yang ditanggapi (*responsded statements*) dan pernyataan yang menanggapi (*responsding statements*) yang dikelompokkan ke dalam wacana interaktif, dan akan dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan terhadap keseluruhan korpus, tampak bahwa Abdurrahman Wahid merupakan tokoh politik yang paling banyak memproduksi wacana politik interaktif (268 satuan wacana), disusul oleh M. Amien Rais (221 satuan wacana), Akbar Tandjung (167 satuan wacana), dan terakhir Megawati Soekarnoputri (163 satuan wacana). Wacana politik interaktif yang dimaksud dalam kajian ini adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis yang menyangkut tokoh politik lain. Kondisi yang berlawanan ditemukan pada Megawati Soekarnoputri, sebab walaupun paling sedikit memproduksi wacana, ternyata dia justru paling banyak diwacanakan (224 satuan wacana), disusul kemudian oleh Akbar Tandjung (202 satuan wacana), Abdurrahman Wahid (197 satuan wacana), dan akhirnya M. Amien Rais (196 wacana).

Berikut disajikan hasil pemetaan umum terhadap wacana politik interaktif keempat tokoh politik Indonesia era Abdurrahman Wahid (Periksa Tabel 1.1.)

Tabel 1.1. Tabel Kajian Wacana Politik

Sebagai Sasaran Wacana	Sebagai Pelaku Wacana				
	Abdurrahman Wahid	Megawati Soekarnoputri	Amien Rais	Akbar Tandjung	Frekuensi sebagai Pelaku
Abdurrahman Wahid	---	101	91	76	268 (I)
Megawati Soekarnoputri	63	---	50	50	163 (IV)
M. Amien Rais	76	69	---	76	221 (II)
Akbar Tandjung	58	54	55	---	167 (III)
Frekuensi sebagai Sasaran	197 (IV)	224 (I)	196 (III)	202 (II)	---

### c. Menelusuri dan Menelaah Wacana Pendahuluan

Berdasarkan hasil langkah sebelumnya, langkah penelusuran dan telaah wacana pendahuluan (*prior discourse*) ini dilakukan dengan cara mengumpulkan baik salinan teks lengkap, maupun rekaman pernyataan langsung keempat elit politik nasional era kepresidenan Abdurrahman Wahid sebagai wacana pendahuluan yang mengandung makna intensional (*intentional meanings*). Penelusuran dan penelaahan muatan terhadap wacana pendahuluan ini dilakukan masih dalam kerangka hermeneutika intensionalisme. Pembacaan terhadap wacana pendahuluan penting dilakukan, sebab dalam pandangan hermeneutika wacana tidak pernah berdiri sendiri, dan karenanya merupakan tunjangan dari wacana sebelumnya. Ini yang disebut studi intertekstualitas.

Intertekstualitas adalah sebuah teori yang diajukan Julia Kristeva dalam rangka menjabarkan teks sebagai jaringan tanda yang berkaitan dengan berbagai sistem pemaknaan lainnya dalam suatu kebudayaan. Disebutkan bahwa telaah intertekstualitas berangkat dari asumsi bahwa kapan pun sebuah karya ditulis tidak mungkin lahir dari kekosongan budaya. Setiap teks terwujud sebagai mosaik kutipan-kutipan, sebuah teks merupakan peresapan dan transformasi teks-teks lain. Jadi, tidak ada sebuah teks pun yang mandiri, dalam arti penciptaannya dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain. Pemahaman teks baru memerlukan latar belakang pengetahuan teks-teks yang mendahuluinya (Yasa, 2007: 45-46).

#### **d. Menelusuri dan Menelaah Proses Diadik Pemaknaan**

Langkah penelusuran dan telaah proses diadik pemaknaan (*diadict process of signification*) ini dilakukan sebagai kebalikan dengan cara mengumpulkan baik salinan teks lengkap, maupun rekaman pernyataan yang menanggapi wacana pendahulu keempat elit politik nasional era kepresidenan Abdurrahman Wahid sebagai wacana tanggapan. Ini dilakukan sesuai dengan asumsi hermeneutika Gadamerian, bahwa makna hanya muncul dari hubungan antara sekurang-kurangnya dua subjek, penutur dan pendengar.

#### **e. Menelaah dan Mengungkap Kecerba-maknaan Wacana**

Langkah telaah dan pengungkapan kecerba-maknaan wacana (*meaning multivalence of discourse*) ini dilakukan dengan menentukan arah tanggapan baik positif (*pro-discourse*), netral (*neutral discourse*), maupun negatif (*counter discourse*), yang diberikan oleh satu atau lebih elit politik terhadap wacana pendahulu. Langkah ini harus dilakukan sesuai dengan asumsi hermeneutika Gadamerian, bahwa proses pemaknaan (*signifying process*) tidak bisa dihindari akan menghasilkan ragam makna sesuai dengan latar belakang, kedudukan dan kepentingan masing-masing penafsir. Dari langkah ini, diperoleh peta konflik sementara keempat elit politik yang dikaji.

#### **f. Mengembangkan Pemahaman Teoretik Substantif**

Langkah pengembangan pemahaman teoretik substantif (*substantive theory*) ini dilakukan dengan menerapkan secara adaptif paradigma penyandian (*coding paradigm*) yang dikembangkan oleh Strauss (1990: 27-28). Paradigma penyandian ini mencakup kondisi penyebab, interaksi para pelaku, strategi dan

siasat, serta akibat-akibat. Penelusuran kembali dilakukan untuk menemukan kondisi penyebab munculnya suatu wacana pendahulu, interaksi diadik pemaknaan oleh elit politik, strategi dan siasat yang menghasilkan multivalensi makna, dan akibat-akibat yang timbul dari multivalensi makna tersebut.

#### **g. Mengembangkan Pemahaman Teoretik Formal**

Untuk meningkatkan suatu teori substantif menjadi teori formal (*formal theory*) yang didasarkan pada satu bidang kajian lapangan, bisa digunakan dua teknik penulisan ulang. Pertama, peneliti menghilangkan sifat-sifat, kata-kata, maupun ungkapan-ungkapan substantif. Kedua, peneliti menulis ulang suatu teori substantif hingga derajat puncak abstraksi. Berkenaan dengan dua teknik ini, peneliti memilih teknik pertama dengan cara menghapuskan muatan substantif (*substantive content*) dalam model teoretik yang diajukan, sehingga perhatian dan pemikiran tertuju pada sejumlah konstruk formal (*formal constructs*).

### **5. Lingkup Penelitian**

Studi ini bertujuan memahami wacana lisan dan tulis dan kontra-wacana elit politik Indonesia era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Fokus utamanya adalah wacana politik yang diproduksi oleh empat elit politik nasional. Masing-masing adalah Abdurrahman Wahid sebagai elit yang memerintah, Megawati Soekarnoputri yang memiliki posisi mendua, Amien Rais dan Akbar Tandjung yang termasuk elit tak memerintah.

## 6. Keterbatasan Penelitian

Secara garis besar terdapat keterbatasan metodologis dalam penelitian ini. Keterbatasan metodologis terkait dengan kelemahan empirik dan hermeneutik. Keterbatasan empirik berkenaan dengan pengumpulan dan penentuan data. Semula data penelitian akan diambil dari ujaran-ujaran lisan, temu wicara, dialog atau pidato tanpa teks tertulis subjek (elit politik), sehingga akan diperoleh ungkapan, gagasan, dan pemikiran asli mereka. Tetapi karena kesulitan yang dihadapi untuk memperoleh teks lisan tersebut, penelitian ini akhirnya juga menggunakan teks tertulis berupa naskah-naskah pidato, tulisan, komentar, argumen dan analisis politik yang muncul di media sebagai data utama.

Dengan menggunakan teks tertulis, penelitian ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, teks tertulis tersebut tidak dibuat sendiri oleh elit politik tetapi merupakan pemikiran kolektif staf ahlinya, sehingga tidak bisa dianggap mencerminkan gagasan dan ideologi politik mereka. *Kedua*, karena teks tertulis itu disusun oleh staf khusus, maka teks itu hanya mencerminkan kebaikan-kebaikannya saja, sehingga tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Teks tertulis biasanya kering, normatif, dan programatik, karena disusun oleh tim penyusun teks pidato berdasarkan pemikiran, evaluasi dan program pemerintah. Kajian seperti ini sebenarnya akan jauh lebih menarik jika menggunakan teks lisan saja sebagai data utama.

Keterbatasan hermeneutik terkait dengan metode tafsir teks. Menurut Hermawan Sulisty (dalam Eriyanto, 2000: viii) tafsir tekstual dapat memberikan gambaran mengenai substansi pemikir resminya, tetapi bisa menghasilkan

kesimpulan yang *misleading*, menyesatkan. Sebab, analisis tekstual sama sekali berbeda dengan analisis perilaku. Teks, lebih-lebih teks tertulis, bisa dijadikan petunjuk bagi pola perilaku seseorang, tetapi menyusun pola semacam itu semata-mata hanya dari teks tertulis bisa menghasilkan kesimpulan yang sama sekali berlainan dan berbeda. Muatan normatif yang selalu ada di dalam teks bisa saja tidak muncul dalam tindakannya. Bahkan dapat pula terjadi, apa yang diucapkan justru bertentangan dengan apa yang dilakukan. Salah satu solusinya adalah kerangka analisisnya disusun secara tematik, atau berdasarkan topik atau tema wacana. Penyusunan secara tematik akan memudahkan analisis atas bagian-bagian tertentu yang sama dari berbagai teks. Selain itu, analisis interpretif seperti dinyatakan Santoso (2002: 38) tidak akan pernah “selesai” dan “otoritatif”, sebab interpretasi bersifat dinamis dan terbuka terhadap konteks dan informasi baru.

Dengan kelemahan metodologis seperti diungkapkan di atas, bukan berarti penelitian ini kurang memiliki daya tarik. Sebab, pendekatan yang digunakan, yakni hermeneutika Gadamerian, merupakan varian lain dari berbagai studi dengan pendekatan serupa, yaitu memahami politik melalui wacana (bahasa). Dengan demikian, penelitian ini, sekecil apapun, diharapkan dapat memberikan sumbangan metodologis dan akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu bahasa dan ilmu hermeneutika atau metode tafsir.



## **BAB IV**

### **LATAR DAN PELAKU UTAMA POLITIK PASCA ORDE BARU**

Walaupun menggunakan perspektif yang sama sekali tidak konvensional, sudah barang tentu upaya memahami wacana politik Abdurrahman Wahid tidak bisa dipisahkan dari latar dan pelaku utama politik Indonesia pasca Orde Baru. Kalau latar mencakup kecenderungan konflik pada setiap suksesi presiden, secara lebih *bipolar* para pelaku utama politik Indonesia pasca Orde Baru mencakup sosok Abdurrahman Wahid dan elit pendukungnya yang berhadapan dengan para pesaing utamanya, yaitu: Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Akbar Tandjung. Berikut disajikan sejarah politik sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya Orde Baru untuk menggambarkan dinamika konflik yang memang mewarnai sejarah perjalanan negeri ini.

#### **A. Indonesia, Negara Demokrasi Berciri Persaingan**

Sejak berdiri, Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Tampak jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan sebagai konstitusi, bahwa “Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pemilihan Umum sebagai mekanisme untuk memanifestasikan kedaulatan rakyat dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali yang sering disebut sebagai ajang dan pesta demokrasi untuk memilih anggota DPR dan MPR.

Menurut kajian salah satu Indonesianis yang cukup dikenal, Liddle (1992: 20), Indonesia merdeka memulai riwayatnya sebagai sebuah negara demokrasi

konstitusional yang bercirikan persaingan partisan (pendukung partai) yang tidak terbatas di dalam kerangka pemilihan umum yang bebas dan parlemen yang berkuasa (dalam hubungannya dengan struktur yang lain).

Persaingan dan konflik muncul tidak hanya ketika berlangsung suksesi kepemimpinan nasional, tetapi juga sepanjang masa kepresidenan. Berkenaan dengan persaingan dan konflik ini, berikut disajikan paparan tentang kecenderungan suksesi penuh konflik di Indonesia, dan konflik politik sepanjang masa kepresidenan yang pernah ada.

### **1. Kecenderungan Suksesi Penuh Konflik**

Perjalanan demokratisasi di Indonesia mengalami fase pasang surut. Dalam waktu beberapa tahun rasa tidak puas masyarakat terhadap apa yang telah dicapai oleh demokrasi perwakilan dan lebih luas lagi terhadap seluruh gaya dan arah pemerintahan parlementer kian menyebar. Akibatnya, setelah sempat menikmati sistem pemerintahan parlementer dengan konstituante 1955 yang diberi tugas menyusun konstitusi baru, Indonesia kembali beralih ke sistem presidensial lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Lewat dekrit tersebut Presiden Soekarno memberi kerangka dasar kelembagaan baru pada gagasan Demokrasi Terpimpin. Bersamaan dengan itu, Dewan Konstituante dibubarkan karena telah lama menghadapi jalan buntu mengenai persoalan apakah negara akan mempunyai dasar pancasila atau suatu dasar yang lebih eksplisit Islam dan memerintahkan perdebatan mengenai hal itu dihentikan (Siregar, ed., 1985: 155).

Kenyataannya, Dekrit Presiden tersebut tidak mampu menjawab persoalan. Banyak tindakan politik Soekarno malah semakin otoriter. Misalnya, Soekarno

menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup sebagai upaya memperkokoh kekuasaannya, pada tahun 1960 membubarkan DPR Peralihan dan menggantinya dengan DPR Gotong Royong, hak kontrol, seperti hak interpelasi dan hak bertanya DPR ditiadakan dan bahkan mengangkat pimpinan DPR menjadi salah seorang menteri dalam kabinet. Dengan demikian, secara penuh DPR menjadi subordinat atau terkooptasi oleh kepentingan eksekutif, sehingga DPR tidak memiliki kekuasaan untuk mengkritisi apalagi menjatuhkan presiden. Karena itu, Presiden Soekarno sangat leluasa menjalankan ambisi-ambisi politiknya. Selain itu, Soekarno juga mereduksi demokrasi dengan slogannya “Revolusi belum selesai” sebagai dasar legal tindakan otoriternya.

Berbagai krisis juga menempa rejim Soekarno, sehingga gelombang protes yang dimotori mahasiswa membawa pengaruh cukup signifikan untuk menjatuhkan pemerintahan Soekarno yang sudah tidak memperoleh legitimasi rakyat. Lahirlah era Orde Baru yang dikemudikan oleh Jenderal TNI Soeharto dengan warisan persoalan bangsa yang sangat kompleks.

Pada awalnya Soeharto dengan rejim Orde Barunya menjanjikan banyak hal untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Legitimasi Soeharto semakin hari semakin tumbuh karena ia mampu menguasai krisis politik yang disebabkan oleh kudeta yang gagal yang dilakukan oleh sayap militer dan didukung oleh Partai Komunis Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 (G 30 S/PKI). Adanya faktor komunis di dalam Gerakan 30 September 1965 tersebut menyebabkan terjadinya kristalisasi politik pada sebagian besar elit politik, rakyat, pelajar, dan mahasiswa yang mendukung gerakan-gerakan politik dan militer Soeharto untuk mengeliminasi kekuatan komunis di Indonesia. Secara

lambat tetapi pasti Soeharto melemahkan dan kemudian menyalakan dua pilar utama kekuatan politik Orde Lama, yakni Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan tinggalah militer, khususnya TNI-AD sebagai satu-satunya kekuatan politik yang tersisa (Bhakti, 2000: 63).

Era “pembangunan” pun dimulai dengan ditopang oleh tiga kekuatan utama, yakni para ekonom sebagai pembuat kebijakan, militer sebagai pemelihara kestabilan, dan birokrat sebagai pelaksana kebijakan pembangunan (Liddle, 1992: 131). Maka, pembangunan sarana dan prasarana umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, jalan raya dan sebagainya secara masal dilakukan sehingga Soeharto dikenal sebagai “Bapak Pembangunan”. Seperti pendahulunya, Soeharto juga mereduksi demokrasi lewat slogannya “Pembangunan belum selesai” sebagai dasar legitimasi tindakan proyek politiknya.

Namun kemajuan fisik yang diciptakan Orde Baru bukan berarti proses demokratisasi terlaksana sebagaimana mestinya. Sebab, kenyataannya rejim ini melakukan banyak pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi untuk mempertahankan kekuasaannya, antara lain memanipulasi pemilu, represif terhadap gerakan mahasiswa, menutup kran-kran demokrasi, seperti penekanan terhadap pers, pembatasan hak bersuara dan mengeluarkan pendapat dengan *apologi* untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan dalih stabilitas sosial politik. Segala sesuatu yang dianggap mengancam kelangsungan dan keutuhan bangsa dan negara dilarang.

Manipulasi di bidang politik sangat jelas dilakukan oleh rejim Orde Baru pada saat pemilu yang merupakan bentuk partisipasi politik warga negara yang paling nyata. Menurut Liddle (1992: 4) pada setiap penyelenggaraan pemilu,

melalui birokrasi sipil dan struktur teritorial militer sebagai alat kampanye politik, Golongan Karya sebagai kendaraan politik Orde Baru hampir selalu menang mutlak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kemenangan Golkar pada lima kali pelaksanaan pemilu selama era Orde Baru sebenarnya tidak mewakili keadaan politik yang sebenarnya. Sebab, pemerintah Orde Baru selalu berupaya memenangkan partainya dengan berbagai cara yang tidak *fair*. Lewat pemilu yang artifisial tersebut, kekuatan-kekuatan sosial-politik lama---santri tradisional, santri modern, abangan kelas bawah, abangan “Marhaenis”---masih berakar dalam. Menurut Liddle, seandainya kerangka besi yang dipancarkan pemerintah untuk memagari kekuatan-kekuatan itu runtuh nantinya, partai-partai lama pasti akan bangkit kembali. Kini prediksi jitu Liddle menjadi kenyataan menyusul perubahan secara fundamental dalam struktur politik Indonesia pasca-kejatuhan Soeharto dengan kelahiran partai politik dalam jumlah yang sangat besar pada Pemilu 1998.

Menyaksikan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, para tokoh kritis seperti Amien Rais, misalnya, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah sistem pemilu agar berlangsung secara demokratis. Menurut Amien Rais, pemilu harus dilaksanakan tidak hanya berdasarkan prinsip “langsung, umum, bebas, dan rahasia”, tetapi juga prinsip kejujuran baik dari sisi penyelenggaraannya maupun dari sisi penghitungan suara, karena kejujuran kejujuran akan sangat menentukan hasil pemilu itu sendiri. Pada Sidang Komisi Ad Hoc Sidang Umum MPR tahun 1993, raksi PPP dan PDI berusaha mengajukan pembaruan Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang penambahan prinsip pemilu tersebut dengan memasukkan prinsip kejujuran, namun ditolak

keras oleh fraksi Golkar, fraksi ABRI, dan fraksi Utusan Daerah. Fraksi ABRI menganggap penambahan prinsip kejujuran adalah “berlebihan” dan secara kualitatif ukuran kejujuran itu sangat sulit dipahami. Sedangkan fraksi Golkar memandang prinsip kejujuran sudah direfleksikan dalam hukuman yang berat terhadap seseorang yang melanggar/membuat kecurangan dalam pemilu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1/1985 (Abdillah, 1999: 204).

Selain tidak fair dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah Orde Baru juga mengembangkan “doktrin monoloyalitas” yang memerintahkan semua pegawai negeri dan keluarganya untuk memilih satu loyalitas, apakah kepada pemerintah melalui Golkar atau kepada partai politik. Lewat cara ini suara Golkar meningkat secara signifikan sehingga selalu menang sebagai *single majority*. Bagi Soeharto, bahkan sampai pemilu 1997 sebagai pemilu terakhir rejim Orde Baru, kemenangan Golkar selalu dianggap sebagai diperolehnya legitimasi dari rakyat atas pemerintahannya. Atas dasar itu, Soeharto melanjutkan proyek pembangunannya dengan slogan ampuhnya “pembangunan belum selesai” dan kebijakan represifnya demi stabilitas nasional. Dalam benak Soeharto, tanpa stabilitas pemerintah tidak mungkin bisa melaksanakan pembangunan. Demikian cara-cara Orde Baru melakukan manipulasi dalam bidang politik untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam bidang ekonomi rejim ini juga dituduh melakukan manipulasi. Pertumbuhan ekonomi yang dijadikan alat legitimasi dan sempat dipuji-puji oleh lembaga-lembaga internasional seperti *IMF*, *World Bank*, dan lain-lain ternyata keropos dan tidak memiliki fundamental yang cukup kuat sebagaimana dikumandangkan selama ini. Pujian lebih memabukkan lagi ketika oleh sementara

kalangan, baik dalam maupun luar negeri, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu macan Asia. Terbukti pujian tersebut sangat keliru, sebab data pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya bertentangan dengan yang disampaikan pemerintah. Akibatnya, krisis ekonomi yang awalnya dimulai di Thailand telah memicu terjadinya krisis multidimensional yang berlarut-larut tanpa dapat diketahui kapan akan berakhir (Kristiadi, 1999: xi).

Sekali lagi bangsa ini berada di bawah rejim yang tidak jujur bahkan otoriter. Demokratisasi, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan setumpuk cita-cita pendiri negara ini di tangan Soeharto semuanya hanya menjadi jargon politik semata. Absolutisme kekuasaan yang pernah terjadi pada era Orde Lama di bawah Soekarno terulang kembali. Korbannya tidak lain adalah rakyat itu sendiri. Seakan terlena dengan cita-cita besar para pendiri negara ini dan jargon-jargon politik yang ia kembangkan, Soeharto justru membangun negeri ini dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Mengamati perjalanan kehidupan politik masa Orde Baru, Sri Bintang Pamungkas dalam pengantar bukunya *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total* (2001) menyatakan bahwa rejim Orde Baru justru lebih dahsyat represifnya karena menggunakan kekuatan militer untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan negara. Orde Baru mengembangkan apa yang disebut dengan otoritarianisme birokrasi dan teknokrasi. Ini bisa dilihat bagaimana pada struktur pemerintahan dari atas hingga tingkat RT (Rukun Tetangga) bahkan sampai bagaimana anak-anak Taman Kanak-Kanak diperlakukan. Akumulasi dari semua persoalan adalah militerisme berada di balik ideologi uniformitas atau

penyeragaman dengan nilai-nilai patutan dan kepatuhan yang ditentukan oleh para elitnya.

Setelah 32 tahun sejak tumbanganya Orde Lama, sekali lagi gelombang gerakan rakyat yang didukung oleh mahasiswa mampu menjatuhkan pemerintahan Orde Baru menyusul runtuhnya legitimasi dan kepercayaan rakyat slogan “Reformasi”. Banyak yang percaya Reformasi yang kemudian menjadi slogan nasional dipercaya akan dapat mengantarkan bangsa ini pada harapan baru akan pemerintahan yang demokratis sebagaimana dicita-citakan para *founding fathers*-nya.

Masyarakat sudah lama memimpikan sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di mana kemerdekaan mengemukakan pendapat dan pikiran, kemerdekaan pers sebagai wahana pemberi informasi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dilindungi dan dihormati, bukan sekadar slogan penguasa. Karena itu, ketika rejim B.J. Habibie yang dianggap sebagai kepanjangan tangan rejim sebelumnya jatuh kemudian digantikan Abdurrahman Wahid sebagai penguasa baru produk Pemilu 1999 yang demokratis masyarakat berharap bangsa ini menjadi lebih baik. Naiknya Abdurrahman Wahid sebagai presiden dianggap sebagai simbol kemenangan *civil society* (masyarakat marga yang demokratis).

Namun ternyata fase demokratisasi ini juga surut. Kondisi kehidupan sosial yang diharapkan lebih baik tidak kunjung tiba. Kehidupan rakyat semakin menderita. Harga-harga kebutuhan bahan pokok makin tak terjangkau, lapangan pekerjaan makin sempit, konflik etnik berbau SARA dan kekerasan massa terjadi di berbagai daerah, serta ancaman disintegrasi terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Yang lebih parah lagi dalam suasana kondisi sosial politik nasional



yang tidak stabil, kepentingan kelompok di antara elit politik jauh lebih menonjol ketimbang keinginan untuk mengentaskan bangsa dari berbagai krisis. Pertikaian dan konflik antarelit politik justru mendominasi perjalanan pemerintahan era Abdurrahman Wahid.

Puncak dari pertarungan itu adalah percepatan Sidang Istimewa (SI) MPR sebagai respon atas dikeluarkannya Dekrit Presiden oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB yang berisi pembekuan DPR dan MPR serta pembubaran Partai Golkar dan percepatan Pemilu. Tidak bisa dihindari, Abdurrahman Wahid jatuh lewat Sidang Istimewa dan digantikan Megawati Soekarnoputri sebagai penguasa baru.

Sidang Istimewa (SI) MPR 2001 adalah sebuah peristiwa politik yang menarik untuk disimak. Forum tertinggi penyelenggaraan negara itu dinilai sarat muatan konflik politik antara legislatif (MPR) dan eksekutif (presiden). Masing-masing mengaku menegakkan demokrasi di Indonesia. Padahal, pangkal pertarungan elit tersebut adalah perbedaan dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam UUD 1945. Presiden menafsirkan UUD 1945 dengan tafsir presidensial, sedangkan MPR dengan tafsir parlementer (Majalah Retorika, Edisi 20/Agustus-September 2001: 14).

Akibatnya pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) penuh kontroversi. Presiden dengan tafsiran presidensialnya menganggap bahwa SI inkonstitusional, sedangkan MPR dengan tafsir parlementernya menganggap SI sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, antara lain karena sudah diawali dengan pemberian Memorandum I dan II atas tindakan Abdurrahman Wahid. Dilihat dari sisi hukum

Sidang Istimewa (SI) memang sah terlepas dari muatan politik yang ada di dalamnya.

Menurut Machfud MD (2003: 103) di mata Abdurrahman Wahid, selain kasus Bulog dan Brunei itu omong kosong, menjatuhkan Presiden di tengah jalan dengan cara mengeluarkan memorandum adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, dengan merujuk pakar hukum tata negara Prof. Harun Alrasid sebuah tindakan inkonstitusional bisa dihalangi dengan sebuah dekrit sebelum keadaan menjadi lebih buruk.

Hikmah yang bisa dipetik dari konflik tersebut adalah pelaksanaan demokratisasi di Indonesia ternyata tidak semudah bayangan banyak orang. Banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem penyelenggaraan dan tata kehidupan negara, misalnya lewat amandemen UUD 1945 sebagaimana yang telah dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2003 lalu agar pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran ganda direvisi. Selain itu, demokrasi yang diidealkan tidak akan pernah tercapai jika tidak ada kedewasaan berpolitik para elit politik yang selama ini dijadikan panutan rakyat.

Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara aklamasi memilih kembali Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya pada 10 Maret 1998, tak seorang pun, termasuk para politik, menduga bahwa ia akan dipaksa turun dari kursi kepresidenannya hanya dalam waktu 72 hari kemudian. Terpilihnya Soeharto diiringi dengan tepuk tangan meriah seluruh anggota Majelis yang kemudian dilanjutkan dengan *standing ovation* (tepuk tangan sambil berdiri) (Pour, 1998: 20). Dalam pidato penerimaannya di depan Sidang Umum MPR 1998, Soeharto dengan rasa percaya diri menyatakan bahwa ia akan

melaksanakan tugasnya sebagai presiden secara penuh untuk masa bakti lima tahun berikutnya.

Dalam pidatonya setelah pelantikan pun, Soeharto dengan nada optimis menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan cara mengefisienkan seluruh kekuatan ekonomi nasional dan berupaya terus menyegarkan dan membangkitkan prakarsa dan kreativitas rakyat, yang menjadi kekuatan untuk membangun masa depan. Pada acara syukurannya di Cendana, di hadapan undangan yang hadir Soeharto juga menyatakan “Kita harus mulai dengan *loro lopo* (menerima keadaan untuk bersakit-sakit). Kita harus mulai dengan *topo broto* (meningkatkan keprihatinan) untuk menghadapi tantangan itu” (Aritonang, 1999: 51).

Seperti tidak tanggap terhadap berbagai tuntutan masyarakat akan pentingnya pemerintahan yang bersih dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang merupakan biang berbagai krisis yang mendera bangsa, Soeharto membentuk kabinet---yang disebut Kabinet Pembangunan VII---yang kontroversial karena mengangkat orang-orang yang di mata masyarakat sudah bermasalah karena berbau KKN. Misalnya, si raja hutan Muhammad Bob Hasan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, putrinya sendiri yang raja jalan tol Siti Hardiyanti Indra Rukmana (mbak Tutut) sebagai Menteri Sosial, Fuad Bawazier sang pembebas pajak bea masuk mobil Timor menjadi Menteri Keuangan, teman akrab mbak Tutut R. Hartono menjadi Menteri Dalam Negeri, Haryanto Danutirto yang disebut sebagai menteri “kecelakaan” karena selama menjabat Menteri Perhubungan pada kabinet sebelumnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas diangkat sebagai Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan

Obat-Obatan, Abdul Latif yang mencuat karena kasus dana Jamsostek sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Subiakto Tjakrawerdya yang selalu memberi peluang kepada Tommy Soeharto untuk urusan monopoli cengkeh tetap menjadi Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil.

Memperhatikan komposisi anggota kabinet seperti itu, masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh melakukan upaya reformasi untuk pemulihan ekonomi. Mahasiswa tidak yakin bahwa kabinet tersebut akan mampu mengatasi masalah krisis ekonomi yang mendera rakyat. Dalam wawancaranya dengan Majalah *D&R*, edisi 21 Maret 1998, Amien Rais berkomentar keras:

“Terbentuknya Kabinet Pembangunan VII ini sebagai rangkaian terakhir sandiwara politik sejak diselenggarakannya pemilihan umum yang berbau rekayasa. Inilah kabinet paling lemah dan paling tidak profesional di masa Orde Baru. Bau nepotisme sangat kental. Beberapa oknum yang jelas-jelas bermasalah dipasang lagi. Karena itu, kabinet ini tidak akan dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang selama ini sudah sangat tipis”.

Reaksi keras Amien Rais menyebar di kampus-kampus sehingga para mahasiswa memprotes keras kabinet yang sangat nepotis tersebut. Mahasiswa menilai kabinet justru cenderung anti-reformasi dan malah mempertahankan kekuasaan yang sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh rakyat. Bahkan reaksi keras juga datang dari luar negeri. Eugene Galbraith, Ketua Pusat Kajian Lembaga Keuangan ABN AMRO Hoare Govett di Hongkong (dalam Pour, 1998: 23) menyatakan:

“Keberanian Soeharto mengangkat orang-orang dekatnya sebagai anggota kabinet sekadar menunjukkan kepada IMF bahwa Soeharto menguasai semua persoalan, sehingga mereka bersedia berunding dengan dia sesuai pola yang ditawarkannya”.

Tetapi Soeharto masih sangat yakin bahwa anggota kabinet yang ia pilih akan mampu membantu menyelesaikan krisis bangsa. Untuk itu, Soeharto memberikan empat tugas pokok dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun berikutnya, yakni: *pertama*, melaksanakan Trilogi Pembangunan yang mencakup stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan; *kedua*, menciptakan kemandirian; *ketiga* memperkuat ketahanan nasional; dan *keempat* meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tugas pokok tersebut ia sebut sebagai Catur Krida Pembangunan yang akan segera ia laksanakan (Aritonang, 1999: 52).

Keputusan MPR dan keyakinan Soeharto tersebut sebenarnya bertentangan dengan opini publik pada umumnya yang sudah tidak mempercayai Soeharto untuk kembali memimpin negeri ini keluar dari krisis ekonomi dan politik yang berawal dari krisis moneter dan keuangan yang melanda sebagian negara Asia sejak pertengahan 1997, sebuah krisis yang oleh Nordholt (2003: 105) dianggap paling serius sejak 1965. Krisis ekonomi yang semakin parah, desakan-desakan dari bawah, gelombang demonstrasi mahasiswa yang semakin besar dari hari ke hari di sebagian pelosok negeri hampir selama dua bulan, pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, pembelotan beberapa orang kepercayaan Soeharto yang selama ini menjadi penyangga rejim, dan semakin mudarnya legitimasi politik rejim Orde Baru menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenannya pada 21 Mei 1998 menyusul kegagalan berbagai upaya kompromi dengan berbagai kalangan.

Sebelumnya pada 18 Mei 1998, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini tidak bisa berbuat banyak juga membuat manuver politik setelah

didesak oleh berbagai lapisan masyarakat. Tidak kuasa menahan desakan yang bertubi-tubi tersebut, Ketua DPR/MPR H. Harmoko akhirnya pada pukul 15.15 WIB dalam keterangan pers di Gedung DPR/MPR Senayan dengan didampingi oleh seluruh wakilnya, Abdul Gafur, Syarwan Hamid, H. Ismail Hasan Metareum, dan Fatimah Ahmad (19/5/1998) menyatakan:

“Pimpinan Dewan, baik Ketua maupun Wakil-Wakil Ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Dan, berdasarkan kesepakatan seluruh fraksi, DPR-RI dapat memahami agar pengunduran diri Soeharto dilaksanakan secara konstitusional” (Surya, 19/5/1998).

Tindakan pimpinan DPR/MPR tersebut tentu mempercepat kejatuhan Soeharto (Aritonang, 1999: 121) dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. B.J. Habibie tentu tidak pernah membayangkan bahwa dia bakal menjadi Presiden Indonesia dalam tempo secepat itu. Kalaupun membayangkan, ia pasti mengira semua itu akan terjadi pada 2003 di saat Soeharto mengakhiri jabatannya yang ketujuh kalinya.

Soeharto meninggalkan singgasana kekuasaannya ketika negara dalam keadaan sangat tidak stabil ---inflasi melejit dan nilai rupiah terempas sampai Rp.16-17 ribu per dolar AS. Lebih mengerikan lagi kelaparan sudah di ambang pintu karena panen gagal, sementara pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk mengimpor beras. Sebagaimana diakui sendiri oleh B.J. Habibie dalam sebuah wawancaranya dengan wartawan FORUM:

“Saya ketika itu gamang karena negara ini ibarat sebuah mobil yang lagi meluncur ke jurang dan ketika itu pula saya harus mengambil alih kemudi. Inflasi bisa sampai 200 persen dan negara akan bangkrut” (Forum, 08/30/5/1999: 6).

Dalam konteks politik global, kejatuhan Soeharto tidak bisa lepas dari gelombang demokratisasi yang menggema di berbagai belahan dunia. Banyak kasus yang bisa dipakai sebagai pelajaran mengenai kejatuhan sebuah rejim. Studi Shively (1993) menyebutkan beberapa contoh. Di Eropa Selatan gelombang demokratisasi melanda Yunani, Portugal, dan Spanyol sejak awal 1970 sampai awal 1980-an. Ketiga negara tersebut mengalami proses demokratisasi karena rejim militer yang berkuasa telah lelah sehingga tidak lagi efektif mengurus negara sehingga tidak memperoleh dukungan rakyat. Selain itu, juga tekanan-tekanan luar terutama negara-negara tetangganya dan Masyarakat Eropa pada umumnya. Masyarakat Eropa mensyaratkan jika sebuah negara Eropa ingin bergabung sebagai anggota, dia harus membangun sistem demokrasi di negara masing-masing (Bhakti, 2000: 70).

Gelombang demokratisasi juga melanda kawasan Amerika Latin ketika beberapa negara membangun kembali demokrasi setelah berlangsungnya kediktatoran militer, seperti di Peru dan Equador pada 1983, Bolivia pada 1982, Argentina pada 1983, Uruguay pada 1984, Brazil pada 1985 dan Chile pada 1989. Secara khusus Argentina mengalami demokratisasi setelah rejim militer yang berkuasa lelah menyusul kekalahan perang Malvinas melawan Inggris. Sementara gerakan demokratisasi juga terjadi di negara-negara komunis Eropa Timur antara 1989 hingga 1990, seperti Jerman Timur yang kemudian bergabung dengan Jerman Barat, Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, Bulgaria, Rumania dan Yugoslavia. Gerakan ini muncul karena semakin lemahnya rejim komunis yang tidak lagi ditopang oleh Uni Soviet, serta keinginan kuat rakyat untuk membangun ekonomi secara demokratis.

Sedangkan gerakan demokratisasi di kawasan Afrika, Amerika Latin dan Asia antara lain terjadi di Algeria 1989-1991, dan pada saat yang sama juga terjadi di Mesir, Jordania, dan Tunisia.; Haiti pada 1990, Korea Selatan pada 1987, Nepal pada 1990, Nicaragua pada 1990, Pakistan pada 1988, dan Filipina pada 1986 ( Bhakti, 2000: 70).

Gambaran di atas menunjukkan tuntutan demokratisasi sangat sulit dibendung oleh penguasa otoriter di berbagai belahan dunia. Demokrasi telah menjadi pilihan sistem politik kebanyakan negara-negara di dunia. Mengutip McColm (1993), Sparringa (1999: 24) menyatakan sejak dua dekade terakhir dunia menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam perkembangan demokrasi. Sejak 1972 jumlah negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 44 menjadi 107. Dari 187 negara di dunia saat ini, lebih dari 58 persen di antaranya telah mengadopsi pemerintahan demokratis, masing-masing dengan variasi sistem politik tertentu.

Kecenderungan demokrasi sebagai pilihan sistem politik yang demikian kuat terutama terjadi setelah jatuhnya pemerintahan komunis di akhir 1980-an dan karenanya telah menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya alternatif yang sah terhadap berbagai bentuk rejim otoritarian. Mencuatnya demokratisasi sebagai satu-satu sistem politik merupakan salah satu perubahan terpenting yang menandai tahun-tahun akhir milenium kedua; sebuah perkembangan yang oleh Huntington (1991) disebut sebagai “gelombang ketiga demokratisasi”.

Dalam konteks Indonesia, rejim Orde Baru yang didukung oleh militer, birokrasi, dan pemodal yang kuat (Munir, 1999: 133) dapat dikatakan telah lelah setelah 32 tahun masa kekuasaannya dan karenanya terjadi pembusukan dari rejim



itu sendiri. Regim ini juga telah kehilangan legitimasinya baik dari sisi ekonomi maupun politik. Selain itu, Soeharto juga dinilai semakin represif, semakin tua, tindakan politiknya tidak terkendali, perpecahan di antara pembantu dan pendukung Soeharto, baik sipil maupun militer, dan desakan-desakan dari bawah dan intervensi internasional. Karena tidak mampu lagi mempertahankan regim Orde Baru, para anggota regim yang tersisa, yang berada di dalam atau luar sistem, berupaya “mereformasi diri” dan beramai-ramai ikut menuntut pengunduran diri Soeharto (Pour, 1998: 168).

Pergantian presiden ternyata tidak serta merta menjadikan penguasa baru diterima begitu saja oleh masyarakat luas. B.J. Habibie sebagai penguasa baru dinilai tidak memiliki legitimasi politik dan moral yang kuat mengingat sebagian besar penyangga pemerintahan ini merupakan bagian dari penguasa lama yang diangkat oleh lembaga-lembaga perwakilan yang dihasilkan oleh pemilihan umum yang penuh manipulasi (Kristiadi, 1999: x). Karena itu, tidak banyak yang meramalkan pemerintahan B.J. Habibie bisa bertahan lama. Benih-benih konflik di masyarakat sudah mulai tampak menyusul berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Pada era B.J. Habibie polarisasi konflik terpecah ke dalam tiga arus besar: *pertama*, kelompok sisa-sisa kekuatan Orde Baru, seperti militer, Golkar, dan kroni Soeharto. B.J. Habibie yang berbasis politik Golkar, sebagai penasehat dan Ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) masuk dalam kategori ini. Kelompok ini lazim disebut sebagai kekuatan-kekuatan lama regim otoritarian atau kekuatan *status quo*. *Kedua*, kelompok oposisi moderat yang berpusat pada tiga tokoh utama yang memiliki basis dukungan massa luas, yakni

Ketua Umum PBNU (yang kemudian menjadi deklarator PKB) Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais (yang kemudian menjadi pendiri dan Ketua Umum PAN), dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. *Ketiga*, kelompok oposisi radikal yang menghendaki reformasi total dengan penggantian rejim B.J. Habibie oleh suatu “Presidium dan pembubaran DPR/MPR dengan suatu “Komite Rakyat”. Aktor utama kelompok ini adalah para aktivis mahasiswa yang memobilisasi aksi demonstrasi menentang pemerintah B.J. Habibie, menolak paket perubahan tiga undang-undang bidang politik, dan tidak mengakui Sidang Istimewa (SI) MPR 1998. Di samping memperoleh dukungan dua partai radikal yakni PRD dan PUDI, kelompok ini juga memperoleh dukungan tokoh-tokoh garis keras yang tergabung dalam Barisan Nasional (Barnas) yang dipimpin oleh Kemal Idris (Haris, 2002: 5).

Perkembangan politik Tanah Air menjadi semakin tidak kondusif karena ambisi-ambisi pribadi pemegang kekuasaan mendorong terjadinya konflik antarelit politik baik di tingkat pusat maupun lokal yang diduga menjadi salah satu sebab merebaknya konflik-konflik komunal di beberapa daerah, seperti di Ketapang, Kupang, Ambon, dan Sambas, dan pembunuhan di Banyuwangi (FORUM, 08/30/5/1999: 6). Berbagai tindak kriminal tersebut tidak ada yang bisa ditangani secara tuntas. Semuanya berhenti pada kecurigaan bahwa di balik semua peristiwa itu ada provokator---tanpa pernah diketahui siapa sebenarnya mereka, apalagi dalangnya. Kelemahan penegakan hukum itu tampak pula belum terungkapnya siapa penembak mahasiswa Trisakti dan pelaku Tragedi 13-14 Mei 1998. Pemerintahan B.J. Habibie gagal menegakkan hukum sebagaimana

diamanatkan MPR. Realitas demikian menyebabkan masa transisi dari Soeharto ke B.J. Habibie mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi (Sparringa, 1999: 39).

Selain itu, arah berbagai kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dinilai juga tidak jelas dan karakter rejim ini dinilai tidak jauh berbeda dengan rejim sebelumnya. Kendati berhasil melakukan liberalisasi politik meminjam istilah O'Donnel dan Schmitter (1993) antara lain dengan membuka kebebasan pers, melepaskan tahanan politik, dan mereformasi undang-undang bidang politik (UU partai politik, UU pemilihan umum (sehingga diharapkan menjadi pemilihan umum paling demokratis selama setengah abad Indonesia), dan UU susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD) yang memungkinkan terbentuknya partai-partai politik baru dan terselenggaranya pemilihan umum secara jujur dan adil sebagaimana diakui oleh B.J. Habibie (FORUM, 08/30/5/1999:6), dan dengan bantuan internasional berhasil mengendalikan inflasi, membenahi sektor perbankan dan sektor riil, pemerintahan B.J. Habibie sangat sulit memperoleh dukungan publik secara luas. Bahkan, dalam bidang ekonomi, rejim ini berusaha menciptakan kebijakan ekonomi yang oleh sementara kalangan dinilai sarat dengan muatan politik dan ada agenda tersembunyi di balik kebijakan tersebut sebagaimana selalu dilakukan penguasa sebelumnya, seperti ekonomi kerakyatan, rekapitalisasi perbankan, redistribusi aset nasional, dan lain-lain.

Oleh banyak kalangan pemerintahan B.J. Habibie lebih dianggap sebagai reproduksi Orde Baru ketimbang suatu pemerintahan demokratis produk reformasi. Alfred Stepan yang mendalami kajian mengenai transisi demokrasi bahkan menyatakan bahwa pemerintahan B.J. Habibie adalah “rejim nondemokrasi yang merupakan kelanjutan kekuasaan lama” (Tempo, 15/8/1998).

Kesimpulan Stepan berdasarkan kecenderungan antara lain: (1) kenyataan bahwa B.J. Habibie merupakan salah seorang pendukung setia dan loyalis terdekat Soeharto (Husaini, 1995: 15) yang tumbuh, besar dan kemudian menjadi anggota kabinet beberapa kali sampai akhirnya menjadi wakil presiden dan presiden, (2) kekuasaan rejim B.J. Habibie sangat dipengaruhi oleh militer, terutama Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto.

Itu pula sebabnya ketika Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie banyak pihak yang meragukan kepemimpinannya. Bahkan, sebagaimana dilaporkan FORUM Keadilan (08/5/1999: 6) beberapa saat sebelum menyerahkan jabatannya, Presiden Soeharto sempat meragukan kemampuan B.J. Habibie mengendalikan keadaan kalau dia *lengser*. Seusai bertemu para ulama Rabu pagi (19/5/1998) di Istana Merdeka secara terus terang dan terbuka dalam acara yang disiarkan langsung oleh seluruh jaringan televisi nasional Soeharto menyatakan “Apakah kalau saya *lengser keprabon* dan digantikan B.J. Habibie tuntutan masyarakat lantas bisa berhenti? Apakah nantinya juga tidak bakal berbalik, menuntut mundur B.J. Habibie?” (Pour, 1998: 168). Di kalangan masyarakat juga banyak orang menolak pemerintahan B.J. Habibie karena dianggap sebagai perpanjangan tangan Orde Baru dan kemampuannya hanya terbatas pada bidang teknologi.

Mereka menilai pemberian mandat kepada B.J. Habibie bahkan sama menghambatnya dengan masa pemerintahan Soeharto sendiri. Sebab, selain orang yang sangat loyal dan murid terbaik Soeharto---sebagaimana diakuinya sendiri --- B.J. Habibie selalu tunduk dan menurut semua kemauan Soeharto. B.J. Habibie

dinilai tidak akan mampu berbuat banyak, apalagi menyeret Soeharto ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya selama berkuasa.

Oleh karena itu, meskipun beberapa kalangan mencoba membujuk masyarakat agar memberikan kesempatan kepada pemerintahan B.J. Habibie untuk bekerja, tampaknya ajakan tersebut disambut dingin dan bahkan telah menimbulkan sangkaan-sangkaan buruk akan maksud itu. Pemerintahan B.J. Habibie memang mengalami suatu masalah besar untuk memperoleh dukungan rakyat yang amat diperlukan untuk pemulihan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang dalam konsep ekonomi-politik global terutama menyangkut kepercayaan pelaku dan lembaga keuangan yang terdapat di dalam maupun luar negeri dipandang sebagai prasyarat dasar yang diperlukan bagi langkah-langkah perbaikan ekonomi (Indrawati, 2000: 15-16). Menurut Sparringa (1999: 40) secara politik, masalah ketidakpercayaan publik dilihat sebagai penyumbang terbesar bagi lambannya usaha pemulihan ekonomi Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa pemerintahan pasca-Soeharto selain tidak mempunyai legitimasi, tidak pula mempunyai *sense of crisis* dan *sense of urgency*. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat menilai pemerintahan B.J. Habibie adalah sebagai pemerintahan transisi yang tidak boleh berlangsung lama. Banyak yang sepakat bahwa pemulihan ekonomi nasional hanya akan bisa dilakukan jika Indonesia memiliki pemerintahan yang kredibel dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang representatif, sebagaimana dinyatakan pula oleh Rais (1998: 48):

“Terus terang saya masih berpegang teguh pada pendirian, di samping usaha untuk mengatasi sembako secara optimal, Pemilu tetap merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri pemerintahan ini dan untuk menghasilkan legitimasi DPR-MPR yang baru maupun pemerintahan baru yang dapat mengentas Indonesia dari keterpurukan ekonomi berkepanjangan. Tanpa Pemilu, keadaannya akan semakin anarkis. Dan jangan kaget, kalau kita sudah menjurus pada anarki maka apa yang paling kita khawatirkan itu bisa terjadi terjadi. Yaitu proklamasi negara Aceh Merdeka, Negara Papua Merdeka. Atau bisa juga negara Riau Merdeka, negara Sulawesi Utara Merdeka. Susul-menyusul, sehingga kemudian kita akan menyesal tanpa ada gunanya”.

Kepercayaan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa pemerintahan yang terbentuk melalui pemilihan umum yang demokratis akan meningkatkan dukungan rakyat dan *public confidence*. Sementara dukungan rakyat berguna bagi lahirnya legitimasi politik yang kuat, *public confidence* akan membuka jalan yang lebih besar bagi mengalirnya kembali dana dalam jumlah besar yang akan memungkinkan roda perekonomian bergerak kembali (Sparringa, 1999: 40-41). Bahkan Fukuyama (1996) menyatakan bahwa kepercayaan adalah modal dasar penyelesaian beberapa masalah ekonomi suatu bangsa.

Cacat legitimasi dan legalitas sebagai penerus rejim Orde Baru karena diangkat tanpa melalui Sidang Istimewa MPR yang didahului pertanggungjawaban presiden Soeharto menjadi dasar penolakan kepemimpinan B.J. Habibie oleh sebagian besar elemen masyarakat (Rachman, 2000: 103). Puncaknya adalah pidato pertanggungjawabannya secara tidak terduga ditolak oleh sebagian besar anggota MPR hasil pemilihan umum Juni 1999 pada dini hari 20 Oktober 1999 dengan selisih suara tipis, yakni 355 menolak dan 322 menerima (Kompas, 21/10/1999: 4).

Dengan penolakan tersebut, pupus sudah harapan B.J. Habibie untuk melaju sebagai calon presiden. Kendati dukungan pencalonannya terus mengalir,

dengan inisiatifnya sendiri di depan 77 wartawan dari 45 media massa dalam dan luar negeri B.J. Habibie menyatakan mundur. Dalam jumpa pers yang diadakan di ruang belakang kediamannya di Patra Kuningan Jakarta, B.J. Habibie menyatakan bahwa penolakan sidang MPR terhadap pidato pertanggungjawabannya telah dilakukan secara demokratis. Selengkapnya B.J. Habibie menyatakan:

“Dari hasil pemungutan suara tersebut jelas wakil-wakil rakyat berkesimpulan Bacharuddin Jusuf Habibie tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Sehubungan dengan itu, bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya--- Bacharuddin Jusuf Habibie---sebagai Presiden masa bakti 1999-2004” (Kompas, 21/10/1999).

Dengan pernyataan pengunduran dari pencalonan presiden tersebut, era B.J. Habibie pun telah berakhir setelah 512 hari masa pemerintahannya yang memang sangat sulit. Langkah B.J. Habibie dinilai bukan saja santun dan terhormat, tetapi juga menempatkan B.J. Habibie sebagai negarawan yang meninggalkan warisan sejarah. Warisan itu, di antaranya yang disepakati hampir semua pihak adalah bahwa kepresidenannya dalam masa transisi telah meletakkan dasar dan langkah demokrasi, yakni dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara bebas, jujur, adil, dan karena itu demokratis.

Pada masa kepresidenannya, B.J. Habibie melalui masa-masa sangat sulit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni gelombang reformasi yang menghendaki perubahan besar dan menyeluruh dalam masyarakat. Sekaligus ia juga mewarisi akumulasi begitu banyak persoalan serta kondisi serba kritis dan serba krisis. Selain itu, dalam menjalankan roda pemerintahan B.J. Habibie dikesan berjalan sendiri atau berjalan dengan dukungan dan *platform* terbatas--- bukan platform nasional---yang merupakan salah satu sebab pokok kelemahannya.

Akibatnya, B.J. Habibie juga dinilai kurang mampu mengambil keputusan serta langkah antisipatif dan efektif dalam menghadapi persoalan-persoalan besar seperti gejala disintegrasi sosial, disintegrasi nasional, serta tindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan tindak kekerasan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Menurut Ilyas (1999: 6) penegakan hukum merupakan salah satu unsur demokrasi. Karena itu, apa pun bentuk dan langkah demokratisasi yang dilakukan sebuah pemerintahan sepanjang penegakan hukum masih lemah secara hakiki demokrasi belum jalan.

Di mata orang terdekatnya seperti Dewi Fortuna Anwar sebagaimana dituturkan pada FORUM Keadilan (08/30/05/1999: 62-66), B.J. Habibie merupakan sosok yang hangat, demokratis, ramah. Sikap dan perilakunya sebagai presiden dan apa adanya dinilai ikut memberikan sumbangan berharga terjadinya proses desakralisasi lembaga kepresidenan---yang selama masa Orde Baru dikenal bukan saja khidmat dan jauh berjarak tetapi juga angker---dan ternyata diteruskan oleh penggantinya Presiden Abdurrahman Wahid.

Dilihat dari sisi semangat demokrasi, langkah mundur B.J. Habibie sebagai calon presiden setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR merupakan kontribusi konkret terhadap makna pertanggungjawaban kekuasaan. Langkah mundur yang disertai sikap *legowo* berkontribusi meredakan ketegangan dan polarisasi dalam masyarakat. Langkah mundur B.J. Habibie justru meninggalkan jejak dan warisan sejarah yang bermakna bagi kehidupan demokrasi di Indonesia di kemudian hari.

Menyusul pengunduran diri B.J. Habibie, maka peta pertarungan presiden berubah. Semula calon presiden yang berlaga dalam pemilihan ada tiga orang,



termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihya Mahendra. Tetapi sebelum *voting*, Yusril juga menyatakan mengundurkan diri karena ingin menjaga *ukhuwah* dengan Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, Fraksi Golkar mencalonkan Akbar Tandjung sebagai pengganti B.J. Habibie. Namun sejam kemudian, Ketua Fraksi Golkar di MPR Marzuki Darusman menarik pengajuan Akbar Tandjung atas perintah Akbar Tandjung sendiri. Dalam pleno pagi hari Akbar Tandjung menyatakan tidak bersedia diajukan sebagai calon presiden. Selanjutnya rapat pleno menentukan Golkar memberikan suaranya kepada Abdurrahman Wahid (Kompas, 21/10/1999: 1).

Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup dan demokratis di Gedung DPR/MPR Jakarta (Rabu 20/10/1999) Abdurrahman Wahid mengungguli Megawati Soekarnoputri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Dari 691 anggota MPR yang menggunakan hak pilihnya, Abdurrahman Wahid meraih dukungan 373, sedangkan Megawati Soekarnoputri 313 suara. Lima suara menyatakan abstain. Sesaat setelah perhitungan suara dilakukan untuk kemenangan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri meminta kesempatan kepada Ketua MPR Amien Rais untuk berbicara:

“Dari hasil perhitungan yang ada, saudara saya KH. Abdurrahman Wahid mendapat angka lebih dari saya. Untuk keutuhan bangsa, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat melihat keadaan ini” (Kompas, 21/10/1999: 1).

Tidak lama berselang Abdurrahman Wahid selaku presiden terpilih juga menyatakan:

“Saya mengucapkan terima kasih kepada saudari saya Megawati Soekarnoputri yang telah menunjukkan pengertian yang mendalam terhadap keadaan kita semua, di samping juga sanggup melaksanakan

kehidupan berdemokrasi bersama-sama dengan saya, sebagaimana terbukti pada jalannya pemilihan presiden” (Kompas, 21/10/1999: 1).

Terpilihnya Abdurrahman Wahid mengungguli Megawati Soekarnoputri yang Ketua Umum partai politik pemenang pemilu 1999 berpotensi menimbulkan konflik sosial utamanya dari pendukung Megawati Soekarnoputri yang fanatik. Mencermati kondisi sosial dan politik yang terus berkembang ke arah negatif di Jakarta dan di daerah-daerah lain di Indonesia, maka untuk menghindari kondisi yang semakin *chaotic* Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan hariannya kepada pendukungnya:

“Hadapilah seluruh proses politik yang tengah berlangsung dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih serta kematangan jiwa, demi tetap utuhnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Mari kita saling percaya dan saling memahami dalam suasana penuh kedamaian agar setiap potensi dan energi bangsa dapat kita satu padukan untuk mengantarkan seluruh rakyat Indonesia dengan selamat dan sentosa ke depan pintu gerbang masa depan yang lebih baik. Kepada segenap aparat dan petugas di lapangan, saya minta untuk senantiasa mengutamakan pendekatan persuasif dalam menghadapi anak bangsa yang tengah mengalami kegalauan karena telah tersayat hati nuraninya” (Kompas, 21/10/1999: 1).

Pernyataan kedua tokoh yang sebelumnya saling bersaing dalam perebutan kursi presiden tersebut sangat penting untuk mendinginkan suasana politik pendukung masing-masing calon yang cenderung menimbulkan kekerasan massa. Sebab, bagaimanapun Abdurrahman Wahid bukan berasal dari partai pemenang pemilu. Sementara, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai politik pemenang pemilu hanya menduduki kursi wakil presiden yang berarti amanat Kongres PDIP di Bali gagal diperoleh. Di mata pendukungnya, Megawati Soekarnoputri dinilai “diakali” oleh teman-teman seperjuangannya yang dimotori

oleh Amien Rais lewat manuver politik yang disebut “Poros Tengah”. Karena itu, kekecewaan pendukung setia Megawati Soekarnoputri sangat bisa dimaklumi.

Tanda-tanda bakal munculnya kekerasan massa sebenarnya sudah bisa dirasakan sebelum proses pemilihan di Gedung DPR/MPR ketika massa pendukung Megawati Soekarnoputri menguasai Jalan Panglima Sudirman dan seputar Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Setelah mengetahui Megawati Soekarnoputri benar-benar dikalahkan oleh Abdurrahman Wahid, massa tampak sangat kecewa dan mulai resah. Massa pun mulai bergerak menuju gedung DPR/MPR sambil melakukan aksi pembakaran ban-ban mobil bekas dan pintu-pintu gerbang tol dalam kota. Sepanjang Rabu sore dan malam (20 Oktober 1999) terjadi ledakan bom di berbagai tempat di Jakarta dan juga di beberapa daerah seperti Solo, Klaten, Yogyakarta, Buleleng Bali, Medan, Makassar dan sebagainya.

Emosi massa pendukung setia Megawati Soekarnoputri akhirnya mendingin setelah sehari sesudahnya yakni 21 Oktober 1999 Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil Presiden setelah mengungguli Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz dengan perolehan suara 396 untuk Megawati Soekarnoputri dan 284 untuk Hamzah Haz. Maka, duet kepemimpinan nasional Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri pun dimulai di tengah kompromi politik “semu” antarelit politik nasional yang ternyata tidak bisa bertahan lama. Terbukti, pemerintahan Abdurrahman Wahid jatuh karena koalisi yang dulu mengantarkannya menjadi presiden pecah menyusul berbagai pertikaian di antara elit politik pendukung koalisi itu dan sebagian karena tindakan politik Abdurrahman Wahid sendiri.

Di mata rakyat, menurut Hendardi (2001: xi) memiliki pemerintahan yang totaliter, seperti pengalaman hidup bersama Orde Baru tiga dasawarsa lebih sama berbahayanya dengan memiliki pemerintahan yang rapuh dan gampang dijatuhkan sebagaimana pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Sebab, pemerintahan totaliter akan membuat parlemen hidup di bawah kendalinya, atau bahkan melenyapkannya sama sekali sebagaimana pengalaman dengan Orde Baru. Sebaliknya, pemerintahan yang mudah dijatuhkan oleh parlemen akan menghasilkan kekacauan yang berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dalam dua kondisi itu, pihak yang terus menderita adalah rakyat. Pemerintahan totaliter akan membuat rakyat kehilangan kebebasan, sedangkan pemerintahan yang rapuh akan membuat rakyat tidak dapat menghargai kebebasan. Sebab, pemerintahan yang mudah berganti akan mengakibatkan kesejahteraan ekonomi gagal untuk diusahakan secara konsisten.

Dalam perspektif penguasa masa transisi pengalaman kejatuhan rejim Soeharto, B.J. Habibie, dan bahkan Abdurrahman Wahid secara berturut-turut dan berbagai konflik sosial yang menyertainya mempertegas tesis para pengkaji rejim masa transisi seperti Uhlin (1998), O'Donnell dan Schmitter (1986), Huntington (1997), Snyder (2000), Delanty (1999) dan Shaw (2000) bahwa demokrasi sama sekali bukan perjalanan mudah kendati menjadi idiom politik sangat populer di setiap rejim. Ia merupakan proses transisi sosial-kultural yang panjang dan rumit. Tidak jarang muncul sikap panik, tergesa, bahkan kalap di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan berbagai persoalan dan konflik baru (Danundjaja, 2001). Sebagaimana dijelaskan Snyder (2000), proses demokratisasi sering menimbulkan

kekalutan, kerusuhan, konflik dan disintegrasi yang disebabkan oleh kebebasan sehingga menimbulkan persaingan antarkelompok. Senada dengan Snyder, Sularto (1999: 6) menyebutkan bahwa dalam setiap perubahan mendasar sering muncul adanya euforia di berbagai bidang kehidupan. Jika euforia tersebut berkepanjangan, maka bisa menimbulkan anarki, yang tentu saja menyimpang dari nilai dasar demokrasi itu sendiri.

## **2. Konflik Politik Sepanjang Masa Kepresidenan**

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang paling problematis. Menurut Suseno (1985: 89) di satu pihak konflik mempunyai dinamika intrinsik untuk asal menundukkan, menindas, merusak dan membunuh. Di pihak lain, ada pelbagai teori konflik yang berbicara tentang fungsi penting konflik dalam perkembangan suatu masyarakat. Konflik dapat bermakna baik positif maupun negatif. Kaum Marxis memandang konflik sebagai awal suatu dinamika. Sebab, dengan konflik akan terjadi suatu dialektika, yang akan berujung pada suatu revolusi, sebagai satu fase menuju masyarakat sosialis (Karim, 1995: 43).

Dalam teori politik, konflik, kompromi dan konsensus merupakan siklus yang lazim terjadi pada hampir keseluruhan proses politik yang melibatkan peran elit politik. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru 21 Mei 1998 sebenarnya baru mengantar Indonesia memasuki fase transisi menuju konsolidasi, sebelum akhirnya pematangan demokrasi. Perjalanan fase transisi menuju demokrasi tidak selalu mudah begitu gagasan itu diterima sebagai pilihan sistem politik oleh sebuah bangsa (Mulkhan, 2001: 74). Lewat kajiannya di beberapa negara yang baru lepas dari rejim otoriter, Snyder (2000: 15) menyebutkan fase transisi ke arah

pematangan demokrasi sering menimbulkan kerusuhan, konflik berbau SARA, perang, dan disintegrasi negara bangsa. Perdamaian yang sesungguhnya hanya terjadi di negara yang demokrasinya sudah matang.

Sementara Huntington yang telah melakukan studi di hampir 30 negara yang mengalami transisi menuju demokrasi menyatakan bahwa pada negara yang penghasilan per kapita di atas \$ 3.000 transisi akan berjalan mulus. Pada kelompok negara yang penghasilan per kapita antara & 1000 hingga \$ 3.000, maka transisi tidak akan berjalan mulus, dan bahkan ada indikasi kembalinya rejim otoritarianisme baru (Tempo, 23/7/2000: 17). Menggunakan tesis Huntington tersebut, maka Indonesia yang berpenghasilan per kapita berkisar \$ 600 jelas masuk dalam daerah berisiko tinggi untuk kembali ke rejim non-demokratis, yang ditandai dengan merebaknya konflik secara horisontal dan vertikal, kekerasan massa, disintegrasi, kekerasan berbau SARA dan sebagainya.

Tesis Snyder dan Huntington tersebut tampaknya bisa dipakai memahami konflik politik di Indonesia sejak kejatuhan rejim Orde Baru, lebih khusus lagi selama era Abdurrahman Wahid. Sebagaimana dijelaskan di bab-bab sebelumnya, pada era Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 perjalanan kehidupan bangsa Indonesia diwarnai *chaos* dan instabilitas politik. Hal ini antara lain karena kian meruncingnya perseteruan sengit antara elit politik di parlemen dan pihak eksekutif, serta manuver-manuver Presiden Abdurrahman Wahid untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kondisi ini diperburuk oleh lumpuhnya fungsi lembaga-lembaga hukum dan peradilan, tidak berdayanya aparat dalam mengatasi gangguan keamanan, semakin merajalelanya korupsi, maraknya aksi kekerasan, dan pertikaian

antaretnis di berbagai wilayah dan gejala di berbagai daerah mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah (Penerbit Buku Kompas, 2002: 24).

Melacak akar konflik di Indonesia, khusus mengenai konflik antarelit politik dikaitkan dengan proses demokratisasi di Indonesia bukan persoalan sederhana. Menurut Chaniago (dalam Maruto MD dan Anwari WMK, 2002: 23) persoalan demokratisasi di Indonesia sangat kompleks baik secara horisontal dilihat dari hamparan geografis dan secara vertikal menurut struktur masyarakat. Ditambah lagi aspek sosiokultural dan aspek struktural ekonomi yang menghadang upaya pencapaian tahap pematangan demokrasi. Menurut Nasikun (1995: 63) segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuan sosial yang terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan primordial dengan sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain mudah sekali menimbulkan konflik di antara kesatuan-kesatuan sosial tersebut.

Dalam hal ini sedikitnya terdapat dua macam tingkatan konflik, yakni: (1) konflik yang bersifat ideologis, dan (2) konflik yang bersifat politis. Pada tingkatan ideologis, konflik terwujud dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh masyarakat serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Sependapat dengan Nasikun, Muizzuddin (2001: 4) menyatakan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat memunculkan nilai-nilai baru, yang menjungkirkan tata cara hidup yang selama ini telah diyakini, dan adanya perebutan pengaruh antara pencetus gagasan. Pada tingkatan kedua, konflik terwujud dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya di masyarakat.

### **a. Masa Kepresidenan Soekarno**

Secara historis konflik elit politik di Indonesia bukan barang baru. Sebelum Indonesia merdeka konflik sudah terjadi. Misalnya, konflik yang melanda Sarekat Islam (SI), yang terpilah ke dalam kelompok yang disemangati oleh ideologi marxisme (melahirkan SI merah) dan kelompok yang ingin melanjutkan perjuangan semula, disemangati oleh Islam (melahirkan SI Putih). Setelah Indonesia merdeka, konflik politik melanda Masyumi, yang semula disepakati sebagai satu-satunya partai penyalur aspirasi politik umat Islam. Konflik ini menyebabkan keluarnya tiga eksponen SI untuk mendirikan PSII (1947) dan pada 1952 NU juga keluar untuk mendirikan partai sendiri (Marijan, 1993: 33-34).

Pada babak selanjutnya setelah lawan dari luar (Belanda) relatif berkurang dan dimulai penataan negara-bangsa, konflik terjadi antarpolitis seperti terlihat pada Pemilu 1955 dan perdebatan di Majelis Konstituante. Studi-studi mengenai sejarah politik Indonesia mencatat bahwa konflik antarpolitis itu tidak lepas dari sejarah kemunculan partai yang memiliki basis kultural sendiri-sendiri dan bercorak aliran. Realitas sejarah kepartaian di Indonesia menunjukkan bahwa partai-partai lahir dari ideologi kultural tertentu. Misalnya, kalangan Islam melahirkan partai-partai Islam, seperti Syarikat Dagang Islam (SDI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Sedangkan Kristen melahirkan Parkindo dan partai Katolik, begitu pula yang bercorak kesukuan serta akar kultural lainnya melahirkan organisasi-organisasi seperti Paguyupan Pasundan (1914), Sarekat Sumatera (1918), Sarekat Ambon (1920), Rukun Minahasa dan kaum Betawi (1923) (Sumantri, 1963: 16).



Lalu dapat dibedakan misalnya antara partainya “orang santri, orang abangan dan priyayi”, berdasarkan kepada agama dan kebudayaan kelompok masyarakat pendukung partai. MASYUMI, Nahdathul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Islamiyah (PERTI) misalnya tergolong ke dalam partainya orang santri. PKI terutama memperoleh dukungan dari kalangan orang abangan, dan PNI berdasarkan kekuatan massanya kepada orang priyayi (Sanit, 1993: 25). Selain berbagai kebijakan politik penguasa Orde Lama semakin tidak populer di masyarakat seperti, misalnya gagasan Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin, ideologi Nasakom (Nasionalisme dan Komunisme) yang kontroversial, sehingga kehidupan sosial ekonomi dan politik tidak stabil serta semakin menajamnya polarisasi politik pada akhir 1950-an hingga 1965, fragmentasi politik demikian tak bisa dihindari melahirkan krisis politik yang mengakhiri kekuasaan Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru.

Menurut Mahfud MD (2000: 58-59) dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kebijakan Soekarno lewat Demokrasi Terpimpin dapat memperlihatkan stabilitas, lebih-lebih setelah dilakukan penyederhanaan kepartaian dan terbentuknya Front Nasional untuk membuat konsensus bagi tujuan nasional. Tetapi sebenarnya stabilitas tersebut semu, sebab ternyata ia tidak meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam proses penggantian kepemimpinan nasional. Stabilitas saat itu hanya mengandalkan pada adanya tokoh politik yang dapat mengelola Front Nasional yang seolah-olah mewakili sistem partai tunggal yang tak kentara. Melalui sistem partai tunggal tak ketantara itu dibina suatu gaya yang berorientasi pada nilai secara mutlak dengan konsekuensi bahwa interpretasi

dari penguasa harus selalu dianggap benar tanpa ada tawaran dan tak mengenal alternatif lain.

Stabilitas politik semu pada era Demokrasi Terpimpin mulai goyang ketika pada 1963 pertentangan-pertentangan politik yang sebelumnya bergolak seperti api dalam sekam mulai mengemuka terutama karena kehidupan ekonomi yang terus merosot. Menurut Feith (1971: 42), tahun 1963 merupakan fase terjadinya polarisasi dalam sistem Demokrasi Terpimpin yang menimbulkan konsekuensi yang lebih dahsyat dibandingkan dengan polarisasi akhir masa Demokrasi Liberal. Merosotnya ekonomi yang diikuti laju inflasi secara cepat, menurunnya tingkat produksi di berbagai sektor, serta kacaunya segi-segi fungsi administratif mengakibatkan semakin tegangnya pertentangan antara kiri dan kanan, bukan hanya di kalangan pemerintah, tetapi juga di kalangan masyarakat desa. Bahkan sebenarnya pada 1963-1965 ketegangan di dalam masyarakat desa berkembang sampai pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pertentangan dan konflik politik semakin tinggi terutama antara TNI dan PKI yang sama-sama mempunyai kekuatan riil dan kepribadiannya sendiri. Puncak dari ketegangan politik terjadi pada 1965 ketika pada 30 September 1965 PKI di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G.30 S/PKI. Sejak peristiwa G. 30 S/PKI tersebut krisis politik terus meningkat yang ditandai oleh gelombang demonstrasi mahasiswa selama lebih kurang 60 hari di ibukota yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menyampaikan tiga tuntutan rakyat (Tritura), yaitu pembubaran PKI, *retooling* kabinet, dan penurunan harga (perbaikan ekonomi). Krisis dan konflik politik yang semakin memuncak akhirnya memaksa Soekarno

mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi agar mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi menjamin keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

#### **b. Masa Kepresidenan Soeharto**

Surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) menandai berakhirnya Orde Lama dan sebagai titik awal kelahiran Orde Baru. Sebab, dengan Supersemar tersebut Soeharto membubarkan PKI, mengambil tindakan-tindakan pembaruan dan stabilisasi politik; dan dengan Supersemar itu pula kekuasaan Soekarno sebenarnya dengan sistem politik Demokrasi Terpimpinnya telah lenyap. Lenyapnya kekuasaan Soekarno kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS yang melalui Sidang Istimewa pada 1967 mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden, sehingga sebagai simbol pun Soekarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan. Pada Maret 1968 MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden definitif.

Negara Orde Baru lahir di antara dua krisis warisan Orde Lama, yakni krisis ekonomi---berupa stagnasi dan inflasi yang membubung tinggi---dan krisis politik berupa konflik politik yang mencapai puncaknya pada pemberontakan PKI September 1965. Menurut Marijan (1993: 34) kemunculan Orde Baru menandai menguatnya negara (*state*) beserta perangkatnya yang berhadapan dengan

melemahnya kekuatan masyarakat, sebagaimana terjadi di negara Dunia Ketiga lainnya yang cenderung totaliter atau otoriter dengan aneka variasinya.

Kecenderungan semacam itu menurut Jackson (1997: 3) sudah ada sejak 1957 pada saat berakhirnya sistem demokrasi parlementer dan diberlakukannya hukum darurat perang. Mulai saat itu kekuatan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan hampir semuanya terbatas pada pegawai negeri, khususnya perwira dan birokrat tingkat tinggi, termasuk para ahli yang dikenal sebagai teknokrat.

Tampilnya Orde Baru di pentas politik Indonesia kontemporer telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter ke sistem demokrasi liberal kembali yang namanya dikenal sebagai sistem politik Orde Baru. Jadi pada mulanya, Orde Baru tampil ke pentas politik dengan demokrasi yang berlandaskan liberal di bidang politik dan berusaha memberikan kepuasan di bidang ekonomi. Menurut Mochtar Mas'ood (dalam Mahfud MD, 2000: 61) pada awal Orde Baru sistem demokrasi dijalankan dibarengi dengan langkah-langkah untuk mencari format baru sistem politik Indonesia.

Tetapi landasan tersebut hanya berlangsung pada masa awal. Sebab, semakin lama negara Orde Baru semakin menunjukkan dirinya sebagai negara kuat yang berperan aktif dengan bertumpu pada dukungan militer. Berbagai kajian tentang sistem politik Orde Baru dengan berbagai perspektifnya (Marijan, 1993: 35) menyimpulkan bahwa peran negara Orde Baru begitu kuat dan mengontrol hampir semua segi kehidupan, sehingga tak ada sedikitpun ruang bagi tumbuhnya kehidupan masyarakat sipil. Selain itu, dalam bidang ekonomi

negara Orde Baru memonopoli alat-alat kekerasan dan politik simbolik serta mengklaim bagian terbaik dari alat-alat produksi.

Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang pada era Orde Lama merosot sampai titik terendah sebagai upaya untuk keluar dari dua macam krisis sebagai mana diungkap di atas, maka Orde Baru dihadapkan pada pilihan pembangunan politik lewat strategi “reformasi nanti” dengan konsekuensi; (1) reformasi politik dilakukan secara bertahap; (2) berkompromi dengan mempengaruhi para pemimpin oligarkis partai; dan (3) penekanan dwi-fungsi ABRI pada “kekaryaan” dalam urusan-urusan non-politik. Di pihak lain, strategi demikian dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik. Bagi Orde Baru, keamanan dan stabilitas politik merupakan hal yang sangat penting guna menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka pemerintah mengambil langkah-langkah: (1) menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan konsensus dengan cara menghapus politik kepartaian, membatasi gerak parpol dan badan-badan perwakilan, dan menerapkan politik konsensus; (2) membatasi partisipasi politik majemuk. Kalaupun ada, partisipasi lebih diarahkan pada pelaksanaan program pembangunan yang dianut oleh elit politik. Langkah ini dimaksudkan agar proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan berjalan cepat, efektif, dan efisien sehingga warna kebijakan bersifat teknokratis.

Maka restrukturisasi politik pun dilakukan, lewat penataan kehidupan partai, penyederhanaan, yang kemudian dilakukan penataan ideologi berupa pengeliminasian politik yang berdasarkan aliran. Orde Baru berpikiran pluralitas

partai dan pluralitas ideologi merupakan *biang kerok* dari konflik-konflik politik yang terjadi sebelumnya.

Di pihak lain, sebagaimana dikemukakan Ali Mutopo (1982: 193) “gagasan penyederhanaan partai itu tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai, tetapi lebih penting daripada itu adalah perombakan sikap dan pola kerja menuju orientasi pada program”. Paralel dengan penyederhanaan partai adalah penunggalan ideologi.

Realisasinya, sepuluh partai disederhanakan menjadi tiga sejak Pemilu 1977, yakni (1) PPP yang bercorak spiritual sebagai fusi partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti, (2) Golongan Karya, sebagai *government party* yang pendiriannya dimaksudkan untuk menampung aspirasi politik dari kelompok-kelompok yang belum tersalurkan dalam partai-partai yang ada, dan (3) PDI yang bercorak nasionalis-materialis, sebagai fusi dari lima partai: PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba.

Format kepartaian yang sangat ideologis tersebut ternyata menimbulkan citra buruk bagi partai politik di Indonesia. Berdasarkan pendekatan pembangunan politik, Pye (dalam Yahya Muhaimin, 1988: 17) mengemukakan munculnya tiga penyakit partai politik yang sering menimbulkan konflik. *Pertama*, mereka terlalu berorientasi pada ideologi, bukan program, yang sangat peka untuk masyarakat majemuk. *Kedua*, mereka hanya mengutamakan kepentingan kelompok dan menggunakan dukungan rakyat untuk melindungi kepentingan tersebut. *Ketiga*, cara pengangkatan pemimpin partai, karena melalui pimpinan pusat dan tidak bertanggungjawab pada pemilih telah menjadikan kepemimpinan partai suatu oligarki yang tidak bertanggungjawab terhadap pemilih mereka.

Selain rentan menimbulkan konflik, kebijakan penyederhanaan partai tampaknya mengingkari pluralitas Indonesia sebagai negara mejemuk dan memungkinkan munculnya gerakan-gerakan sentrifugal terhadap pusat-pusat kekuasaan. Dalam praktiknya, stabilitas nasional sebagai idiom politik khas Orde Baru ternyata justru memperlihatkan penguatan pusat-pusat kekuasaan terus menerus tanpa pernah memberi kesempatan kekuatan masyarakat muncul sebagai pusat kekuasaan alternatif. Dengan pola distribusi kekuasaan yang timpang, demokrasi mau tak mau harus dikebelakangkan sehingga pembangunan ekonomi dapat dijalankan.

Akibatnya, berbagai label atas format dan wajah politik Orde Baru dikenakan. Misalnya, Willner, Anderson, dan Crouch menyebut Orde Baru sebagai rejim *neopatrimonial*, Feith menyebutnya *repressive developmentalist*, Karl D. Jackson menyebutnya *bureaucratic polity*, R. William Liddle menyebutnya *personal rule*, MacDougall sebagai *technical state*, dan Dwight Y. King sebagai *bureaucratic authoritarian* (Shin, 1989). Berbagai sebutan tersebut menggambarkan bahwa Orde Baru sebagai sebuah rejim otoriter dan represif yang bertumpu pada kekuatan militer dan birokrasi sebagai mesin pembangunan dengan Soeharto sebagai pemegang pusat kekuasaan yang sangat besar baik pada *level* infrastruktur maupun suprastruktur politik. Posisi Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar memudahkan untuk secara langsung menguasai hegemoni Golkar terhadap kekuatan infrastrukural seperti partai politik. Pada gilirannya hal ini berpengaruh pada fungsi kontrol lembaga legislatif. Ini merupakan gambaran kuatnya posisi presiden secara suprastrukural.

Kekuasaannya sebagai kepala eksekutif tidak mendapat kontrol yang berarti karena presiden memegang pusat-pusat kekuasaan.

Maka, tidak mengherankan DPR pada era Soeharto sekadar sebagai institusi yang selalu memberi legitimasi atas seluruh kebijakan Soeharto. Karena fungsi kontrol legislatif tidak berjalan, maka tindakan rejim Orde Baru semakin hari semakin tak terkendali. Dikaitkan dengan peran militer dalam proses pembangunan, Orde Baru telah mengubah Dwi-Fungsi ABRI menjadi semacam ideologi. Buktinya bisa dilihat dari penetrasi dan penguasaan militer di jajaran birokrasi, korporatisme melalui Golkar, penguasaan lembaga legislatif, praktik ekonomi dan bisnis militer serta pendekatan populis kepada rakyat melalui program ABRI Masuk Desa (AMD). Akhirnya, ideologi Dwi-Fungsi ABRI bekerja ganda, yaitu di satu sisi memotong basis-basis kekuatan politik masyarakat sampai tingkat terendah dan sekaligus memindahkan basis-basis kekuatan tersebut ke tangan militer.

Mengamati peran militer demikian kuat, pengamat Indonesia Prof. Daniel Lev (dalam Sukarjaputra, 2001: 64) menyatakan praktis militerlah sebenarnya yang menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia dengan pengaruh militerismenya bahkan sejak Indonesia baru merdeka. Di bidang ekonomi, bisnis militer marak di mana-mana mulai dari jasa angkutan, pengadaan barang, sampai pemilikan sekolah, mal atau supermarket. Di bidang pendidikan, pengaruh militerisme pun merasuk sedemikian dalam, terbukti dari banyaknya anggota militer yang menjabat di departemen pendidikan. Bukan hanya itu, militer juga masuk lebih dalam sampai kepada kurikulum sekolah lewat mata kuliah kewiraan. Di bidang sosial dan politik, militer masuk lebih jauh lagi



untuk menentukan jalan hidup anggota masyarakat. Pendek kata, selama Orde Baru berkuasa tidak ada ruang yang bebas dari pengaruh militer.

Sebagaimana rejim manapun di dunia ini yang dikuasai militer, rejim Orde Baru tidak saja sentralistik tetapi juga represif. Represi rejim ini berupa kekerasan dan kekejaman politik diperlakukan khususnya bagi mereka yang mempertahankan hak milik tanah, hak untuk hidup, hak berekspresi, hak berbeda ideologi politik, serta hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya (Bhakti, *et al*, 2001: 266). Begitu represifnya, maka sebagian orang ada yang menyebut Indonesia di bawah Orde Baru sebagai *The Republic of Fear*.

Orientasi Orde Baru terhadap pembangunan ternyata tidak lebih sekadar bagian dari upaya memusatkan kekuasaan yang tak lepas dari penguasaan sumber daya politik masyarakat. Orientasi ini tampaknya tidak lagi relevan mengingat pembangunan Orde Baru ternyata membawa dampak terhadap perkembangan masyarakat, misalnya jurang kemiskinan yang semakin melebar. Lewat pengumuman pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% per tahun, Indonesia mengundang decak kagum Bank Dunia dan disebut sebagai salah satu keajaiban Asia (*the Asia Miracle*). Namun alih-alih sukses pembangunan ekonomi itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang terjadi justru kesenjangan sosial kian melebar. Bersamaan itu pula, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh aparat negara bagaikan gurita yang mengusik rasa keadilan, yang mengakibatkan kemarahan rakyat.

Di samping itu, belakangan terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang amat spektakuler tersebut ternyata hanya semu belaka. Sebab, pertumbuhan 7%

per tahun yang selalu didengung-dengungkan pemerintah ternyata bukan merupakan pencerminan dari kekuatan fundamental ekonomi nasional. Para ahli menyebutkan bahwa fondasi perekonomian ternyata sangat keropos (Alhumami, 1999:10). Ini terbukti ketika krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia sejak pertengahan 1997 telah berdampak sangat luas bagi perekonomian nasional. Akhirnya, krisis ekonomi benar-benar melilit Indonesia dan memporak-porandakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama enam Repelita.

Kisah sukses pembangunan ekonomi yang amat dibanggakan Orde Baru itu runtuh seketika diterpa badai krisis yang demikian dahsyat. Bersamaan itu muncul tuntutan masyarakat akan sebuah model format politik yang lebih demokratis. Sebab, Orde Baru dari waktu ke waktu dianggap telah melenceng jauh dari cita-cita awalnya. Isu “keterbukaan” tak bisa dielakkan seiring dengan munculnya isu demokratisasi di panggung politik global. Seiring dengan terus merosotnya kehidupan ekonomi nasional, berbagai desakan reformasi politik terus menggema. Akibat desakan bertubi-tubi dari berbagai lapisan masyarakat yang dipelopori mahasiswa dan intelektual, Soeharto terpaksa harus meletakkan jabatan 21 Mei 1998. Dan, saat itu pula rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun berakhir dengan berbagai persoalannya.

### **c. Masa Kepresidenan B.J. Habibie**

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru tidak berarti jalan menuju demokrasi bisa dilalui dengan mulus. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 tidak mampu bertahan karena lebih dipandang sebagai reproduksi Orde Baru ketimbang suatu pemerintahan demokratis produk reformasi. Alfred Stepan yang mendalami kajian mengenai transisi demokrasi

bahkan mengatakan bahwa pemerintahan B.J. Habibie adalah “rejim nondemokrasi yang merupakan kelanjutan kekuasaan lama” (Tempo, 15/8/1998). Para ahli menyebut era B.J. Habibie sebagai era pemerintahan transisi.

Walaupun berhasil melakukan liberalisasi politik, antara lain dengan membuka kebebasan pers, melepaskan para tahanan politik, dan mereformasi undang-undang bidang politik (UU partai politik, UU pemilihan umum, dan UU susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD)---yang memungkinkan terbentuknya partai-partai baru dan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis---pemerintahan B.J. Habibie hanya bertahan selama 15 bulan. B.J. Habibie, mantan orang kepercayaan Soeharto, Ketua ICMI, penasehat Golkar, dan pemimpin di berbagai bidang usaha negara, akhirnya jatuh menyusul penolakan pertanggungjawabannya oleh MPR hasil pemilu demokratis produk pemerintahannya. Sebenarnya kebijakan liberalisasi politik rejim B.J. Habibie merupakan hasil tekanan-tekanan politik yang secara terus menerus tetap dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama mahasiswa sehingga pemerintahan B.J. Habibie mau tidak mau harus melakukan hal itu sebagai jawaban dan langkah kompromi politik.

Masa transisi---di mana pun juga---lazimnya disertai oleh atmosfer keterbukaan, kekaburan, kesamaran, kegamangan, dan ketidakjelasan arah. Pun yang terjadi di Indonesia pada era B.J. Habibie. Atmosfer kehidupan politik era B.J. Habibie menimbulkan terjadinya dislokasi dan disorientasi. Sebab, tatanan lama sudah dipandang usang dan terus dilakukan pembongkaran secara besar-besaran, tetapi tatanan baru tengah dalam proses dicari.

Meskipun memperoleh legitimasi formal-konstitusional, B.J. Habibie secara faktual tidak bisa menghindar dari persoalan legitimasi publik karena tidak melalui proses pemilu. Ini menyebabkan debat berkepanjangan dan tidak sehat di kalangan elit politik. Apalagi, elit-elit itu sendiri juga mengalami disorientasi yang cukup tajam. Debat dan konflik antarelit politik itu pula yang dapat menjelaskan tentang pro-kontra Sidang Istimewa. Ide-ide tentang presidium dan Komite Rakyat juga muncul bersamaan mengemukakan konflik di kalangan elit politik.

Jika kita amati, terdapat beberapa konsekuensi politik era transisi B.J. Habibie. *Pertama*, terjadi pertarungan kepentingan antarelit yang dengan fasih selalu berbicara atas kepentingan rakyat. Konflik ini terjadi bukan saja karena selama rejim Soeharto masyarakat kita---termasuk elit-elit politiknya--- tidak dibiasakan berkonflik secara sehat dan wajar, tetapi juga lantaran munculnya egoisme politik yang begitu mengedepan. Sebagaimana dikutip Urbaningrum (1999: 266) para ahli menyebutkan telah terjadi *political selfish* di kalangan elit politik secara telanjang pada era transisi Indonesia.

Maka, muncul isu-isu tentang rembuk nasional, koalisi nasional, atau rekonsiliasi nasional yang di satu sisi bisa dipahami sebagai kemauan politik (setidaknya secara verbal) untuk mencairkan kebekuan dan gejala egoisme politik, tetapi di sisi lain adalah pengabsahan bahwa gejala itu memang secara faktual hadir dalam dinamika perpolitikan nasional. Sampai berakhirnya era B.J. Habibie, gagasan tersebut ternyata belum terlaksana atau memang sengaja tidak dilaksanakan, karena masing-masing elit politik lebih banyak mencurahkan perhatian pada perebutan kekuasaan dan upaya menjatuhkan pemerintahan B.J. Habibie ketimbang membangun *platform* politik wajah Indonesia ke depan.

*Kedua*, bersamaan dengan konflik antarelit politik itu muncul pula realiranisasi politik. Politik aliran ini sesungguhnya dipercaya sebagai gejala khas politik Indonesia pada 1950 dan 1960-an dan sempat hendak dikubur oleh rejim Soeharto lewat kebijakan pembangunan politik yang mengarah pada program dan rasionalitas ekonomi politik. Ini yang sering disebut sebagai proyek deideologisasi. Tetapi, proyek itu gagal karena deideologisasi dan dealiranisasi yang ditempatkan pada konteks otoritarianisme politik ternyata kehilangan pijakan empirisnya di masyarakat, selain mencabik-cabik semangat pluralisme. Maka itu, ketika rejim Soeharto jatuh aliranisme muncul kembali.

*Ketiga*, muncul kembali gejala figurisme politik. Fenomena ini bisa dimengerti pada konteks disorientasi masyarakat yang disertai romantisme politik, sehingga rasionalitas politik kurang memperoleh tempat yang memadai dalam wacana politik. Dengan kata lain, figurisme politik ditopang oleh kesadaran dan pilihan politik atas dasar emosi-fanatis dan simbol-simbol kebesaran masa silam yang hendak dibangkitkan kembali. Menurut Urbaningrum (1999: 267) dalam konstruksi politik demikian, yang gampang tampil dan diterima oleh masyarakat adalah tipe-tipe pemimpin *solidarity maker*. Masyarakat yang mengalami disorientasi itu memimpikan para pemimpinnya bisa tampil sebagai mesias, semacam Ratu Adil yang akan mampu membawa kepada zaman baru yang lebih baik.

Gambaran di atas sesungguhnya menunjukkan betapa secara politik tengah terjadi krisis yang begitu parah di Indonesia. Ujung dari keadaan ini adalah pada era B.J. Habibie terjadi polarisasi sikap politik di antara elit politik yang menurut Haris (2002: 31) mengerucut ke dalam tiga kategori umum, yaitu (1) kekuatan-

kekuatan status quo yang berpusat di tubuh Golkar, militer, dan kroni Soeharto, (2) kelompok reformis moderat yang didominasi para pemimpin partai-partai baru seperti PDIP, PAN, PKB, dan PBB, dan (3) kelompok reformis radikal yang berpusat pada sebagian kelompok gerakan mahasiswa dan LSM.

Sesudah Soeharto mundur para elit oposisi menggumpal di bawah wacana dominan gerakan mahasiswa yang menghendaki “reformasi total”. Namun kenyataannya para elit oposisi yang berbasis massa luas seperti Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Amein Rais, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyadari sepenuhnya bahwa kendati Soeharto telah jatuh, militer dan Golkar sebagai tulang punggungnya, masih berdiri kokoh di belakang Presiden B.J. Habibie. Karena itu, Deklarasi Ciganjur yang mempertemukan ketiga tokoh oposisi plus Sri Sultan Hamengkubuwono X masih sangat kompromistis dengan kekuatan-kekuatan lama tersebut, sehingga mahasiswa sebagai penggagas pertemuan tersebut kecewa.

Namun demikian, hal penting yang perlu dicermati bahwa pertemuan Ciganjur merupakan momentum bagi dua hal penting yang mempengaruhi arah reformasi. *Pertama*, terpecahnya kekuatan oposisi ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) kelompok reformis radikal yang didominasi sebagian gerakan mahasiswa dan LSM, (2) kelompok reformis moderat yang dipimpin para elit politik berbasis massa luas seperti tokoh-tokoh Deklarasi Ciganjur, dan (3) kelompok mahasiswa Islam yang mendukung kepemimpinan B.J. Habibie dan moderat dalam menyikapi Golkar dan militer.

*Kedua*, Deklarasi Ciganjur menjadi momentum tersisihnya kelompok reformis radikal seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Partai Uni

Demokrasi Indonesia (PUDI), karena para tokoh yang juga menjadi pemimpin partai politik baru, kecuali Sri Sultan Hamengkubuwono X, cenderung membiarkan berlangsungnya suatu transformasi politik secara gradual melalui mekanisme Pemilu ketimbang secara total melalui penggantian kekuasaan lewat gagasan Presidium dan Komite Rakyat.

Kendati dalam suasana politik sedemikian rapuh, pemerintahan B.J. Habibie berhasil melaksanakan Pemilu secara demokratis pada 1999 dengan hasil PDIP yang agak konservatif sebagai pemenangnya. Ini membuktikan bahwa rakyat secara mayoritas menghendaki proses penggantian kekuasaan berjalan secara bertahap. Di sisi lain, partai-partai politik garis keras ternyata tidak memperoleh dukungan rakyat secara signifikan, sehingga tak memperoleh satu kursi pun di lembaga perwakilan. Partai-partai Islam yang eksklusif, kecuali PPP yang meraih jumlah kursi ketiga di DPR, relatif tidak memperoleh dukungan luas sebagaimana dibayangkan sebelumnya.

Sampai menjelang pemilihan presiden yang dimenangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid polarisasi politik di antara elit politik berikut konstituennya sangat tajam antara pendukung KH. Abdurrahman Wahid sebagai seorang pluralis dan Megawati Soekarnoputri yang secara riil partainya memenangkan pemilu. Karena memperoleh dukungan Poros Tengah, akhirnya KH. Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan presiden mengalahkan Megawati Soekarnoputri. Kompromi politik lewat Poros Tengah yang mengantarkan KH. Abdurrahman Wahid menduduki jabatan presiden ternyata bersifat sesaat dan semu. Terbukti bahwa hanya dua bulan sesudah masa kepresidenannya, Abdurrahman Wahid sudah mulai menghadapi berbagai konflik dan pertarungan politik yang semakin

hari semakin menajam dan berakhir dengan kejatuhannya, kendati sebagian dari konflik disebabkan oleh ulah dan tindakan Presiden Abdurrahman Wahid sendiri. Sebenarnya kerjasama, konflik dan pertarungan antarelit politik menjelang dan selama era Abdurrahman Wahid adalah kerjasama dan pertarungan di antara sesama kelompok elit politik reformis yang sebelumnya secara bersama-sama mengakhiri kekuasaan B.J. Habibie.

Mengkaji perjalanan sejarah politik Indonesia secara ringkas sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan kajian Gribb (1990), Wertheim (1950), dan Nordholt (2000), kita bisa sampai simpulan bahwa betapapun luasnya perselisihan, kerusuhan, kekerasan, dan konflik dalam berbagai dimensinya bukan sesuatu yang aneh bagi Indonesia. Secara keseluruhan, sejarah Indonesia pada masa pra-kolonial, kolonial dan setelah kemerdekaan diwarnai dengan kekerasan, perselisihan dan konflik, baik antarindividu, antarkeluarga, antarsuku, antarwilayah. Masing-masing berusaha keras untuk melindungi atau meneruskan kepentingan-kepentingan mereka. Hal yang sama juga terjadi pada era Abdurrahman Wahid di mana konflik antarelit politik tidak lepas dari upaya memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

#### **d. Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid**

Salah satu perubahan mencolok dalam struktur politik di Indonesia pasca-kejatuhan Soeharto adalah menguatnya kekuatan politik parlemen (DPR). Selama Orde Baru berkuasa institusi representasi rakyat ini sangat tidak berdaya dan tak lebih dari sekadar “stempel” politik bagi lembaga eksekutif, terutama lembaga kepresidenan. Dengan kata lain, Dewan Perwakilan Rakyat tidak ubahnya sebagai lembaga boneka eksekutif. Sebab, setelah dilakukan fusi atau penyederhanaan



partai politik pada 1972 secara otomatis Golkar yang menjadi mesin politik pemerintah menjadikan DPR sebagai instrumen politik pemerintah---karena Golkar meraih predikat sebagai pemenang mayoritas tunggal pada lima kali pemilu.

Menguatnya lembaga perwakilan rakyat merupakan buah dari proses liberalisasi politik yang digulirkan sejak jatuhnya Orde Baru. Selain itu, terbangunnya institusi perwakilan rakyat ini merupakan indikasi mulai tumbuhnya suatu pemerintahan demokratis yang ditandai oleh kekuatan rakyat yang berdaulat melalui wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilihan umum yang demokratis.

Meminjam perumusan CF Strong tentang hakikat demokrasi, Syafe'ie (2001: 4) menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Atau dengan kata lain, negara demokratis didasari oleh sistem perwakilan yang demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

Pada era Abdurrahman Wahid keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat semakin independen dan bersuara lantang mengontrol jalannya pemerintahan oleh eksekutif. Dalam perkembangannya, banyak yang menilai bahwa atmosfir kebebasan era Abdurrahman Wahid membuat sebagian kekuatan di parlemen semakin *over acting* dalam memainkan peran kontrolnya terhadap eksekutif. Akibatnya, menurut Mahfud MD (2003: 91) Indonesia yang konstitusinya didasarkan atas sistem presidensial seolah-oleh telah berubah menjadi sistem

parlementer. Di sini permasalahan mulai muncul karena perbedaan tafsir politik atas kewenangan masing-masing

Mengapa pada era Abdurrahman Wahid parlemen menjadi begitu kuat? Terdapat beberapa alasan, antara lain: *pertama*, Presiden Abdurrahman Wahid berasal dari partai pendukung (PKB) yang relatif kecil dan bukan pemenang pemilu; *kedua* anggota DPR dipilih melalui Pemilu yang demokratis; *ketiga* Presiden berasal dari kalangan sipil yang berwawasan demokratis dan; *keempat* tidak terkooptasi oleh lembaga eksekutif.

Keberadaan institusi perwakilan rakyat yang sangat kuat tersebut membuat lembaga ini bukan hanya mampu menjalankan fungsi-fungsi kontrol yang melekat pada lembaga tersebut, tetapi juga sebagai *watch dog* bagi eksekutif yang sewaktu-waktu bisa bertindak sangat represif. Selain itu, anggota DPR tidak lagi menjadi rikuh melancarkan kritik terbuka kepada Presiden. Di satu sisi, dalam kehidupan demokrasi kenyataan ini harus dipandang sebagai perkembangan positif karena di masa lalu hubungan antara DPR dan Presiden terlalu formal dan kaku. Presiden di masa lalu tampak angker di depan DPR dan DPR tampak tidak berani untuk menengadahkan muka di hadapan Presiden. Abdurrahman Wahid mencairkan kekakuan dan keangkeran itu sebagai bagian dari desakralisasi lembaga kepresidenan. Namun, di sisi yang lain, perkembangan itu juga bisa negatif karena kemudian DPR ternyata sangat interventif terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif.

Desakralisasi baik lembaga perwakilan rakyat maupun kepresidenan yang dilakukan Abdurrahman Wahid tidak lama setelah memangku jabatan presiden ternyata akhirnya menjadi bibit konflik antara Presiden dan DPR yang

berkepanjangan. Mula-mula, bibit konflik itu timbul melalui masalah yang sepele, yakni ketika Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa tingkah laku anggota DPR seperti tingkah laku murid taman kanak-kanak. Barangkali, dengan pernyataannya itu, Abdurrahman Wahid hanya bermaksud bercanda seperti kebiasaannya.

Dalam acara rapat konsultasi antara Presiden dan DPR yang membicarakan pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, Kamis, 25 November 1999, pada sesi tanya jawab, terlihat bahwa banyak anggota DPR yang mengacungkan tangan sambil berteriak untuk minta berbicara. Ketika ada seorang anggota berbicara, anggota lain menginterupsi sehingga suasana memang mirip murid taman kanak-kanak yang berebutan ingin menyanyi. Tidak heran kalau Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa “Tak ada bedanya antara anggota DPR dengan murid Taman Kanak-Kanak”.

Karuan saja Gedung DPR/MPR menjadi hiruk pikuk seolah menjadi panggung ludruk. Senyum, tawa, hingga gemuruh tepuk tangan berkali-kali membahana di gedung parlemen itu. Abdurrahman Wahid telah meruntuhkan keangkeran lembaga kepresidenan dengan berbagai lelucon segarnya. Tanpa sangkan-sangkan Abdurrahman Wahid menampilkan gaya yang mustahil bisa terjadi semasa Presiden Soeharto berkuasa. Kala itu, lembaga kepresidenan tampak begitu angker, sementara DPR sangat tidak berdaya.

Tetapi gaya santai Abdurrahman Wahid tak urung membuat sebagian elit politik dan masyarakat terkaget-kaget. Beberapa anggota DPR menyatakan keberatan dengan pernyataan Abdurrahman Wahid itu karena menganggapnya sebagai pelecehan terhadap lembaga negara yang secara struktural ketatanegaraan sejajar dengan Presiden. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Prijo Budi

Santoso meminta pernyataan tersebut diklarifikasi. “Saya menangkap dari pernyataan itu Pak Abdurrahman Wahid me-*nothing*-kan apa-apa yang kami sampaikan” ujarnya berapi-api (Forum, No. 34/28/11/1999: 20). Bahkan, ada di antara mereka yang meminta Abdurrahman Wahid, untuk mencabut pernyataannya itu. Abdurrahman Wahid yang memang selalu bersikap enteng dan tanpa beban, menyambut reaksi beberapa anggota DPR itu dengan tenang. “Ya, sudah. Kalau ada yang tersinggung saya minta maaf. *Gitu* aja, kok repot,” katanya, yang kemudian menjadi ungkapan khasnya di berbagai kesempatan.

Tentu tidak semua anggota Dewan menganggap hal itu sebagai pelecehan Presiden terhadap DPR. Panda Nababan dari Fraksi PDI-P menyatakan “Ini kan ungkapan lugu, biasa saja *kok*. Karena itu, ia pun menduga orang-orang yang memilih Abdurrahman Wahid dalam Sidang Umum MPR lalu sebenarnya kurang memahami perilakunya” (Forum No. 34, 28 November 1999: 20).

Mengapa sebagian anggota DPR begitu garang terhadap Presiden Abdurrahman Wahid? Bibit kekecewaan sebagian anggota DPR bisa dilacak ketika pada 26 November 1999 tiba-tiba Abdurrahman Wahid memberhentikan Hamzah Haz dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) hanya selang satu bulan setelah pelantikannya atas permintaan sendiri karena Hamzah Haz ingin berkonsentrasi ke partai (PPP). Pemberhentian itu sendiri memang agak unik. Abdurrahman Wahid mengumumkan bahwa Hamzah Haz diberhentikan atas permintaannya sendiri, sedangkan Hamzah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah minta berhenti. Hamzah Haz meminta Abdurrahman Wahid agar memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat KKN. Menurut Mahfud MD (2003: 93) alasan yang

dijadikan pegangan pemberhentian Hamzah Haz bukan tidak disengaja, tetapi merupakan cara cerdas Abdurrahman Wahid untuk memberhentikan Hamzah Haz yang memang tidak disukainya.

Pemberhentian Hamzah Haz oleh Abdurrahman Wahid secara mendadak tentu menimbulkan kekecewaan yang sangat dalam bagi warga PPP yang merasa ikut memberikan kontribusi besar atas terpilihnya Abdurrahman Wahid. Kekecewaan itu kemudian disuarakan melalui orang-orang PPP di DPR yang terus kritis terhadap semua tindakan dan kebijakan Abdurrahman Wahid.

Pada 4 Januari 2000 Abdurrahman Wahid mengangkat Letjen (Pol) Rusdiharjo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal (Pol) Roesmanhadi tanpa persetujuan DPR. Pengangkatan Rusdiharjo menjadi Kapolri menimbulkan ketegangan baru antara Presiden dan DPR. Sebab, tindakan Abdurrahman Wahid dianggap melanggar undang-undang.

Belum reda kekecewaan masyarakat, terutama warga PPP, atas pemberhentian salah seorang kader terbaiknya, giliran berikutnya Abdurrahman Wahid memberhentikan Laksamana Sukardi dari jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN dan Jusuf Kalla dari jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 24 April 2000 dengan alasan keduanya terlibat KKN. Tak pelak, pemberhentian kedua menteri yang berasal partai pemenang pemilu 1999, PDIP dan Golkar, itu memancing reaksi sangat keras di DPR. PDIP dan Golkar, melalui fraksinya, terus menerus mendesak Abdurrahman Wahid untuk menunjukkan bukti bahwa mereka melakukan KKN.

Abdurrahman Wahid sendiri tetap bersikeras dan mengatakan telah menyerahkan bukti-bukti yang tebalnya lebih dari 300 halaman kepada berbagai

pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk dilakukan pemeriksaan. Tetapi, bukti-bukti yang diserahkan itu rupanya tidak pernah mampu menggiring mereka ke depan aparat penegak hukum. Mungkin, bukti-bukti yang diserahkan Abdurrahman Wahid tidak cukup kuat secara formal untuk ditindaklanjuti, meskipun dipercaya bahwa di balik yang formal itu ada fakta-fakta lain. Dan, ini harus dipahami sebagai akibat dari orientasi penegakan hukum kita yang berpihak pada formalitas-prosedural.

Bagaimana pun pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla telah mengecewakan dua partai besar lain setelah PPP, yakni PDIP dan Golkar. Bahkan, dikabarkan juga bahwa Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri, sangat terpuak dengan pemecatan Laksamana Sukardi yang merupakan salah satu orang andalannya di PDIP. Buntutnya, pada 25 Mei 2000 sejumlah 263 tanda tangan anggota DPR terkumpul untuk mendukung hak interpelasi kepada presiden atas kasus pemberhentian dua kader partai politik besar. Akhirnya, pada 21 Juli 2000 Presiden Abdurrahman Wahid membuat pernyataan permintaan maaf tertulis kepada DPR atas pemberhentian dua orang menteri tersebut. Pada 22 Juli 2000 DPR menerima permintaan maaf presiden dengan catatan di antaranya harus menghentikan pernyataan-pernyataan kontroversialnya.

Menurut berbagai sumber, kendati pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri merupakan hak prerogatif presiden dan DPR telah memaafkan presiden, pemberhentian Laksamana Sukardi dari jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN secara mendadak sangat mengecewakan Megawati Soekarnoputri dan dianggap sebagai awal berubahnya sikap Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab, Laksamana Sukardi adalah salah seorang

kader terbaik PDIP dan menjadi menteri atas garansi Megawati Soekarnoputri. Seandainya pemberhentian itu dibicarakan terlebih dahulu dengan Megawati Soekarnoputri barangkali persoalannya menjadi agak lain. Lebih-lebih ternyata pengganti Laksamana Sukardi adalah Rozy Munir yang tak lain adalah orang dekat Abdurrahman Wahid sendiri. Maka, kejengkelan Megawati Soekarnoputri sangat bisa dipahami.

Menyusul pemberhentian Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla, yang tak kalah mengejutkan lagi adalah pemberhentian Wiranto dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Polkam yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid dalam perjalanannya ke luar negeri pada 31 Januari 2000. Saat itu Abdurrahman Wahid meminta agar Wiranto mengundurkan diri karena diduga terlibat dalam pelanggaran HAM pasca-jajak pendapat di Timor Timur. Wiranto sendiri semula enggan memenuhi permintaan itu karena kalau langsung mengundurkan diri berarti dia mengakui terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur. Padahal, itu baru kesimpulan sepihak dari Tim Pencari Fakta yang harus dibuktikan dulu di pengadilan.

Tetapi pada akhirnya Wiranto harus mundur sebab di dalam sistem Presidensiil jabatan menteri itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Pada 15 Februari 2000 Abdurrahman Wahid melantik Letjen (Purn) Surjadi Sudirja sebagai Menko Polkam *ad interim* menggantikan Wiranto bersamaan dengan pelantikan Ir. Bondan Gunawan sebagai Sekretaris Negara menggantikan Dr. Ali Rahman yang telah mengundurkan diri.

Di kalangan aktivis LSM dan aktivis HAM di dalam dan di luar negeri, tindakan Abdurrahman Wahid memberhentikan Wiranto dianggap sebagai

tindakan kepahlawanan dengan keberanian yang luar biasa. Belum ada orang yang seberani Abdurrahman Wahid melakukan tindakan yang begitu tegas terhadap jenderal yang sangat kuat seperti Wiranto. Abdurrahman Wahid merupakan orang pertama yang berani *mengobok-obok* Mabes TNI yang dalam waktu lama dianggap angker.

Namun, tindakan Abdurrahman Wahid tersebut harus dibayar mahal, sebab barisan politik yang kecewa terhadap Abdurrahman Wahid dari hari ke hari semakin banyak dan kuat. Selain PPP, PDIP, dan Golkar yang sudah lebih dahulu kecewa karena kader-kadernya diberhentikan, kini giliran TNI yang semakin tidak simpatik kepada Abdurrahman Wahid dan secara diam-diam menjadi bagian dari barisan ini yang menggoyang Abdurrahman Wahid. Persetujuan Fraksi TNI di MPR/DPR untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid yang menjadi kunci penentu lengsernya sang Presiden. Seandainya TNI (dan Polri) masih *solid* mendukung Abdurrahman Wahid, agaknya tidak mungkin Abdurrahman Wahid bisa dijatuhkan dengan begitu mudah.

Tindakan Abdurrahman Wahid membersihkan orang-orang yang tidak disukainya di kabinet terus dilanjutkan dengan memberhentikan Bambang Sudibyo, orang kepercayaan Amien Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari jabatan Menteri Keuangan dan Kwik Kian Gie, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri dari PDIP dari jabatan Menko Ekuin pada 10 Agustus 2000. Menyusul pemberhentian Bambang Sudibyo oleh Abdurrahman Wahid, Amien Rais selaku Ketua Umum PAN sebagaimana dimuat Jawa Pos (19/8/2000) menyatakan “Tanpa Bambang Sudibyo di posisi Menteri Keuangan, PAN jadi oposisi”



Ketegangan hubungan antara sebagian anggota DPR dan Abdurrahman Wahid semakin bertambah ketika pada 18 September 2000 Abdurrahman Wahid secara mengejutkan tiba-tiba memberhentikan Kapolri (Pol) Rusdihardjo dan menunjuk Wakil Kapolri Komisaris Besar (Pol) Surojo Bimantoro sebagai Kapolri yang baru. Sebab, DPR menilai pemberhentian dan pengangkatan Kapolri baru tidak sesuai dengan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang TNI Polri karena tanpa persetujuan DPR.

Pengumuman pemberhentian ini muncul bersamaan dengan kecaman simpang-siur mengenai kegagalan Polri mengungkap rangkaian peledakan bom di Jakarta, yang memuncak dengan perintah presiden untuk menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Oleh karena itu, tak mengherankan jika muncul dugaan yang mengkait-kaitkan pemberhentian ini dengan rangkaian kegagalan Polri mengungkap berbagai kasus tersebut. Menurut laporan berbagai media, ada bukti-bukti yang menyebutkan pihak kepolisian sudah tahu siapa yang bertanggungjawab di balik semua ini. Karena itu, harus segera dibuktikan.

Akan tetapi, banyak pihak, seperti terungkap dari laporan berbagai media massa, memang sudah sejak lama kasak-kusuk mencurigai sangkut-paut rangkaian peledakan bom ini dengan Soeharto dan para loyalisnya. Ledakan terakhir yang menewaskan 15 orang yang terjadi di BEJ (Bursa Efek Jakarta) Rabu (13/09/2000), atau hanya sehari sebelum sidang kedua pengadilan Soeharto dan ledakan sebelumnya yang terjadi hanya 200 meter dari Departemen Pertanian (tempat pengadilan berlangsung) di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu malam (30/08/2000), juga terjadi hanya semalam sebelum pengadilan pertama mantan penguasa Orde Baru.

Sebelumnya, di Jakarta juga terjadi dua peledakan bom lainnya. Pertama terjadi di gedung Kejaksaan Agung Selasa (04/07/2000), setelah pagi harinya Kejaksaan memeriksa Tommy Soeharto. Sedangkan satu peledakan bom lainnya berlangsung Selasa (01/08/2000) di rumah dinas Dubes Filipina Leonidas T Caday, dan sempat menewaskan dua orang.

Tentu saja, kecurigaan itu masih harus dibuktikan, dan jelas bukan pekerjaan gampang. Namun, Abdurrahman Wahid segera dengan lantang melontarkan tudingan terbuka bahwa putra bungsu Soeharto merupakan dalang di balik serangkaian peledakan ini. Tujuannya, ingin menghancurkan kredibilitas pemerintahannya, terutama di mata internasional, karena BEJ merupakan panggung modern keuangan Indonesia, tempat kekuatan pasar modern ekonomi lokal bercengkrama dengan kekuatan ekonomi global. Tudingan serupa, ingin mencemarkan wibawa pemerintahannya di mata internasional, juga dilemparkannya sehubungan pembunuhan tiga orang staf UNHCR di Atambua Rabu (06/09).

Atas sikap Abdurrahman Wahid, para lawan politiknya, seperti biasanya, cenderung menilai Abdurrahman Wahid ceroboh dan begitu gampang menuduh seseorang, serta---juga seperti biasanya---suka cari perkara yang tak perlu. Tak bisa dihindari, langkah Abdurrahman Wahid memberhentikan Kapolri menimbulkan ketegangan politik dengan DPR semakin menajam.

Kabinet Abdurrahman Wahid sudah tidak lagi solid ketika pada 3 Januari 2001 Ryaas Rasyid menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Menpan karena alasan perbedaan visi pekerjaan dengan presiden dan dikabulkan oleh Abdurrahman Wahid pada 3 Februari 2001. Pada 7 Februari 2001, Abdurrahman

Wahid memberhentikan Yusril Ihza Mahendra dari jabatannya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM dan digantikan oleh Baharuddin Lopa. Menurut Abdurrahman Wahid, Yusril dinilai tidak bisa bekerjasama dengan presiden dan disusul dengan pemberhentian Nurmahmudi Ismail, mantan Presiden Partai Keadilan (PK), dari jabatan Menteri Kehutanan pada 15 Maret 2001 karena dinilai tidak bisa mengendalikan Partai Keadilan yang dipimpinnya.

Namun, harus diingat upaya Abdurrahman Wahid untuk menyempurnakan kabinet bukan hanya dengan memberhentikan orang-orang di luar PKB, tetapi juga orang-orang di dalam PKB sendiri seperti Rozy Munir Jailani Hidayat, sehingga orang PKB yang masih tersisa hanya Chofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Beberapa bulan sebelumnya di tengah hubungannya dengan DPR yang sudah tidak harmonis, Abdurrahman Wahid kesandung kasus Buloggate dan Bruneigate yang sangat menghebohkan. Sebagai balasan terhadap manuver Abdurrahman Wahid, maka anggota parpol-parpol yang ada di DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki kasus Bulog dan bantuan dana dari Sultan Brunei Darussalam yang kemudian terus menggiring Abdurrahman Wahid ke Sidang Istimewa MPR, sampai akhirnya ia lengser.

Pada 1 Desember 2000 Abdurrahman Wahid secara terbuka mengecam keras legalitas pembentukan Pansus DPR dan mempertanyakan penyampaian berita acara pemeriksaan dari seorang perwira polisi kepada DPR bukan kepada Kejaksaan Agung. Merasa ditantang dan marah dengan pembentukan Pansus, Abdurrahman Wahid tidak mau menghadiri panggilan-panggilan DPR berkenaan dengan kasus Bulog dan bantuan Sultan Brunei tersebut. Abdurrahman Wahid

mengatakan bahwa pembentukan Pansus adalah ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 1954 yang mengharuskan pembentukan Pansus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan dimasukkan di dalam Lembaran Negara. DPR sendiri, kendati kemudian secara diam-diam terlambat mendaftarkan Pansus itu ke Departemen Kehakiman, menganggap bahwa pembentukan Pansus itu sah dan telah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1999 serta Tata Tertib DPR sendiri.

Karena Abdurrahman Wahid tidak mau datang ke DPR untuk memenuhi undangan Pansus, DPR sendiri kemudian menyatakan bersedia menemui Abdurrahman Wahid di Istana, asalkan sang Presiden mau menerima. Abdurrahman Wahid sendiri kemudian mau bertemu Pansus, hanya saja tidak di Istana melainkan di tempat lain, yakni, Jakarta Convention Center (JCC) pada 22 Januari 2001. Pertemuan akhirnya dilaksanakan di Merak Room JCC tetapi hanya berlangsung beberapa saat karena secara tiba-tiba Abdurrahman Wahid meninggalkan ruang pertemuan. Sebab, Abdurrahman Wahid menganggap Pansus tidak memberi klarifikasi apakah pertemuan itu merupakan forum politik atau hukum. Sejumlah anggota Pansus menganggap Presiden melakukan *walk out*.

Pertemuan di JCC itu bukan memperbaiki keadaan melainkan sebaliknya memperburuk hubungan antara Presiden dan DPR. Sebab, Abdurrahman Wahid yang didampingi oleh pengacaranya, Luhut Pangaribuan, tidak mau mengikuti agenda Pansus yang menurutnya mau mengungkit-ungkit masalah secara tidak proporsional. Padahal, sebenarnya pertemuan itu diharapkan bisa menyelesaikan pertarungan politik antara Presiden dan DPR. Tetapi, sifat Abdurrahman Wahid yang tidak suka dilawan dan ditantang serta sikapnya yang tetap konfrontatif

dengan Pansus telah menimbulkan kekecewaan di kalangan anggota Pansus sehingga mendorong munculnya gerakan untuk meneruskan masalah ke Sidang DPR guna mengeluarkan Memorandum.

Pada 26 Januari 2001, Pansus DPR melakukan pemungutan suara di tingkat Pansus secara tertutup untuk mengambil kesimpulan hasil penyelidikan Pansus dengan hasil 44 orang anggota Pansus yang hadir---enam orang tidak hadir---sebanyak 33 anggota Pansus memilih opsi Presiden dapat diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog sebesar Rp. 35 miliar. Sementara sepuluh anggota yang lain memilih opsi orang-orang dekat Presiden menggunakan momentum kedekatannya dengan Presiden untuk mencairkan dana Yanatera, sedangkan satu anggota memilih abstain. Pansus akhirnya menyerahkan hasil pemungutan suara kepada Ketua DPR Akbar Tandjung.

Pada 29 Januari 2001, Rapat paripurna DPR RI menerima laporan Pansus secara aklamasi. Tetapi rapat diwarnai aksi *walk out* enam anggota DPR dari PKB yang tidak setuju rapat dilanjutkan. Hasil kerja Pansus akan menjadi keputusan Dewan apabila Rapat Paripurna Dewan menerima atau menolak hasil kerja Pansus tersebut.

Pada 1 Februari 2001, DPR RI akhirnya menerima dan menyetujui hasil kerja Pansus penggunaan dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei melalui Keputusan DPR RI No. XXXVI/I Februari 2001 dan segera menyampaikan Memorandum I kepada Presiden.

Pada 2 Februari 2001, DPR RI memberikan Memorandum I kepada Presiden yang isinya 'Presiden patut diduga turut berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog; dan Presiden dinilai "inkonsisten" dalam

pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Bruni”. Sejak itu, tuntutan agar Presiden Abdurrahman Wahid mengundurkan diri semakin marak.

Pada 28 Maret 2001, Presiden memberikan jawaban tertulis atas Memorandum I DPR yang dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH. Dalam jawabannya, Presiden tidak menerima isi atau substansi Memorandum yang disampaikan DPR dengan alasan Memorandum tidak memiliki alasan konstitusional. Namun demikian, Presiden menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat jika selama ini melakukan langkah-langkah yang tak terpuji dan tidak berkenan di hati.

Respon atas jawaban Presiden terhadap Memorandum tersebut beragam. Ada yang menilai jawaban Presiden tidak memberi inspirasi/semangat ekonomi yang sedang tidur. Karena itu, Presiden harus segera melakukan kompromi politik untuk menghindari keluarnya Memorandum II dengan menyerahkan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari kepada Wakil Presiden dan ada kontrak politik baru antara legislatif dan eksekutif untuk tidak saling mengganggu. Sedangkan Ketua MPR Amein Rais menilai jawaban Presiden atas Memorandum DPR fatal, karena justru mengandung penjelasan yang memperkuat adanya KKN dalam penyaluran dana terutama dana bantuan Sultan Brunei. Selengkapnya Amien Rais menyatakan:

“Kalau diurut, maka pengusaha, investor, pialang luar dan dalam negeri dapat memberikan upeti sebanyak-banyaknya tanpa batas dengan alasan sumbangan pribadi. Padahal, pemberian upeti merupakan inti dari KKN yang harus diberantas. Saya sampai menangis dalam hati mendengar jawaban itu. Bagaimana kita bisa diberi mandat oleh rakyat untuk memberantas KKN, tapi Presiden sendiri bilang halal” (Kompas, 30/3/2001).

Merasa tidak ada perbaikan yang berarti setelah dikeluarkannya Memorandum I oleh DPR tetapi justru sikap konfrontatif Presiden yang ditujukan kepada DPR, maka tak bisa dihindari pada 30 April 2001 DPR akhirnya mengeluarkan Memorandum II setelah sebelumnya dalam *voting* secara terbuka dari 457 anggota DPR yang hadir, 363 anggota menyatakan setuju bahwa Memorandum II disampaikan kepada Presiden, 52 anggota tidak setuju dan 42 anggota menyatakan abstain.

Kunci dikeluarkannya Memorandum II sebenarnya terletak pada sikap Fraksi PDIP pada sidang DPR tersebut. Di akhir draf tanggapan PDIP setebal 18 halaman juru bicara Fraksi PDIP menyatakan "...maka Fraksi PDI Perjuangan tiba pada kesimpulan untuk mengusulkan kepada Sidang Dewan yang mulia ini agar menyampaikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid Memorandum Kedua untuk diindahkan" (Tempo, 6/5/2001: 24).

Sikap PDIP itu jelas mencerminkan sikap ketuanya, Megawati Soekarnoputri yang selama ini tak pernah bicara gamblang kepada publik ihwal kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Ia terkesan kuat berusaha tetap menjalin hubungan baik, walaupun belakangan Megawati Soekarnoputri mulai jengkel atas tindak tanduk Abdurrahman Wahid.

Sebagaimana diketahui memorandum DPR kepada Presiden sebenarnya adalah bentuk ketidakpuasan atau ketidakpercayaan DPR pada apa yang disampaikan Presiden melalui hak menyampaikan pendapat dan karena itu Presiden harus mempertanggungjawabkan semuanya dalam SI-MPR. Sesuai dengan TAP MPR No. III/1978, dari Memorandum I ke Memorandum II

diberikan waktu tiga bulan, sedangkan memorandum kedua ke usulan SI-MPR berlangsung selama satu bulan.

Menghadapi situasi sosial politik negara yang sangat tidak menentu menyusul dikeluarkannya Memorandum II oleh DPR dan munculnya isu mengenai dekrit Presiden yang membingungkan masyarakat, pada 28 Mei 2001 Presiden mengeluarkan Maklumat Presiden yang kemudian dikenal dengan Maklumat Presiden 28 Mei 2001 dengan memerintahkan Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan. Maklumat tersebut selengkapnya berbunyi:

“Berhubung dengan situasi politik darurat yang kita hadapi karena adanya kontroversi mengenai kemungkinan Sidang Istimewa MPR RI dan kemungkinan Dekrit Presiden maka dengan ini saya memerintahkan Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan untuk mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah khusus yang diperlukan, dengan mengkoordinasikan seluruh aparat keamanan secara fungsional, guna mengatasi krisis serta menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya” (Kompas, 29/5/2001).

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono sendiri penugasan yang diterimanya itu sesuai dengan lingkup dan otoritas sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Sosial dan Keamanan. Di depan wartawan Susilo menyatakan “Tidak ada mandat yang berlebihan dari apa yang saya terima dalam penugasan ini” (Panji, 06/6/2001: 28).

Anehnya, Menkopolsoskam Susilo Bambang Yudhoyono yang diberi mandat untuk melaksanakan Maklumat Presiden diberhentikan pada 1 Juni 2001 oleh Abdurrahman Wahid dan digantikan oleh Agum Gumelar bersamaan dengan *reshuffle* kabinet untuk yang kesekian kalinya yakni Menteri Kelautan dan



Perikanan Sarwono Kusumaatmadja digantikan oleh Rochimin Dahuri, Kementerian Muda Percepatan Restrukturisasi Perekonomian Nasional Cacuk Sudarijanto dihapus, Jaksa Agung Marzuki Darusman digantikan oleh Baharuddin Lopa, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Agum Gumelar digantikan oleh Budi Mulyawan Suyitno dan semuanya berlaku efektif mulai 1 Juni 2001.

Sebelumnya pada 30 Mei 2001 DPR mengadakan Sidang Paripurna DPR ke-62 untuk menanggapi Memorandum II DPR. Akhirnya DPR secara resmi meminta MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa (SI) dengan agenda pokok meminta pertanggungjawaban Presiden. Sidang Istimewa rencananya diadakan pada 1 Agustus 2001 (Kompas, 31/5/2001) .

Pada 1 Juni 2001, Presiden meminta agar Kapolri Jederal (Pol) S. Bimantoro mengundurkan diri dan menunjuk Komisaris Jenderal (Pol) Chaeruddin Ismail sebagai Wakapolri untuk melaksanakan tugas-tugas Kapolri. Tetapi Bimantoro menolak karena tidak sesuai dengan prosedur yakni dengan persetujuan DPR. Sebab, menurutnya masalah Kapolri bukan hanya masalah dirinya tetapi menyangkut DPR. Tak pelak tindakan Abdurrahman Wahid menimbulkan kemarahan sebagian anggota DPR dan menilai Presiden benar-benar telah melanggar hukum untuk yang kesekian kalinya.

Kelanjutannya, pada 20 Juli 2001 Presiden Abdurrahman Wahid melantik Jenderal Chaeruddin Ismail (yang sebelumnya berpangkat Komisaris Jenderal) menjadi Pemangku Sementara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan lagi-lagi tanpa persetujuan DPR. Pelantikan ini telah mendorong pimpinan MPR untuk melaksanakan Sidang Paripurna Sabtu, 21 Juli 2001 dalam rangka mempersiapkan Sidang Istimewa.

Atas tindakan Presiden yang telah menyeret institusi Polri kepada politik praktis, pada 3 Juni 2001 lebih dari 100 perwira tinggi dan perwira menengah Kepolisian RI mengeluarkan pernyataan sikap, yang pada intinya menegaskan menolak segala campur tangan pihak luar yang bertujuan memolitisasi Polri sehingga Polri menjadi alat pemerintah atau alat kekuasaan. Tindakan Abdurrahman Wahid yang mendesak promosi Chaeruddin tanpa persetujuan DPR nyatanya dimaksudkan untuk menyiapkan dukungan bagi pelaksanaan dekrit.

Seakan berebut dengan waktu dan persetujuan antara Presiden dan DPR sudah sangat memuncak, maka pada 23 Juli 2001 pukul 01.10 dini hari Presiden mengeluarkan Maklumat tentang Dekrit Presiden mendahului Sidang Istimewa yang isinya membekukan DPR dan MPR, membubarkan Partai Golkar dan mempercepat Pemilu dalam waktu satu tahun.

Sebagai reaksi atas dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, maka pada 23 Juli 2001 itu pula MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa. MPR mengharap Presiden Abdurrahman Wahid datang ke Sidang Istimewa. Tetapi Abdurrahman Wahid tidak mau datang karena memandang Sidang Istimewa ilegal. Dalam pernyataannya yang disiarkan SCTV (Minggu, 21/7/2001, pukul 20.00 WIB) Abdurrahman Wahid menyatakan:

“MPR itu kalah dengan undang-undang. Fakta siapa sekarang yang punya kekuatan?. Karena itu, SI bertentangan dengan undang-undang. Telah terjadi penyimpangan agenda. Mari adu kuat. Kekuatan siapa yang menang. Tetapi saya jamin tidak ada adu fisik. Saya tidak datang karena SI harus dipandang ilegal, berarti besok saya akan diturunkan oleh mereka. Belum ada sidang arahnya sudah ke sana. Oleh karena itu, tidak ada cara lain kecuali dilawan. Tetapi jangan menggunakan peluru tajam. Adu kuatnya kaya apa? Tadi kepada Panglima TNI, Pak Sabarno dan Pak Budi Harsono saya minta mencabut dukungannya kepada SI. Kalau tidak silahkan mundur sekarang juga. Mari adu kuat, tetapi jangan ada

sedikitpun darah menetes. Saya perintahkan dilawan pakai peluru karet saja”.

Mengomentari ketidaksediaan Presiden Abdurrahman Wahid datang ke Sidang Istimewa, di saluran TV yang sama pada 20 Juli 2001 pukul 18.40 WIB Amien Rais menyatakan:

“Presiden tidak hadir tidak apa-apa asal ada yang mewakili. SI malah dipercepat. Sekarang SI sudah bulat. Fakta konstitusional, politik dan faktual, SI sudah *legitimate*. Titik. Kita sudah hati-hati. Dari 11 fraksi, 9 sudah belajar konstitusi. Mana yang lebih konstitusional. Dalam ilmu sosial, objektif itu keputusan orang banyak. Tak sama dengan eksakta. Dekrit sudah tumpul sudah tidak efektif. TNI/Polri hari ini amat sangat jelas. Tidak mendukung Pak Wahid. Sikap TNI jelas tadi. Sikap PKB sendiri tidak bulat. Contoh, Ketua Umum PKB diberhentikan hari ini. Tokoh-tokoh itu sudah tak tertarik bertemu dengan presiden. Bicaranya terus bergeser. Ada keengganan bertemu. Sebab, hasil pertemuan selalu disinformasi. Presiden agar melihat fakta”.

Sementara di hari yang sama, mengomentari tentang dikeluarkannya Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah pembubaran Partai Golkar, Akbar Tandjung menyatakan:

“Ya, saya akan terus. Saya tak melanggar hukum. Kemarin partai saya dibubarkan Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah, MA menolak. Saya memberi dukungan penuh Mbak Mega”.

Sidang Istimewa tidak bisa dihindari dan dilaksanakan lebih awal dari jadwal semula (dari pukul 10.00 ke 08.00 WIB) yang akhirnya memberhentikan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Abdurrahman Wahid tergelincir dari kursi kepresidenan dan dekritnya dianggap angin lalu karena tidak mendapat dukungan masyarakat, terutama TNI dan Polri. Padahal, para kiai yang bertemu di Batu Ceper, PKB, LSM serta sejumlah pakar hukum dan politik meyakinkan

Abdurrahman Wahid bahwa dekrit akan memperoleh dukungan luas dari masyarakat termasuk polisi dan tentara. Informasi yang masuk ke Abdurrahman Wahid adalah apel siaga TNI di Monas dimaksudkan untuk mendukung Abdurrahman Wahid. Di sini Abdurrahman Wahid benar-benar salah perhitungan sehingga berani mengeluarkan dekrit yang dikira akan memperoleh dukungan dari TNI dan Polri.

Pada hari yang sama MPR mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia. Saat itu pula era Abdurrahman Wahid berakhir.

### **B. Sosok Pribadi Abdurrahman Wahid dan Elit Pendukungnya**

Kepresidenan Abdurrahman Wahid berlangsung singkat, tetapi diyakini telah membawa perubahan cukup signifikan dalam membangun wacana demokrasi di Indonesia. Sayangnya kebijakan Abdurrahman Wahid penuh kontroversi. Begitu kontroversialnya, Mustafa Bisri (dalam Tim INCRoS, 2000: iii) menyatakan bahwa boleh jadi orang Indonesia sepakat tentang Abdurrahman Wahid hanya dalam satu hal, yaitu kontroversial tulen. Apa pun julukan yang diberikan kepadanya mulai yang baik-baik sampai yang jelek-jelek, Abdurrahman Wahid membiarkannya begitu saja. Kalaupun memberi tanggapan, dia hanya berucap “Gitu saja kok repot”, yang menurut Mahfud MD (2003) merupakan idiom khasnya.

Pernah dalam sebuah seminar, ada peserta yang mempersoalkan gelar dan intelektualitas Abdurrahman Wahid. Ditanya soal itu, Abdurrahman Wahid seperti tidak peduli. Dia seolah tidak lagi mementingkan gelar dan *embel-embel* lain di belakang namanya. “Yang dipentingkan itu kualitas, bukan sederet gelar yang ada

di belakang nama”, tegas Abdurrahman Wahid. Ketika menjadi presiden, Abdurrahman Wahid bahkan sering jengkel dengan orang-orang bertitel profesor, doktor, insinyur, sarjana hukum, dan sebagainya. “Berapa banyak profesor, doktor, insinyur, SH segala macam, ternyata dia maling” ujar Abdurrahman Wahid di depan peserta Kongres XII Gerakan Pemuda Ansor di Asrama Haji Donuhudan Boyolali, 29 Juni 2000 (Kompas, 30/6/2000: 6).

Meski tak bergelar, intelektualitas Abdurrahman Wahid diakui tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. Menurut pengamat politik dari LIPI Hermawan Sulistiyo Abdurrahman Wahid adalah ilmuwan kelas dunia yang penuh humor. Predikat yang diberikan Hermawan bukan isapan jempol. Abdurrahman Wahid membuktikan itu dengan karya nyata lewat ratusan artikel yang terbit di dalam maupun di luar negeri. Para Indonesianis seperti Douglas E. Ramage, Greg Barton, Adam Schwarz, Mitsuo Nakamura menyebut Abdurrahman Wahid sebagai salah seorang intelektual Indonesia paling berpengaruh dengan corak pemikiran Islam yang kritis dan progresif, atau Islam liberal (Ramage, 1995: 45; Tim INCReS, 2000: 33).

Ketika menjabat presiden, gaya dan model tindakannya tidak berubah. Berbagai kebijakan, pernyataan dan tindakan Abdurrahman Wahid sering membingungkan publik. Tindakan Abdurrahman Wahid yang sama bisa dimaknai berbeda oleh orang lain. Dia sering melontarkan ungkapan-ungkapan kontroversial dan membiarkannya masyarakat memahaminya dan kalau sudah kepepet dia berkelit (Forum Keadilan, No. 34, 28/11/1999: 20). Sebagian orang melihat hal itu sebagai gaya Abdurrahman Wahid bermain politik, pendukungnya mengartikan Abdurrahman Wahid sebagai orang hebat---bahkan wali---yang

ucapan dan tindakannya selalu jauh di atas jangkauan pemahaman manusia kebanyakan. Pesaing-pesaing politiknya memandang Abdurrahman Wahid sebagai orang yang tidak konsisten dan pembicaraannya sulit dipegang atau *plin-plan*.

*Walhasil*, Abdurrahman Wahid adalah sosok dengan sederet label sosial yang meramaikan panggung politik Indonesia menyusul kejatuhan Orde Baru 21 Mei 1998. Menurut Barton (dalam Zada, 2002: vii) dan Ramage (1995: 45) bagaimanapun Abdurrahman Wahid yang pengagum berat tokoh-tokoh dunia seperti Sun Yat Sen (Cina), Soekarno (Indonesia), Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi (India), dan Jose Rizal (Filipina) telah mengisi wacana politik Indonesia kontemporer lewat berbagai wacana yang ia bangun seperti demokrasi, kebebasan pers dan berbicara, desakralisasi lembaga kepresidenan, supremasi sipil, dan deformasi Islam, dan perjuangan hak kaum minoritas.

### **1. Sosok Pribadi Abdurrahman Wahid**

Sebagai salah satu upaya memahami wacana politik Abdurrahman Wahid yang menjadi tema sentral studi ini, penting diungkap sejarah dan asal-usul sosial serta intelektual Abdurrahman Wahid berikut sepak terjangnya hingga ia menjadi presiden ke-4 Indonesia. Sebab, dalam perspektif ilmu sosial tindakan seseorang tidak lepas dari dari latar sosial, kultural, intelektual dan pola pikir yang ia miliki. Pun Abdurrahman Wahid, wacana demokratisasi yang ia usung selama menjadi presiden tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang dan sepak terjang sosok Abdurrahman Wahid yang selalu “memperjuangkan” demokrasi lewat berbagai forum yang ia ikuti, kendati banyak pula yang menanyakan di mana watak dan jiwa demokratisnya ketika ia mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan

DPR/MPR dan membekukan partai Golkar. Sebab, dekrit yang dikeluarkan oleh sebuah rejim merupakan musuh besar demokrasi.

#### **a. Masa Kecil Abdurrahman Wahid**

Abdurrahman Wahid, panggilan populer K.H. Abdurrahman Wahid, lahir dengan nama lengkap Abdurrahman ad-Dakhil 4 Agustus 1940 di Denanyar Jombang, anak pertama dari enam bersaudara. Ad-Dhakil artinya sang penakluk, sebuah nama yang diambil dari seorang perintis dinasti Bani Umayyah yang menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol berabad-abad silam (Al-Brebesy, 1999: 111). Ayahnya, K.H. Abdul Wahid Hasyim, adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng dan pendiri *jam'iyah* Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan barangkali juga di dunia, melalui jumlah anggota antara 30-40 juta orang (Ramage, 1995: 45).

Ibunya, Ny Hj Sholehah, juga putri tokoh besar NU, K.H. Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang dan Rois 'Aam Syuriah PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dari garis keturunan demikian, meminjam istilah Clifford Geertz, secara genetik Abdurrahman Wahid adalah keturunan darah biru, ia tergolong seorang santri dan priyayi sekaligus. Baik dari trah ayah maupun ibu, Abdurrahman Wahid sosok yang menempati strata sosial tinggi dalam masyarakat Indonesia. Abdurrahman Wahid adalah cucu dari dua ulama terkemuka NU dan tokoh besar bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Abdurrahman Wahid adalah keturunan Brawijaya IV (Lembu Peteng) lewat dua jalur, yakni Ki Ageng Tarub I dan Joko Tingkir (Barton, 2002: 38). (Lebih lengkap lihat bagan Geneologi Keluarga Abdurrahman Wahid). Tak berlebihan jika Ramage (1995:

45) melukiskan Abdurrahman Wahid sebagai anggota keluarga paling terpandang di Indonesia yang telah terlibat dalam malang melintang gerakan nasional dan Islam selama tidak kurang tujuh puluh tahun.

Meski keturunan Kyai terkemuka dan bangsawan di Indonesia, sejarah kehidupan Abdurrahman Wahid tidak mencerminkan kehidupan seorang ningrat. Dia berproses dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat kebanyakan. Abdurrahman Wahid kecil belajar di Pondok Pesantren. Dalam usia lima tahun, ia sudah lancar membaca Al-Qur'an. Gurunya waktu itu adalah kakeknya sendiri, K.H. Hasyim Asy'ari. Pada saat bocah, tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya, Abdurrahman Wahid tidak memilih tinggal bersama ayahnya tapi ikut bersama kakeknya. Dia diajari mengaji dan membaca al-Qur'an oleh kakeknya sendiri di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Di saat serumah dengan kakeknya itu, Abdurrahman Wahid kecil, yang pernah bercita-cita ingin menjadi tentara tetapi gagal karena pada usia 14 tahun dia harus berkaca mata minus, mulai mengenal politik dari orang-orang yang tiap hari hilir mudik di rumah kakeknya.

Riwayat pendidikan formal Abdurrahman Wahid dimulai ketika dia masuk Sekolah Rakyat (SR) di Jakarta. Sebab, pada 1950, lima tahun setelah Indonesia merdeka ayahnya KH. Wahid Hasyim diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Agama. Untuk menambah pengetahuan dan melengkapi pendidikan formalnya, Abdurrahman Wahid dikirim ayahnya mengikuti les privat bahasa Belanda yang diajar oleh seorang Belanda muslim bernama Willem Buhl. Sambil belajar bahasa Belanda, gurunya itu selalu menyajikan musik klasik Barat yang ternyata sangat digemari Abdurrahman Wahid. Inilah pertama kali Abdurrahman



Wahid bersentuhan dengan budaya Barat. Karena ayahnya seorang menteri, Abdurrahman Wahid kecil juga mulai akrab dengan dunia politik lewat teman-teman ayahnya.

April tahun 1953, beberapa bulan sebelum kelulusan, dia pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan sebuah madrasah baru. Dalam perjalanan antara Cimahi dan Bandung, mobil yang dikendarai mengalami kecelakaan. Abdurrahman Wahid kecil selamat, tetapi ayahnya meninggal dunia dalam usia 40 tahun pada saat menjabat Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama. Kematian sang ayah merupakan pukulan berat bagi keluarga Abdurrahman Wahid. Apalagi, ibu Abdurrahman Wahid, Ny Sholihah, saat itu tengah mengandung Hasyim tiga bulan, dan ia harus menanggung beban lima anak.

Lulus dari Sekolah Rakyat (SR), Abdurrahman Wahid masuk Sekolah Menengah Ekonomi (SMEP) di Tanah Abang Jakarta. Setelah satu tahun, oleh ibunya Abdurrahman Wahid dipindahkan ke SMEP Gowongan Yogyakarta dengan harapan selain agar ia bisa melepaskan diri dari lingkungan lama di Jakarta, juga agar ia bisa mendekati Pondok Pesantren, habitat aslinya. Dalam benak ibunya, kelak Abdurrahman Wahid dapat menggantikan almarhum ayahnya sebagai ketua umum PBNU. Di kemudian hari, cita-cita ibunya ternyata menjadi kenyataan, Abdurrahman Wahid tidak hanya menjadi Ketua Umum PBNU tetapi malah menjadi presiden.

Di Yogyakarta Abdurrahman Wahid kecil oleh ibunya ditempatkan di rumah tokoh pergerakan Muhammadiyah. Abdurrahman Wahid juga sempat menjadi santri di pesantren Tegalrejo (Magelang). Di sini Abdurrahman Wahid

mulai mempelajari buku klasik sastra maupun ilmu pengetahuan seperti *Das Kapital* karya Karl Marx, sebuah buku berpengaruh pada dunia modern, berisi sosialisme-komunisme dari buku pikiran Karl Marx (1818-1883) yang ditulis oleh Marshall George Catlets (1800-1959), seorang negarawan AS yang paling berjasa dalam Perang Dunia I. Dalam usia seperti itu dia sudah membaca *Das Kapital*. Abdurrahman Wahid mengakui bahwa buku-buku itu mempengaruhi jalan pikirannya.

Di Yogyakarta Abdurrahman Wahid tinggal di Pondok Pesantren Krapyak, asuhan K.H. Ali Maksum. Siang harinya, dia berangkat sekolah di SMEP. Pada malam hari, dia ikut berdiskusi bersama Haji Juneidi dan anggota Muhammadiyah lainnya. Di sini, Abdurrahman Wahid lagi-lagi mendapatkan pengalaman baru berinteraksi dengan kalangan lain di luar habitatnya. Kehidupan Abdurrahman Wahid mulai berkembang dan meningkat.

Di SMEP Yogyakarta, Abdurrahman Wahid bertemu dengan seorang perempuan bernama Rofi'ah, guru bahasa Inggris. Abdurrahman Wahid juga belajar bahasa lewat radio *Voice of America* dan BBC London. Ia rajin membaca buku-buku berbahasa Inggris. Kegemarannya membaca buku berbahasa asing ini ternyata diketahui oleh guru bahasa Inggrisnya, Rofi'ah, seorang gerwani. Oleh gurunya, Abdurrahman Wahid sering dipinjami buku-buku komunis. Selain buku-buku tersebut, Abdurrahman Wahid juga membaca buku-buku karya penulis terkenal seperti Ernest Hemingway, John Steinbach dan William Faulkner. Dia membaca setiap novel dan buku. Tanpa memilih-milih judul, dan isi setiap buku yang ia peroleh dari toko-toko loakan di Yogyakarta dibaca sampai tuntas seperti Karya Huizinga, Andre Malraux, Ortega Y. Gasset. Dia juga membaca karya

Mikhail Sholokov yang berjudul *And Quid Flowes the Don* merupakan salah satu bacaan favoritnya. Buku-buku dari pengarang Soviet ini dia peroleh secara gratis dari Kedutaan Soviet. Abdurrahman Wahid remaja juga melahap habis beberapa jilid buku Karya Will Durant yang berjudul *The Story of Civilization*.

Masa pendidikan Abdurrahman Wahid di SMEP Yogyakarta tergolong unik. Pada 1955 Abdurrahman Wahid pernah tidak naik kelas sampai dua kali karena nilai matematika dan tata buku-mata pelajaran pokok di SMEP-mendapat angka minus. Sebagaimana diakui Abdurrahman Wahid sendiri nilai kedua mata pelajaran itu kurang karena ia merasa bosan dengan pelajaran itu dan karenanya sering membolos.

Di Yogyakarta Abdurrahman Wahid sampai akhir tahun 1957 ketika dia lulus dari SMEP Selanjutnya, Abdurrahman Wahid memasuki dunia pendidikan agama secara intensif, untuk memenuhi harapan keluarga. Pada tahun itu juga, oleh kakeknya K.H. Bisri Syamsuri Abdurrahman Wahid dikirim ke Pondok Pesantren Tegal Rejo Magelang asuhan K.H. Chudori. Kiai Chudori ini yang menariknya ke dalam situs-situs sufi dan menanamkan praktik-praktik ritual mistik secara mendalam dalam Islam Jawa. Di bawah bimbingan Kiai Chudori, Abdurrahman Wahid mulai melakukan ziarah ke beberapa kuburan keramat para wali di Jawa pada hari-hari tertentu seperti Jum'at legi dan Kamis malam untuk berdo'a dan membaca al-Qur'an. Kebiasaan ziarah kubur dan makam-makam keramat tetap ia lakukan sampai ia menjadi presiden. Bahkan di hari-hari menjelang kejatuhannya, Abdurrahman Wahid masih menyempatkan diri ziarah ke makam seorang ulama di Jombang, sebuah tindakan yang orang awam sulit memahaminya.

Setelah dua tahun belajar di Pesantren Tegalrejo pada tahun 1959, K.H. Abdul Fatah Hasyim, pamannya, meminta Abdurrahman Wahid (usia 19 tahun) membantu mengurus Sekolah Mua'limat di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang dengan jabatan Sekretaris Pondok Pesantren. Di Madrasah ini ia jatuh hati pada muridnya bernama Siti Nuriyah yang akhirnya dinikahi pada 11 Juli 1968 dan memberinya empat orang anak perempuan (Tim INCRes, 2000: 18).

#### **b. Masa Belajar Abdurrahman Wahid**

Pada usia 22 tahun, Abdurrahman Wahid yang sudah menamatkan beberapa kitab standar *mu'tabarah* Pondok Pesantren, berangkat ke Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji dan melanjutkan studinya di Timur Tengah. Pada tahun 1964, Abdurrahman Wahid melanjutkan studi di Al-Azhar Islamic University Mesir, mengambil konsentrasi *Department of Higher Islamic and Arabic Studies*. Menurut Barton (2002: 83) Al-Azhar adalah perguruan tinggi tertua di dunia, didirikan satu abad sebelum Oxford di Inggris dan Sorbonne di Perancis. Sebelum berangkat, pamannya K.H. Fatah Abdurrahman Wahid menganjurkan agar ia mencari istri terlebih dahulu. Anjuran sang paman diterima Abdurrahman Wahid, sebab diam-diam Abdurrahman Wahid sudah punya calon pendamping hidupnya.

Dengan menumpang kapal laut, Abdurrahman Wahid muda menuju Mesir. Dengan membawa buku karya Arthur Schlesinger Jr. yang berjudul *The Age of Jackson*. Buku ini dibaca habis sepanjang perjalanan. Sesampainya di Mesir, ijazah sekolahnya tak berlaku sehingga selama dua tahun waktunya terbuang hanya untuk mengurus persoalan ijazah. Akhirnya ia bisa diterima di Fakultas Syari'ah, Universitas al-Azhar, yang ternyata juga membosankan karena yang ia peroleh sudah ia *khatamkan* di Pesantren.

Untuk menghilangkan rasa bosan kuliahnya, Abdurrahman Wahid menghabiskan waktu di salah satu perpustakaan di Kairo, termasuk American University Library, pusat pelayanan informasi Amerika (USIS), dan toko-toko buku. Di sini, Abdurrahman Wahid menemukan buku mengenai John F. Kennedy dan novel-novel serta sejumlah karya tentang sejarah, filsafat, dan musik. Setiap hari hari Abdurrahman Wahid menyempatkan diri melihat film-film Perancis karya Francois Truffat, Alain Resnais, dan Jean Luc Goddard. Di sini, Abdurrahman Wahid tampak bisa menikmati kembali musik kesukaannya, yaitu musik-musik klasik, nonton film-film Perancis, dan sepak bola (Barton, 2002: 84).

Mesir bagi Abdurrahman Wahid menjadi tempat yang sangat berharga dalam hidupnya. Sebab, dia bisa lebih dekat memahami tokoh Mesir Gamal Abdul Nasser, seorang nasionalis yang dinamis. Di bawah Nasser, Kairo mencapai era keemasan kaum intelektual. Kebebasan untuk bertukar pendapat mendapat perlindungan yang cukup. Misalnya, para pendukung negara Islam Mesir melakukan debat terbuka dengan sosialis di buku-buku, surat kabar, dan kolom-kolom majalah. Perdebatan ini lebih menarik perhatian Abdurrahman Wahid daripada kuliah Al-Azhar. Dia menyimak debat tersebut secara sungguh-sungguh. Hal ini dia lakukan sebagai respek atas pemikir-pemikir muslim modern di Mesir. Menurut salah seorang rekan dekatnya ketika belajar di Mesir, Abdurrahman Wahid adalah pengagum dan pemerhati pandangan-pandangan Thoha Husein dan ‘Ali Abd al-Raziq yang menurut, kalangan al-Azhar, dianggap kontroversial, sekular, dan membias dari akidah Islam (Barton, 2002: 54).

Karena seringnya tidak masuk kuliah, Abdurrahman Wahid tidak naik tingkat dalam kuliahnya di al-Azhar. Ia lebih aktif pergi ke perpustakaan, nonton

film, dan kegiatan-kegiatan di organisasi PPI (Persatuan Pelajar Indonesia). Abdurrahman Wahid menjadi Ketua PPI masa bakti 1964-1970. Meski begitu, bagi Abdurrahman Wahid belajar di Mesir bukan tanpa kesan. Menurut pengakuannya, di Mesir itu ia banyak memperoleh paham “sosialisme yang berbudaya”. Orang-orang Arab, kata Abdurrahman Wahid, sering mempersoalkan sosialisme dari sudut budaya. Hal itu dilakukan karena mereka tidak punya tempat mempersoalkan sosialisme dari sudut agama.

Merasa tidak akan berkembang, pada tahun 1966 dalam usia 26 tahun Abdurrahman Wahid memutuskan keluar dari Universitas al-Azhar dan pergi ke Universitas Baghdad Irak memilih *Department of Religion*. Dari tahun 1966 sampai 1970, di Baghdad Abdurrahman Wahid mendapatkan rangsangan intelektual yang tidak pernah ia dapatkan di Mesir. Dia menyatakan, “di Baghdad, saya mulai berpikir secara sistematis.” Di sini masyarakat muslim Arab klasik dikaji secara empiris dengan pisau metodologis yang tajam. Dia menemukan gairah intelektualnya kembali. Di lingkungan yang baru itu, Abdurrahman Wahid banyak membaca karya-karya sosiologi seperti Emile Durkheim.

Pada waktu yang sama, Abdurrahman Wahid bersentuhan dengan buku-buku besar karya sarjana orientalis Barat. Di samping itu, hal yang menarik lagi adalah perpustakaan universitas penuh dengan buku-buku mengenai Indonesia. Karena itu, di Universitas Baghdad Abdurrahman Wahid diminta untuk meneliti asal-usul historis Islam Indonesia. Di luar studi, Abdurrahman Wahid rajin mengunjungi makam-makam keramat para wali, termasuk makam Syek Abdul Qodir Jalelani, pendiri *Thariqah Qadiriyyah*. Abdurrahman Wahid juga menggeluti ajaran Imam Junaid al-Bahgdadi, seorang pendiri aliran tasawuf yang

diikuti oleh jamaah NU. Atas semua ini Abdurrahman Wahid berkomentar, “Saya menemukan sumber spiritualitas saya.”

Sementara di Irak Abdurrahman Wahid sibuk menuntut ilmu, di Tambak-beras Jombang sebuah perhelatan dipersiapkan. Kebetulan, salah seorang adik Abdurrahman Wahid waktu itu ada yang mau menikah. Merasa tak enak jika ia dilangkahi, Abdurrahman Wahid meminta K.H. Bisri Syansuri-kakek kandungnya yang ketika itu telah berusia 68 tahun-untuk mewakili dirinya naik kepelaminan, mempersunting gadis Nuriyah yang telah ditaksirnya sebelum berangkat ke Timur Tengah.

Sebenarnya dari Universitas Baghdad, Abdurrahman Wahid memperoleh gelar Lc-setingkat S1 di Indonesia-Sastra Arab pada 1970, tetapi tidak pernah disandanginya. Sesudahnya, Abdurrahman Wahid berharap dapat mendaftar di salah satu perguruan tinggi di Eropa yang diawali dengan penajakan ke Universitas Kohn, Heidelberg, Paris, dan Leiden di Belanda. Tetapi ternyata gagal karena selain persyaratan bahasa yang ketat yang tidak dapat dipenuhi tanpa menempuh pelajaran tambahan selama satu tahun, seperti bahasa Jerman, Hebrew, dan Yunani, atau Latin secara baik kualifikasi mahasiswa dari Timur Tengah tidak diakui. Inilah, salah satunya, yang memotivasi Abdurrahman Wahid pergi ke McGill University Canada untuk mempelajari keislaman, tetapi gagal. Karenanya, Abdurrahman Wahid menjadi pelajar keliling, berjalan dari satu universitas ke universitas lain.

Akhirnya dia menetap di Belanda, dia tinggal selama enam bulan dan mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia. Organisasi ini sampai sekarang masih hidup. Untuk biaya hidup selama di rantau, dua kali

sebelum dia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih kapal tanker. Perjalanan panjang Abdurrahman Wahid di luar negeri berakhir pada Juni tahun 1971, ketika akhirnya dia harus kembali ke Pondok Pesantren, habitat asalnya. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid membantu mengajar di pesantren kedua kakeknya di Jombang, Denanyar dan Tebuireng dan juga di Fakultas Ushuluddin, Universitas Hasyim As'ari dan sekolah menengah di pesantren tersebut.

Di samping mengajar, Abdurrahman Wahid melakukan upaya pemberdayaan pesantren. Dia mengunjungi hampir semua pesantren yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Upaya pemberdayaan itu baru mendapatkan langkah nyata pada pertengahan 1970-an sampai dia memperoleh penghargaan Kalpataru sebagai bukti keberhasilan upaya Abdurrahman Wahid dalam rangka pemberdayaan itu. Atau paling tidak pesantren. intensif terlibat upaya kesehatan pelestarian lingkungan. Bekerja sama dengan LP3ES, Abdurrahman Wahid terus memberi warna baru bagi pesantren di Indonesia. Cara kerja seperti ini, memberikan ruang gerak yang cukup bagi Abdurrahman Wahid untuk tetap memiliki akar pijakan yang jelas pada setiap langkah politiknya.

Tegasnya, antara Abdurrahman Wahid dan para pemimpin serta pengasuh pesantren telah ada kesamaan bahasa yang cukup mendalam. Sehingga, hampir tak ada suatu gerakan Abdurrahman Wahid yang dianggap mengkhianati pesantren, meskipun tampak luarnya bertentangan dengan tradisi pesantren. Contoh aktual ketika Abdurrahman Wahid menerjemahkan ucapan salam dengan selamat pagi. Bagi para ulama pesantren, keinginan itu tidak diterjemahkan dalam rangka keberagamaan, tetapi semata dalam kerangka budaya di mana Abdurrahman



Wahid menjadi salah satu pelaku. Tetapi, tanggapan keras muncul dari ulama non-pesantren yang menganggap Abdurrahman Wahid main-main.

“Kalau Abdurrahman Wahid bicara, kami mengerti siapa yang dituju dari pembicaraan itu. Apakah itu orang politik, jamaah NU atau para elite. Kami sudah tahu Abdurrahman Wahid sedang berada di frekuensi apa ketika dia bicara,” ujar KH Munasir, ulama sepuh asal Mojokerto dalam sebuah kesempatan.

KH Munasir tidak bercanda. Ketika Abdurrahman Wahid mendirikan Forum Demokrasi (Fordem), sebagian ulama menganggap Abdurrahman Wahid menyalahi prinsip keulamaan dengan terlibat terlalu intens pada persoalan yang tidak langsung menyangkut masalah umat. Tetapi, tidak kurang pula ulama yang mendukung Abdurrahman Wahid. Atau paling tidak, ulama tidak bersikap netral. Inilah hasil penting upaya pemberdayaan yang langsung dilakukan Abdurrahman Wahid di awal tahun 1970-an itu di samping tentu saja ‘darah biru’ yang melekat pada dirinya.

Bahkan ketika di akhir tahun 1980-an, Abdurrahman Wahid terlibat saling sengketa dengan KH As’ad Syamsul Arifin, dari pesantren Asembagus, Situbondo, hingga KH As’ad menyatakan *firoq* (cerai) dengan Abdurrahman Wahid. Padahal perbedaan itu didasari pada perbedaan *ushul fiqh* yang dianut masing-masing. Abdurrahman Wahid berpegang pada kaidah mempertahankan sesuatu yang baik dari masa lalu dan mau menerima sesuatu yang lebih baik yang datang dari masa sekarang. Dengan berpegang pada kaidah ini, Abdurrahman Wahid bisa tampil lebih progresif. Sedangkan KH As’ad berpegang pada kaidah *ushul idza ta’aradha al muqtadi wal maanik, qudimal maanik* (menghindari sesuatu yang jelek lebih utama dibanding mengamalkan sesuatu yang baik) dengan kaidah ini para ulama sepuh dalam geraknya terlihat lebih konservatif.

Tindakan politik Abdurrahman Wahid yang sering berbeda dengan masyarakat kebanyakan ditunjukkan ketika pada Desember 2000 Presiden Soeharto merestui pendirian sebuah organisasi Islam baru yang besar, yakni Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Organisasi ini mempersatukan pejabat-pejabat pemerintah dengan para intelektual Muslim terkemuka, termasuk mereka yang dulu mengkritik keras Orde Baru-nya Soeharto yang memusuhi Islam pada tahun-tahun sebelumnya. Menyikapi berdirinya ICMI, Abdurrahman Wahid berujar bahwa organisasi tersebut dianggap sebagai contoh dari manipulasi Islam guna mendukung pemerintah. Itu sebabnya, dia menolak bergabung dengan organisasi intelektual Muslim tersebut (Ramage, 1995: 63-64).

Gerakan Abdurrahman Wahid yang progresif itu sering kali sulit dimengerti banyak orang. Misalnya, ketika Abdurrahman Wahid terus maju menjadi calon presiden pada SU MPR 1999. Padahal, sebelumnya dia getol mendukung Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Di sini pendukung Megawati Soekarnoputri merasa bahwa Megawati Soekarnoputri *ditelikung* Abdurrahman Wahid. Buntutnya, upaya pendongkelan yang dilakukan loyalis Megawati Soekarnoputri terhadap Abdurrahman Wahid terus menerus dilakukan hingga kejatuhannya akibat skandal Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei. Seandainya fraksi PDIP yang merupakan suara mayoritas di DPR tidak memberi angin atas dibongkarnya kasus dana Bulog dan bantuan Sultan Brunei sejarah kepresidenan Abdurrahman Wahid mungkin akan lain.

Sampai saat ini, menurut KH. Mustafa Bisri (dalam Tim INCREs, 2000: iii) belum ada orang yang bisa menandingi Abdurrahman Wahid dalam banyaknya identitas yang menempel. Menurut KH. Ahmad Wahib, Abdurrahman

Wahid bukan seorang sosiolog, bukan seorang politikus, bukan seorang politisi, bukan seorang seniman, bukan seorang feminis, bukan seorang budayawan, dan juga bukan seorang agamawan, juga bukan seorang pemikir, tapi Abdurrahman Wahid adalah semuanya. Lebih dari itu, Abdurrahman Wahid juga seorang humoris, budayawan, agamawan, politikus, dan politisi dan orang yang bergaul sangat luas. Di mata juru bicaranya Wimar Witular, Abdurrahman Wahid adalah seorang pemimpin yang berharga, yang memberikan warna humanisme, inklusivitas, toleransi, humor, persahabatan sebagai payung di mana kemudian masyarakat membuat perbaikannya sendiri (Kompas, 12/10/2000: 6).

Keluasan pergaulan dan perhatian Abdurrahman Wahid niscaya sangat berperan dalam pengumpulan julukan itu. Lihat saja, misalnya, kiprah Abdurrahman Wahid di bidang kesenian dan budaya dengan menjadi Ketua DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) pada 1983-1985, Juri FFI (Festival Film Indonesia) sampai dua kali pada 1986, sehingga dia dijuluki sebagai budayawan atau seniman, Presiden *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) mulai 1994-1999, Anggota Dewan Internasional *Perez Center for Peace* (PCP) atau Institut Shimon Perez untuk Perdamaian di Tel Aviv Israel dan sebagainya. Mereka yang menyaksikannya acara dalam seminar-seminar dan menuliskan pemikiran-pemikirannya, menjulukinya cendekiawan dan pemikir multidisipliner ulung.

Berbeda dengan orang Jawa pada umumnya, Abdurrahman Wahid adalah sosok orang Jawa yang tidak suka menyimpan apa yang dia ingin katakan atau lakukan, bahkan apa yang dia pikirkan. Padahal, dalam tradisi dan budaya Jawa, menurut Suseno (1985: 98) untuk menghindari konflik orang tidak harus

mengatakan hal secara terus terang dan langsung. Barton (dalam Zada, 2002: xiii-xiv) menyebut Abdurrahman Wahid sebagai orang yang meyakini kata-kata yang ia ucapkan apa pun risikonya. Keyakinannya bahwa perbedaan itu merupakan hal yang *fitri* dan termasuk bagian dari *sunatullah* begitu kuat, sehingga tidak pernah ada padanya rasa khawatir sedikit pun bahwa apa yang akan ia katakan atau lakukan tidak disetujui orang lain. Karena dia juga seringkali tidak setuju sikap orang, dia tidak perlu pusing-pusing dengan ketidaksetujuan orang terhadap sikapnya.

Dalam konteks politik, keterusterangan Abdurrahman Wahid dalam berbagai hal yang ia yakini harus dikatakan sering menjadi *blunder*. Sebab, dalam politik menyampaikan hal secara terus terang belum tentu baik. Orang lain mungkin ada yang berpikir, sesuatu yang diyakini benar atau baik, belum tentu benar dan baik dikatakan. Abdurrahman Wahid tidak begitu. Bila dia meyakini apa yang akan dikatakan benar, dia akan mengatakannya. Bila dia yakin sesuatu baik dilakukan, dia akan melakukannya. Kalau dia sangat yakin dia akan *ngotot*. Menurut Mahfud MD (2003) Abdurrahman Wahid adalah sosok yang selalu percaya diri. Maka, apa yang ia yakin benar apa pun risikonya akan ia lakukan.

Misalnya, di awal masa kepresidenannya Abdurrahman Wahid mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXV/1966 tentang larangan Komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Abdurrahman Wahid mungkin tidak mempertimbangkan reaksi orang terhadap pendapat itu. Dia kelihatannya juga *cuek* walaupun pendapatnya itu bisa dijadikan senjata bagi mereka yang tidak menyukainya untuk menyerang.

Keberanian berbeda dengan orang kebanyakan bagi Abdurrahman Wahid ternyata adalah hal biasa. Almarhumah Ibu Wahid Hasyim adalah seorang ibu dan sekaligus kepala keluarga yang-seperti juga Almarhum Kiai Wahid Hasyim sendiri, sangat demokrat dan menghormati perbedaan. Dalam lingkungan keluarga, perbedaan juga menjadi hal biasa. Misalnya, dalam politik Sebagai deklarator, Abdurrahman Wahid logis mendukung PKB, sedangkan saudaranya A'isyah mendukung Golkar, Sholahuddin Wahid mendukung PKU, dan Gus Hasyim mendukung PDI-P.

Sikap keberbedaan Abdurrahman Wahid sesungguhnya bisa diartikan pembelajaran bagi masyarakat. Sebab, mulai zaman kerajaan hingga Soeharto, bangsa ini boleh dikata tidak pernah diajari untuk berbeda. Bahkan yang selalu diajarkan oleh para penguasa, terutama penguasa Orde Baru, adalah penyeragaman. Padahal, penyeragaman atau homogenisasi dalam praktik kehidupan menurut Nurcholis Madjid tanpa disadari telah mengingkari pluralisme (Kompas, 23/3/2000: 9). Hingga tanpa terasa, di republik ini perbedaan yang paling *fitri* pun masih dipandang sebagai hal yang angker. Perbedaan sekecil apa pun di sini bisa menjadi masalah. Orang yang berbeda diidentikkan dengan musuh. Pada gilirannya orang juga sulit bersikap adil dan objektif sehingga demokrasi tidak hidup. Padahal, demokrasi bisa hidup justru lewat perbedaan pendapat. Lewat perbedaan yang dia bangun, Abdurrahman Wahid sejatinya ingin mengembangkan demokrasi di negeri ini. Sayang, pilar-pilar yang diperlukan untuk membangun demokrasi tersebut kurang kokoh.

### c. Masa Dewasa Abdurrahman Wahid

Sambil mengajar sekaligus menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasjim As'ari (Unhas) di Jombang sejak 1972 hingga tahun 1974 Abdurrahman Wahid menekuni kembali bakatnya menulis dan menjadi kolumnis. Tulisannya yang analitik dan kritis, tajam, dan reflektif, tentang pesantren, toleransi beragama, pluralisme, demokratisasi, dan filsafat, tersebar ke berbagai media massa, terutama majalah *Tempo*, surat Kabar *Kompas*, *Pelita*, dan Jurnal *Prisma*. Gagasan-gagasannya menarik perhatian banyak orang, dan tidak sedikit yang mengundang kontroversi. Sampai-sampai Fikri al-Jufri, Wakil Pimpinan Redaksi majalah *Tempo*, ketika itu, pernah *nyeletuk*, “Tulisan Cak Dur sulit dipotong karena begitu padat, singkat dan bagus,” katanya. Dalam tulisan-tulisannya, Abdurrahman Wahid mengembangkan gaya bahasa yang menggabungkan bahasa harian dan humor dengan topik-topik yang serius. Mencermati fenomena ini, Djohan Effendi, sahabat karibnya yang pernah ia angkat menjadi Sekretaris Negara, menilai Abdurrahman Wahid adalah seorang pencerna, pencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi pemikirannya sendiri.

Dalam catatan Harius Salim HS dan Nuruddin Amin, Abdurrahman Wahid muncul pertama kali dalam pentas nasional pada awal 1970-an tepatnya 1973, ketika salah satu tulisannya mengenai dunia pesantren muncul di media massa ibu kota berpengaruh, yakni dalam harian Umum *Kompas*, 26 November 1973, berjudul “Pesantren dalam Kesusastraan Indonesia.”

Tahun 1974, Abdurrahman Wahid diminta K.H. Yusuf Hasyim, pamannya, untuk membantu mengelola Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang.

Abdurrahman Wahid menjadi Menteri Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng hingga tahun 1980. Selama periode ini secara teratur ia semakin terlibat dalam kepengurusan NU dengan menjabat Wakil Katib Awal Syuruyah PBNU. Dari sini, Abdurrahman Wahid mulai sering diundang diskusi-diskusi keagamaan dan kepesantrenan di berbagai tempat, di dalam dan luar negeri. Abdurrahman Wahid pun kemudian terlibat dan terjun di dunia LSM, menjadi tenaga pengajar pada program pelatihan-pelatihan, termasuk juga untuk pendeta Protestan. Di LP3ES, ia bersama M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan masyarakat pesantren. Kemudian, dalam perkembangannya, bersama para kiai dimotori LP3ES, Abdurrahman Wahid mendirikan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), suatu LSM yang sekarang intens melakukan *enlightenment* terhadap para kiai dan santri.

Pertengahan 1970-an Abdurrahman Wahid menjalin hubungan dengan intelektual muslim modernis seperti Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Syu'bah Asa, dan M. Dawam Rahardjo. Ia semakin intens bergabung dengan teman-teman ini dalam rangkaian forum-forum akademik dan kelompok-kelompok kajian intelektual muda. Kelompok ini bertemu Di Yayasan Samanhudi. Kelompok ini kemudian berlanjut pada pembentukan pertemuan “Reboan” di tahun 1980-an, di mana Soetjipto Wirosardjono dan Moeslim Abdurrahman terlibat aktif di dalamnya.

Kendati sangat sibuk, usahanya untuk mendapatkan gelar Doktor tetap tidak surut. Pada tahun 1979, Abdurrahman Wahid pernah ditawari belajar ke sebuah universitas di Australia untuk mendapatkan gelar Doktor. Tapi di Australia, semua promotor tidak sanggup. Malah mereka menyuruh Abdurrahman

Wahid pulang. Para promotor di sana menganggap Abdurrahman Wahid tidak membutuhkan gelar itu. “Dia malah lebih pantas disuruh menguji kandidat Doktor,” kata Ghafar Rahman, teman sepondok Abdurrahman Wahid ketika di Tambakberas. Ternyata benar, beberapa disertasi calon Doktor dari Australia itu, justru dikirimkan kepada Abdurrahman Wahid untuk dikoreksi, dibimbing, dan kemudian dipertahankan di hadapan sidang akademik.

Pada dekade 80-an, Abdurrahman Wahid tampak meyakinkan sebagai seorang pemikir, intelektual, budayawan dan agamawan. Abdurrahman Wahid mencurahkan sepenuh perhatiannya pada pengembangan pemikiran dan pembangunan masyarakat-bangsa. Lewat kekayaan tulisan itu, agaknya kemampuan Abdurrahman Wahid bertindak sebagai “juru bicara” kalangan Islam tradisional (dunia pesantren) di hadapan wacana modernitas. Dasawarsa 1970-an dan 1980-an awal barangkali bisa disebut “periode ilmiah” Abdurrahman Wahid. Serangkaian tulisan-tulisannya yang serius-ilmiah muncul pada kurun waktu ini, ia ibarat mesin produksi pengetahuan masyarakat pesantren.

Darah senimannya yang kental sempat menarik jalan hidupnya. Tiba-tiba pada tahun 1983, Abdurrahman Wahid ditawari menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki. Tanpa berpikir panjang tawaran itu pun dia terima. Bahkan, tanpa mempedulikan cibiran kiri-kanan, ia juga menjadi Ketua Juri Festival Film Indonesia (FFI), 1986-1987. Itu merupakan awal aktualisasi perjalanan kebudayaan Abdurrahman Wahid, yang dalam posisinya sebagai Ketua Umum PBNU dipertanyakan banyak Kiai. Tak kurang dari Kiai As’ad menjulukinya sebaga “kiai ketoprak”.



Kehadiran Abdurrahman Wahid pada wilayah publik semakin mantap ketika pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah, Sukorejo, Situbondo dia dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PBNU yang sebelumnya dipegang KH. Dr. Idham Chalid. Kemenangannya sekaligus menumbangkan dominasi kubu Cipete, sarang para politisi NU. Dalam Muktamar berikutnya, dengan berbagai tantangannya yang seru, baik di Krapyak (1989) maupun di Cipasung (1994), Abdurrahman Wahid terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU. Praktis, ia memimpin NU selama 15 tahun, dari 1984-1999.

Di awal-awal menjabat Ketua Umum PBNU ini, perilaku politik Abdurrahman Wahid semakin *zig zag*. Misalnya, ia menjalin hubungan dekat dengan pemerintah. Bahkan NU menjadi organisasi massa Islam yang pertama kali menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal. Pada saat itu pula tawaran “NU kembali ke Khittah 1926” yang intinya NU tidak mau terlibat dalam urusan politik praktis dikibarkan lagi. Akibatnya, para naqliyin pun beramai-ramai mencabut dukungannya pada PPP (Forum Keadilan, No. 34, 28/11/1999: 20).

Tindakan politik yang paling mencolok terjadi tak lama setelah pembantaian umat Islam di Tanjungpriok, Jakarta Utara September 1984, Abdurrahman Wahid runtang-runtung dengan Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani ke pondok-pondok pesantren. Belakangan Abdurrahman Wahid menjelaskan kepada para pengasuh pondok pesantren kalau LB. Moerdani beragama Kristen.

Namun, beberapa tahun kemudian hubungan Abdurrahman Wahid dengan pemerintahan Soeharto retak. Ini akibat wawancara Abdurrahman Wahid dengan wartawan Australia Adam Schwarz yang kemudian dimuat dalam *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s* (1994) yang mengatakan Soeharto itu bodoh. Tentu saja Soeharto marah besar. Ia pun tak mau menerima kunjungan Abdurrahman Wahid. Bahkan ketika Menteri Agama (waktu itu) Munawir Sjadzali menyampaikan keinginan Abdurrahman Wahid untuk bertemu, Soeharto berkomentar singkat “*Wong cah gendheng wae kok*” (hanya anak gila saja kok).

Dalam posisi terasing dari kekuasaan itu Abdurrahman Wahid membuat manuver dengan menggandeng Megawati Soekarnoputri, di kemudian hari menjadi pasangannya sebagai Wakil Presiden, yang saat itu bersama PDI di *kuyo-kuyo* pemerintah rejim Soeharto mulai dari Kongres PDI di Palu sampai Medan (Lay, 1999: 137). Dalam pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, mula-mula Abdurrahman Wahid mendukung total. Belakangan ia meralatnya dengan mengatakan ia mendukung hak Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Terakhir, karena ia dicalonkan “Poros Tengah” sebagai presiden, maka ia pun tak bisa memerintahkan warga PKB dan NU untuk memilih Megawati Soekarnoputri. Di sini warga PDIP pendukung Megawati Soekarnoputri merasa kalau Megawati Soekarnoputri *ditelikung* Abdurrahman Wahid sehingga menjadi korban permainan cantik politiknya (Forum Keadilan, No. 34, 28/11/1999: 21).

Menjelang Pemilu 1997 Abdurrahman Wahid malah berbaik-baik dengan Mbak Tutut. Bahkan ia menyebut putri Presiden Soeharto itu sebagai calon pemimpin masa depan. Abdurrahman Wahid juga kerap bepergian untuk melaksanakan acara istighosah dengan KSAD Jenderal R. Hartono dan Tutut.

Bagi Abdurrahman Wahid, Hartono bukan orang baru. Sebab, semasa menjabat Kassospol ABRI, Hartono dikabarkan ingin menjegal Abdurrahman Wahid dalam pemilihan Ketua Umum PBNU di Cipasung 1994 dengan mendirikan NU tandingan yang diketuai oleh Abu Hasan. Melihat manuver Hartono, Abdurrahman Wahid berucap singkat “Kasih si Abu Hasan itu”.

Ketika badai reformasi berembus kencang, Abdurrahman Wahid terserang *stroke* dan sempat dirawat di rumah sakit sehari-hari. Dan, menjelang kejatuhan Soeharto, Abdurrahman Wahid diundang Soeharto sebagai salah seorang tokoh nasional yang diminta untuk mempersiapkan Dewan Reformasi yang kemudian gagal terwujud. Berbeda dengan mantan orang-orang kepercayaannya yang menjauhkan diri dari Soeharto setelah lengser, Abdurrahman Wahid justru *sowan* ke Soeharto beberapa kali. Ketika banyak yang bertanya mengapa dia berkunjung ke Soeharto, dengan *entheng* Abdurrahman Wahid berucap “Ini cuma soal kemanusiaan” (Forum Keadilan, No. 34, 28/11/1999: 21).

Setelah sembuh dari sakitnya, Abdurrahman Wahid membuat manuver politik dengan mengadakan pertemuan di rumahnya di Ciganjur pada 10 November 1998 yang menghasilkan “Deklarasi Ciganjur” bersama Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan ini ternyata membuka jalan bagi Abdurrahman Wahid menuju Istana yang dihuni selama 21 bulan masa kepresidenannya sebelum akhirnya jatuh lewat Sidang Istimewa (SI) MPR 2001 karena kasus Buloggate dan Bruneigate yang menghebohkan.

## 2. Keunikan Kiprah dan Bahasa Politik Abdurrahman Wahid

### a. Keunikan Kiprah Politik Abdurrahman Wahid

Kontroversial, *plinplan*, tidak konsisten, semaunya sendiri dan sejenisnya adalah beberapa predikat yang sejak awal sudah melekat pada sosok Abdurrahman Wahid. Langkah-langkahnya sering membingungkan dan mengagetkan orang. Ali Machsan Musa mengibaratkan gerakan Abdurrahman Wahid seperti bemo yang sering tiba-tiba berbelok tanpa memberikan lampu *sein*, sehingga orang-orang di belakangnya sulit menduga dan mengikutinya.

Akibat lebih lanjut dari kekhasan ini, jumlah penentang sama banyak dengan jumlah pendukungnya. Di kalangan internal Nahdlatul Ulama, gaya Abdurrahman Wahid sebenarnya sudah dipersoalkan sebelum ia terpilih menjadi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-27 di Situbondo, 1984. Sebab, selain masih muda, ia juga belum menunaikan ibadah haji dan dikenal sebagai budayawan. Karena itu, bagaimana mungkin ia harus memimpin organisasi tempat para ulama tersebut. Namun dengan restu sesepuh NU, KH. As'ad Syamsul Arifin, Abdurrahman Wahid lolos menjadi Ketua Umum.

Lima tahun kemudian, KH. As'ad Syamsul Arifin pula yang mencoba mendongkel kedudukan Abdurrahman Wahid karena ia melontarkan gagasan “pribumisasi Islam”, yang antara lain dengan mengubah “Assalamu’alaikum” dengan “Selamat pagi” yang mengundang polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat. Polemik itu belum reda, Abdurrahman Wahid membuat jengkel lagi KH. As'ad Syamsul Arifin karena membeberkan kemiskinan umat Islam ketika menyampaikan pidato pada Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Surabaya, Oktober 1989. Tetapi, Abdurrahman Wahid mampu menyelamatkan

diri dari berbagai cercaan. Tetapi buntutnya, sejak itu KH. As'ad Syamsul Arifin menyatakan *mufaraqah* (mengasingkan diri) dari komunitas NU.

Yang lebih mengagetkan lagi adalah ketika Abdurrahman Wahid mengajak NU keluar dari politik praktis dan kembali ke Khitah 1926 pada Muktamar ke-27 tersebut, sehingga ia dicap sebagai pengkhianat. Sebab, ajakan tersebut dimaknai sebagai upaya penggembosan PPP sebagai “rumah politik” warga Nahdliyin.

Setelah berhasil menggembosi PPP, Abdurrahman Wahid lalu mulai akrab dengan Golkar, dan bahkan sempat menjadi anggota MPR dari Golkar periode 1987-1992. Sebelumnya, Abdurrahman Wahid dikecam banyak kalangan karena akrab dengan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani. Bahkan Moerdani yang Kristen ia ajak berkunjung ke pondok-pondok pesantren. Padahal, banyak aktivis politik Islam saat itu memusuhi LB. Moerdani karena dianggap bertanggungjawab dalam pembantaian Tanjungpriok, September 1984, yang kasusnya sampai sekarang belum terselesaikan.

Ketika ada “gerakan kanan” di Indonesia dan rejim Soeharto merestui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di mana B.J. Habibie sebagai Ketua Umumnya, Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak ajakan untuk bergabung dengan organisasi kaum intelektual tersebut dengan alasan organisasi tersebut sektarian dan sangat tidak kondusif bagi pembangunan bangsa yang plural seperti Indonesia. Menurut Abdurrahman Wahid, selain sektarian organisasi tersebut akan membawa Indonesia menuju negara Islam (Schwarz, 1994: 186). Ia pun mencoba menghadangnya dengan membentuk Forum Demokrasi (Fordem) meski akibatnya menjadikan ia tidak populer di mata

pemerintah Soeharto (Forum, 11/1/1999: 17). “Saya di luar saja mengurus muslim berkaki lima” kata Abdurrahman Wahid di suatu kesempatan mengomentari berdirinya ICMI.

Sejak itu ia semakin berjarak dengan pemerintah, lebih-lebih ketika ia menyatakan “Stupidity, and because Soeharto doesn’t want to see anyone he doesn’t control grow strong” ketika ia menjawab pertanyaan Adam Schwarz dalam sebuah wawancara mengapa ide-idenya tidak ditanggapi Soeharto (Schwarz, 1994: 188). Akibatnya, Soeharto menolak menerima kunjungan anggota PBNU yang baru terpilih. Karena semakin terkucil dan mungkin merasa senasib, Abdurrahman Wahid semakin condong ke Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yang juga terus digoyang rejim Soeharto.

Tetapi, setahun kemudian sikap Abdurrahman Wahid berbalik 180 derajat. Ia meninggalkan Megawati Soekarnoputri. Dalam kampanye Pemilu 1997, ia menggandeng putri sulung Soeharto Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut). Tutut yang menjadi juru kampanye Golkar ia ajak berkeliling ke pondok-pondok pesantren dengan alasan Mbak Tutut adalah “pemimpin masa depan” yang kemudian ia turunkan setingkat menjadi Mbak Tutut adalah “tokoh masa depan”. Menurut Suseno (1999: 225), menggiring dan runtang-runtung dengan Tutut ke pesantren-pesantren NU bisa jadi dimaksudkan agar ia tidak direkayasa dijatuhkan dari kedudukannya sebagai Ketua Umum PB NU.

Hubungan mesra ini berlanjut sampai hari-hari terakhir menjelang kejatuhan Soeharto 21 Mei 1998. Dua hari sebelum Soeharto lengser, Abdurrahman Wahid bersama delapan tokoh lain menemuinya di Istana Negara

dan membahas pembentukan “Komite Reformasi” yang ternyata gagal karena tidak memperoleh dukungan.

Setelah Soeharto jatuh dan digantikan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid memainkan akrobat politik dengan menemui Presiden B.J. Habibie dan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Padahal, beberapa waktu sebelumnya ia menyangsikan legitimasi hukum pemerintahan B.J. Habibie. Bahkan Abdurrahman Wahid bersuara keras tentang Tragedi Semanggi 13-14 November 1998 yang memakan korban 16 orang mahasiswa meninggal dunia. Abdurrahman Wahid juga meminta Wiranto bertanggungjawab.

Sebelumnya Abdurrahman Wahid telah menemui Soeharto. Padahal publik menjauhinya karena telah dianggap berlaku dzalim selama hampir 32 tahun masa pemerintahannya, Dia secara diam-diam juga menemui mantan Menhankam/Pangab LB. Moerdani. Tak pelak, langkah ini juga mengundang kontroversi. Sparringa (1999: 32) menyatakan:

“Sejak dulu Gus Dur selalu nyleneh. Tapi kali ini paling nyleneh. Langkahnya menemui Habibie, Wiranto, Pak Harto--- di saat suasana politik sekarang ini, sungguh aneh. Ibarat ada tembak menembak dalam perang, Gus Dur mencoba menerobos di tengahnya untuk melerai. Keberanian dengan risiko tinggi”.

Seperti biasanya Abdurrahman Wahid tak peduli dengan berbagai komentar baik yang pro maupun yang kontra. Menurutnya, dalam rangka rekonsiliasi nasional, tak bisa begitu saja mengesampingkan seorang Soeharto. Ia beranggapan pertemuannya dengan Soeharto justru untuk menyelesaikan segala kemelut politik yang diwarnai kekerasan.

“Penyelesaian konflik itu tak juga terwujud. Mengapa? Ya, karena kita tidak melibatkan Soeharto dalam memecahkan masalah. Pelibatan Soeharto penting, karena pengikutnya masih banyak. Peristiwa yang

terjadi di Ketapang, Kupang, dan Banyuwangi, semua dilakukan pengikut Pak Harto. Mereka marah karena bos mereka dihancurkan pelan-pelan melalui demonstrasi mahasiswa. Saya membacanya begitu” jelas Gus Dur kepada wartawan mengenai kunjungannya ke Soeharto (Forum, 11/1/1999: 20).

Selesai pemilu 1999 dan PDIP dinyatakan sebagai partai pemenangnya, Abdurrahman Wahid kembali akrab dengan Megawati Soekarnoputri. Publik pun melihat bagaimana sepak terjang dua tokoh politik yang saling menganggap kakak beradik itu. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri berziarah bareng ke makam Bung Karno di Blitar dan makam K.H. Hasyim Asy’ary di Jombang. “Kami minta restu kepada kedua bapak bangsa” kata Megawati Soekarnoputri kepada Tempo (17/10/1999) ketika ditanya wartawan apa tujuan ziarah tersebut.

Secara terbuka Abdurrahman Wahid mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menggantikan B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri pun mendukung Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Keduanya sepakat untuk sama-sama maju dalam pemilihan presiden. Keduanya bersama Amien Rais dan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengadakan pertemuan di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan yang melahirkan Deklarasi Ciganjur.

Publik dibuat kaget ketika Abdurrahman Wahid terus melaju sebagai calon presiden lewat dukungan Poros Tengah, gagasan Amien Rais, yang tiba-tiba menjadi aliansi politik untuk mengganjal Megawati Soekarnoputri menduduki jabatan Presiden. Dalam waktu singkat gabungan partai-parti politik berbasis Islam ini menjadi kekuatan penentu. Melihat dukungan semakin deras dan Amien Rais menyatakan dukungan penuhnya, Abdurrahman Wahid mengatakan “Saya akan maju terus menjadi pesaing Megawati Soekarnoputri. Peluang saya besar



sekali. Hampir 100 persen”. Sebagaimana dilaporkan Forum (5/9/1999: 30-31)

Abdurrahman Wahid menyatakan:

“Saya siap bertarung dengan Habibie dan Megawati Soekarnoputri dalam memperebutkan kursi presiden mendatang. Optimisme saya samalah dengan Pak Habibie atau Mbak Mega”.

Seperti biasanya, ketika ditanya mengapa ia tidak lagi mendukung Megawati Soekarnoputri, padahal selama ini keduanya sudah seperti kakak beradik yang saling mendukung, Abdurrahman Wahid dengan *entheng* menjawab:

“Siapa yang tidak mendukung. Dari dulu saya menyetujui Mbak Mega sebagai presiden. Karena pencalonan itu sah. Demikian juga saya. Saya juga harus didukung karena pencalonan saya sah. Tapi, kalau saya disuruh kerja untuk Mbak Mega, saya enggak mau. Itu bukan kewajiban saya” (Tempo, 5/9/1999: 32). .

Akhirnya, sejarah membuktikan bahwa dalam Sidang Umum MPR 1999 dengan dukungan Poros Tengah Abdurrahman Wahid mengungguli Megawati Soekarnoputri untuk menduduki jabatan Presiden RI ke-4 menggantikan B.J. Habibie, 20 Oktober 1999.

Sampai di sini orang menjadi paham atas berbagai manuver Abdurrahman Wahid selama ini. Bahwa Abdurrahman Wahid akhirnya menjadi presiden sebenarnya sudah banyak diprediksi orang. Menurut Suseno (1999: 219) ada beberapa orang yang sudah lama berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid mesti menjadi presiden yang paling ideal. Paling ideal karena wawasannya, karena kekuatan kepribadiannya, karena *sense of fairness*-nya, dan karena ia dapat diterima oleh seluruh rakyat. Menurut analisis Frans Magnis Suseno, sebenarnya Abdurrahman Wahid sudah lama ingin menjadi presiden.

Setelah ia menduduki jabatan presiden, Abdurrahman Wahid tidak bisa menghilangkan sifat kontroversinya. Berbagai wacana dan tindakan politik selama

menjadi presiden sungguh mengagetkan banyak orang. Di mata Suseno (1999: 225), Abdurrahman Wahid adalah kebalikan dari seorang ideologi. Ia seorang pragmatik 100%. Baginya, tujuan tidak menghalalkan semua, tetapi hampir semua cara, artinya, ia tidak akan direm oleh prinsip-prinsip abstrak dari melakukan sesuatu yang dianggap perlu. Karena itu, ia dapat mengambil langkah-langkah yang cukup inkonvensional. Abdurrahman Wahid sangat sadar akan medan atau tenunan kekuatan-kekuatan yang menentukan setiap situasi. Mungkin ia juga sadar bahwa berbagai manuver politiknya selalu membawa risiko, termasuk risiko dilengserkan dari jabatan presiden melalui Sidang Istimewa MPR 2001 pada 23 Juli 2001, sebuah peristiwa politik yang oleh sebagian orang juga dianggap kontroversial.

#### **b. Kekhususan Bahasa Politik Abdurrahman Wahid**

Secara teoretik terdapat dua macam hubungan antara bahasa dan politik. *Pertama*, hubungan koordinatif antara politik dan bahasa. Di sini politik dan bahasa berinteraksi, saling mempengaruhi, dan tarik menarik secara setara. *Kedua*, hubungan subordinatif antara politik dan bahasa. Di sini salah satu menjadi subjek dan lainnya menjadi objek. Pada satu pihak bahasa dapat dijadikan agenda, kebijakan, dan sasaran kajian politik sehingga di sini politik menjadi subjek dan bahasa menjadi objek; dan pada pihak lain tuturan politik dan perilaku verbal politik dapat dilihat sebagai gejala kebahasaan dan sasaran kajian kebahasaan sehingga di sini politik menjadi objek dan bahasa menjadi subjek. Yang pertama dapat disebut politik bahasa (*language politics*), sedangkan yang kedua disebut bahasa politik (*political language*).

Politik bahasa, dengan demikian, menunjuk pada kenyataan-kenyataan di mana keberadaan, keadaan, persamaan, dan perbedaan bahasa diperpolitikkan dan keberadaan, keadaan, persamaan, dan perbedaan politik dituangkan, disuarakan, dan diungkapkan dalam ungkapan atau idiom kebahasaan. Sedangkan bahasa politik menunjuk pada kecenderungan bahasa elit politik atau partisipan politik, yang akan menentukan orientasi dan kecenderungan politik mereka sendiri dan orientasi dan kecenderungan politik masyarakat. Jika kita menyebut politik bahasa nasional (di) Indonesia berarti kita menunjuk pada pelbagai kenyataan di Indonesia di mana keberadaan, keadaan, persamaan, dan atau perbedaan bahasa di Indonesia diperpolitikkan oleh warga bangsa; dan keberadaan, keadaan, persamaan dan atau perbedaan politik di Indonesia yang dimainkan oleh warga bangsa diungkapkan dalam idiom kebahasaan. Sementara itu, jika kita menyebut bahasa politik nasional di Indonesia berarti kita berurusan dengan orientasi dan kecenderungan bahasa elit politik atau partisipan politik Indonesia, orientasi dan kecenderungan elit politik Indonesia yang terepresentasikan dalam bahasa, dan orientasi dan kecenderungan politik masyarakat Indonesia yang terepresentasi dalam bahasa (Saryono, 2000: 1).

Dalam praktik sebenarnya sulit dipisahkan secara tegas antara politik bahasa dan bahasa politik. Sebab, hubungan politik bahasa dan bahasa politik sedemikian rumit. Selain itu, berbagai faktor seperti sosial, politik, kultural, ideologi, etnis, dan ekonomi turut menyemarakkan hubungan keduanya. Bisa saja persoalan kecenderungan eufemisme dan stratifikasi bahasa Indonesia susah dijelaskan dari segi bahasa, tapi malah bisa dijelaskan dari segi politik. Bisa saja persoalan eufemisme dan sarkasme bahasa Indonesia susah dijelaskan dari segi

bahasa, tetapi juga bisa dijelaskan dari segi sosial politik. Demikian juga pelarangan pembicaraan masalah SARA, marxisme, dan negara federal pada masa Orde Baru dapat dijelaskan dari segi politik, tetapi juga bisa dijelaskan dengan baik dari segi bahasa. Ini semua menunjukkan bahwa politik bahasa sering merupakan kepanjangan tangan suatu rejim politik atau ideologi dan agenda politik suatu rejim penguasa pada satu pihak dan pada pihak lain bahasa politik sering menjadi bagian dari politik bahasa suatu rejim.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa politik bahasa bukan persoalan yang sempit dan sederhana karena tidak semata-mata berurusan dengan persoalan jenis, fungsi, dan bentuk bahasa, tetapi malah jauh lebih penting dari itu politik bahasa berurusan dan menangani persoalan kehadiran bahasa, makna bahasa, wacana bahasa, ranah penggunaan bahasa, ruang penggunaan bahasa, sektor penggunaan bahasa dan sejenisnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa politik bahasa harus diartikan pula sebagai politik lambang bahasa, politik makna, politik wacana, politik komunikasi verbal, penafsiran bahasa dalam bingkai filsafat, sosial, politik, ekonomi, etnis, budaya, demografi dan sebagainya. Geertz (1973: 311) menyebutnya sebagai *the politics of meaning*.

Misalnya, pada waktu unsur-unsur bahasa Jawa (Kuno) atau Kawi banyak sekali digunakan oleh penguasa untuk menamai gedung pemerintahan; pada waktu pemerintah (baca: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) menetapkan ejaan bahasa Indonesia, pedoman pembentukan istilah bahasa Indonesia, tatabahasa baku bahasa Indonesia, dan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; pada waktu pemerintah memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa dari luar sebagai bahasa asing, dan bahasa lokal sebagai bahasa

daerah sekaligus menetapkan kedudukan dan fungsinya masing-masing di Indonesia, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sebuah politik bahasa di Indonesia (Alwi, 2000: 6).

Sebaliknya, sewaktu kosa kata *pembangunan*, *trilogi pembangunan*, *pertumbuhan-pemerataan-stabilitas-nasional*, dan *pembangunan sebagai pengamalan Pancasila serta Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa, bernegara dan bermasyarakat* dijadikan konsep-konsep resmi rejim Orde Baru; pada waktu gaya bahasa eufemistis, puferistis, atau sarkastis, bombastis, vulgaristis, feodalistis, dan sloganistis dijadikan sebagai gaya bahasa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi Pembangunan; pada waktu masyarakat melakukan perlawanan simbolik terhadap penguasa dengan menciptakan *plesetan-plesetan* bahasa, misalnya Timor = Tommy Itu Memang Orang Rakus, Supersemar = Suharto Persis Seperti Marcos, SDSB = Soeharto Dalang Segala Bencana, Akbar Tandjung = Akhirnya Bubar Tanpa Ujung, dan sebagainya. Sesungguhnya kita sedang menyaksikan penggunaan bahasa politik (bahasa Indonesia) atau bahasa kekuasaan di Indonesia (Saryono, 2000: 3; Heryanto, 1996: 102).

Pun pada era Abdurrahman Wahid kita menyaksikan ungkapan-ungkapan seperti “Gitu saja kok repot-repot, anggota DPR *kok* seperti murid Taman Kanak-Kanak, Sepuluh persen TNI tak loyal; Wiranto harus mundur dari Menko Polkam; Wiranto itu seorang perwira yang baik dan telah menolong saya pada masa lalu; Feisal Tanjung pernah berusaha membunuh saya dan Mega; Ada konspirasi dan skenario besar ingin jatuhkan Presiden!; dan Jakarta Siaga II, Biang kerok kerusuhan ada di MPR, Tangkap Tony Winata, Tangkap Tommy dan Habib Ali

Baagil dan Lucuti senjata pengawal Soeharto yang bukan TNI dan Polri, tumpas kelor, Abdurrahman Wahid jangan *penthenthang-pethentheng*, Abdurrahman Wahid jangan nantang, syaraf presiden ada yang rusak, halal darah Amien Rais, Abdurrahman Wahid itu *esuk tempe sore dele*, dicari Amien Rais: hidup atau mati, barisan berani mati”, dan banyak istilah lokal-kultural seperti *istighosah*, *ziarah kubur*, *wali*, *ruwatan*, *tsausiah*, *bughot*, *mufarraqah* dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan demikian semakin meramaikan wacana politik nasional era Abdurrahman Wahid sekaligus membingungkan sebagian masyarakat karena memang tidak dikenal dalam teori dan tradisi politik modern.

Sepak terjang Abdurrahman Wahid selama menjabat presiden membuat geger panggung politik Indonesia bukan hanya lewat wacana politik yang dikembangkan --- yang mengundang pro dan kontra berbagai kalangan ---, tetapi juga lewat bahasa politiknya yang oleh sebagian orang dipandang tidak lazim.

Di awal kepresidenannya di depan anggota DPR, dengan *entheng* Abdurrahman Wahid mengucapkan *prek*, sehingga membuat anggota dewan tersinggung. Tak lama setelah itu, Abdurrahman Wahid mengucapkan kalimat khasnya *Gitu saja kok repot-repot*, yang terus saja dipakai di berbagai kesempatan. Kita tambah bingung oleh ucapan-ucapan Abdurrahman Wahid yang lain, misalnya *Sepuluh persen TNI tak loyal*; *Wiranto harus mundur dari Menko Polkam*; *Wiranto itu seorang perwira yang baik dan telah menolong saya pada masa lalu*; *Feisal Tanjung pernah berusaha membunuh saya dan Mega*; *Ada konspirasi dan skenario besar ingin jatuhkan Presiden!*; dan *Jakarta Siaga II*, *Biang kerok kerusuhan ada di MPR*, *Tangkap Tony Winata*, *Tangkap Tommy dan*

*Habib Ali Baagil dan Lucuti senjata pengawal Soeharto yang bukan TNI dan Polri.*

Menanggapi berbagai pernyataan Abdurrahman Wahid tersebut, pesaing-pesaing politiknya membalasnya dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan tandingan (*counter discourse*), seperti “*presiden gila, syaraf memori presiden ada yang tidak beres, Gus Dur jangan pethentang-pethenteng, presiden selingkuh dengan Aryanti, presiden akan saya jewer* ” dan sebagainya. Baik pernyataan Abdurrahman Wahid maupun pernyataan tandingan pesaing-pesaing politiknya semuanya menggambarkan terjadinya komunikasi yang tidak sehat. Lebih dari sekadar bentuk komunikasi yang tidak sehat, Mietzner (2001: 29-44) menyatakan komunikasi politik antarlembaga tinggi negara tersebut menunjukkan hubungan mereka yang tidak mesra.

Selama masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, kita disuguhi dengan ucapan-ucapan seperti di atas baik oleh Abdurrahman Wahid maupun lawan-lawan politiknya. Tak pelak wacana perpolitikan nasional disesaki perang wacana antarelit politik. Wajar jika kita terhentak oleh perilaku kebahasaan Abdurrahman Wahid dan para elit politik. Sebab, selama Orde Baru ungkapan-ungkapan seperti itu tidak pernah muncul, dari elit politik apalagi dari Soeharto. Saryono (2000: 1) menyatakan bahasa Soeharto sangat baku, kepriyayan, hati-hati, datar, tenang, dan seperlunya sehingga dari sisi retorika tidak menarik. Tetapi karena kita masih akrab dengan 'model' ucapan Soeharto di zaman Orde Baru yang memang sudah berurat-berakar, kita benar-benar kaget dengan 'model' ucapan Abdurrahman Wahid.

Bukan hanya masyarakat awam yang kaget dengan 'model' ucapan Abdurrahman Wahid tersebut, tetapi juga para elit politik dan pakar. Tak kurang Ketua DPR malah menyarankan agar Abdurrahman Wahid lebih hemat, tidak *ceplas-ceplos* atau *sebrono*, dan berhati-hati berucap sebab dia seorang presiden. Tapi, sebagai politikus ulung dan presiden, mungkinkah Abdurrahman Wahid sebegitu *sebrono*, tidak hati-hati, dan tanpa perhitungan dalam berucap? Tak mungkin. Tentu ada maksud tertentu dan juga ada faedah tertentu bagi kita bila Abdurrahman Wahid berucap seperti di atas. Sebab, sebagaimana dinyatakan Gadamer (1977) bahasa harus dipahami sebagai sesuatu yang memiliki ketertujuan (*telos*) di dalam dirinya. Kata-kata atau ungkapan tidak pernah tidak bermakna (Sumaryono, 1999: 27).

Mencermati bahasa politik Abdurrahman Wahid sebagaimana di atas, masih ada lagi penjelas logik-teoretik sebagai upaya memahami bahasa politik Abdurrahman Wahid lebih jauh. Jika direnungkan lebih dalam, dengan ucapan-ucapannya tersebut, meminjam istilah Saryono (2000: 2) sesungguhnya Abdurrahman Wahid sedang mendekonstruksi secara mendasar *linguistics of power* Orde Baru pada satu sisi. Pada sisi lain, dia sedang mengkonstruksi sebuah *linguistics of power* baru yang (diharapkan) lebih cocok dengan semangat demokrasi, masyarakat madani, dan penghormatan HAM yang ia perjuangkan. Bahasa politik Orde Baru yang cenderung represif-sarkastis, otoritarian, posesif, arkais (kejawakunoan), stratifikatif-feodal, kepriyayan, magis-mistis, militeristis, tertutup, sentralistis, sloganistis, dan imperatif-direktif serta bak sabda yang tak terbantahkan (*sabda pandito ratu*) dicoba didekonstruksi oleh Abdurrahman Wahid.



Persoalannya, bahasa politik seperti itu jelas menghambat, malah menelikung proyek politiknya. Sebagai gantinya, sebagai tampak pada ucapannya, Abdurrahman Wahid sedang mengkonstruksi sebuah bahasa politik yang lebih demokratis, partisipatif, dialogis, egaliter, kerakyatan, profan, terbuka, akomodatif, deklaratif-informatif, dan humanistik dalam arti tidak mirip sabda.

Lewat ucapan-ucapannya, Abdurrahman Wahid tampaknya juga sedang menghancurkan pola-pola dasar permainan bahasa dan tindak bahasa Orde Baru. Selain itu, Abdurrahman Wahid juga sedang membangun atau meletakkan dasar-dasar bahasa politik baru yang menunjang tujuan reformasi atau pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bahasa politik Orde Baru terutama Soeharto yang dalam pandangan Saryono (2000: 3) sangat monologis, tak partisipatif, sirkuler, vulgaristik, sarkastis, bombastis, pufistik, eufemistik, dan bertopeng (manipulatif) dicoba dihancurkan oleh Abdurrahman Wahid.

Tampak sangat jelas bahwa seiring dengan *frame of politics* yang ia kembangkan, Abdurrahman Wahid berusaha menggantinya dengan bahasa politik yang dialogis, partisipatif, terang, multi-arah, terus terang (transparan), etis-santun, egaliter dan realistis. Di dalamnya sebenarnya terbuka peluang masyarakat masuk dan berpartisipasi. Bahasa Orde Baru yang sangat imperatif, direktif, dan interogatif (penuh buruk sangka) dicoba diganti oleh Abdurrahman Wahid dengan gaya bahasa yang lebih deklaratif, informatif, impresif, dan ekspresif sehingga masyarakat merasa tak sedang diperintah, tapi diajak omong. Makanya, ucapan Soeharto selalu diartikan perintah bertindak, sedangkan ucapan Abdurrahman Wahid biasanya hanya diartikan sebagai wacana.

Hal tersebut wajar dan masuk akal dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, tak perlu dianggap aneh dan dicurigai. Tampaknya, Abdurrahman Wahid memang punya kepentingan dan agenda menghancurkan bahasa politik Orde Baru dan juga membangun bahasa politik baru. Ini karena bahasa politik sangat sentral kedudukan dan fungsinya bagi sebuah pemerintahan atau kekuasaan. Bahkan dapat menjadi pembeda antara rezim yang satu dan rezim yang lain. Pabottingi (1991) menyatakan praktik politik setiap rezim penguasa tampak pada praktik bahasanya.

Dekonstruksi bahasa politik Abdurrahman Wahid tentu bukan hanya dimaksudkan sebagai sekadar pembeda dengan bahasa politik rezim-rezim sebelumnya. Lebih jauh dari itu, Abdurrahman Wahid berupaya melakukan konsolidasi kekuasaan melalui dunia simbol. Sebagaimana dinyatakan Bourdieu (1994) bahasa memiliki daya-kuasa simbolis (*symbolic power*) yang dahsyat. Lagi pula, bukankah, menurut Baudrillard (1981), *the real monopoly is never that of technical means, but of speech*. Tanpa membangun dan menguasai bahasa politik yang mantap dan berbeda dengan bahasa politik Orde Baru, integritas, soliditas, kohesivitas, dan konsolidasi pemerintahan Abdurrahman Wahid tentulah akan terganggu. Sebagaimana Soeharto, Abdurrahman Wahid juga berupaya membangun integritas, soliditas, kohesivitas, dan konsolidasi kekuasaannya secara mantap lewat bahasa politik sesuai iklim politik (baca: demokratisasi) yang ia kembangkan.

Menggunakan perspektif sosiolinguistik Chaika (1982) bahwa bahasa adalah cermin dunia batin penuturnya, maka bahasa politik Abdurrahman Wahid tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan dan disikapi secara reaktif sejauh dalam

upaya membangun bahasa politik baru yang cocok dengan semangat demokrasi, masyarakat madani, dan penghormatan HAM (Saryono, 2000: 3). Sebab, sebagaimana dinyatakan Oetomo (1991) dan Boey (1975) sebagai fenomena sosial budaya, bahasa memang tidak pernah berdiri sendiri. Ada faktor luar bahasa yang oleh Hymes (1972) disebut sebagai *components of speech* (komponen tutur), oleh Rahardi (2001: 27) disebut sebagai *extra linguistics* dan oleh Danziger (dalam Chaniago, 2000: 8) disebut sebagai *hidden ideology* yang membentuk pilihan dan ragam bahasa seseorang. Jika demikian, maka ragam bahasa politik Abdurrahman Wahid yang sangat terbuka tidak bisa dilepaskan dari proyek liberalisasi politik yang ia kembangkan selama menjabat sebagai presiden. Bagi para pendukung Abdurrahman Wahid, hal ini tentu disayangkan karena dengan demikian proyek politiknya tak bisa diselesaikan. Proyek politik yang dimaksudkan adalah demokratisasi yang ditandai dengan semakin dihargainya hak-hak sipil warga negara.

### **3. Abdurrahman Wahid dalam Pandangan Para Pendukungnya**

Jika bagi masyarakat kebanyakan, lebih-lebih yang di luar NU, berbagai tindakan dan manuver politik Abdurrahman Wahid sungguh sulit dipahami, tapi tidak bagi para pengikut setianya. Berikut disajikan uraian mengenai pendapat para pengikut setia Abdurrahman Wahid seperti KH. Said Agil Siradj, Muhammad AS Hikam, Alwi Sihab, dan Moh. Mahfud MD. Pilihan terhadap ketiga tokoh pendukung ini memang tidak didasarkan pada kaidah sampel representatif, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan sampel teoretik.

### a. Pandangan Said Agil Siradj

Bagi salah seorang Ketua PBNU, KH. Said Agil Siradj, Abdurrahman Wahid harus dipahami melalui beberapa dimensi. Dalam posisinya sebagai Bapak Masyarakat, ekspresi Abdurrahman Wahid tidak membingungkan. Tindakannya jelas menuju ke permasalahan dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Misalnya, ketika Megawati Soekarnoputri menggebu-nggebu akan menyeret para pelaku dan dalang di balik peristiwa 27 Juli, Abdurrahman Wahid mencegahnya dan meminta Megawati Soekarnoputri supaya lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan PDI. Mengapa? Karena Abdurrahman Wahid ingin menjaga keutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Sebab, menurutnya ia tidak ingin bangsa ini hancur. Dia sangat *concerned* pada soal itu. Jadi sesungguhnya sikap Abdurrahman Wahid tidak sulit dipahami. Dia semata-mata ingin menjaga keselamatan bangsa dan negara (Tempo, 11/1/1999: 17).

Menurut Said Agil Siradj, besarnya perhatian Abdurrahman Wahid pada bangsa terlihat ketika ia mendukung Pancasila sebagai asas tunggal. Dia melihat bangsa ini beragam. Karena itu, Pancasila sangat diharapkan menjadi alat pemersatu. Meski Abdurrahman Wahid tokoh agama, ia sama sekali tak mau membuat negara ini berdasarkan agama tertentu, apalagi menjadikannya sebagai negara Islam. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana Abdurrahman Wahid dengan keras menolak bergabung dengan ICMI yang dia anggap sebagai organisasi sektarian dan akan menjurus ke negara Islam.

Kompromi Abdurrahman Wahid terhadap agama lain adalah cermin sikap humanismenya. Saling mendo'akan antarsesama pemeluk agama, bagi Abdurrahman Wahid adalah hal biasa. Menurut Said Agil Siradj, Abdurrahman

Wahid pernah diminta oleh seorang pemuka Hindu untuk berdo'a di rumah ibadahnya. Untuk menghargai permintaan itu, Abdurrahman Wahid *pun* berdo'a di tempat ibadah tersebut. “*Toh* do'a dikabul tidak selalu harus di masjid saja, kan? Itu penghargaan kemanusiaan Abdurrahman Wahid, terutama, kepada orang yang memintanya” (Tim *INCReS*, 2000: 243). Di sini Abdurrahman Wahid bertindak sebagai tokoh yang mengedepankan humanisme.

Sebagai politikus, sebagaimana diakui Said Agil Siradj, Abdurrahman Wahid memang membingungkan dan tindakannya selalu menimbulkan tafsir ganda. Bahkan kata Said Agil Siradj, ABRI pun dibuat bingung oleh manuver politik Abdurrahman Wahid. Kita ingat bagaimana manuver Abdurrahman Wahid di era B.J. Habibie. Ketika hampir sebagian besar lapisan masyarakat menghujat Soeharto karena dianggap telah melakukan kedholiman selama memerintah sehingga menunai hujatan di mana-mana, Abdurrahman Wahid adalah satu-satunya tokoh yang berani pertama kali berkunjung ke Soeharto. Wajar jika banyak orang bingung dan bahkan jengkel sebagaimana dinyatakan Said Agil Siradj berikut:

“Langkah-langkah Gus Dur buat sebagian orang memang sukar dipahami dan terkesan tidak konsisten. Kadang-kadang jadi oposan, terkadang jadi teman. Namun, menurut saya, segala yang diperbuat Gus Dur itu adalah kebenaran yang diyakininya dan demi bangsa ini. Langkah Gus Dur itu jauh dari kepentingan pribadinya” (Forum, 11/1/1999: 19).

Bukan hanya itu, Abdurrahman Wahid ternyata juga melakukan pertemuan dengan Presiden B.J. Habibie dan Wiranto. Alasan Abdurrahman Wahid mengunjungi ketiganya adalah demi konsiliasi. Menurut Abdurrahman Wahid konsiliasi merupakan satu-satunya jalan meredam kekerasan dan menyelesaikan berbagai konflik sosial. Abdurrahman Wahid melihat bahwa ketiga tokoh tersebut

bagaimana pun masih memiliki pengikut yang cukup banyak. Karena itu, demi keselamatan bangsa ketiganya harus diajak bersama untuk memecahkan masalah. Di sini tampak sangat jelas kecintaan Abdurrahman Wahid pada bangsa dan negara.

Satu lagi keanehan Abdurrahman Wahid adalah ketika orang pada umumnya memandang sebuah peristiwa sangat serius dan membahayakan dirinya, Abdurrahman Wahid justru menganggapnya sesuatu yang *sepele* dan biasa-biasa saja. Dia tenang-tenang saja. Sebaliknya, ketika masyarakat umum memandang sebuah peristiwa biasa, Abdurrahman Wahid menyikapinya dengan serius. Tetapi semuanya benar. “Pokoknya Gus Dur itu lain dari manusia kebanyakan” ujar Said Agil Siradj suatu ketika.

Diakui Said Agil Siradj bahwa Abdurrahman Wahid dekat dengan walisongo. Sebab, Abdurrahman Wahid sangat mengidolakan orang-orang *khawash*. Ini bisa kita lihat dari seringnya Abdurrahman Wahid melakukan ziarah ke makam orang-orang suci baik sebelum maupun sesudah menjabat sebagai Presiden. Bahkan di saat para anggota DPR berkumpul di Senayan mempersiapkan Sidang Istimewa, Abdurrahman Wahid masih menyempatkan diri melakukan ziarah di Jombang.

Secara agak berlebihan, Said Agil Siradj tidak keberatan Abdurrahman Wahid dianggap sebagai wali sebagaimana dinyatakan berikut:

“Anggapan sebagian orang bahwa Gus Dur itu *waliyullah* barangkali karena didasarkan pada kejeniusan dan kecerdasannya yang luar biasa dalam dirinya. Atau, bisa juga didasarkan pada sifat *tawakkal* dan sikap yang tidak punya kekhawatiran---baik fisik maupun mental---dalam kehidupan kesehariannya. Sifat dan sikap itu tampak dalam kesederhanaan hidup yang dijalani Gus Dur” (Siradj, 2000: 239).

Menurut Said Agil Siradj, keluarga Abdurrahman Wahid, yaitu dua kakeknya seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Bisri Syansuri adalah wali. Memang, pengertian tentang wali menurut Said Agil Siradj harus dijelaskan. Wali adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah. Said Agil menggolongkan wali ada dua macam: *waliyullah* dan wali hak-hak Allah. Manusia seperti Imam Syafi'iy, Imam Bukhari, Kiai Sahal, Kiai Maksum, Kiai Wahab, dan lain-lain agaknya bisa dikatakan sebagai wali yang dicintai Allah karena kemampuannya yang selalu menjaga ilmu Allah.

Berangkat dari gambaran wali seperti itu dan melihat sosok Abdurrahman Wahid yang di mata Said Agil Siradj memiliki beberapa kelebihan dibanding orang-orang kebanyakan, maka tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid juga dianggap sebagai wali. Dalam beberapa hal, Abdurrahman Wahid memang sering melakukan kenylenehan yang kelihatannya tidak disengaja: spontanitas, tapi ternyata (setelah terjadi) benar. Menurut Said Agil Siradj, itu terjadi karena taufiq dari Allah, atau setidaknya karena mendapat nikmat tersendiri.

“Kalau memang bukan mau'nah atau karamah, mungkin Abdurrahman Wahid mendapatkan *inayah*. Dari fenomena seperti itu, boleh saja Abdurrahman Wahid dianggap sebagai seorang wali. Dianggap wali, dalam arti orang yang bisa melaksanakan *tawakkal*, *qana'ah*, dan hidup sederhana (Siradj, 2000: 240).

Dalam tinjauan lain, secara kultural Said Agil Siradj memandang Abdurrahman Wahid sebagai sufi. Ini bisa dilihat dari sisi pola hidupnya yang sederhana, *tawakkal*, tidak *hasud*, tidak marah kalau dikritik, dan lain-lain. Tetapi secara struktural-formal belum. Sebab, secara resmi ia tidak melewati *maqam-maqam* kewalian secara hirarkis-sistematik.

Yang berbeda lagi dengan tokoh-tokoh lain pada umumnya adalah kendati memiliki beberapa kehebatan, Abdurrahman Wahid tidak bisa mengangkat murid yang akan meneruskan garis perjuangannya. Sebab, Abdurrahman Wahid secara struktural-formal tidak menempuh jalur itu. Meskipun begitu, dia bisa melakukan untuk dirinya sendiri.

Kesimpulan secara teoretik, menurut Said Agil Siradj, adalah Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang *khawash*, artinya tokoh yang memiliki kekhasan-kekhasan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Oleh karena itu, memahami Abdurrahman Wahid sama dengan ketika seorang pelukis membuat titik yang berserakan untuk membuat sebuah garis. Dengan kata lain, membaca Abdurrahman Wahid harus melalui beberapa dimensi. Karenanya, memahami Abdurrahman Wahid hanya dengan suatu kerangka teori dan dimensi tertentu pasti akan gagal.

#### **b. Pandangan Muhammad AS Hikam**

Muhammad AS Hikam yang mengaku baru mulai mengenal Abdurrahman Wahid secara personal sekitar 1982-an adalah salah seorang pengikut setia Abdurrahman Wahid. AS Hikam memang bukan sosok pengikut setia yang selalu menerima ide Abdurrahman Wahid mentah-mentah. Sebab, tidak jarang dia juga mengkritik pandangan dan tindakan Abdurrahman Wahid yang dia anggap tidak sama dengan tindakan orang kebanyakan. Tetapi justru karena itu Abdurrahman Wahid senang dan mengangkatnya menjadi salah satu anggota Kabinet sebagai Menristek. Sebab, menurut Abdurrahman Wahid, AS Hikam adalah satu dari sekelompok kecil generasi muda NU yang berani mengkritiknya. “Dan karena Hikam berani mengkritik saya itulah, dia saya angkat sebagai Menteri Ristek”



jawab Abdurrahman Wahid ketika menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan anggota kabinet.

Di mata AS Hikam, Abdurrahman Wahid adalah seorang tokoh multi-dimensi. Dia seorang kiai, politisi, intelektual, budayawan dan beberapa predikat lain yang menempel pada dirinya. Selain itu, Abdurrahman Wahid adalah orang yang sangat menarik karena berasal dari pendidikan tradisional (pesantren) kemudian melanjutkan pendidikannya ke Baghdad, tetapi tidak memberikan citra “tradisional” seperti dikesankan orang. Pemikiran Abdurrahman Wahid tidak konvensional dan tidak tercerabut dari akar tradisi atau lingkungan NU (Hikam, 1999: xvii). Sebab, umumnya pola pikir orang sangat diwarnai oleh jenis pendidikan yang pernah dilaluinya.

AS Hikam berkesan bahwa Abdurrahman Wahid memiliki kemampuan mengadaptasi dan melakukan pencarian alternatif yang mungkin tidak gampang dipahami orang. Abdurrahman Wahid memerankan diri sebagai seorang profetik yang pemikirannya sering mendahului atau melampaui zamannya, dan karenanya monumental. Misalnya, ketika orang masih berkutat tentang persoalan “islami dan tidak islami”, Abdurrahman Wahid sudah meninggalkan itu. Menurut AS Hikam, orang yang berpikir konvensional memang tidak mudah mengikuti pola pikir Abdurrahman Wahid, apalagi kalau hanya menangkap ‘kulitnya’, tanpa memahami substansinya. Misalnya, soal *assalamu’alaikum* yang diganti selamat siang.

Dari segi pemikiran, Abdurrahman Wahid selalu ada di depan, mendahului apa yang menjadi *main stream* atau *discourse* pemikiran masyarakat. Hal itu membuat orang melihat Abdurrahman Wahid sebagai *role model* yang patut

dicontoh. Selain itu, Abdurrahman Wahid humoris dan sangat toleran. Guyonnya yang khas NU bisa memecahkan kebekuan dan persoalan serius sekalipun.

Dari segi pemikiran, menurut AS Hikam, latar belakang gagasan dan ide Abdurrahman Wahid sebenarnya berkaitan dengan *setting* waktu tahun 1970-an yang diwarnai oleh gejolak-gejolak alternatif dengan munculnya modernisasi sebagai paradigma. Abdurrahman Wahid masuk dalam situasi di mana orang mulai tidak senang dengan model pembangunan yang *top down*. Pada tataran nasional, Abdurrahman Wahid membawa alternatif pemikiran yang berbeda dengan *main stream* pemerintah. Kebetulan Abdurrahman Wahid juga terjun di LSM, sehingga pengalaman-pengalaman LSM-nya yang diolah dengan bacaan serta refleksi intelektualnya menjadikan pemikirannya sering bertentangan dan terkesan “melawan arus”. Namun, di sisi lain, pemikiran alternatifnya menjadi penyegaran bagi situasi intelektual yang terkungkung dengan paradigma pembangunan model Orde Baru.

Sedangkan pada tataran Islam, Abdurrahman Wahid menolak pemikiran-pemikiran *established*, yang mapan tentang dikotomi pemikiran modern dan tradisional dan menunjukkan bahwa yang disebut tradisional ternyata mempunyai khasanah kultural yang jauh lebih fleksibel dan mempunyai prospek ketimbang modernis. Tulisan-tulisan kiai, termasuk Abdurrahman Wahid, menurut AS Hikam, menunjukkan bahwa jika pemikiran tradisional NU dikembangkan dengan paradigma yang pas ternyata tidak kalah dengan, atau bahkan, bisa menunjukkan betapa khasanah tradisional itu lebih *advanced* dalam rangka menjawab tantangan zaman.

Persoalannya adalah bagaimana mencari paradigma yang telah dirintis dan dikembangkan Abdurrahman Wahid itu bisa dipahami bukan saja oleh kalangan NU, tetapi juga oleh kalangan di luar NU. Sebagai pembawa paradigma, Abdurrahman Wahid masih sering disalahpahami dan sedikit orang yang bisa memahami pemikirannya. Padahal, untuk mengerti pemikiran Abdurrahman Wahid sebenarnya tidak terlalu sulit sepanjang menangkap substansinya secara baik sehingga sebenarnya tidak ada yang *nyleneh*. Di sini AS Hikam berbeda dengan orang kebanyakan yang umumnya memahami pemikiran dan tindakan Abdurrahman Wahid dari sisi lain sehingga dianggap *nyleneh*. Padahal, menjadi aneh dan *nyleneh* itu adalah karena orang gagal memahaminya.

Ciri Abdurrahman Wahid yang lain menurut AS Hikam (2000: 137) adalah sederhana, yakni kalau dia mempunyai pendapat, dia akan getol mempertahankannya meski tidak populer; dan dia selalu percaya bahwa apa yang dipikirkannya itu benar. Kalau terbukti tidak benar, dia segera minta maaf. Bagi Abdurrahman Wahid itu tidak jadi soal. Misalnya, beberapa gagasan dan tindakannya selama menjabat sebagai presiden seperti keinginannya membuka hubungan dagang dengan Israel dan mencabut Tap MPRS No. XXV/1966 tentang Pelarangan Penyebaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme di Indonesia karena dianggap melanggar hak hukum seseorang, melakukan kunjungan ke luar negeri justru ketika di Aceh sedang terjadi gejolak dan bahkan akan memberikan kesempatan Referendum bagi masyarakat Aceh, memberikan ijin perubahan nama provinsi Irian Jaya menjadi provinsi Papua dan sebagainya. Tak pelak, gagasan dan tindakan tersebut menuai badai kritik dan kecaman berbagai lapisan masyarakat. Setelah menerima banyak kritik dan kecaman dan terbukti tidak

banyak manfaatnya, seperti biasanya dengan *entheng* Abdurrahman Wahid mengaku salah dan menyatakan ungkapan khasnya “gitu saja kok repot”.

Lebih lanjut, menurut AS Hikam, ada tiga hal yang mendasari pemikiran Abdurrahman Wahid selama ini, yakni konsep humanisme universal, wacana aswaja (*ahlus sunnah wal jama'ah*) yang merupakan basis kulturalnya, dan kondisi sosio-politik Indonesia yang tidak memungkinkan penggunaan pemikiran absolutis, tetapi fleksibel. Indonesia merupakan lahan tempat eksperimentasi bagi ketiga landasan pemikiran tersebut. Kalau hanya menggunakan salah satu dan meninggalkan lainnya akan terjadi alienasi. Abdurrahman Wahid tidak mau seperti itu. Ia berusaha keras mencari titik temu dari tiga tradisi pemikiran tersebut, sehingga ia lebih lincah dibanding Amien Rais dan Nurcholish Madjid sekalipun dalam merespon perkembangan kontemporer (Hikam, 2000: 134).

Dari visi politik, Abdurrahman Wahid adalah sosok demokrat sejati yang tidak mengenal diskriminasi. Abdurrahman Wahid juga tidak mengenal demokrasi proporsional. Artinya, karena umat Islam merupakan penduduk mayoritas maka jumlah kursi untuk orang Islam di lembaga-lembaga perwakilan rakyat harus mayoritas pula. Tetapi benar-benar demokrasi yang berdasarkan pada prinsip kesamaan (*egalitarianisme*), *rule of law* (supremasi hukum), *accountability* (pertanggungjawaban) dan sebagainya. Dari sini kita bisa melihat bahwa visi politik Abdurrahman Wahid adalah demokrasi modern. Abdurrahman Wahid sendiri memang percaya pada demokrasi sekuler, sehingga dia tidak pernah menggunakan ideologi primordial seperti agama. Hal ini terbukti dengan reaksi keras Abdurrahman Wahid atas berdirinya organisasi cendekiawan Muslim seperti ICMI yang ia nilai sangat sektarian. Abdurrahman Wahid menempatkan agama

sebagai tata nilai yang melandasi seluruh tata perilaku politik. Agama hanya menjadi komplemen, karena berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk. Ini berbeda dengan Nurcholish Madjid yang menginginkan Islam sebagai *world view* di Indonesia, sehingga menjadi nilai yang hegemonik, meminjam istilah Gramsci. Abdurrahman Wahid melihat Islam hanya sebagai komplemen dari berbagai nilai yang turut membentuk negara bangsa ini. Konsekuensi logisnya dari kepercayaan Abdurrahman Wahid itu adalah ia bersedia dekat dengan kalangan minoritas, meski mendapat kecaman dari kalangan Islam sendiri. Secara nyata demokrasi harus meniscayakan perlindungan terhadap minoritas.

Mengenai penilaian sebagian anggota masyarakat bahwa Abdurrahman Wahid *plin-plan*, AS Hikam memandang bahwa orang tersebut berarti tidak mampu membedakan antara prinsip, strategi, dan taktik.

“Saya kira sangat wajar orang seperti Gus Dur tidak mau menghamba kepada kekuasaan yang otoriter. Itu prinsip. Demikian juga manuver Gus Dur yang tidak mau melakukan gerakan radikal walau dibayar berapa pun dan *diiming-imingi* apa pun. Sebab, Gus Dur selalu menggunakan prinsip *non-violence*. Oleh karena itu, membaca Gus Dur harus mampu membedakan mana prinsip, strategi, dan sekadar taktik belaka. Memang tidak mudah memahami Gus Dur, saya saja harus pelan-pelan supaya dapat mengkritik Gus Dur dengan tepat” (Hikam, 2000: 138-139).

Lain dari itu, orang menyebut perilaku Abdurrahman Wahid *nyleneh*. Menurut AS Hikam, hal itu terjadi karena dua hal. Pertama, karena dia tidak mengerti. Kedua, karena dia tidak pernah berpikir bahwa manuver itu ternyata menghasilkan sesuatu yang efektif di kemudian hari. Menurutnya, anggapan *nyleneh* itu muncul karena ketidaktahuan mereka saja. Misalnya, ketika Abdurrahman Wahid *runtang-runtung* dengan mbak Tutut menjelang Pemilu 1997, orang beranggapan Abdurrahman Wahid *plin-plan*. Padahal, lanjut Hikam,

kalau kita melihat konteksnya mengapa dia harus berbaik-baik dengan keluarga Cendana, maka kita tidak semudah itu mengambil kesimpulan tentang tindakan Abdurrahman Wahid. Seperti kita ketahui Pemilu 1997, merupakan pemilu yang penuh dengan kekerasan. Maka, jika terjadi kekerasan lebih banyak yang akan menjadi korban adalah masyarakat bawah, khususnya warga NU sendiri.

Saat itu, Abdurrahman Wahid terlihat tidak bisa mengambil jarak secara tegas meskipun NU sudah tidak berpihak pada parpol mana pun. Abdurrahman Wahid tentu tidak bisa lepas tangan begitu saja akibat negara demikian kuat. Aparat negara bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kalau Abdurrahman Wahid tidak melakukan sesuatu untuk mencegah kekerasan, maka Abdurrahman Wahid akan disalahkan banyak orang. Itu sebabnya Abdurrahman Wahid menggandeng mbak Tutut, anak sang penguasa saat itu. Meminjam istilah Ida (2000: 118), kedekatan Abdurrahman Wahid dengan mbak Tutut adalah untuk meluluhkan hati sang raja yang sedang berkuasa. Di sini sebenarnya kelihaian Abdurrahman Wahid bermain akrobat politik. Hanya orang tidak tahu apa sebenarnya di balik tindakannya.

Tak pelak kedekatan Abdurrahman Wahid dengan mbak Tutut menjadi wacana politik hangat. Sebab, pertemuan dua tokoh yang sebelumnya berseberangan itu terjadi tiba-tiba. Muatan politik sebuah peristiwa biasanya bergantung pada siapa yang bertemu dan apa niat mereka. Bisa saja aktor-aktor yang bertemu tidak memikirkan nilai-nilai politik dari pertemuan tersebut. Tetapi bisa juga terjadi bahwa pihak yang bertemu telah mengagendakan tujuan politik tertentu. Dari sini tampak jelas bahwa Abdurrahman Wahid mesti memiliki tujuan politik tertentu.

Abdurrahman Wahid juga merupakan tokoh yang merakyat. Dia merupakan tokoh politik yang paling sering turun ke bawah bertemu dengan lapisan masyarakat lapis bawah melalui pidato, ceramah, pengajian dan sebagainya.

“Saya kira dalam hal begini Gus Dur sulit ditandingi. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan bahwa gagasan Gus Dur selalu tidak dimengerti kalangan bawah berarti orang itu bodoh. Orang itu tidak melihat bahwa Gus Dur selalu dekat dengan kalangan bawah” ujar AS Hikam suatu ketika.

Lebih dari itu semua, satu hal yang sangat menonjol dari sosok Abdurrahman Wahid adalah dia inspirator sekaligus penggerak demokratisasi di Indonesia. Salah satunya, ia bersama teman-temannya dari berbagai ideologi mendirikan Forum Demokrasi (Fordem), meskipun ada yang berpendapat bahwa pendirian forum tersebut untuk meng-*counter* gerakan ICMI. Padahal, *counter* itu hanya salah satu efek samping saja. Fordem didirikan bukan untuk membasmi ICMI-nya, tetapi isu sektarianisme yang melekat padanya. Abdurrahman Wahid sangat khawatir dengan sektarianisme, sebab negara ini sangat pluralis. Jadi sebenarnya Abdurrahman Wahid tidak menolak ICMI, tetapi menolak gagasan sektarianisme yang melekat pada organisasi itu. Di sini banyak orang salah memahaminya.

Dari berbagai kajiannya tentang pemikiran Abdurrahman Wahid, AS Hikam (1999: xix) sampai pada simpulan bahwa *main stream* pemikiran Abdurrahman Wahid meliputi empat hal. Pertama, ia ingin mengembangkan khasanah kultural *ahlus sunnah wal jama'ah* menjadi sesuatu yang relevan dengan konteks Islam dan Indonesia. Kedua, ia ingin mengembangkan pemikiran-pemikiran modern yang berasal dari pencerahan dan sekuler sesuai dengan

tantangan yang dihadapi Indonesia tanpa harus meninggalkan ciri-ciri kultural. Ketiga, karena Abdurrahman Wahid seorang nasionalis, maka ia menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan tidak tergantung pada bangsa-bangsa lain, baik dari segi pemikiran, kebudayaan, teknologi maupun politik. Keempat, Abdurrahman Wahid selalu memperjuangkan demokrasi sebagaimana yang pernah dirintis oleh ayahnya KH. Wahid Hasyim dan teman-teman seperjuangannya. Abdurrahman Wahid mempunyai panggilan moral untuk melanjutkan proses demokratisasi di Indonesia, kendati untuk itu ia harus berkorban. Buktinya, ia terjungkal dari kursi kepresidenan justru di saat-saat iklim demokrasi yang ia bangun telah mulai tumbuh.

### **c. Pandangan Mohammad Mahfud MD**

Ketika 22 Agustus 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat Mohammad Mahfud MD menjadi Menteri Pertahanan, banyak orang yang ragu dan pesimis atas kemampuannya menjalankan tugas berat itu. Sebab, Mahfud MD hanya dikenal sebagai dosen bidang hukum tata negara dan pengamat politik dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tetapi, seperti biasanya jika punya kemauan Abdurrahman Wahid terus jalan dan mengatakan bahwa profesor muda tersebut akan mampu mengemban tugasnya. Ternyata setelah menduduki jabatan Menteri Pertahanan, Mahfud MD menjadi politisi-akademisi yang fenomenal. Sepak terjang dan pernyataan-pernyataannya merupakan perpaduan antara sikap akademisi yang jernih dan politisi yang lincah dan lugas. Gaya bicaranya tenang, tetapi selalu nalar, tajam dan berani. Dia dikenal sangat loyal terhadap Abdurrahman Wahid, tetapi tetap kritis sehingga sering dijuluki sebagai “peluru tak terkendali” dari kabinet Abdurrahman Wahid.



Berbeda dengan pengikut-pengikut setia Abdurrahman Wahid yang lain seperti Said Agil Siradj, dan Muhammad AS Hikam yang melihat Abdurrahman Wahid dari sisi pemikiran dan langkah-langkah politiknya, baik sebelum dan sesudah menjadi presiden berangkat dari kaca mata akademik, Mahfud MD memberikan penilaian terhadap langkah-langkah Abdurrahman Wahid selama menjadi presiden dari kaca mata pengalamannya selama satu tahun mendampingi sebagai Menteri Pertahanan, khususnya tentang beberapa peristiwa yang mengakibatkan kejatuhannya.

Pemahaman Mohammad Mahfud MD tentang Abdurrahman Wahid layak ditampilkan di sini, sebab Mahfud MD merupakan salah satu pembantu presiden yang bersih dan jujur sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Abdurrahman Wahid:

“Salah satu hal yang sangat menggembirakan saya adalah kenyataan bahwa saya tidak salah pilih dengan beberapa tenaga muda yang ditetapkan menjadi para pembantu dalam kedudukan mereka sebagai menteri dan menteri negara di masa saya menjadi presiden. Mahfud MD, Muhammad AS Hikam, Chofifah Indraparawansa, Alhilal Hamdi, dan Marsilam Simanjuntak adalah contoh-contoh dari para pembantu presiden yang bersih dan jujur” (Wahid, 2003: xvi-xvii).

Apa yang dinyatakan Abdurrahman Wahid benar. Mahfud MD adalah salah seorang dari beberapa pejabat tinggi yang sampai detik-detik terakhir kejatuhan Abdurrahman Wahid masih tetap setia menemaninya. Itu adalah saat ketika para elit politik beramai-ramai menggoyang Abdurrahman Wahid dengan segala macam cara untuk memperoleh jabatan baru di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri atau minimal tetap pada jabatan semula.

Sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD di harian Kompas (21/4/2003), “Saya tak pernah meninggalkan sahabat”, maka Mahfud MD layak digolongkan sebagai loyalis sejati Abdurrahman Wahid kendati dia harus rela meninggalkan

jabatannya sebagai Menhankam. Di saat-saat Abdurrahman Wahid sudah mulai goyah, Mahfud MD pernah diminta oleh Amien Rais untuk berhenti membela Abdurrahman Wahid dan tidak lagi melakukan lobi-lobi politik karena tidak akan berguna. Peluang tetap menjadi Menteri Pertahanan belum tertutup dan bisa segera dibicarakan dengan Megawati Soekarnoputri. “Sebagai kawan saya sarankan Mas Mahfud mempertimbangkan itu” ujar Amien Rais (Mahfud MD, 2003: 181). Tetapi Mahfud MD bersikukuh tetap setia mendampingi Abdurrahman Wahid di saat kawan-kawan yang lain meninggalkannya untuk menyelamatkan diri. Mengapa Mahfud MD begitu *getol* membela Abdurrahman Wahid sampai detik-detik terakhir kekuasaannya? Berikut pandangannya tentang Abdurrahman Wahid.

Mohammad Mahfud MD, yang mengaku mulai mengenal Abdurrahman Wahid pada akhir 1983 ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan pernah mengundangnya ke kampus UII untuk memberi ceramah ilmiah, menyatakan Abdurrahman Wahid merupakan tokoh besar di negeri ini. Lain dari itu, sebagaimana masyarakat kebanyakan Mahfud MD juga mempunyai kesan bahwa di balik kebesarannya, Abdurrahman Wahid adalah tokoh *nyleneh*. Kata Mahfud MD (2003: 8) “(S)eandainya Gus Dur tidak *nyleneh* maka tak mungkin saya pernah menjadi menteri. Siapa sih saya ini?”.

Kekaguman Mahfud MD pada Abdurrahman Wahid berawal ketika ia mengikuti cerামannya di Universitas Gadjah Mada tentang masalah “Tradisi Keilmuan dalam Islam”. Karena itu, dia mengundangnya ke kampus UII Yogyakarta untuk berbicara hal yang sama. Sejak itu hubungannya dengan Abdurrahman Wahid terus terbina dengan baik dan lebih-lebih setelah

Abdurrahman Wahid sering berkunjung ke UII Yogyakarta untuk melakukan hal yang sama. Mahfud MD sering antar jemput Abdurrahman Wahid dari dan ke bandara ke kampus UII Yogyakarta.

Mahfud MD yang mengaku anak hasil persahabatan antara NU dan Muhammadiyah itu menyatakan senang dan menghayati budaya santri dan apresiasi keagamaan NU, tetapi sekaligus juga menyenangi budaya intelektualitas Muhammadiyah. Dari sini awal mula dia mengidolakan Abdurrahman Wahid sebagai tokoh besar negeri ini yang pikiran-pikirannya, menurut Mahfud MD, memberikan kontribusi besar bagi bangsa.

Mahfud MD mengaku sering terlibat kontak dengan gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid melalui media massa. Di bidang politik, Mahfud MD sering mengkritiknya karena langkah-langkahnya membingungkan banyak orang, tetapi di bidang hukum membelanya. Berikut pernyataan Mahfud MD (2003: 6-7) mengomentari gagasan dan tindakan politik Abdurrahman Wahid:

“Ketika Gus Dur menjadi Presiden, banyak sekali lontaran-lontaran pendapat bahkan langkah-langkahnya yang menimbulkan pro dan kontra. Sebagian di antaranya, saya ikut menanggapi, mengkritik secara politik, tapi membela secara hukum. Ketika Gus Dur melontarkan gagasan untuk menghapus Tap MPR No. XXV/MPR/1966 tentang larangan penyebaran ajaran komunis, saya termasuk yang menolak dan mengkritiknya secara keras. Menurut saya hal itu tidak sejalan dengan keinginan sebagian terbesar rakyat Indonesia dan akan menanam sumber konflik baru yang mungkin dahsyat. Itu menurut saya, setelah melihat konfigurasi politik nasional kita. Tetapi, ketika orang di MPR berupaya menjatuhkan Gus Dur hanya karena lontaran gagasannya itu, saya membelanya habis-habisan. Menurut saya sangatlah naif, jika hanya melontarkan gagasan secara politis, seorang Presiden akan dijatuhkan dari jabatannya secara konstitusional”.

Dalam rangka membela Abdurrahman Wahid, Mahfud MD menantang para lawan politik Abdurrahman Wahid untuk berdebat dalam wacana politik.

Alasannya adalah jauh sebelum menjadi Presiden, Abdurrahman Wahid telah biasa mengajak kita berdebat dan berbeda pendapat. Ketika melihat kebijakan Abdurrahman Wahid yang kurang tepat, Mahfud MD juga tak kalah kerasnya memberikan kritik. Misalnya, ketika Abdurrahman Wahid memecat Parni Hadi dari jabatannya sebagai Pemimpin Kantor Berita Antara dan menggantinya dengan Sobary. Menurut Mahfud MD itu hal yang sangat tidak tepat, kendati tidak melanggar hukum. Sebab, sudah dikenal luas bahwa Sobary adalah sahabat dekat Abdurrahman Wahid, sehingga pengangkatannya dipandang bermuatan nepotis.

Menurut Mahfud MD, tindakan Abdurrahman Wahid tersebut sangat merugikan dirinya. Sebab, di tengah-tengah isu sentral dan wacana publik tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Abdurrahman Wahid sepertinya menantang arus. Tetapi ketika Parni Hadi menuntut Abdurrahman Wahid secara hukum ke pengadilan, Mahfud MD membela habis-habisan sebab pemberhentian dan pengangkatan seorang Pemimpin Kantor Berita seperti itu adalah hak prerogatif Presiden sehingga Presiden sama sekali tidak bisa dianggap melanggar hukum. Karena itu, masalahnya bukan soal hukum, tetapi *image* politik. Ternyata gugatan Parni Hadi ditolak Pengadilan, sebab memang dari sisi hukum Presiden benar.

Di mata Mahfud MD, salah satu ciri khas Abdurrahman Wahid adalah berbeda pendapat dan memperdebatkan suatu masalah hingga menjadi polemik panjang memang merupakan kegemarannya sejak dulu. Tampaknya ini benar. Kita bisa mengingat bagaimana Abdurrahman Wahid sudah mulai melontarkan wacana politik tentang berbagai persoalan sosial dan politik hanya beberapa hari

sejak dilantik menjadi presiden seperti pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, keinginannya melakukan normalisasi hubungan dagang dengan Israel, melakukan desakralisasi lembaga kepresidenan, membangun wacana supremasi sipil dengan banyak intervensi ke tubuh militer dan sebagainya.

Menyikapi masa kepresidenan Abdurrahman Wahid yang pendek, Mahfud MD menyatakan bahwa gaya dan selera Abdurrahman Wahid dalam berpolitik *easy going* dalam mengurus dan menyikapi persoalan. Misalnya, kasus Bulog yang akhirnya menyeretnya hingga jatuh. Menurut Mahfud MD, kalau mau jujur kasus Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam sebenarnya sangat kecil, lebih-lebih jika kasus tersebut diletakkan di tengah-tengah kasus yang lain yang jelas-jelas melanggar hukum. Ini tidak berarti kasus Bulog tidak serius, tetapi keterlibatan Abdurrahman Wahid di dua kasus tersebut dinilai terlalu berlebihan dan sangat bermuatan politis. Menurutnya, semua itu terjadi karena kekhilafan dan sifat *easy going* Abdurrahman Wahid.

Lebih jauh dalam pengamatan Mahfud MD, dalam menjalankan pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak suka pada hal-hal yang detail dan teknis. Begitu menentukan sesuatu, Abdurrahman Wahid tidak pernah mengurus kelanjutan dan masalah teknisnya. Ini bisa dilihat ketika Abdurrahman Wahid membentuk Komisi Hukum Nasional dan Badan Ombudsman Nasional dan ketika mengangkat Penasehat Presiden. Setelah menandatangani keputusan pembentukan kedua lembaga tersebut, Abdurrahman Wahid tidak pernah mengurus hal-hal teknis sebagai implikasi keputusannya, termasuk anggaran operasional dan gaji pejabat dan karyawannya. Dalam kasus Bulog, misalnya, begitu menyatakan tidak akan menggunakan dana Bulog, Abdurrahman Wahid langsung tidak mau tahu

lagi bagaimana kelanjutannya, tetapi dimanfaatkan para petualang di luar pengetahuan Abdurrahman Wahid. Karena itu, Abdurrahman Wahid jatuh akibat ulah orang-orang tersebut (Mahfud MD, 2003: 101).

Ciri khas yang lain adalah Abdurrahman Wahid acapkali suka menyederhanakan persoalan. Ungkapannya yang sangat populer “begitu saja kok repot” menjadi bukti dari kebiasaannya untuk mudah menyederhanakan dan menganggap *entheng* masalah. Padahal, banyak masalah yang terlihat *entheng* dan sederhana tetapi di dalam politik bisa menjadi masalah besar. Ketika Abdurrahman Wahid menyatakan tidak menggunakan dana Bulog karena sudah memperoleh bantuan dari Sultan Brunei Darussalam sebenarnya Abdurrahman Wahid terlalu menyederhanakan masalah dalam mengemukakan persoalan. Karena terlalu menyederhanakan masalah itu, dana dari Sultan Brunei Darussalam yang sebenarnya zakat pribadi melalui pribadi, itu pun tidak langsung ke pribadi Abdurrahman Wahid, ditafsirkan oleh orang sebagai penerimaan resmi negara.

Abdurrahman Wahid juga dipandang Mahfud MD sebagai sosok tidak suka dilawan dan tidak mau melakukan kompromi jika ia merasakan bahwa kompromi itu merugikan dirinya. Padahal, kompromi dan pendekatan terhadap lawan merupakan bagian penting di dalam pergulatan politik. Maka itu wajar jika Abdurrahman Wahid juga sering disebut sebagai sosok otoriter dan keras kepala. Dalam kasus Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam, Abdurrahman Wahid merasa dilawan secara tidak *fair* oleh DPR dan harga dirinya telah menghalangnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat kompromistis. Karena itu, sebagaimana kita ketahui, demi harga diri apa pun dia lakukan, termasuk lengser dari jabatannya sebagai presiden.

Dalam hal yang menyangkut masalah prinsip, Abdurrahman Wahid tidak pernah mau mengalah dan menerima kompromi yang lebih akomodatif. Abdurrahman Wahid sering mengatakan bahwa demokrasi tidak bisa disamakan dengan pasar. Karenanya, menyikapi masalah Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam, Abdurrahman Wahid bersikap tidak akan mengalah dan memilih dilengserkan atau membubarkan DPR/MPR melalui Dekrit Presiden.

Kendati upaya lobi politiknya menemui jalan buntu dan kejatuhan Abdurrahman Wahid tinggal menunggu waktu saja, Mahfud MD tetap membela Abdurrahman Wahid mati-matian. Semakin Abdurrahman Wahid diserang, semakin keras pula Mahfud MD membelanya. Sebab, menurutnya Abdurrahman Wahid tidak melakukan kesalahan fatal, sehingga pantas dibela.

“Sikap-sikap Gus Dur saja sebenarnya yang tidak menyejukkan para politisi di Senayan. Ini berawal dari hal sepele, yakni ketika Gus Dur menyebut sulit membedakan antara anggota DPR dengan murid taman kanak-kanak” ujar Mahfud MD (Kompas, 21/4/2003).

Terlepas dari kekurangannya dalam menjalankan roda pemerintahan, Mahfud MD mengagumi Abdurrahman Wahid sebagai tokoh yang mempunyai daya ingat luar biasa. Menurutnya, jauh sebelum menjadi presiden dan belum mengalami gangguan penglihatan, jika berceramah atau menulis, Abdurrahman Wahid sangat lancar menyebut data tentang buku, nama orang dan tanggal kejadian atau istilah-istilah yang sudah puluhan tahun terjadi atau yang jauh dari negeri ini. Dia bukan hanya tahu detil biografi tokoh-tokoh politik dunia, tetapi juga nama artis-artis terkenal pada tahun tertentu di negara tertentu, nama atlet terkenal dengan segala kegemaran dan kebiasaannya, bahkan termasuk orang yang hidup puluhan tahun yang lalu. “Itulah Abdurrahman Wahid” ujarnya.

Kekaguman Mahfud MD terhadap Abdurrahman Wahid semakin menguat justru di saat akhir menjelang kejatuhannya setelah diyakinkan oleh pujian Baharuddin Lopa tentang sikap Abdurrahman Wahid yang begitu teguh menghadapi persoalan dengan mengatakan:

“Kita harus memuji sikap Gus Dur yang tegas. Presiden begini yang benar. Kita harus puji Presiden yang memegang teguh prinsip, terlepas dari segala kekurangannya” (Mahfud MD, 2003: 178).

Ketika Abdurrahman Wahid akhirnya jatuh, Mahfud MD tetap merasa senang dan bangga karena berhasil mempertahankan keyakinannya untuk tidak mengkhianati Abdurrahman Wahid dengan memanfaatkan momentum dan suasana politik yang tidak menguntungkan dirinya. Dia menyatakan tidak munafik dan senang andai tetap menjabat sebagai menteri, tetapi untuk itu tidak boleh menukarnya dengan loyalitas dan kesetiakawanan. Mahfud MD juga merasa senang telah mendampingi tokoh besar yang dia kagumi baik dalam suka maupun duka. Barangkali dia bisa menjadi teladan sebagai seorang kawan sejati yang loyalitasnya tidak diragukan, tetapi pada saat yang sama tetap bersikap kritis.

### **C. Para Pesaing Utama Abdurrahman Wahid**

Dalam realitas politik Indonesia kontemporer, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Amien Rais, yang menjabat Ketua MPR, adalah salah satu tokoh politik terkemuka, di samping Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR, Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Karena menduduki posisi puncak dalam sistem pemerintahan di Indonesia, bisa dikatakan pula di tangan keempat tokoh tersebut masa depan Indonesia pasca-Orde Baru ditentukan.



Sebagai bagian dari upaya memahami wacana politik yang mereka bangun dari perspektif Gadamerian, menyajikan latar sosial masing-masing elit politik tersebut sangat penting. Latar sosial seseorang menentukan pesan dan bentuk wacana politik yang dihasilkan. Atas dasar itu, berikut secara ringkas disajikan latar belakang sosial Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Akbar Tandjung.

### **1. Wakil Presiden dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri**

Sebagaimana Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, Megawati Soekarnoputri juga merupakan tokoh politik penting yang mewarnai wacana politik Indonesia pasca-Orde Baru. Kemunculannya dalam kancah politik Indonesia sangat mengejutkan. Sebab, Megawati Soekarnoputri yang dikenal pendiam dan sepertinya tidak tertarik dalam urusan politik, tiba-tiba namanya meroket menyusul kemenangan partai yang dipimpinnya (PDIP) dalam pemilu 7 Juni 1999 yang mencapai 33,6 %. Kendati tidak memperoleh suara mayoritas, pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik itu membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri semakin memperoleh simpati dari rakyat. Karena itu, terkait dengan fokus kajian ini menyajikan latar sosial Megawati Soekarnoputri dan sekilas kiprah politiknya sangat penting untuk memahami wacana politik yang dihasilkan semasa era Abdurrahman Wahid.

Megawati Soekarnoputri yang bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri Setyawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta 23 Januari 1949. “Saya beri nama Megawati Soekarnoputri karena ketika akan lahir curah hujan lebat dan gemuruh guntur sepertinya hendak membelah angkasa serta diikuti keadaan gelap gulita” ujar ayahnya Ir. Soekarno dalam *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Dari kecil Megawati Soekarnoputri memang pendiam, sedikit

bicara dan banyak senyum. Sikap diam ini yang masih terbawa sampai saat ini ketika telah menjadi Presiden RI ke-5 sering membuat kawan dan lawan-lawan politiknya memberikan tafsir bermacam-macam. Bagi pengikutnya, sikap diam Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai tindakan bijak dengan mengambil kata-kata mutiara “Diam adalah emas”. Sebaliknya bagi yang tidak suka, sikap diam Megawati Soekarnoputri diartikan sebagai wujud kebodohnya. Menanggapi banyaknya pujian dan kritikan terhadap dirinya, Megawati Soekarnoputri *toh* tetap diam dan semakin membuat orang penasaran. Banyak yang menyatakan bahwa komunikasi politik Megawati Soekarnoputri dinilai lemah.

Megawati Soekarnoputri menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di Perguruan Cikini. Ia selanjutnya masuk Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Di universitas ini ia mulai mengenal GMNI. Ketika ayahnya Bung Karno sakit dan diisolasi oleh Soeharto, Megawati Soekarnoputri meninggalkan Bandung dan balik ke Jakarta. Tahun 1970, Megawati Soekarnoputri masuk Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, tetapi tidak sampai tamat.

Pernikahannya dengan penerbang Letnan Surindro Supjarso memberinya seorang anak. Namun, di saat mengandung anak keduanya Surindo Supjarso mengalami musibah ketika pesawatnya Skyvan T-701 yang dikemudikannya terjatuh di Biak, Papua dalam menjalankan tugas bersama tujuh awak pesawatnya.

Megawati Soekarnoputri yang punya hobi berkebun itu kemudian menikah lagi dengan diplomat Mesir bernama Hassan Gamal Ahmad Hasan di KUA Sukabumi pada 27 Juni 1972. Tetapi hanya satu setengah jam mereka bertemu.

Sebab, perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan Agama dengan alasan nasib Surindo belum jelas.

Megawati Soekarnoputri menikah lagi dengan Taufik Kiemas setelah AURI memastikan bahwa suaminya gugur dalam tugas. Perkawinan itu melengkapi Megawati Soekarnoputri dengan tiga anak, M. Rizki Pratama, M. Prananda, dan Puan Maharani.

Dibanding tiga tokoh politik yang lain, Abdurrahman Wahid, Amien Rais dan Akbar Tandjung, kiprah politik Megawati Soekarnoputri relatif baru. Tahun 1987 Megawati Soekarnoputri baru mulai terjun ke politik. Ini sebenarnya melenceng dari konsensus keluarga Bung Karno pada 1982 yang berketetapan bahwa mereka tidak akan terjun ke politik dan akan berdiri di atas semua golongan (Setiono, et al, 2000: 5).

Adalah duet pimpinan PDI waktu itu Soerjadi selaku Ketua Umum dan Nico Daryanto selaku Sekretaris Jenderal yang mengajak keluarga Bung Karno itu terjun ke politik dan bergabung dengan PDI. Sebagaimana diceritakan penulis *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri* Akio Satoko, semula Guntur Soekarnoputra menolak, tetapi Guruh Soekarnoputra menerimanya dan Megawati Soekarnoputri ragu-ragu. Untung Taufik Kiemas langsung menyatakan setuju dan berkomentar bahwa itu gagasan bagus. Setelah itu Megawati Soekarnoputri setuju bergabung dengan PDI pimpinan Soerjadi (Kompas, 18/9/2000).

Ajakan Soerjadi dan Nico Daryatmo kepada Megawati Soekarnoputri bukan tanpa alasan. Saat itu menjelang pemilihan umum, PDI sedang mencari figur yang dapat menarik massa. PDI juga sedang mencoba membangkitkan sentuhan emosional para pendukung Soekarno. Pilihan jatuh pada keterlibatan

keluarga Soekarno. Megawati Soekarnoputri bergabung dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR periode 1987-1992 (Setiono, et al, 2000: 7). Saat itu pula ia menjabat sebagai Ketua Cabang PDI Jakarta Pusat, kemudian diangkat kembali sebagai anggota DPR/MPR-RI periode 1992-1997.

Keberadaan Megawati Soekarnoputri di tubuh PDI tidak sia-sia. Sebab, secara perlahan tetapi pasti suara PDI naik dari pemilu ke pemilu. Terbukti pada pemilu 1987 dan 1992 secara berturut-turut PDI berhasil menaikkan perolehan suaranya 60% dan 40%. Diakui oleh banyak pengamat bahwa faktor Megawati Soekarnoputri merupakan variabel penting dalam menaikkan perolehan suara PDI tersebut. Personifikasi Soekarno secara cerdas oleh para pemikir PDI telah ditempatkan dalam-dalam pada diri Megawati Soekarnoputri sebagaimana dinyatakan Barton (2002: 193) “By this time Sukarnoism had become a codeword for democratic reform”.

Tetapi Megawati Soekarnoputri memang sosok politisi pendiam. Sampai menjadi anggota DPR pun Megawati Soekarnoputri tidak terdengar suaranya. Menurut anggota DPR yang lain dalam sidang-sidang di DPR Megawati Soekarnoputri juga banyak diam sehingga nama Megawati Soekarnoputri sebagai anggota DPR tidak banyak diketahui publik secara luas. Nama Megawati Soekarnoputri mulai muncul ke panggung politik ketika Kongres PDI ke IV di Medan pada Juli 1993 yang sarat konflik terjadi tarik menarik kepentingan antara kubu Soerjadi di satu pihak dan kubu Alex Asmasoebrata di pihak lain. Di saat itu nama Megawati Soekarnoputri muncul sebagai tokoh alternatif untuk menjembatani konflik internal partai berlambang kepala banteng tersebut.

Kendati dukungan kepada Megawati Soekarnoputri sangat besar, tidak berarti jalan Megawati Soekarnoputri menduduki kursi Ketua Umum berjalan mulus. Sebab, Kongres di Medan tersebut menemui jalan buntu (*dead lock*) dan dilanjutkan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya 2 - 6 Desember 1993. Bisa diduga bahwa kegagalan Kongres PDI di Medan tersebut adalah karena intervensi penguasa Orde Baru yang saat itu sedang kuat-kuatnya .

Sejak saat itu, di mata pendukungnya nama Megawati Soekarnoputri semakin populer dan langkahnya kian mantap untuk memasuki dunia politik riil dengan memimpin partai berlambang kepala banteng tersebut. Pelaksanaan Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya pun tidak berjalan mulus. Sebab, pemerintah memberi *dead line* pukul 00.00, 6 Desember 1993 ijin KLB berakhir. Jika Kongres belum selesai pada pukul tersebut, maka ajang KLB akan diambil alih oleh polisi. Sepuluh menit sebelum batas waktu berakhir, Megawati Soekarnoputri muncul secara tiba-tiba dari kamar hotelnya dan dalam pidato singkatnya tanpa teks menyatakan bahwa secara *de facto* dirinya sebagai Ketua Umum DPP PDI. Pekik sorak para pendukungnya tak terhindari. Secara *de jure*, kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dikukuhkan pada Munas PDI di Jakarta 22-23 Desember 1993.

Walaupun secara *de facto* dan *de jure* Megawati Soekarnoputri telah dinyatakan sah sebagai Ketua Umum DPP PDI, tetapi langkah politiknya tidak serta berjalan mulus. Melihat dukungan arus bawah ke Megawati Soekarnoputri yang semakin kuat, penguasa Orde Baru mulai khawatir dengan munculnya Neo-Soekarnoisme dan dicari akal bagaimana menggusur Megawati Soekarnoputri dari jabatan Ketua Umum DPP PDI tersebut. Berbagai isu seperti banyak anggota PDI

tidak bersih lingkungan, ekstrim kiri dan sebagainya sebagai ungkapan politik makna Orde Baru dilabelkan pada pengurus PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri. Maka muncul pendirian PDI *Reshuffle* pimpinan Yusuf Merukh. Bukan hanya itu, sebanyak 16 orang fungsionaris DPP PDI membelot dan menyelenggarakan Kongres di Medan. Melalui Kongres akal-akalan tersebut, jabatan Ketua Umum DPP PDI berpindah ke tangan Soerjadi lagi. Suhu politik Tanah Air pun menjadi kian memanas. Sebab, pendukung Megawati Soekarnoputri tetap menganggap dirinya sebagai pemimpin PDI yang sah, sementara penguasa Orde Baru hanya mengakui PDI Soerjadi sebagai satu-satunya PDI yang sah. Masyarakat bingung melihat adegan politik atas dualisme kepemimpinan di tubuh PDI. Menghadapi persoalan demikian, Megawati Soekarnoputri lebih memilih jalur hukum, daripada kekerasan. Di sini tampak kedewasaan politik Megawati Soekarnoputri yang sudah mulai matang. Dengan sikap tersebut, Megawati Soekarnoputri dikenal sosok politisi anti kekerasan.

Akibat Kongres di Medan tersebut gesekan terus menerus terjadi antara pendukung Megawati Soekarnoputri dan pengikut Soerjadi yang didukung pemerintah dan akhirnya meletup peristiwa berdarah 27 Juli 1996 yang dikenal dengan peristiwa “kudatuli” yang sampai kini kasusnya belum terselesaikan secara tuntas. Peristiwa ini tidak lain merupakan rekayasa politik yang diciptakan oleh penguasa Orde Baru untuk mengusir massa PDI Pro Mega yang berada di kantor DPP PDI Jl. Diponegoro Jakarta yang telah sehari-hari mengadakan mimbar bebas di kantor tersebut.

Sepertinya menganggap angin lalu saja melihat sepak terjang Soerjadi dan kawan-kawan yang telah merampas kepemimpinannya, Kongres PDI di Denpasar

Bali Oktober 1998 justru merekomendasikan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Ini merupakan sebuah keputusan politik penting yang tetap ia pegang teguh sampai ia benar-benar menjabat sebagai presiden menggantikan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001. “Saya tidak ingin menjadi presiden, tetapi Kongres Bali mengamanatkan saya untuk dicalonkan sebagai presiden” ujar Megawati Soekarnoputri di berbagai kesempatan.

Di tangan Megawati Soekarnoputri PDI menjadi tumbuh besar dan siap memenangkan pemilu 1999 untuk mengakhiri era *status quo*. Terbukti pada pemilu 1999 PDI memenangkan pemilu dengan memperoleh 33,6% suara dan mengalahkan Golkar yang selalu menang di setiap pemilu sejak awal Orde Baru. Keunggulan PDI tampaknya bukan pada organisasi partai dan programnya, melainkan sosok Megawati Soekarnoputri itu sendiri. Seorang fungsionaris PDI bahkan menyatakan “Tanpa Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan bukanlah apa-apa” (Gautama, 2000: 54).

Mengapa hari demi hari pendukung Megawati Soekarnoputri semakin membesar? Menurut kajian Akio Satoko (Kompas, 18/9/2000) dukungan ke Megawati Soekarnoputri semakin besar justru karena kekeliruan Soeharto. Satoko menyatakan:

"Sebelum insiden Gambir, ketika massa yang menolak Kongres PDI di Medan dihajar petugas pendukung Megawati Soekarnoputri masih terbatas. Setelah insiden pecah, media massa, PRD, LSM, golongan menengah semuanya mulai bersimpati. Apalagi setelah peristiwa 27 Juli, dengan pengelolaan publikasi oleh penguasa berantakan, semua orang terusik, begitu tega penguasa menganiaya. Sekalipun sejarah tidak bisa diulang, saya yakin seandainya Soeharto waktu itu membiarkan Megawati Soekarnoputri apa adanya, kisahnya mungkin akan bisa menjadi lain"(Kompas, 18/9/2000).

Selain itu, dukungan masyarakat yang semakin besar kepada Megawati Soekarnoputri juga tidak lepas dari romantisme dan reinkarnasi politik sebagian rakyat Indonesia terhadap sosok ayahnya Soekarno sang proklamator. Sosok ayahnya yang amat legendaris dan karismatik itu diyakini meneteskan darah kepemimpinan kepada putrinya Megawati Soekarnoputri, kendati Megawati Soekarnoputri sendiri menolak anggapan itu sebagaimana dinyatakan baru-baru ini dalam sebuah acara wawancara di televisi swasta.

“Saya tidak bisa disamakan dengan Bung Karno. Memang saya beruntung punya ayah seperti Bung Karno. Tetapi zaman Bung Karno berkuasa tidak sama dengan zaman saya. Jadi saya ya diri saya sendiri” ujar Megawati Soekarnoputri menjawab pertanyaan presenter TV swasta tersebut.

Pemegang garis keturunan dari seorang tokoh paling berpengaruh di Indonesia pasca-kemerdekaan merupakan faktor keberuntungan Megawati Soekarnoputri yang tidak dimiliki politisi lain. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan arus dukungan kepada Megawati Soekarnoputri semakin membesar ketika terjadi krisis kepemimpinan nasional.

Walaupun partainya telah memenangkan pemilu, Megawati Soekarnoputri tetap diam. Pernyataan-pernyataan politik yang diharapkan muncul darinya, baik oleh pendukung, kalangan intelektual, maupun lawan-lawan politiknya tidak juga terlontar. Bahkan terhadap pers, Megawati Soekarnoputri sering tampak menutup diri, sehingga banyak kritikan yang ditujukan kepadanya. Pada tataran pertarungan ide yang banyak dilakukan kalangan intelektual dalam bentuk debat-debat calon presiden pun tidak pernah diikuti. Menurut Darmanto Jatman, bagi masyarakat lapis bawah banyak *ngomong* itu bukanlah hal terpenting. Sedangkan bagi kelompok Megawati Soekarnoputri sikap diam merupakan satu strategi



psikologis. Bahkan di mata pendukungnya, segala tudingan yang dialamatkan kepada Megawati Soekarnoputri justru menguntungkan dirinya. Karena itu, semuanya dibiarkan berlalu saja. Demikian sikap politik Megawati Soekarnoputri yang sangat menonjol bahkan sampai saat ini ketika dia menjabat sebagai Presiden.

Tetapi sikap diam Megawati Soekarnoputri ada batasnya. Terbukti pada 29 Juli 1999 Megawati Soekarnoputri membacakan pidato politik pertamanya dengan judul “Pidato Politik Megawati Soekarnoputri dalam Rangka Menyambut Kemenangan Rakyat dalam Pemilu 1999”. Naskah pidato setebal 15 halaman tersebut banyak memperoleh tanggapan pro dan kontra.

Ketika gerakan reformasi bergulir, musuh bersama gerakan pro-reformasi adalah kelompok *status quo* (baca: Orde Baru). Sebab, kelompok ini berkonotasi negatif, karena sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak demokratik. Karena itu, di kalangan pendukung Megawati Soekarnoputri yang *note bene* adalah lapisan masyarakat kelas bawah, kemenangan reformasi diartikan sebagai lapangnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI yang sekaligus menggantikan era *status quo* tersebut (Gautama, 2000: 54-55).

Ternyata sejarah berbicara lain. Perjalanan politik Megawati Soekarnoputri menduduki kursi Presiden RI memang tidak selalu mulus. Kendati partainya memenangkan pemilu, tidak berarti Megawati Soekarnoputri langsung bisa menduduki jabatan presiden. Sebab, mekanisme demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan sehingga tidak ada jaminan seorang calon dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu dengan sendirinya akan terpilih menjadi presiden. Hal ini terbukti dengan kegagalan Megawati

Soekarnoputri menduduki jabatan presiden setelah Sidang Umum DPR/MPR 1999 memenangkan Abdurrahman Wahid.

Di sini kesabaran Megawati Soekarnoputri teruji, sebab ketika pendukung fanatiknya marah menyusul kegagalannya menjadi presiden melalui voting terbuka, demi persatuan dan kesatuan bangsa Megawati Soekarnoputri meminta pendukungnya untuk bersabar dan menghindari kekerasan yang akan menimbulkan korban sia-sia. Maka demi meredam suasana yang sudah memanas, keesokan harinya (21 Oktober 1999) Megawati Soekarnoputri---yang sangat menentang ide negara Indonesia dalam bentuk federasi sebagaimana dilontarkan Amien Rais dan memandang NKRI sebagai sudah final ---terpilih menjadi Wakil Presiden setelah bersaing ketat dengan Ketua Umum PPP Hamzah Haz dengan memperoleh 306 suara sedangkan Hamzah Haz 284 suara. Dengan demikian, duet kepemimpinan nasional Abdurrahman Wahid - Megawati Soekaroputri pun dimulai.

Tetapi sejarah membuktikan bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama. Perjalanan pemerintahannya diwarnai banyak konflik di kalangan elit politik akibat wacana politik yang dikembangkannya, sehingga praktis tidak efektif. Selain itu, Abdurrahman Wahid tersandung kasus penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam dan dana *non-budgeter* Bulog yang menghebohkan itu.

Pada 23 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa dan akhirnya memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid dari Jabatan Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu pula sesuai undang-undang, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden RI ke-5. Dengan

pelantikan itu, maka perjalanan panjang Megawati Soekarnoputri menuju kursi presiden berakhir.

Kini Megawati Soekarnoputri berada di tahun akhir memimpin bangsa ini dan berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi telah bersiap-siap mengikuti pemilu putaran kedua setelah pasangan ini dinyatakan lolos secara resmi oleh KPU dengan memperoleh 31. 442. 987 suara atau sebesar 26, 61% dari seluruh suara nasional yang masuk dan dinyatakan sah (Kompas, 21/7/2004).

## **2. Ketua MPR RI dan Ketua Umum PAN, M. Amien Rais**

Lahir 26 April 1944 di Solo Jawa Tengah, Amien Rais dibesarkan dalam sebuah keluarga Muhammadiyah *minded*. Bapaknya, Suhud Rais (alm) adalah alumni Mu'alimin Muhammadiyah, yang semasa hidupnya pernah bekerja sebagai pegawai kantor Departemen Agama. Sedangkan ibunya, Sudalmiyah, lama menjadi Ketua A'isyiah Surakarta. Selain itu, ia juga pernah menjadi tenaga pengajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) Negeri dan termasuk salah seorang pendiri Sekolah Bidan A'isyiah Surakarta (Hasyim, et al., 1997: 195).

Sebagai anak kedua dari enam bersaudara, Amien Rais sejak kecil sudah dilatih pola hidup dengan disiplin tinggi oleh orangtuanya, terlebih dalam soal agama. Namun demikian, orangtuanya tidak pernah memaksakan kehendaknya. Amien Rais kecil dan saudara-saudaranya diberikan kebebasan untuk tumbuh secara alami sesuai bakat dan minat masing-masing. Hanya saja pesan penting dari orangtuanya, terutama ibunya, adalah hidup merupakan ibadah. Pesan tersebut tampaknya sangat menancap di hati Amien Rais hingga dewasa.

Kedisiplinan yang ketat sudah dialami Amien Rais sejak usia 9 tahun. Pada usia ini Amien Rais sudah diwajibkan bangun sejak pukul 04.00 WIB. Ketatnya pendidikan agama dapat ditilik dari pendidikan yang

ditempuh Amien Rais. Amien Rais mengawali pendidikan formalnya di SD Muhammadiyah Solo dan selesai pada 1956. Kemudian melanjutkan ke SMP Muhammadiyah Solo dan selesai pada 1959. Selain di sekolah umum, Amien Rais juga mengikuti pendidikan agama di Pesantren Mamba'ul Ulum Solo dan juga di Pesantren Al Islam Solo. Selepas SMO, Amien Rais melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Solo dan selesai pada 1962 (Najib, 1999: 53-57).

Sewaktu masih di Sekolah Dasar, Amien Rais kecil bercita-cita ingin menjadi walikota. Cita-cita ini sangat dipengaruhi oleh kekagumannya pada Walikota Solo saat itu, Muhammad Saleh, yang sangat taat beribadah, dihormati dan dicintai warganya. Namun cita-cita tersebut berubah ketika ia lulus SMA. Ia ingin menjadi duta besar. Mungkin cita-cita ini yang membuat ia memilih Jurusan Hubungan Internasional ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada.

Menikah dengan Kusnariyati Sri Rahayu pada 1969, Amien Rais yang dikaruniai enam orang anak memegang teguh tiga pilar kebahagiaan dalam hidupnya, yakni kebahagiaan spiritual, kebahagiaan intelektual, dan kebahagiaan psikologis. Kebahagiaan spiritual diperoleh dengan menjalani hidup dengan rel agama, kebahagiaan intelektual dilalui dengan cara memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, dan kebahagiaan psikologis diperoleh jika ia bisa menolong orang atau berbuat banyak kepada orang lain.

Setelah tamat SMA, ibunya menginginkan Amien Rais melanjutkan studinya ke Al-Azhar, Mesir. Tetapi ayahnya menginginkan ia melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada dan ia diterima di dua fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tetapi Amien Rais memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk tidak mengecewakan harapan sang ibu, Amien Rais juga mendaftarkan diri di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Amien Rais lulus dari Universitas Gadjah Mada pada 1968 dan melanjutkan pendidikan pasca-sarjana di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat, lulus 1974 dengan tesis politik luar negeri Anwar Sadat, mantan presiden Mesir. Setelah lulus S2, Amien Rais pulang ke Tanah Air sebentar dan kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi doktor di University of Chicago dan lulus pada 1981 dengan disertasi mengenai Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi gerakan Islam-Fundamentalis di Mesir.

Amien Rais yang sejak muda senang berorganisasi itu dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi, khususnya Mohammad Natsir. Ia bahkan pernah menjadi salah seorang pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang merupakan wadah tokoh-tokoh yang menentukan perjuangan partai Masyumi.

Kiprah politik Amien Rais dimulai dari kritik-kritiknya yang lugas dan tajam terhadap Pemerintahan Orde Baru melalui berbagai forum, terutama sejak ia menggulirkan ide sangat berani, yakni isu suksesi kepemimpinan nasional tahun 1998. Ide tersebut ia lontarkan pada sidang Tanwir Muhammadiyah 1993 di Surabaya. Ide suksesi, yang notabene adalah menghendaki turunnya Soeharto dan digantikan oleh presiden baru, melahirkan sikap pro dan kontra bukan hanya di kalangan peserta Tanwir, tetapi juga masyarakat luas. Bagi penguasa (baca: Soeharto) gagasan suksesi seperti merupakan barang haram untuk dibicarakan, lebih-lebih Soeharto baru saja dilantik untuk menjadi Presiden RI yang ke-enam kalinya. Selain dianggap ide sangat berani, gagasan tersebut dikhawatirkan akan membawa risiko besar bagi Muhammadiyah. Namun demikian Amien Rais tidak sendirian. Sebab, ternyata ide tersebut didukung secara kuat oleh tokoh

Muhammadiyah Lukman Harun yang juga berbicara lantang mengenai suksesi, sehingga masuk menjadi materi pada sidang komisi.

Walaupun sempat masuk dan didiskusikan pada sidang komisi, isu suksesi tersandung pada sidang pleno oleh KH. Achmad Azhar Basyir, Ketua Umum Muhammadiyah. Menurut Ketua Umum, pemikiran Amien Rais dan kawan-kawan kurang tepat menurut rasa dan etika ketimuran, walaupun sudah tepat menurut logika politik. Apalagi, Muhammadiyah bukan organisasi politik. Akhirnya, KH. Achmad Azhar Basyir mengambil keputusan untuk menunda pembicaraan tentang suksesi, sehingga masalah suskesi sama sekali tidak diputuskan dalam sidang Tanwir tersebut.

Namun demikian, bukan berarti isu tentang suksesi terkubur. Justru sebaliknya, isu tersebut melesat ke luar ruang sidang Tanwir, sehingga menjadi wacana publik yang sangat hangat. Berbagai media massa nasional mengangkatnya menjadi salah satu tema sentralnya sehari-hari. Sejak saat itu, Amien Rais yang sebelumnya hanya dikenal sebagai dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Gadjah Mada dan pengamat politik internasional dengan spesialisasi masalah politik Timur Tengah, mendapat predikat baru sebagai intelektual vokal dengan gaya bahasa yang lugas, tegas, dan tepat sasaran sebagai bentuk protes terhadap hegemoni dan arogansi penguasa.

Untuk menopang ide tersebut Amien Rais menyusun makalah lengkap dengan rujukan ilmiah dan data tentang kebobrokan Orde Baru dengan judul “Suksesi 1998: Suatu Keharusan”. Amien Rais mengemukakan empat alasan mengapa suksesi harus dilakukan. Pertama, ada jurang sangat lebar antara segelintir orang yang menikmati pembangunan dengan mayoritas masyarakat

yang miskin. Karenanya, diperlukan pendekatan structural untuk mengatasinya. Kedua, korupsi merajalela, bahkan cenderung makin gawat dari tahun ke tahun. Ketiga, proses demokratisasi tidak tumbuh secara signifikan. Keempat, Orde Baru sudah berkuasa terlalu lama. Meminjam dalil politik Lord Acton, Amien Rais mengatakan “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Kelima, pemimpin yang terlalu lama berkuasa cenderung menimbulkan kultus individu. Keenam, suksesi, rotasi, atau regenerasi dalam sistem demokrasi adalah suatu keniscayaan. Ketujuh, elit yang terlalu lama berkuasa cenderung mengalami penumpukan visi dan kreativitas. Kedelapan, elit yang terlalu lama berkuasa cenderung mengalami sindrom (Najib, 1997: 57).

Isu suskesi pelan-pelan surut seiring dengan perjalanan waktu, tetapi muncul kembali pada 1997 menjelang dan pasca-Pemilu. Terjadinya krisis moneter pada pertengahan 1997 yang melebar menjadi krisis multidimensional menyebabkan para mahasiswa dan intelektual menyuarakan isu suksesi secara sangat intensif. Lebih-lebih ketika itu Soeharto mengangkat anggota Kabinet Pembangunan VII yang sarat dengan isu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tak bisa dihindari isu suksesi kepemimpinan nasional segera memperoleh dukungan masyarakat luas karena masyarakat semakin tidak percaya dengan pemerintahan Orde Baru, sehingga pemerintahan Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 lewat gerakan yang disebut Reformasi. Sejak saat itu Amien Rais diberi predikat sebagai salah seorang tokoh Reformasi.

Kejengkelan Amien Rais terhadap Soeharto tampaknya sudah lama terpendam. Sebab, Amien Rais tidak saja melontarkan isu suksesi yang membuat penguasa Orde Baru terusik, tetapi juga melontarkan isu tentang persoalan Busang

dan Freeport yang di mata Amien Rais sangat merugikan negara Indonesia. Tak terelakkan karena kritik-kritiknya yang sangat tajam mengenai praktik KKN keluarga istana, Amien Rais menjadi salah satu musuh politik Soeharto nomor wahid. Dianggap sebagai musuh Soeharto, Amien Rais justru sangat senang. Dalam sebuah dialog di Yogyakarta, Amien Rais menyatakan:

Kalau Soeharto masih menganggap Amien Rais musuh besarnya, saya malah senang. Kenapa? Itu artinya Soeharto melihat Amien masih konsisten mengejar Soeharto sampai tercipta keadaan dan penegakkan hukum yang adil bagi bangsa Indonesia (Hasyim, 1999: 87).

Sikap konsisten dan berani Amien Rais terhadap penguasa yang dia anggap salah dan sudah keluar dari rel dan aturan main tidak saja dia lakukan terhadap Soeharto, tetapi juga belakangan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid yang sebelumnya dia dukung lewat *deal* politik yang disebut Poros Tengah ketika Abdurrahman Wahid dia nilai telah melanggar tata aturan hukum kenegaraan dengan menerima sumbangan dana dari Sultan Brunei Darussalam dan penggunaan dana *non-budgeter* Bulog yang mengakibatkan Abdurrahman Wahid lengser dari kursi kepresidenannya. .

Mei 1998 adalah peristiwa yang tak pernah terlupakan oleh seluruh bangsa ini, yang sudah lama mendambakan adanya perubahan mendasar dari kehidupan semu yang telah dijalani selama lebih dari 30 tahun. Pada 10 Mei 1998, Amien datang kembali ke Tanah Air setelah keliling ke Amerika Serikat dan Jerman untuk menjernihkan persepsi yang salah mengenai kerusuhan 11 Mei 1998. Di depan massa di Masjid Raya Bintaro Jakarta, Amien Rais mulai mencanangkan secara lantang tentang segera berakhirnya kekuasaan Orde Baru, kendati publik sulit mempercayainya karena kekuasaan Orde Baru masih kelihatan kuat. Apalagi, dengan tenang Soeharto melakukan kunjungan ke Mesir.



Perubahan sosial politik berlangsung begitu cepat. Tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa akibat tertembus peluru aparat. Situasi semakin memanas. Pada 13 Mei 1998 seluruh kekuatan reformasi berkumpul di Universitas Trisakti. Mencermati keadaan sedemikian genting, Amien Rais yang sedang berada di Yogyakarta segera terbang ke Jakarta untuk menemui massa di dalam Universitas Trisakti. Ia bersama Adnan Buyung Nasution dan Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi politik. Usai menyampaikan orasi politiknya, Amien Rais melanjutkan pembicaraan dengan tokoh-tokoh kritis seperti WS. Rendra, Harry Tjan, Permadi, Arifin Panigoro, Wimar Witoelar, dan lain-lain untuk membicarakan keadaan sosial politik terakhir di Tanah Air.

Tanggal 14 Mei 1998 Amien Rais menghadiri pertemuan pembentukan Majelis Amanat Rakyat (MAR) di Café Cemara Menteng di tengah-tengah suasana galau dan kerusuhan yang masih menghantui Jakarta sebagai epilog peristiwa penembakan di Trisakti. Belakangan diketahui bahwa Majelis Amanat Rakyat merupakan wadah atau cikal bakal berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Amien Rais mendeklarasikan PAN sebagai partai politik terbuka.

Sebagaimana Abdurrahman Wahid, Amien Rais termasuk sosok intelektual Muslim “nyleneh” dan vokal dalam menyikapi segala sesuatu yang dianggap tidak benar baik menurut ukuran akal maupun tata nilai. Di balik itu, Amien Rais juga digolongkan sebagai cendekiawan Muslim modernis, dan karakteristik pemikirannya banyak diwarnai oleh pemahamannya terhadap *tauhid* yang berarti meniadakan sifat ketuhanan (divinitas) dari seluruh sifat alam. Konsep *tauhid* berarti segala ciptaan Tuhan adalah makhluk, yang bersifat tidak

transenden dan tunduk kepada hukum ruang dan waktu. Bagaimana pun tidak ada sesuatu yang dapat berwujud Tuhan (Al-Brebesy, 1999: 201-205). Atas landasan *tauhid* tersebut, Amien Rais merasa tidak perlu ada yang ditakuti dalam memberantas segala bentuk ketidakadilan dan kebobrokan.

Lebih dari itu, seperti kebanyakan pemikiran intelektual muslim modernis, dilacak dari wacana intelektual yang dihasilkan pemikiran Amien Rais tampak dekat dengan pemikiran tokoh-tokoh al-Ikhwan al-Muslimin, seperti Hasan al-Banna, Muhammad Qutb, dan Abul A'la al-Maududi. Ini tampak pada apresiasinya yang tinggi terhadap teori politik yang ditawarkan Abul A'la al-Maududi yang menolak demokrasi model Barat, yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat. Sebaliknya, bagi Abul A'la al-Maududi, kedaulatan ada di tangan Tuhan.

Selain banyak diwarnai pemikiran para tokoh di atas, Amien Rais sangat gandrung dengan pemikiran seorang tokoh Syi'ah, Ali Syari'ati yang berpandangan bahwa sistem sosio-ekonomi Islam adalah sistem sosialisme ilmiah yang didasarkan pada monoteisme (*tauhid*). Banyak karya Ali Syari'ati di Indonesia diterjemahkan oleh Amien Rais. Sebagaimana Amien Rais yang menentang kekuasaan diktator Soeharto, Ali Syari'ati semasa hidupnya juga sangat keras melawan rejim yang memerintah secara diktatorial walaupun harus mengorbankan nyawanya.

Studi Al-Brebesy (1999: 218) memaparkan bahwa selain berdasarkan *tauhid*, pemikiran Amien Rais sangat jelas diwarnai oleh pemahamannya terhadap *syari'ah*. Hakikat *syari'ah* menurut Amien Rais bertujuan untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai kebajikan (*ma'rufat*) dan

membersihkan diri dari berbagai kejahatan (*munkarat*). Dalam hal ini *ma'rufat* mencakup segala kebajikan (*virtues*) dan seluruh kebaikan (*good quality*) yang diterima oleh nurani manusia sepanjang masa. Sedangkan *munkarat* menunjuk pada segenap kejahatan dan keburukan yang selalu bertentangan dengan nurani manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *syari'ah* merupakan sistem hukum yang lengkap dan terpadu.

Karena suatu hukum hanya dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum (*law enforcement*), maka menurut Amien Rais pelaksanaan *syari'ah* memerlukan adanya suatu kekuasaan politik. Dengan demikian, dalam pandangan Islam negara adalah penjaga *syari'ah* supaya tidak mengalami penyelewengan. Atas dasar itu, menurut Amien Rais, penguasa negara harus orang-orang yang jujur, bersih dari tindak penyelewengan, amanah dan sama sekali tidak memiliki cacat dalam arti luas.

Selain itu, pemikiran politik Amien Rais juga tidak bisa dipisahkan dari pemahamannya terhadap sekularisme. Dalam pandangan Amien Rais, Islam dan sekularisme merupakan dua hal yang antagonistik, sehingga tidak mungkin bisa disatukan. Sebab, Islam bangkit dari iman (*faith*) pada Tuhan, sedangkan sekularisme berangkat dari sikap tidak peduli pada iman dan Tuhan. Islam mengajarkan untuk melakukan tugas-tugas *khilafah*, misalnya tugas-tugas pembangunan yang antara lain berusaha menciptakan kemakmuran material hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yakni kesejahteraan hidup di akhirat. Sedangkan sekularisme berpandangan bahwa kemakmuran material merupakan kunci bagi kebahagiaan masyarakat. Dengan

kata lain, apa yang dianggap oleh Islam sebagai alat atau sarana, oleh sekularisme dianggap sebagai tujuan akhir (Al-Brebesy, 1999: 209).

Sebagai seorang Muhammadiyah, dalam berpolitik Amien Rais memiliki kecenderungan untuk bersikap legal-formalistik. Ini bisa dilihat dari berbagai wacana intelektualnya. Selain itu, Amien Rais juga digolongkan sebagai cendekiawan Muslim fundamentalis dan radikal serta kurang menghargai kelompok minoritas, terutama Kristen. Sikap ini pula tampaknya yang sangat mewarnai bentuk wacana sebagai wacana tandingan terhadap wacana politik Abdurrahman Wahid ketika menjadi presiden.

Namun sejalan dengan perubahan perjalanan politiknya di mana Amien Rais juga berkali-kali menyatakan ingin menjadi presiden, maka sikap politiknya juga terjadi perubahan cukup signifikan dengan mencoba bersikap akomodatif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Tetapi sifat eksklusifnya tampaknya sulit dihapus dari kolektif memori masyarakat Indonesia. Namun demikian, gagasan-gagasannya tentang “koalisi bersih” dan bentuk negara federal bagaimanapun telah mewarnai wacana politik Indonesia kontemporer.

Kajian politik Indonesia pasca-Orde Baru tidak bisa dipisahkan dari *deal* politik yang terjadi sebelum pemilihan presiden hasil pemilu 6 Juli 1999 yang disebut Poros Tengah, di mana Amien Rais menjadi salah seorang penggagasnya. Sebagaimana diketahui, hasil pemilu 6 Juli 1999 menempatkan PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB, sebagai peraih suara terbanyak pertama sampai keenam. Perolehan suara ini setidaknya menggambarkan kuatnya politik aliran sebagaimana yang terjadi pada hasil pemilu-pemilu sebelumnya. PDI Perjuangan menjadi cerminan dari aliran *nasionalis sekuler*. PPP, PBB, PK, dan

Partai Islam lainnya diidentikkan dengan aliran *nasionalis Muslim*. Sementara untuk PKB dan PAN, meski menyebut dirinya sebagai partai terbuka (*inklusif*), namun rasanya sulit untuk tidak disebut sebagai partai Islam. Golkar yang sebenarnya identik didominasi “Muslim Hijau”, juga sulit untuk tidak disebut sebagai partai yang dekat dengan kelompok islam.

Menguatnya kembali politik aliran sebagaimana disebutkan di atas ternyata membawa implikasi yang cukup pelik, terlebih dalam upaya menentukan siapa yang seharusnya menjadi presiden republik ini. Sementara pemilu 6 Juli 1999 tidak berhasil memunculkan partai politik dengan perolehan suara mayoritas (50 persen plus 1). Dari sini kemudian memunculkan polarisasi antara dua kekuatan politik, antara kubu PDI Perjuangan yang mencalonkan Megawati Soekarnoputri dan kubu partai Golkar yang mencalonkan B.J. Habibie, masing-masing memperoleh suara terbanyak pertama (33,7 persen) dan kedua (22,4 persen).

Kubu Megawati Soekarnoputri merasa yang paling pantas menjadi presiden karena partainya memenangkan pemilu. Sementara konstitusi kita menyatakan bahwa pencalonan presiden terletak di tangan Sidang Umum MPR RI. Siapa pun yang terpilih dalam Sidang Umum MPR-RI, maka dialah yang berhak menyandang jabatan presiden. Itu artinya, siapa pun tidak berhak mengklaim sebagai calon yang paling layak sebelum dia dipilih dalam Sidang Umum MPR-RI.

Kubu Megawati Soekarnoputri misalnya, sebagaimana dilakukan oleh massa PDI Perjuangan Jawa Timur membuat sumpah berupa cap jempol darah, yang terakhir bahkan menggantinya dengan “cap bibir”, dan mengumpulkan tanda

tangan sebagai wujud dukungan atas pencalonan Megawati Soekarnoputri. Sementara kubu B.J. Habibie membuat *counter* atas ulah pendukung Megawati Soekarnoputri, dengan mempolitisir kelompok-kelompok Islam sebagai alat politiknya – sebagaimana diyakini banyak pihak – membentuk pasukan yang disebutnya dengan “pasukan bulan sabit”.

Untuk menghindari rivalisasi yang semakin menajam ini, dan juga untuk memecahkan kebekuan politik sebagai implikasi dari rivalitas kedua kubu, Amien Rais bersama Abdurrahman Wahid kemudian menggagas apa yang kemudian dikenal dengan sebutan “Poros Tengah”.

Sebagaimana ditegaskan Amien Rais, lahirnya “Poros Tengah” sebenarnya lebih disebabkan karena keprihatinan dirinya dan Abdurrahman Wahid melihat semakin mengerasnya dua kekuatan politik, PDI Perjuangan dan Golkar. Sementara hasil pemilu 1999 sendiri menunjukkan tidak adanya partai yang menang secara mayoritas. Bukan hanya itu, di tingkat *grassroot* juga ada pemikiran-pemikiran yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Di benak Amien Rais, demokrasi tidak bisa dipersamakan dengan amuk massa dan berlandaskan menang-menangan. Atas dasar ini, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid berpikir untuk menawarkan perspektif baru yang kemudian terkenal dengan sebutan “Poros Tengah” dengan anggota para tokoh politik dari partai “faksi Islam”, seperti Hamzah Haz (PPP), Yusril Ihza Mahendra (PBB), Yusuf Hasyim (PKU), dan Nur Mahmudi (PK), Syukron Ma'mun (PNU), dan tentu Amien Rais sendiri yang mewakili PAN. PKB, sebagai partai nasionalis-religius berbasis Islam juga diharapkan ikut terlibat di dalamnya, namun PKB semula masih ragu dengan

kehadiran “Poros Tengah” yang mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

“Poros tengah” sebagaimana dijelaskan Amien Rais juga mempunyai prinsip-prinsip. *Pertama*, “Poros Tengah” menjadi kekuatan yang bersifat menggalang seluruh elemen-elemen patriotisme, nasionalisme, dan juga wujud politik yang terbuka (inklusif), lentur, dan jauh dari sikap-sikap otoriter. *Kedua*, “Poros Tengah” merupakan wadah seluruh anak bangsa, tidak pandang bulu dari manapun latar belakang, ormas maupun partai politiknya. Dan *ketiga*, “Poros Tengah” merupakan terobosan demokratik yang juga diharapkan patuh terhadap permainan demokrasi yang ada.

Sebagai kekuatan baru, “Poros Tengah” memang cukup menjajikan untuk memperoleh kursi yang cukup signifikan. Bila “Poros Tengah” tetap solid hingga Sidang Umum MPR-RI setidaknya akan terkumpul 118 kursi, ini belum termasuk PKB yang memperoleh 51 kursi, yang masih bertahan untuk mendukung Megawati Soekarnoputri. Dengan demikian, calon presiden yang diusulkan Poros Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi presiden.

Sebagai penggagas kelahiran Poros Tengah, Amien Rais juga tidak lepas dari kritik-kritik tajam berbagai kalangan, seperti Siswono Yudo Husodo, Muhammad AS Hikam, Matori Abdul Jalil dan sebagainya. Umumnya mereka menilai bahwa “Poros Tengah” hanya merupakan akal-akalan politik Amien Rais yang ujung-ujungnya hanya akan menguntungkan B.J. Habibie yang sudah dicalonkan Golkar, sehingga pencalonan Abdurrahman Wahid oleh “Poros Tengah” hanya sebagai jebakan. Atas tuduhan tersebut, Amien Rais menepisnya dengan menyatakan:

“Menurut saya, tuduhan tersebut justru merendahkan ketokohan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Tidak benar tuduhan itu. Pencalonan Gus Dur sebagai calon presiden “Poros Tengah” tidak lain karena Gus Dur-lah tokoh yang relatif bisa diterima oleh semua pihak”.

Pencalonan Abdurrahman Wahid menurut mantan Ketua PP. Muhammadiyah ini, telah melalui beberapa pertimbangan, di antaranya, *pertama*, ekseptabilitas Abdurrahman Wahid diyakini jauh lebih luas ketimbang yang lain. *Kedua*, penerimaan teman-teman minoritas diyakini cukup positif. Kalangan Kristen/Katolik maupun teman-teman Tionghoa itu cukup reseptif terhadap Abdurrahman Wahid. *Ketiga*, reaksi pasar diyakini juga akan bagus, karena reputasi Abdurrahman Wahid di luar negeri sebagai seorang demokrat tak perlu diragukan. *Keempat*, reaksi umat Islam, baik NU dan Muhammadiyah akan positif. Dan *kelima*, sayap TNI diyakini juga akan mendukung pencalonan Ketua Tanfidziyah PBNU ini.

Selain itu, munculnya gagasan “Poros Tengah” bisa juga ditafsirkan sebagai cerminan dari “ketidaksabaran” Amien Rais dalam menghadapi sikap Megawati Soekarnoputri dengan PDI Perjuangan-nya bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai presiden sepertinya adalah suatu keharusan, sebagai harga mati, meski harus menempuh cara apapun, sehingga mengesankan arogansinya. Belum lagi dalam pidato politiknya 29 Juli 1999, Megawati Soekarnoputri menunjukkan sikap kurang bijaksana, dengan ultimatum-ultimatum politik yang seakan dia yang paling pantas menjadi presiden. Bahkan tokoh PDI-P, Aberson Marle Sihlolo, dengan nada “arogan” dengan mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri merupakan orang yang telah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin negara ini. Baginya semua urusan sudah selesai dan rakyat memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk memimpin negara.



Melihat sikap PDI Perjuangan ini, Amien Rais tampaknya tidak cukup sabar. Sikap ini, rasanya juga menghinggapi hampir semua elit partai yang terlibat dalam “Poros Tengah”, termasuk Abdurrahman Wahid. Karena itu, tidak ada lagi cara untuk memecahkan kebekuan politik kecuali dengan cara menampilkan calon lain di luar Megawati Soekarnoputri dan B.J. Habibie, yakni Abdurrahman Wahid yang dinilai paling memenuhi syarat tersebut.

Kita menyaksikan bahwa Amien Rais tetap konsisten mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid sampai berhasil menduduki jabatan sebagai Presiden. Tetapi kita semua juga tahu bahwa Amien Rais pula yang akhirnya memelopori pelengseran Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden setelah diduga terlibat penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam dan dana Bulog yang menghebohkan itu.

Walhasil, Amien Rais dikenal sebagai politikus ulung di negeri ini. Dia sangat piawai memanfaatkan sekecil apa pun peluang untuk popularisasi kiprah politiknya. Ketika banyak orang menghujatnya karena melengserkan Abdurrahman Wahid yang dulu dia dukung, dengan *entheng* Amien Rais menyatakan “bahwa dalam politik tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi”. Di lain kesempatan, dia menyatakan “Gus Dur memang saya dukung untuk menjadi presiden. Sebab, ketika itu tidak ada calon yang paling *acceptable* di terima oleh masyarakat luas, tetapi karena selaku presiden dia melanggar undang-undang, maka demi keselamatan bangsa dan negara saya memberhentikannya. Bangsa demikian besar ini tidak boleh disandera oleh seorang yang bernama Gus Dur” ujarnya menjelang pelengseran Abdurrahman Wahid.

Ketika disertasi ini hampir mencapai tahap akhir penyusunannya, Amien Rais sedang giat-giatnya melakukan kampanye politik untuk menjadi calon presiden berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo sebagai calon wakil presiden. Melalui partai yang didirikannya PAN, Amien Rais berusaha keras merebut kursi presiden melalui lobi dan kampanye politik sangat intensif. Tidak segan-segan dia masuk ke kawasan-kawasan kumuh tempat pemulung tinggal dan bekerja, ke sawah ikut menanam padi bersama para petani, makan di warung-warung kecil, ke kantong-kantong santri, nelayan, perguruan tinggi, pasar dan sebagainya dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat secara terbuka dengan bahasa yang lugas, jernih dan tepat sasaran. Para pengamat menilai Amien Rais merupakan calon presiden yang mesin politiknya bekerja paling intensif.

Tetapi politik memang bukan persoalan hitam dan putih. Kendati berbagai upaya telah dilakukan dengan sangat sistematis dan intensif untuk memenangkan kursi presiden perolehan suara PAN pada pemilu legislatif sangat rendah dan jauh dari target. Pada pemilu calon presiden tahap pertama, Amien Rais yang berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo berada pada urutan keempat dengan memperoleh 17. 567 386 suara atau sekitar 14, 88 % secara nasional, sehingga dia tidak bisa mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua 20 September 2004 (Kompas, 21/7/2004). Usai pemilu, Amien Rais dan keluarga meninggalkan Tanah Air untuk melakukan umrah di tanah suci Makkah. Sekembalinya dari perjalanan umrah, dengan sikap tulus Amien Rais dalam *concession speech*-nya pada di Jakarta, Rabu 28 Juli 2004 menerima hasil pemilu 5 Juli 2004 sekaligus mengucapkan selamat kepada kandidat Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla

dan Megawati Soekarnoputri-KH. Hasyim Muzadi yang berhasil maju ke putaran kedua. Selanjutnya Amien Rais menyatakan:

“Bila selama ini saya memberikan kritik, itu hanya untuk memotivasi bangsa ini agar dapat melihat pemilihan umum yang bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. (Kompas, 29/7/2004)

Amien Rais telah dikesan sebagai seorang demokrat. Dia tidak mencari kambing hitam atas kekalahannya dalam pemilu kendati berbagai upaya dalam kampanye telah dia lakukan secara maksimal. Sebagai politisi berbasis akademisi dan intelektual, Amien Rais sangat sadar bahwa dalam peristiwa demokrasi (baca: pemilu) di mana rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk memilih calon yang disukai, pasti akan muncul pihak yang kalah dan menang. Dengan menyatakan menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada yang menang, Amien Rais telah memberikan pelajaran bagi bangsa kehidupan dan praktik demokrasi yang sesungguhnya.

### **3. Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung**

Dalam kancah politik Indonesia, suka atau tidak, Akbar Tandjung adalah sebuah fenomena. Ia adalah satu dari sedikit saja pelaku penting Orde Baru yang tak sekadar bertahan hidup melainkan tetap *digjaya*. Ia mampu melewati masa-masa sulit peralihan dari Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid sampai Megawati Soekarnoputri. Lebih dari itu, di dalam partai Golkar Akbar Tandjung memiliki posisi dan peran amat penting. Menyebut Akbar Tandjung sebagai tokoh politik yang tak tersentuh (*untouchable*) memang tidak berlebihan. Sebab, dia tetap menjadi salah satu pemain utama dalam arena politik Indonesia kontemporer.

Akbar Tandjung sering dikategorikan sebagai figur politisi profesional yang memiliki semangat komitmen dan selalu mencari jalan tengah dalam menghadapi persoalan. Itu mungkin yang menyebabkan dia dikenal sebagai politisi lemah. Tetapi bisa juga dibalik, bahwa itu sesungguhnya kekuatan Akbar Tandjung karena dia halus, penyayang, santun dan halus tutur bahasanya. Dia tidak suka meledak-ledak. Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid menilai Akbar Tandjung sebagai lebih berkeadaban, lebih mempunyai moral. Memang dia memiliki kelemahan, yakni tidak dilengkapi dengan kemampuan beretorika yang kuat. Tidak seperti Soekarno dan Abdurrahman Wahid yang pidatonya populer, Akbar Tandjung berpidato dengan gaya seperti seorang sedang memaparkan visi (Ridwan, et al, 2003: xxii).

Lahir di desa Sorkam, Tapanuli Tengah, 14 Agustus 1945, Akbar Tandjung yang bernama lengkap Djandji Akbar Zahiruddin Tadjung merupakan anak ke-13 dari 16 orang bersaudara dan berasal dari sebuah keluarga besar yang dikenal sangat religius, disiplin, dan toleran. Keluarga ini memiliki kecenderungan orientasi hidup heterogen dan setiap anak memiliki karakter berbeda-beda. Karakter keluarga demikian tampaknya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan watak politik Akbar kelak di kemudian hari. Bagi Akbar kecil tidak ada pilihan kecuali harus bersikap akomodatif terhadap perbedaan. Mungkin pula keluarga besar ini yang menjadi titik awal proses sosialisasi Akbar yang membentuk dirinya sebagai politisi demokrat, terukur, santun, dan pandai bekerja sama dengan golongan mana pun.

Selain itu, Akbar Tandjung juga dikenal sebagai politisi yang tidak suka menyakiti hati lawan-lawan politiknya. Kesan itu akan segera terlihat terutama

ketika kita berhadapan secara langsung. Para pengamat, kawan-kawan dekat dan lawan-lawan politiknya mengakui hal itu. “Akbar masuk dalam kategori *man of consensus*” kata Hamid Awaluddin (Ridwan, et al, 2003: 51).

Untuk memahami sosok Akbar Tandjung penting dilacak sejarah kehidupan keluarganya secara komprehensif. Ayah Akbar Tandjung yang bernama Zahiruddin Tandjung adalah seorang pedagang kain, getah, dan rempah-rempah yang cukup sukses dan sangat terkenal di Tapanuli Tengah. Namun Akbar tidak mewarisi jejak orangtuanya sebagai penguasaha. Akbar lebih memilih terjun ke dunia politik praktis. Secara sosio-kultural, karakter politik Akbar Tandjung yang dianggap santun dan terukur serta ulet sebenarnya merupakan refleksi dari watak masyarakat Tapanuli yang dikenal memiliki sifat ulet, gigih, tegas, dalam mempertahankan sebuah prinsip dan konsisten dalam mencapai cita-cita hidupnya. Ini bisa dilihat bagaimana Akbar bersikap tegas ketika partai Golkar yang dipimpinnya dibekukan oleh Abdurrahman Wahid menjelang lengsernya.

Selain berdagang, ayah Akbar Tandjung juga aktif menjadi pengurus Muhammadiyah di desa kelahirannya Sorkam. Dengan latar belakang organisasi Islam seperti itu keluarga Zahiruddin tampak sangat rasional dan pekerja keras. Sebab, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi pembaru yang sangat menekankan rasionalitas dan etos kerja. Di sini tampaknya watak masyarakat Tapanuli, di satu sisi, dan teologi kemuhammadiyah, di sisi lain, mungkin saja berjalan secara sinergis dalam membentuk pribadi-pribadi keluarga Zahiruddin. Tidak bisa dipungkiri, terutama berkaitan dengan soal kesungguhan dan watak pekerja keras tadi, faktor-faktor ini diduga kuat ikut menopang pembentukan karakteristik perilaku politik Akbar Tandjung. Dengan demikian, dalam diri

Akbar Tandjung aktualisasi nilai-nilai kesungguhan dan keuletan mengkristal dalam perilaku politiknya.

Di samping itu, bagi Akbar Tandjung, keluarga besar Zahiruddin seperti telah menjadi sebuah miniatur yang memberikan inspirasi tersendiri untuk memasuki realitas kehidupan sosial-politik. Dalam keluarga ini Akbar Tandjung sudah terbiasa dengan kompromi, akomodatif terhadap berbagai pendapat dan harapan, sabar menghadapi setiap guncangan, menghargai perbedaan, dan tidak bermusuhan satu sama lain. Latar belakang ini mempengaruhi dan menyiapkan secara psikologis untuk kelak menjadi seorang pemimpin, karena ia menjadi biasa menangani masalah-masalah sudah sejak kecil. Sebagaimana dinyatakan Nurcholish Madjid (dalam Ridwan, et al, 2003: 54) karena terbiasa menghadapi situasi “konflik” dalam intern keluarga, Akbar Tandjung terdidik menjadi orang yang moderat, dan mempunyai pemahaman yang positif terhadap konflik itu sendiri

Dalam pergaulan sosial terdapat berbagai dimensi sosiologis yang mempengaruhi kehidupan Akbar Tandjung. Sebagai anak pantai di pedesaan, Akbar Tandjung tersosialisasi dengan kehidupan sosial-kultural agraris. Sementara sebagai pedagang sukses, Zahiruddin membina banyak hubungan luas dengan berbagai kelompok lapisan masyarakat. Pergaulan dan keterbukaan sang ayah telah memberikan pengaruh tersendiri terhadap proses pergaulan dan hubungan sosial Akbar Tandjung kelak di kemudian hari. Demikian antara lain akar-akar geneologis intelektual dan kultural Akbar Tandjung yang mengantarkan dirinya sebagai salah satu politisi tangguh dan tahan banting di negeri ini.

Pendidikan dasar dan menengah Akbar Tandjung tampaknya juga memberikan pengalaman tersendiri yang ikut mewarnai perjalanan politiknya. Dia pernah mengikuti pendidikan dasar di sekolah Nasrani (Protestan) di Medan dan SMA Katolik, Kanisius, di Jakarta. Mengenai latar belakang pendidikannya, dalam sebuah wawancara dengan M. Deden Ridwan, 22 November 2000, Akbar Tandjung menyatakan:

“Saya juga sekolah dasar di Muhammadiyah. Tapi waktu tinggal di Medan, saya memasuki sekolah dasar Nasrani. Saya tidak tahu kenapa oleh kakak saya dimasukkan ke sekolah Nasrani. Suasana Natal itu terasa di sana, dan lingkungan pergaulan saya waktu muda di Medan juga dengan orang-orang yang beragama lain. Karena lingkungannya seperti itu (lingkungan Nasrani), sedangkan dalam lingkungan kehidupan saya di rumah sangat religius-Islam, karena pada sore hari saya belajar agama di Madrasah Ibtidaiyah Medan”.

Ungkapan Akbar Tandjung menyiratkan makna bahwa sejak kecil Akbar Tandjung sudah terbiasa bergaul dengan kelompok masyarakat dengan keyakinan/agama berbeda. Dengan demikian sikap pluralis Akbar Tandjung yang dia sandang sampai saat menjadi politisi tangguh saat ini bukan tiba-tiba dan sekadar strategi politik, tetapi sejak kecil memang sudah melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagai hasil pergumulannya dengan realitas sosial-kultural yang heterogen. Pergaulannya dengan orang yang berbeda agama bukan masalah asing dan aneh. Baginya hal demikian telah menjadi bagian hidupnya.

Akbar Tandjung memasuki masa-masa sulit dalam hidupnya ketika masih berusia tujuh tahun, ayahnya wafat pada 1952. Sejak saat itu, dia harus hidup dengan orangtua tunggal. Dia dibesarkan oleh sang ibu dan kakak-kakaknya. Karena itu, Akbar Tandjung sering berpindah-pindah tempat mengikuti kakak-kakaknya. Dia menjadi terbiasa dengan suasana yang berubah-ubah tanpa

direncanakan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Pengalaman ini pula yang membuat Akbar Tandjung tidak saja tetap eksis di empat rejim pemerintahan sampai saat ini, tetapi juga menjadi salah satu pemain inti dalam perpolitikan nasional.

Usai lulus SMA, Akbar Tandjung melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) pada 1964. Pada saat yang sama dia memulai kehidupan berorganisasi dengan masuk menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di HMI, Akbar Tandjung menemukan tempat yang di kemudian hari memberikan kontribusi sangat besar bagi kehidupan politiknya. Karakter HMI secara organisatoris telah mendewasakan dan membentuk kepribadian dan karakter politiknya. Dari HMI ini Akbar Tandjung memulai karier politiknya yang dia awali dengan menjadi ketua cabang hingga ketua umum.

Bagi Akbar Tandjung, HMI merupakan salah satu guardian terpenting dari moralitas bangsa yang plural. Dalam ceramahnya pada Acara Pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 16 Januari 2000, Akbar Tandjung menyatakan:

“HMI telah membuktikan sejak dulu kala selalu berada di barisan terdepan tatkala panggilan bangsa menyerunya. Di sini letaknya bahwa HMI harus berusaha tampil secara sungguh-sungguh menjadi *mediating and moderating factor* dan perekat kaum muda Indonesia, sebagaimana dulu pernah diperankan dengan baik dalam kelompok Cipasung, misalnya”.

Dalam diri Akbar Tandjung, HMI memang begitu membekas. Hal ini tentu ada alasannya. Sebab, HMI merupakan organisasi mahasiswa terbesar, setidaknya sampai akhir 1980-an. Organisasi kemahasiswaan ini berpijak dari nilai-nilai Islam inklusif. Ekspresi Islam menurut organisasi ini memiliki dimensi tersendiri, yaitu keislaman yang ditafsirkan dalam konfigurasi pluralistik;



keislaman yang tidak terpisahkan dari keindonesiaan. Secara simultan, menurut Akbar Tandjung, HMI harus menjalin kebersamaan dengan semua organisasi pemuda dan mahasiswa tanpa memandang perbedaan suku, etnis dan agama dalam semangat kebangsaan. Karena itu, HMI sering menjelma menjadi kategori sosial-budaya. Mahasiswa Islam yang tergabung dalam HMI kerap diidentifikasi sebagai kelompok Islam modernis, kendati definisi modernis itu sendiri masih mengundang debat. Dengan demikian, kategori ini setidaknya membedakan HMI dengan organisasi mahasiswa Islam lain, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang sering dicap sebagai kelompok tradisional.

Kiprah Akbar Tandjung di HMI dalam percaturan politik semakin bersinar ketika di awal Orde Baru dia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI menggantikan Nurcholish Madjid dalam Kongres HMI ke-X Oktober 1971 di Palembang. Pergulatan Akbar Tandjung dalam HMI telah ikut memperkokoh dirinya untuk terlibat dalam panggung politik praktis dengan cara tidak memasuki partai Islam.

HMI ternyata bukan satu-satunya wadah bagi Akbar Tandjung untuk bersosialisasi politik. Sebab, pada saat yang sama dia juga aktif di Angkatan 66 bersama seniornya seperti Ekky Syahrudin, Mar'ie Muhammad, dan Abdul Ghafur. Pertemanan ini akhirnya membawa Akbar Tandjung masuk ke kancah politik praktis dan bahkan dia juga menjadi salah seorang pendiri dan sekaligus terpilih menjadi Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atas rekomendasi Nurcholish Madjid yang selanjutnya mengantarkannya masuk Golkar dan bahkan menjadi Ketua Umumnya setelah Soeharto lengser.

Lewat Golkar ini pula, karier dan kepiawian politik Akbar Tandjung teruji. Bagaimana tidak, Golkar yang telah menjadi pilar penyangga kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun tiba-tiba dihujat banyak orang, pengurusnya dikejar-kejar, salah satu kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dibakar massa, bahkan di era Abdurrahman Wahid sempat dibekukan. Namun Akbar Tandjung dengan cerdik membangun Golkar hingga memperoleh semangat dan gairah baru sampai akhirnya menjadi pemenang kedua setelah PDIP dalam Pemilu 1999 yang berlangsung secara demokratis. Bahkan dalam Pemilu legislatif 2004, Partai Golkar menjadi pemenangnya, mengungguli PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Selama rejim Orde Baru, Akbar Tandjung dikenal dekat dengan penguasa. Itu pula sebabnya dia terpilih secara berturut-turut pada 1977 menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), kemudian menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Menteri Perumahan dan Pemukiman, Semuanya di era Orde Baru. Di era B.J. Habibie, Akbar Tandjung menjabat sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada era Abdurrahman Wahid, Akbar Tandjung menjadi Ketua DPR RI hingga sekarang (G-Martha, 2003: 133).

Namun demikian, perjalanan politik Akbar Tandjung tidak selamanya berjalan mulus. Sebab, dia pernah kesandung kasus penggunaan dana non-budgeter Bulog sebesar 40 milyar ketika menjabat sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara pada era B.J. Habibie dan divonis tiga tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat, kendati akhirnya dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya pada Kamis, 12 Februari 2004 (Kompas, 13/2/2004). Selama

kasusnya berlangsung selama dua tahun empat bulan (sejak 25 Oktober 2001), Akbar Tandjung sempat dicekal, ditahan, dihujat, ditekan bertubi-tubi dan bahkan diminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Sejak itu pula, tidak sedikit yang memperkirakan bahwa karier politiknya akan tamat. Semuanya dia hadapi dengan tenang dan tanpa emosi. Atas sikapnya menghadapi berbagai masalah berhubungan dengan jabatan publiknya, tak berlebihan jika Indonesianis R. William Liddle di suatu kesempatan menyatakan:

“Saya kira figur Akbar adalah politikus yang sangat akseptabel dan lincah dalam bermain politik. Dia bisa berembuk dengan siapa saja. Gaya politik dan kepemimpinan Akbar-lah yang sebenarnya bisa dipastikan Golkar sekarang ini meraih simpati dari berbagai pihak”.

Berbagai latar sosial sebagaimana diuraikan di atas telah menjadikan Akbar Tandjung salah seorang politisi profesional. Perilaku politiknya santun dan akomodatif terhadap kepentingan politik kelompok manapun. Ia menerima keberadaan berbagai kelompok lain sekalipun secara politis, kepercayaan, dan pemikiran mungkin berbeda. “Dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu, kalau seandainya jabatan tersebut memerlukan orang, kita tidak merasa harus merekrut orang-orang Islam saja”, ungkapnya suatu kali.

Baginya realitas merupakan sumber pembentukan kesadaran politik. Karena itu, Akbar Tandjung sangat mudah melakukan kompromi sekalipun dengan lawan politik dan cenderung menghindari konflik. Akbar Tandjung selalu berusaha mencari titik konsensus, sehingga dia sesungguhnya seorang tokoh pembangun konsensus, walaupun kadang-kadang juga membawa risiko. Namun demikian, bukan berarti Akbar Tandjung tidak bisa berbuat tegas. Dalam hal yang prinsip, Akbar Tandjung sesungguhnya merupakan sosok politisi yang tegas dan

tidak kenal kompromi. Ini bisa dilihat, misalnya, ketika Partai Golkar dibekukan oleh Abdurrahman Wahid. Ini bisa dipahami, sebab Golkar merupakan wadah politik dan aset sangat besar bagi Akbar Tandjung. Karena itu, siapa pun yang menggoyang apalagi membubarkannya pasti dia hadapi dengan tegas.

Langkah politik mutakhir Akbar Tandjung yang oleh pengamat dianggap sebagai sangat cerdas adalah ketika melontarkan gagasan tentang Konvensi untuk memilih calon presiden yang akan mewakili Golkar dalam pemilu 2004. Menurut Fatah (2004: 341) ketika ia sendiri dibelit persoalan hukum dan didera degradasi citra politik, dengan sangat canggih Akbar Tandjung berdiam diri dan berkonsentrasi pada persoalan dirinya, tetapi pada saat yang sama dia menggunakan tangan-tangan di luar dirinya untuk mengkonsolidasikan partai. Kendati akhirnya dia harus kalah dari Wiranto, Konvensi terbukti sukses memroduksi kekuatan Golkar dengan mengakumulasikan berbagai sumber daya finansial, mobilisasi politik, intelektual dan moral, secara cuma-cuma melalui kerja para calon peserta konvensi. Hasilnya jelas, Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu Legislatif 5 Juni 2004 dengan mengungguli PDIP walaupun calon dari partai Golkar Wiranto akhirnya harus menerima kekalahan dalam Pemilihan Presiden Tahap I (5 Juli 2004). Banyak yang menuduh bahwa kekalahan Wiranto karena mesin politik Golkar tidak bekerja optimal dan Akbar Tandjung bekerja setengah hati membantu Wiranto. Semua tuduhan telah dibantah melalui dialognya dengan presenter SCTV.

Ketika melihat Akbar Tandjung terlempar dari konvensi, banyak orang memprediksi karier politik Akbar Tandjung akan segera berakhir. Tetapi dengan mencermati berbagai pengalaman sepanjang sejarah perjalanan politiknya, rasanya

terlalu gegabah untuk menyatakan bahwa karier politik Akbar Tandjung akan segera berakhir. Sebab, belakangan dia terlihat sedang membangun kompromi politik dengan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi untuk membangun pemerintahan pasca Pemilu 2004. Dalam Pemilu Presiden Tahap II (20 September 2004) secara organisatoris Partai Golkar mendukung pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Sampai di sini kita belum tahu ke mana Akbar Tandjung akan melangkah .

**BAB V**

**NARASI REALIS KONTEKSTUAL**  
**WACANA POLITIK EMPAT ELIT POLITIK INDONESIA**

Bab ini menyajikan narasi realis kontekstual wacana politik empat elit politik Indonesia. Wacana, merujuk kembali kepada pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah tulisan dan ujaran yang diproduksi oleh seseorang. Selanjutnya, karena politik secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan seseorang untuk memperoleh, menggunakan, mempertahankan atau mengendalikan kekuasaan, maka wacana politik adalah ujaran atau tulisan yang diproduksi --- atau tepatnya digunakan --- oleh seseorang untuk memperoleh, menggunakan, mempertahankan dan atau mengendalikan kekuasaan. Sedangkan empat elit politik Indonesia yang dimaksudkan dalam paparan ini adalah Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Megawati, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Karena narasi disajikan secara realis, maka pemaknaan intensional masih sangat provisional. Penekanan lebih diberikan pada urutan berdasarkan waktu, dan kurang didasarkan pada tema. Pengulangan-pengulangan kandungan makna wacana politik pada saatnya nanti akan dijadikan sebagai salah satu dasar bagi rekonstruksi teoretik baik substantif maupun formal.

### A. Wacana Politik Abdurrahman Wahid

Sejauh mengacu pada pernyataan Abdurrahman Wahid berkenaan dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap BI, tampak bahwa penggunaan kekuasaan harus transparan dan kekuasaan formal (kewenangan) harus disebarkan merupakan dua wacana inti yang ingin diwujudkan. Walaupun demikian, dari sudut pandang analisis wacana, di dalam pernyataan Abdurrahman Wahid sendiri terkandung ketidak-konsistenan. Ketika sesuatu berdampak positif, diklaim sebagai kinerjanya (yang dilakukan pemerintah), sedangkan ketika berdampak negatif diklaim sebagai di luar urusannya (pemerintah tidak punya urusan apa pun). Dengan ungkapan lain, koherensi wacana ini tidak bisa diwujudkan. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid yang disajikan beserta konteks yang melingkupinya.

Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan setuju jika hasil audit BPK terhadap Bank Indonesia yang akan diserahkan ke DPR Jum'at besok, 31 Desember 1999, diberikan kepada masyarakat. "Setelah diserahkan ke DPR, diharapkan hasil audit itu dapat diketahui masyarakat luas. Bagi saya, itu tidak masalah karena bukan rahasia negara", kata Gus Dur usai menerima Gubernur BI Syahril Sabirin di Bina Graha, Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Gus Dur, jika BPK akan mengumpulkan hasil auditnya dengan no opinion atau disclaimer (tidak bisa menyimpulkan neraca keuangan itu benar atau salah), hal itu merupakan wewenang BPK. "Bagi saya, yang penting bukan soal disclaimer atau tidak. Tapi, bagaimana, kita tak boleh menutup-nutupi hal itu", tegas Gus Dur.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK mengaudit BI untuk mengungkapkan kebenaran atas dugaan penyelewengan BLBI Rp 144,5 triliun lebih. Ada kecurigaan, dana itu hanya disalurkan kepada segelintir konglomerat kroni Soeharto.

Gus Dur berharap pengumuman hasil audit BPK itu tidak mempengaruhi atau mengguncangkan pasar. Tapi, justru diterima pasar sebagai bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah. "Upaya ini mudah-mudahan disambut dengan baik oleh dunia usaha kita, bahwa kita

tak ingin ada keguncangan, tetapi kita ingin tetap menegakkan kebenaran", tegas Gus Dur.

Diakui, setelah diberlakukannya UU 23/1999 yang mengatur Independensi BI, presiden tidak lagi mempunyai hubungan instruktif lagi dengan BI. "Terus terang saja, pemerintah nggak punya urusan apa pun atas BI. BI kan urusan BPK dengan parlemen (DPR, red)".

"Jadi, sama sekali tak ada urusan dengan pihak eksekutif" (Jawa Pos, 30 Desember 1999).

Kebebasan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia, sejauh mengacu pada pernyataan-pernyataan Abdurrahman Wahid, juga merupakan wacana yang berusaha dikembangkan. Kekuasaan formal tidak boleh digunakan untuk mengendala kebebasan dan melanggar hak-hak asasi manusia. Ini tampak dari pernyataan Abdurrahman Wahid berkenaan dengan larangan terhadap ajaran komunisme dan marxisme. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid yang disajikan beserta konteks yang melingkupinya. Tampak pula bagaimana penulis berita ini membuat penafsiran yang bahkan melebihi pernyataan Abdurrahman Wahid.

"Saya ingin mendudukan masalahnya secara tepat, bahwa UUD 1945 tidak pernah melarang komunisme. Kalau mau marah kepada PKI, silahkan. Tetapi komunisme sebagai paham itu jangan digebyah-uyah. Kalau masyarakat tidak setuju dengan paham komunisme, maka didiklah warga masyarakat melalui pendidikan dan berbagai hal yang bisa dilakukan", kata Gus Dur.

Barangkali Gus Dur menganggap bahwa sumber krisis dan keterbelakangan bangsa ini adalah tiadanya ruang keterbukaan yang diawali dengan sikap antipati terhadap komunisme dan yang berbau komunisme. Lebih dahsyat lagi, Tap XXV/MPRS/1966 mengunci kuat-kuat ketertutupan itu, mengeksploitasi rakyat dengan ancaman Tap itu, dan membangun *word view* masyarakat sejalan dengan Tap itu.

Jalan untuk membebaskan bangsa ini bagi Gus Dur adalah mengubah Tap tersebut menjadi 'jalan putar teoritis' yang bisa digunakan untuk membangun bangsa ini secara revolusioner, sebagaimana Marx melahirkan sebuah pemikiran dan gerakan revolusioner yang sangat berpengaruh dengan penemuan 'jalan putar teoritis' yang berupa 'materialisme historis'.



Dengan teori revolusioner ini Gus Dur ingin mulai mengajak rakyat bangkit, membangun Indonesia secara kritis, dan melihat masa lalu secara adil. Itulah sebabnya mengapa ia perlu 'memproklamasikan' temuannya pada hari kebangkitan Nasional. Gus Dur ingin membongkar pembangunanisme dan membebaskan masyarakat dari belenggu Orde Baru dengan mencoba menampilkan lawannya sehingga masyarakat bisa membaca orde itu secara kritis.

Dengan merombak Tap XXV/MPRS/1966 Gus Dur juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa belajar Marxisme tidaklah tabu, kita bisa mengambil beberapa teori darinya yang barangkali bisa diterapkan di Indonesia, sambil mengkritisi kekurangan-kekurangannya. Dengan komunisme itu pula bangsa ini bisa melahirkan praktik revolusioner berupa pemerataan penghasilan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan umum, menghilangkan hak antara yang kaya dan yang miskin, dan membuat semua orang saudara (AULA, Juni 2000).

Kembali pengakuan akan hak-hak asasi manusia, termasuk misalnya, untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat merupakan butir wacana yang sering dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid. Butir nilai yang sama ini tampak dari tanggapan Abdurrahman Wahid terhadap kongres yang digelar oleh masyarakat Papua. Walaupun sebagian kaum "nasionalis" mengecam ijin yang diberikan oleh Pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk penyelenggaraan kongres tersebut, tampak jelas bahwa Abdurrahman Wahid melalui wacana yang dikembangkan tetap membela keputusannya. Selain pengakuan akan hak-hak asasi manusia, Abdurrahman Wahid juga menonjolkan demokrasi dan otonomi sebagai salah satu nilai utama. Setiap pengambilan keputusan yang mengatasnamakan rakyat, selalu ditentang oleh Abdurrahman Wahid. Karena itu, forum yang tidak representatif serta kehadiran "orang-orang luar" dinilai sebagai penyebab ketidak-absahan keputusan yang diambil. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid ketika menanggapi hasil Kongres Rakyat Papua.

Menurut Presiden, memang ada sebagian rakyat Papua yang ingin memerdekakan Papua, namun jumlah mereka itu tidaklah banyak sementara sebagian besar lainnya tidak menginginkan itu.

Di Papua sedang berlangsung Kongres Rakyat Papua yang hasilnya tidak diakui Pemerintah RI karena tidak mewakili keseluruhan rakyat Irian Jaya, juga karena dalam kongres itu orang-orang Papua yang menentang pemisahan Papua dari RI tidak diperbolehkan mengikuti kongres. "Dalam kongres tersebut", ujar Presiden, "juga ada unsur-unsur luar negeri, baik dari Belanda maupun Australia" (Kompas, 4 Juni 2000).

Humanisme anti kekerasan cenderung dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid sebagai salah satu posisi yang seharusnya diambil oleh Pemerintah. Kepentingan politik tidak boleh berada di atas penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Demikian pun, penggunaan kekuasaan pemerintah tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang karena harus mempertimbangkan dampaknya bagi kemanusiaan. Karena itu, Jeda Kemanusiaan harus menjadi pilihan untuk "menghentikan" segala bentuk kekerasan yang mengancam harkat kemanusiaan. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid berkenaan dengan Jeda Kemanusiaan bagi penyelesaian konflik di Aceh dan Maluku.

Menyinggung tentang Aceh, Presiden mengemukakan saat ini sudah diberlakukan Jeda Kemanusiaan dan ia yakin masalah yang terjadi di sana bisa diselesaikan dengan baik.

Sedangkan persoalan di Maluku, kata Kepala Negara, terus diupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan di sana tidak mudah, katanya, karena berakar sejak zaman Belanda di mana golongan Kristen ketika itu mendapat perlakuan istimewa dari Belanda untuk menduduki menjadi anggota militer.

Ketika Soeharto berkuasa dan juga BJ Habibie, kata Presiden, keadaan terbalik di mana kaum Muslimin menduduki berbagai posisi sementara ketika Kristen memprotes mereka dihadapi dengan kekerasan.

Karena itu ujaranya, kekerasan yang terjadi sekarang ini tidaklah mungkin harus dihadapi dengan kekerasan pula dan itu pula sebabnya Pemerintah saat ini tidak bisa begitu saja mengganti para pejabat yang bertugas di Maluku (Kompas, 4 Juni 2000).

Pengambilan keputusan berkewenangan dan kepentingan nasional merupakan nilai lain yang berusaha ditonjolkan oleh Abdurrahman Wahid. Penegasan Abdurrahman Wahid bahwa keputusannya merupakan keputusan berkewenangan yang otonom, terpaksa diwacanakan oleh Abdurrahman Wahid karena telah begitu gencar kritik publik terhadap ketidak-konsistenan kebijakan Abdurrahman Wahid. Menurut para pengkritiknya, kebijakan yang tidak konsisten itu timbul karena ada sejumlah "pembisik maut" yang mengakibatkan Abdurrahman Wahid kehilangan otonominya sebagai pribadi dan akhirnya mempengaruhi otoritasnya sebagai Presiden. Berikut adalah petikan "kontra wacana" Abdurrahman Wahid terhadap otoritas-otonom yang dimiliki serta pengambilan keputusannya yang tidak dimaksudkan untuk menguntungkan sekelompok orang, tetapi demi kepentingan nasional.

Presiden Abdurrahman Wahid membantah bahwa ia akan melakukan reshuffle (perombakan) kabinet seperti yang kini banyak diisukan orang. Ia juga menegaskan, dalam proses mengambil keputusan penting kenegaraan dirinya sama sekali tidak pernah "termakan" gelombang pengaruh oleh mereka yang menurut desas-desus sering disebut para "pembisik" presiden.

"Tidaklah benar, menurut (isi) desas-desus itu saya (telah) dibisiki orang. Termasuk (sas-sus) bahwa anak-anak saya juga telah membisiki saya. Ada orang-orang atau staf saya yang membisiki saya, itu tidak benar!", kata Presiden Abdurrahman Wahid menjawab pertanyaan peserta simposium "Membangun Etika dan Moralitas Politik Nasional Menuju Indonesia Baru yang Beradab" di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (26/6) siang.

"Kalau semua orang memberikan pendapat, (itu) betul. Akan tetapi, pada akhirnya saya sendirilah yang mengambil kesimpulan. (Dan) kesimpulan yang saya ambil selalu berdasarkan kepentingan terbesar bangsa kita", tandas Abdurrahman Wahid (Kompas, 27 Juni 2000).

Kendati tidak mendapatkan cukup banyak porsi, Abdurrahman Wahid sebenarnya juga memperhatikan stabilitas nasional sebagai salah satu nilai yang muncul dalam wacana politiknya. Tanpa stabilitas, menurut Abdurrahman Wahid, bangsa Indonesia tidak bisa menyelesaikan begitu banyak masalah yang dihadapinya. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid tentang tidak perlunya Indonesia --- pemerintahan Abdurrahman Wahid --- menambah masalah dengan terus-menerus melakukan reshuffle kabinetnya.

Menjawab pertanyaan lain tentang isu rencana reshuffle kabinet, Presiden menegaskan hal itu juga tidak benar akan dia lakukan. Menurut dia, sekarang ini kita sudah punya banyak masalah. "Saya tidak akan tergoda untuk melakukan reshuffle dalam waktu dekat, karena saya ingin lebih berkonsentrasi pada masalah-masalah yang ada. Nggak perlu nambahin masalah-masalah baru lagi", tandasnya (Kompas, 27 Juni 2000).

Penegakan hukum merupakan nilai lain yang berusaha dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid. Sebenarnya Abdurrahman Wahid benar-benar menyadari bahwa sebagai presiden era reformasi, dia dibebani sejumlah agenda reformasi yang salah satunya adalah penegakan hukum. Kontra wacana Abdurrahman Wahid terhadap kritik sejumlah komponen masyarakat berikut ini menggambarkan bagaimana secara diskursif Abdurrahman Wahid juga menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu wacana politik yang dia kembangkan.

Terhadap pertanyaan gugatan mahasiswa yang menuduh pemerintahan sekarang tak serius menjalankan agenda reformasi, Presiden mengatakan hal itu juga tidak benar. Reformasi menjadi tanggung jawab semua pihak dan tak benar pemerintah telah kedodoran menjalankan agenda itu.

Menurut Presiden, menjalankan reformasi di bidang hukum tidaklah mudah. Ia lalu mengungkapkan akhir-akhir ini pemerintah pun

terutama Presiden juga sering diujani tuduhan telah melakukan KKN atau korupsi. Secara hukum, katanya, dirinya tak ada masalah dengan upaya menemukan bukti-bukti hukum (Kompas, 27 Juni 2000).

Supremasi hukum sering diwacanakan oleh Abdurrahman Wahid terutama ketika kritik dari publik mengarah kepada dirinya. Bahkan, karena begitu mengandalkan pada nilai ini, Abdurrahman Wahid lalai bahwa sebagai presiden dia tidak hanya menghadapi pengadilan hukum, tetapi juga pengadilan politik oleh MPR. Berikut adalah petikan "kontra wacana" Abdurrahman Wahid terhadap tuduhan yang berkembang karena kasus Bulog dan KKN secara umum.

"Buktikan secara hukum (kasus saya) dalam Buloggate. Itu sederhana bagi saya, namun barang kali tidak sederhana bagi bangsa ini", kata Presiden. Namun, Abdurrahman Wahid segera mengingatkan, rasanya juga tidak fair kalau masyarakat sekarang ini cenderung begitu saja mudah menuduh pemerintah terkesan kurang serius dalam upaya memberangus praktik KKN.

"Saya hanya ingin minta waktu dan harapan saya agar masyarakat mau bersabar untuk itu. Berilah kesempatan yang fair bagi kami - eksekutif dan legislatif - untuk itu", kata Presiden sembari mengingatkan betapa hingga kini masih begitu banyak elit politik yang hanya asyik dengan agenda politik pribadi dan kelompoknya sendiri. "Jarang mereka-mereka ini mau memikirkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan", tandasnya (Kompas, 27 Juni 2000).

Setelah demokrasi, hak asasi termasuk hak berbicara, kesetaraan atau multikulturalisme, Abdurrahman Wahid juga mengembangkan wacana tentang akuntabilitas publik. Pemerintah, menurut Abdurrahman Wahid, tidak hanya harus bertanggung-jawab kepada lembaga legislatif, tetapi juga harus bertanggung jawab secara jujur kepada rakyat. Jadi walaupun belum menggunakan istilah akuntabilitas atau pertanggung-gugatan --- yang barangkali justru disengaja agar

tidak membingungkan masyarakat -- Abdurrahman Wahid juga menegaskan pentingnya akuntabilitas publik tersebut.

Terhadap pertanyaan peserta yang mencemaskan akan kembalinya kelompok status quo, Presiden menegaskan bahwa hal itu takkan terjadi.

"Saya jamin, (mereka) tidak akan kembali. Saya bersikeras dalam hal ini bahwa kita tidak boleh melupakan tindakan-tindakan yang akan mengacau demokrasi, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi setiap orang tanpa memandang asal-usulnya, dan pertanggung jawaban yang jujur pemerintah kepada rakyat", jawab Presiden (Kompas, 27 Juni 2000).

Walaupun dalam wacana mengedepankan penegakan hukum dan supremasi hukum, Abdurrahman Wahid sering mengemukakan pernyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai supremasi hukum. Ketika menyangkut penanganan kasus mantan Presiden Soeharto, Abdurrahman Wahid menegaskan akan ada pengadilan untuk itu. Ketika ada tuduhan terhadap dirinya, Abdurrahman Wahid mengkontra dengan wacana agar dibuktikan secara hukum. Nilai supremasi hukum ini ternyata dia abaikan karena seringkali Abdurrahman Wahid membuat pernyataan yang intinya menuduh satu atau sekelompok orang. Berikut adalah satu di antara banyak pernyataan Abdurrahman Wahid yang mengandung tuduhan dan bersilang-sengkarut dengan nilai penegakan dan supremasi hukum.

Presiden Abdurrahman Wahid hari Sabtu (1/7) mengungkapkan, sesuai dengan laporan intelijen yang diperolehnya, biang kerok dari banyak persoalan akhir-akhir ini ternyata berada di MPR/DPR. "Hanya karena bukti-buktinya belum ditemukan", kata Presiden, "orang tersebut masih bisa berkeliaran dan belum bisa diinterogasi Kejaksaan Agung".

Pada hari yang sama Presiden juga telah menandatangani persetujuan agar beberapa anggota DPR/MPR diperiksa karena bukti-buktinya sudah cukup. Namun, Presiden tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dan dalam konteks apa para anggota DPR/MPR akan diperiksa.

Pernyataan Presiden itu muncul dalam rangkaian jawaban terhadap pertanyaan Martin Manurung, mahasiswa Fakultas Ekonomi UI, pada dialog pada sesi akhir pertemuan dua hari Forum Rembuk Nasional (FRN) di Kuta, Bali. Pada dialog itu, Martin Manurung bertanya apakah penyelesaian kasus KKN mantan Presiden Soeharto akan dilaksanakan dengan pendekatan hukum atau silaturahmi.

Abdurrahman menegaskan, "Soeharto akan diadili". Hal itu yang kini terus diupayakan oleh Kejaksaan Agung. Pada kesempatan yang sama, kata Presiden, melalui Menteri Pertambangan SB Yudhoyono pihaknya bernegosiasi dengan putra-putri Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo, tentang pengembalian harta Soeharto yang diperoleh dari proses KKN (Kompas, 2 Juli 2000).

Optimisme berlebihan merupakan sifat, kalau bukan nilai, yang banyak muncul dalam pernyataan atau ujaran yang dibuat oleh Abdurrahman Wahid. Dimulai dari yang paling terkenal, "gitu aja kok repot", hingga kalau sudah itu "bereslah semuanya". Semua itu menggambarkan sifat reduksionis Abdurrahman Wahid, sehingga masalah-masalah tidak jelas lagi skala prioritasnya. Di mata Abdurrahman Wahid masalah sebesar apa pun menjadi tampak kecil. Berikut adalah contoh pernyataan bagaimana Abdurrahman Wahid mengecilkan persoalan yang demikian kompleks dengan mereduksinya dengan menawarkan penanganan para biang kerok.

Presiden juga sudah menandatangani perpanjangan masa jabatan seorang duta besar. Usul itu datang dari satu lembaga kepada Departemen Luar Negeri untuk membantu mengurus soal harta Soeharto itu.

Dengan demikian, kata Presiden, selain ada kepuasan dari sisi hukum, juga ada manfaat dari sisi lain. "Oleh karena itu, saya mohon jeda atau keringanan waktu supaya tercapai dua-duanya sampai sidang umum MPR. Berilah kami kesempatan. Doakan segera selesai dengan memuaskan", kata Presiden.

"Jadi, Soeharto tetap ke pengadilan. Hari ini saya sudah menandatangani persetujuan beberapa anggota MPR/DPR akan diperiksa karena bukti-bukti sudah cukup. Ada satu orang yang kakap... sampai sekarang belum ketemu bukti-buktinya. Semua ini biang keroknya itu dia.

Kalau dia masuk, bereslah semuanya. Itu sepanjang informasi intelijen yang saya terima", kata Presiden. Adapun dialog atau silaturahmi, menurut Presiden, itu adalah pelengkap dari proses hukum (Kompas, 2 Juli 2000).

Kritisisme sebagai bagian dari hak berbicara tidak hanya dianjurkan oleh Abdurrahman Wahid, tetapi dia sendiri sudah melakukannya jauh sebelum menjadi presiden. Sikap dan pernyataannya Abdurrahman Wahid yang sering cukup keras, bahkan terhadap lembaga yang memberikan mandat kepadanya, menunjukkan betapa kritisisme merupakan wacana yang tidak hanya terus-menerus dikembangkan tetapi dipraktikkan oleh Abdurrahman Wahid. Dimulai, misalnya, dengan ungkapan bahwa para anggota MPR seperti murid taman kanak-kanak, hingga kritiknya terhadap anggota MPR yang dia nilai cenderung berpolitik sendiri. Berikut adalah contoh kutipan yang mencerminkan muatan kritisisme dalam wacana politik Abdurrahman Wahid.

Menyinggung protes Amien, Presiden mengatakan bahwa dalam pandangan eksekutif, Tap MPR tentang penggantian Kapolri itu baru efektif jika sudah diundangkan dalam lembaran negara.

"Jadi, (dalam masalah ini) harus diketahui kalau hal tersebut (diundangkan dalam lembaran negara, Red) tidak pernah terjadi. Karena itu, tidak bisa begitu saja menyalahkan eksekutif. MPRnya sendiri harus membikin PR. Jangan hanya sibuk berpolitik sendirian", tandas presiden yang langsung mendapat aplaus panjang hadirin.

Dia mengaku telah menggunakan hak prerogatifnya dalam memberhentikan Rusdihardjo. Sebab, sampai sekarang, Tap MPR tentang itu dinilainya belum berstatus sebagai landasan hukum.

"Tapi, harus dimengerti bahwa hal itu kita ambil karena kondisinya memang sangat mendesak. Tapi toh begitu, saya tetap kompromi dengan menghubungi Bang Akbar", tegasnya (Jawa Pos, 23 September 2000).



Sekali lagi, kebebasan berbicara bahkan yang paling kritis sekalipun, merupakan butir muatan wacana politik Abdurrahman Wahid yang tidak hanya dia sendiri yang mempraktikkan, tetapi juga dia buka lebar-lebar kesempatan untuk itu. Ini dilakukan dengan menyilakan para pengkritiknya untuk terus berbicara. *Vox populi vox dei*, ungkapan yang sering dia kutip ini dia jadikan sebagai tolok ukur akhir dari penilaian masyarakat terhadap seorang pejabat publik hasil pemilihan (*elected officer*). Berikut adalah kutipan yang menggambarkan penonjolan nilai kebebasan berbicara dan kritisisme Abdurrahman Wahid.

Presiden mengaku tahu bahwa langkahnya tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman dan kritik keras dari masyarakat. Tapi, lagi-lagi, dia mengaku tidak peduli. Bahkan, presiden menyilakan pengkritiknya terus melakukan kritik, baik di media cetak maupun elektronik.

"Kalau mau hukum saya, silakan sekarang. Kalau mau ngomong, silakan ngomong di koran. Saya tak pernah bantah kok. Di TV, juga tidak (saya bantah). Silakan setiap orang bikin penilaian. Tapi, nanti pada waktunya, masyarakat yang akan beri penilaian dalam bentuk pemberian suara. Dan, saya yakin, saya akan menang", ujar presiden semangat.

Betulkah Rusdihardjo menolak menangkap Tommy? Kapolri yang baru saja dilorot itu pasti membantahnya. "Sebagai polisi profesional, tidak mau menangkap begitu saja seseorang tanpa cukup bukti", ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam.

Menurut dia, Tommy Soeharto maupun Habib Ali Ba'agil yang disebut-sebut presiden, polisi dalam penyelidikannya belum menemukan cukup bukti. Pertimbangan itulah yang menyebabkan dia tidak mau main asal tangkap seseorang yang belum jelas bukti-buktinya.

Rusdihardjo membantah tidak berani menangkap Tommy hanya karena alasan keluarga Cendana. Menangkap seseorang tidak bisa sembarangan. "Kalau sampai polisi salah tangkap, risikonya sangat berat", tambahnya.

Risiko itu akan berakibat buruk bagi kredibilitas penegak hukum. Sebagai penegak hukum yang profesional, polisi tetap akan melakukan tugas sesuai dengan jalur hukum. Sebab, jika salah tangkap, polisi justru

bisa dituntut balik oleh orang yang ditangkap dengan delik pencemaran nama baik (Jawa Pos, 23 September 2000).

Tidak hanya satu atau dua kali, apabila Abdurrahman Wahid mengambil keputusan publik, dia bersikukuh bahwa keputusan itu dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dia miliki sebagai presiden. Frekuensi reshuffle yang sangat tinggi selama kepemimpinan Abdurrahman Wahid memang sering menimbulkan kritik, tidak hanya dari komponen-komponen masyarakat tetapi juga dari kalangan legislatif. Siapa pun, termasuk anggota DPR dan wakil presiden, boleh memberikan saran atau malah mengajukan kritik, tetapi Abdurrahman Wahid selalu menyatakan bahwa keputusan diambil sesuai asas otoritas dan otonom. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid sehubungan dengan keputusannya untuk memberhentikan Rusdihardjo dan mengangkat Bimantoro sebagai Kapolri.

Presiden Abdurrahman Wahid benar-benar mengambil langkah berani. Di tengah derasnya kritikan, ia kemarin tetap melantik Komisaris Jenderal Pol S. Bimantoro menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Rusdihardjo yang dicopot.

Pelantikan ini memang terkesan tergesa-gesa. Semula presiden berencana melantik Bimantoro Senin sore setelah siang harinya melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR. Wapres pun memberikan saran agar pelantikan dilakukan Senin.

Mengapa dipaksakan Sabtu? Presiden mengatakan mempunyai alasan yang mendesak. Yakni, merasa gerah karena di saat lowongnya jabatan Kapolri, enam tersangka insiden Atambua lepas. Padahal, presiden kini sedang mengirim utusan ke B, yakni Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono dan Menlu Alwi Shihab, untuk meyakinkan B agar tidak mengirim utusannya ke Atambua.

"Dengan susah payah utusan kita menggagalkan rencana DK B untuk mengirim pasukan membawa misi ke Atambua. Tetapi, tiba-tiba ada peristiwa pelepasan tersangka insiden Atambua", ujar presiden.

Menurut Wahid, agar dirinya tidak dituduh meremehkan resolusi 1319 DK B, mantan Ketua Umum NU ini memilih mempercepat melantik Bimantoro menjadi Kapolri. Tujuannya agar Bimantoro bisa menangkap kembali tersangka insiden Atambua yang dilepas Polda NTT itu (Jawa Pos, 24 September 2000).

Seminggu kemudian kritik dan pertanyaan masih saja ada yang mengajukan. Namun Abdurrahman Wahid tetap menegaskan bahwa apa yang dilakukan, termasuk wacana di balik keputusan tersebut, sudah tepat dan dia nilai benar-benar bisa memberikan dampak sebagaimana diharapkan. Karena itu, Abdurrahman Wahid pun yakin bahwa sebagian besar anggota MPR tetap mendukungnya dan memastikan diri terbebas dari tuntutan mundur yang "diagendakan" dalam SI MPR. Berikut adalah pernyataan Abdurrahman Wahid, khususnya tentang keyakinannya bahwa dia akan lolos dari tuntutan untuk mundur dari jabatan Presiden.

Presiden mengatakan apa yang dilakukan dirinya selama ini termasuk pencopotan Kapolri adalah sudah tepat dan terbukti mulai dapat menyelesaikan permasalahan bangsa saat ini. Dengan tegas Gus Dur menegaskan dirinya optimis bila Sidang istimewa tersebut benar-benar terjadi dirinya pasti berhasil dan lolos dari jeratan pencopotan. "Karena sebagian besar anggota MPR mendukung saya", ujar Gus Dur yakin (Tabloid Nasional, 13 - 20 Oktober 2000).

Dalam batas ujaran-ujaran yang dikemukakan dalam berbagai kesempatan, khususnya ketika menghadapi kritik baik dari kalangan legislatif maupun komponen masyarakat lainnya, Abdurrahman Wahid selalu bersandar kepada dua nilai yang sering diwacanakan, yaitu: akuntabilitas dan kedaulatan rakyat. Ketika keputusan Abdurrahman Wahid untuk menunda pemeriksaan tiga pengusaha, yakni Marimutu Sinivasan, Prajogo Pangestu, dan Sjamsul Nursalim,

Abdurrahman Wahid pun menggunakan wacana akuntabilitas publik dan kedaulatan rakyat sebagai sandarannya. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid tentang SI yang dia sebut tidak jadi persoalan sepanjang dikehendaki oleh rakyat, serta masalah penghentian pemeriksaan kasus ketiga pengusaha tersebut.

Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan tidak khawatir terhadap permintaan beberapa orang agar dia mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Bahkan, Presiden mempersilakan agar Sidang Istimewa (SI) MPR digelar bila rakyat memang menghendakinya.

Presiden menyampaikan pernyataan itu menjawab pertanyaan seseorang yang mengikuti dialog usai shalat Jum'at di Masjid Baiturrahim di sebelah barat Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10).

Dalam acara yang dipandu Kepala Protokol Kepresidenan Wahyu Muryadi, Presiden juga menjelaskan soal penundaan penuntutan terhadap tiga pengusaha, yakni Marimutu Sinivasan, Prajogo Pangestu, dan Sjamsul Nursalim.

"Saya mengambil tindakan itu atas nasihat para ekonom. Bukan pendapat saya pribadi. Ini kebijaksanaan. Saya katakan, nanti dalam pemilihan umum, hal ini saya pertaruhkan", kata Presiden (Kompas, 28 Oktober 2000).

Penilaian akan kinerja bukan di tangan para anggota legislatif, tetapi di tangan rakyat. Acap dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid bahwa dia akan mempertanggung-jawabkan segala keputusan dan kebijakannya kepada rakyat. Betapapun Abdurrahman Wahid khilaf bahwa sistem pemilihan Indonesia yang menempatkan dirinya menjadi presiden masih menggunakan sistem perwakilan. Mandat yang diterima oleh Abdurrahman Wahid tidak secara langsung berasal dari hasil pemilihan umum, melainkan dari MPR. Melengkapi ungkapan-ungkapan lainnya, berikut adalah pernyataan yang menggambarkan muatan wacana kedaulatan rakyat.

Ia menegaskan, apa yang telah dilakukannya berkaitan dengan keinginannya menyejahterakan rakyat. "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpin harus terkait langsung dengan kemaslahatan dan kesejahteraan. Jadi, saya akan bertanggungjawabkan. Kita tidak usah berpolemik", ujar Presiden (Kompas, 28 Oktober 2000).

Kebebasan, dalam arti kemerdekaan untuk melakukan apa-apa yang dinilai sebagai baik dan sewajarnya, merupakan nilai lain yang sering muncul dalam berbagai pernyataan Abdurrahman Wahid. Tampaknya Abdurrahman Wahid sekali lagi khilaf bahwa ada perbedaan antara kedudukannya sebagai pribadi yang merdeka dengan kedudukannya sebagai seorang pejabat publik tertinggi di sebuah negara. Dalam paktiknya, Abdurrahman Wahid diidentikkan dengan sosok yang mampu mendekonstruksi sejumlah konvensi, misalnya aturan protokoler kepresidenan, yang relatif mapan.

Sebagai pribadi memang tidak ada masalah bagi Abdurrahman Wahid untuk bertemu dengan siapa pun dan kapan pun, tetapi sebagai presiden tentu akan menimbulkan kecaman apabila menemui seseorang yang berstatus sebagai nara pidana. Tentu sangat berbeda bagi seorang presiden, apakah akan menemui seorang nara pidana atau bertemu dengan warga negara yang lain. Persoalannya, justru oleh Abdurrahman Wahid antara Tommy Soeharto dengan warga negara biasa dipandang secara sama.

Mengenai pertemuannya dengan Tommy Soeharto, Presiden mengatakan, ia telah berkali-kali menjelaskan hal itu. "Saya ketemu Tommy itu karena dia minta ketemu. Saya tanya ada apa? Masalah peninjauan kembali (PK). Saya katakan itu masalah Mahkamah Agung, bukan urusan pemerintah. Zaman sekarang, tidak lagi masanya pemerintah punya kekuasaan (terhadap peradilan)", jelas Presiden.

Presiden mengatakan, bukan hanya Tommy yang bertemu dengan dirinya. "Tiap hari orang yang bertemu saya banyak. Habib siapa itu, bisa

bertemu dengan saya kok. Habib siapa itu yang galaknya tidak karuan datang ke tempat saya, sampai saya usir karena dia itu pidato", ujarnya (Kompas, 28 Oktober 2000).

Apakah MPR merupakan representasi dari rakyat? Pertanyaan ini secara tidak langsung sering diajukan oleh Abdurrahman Wahid. Bahkan ketika MPR hendak menyelenggarakan SI yang agendanya adalah meminta pertanggungjawaban Abdurrahman Wahid, dia pun menyatakan tidak masalah sepanjang SI itu merupakan representasi rakyat Indonesia. Dengan ringan dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin menjadi presiden. Berikut adalah cermin ketidak-konsistenan baik antarwacana Abdurrahman Wahid maupun antara wacana dengan tindakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid.

Sementara itu, ancaman SI MPR kembali ditanggapi Gus Dur. Ia mempersilakan DPR mengusulkan SI, berkait dengan desakan dirinya agar mundur asal itu merupakan representasi keinginan rakyat Indonesia secara luas, sementara dia sendiri tak ingin menjadi Presiden.

"Sejak dulu saya tidak ingin menjadi presiden, kok", kata Gus Dur, dalam dialog usai salat Jumat di Masjid Baitul Rahim, kompleks Istana Merdeka Jakarta, (27/10).

"Kalau minta saya mundur, (terserah) rakyat. Rakyat tercermin dalam DPR", tambahnya. Penegasan itu menjawab pertanyaan seorang jamaah mengenai perseteruan Gus Dur dengan Ketua MPR Amien Rais.

Gus Dur menyatakan belakangan ini banyak yang tidak mengakui apa yang telah dilakukan pemerintah. "(Penilainnya) Terserah masing-masing. Rakyat yang menentukan dalam Pemilu", katanya (Surya, 28 Oktober 2000).

Dalam wacana politiknya, Abdurrahman Wahid menempatkan kedaulatan rakyat sebagai wacana politik tempat ia bersandar ketika menghadapi kritik tajam atas kinerja pemerintahannya. Misalnya, kendati indikator-indikator ekonomi secara objektif masih belum membaik, Abdurrahman Wahid dengan percaya diri

mengungkapkan telah terjadi banyak kemajuan. Bukan para kritisi ekonomi dan politik yang menurut Abdurrahman Wahid berkewenangan untuk menilai kinerja pemerintahannya, melainkan rakyat secara langsung. Itu pun, sejauh mengacu pernyataan Abdurrahman Wahid, harus ditunggu pada saat Pemilu mendatang yang dia pastikan akan dia menangkan. Berikut adalah wacana Abdurrahman Wahid yang menempatkan kedaulatan rakyat dan logika legitimasi hasil demokrasi langsung sebagai sandarannya.

Kepala Negara mengungkapkan banyak hal yang telah dilakukan pemerintah, meski investasi tidak bisa masuk sebagaimana yang diharapkan. Sejumlah kendala yang dihadapi berkaitan dengan itu, yakni keamanan nasional yang kurang terjamin, tidak ada stabilitas, birokrasi yang masih mewarisi tradisi Orde Baru dan perangkat hukum yang belum kondusif.

Kekurangan itu, katanya, diganti penggalakan ekspor. Presiden mengungkapkan rencana ekspor yang senilai 37 miliar AS, yang menurut IMF harus diubah menjadi 44 miliar dolar AS, sementara Menteri Perdagangan Luhut B. Panjaitan menyatakan nilai ekspor kini sudah mencapai 56 miliar dolar AS.

"Jadi dari semuanya ada kemajuan. Diterima atau tidak terserah pada rakyat. Urusan rakyat pada Pemilu mendatang, siapa pun tidak bisa bicara. Boleh ngomel apa pun. Tetapi, ya...itu", kata Gus Dur tidak menyelesaikan pernyataannya (Surya, 28 Oktober 2000).

Kebersatuan dan partisipasi otonom merupakan wacana lain yang disuarakan oleh Abdurrahman Wahid. Persatuan tanpa partisipasi otonom, dalam pandangan Abdurrahman Wahid, merupakan penindasan. Demikian pun partisipasi yang dimobilisasi oleh setiap bentuk "iming-iming", dia nilai sebagai sesuatu yang tidak terpuji, yang tidak dilandasi oleh keikhlasan. Berikut, tanpa mengesampingkan pujiannya terhadap Megawati, yang dikemukakan di depan pendukung Megawati, adalah pernyataan Abdurrahman Wahid yang

mencerminkan penghargaannya terhadap "kebersatuan" dan partisipasi otonom para pendukung PDI Perjuangan.

Sementara itu, dalam pidatonya selama 20 menit, Presiden Abdurrahman Wahid antara lain mengatakan, Megawati Soekarnoputri jauh lebih besar sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan ketimbang Wakil Presiden.

"Kebetulan tadi saya panggil Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, walaupun dia Wakil Presiden. Karena kalau saya sebut Wakil Presiden, sebenarnya dia jauh lebih kecil daripada kalau menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan", demikian Presiden, yang disambut tepuk gemuruh massa PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, katanya, sebutan itu memang pantas untuk Megawati Soekarnoputri dan ini tidak menurunkan derajat, tetapi justru menaikkan penghargaan kepadanya. "Mudah-mudahan PDI Perjuangan di bawah pimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri akan mencapai kejayaan lebih besar di masa datang, sebagai penerusan dari perjuangan Bung Karno yang sama-sama kita cintai", ujarnya, disambut tepuk gemuruh.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mencatat puluhan ribu orang yang datang ke Gelora Bung Karno ini bukan karena dibayar, tetapi karena keikhlasan dan spontan mereka.

"Karena itu, saya terus terang saja selalu heran kalau ada yang mengatakan, kita tidak memiliki rasa kebersatuan sama sekali. Karena kenyataannya, banyak orang berbondong-bondong datang. Saya yakin warga PDI Perjuangan yang datang ke sini tidak dibayar oleh siapa pun. Juga tadi pagi, juga tidak ada yang dibayar", kata Presiden lagi (Kompas. 15 Januari 2001).

Penegakan hak-hak masyarakat sipil, termasuk di dalamnya hak untuk berkegiatan politik dalam suasana demokratik, merupakan nilai yang secara diskursif berupaya diintroduksi oleh Abdurrahman Wahid. Tentu ini tidak mengherankan, sebab jauh hari sebelum Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dia adalah ketua Forum Demokrasi. Belakangan, beberapa rekan dia ketika masih di forum tersebut juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan atau jabatan dalam



pemerintahan Abdurrahman Wahid. Marsilam Simanjuntak adalah salah satu dari anggota Forum Demokrasi.

Walaupun tidak dalam ungkapan "suara rakyat adalah suara Tuhan", tetapi "suara rakyat adalah suara yang menentukan", tampak jelas bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat merupakan wacana yang acapkali dikemukakan Abdurrahman Wahid. Namun demikian, di balik keseringan mewacanakan kedua butir kaidah politik ini, Abdurrahman Wahid cenderung memandang dirinya sebagai presiden yang seolah-olah memperoleh legitimasi politiknya secara langsung dari rakyat melalui Pemilu Presiden. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid di hadapan para pendukung PDI Perjuangan yang mengedepankan penegakan dan perlindungan hak-hak sipil yang dia akui sangat diabaikan selama Pemerintahan Orde Baru, serta tekadnya mewujudkan demokrasi dan rekonsiliasi nasional.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengingatkan penindasan terhadap para anggota partai di awal Orde Baru berdiri. "Pada waktu kita menjadi bulan-bulanan pada awal-awal, apa yang disebut Orde Baru, kita menyaksikan waktu itu, bagaimana anggota-anggota partai politik diinjak-injak atau bahkan dibunuh oleh aparat. Paling tidak di tangan saya ada ribuan kasus, di mana warga NU (Nahdatul Ulama) disiksa oleh mereka yang tidak mengerti dan menegakkan kekuasaan secara keliru", ujarnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan seorang kiai yang hendak pidato di Indramayu terpaksa membatalkan niatnya karena tempat pertemuannya diobrak-abrik oleh para pemuda Siliwangi. "Beberapa banyak kaum ibu yang diperkosa oleh orang-orang yang sedang berkuasa waktu itu. Semuanya itu adalah pengorbanan yang diberikan rakyat kita", ujarnya lagi.

Kini, katanya, rakyat ini telah mencapai proses demokratisasi. "Di mana suara rakyat adalah suara yang menentukan, bukan suara siapa-siapa. Apakah dengan demikian, warga negara kita yang tadinya diinjak-injak, diperkosa bahkan dibunuh, lalu memiliki dendam. Tidak. Tidak ada dendam. Kita bersabar, tetapi juga berketetapan. Kita bersabar tetapi berkemauan keras untuk mewujudkan demokrasi di negeri ini", ujarnya (Kompas. 15 Januari 2001).

Profesionalisme adalah wacana lain yang hendak diintroduksi oleh Abdurrahman Wahid. Salah satu ciri sikap profesional adalah mampu membedakan antara satu urusan dengan urusan lain berdasarkan pembidangan yang jelas. Persoalan hukum yang sering bersentuhan dengan persoalan politik, misalnya, berupaya ditegaskan perbedaannya oleh Abdurrahman Wahid. Sebab, sejauh memperhatikan pernyataan-pernyataan Abdurrahman Wahid, persoalan politik memiliki implikasi politik, sedangkan persoalan hukum memiliki implikasi hukum.

Lembaga Perwakilan, menurut Abdurrahman Wahid, hanya berhak mempersoalkan masalah politik, karena dalam lembaga perwakilan seorang pejabat politik memberikan pertanggung-jawaban politiknya, sedangkan dalam lembaga peradilan seorang tertuduh atau terdakwa berupaya memberikan pertanggung-jawaban hukum. Bagi Abdurrahman Wahid, sebelum dia menyampaikan sesuatu, mana harus jelas terlebih dulu hakikat dari forum tersebut. Karena itu pula, Abdurrahman Wahid mempertanyakan kepada sejumlah anggota Pansus Kasus Bulog dan Sumbangan Sultan Brunai, forum apa sebenarnya yang sedang digelar di JCC. Begitu para anggota Pansus tidak bisa memberikan klarifikasi tentang hakikat forum tersebut, maka Abdurrahman Wahid pun meninggalkannya tanpa sepatah kata pun.

Di Istana Merdeka Jakarta, giliran Presiden mengadakan jumpa pers. Kepada wartawan, Presiden mengatakan, pertemuan dengan Pansus DPR terhenti karena Pansus tidak bisa memberi klarifikasi apakah pertemuan itu forum politik atau forum hukum.

"Saya minta klarifikasi, yang akhirnya tidak diberikan apakah ini forum politik ataukah sebuah forum hukum. Karena tidak diberikan dengan sendirinya saya tidak ada guna meneruskan pertemuan dengan

Pansus, dan saya pulang setelah jelas bahwa forum tidak bisa memberikan jawaban", ujar Presiden kepada wartawan di ruang pers, Istana Merdeka, setelah bertemu Pansus.

Presiden menambahkan, dirinya sudah memberikan keterangan. "Tetapi saya tidak ingin memberitahukan apa substansi keterangan saya itu. Kedua, kembali lagi ini forum politik atau tidak. Kalau itu sifatnya politik, boleh", tegas Presiden yang didampingi Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak dan Sekretaris Negara Djohan Effendy.

Simanjuntak menjelaskan, kepada forum, Presiden meminta kejelasan legal standing dari Pansus. "Tadi sudah dijelaskan bahwa karena status dari forum Pansus tadi tidak ditegaskan, maka tanya jawab tidak diteruskan", ujar Simanjuntak.

Ketika ditanya forum politik seperti apa, Presiden menjawab, "Forum politik yang dimaksudkan di sini adalah kita, kan, harus menegakkan demokrasi. Menegakkan demokrasi itu harus bersama-sama. Jadi, dalam forum itu saya berikan penjelasan panjang lebar, apa itu hakekat dari forum itu sendiri, yaitu kita ingin supaya peristiwa yang disebut sebagai Buloggate dan Bruneigate itu mendapatkan kejelasan, yang sudah saya berikan keterangan".

"Dalam hal ini keterangan ini tergantung, ada yang puas dan ada yang minta keterangan tambahan. Tetapi, tetap saja dalam konteks politik, dalam arti bahwa itu tidak akan digunakan secara legal kepada siapa pun. Sebab, Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 1954 sudah jelas mengatakan bahwa Panitia Angket tidak dapat mempergunakan keterangannya sebagai suatu bukti hukum", ujarnya.

Presiden mengutip Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 1954. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 26 maka segala keterangan yang diberikan kepada Panitia Angket tidak dapat dipergunakan bukti dalam peradilan terhadap saksi atau ahli itu sendiri yang memberikan keterangan atau terhadap orang lain.

Mengutip Pasal 23 (2) UU yang sama, Presiden mengatakan, "Jadi, tidak bisa istilahnya selfi-criminating. Nah, kita sudah tahu dengan jelas, beberapa anggota dari Pansus telah menggunakan forum dan menggunakan katakana media, sebagai lahan untuk menghancurkan wibawa Presiden. Jadi, yang terjadi adalah character assassination".

Pasal 23 (2) berbunyi: Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu.

Apakah dengan pertemuan ini sudah tidak ada masalah, dengan tersenyum Presiden menjawab, "Saya tidak pernah menganggap ada masalah. Jadi, selesai atau tidak selesai, itu bukan urusan saya" (Kompas, 23 Januari 2001).

Anti-kekerasan dan toleransi multi-kulturalisme juga merupakan wacana yang sering diangkat oleh Abdurrahman Wahid. Semua itu harus diwujudkan melalui dialog terus-menerus antar berbagai segmen masyarakat yang berbeda. Pada intinya, semua orang harus saling menghormati dan mendukung demi mewujudkan tujuan bersama. Ini pula yang tampak dari pernyataan Abdurrahman Wahid ketika memberikan sambutan dalam suatu forum silaturahmi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid dalam forum tersebut.

Senin malam, Presiden Abdurrahman Wahid menghadiri acara yang digelar forum silaturahmi organisasi massa Islam, pemuka agama, tokoh TNI/Polri, serta tokoh nasional di Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden mengemukakan, saat ini bangsa Indonesia harus mengembangkan etika dalam berdialog satu sama lainnya, bukan saling mencaci atau saling menjatuhkan. "Kita harus berada dalam suasana saling tenggang rasa, bukan saling menjatuhkan, tapi saling mendukung serta saling menolong", kata presiden (Kompas, 30 Januari 2001).

Apa optimisme, reduksionisme, atau malah kemasa-bodohan (*ignorance*) yang tersirat dari begitu banyak pernyataan Abdurrahman Wahid yang intinya menganggap sesuatu masalah yang sebenarnya cukup serius dengan begitu ringannya. Tersertakan dalam pernyataan-pernyataan berikut, adalah kecaman Abdurrahman Wahid terhadap berbagai bentuk usaha pengendalian kekuasaan (*controlling the power*) yang dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan. Demonstrasi itu, menurut Abdurrahman Wahid adalah demonstrasi tiga kelompok "musuh" Abdurrahman Wahid ditambah sejumlah orang yang bersedia dibayar. Mereka bukan partisipan otonom sebagaimana telah ditanggapi secara positif oleh Abdurrahman Wahid.

Namun, tentang ucapan Toety Herati bahwa sekarang Presiden sedang menghadapi kesulitan, Presiden mengatakan hal ini harus ditinjau dari perspektif lain. "Dari sudut kawan-kawan ini dibilang kesulitan, tapi saya tenang-tenang saja, karena bagi saya tidak sulit. Sampai ada orang dari Brussel datang mengatakan kepada saya, saat ini situasinya membahayakan. Bahaya apa, wong saya melihat tidak ada bahaya apa-apa. Kalau ada demonstrasi di depan Istana, ya, karena demonstrasi ada yang membayar", ujarnya.

Presiden mengatakan tidak kaget dengan situasi saat ini yang dihadapinya. "Ini adalah gabungan dari beberapa pihak terdiri dari mereka yang takut berhadapan dengan hukum, kedua mereka ingin segera ambisi politik pribadinya segera tercapai, ketiga orang-orang yang mempertahankan status quo, dan keempat adalah orang-orang ikut-ikutan yang dibayar", demikian Presiden.

Abdurrahman Wahid mengatakan, sudah tahu siapa-siapa orang-orang yang termasuk dalam empat kelompok itu. "Saya sudah tahu orangnya, tidak perlu ramai-ramai. Cara menghadapinya dengan cara main silat. Maka saya bermain-main dengan seorang wartawan yang bertanya, jurus apa yang Anda pakai. Jurusnya sederhana saja, sekarang baru saya pakai satu. Jadi masih ada 17 langkah lagi. Tidak gampang membunuh seorang Presiden. Maka saya nyatakan, tidak usah khawatir. Lihat saja nanti", tegasnya (Kompas, 5 Februari 2001).

Setahun lebih setelah Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden, goncangan terhadap jabatannya semakin kentara. Tetapi, kebiasaan Abdurrahman Wahid untuk begitu percaya diri bahwa dia masih didukung oleh rakyat, mendorong dia untuk tetap yakin bahwa dia bisa menjabat sampai akhir masa jabatannya habis. Dalam masa jabatannya itu, menurut Abdurrahman Wahid, sekurang-kurangnya ada satu agenda yang benar-benar ingin diwujudkan, yaitu: demokrasi. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid.

Ia memperkirakan dengan penuh keyakinan bisa menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden. Setelah mengutip ayat-ayat suci, Presiden mengatakan, ia tidak akan meninggalkan situasi sulit terhadap rakyat. "Mudah-mudahan dalam periode saya menjadi Presiden, paling pokok terjadi transisi menuju demokrasi", ujarnya (Kompas, 5 Februari 2001).

Kekuasaan formal (*authority*) menurut Abdurrahman Wahid harus disebarkan, harus dibagikan secara proporsional. Menindak-lanjuti Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000, selaku presiden Abdurrahman Wahid mengukuhkannya dalam Keputusan Presiden nomor 121/2000. Kebijakan ini mengatur pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden. Walaupun pertimbangan-pertimbangan personal sangat mewarnai hubungan antara Abdurrahman Wahid dengan Megawati, menurut Abdurrahman Wahid semua harus tunduk pada kaidah politik tentang pembagian tugas dan wewenang. Semua itu, menurut Abdurrahman Wahid, harus dilakukan agar kinerja pemerintah segera bisa diperbaiki, terutama bidang ekonomi, sosial dan keamanan. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid mengenai bagaimana yang formal profesional harus lebih didahulukan daripada yang personal.

Presiden Abdurrahman Wahid meminta Wakil Presiden (Wapres) Megawati Soekarnoputri untuk lebih berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan baik Presiden berada di dalam maupun di luar negeri. Berkaitan dengan adanya aksi mahasiswa yang meminta Presiden mundur, Abdurrahman Wahid menegaskan sikapnya tidak akan mundur.

Permintaan Presiden tersebut dimaksudkan agar kesatuan dan sinergi kepemimpinan nasional dapat ditingkatkan sebagai upaya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dan pemantapan transisi ke arah negara yang lebih demokratis. Dalam kaitan itu, Wapres juga diminta memberikan laporan kepada Presiden tentang keputusan atau langkah-langkah atau kebijakan yang telah diambil dari waktu ke waktu.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet di Bina Graha, Jakarta, senin (12/3), yang berlangsung pukul 09.00-15.00. Sidang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri serta dihadiri para menteri, Panglima TNI Laksamana Widodo AS, namun tidak dihadiri Kepala Polri Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro.

"Selama ini, Ibu Wapres dan saya sama-sama sungkan. Sekarang sudah berubah", kata Presiden kepada wartawan di halaman belakang Bina Graha setelah sidang kabinet.

Soal pembagian tugas Presiden dan Wapres sudah diamanatkan MPR melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000. Hal itu juga dikukuhkan dalam Keputusan Presiden nomor 121/2000 (Kompas, 13 Maret 2001).

Kalau di depan sudah banyak dikutip butir demokrasi sebagai salah satu muatan utama wacana politik Abdurrahman Wahid, sejalan dengan itu Abdurrahman Wahid juga mengedepankan konstitusionalisme dan integritas wilayah RI sebagai butir wacana politiknya. Belajar dari kegagalan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa salah satu tugas pentingnya sebagai presiden menurut UUD 1945 adalah menjaga integritas nasional. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid berkenaan dengan tugas konstitusionalnya tersebut.

Menjawab pertanyaan tentang adanya tuntutan mahasiswa agar Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya sebagai Presiden, ia mengatakan", Mahasiswa yang menuntut mundur itu jumlahnya kecil dibandingkan yang lain-lain".

Jadi Anda tidak akan mundur? Tanya wartawan lagi. Menurut Presiden, dirinya tidak akan mundur karena tugasnya sebagai Presiden menjaga integritas wilayah Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Kompas, 13 Maret 2001).

Konstitusionalisme, yang termasuk di dalamnya adalah adanya asas pengambilan keputusan berkewenangan (otoritas) kembali ditampilkan oleh Abdurrahman Wahid sebagai salah satu wacana yang dia kemukakan. Wacana ini acap kali dikemukakan ketika Abdurrahman Wahid mendapatkan serangan karena keputusan-keputusannya yang tidak melibatkan pihak legislatif. Masalah reshuffle

kabinet yang dalam sejarah RI paling banyak dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, misalnya, selalu disandarkan pada kewenangannya sebagai presiden. Karena Indonesia menurut UUD 1945 merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, maka menurut Abdurrahman Wahid legislatif tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan keputusannya untuk me-resuffle atau tidak kabinetnya. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid.

Ditanya tentang kemungkinan adanya reshuffle, Presiden mengatakan", Ini bukan pemerintahan partai dan bukan pemerintahan parlementer. Ini pemerintahan berdasarkan UUD 1945" (Kompas, 13 Maret 2001).

Kritik yang tiada henti ditujukan kepada pemerintahan Abdurrahman Wahid menyangkut penyelesaian berbagai kasus KKN. Padahal, selain MPR yang mengangkat Abdurrahman Wahid memiliki ketetapan tersendiri mengenai itu, cita-cita reformasi di antaranya adalah penegakan dan supremasi hukum. Abdurrahman Wahid sebenarnya sangat menyadari tuntutan tersebut. Karena itu, Abdurrahman Wahid pun tidak hanya membangun wacana bahwa pemerintahnya sudah berupaya melaksanakan penegakan dan supremasi hukum, tetapi juga perlu menampilkannya sebagai panggung yang bisa dicitra secara langsung oleh masyarakat. Betapa cukup cepat, bila dibandingkan dengan kasus-kasus lain, penetapan vonis terhadap Sapuan yang juga melibatkan dirinya dalam kasus Bulog, menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid pun melakukan politik citra (*politics of image*).

Di hari yang sama, Presiden juga memanggil Jaksa Agung Marzuki Darusman, Menteri Kehakiman dan HAM Baharuddin Lopa, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro. Dalam pertemuan itu Presiden mengatakan, "Pemerintah sangat berkepentingan untuk dengan cepat



membawa kasus KKN ke pengadilan". Langkah ini diduga sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki citra penegakan hukum sehubungan dengan jatuhnya memorandum DPR.

Sesuai jadwal, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Lalu Mariyun hari Selasa ini akan menjatuhkan vonis atas diri terdakwa mantan Wakil Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sapuan. Sebelumnya, Sapuan dituntut 18 bulan penjara. Vonis pengadilan atas diri Sapuan ini, paling tidak akan memberikan gambaran versi pengadilan soal fakta terjadinya skandal keuangan Yayasan Bina Sejahtera Bulog yang melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid (Kompas, 20 Maret 2001).

Dua minggu menjelang dikeluarkannya Memorandum II oleh DPR, Tempo (15 April 2001) menurunkan laporan yang sangat memojokkan Abdurrahman Wahid. Sejauh mengutip laporan Tempo tersebut, maka bisa dikesan betapa Abdurrahman Wahid telah mengobrak-abrik berbagai wacana positif yang dia kembangkan sendiri. Hubungan dengan Megawati, legislatif FPDIP, termasuk dengan Taufik Kiemas sudah tidak tertolong lagi. Akan halnya hubungan dengan Poros Tengah yang dulu berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden, sudah cukup lama "dirusak" oleh Abdurrahman Wahid yang dimulai dengan pencopotan Yusuf Kalla dari jabatannya sebagai Menkokesra bersamaan dengan Laksamana Sukardi yang berasal dari kubu Megawati.

Kompetensi, integritas nasional, dan kebersamaan yang secara diskursif sering digunakan sebagai butir wacana politik Abdurrahman Wahid, memang tetap dilontarkan, tetapi jelas bahwa wacana-wacana ini bukan berhasil memantapkan (membantu mempertahankan kekuasaan) melainkan justru memperkuat pihak lain untuk melakukan pengendalian (*control*) terhadap kekuasaan Abdurrahman Wahid. Berikut adalah kutipan sejumlah ujaran

Abdurrahman Wahid yang oleh para analis politik disebut sebagai ungkapan "bunuh diri" Abdurrahman Wahid.

Dari transkrip rekaman yang didapat TEMPO, Presiden menyatakan", Megawati Soekarnoputri itu tidak ada apa-apanya. PDI-P itu menang di pemilu karena saya yang bantu".

"Presiden meragukan kemampuan Mega", begitu besar-besar ditulis judul koran esok harinya. Jika benar, pernyataan ini memang tergolong "luar biasa" karena posisi Presiden Abdurrahman sebenarnya justru bergantung pada Megawati. Apalagi, kalimat penuh percaya diri itu dikeluarkan cuma sebulan sebelum Dewan bersidang untuk memutuskan ke luar-tidaknya Memorandum Kedua. Dengan ucapan "keras" itu, berbagai lobi yang tengah digelar untuk mengupayakan sebuah kompromi politik ke politik baru pun terancam buyar (lihat boks).

"Cibiran" Presiden Abdurrahman buat Mega itu sesungguhnya bukan sekali ini terjadi. Saat bertemu pengurus Forum Indonesia Damai, 3 Januari lalu, Presiden juga bilang bahwa Mega terlalu mudah disetir suaminya, Taufik Kiemas, demi segala kepentingan bisnisnya. Kesimpulannya, Mega tak layak jadi Presiden. "Kalau dipaksakan, nanti yang jadi Presiden, ya, si Taufik itu", katanya menirukan.

Tertera dalam transkrip, Presiden Abdurrahman lalu menjawab", Saya tidak bisa turun. Kalau saya turun, Indonesia akan pecah. Lima daerah sudah menyatakan akan memisahkan diri. Antara lain Madura, yang mempunyai warga sekitar 10 juta dan tersebar dimana-mana. Bukannya saya tidak mau turun. Sebenarnya saya sudah malas jadi Presiden, tapi kalau saya turun, akan pecah perang saudara".

Komentar Presiden atas saran berbagi kekuasaan dengan Wapres juga terdengar kurang pantas. "Yang mesti dipertanyakan, Megawati Soekarnoputri itu orangnya bisa apa nggak? Saya bukannya nggak mau". Kata Presiden lagi", Dari dulu dia sudah mendesak Mega supaya menyusun berbagai konsep. Tapi Mega selalu menjawab, Anda (Abdurrahman, red) saja yang menyusun konsep, saya yang melaksanakannya". Pokoknya, kata Abdurrahman kemudian, "Saya tidak bisa terima usul-usul tentang pembagian kekuasaan, tentang mundur, dan sebagainya. Megawati Soekarnoputri itu tidak ada apa-apanya. PDI-P itu menang di pemilu karena saya yang bantu" (Tempo, 15 April 2001).

Selanjutnya, sebagai jalan keluar dari masalah kepresidenan, Abdurrahman Wahid membangun wacana yang teramat sulit untuk diwujudkan, yaitu percepatan Pemilu. Ini sebenarnya mencerminkan butir wacana sebelumnya,

bahwa rakyat merupakan penilai kinerja presiden. Abdurrahman Wahid merasa tidak harus mundur, dan tidak bisa mundur karena menurut Abdurrahman Wahid kinerja pemerintahannya masih cukup baik. Berikut adalah petikan wacana percepatan Pemilu yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid.

Menurut Abdurrahman, satu-satunya jalan pergantian kekuasaan yang bisa diterimanya adalah lewat percepatan pemilu", Tapi itu susah, karena memerlukan hukum darurat". Tuturnya lagi", Sampai sekarang, negara tetap utuh. Ekonomi berjalan baik. Birokrasi berangsur-angsur dibersihkan. Kok, saya disuruh mundur? Sudahlah, apa boleh buat. Sebenarnya saya sudah capek. Sebenarnya saya ingin berhenti. Tapi kalau gantinya begitu, ya, tidak bertanggung jawab kalau saya lepas" (Tempo, 15 April 2001).

Sosok Abdurrahman Wahid yang semula dinilai oleh banyak kalangan sebagai sosok sangat populis, mendorong Abdurrahman Wahid untuk merasa bisa menghayati apa kehendak rakyat kecil. Abdurrahman Wahid cenderung memisahkan begitu tegas antara elit dengan massa, sehingga ketika Abdurrahman Wahid terlibat konflik dengan sejumlah elit politik, misalnya, melalui pernyataan-pernyataannya dia melakukan kritik sangat tajam terhadap para elit. Populisme, meskipun dalam taraf wacana, merupakan nilai yang sangat ditonjolkan oleh Abdurrahman Wahid. Sekurang-kurangnya, hingga ketika ada sejumlah elit mengajukan permintaan yang tidak sejalan dengan kebijakannya, maka Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa itu hanya kehendak para elit. Rakyat tidak menghendaki tuntutan itu. Tampaknya, sekali lagi, Abdurrahman Wahid khilaf bahwa sistem pemilihan Indonesia yang menempatkan dirinya menjadi presiden masih menggunakan sistem perwakilan. Berikut adalah contoh lain dari

pernyataan Abdurrahman Wahid yang memandang dirinya lebih populis daripada sejumlah elit politik lain.

Sekali lagi, Siswono meminta tanggapan tentang usul pembagian kekuasaan dengan Wapres. Presiden bersikukuh menyatakan tak bersedia. "Saya tahu persis rakyat tidak mau. Yang mau itu elit politik", tutur Presiden (Tempo, 15 April 2001).

Pemisahan antara yang personal dengan yang institusional, bahkan antara agama dengan politik (*secularization*) merupakan butir wacana politik lain dari Abdurrahman Wahid. Menurut Abdurrahman Wahid, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan negatif, maka itu merupakan urusan pribadi pelaku masing-masing, tidak terkait langsung organisasinya. Demikian pula, walaupun seseorang menjadi tokoh suatu organisasi agama, maka bila dia berkegiatan politik atau mungkin malah bertindak kekerasan, maka sebenarnya tidak bisa dikaitkan langsung dengan organisasi keagamaannya. Organisasi agama bukan organisasi politik, demikian kesimpulan dari sejumlah pernyataan Abdurrahman Wahid yang salah satunya tampak dari kutipan berikut.

Pada bagian lain, Presiden mengatakan, organisasi agama bukanlah organisasi politik. Karena itu Presiden mengingatkan agar masyarakat berhati-hati untuk tidak mengaitkan perbuatan seseorang dengan organisasi agama. Organisasi agama juga jangan diminta bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang berpolitik.

"Walaupun ada organisasi politik, tapi Pak Amien Rais ada organisasi agama, yaitu dari Muhammadiyah dan Akbar Tandjung dari NU. Tetapi, tidak berarti organisasi tersebut bertanggung jawab dengan perbuatan siapa pun, harus ada keputusan resmi dari organisasi itu", tegas Presiden. Bahkan Abdurrahman Wahid menyatakan, tidak ada organisasi agama apa pun, apakah NU, Muhammadiyah, HKBP, dan Wali Gereja yang menganjurkan kekerasan.

"Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan. Hati-hatilah. Apakah itu NU atau Muhammadiyah, janganlah langsung dikaitkan dengan orang yang berpolitik", kata Presiden (Kompas, 22 April 2001).

Sebagai tokoh yang memiliki latar belakang dan banyak bergaul dengan kalangan intelektual, Abdurrahman Wahid memiliki pemahaman mendalam terhadap berbagai dimensi kekerasan. Kekerasan tidak hanya berbentuk fisik-koersif, tetapi bisa pula berbentuk non-fisik simbolik. Hujat-menghujat antarelit politik, sebagai bentuk kekerasan simbolik pun tidak luput dari wacana politik Abdurrahman Wahid. Berikut adalah pernyataan, yang walaupun tidak langsung, menggambarkan betapa anti-kekerasan dalam wacana politik Abdurrahman Wahid juga mencakup kekerasan non-fisik simbolik.

Presiden Abdurrahman Wahid menginstruksikan kepada seluruh warga Indonesia, tanpa terkecuali, untuk menghentikan kebiasaan hujat-menghujat serta menghentikan segala bentuk tindak kekerasan dan saling menjatuhkan.

Penegasan Presiden itu disampaikan dalam pidato yang dibacakan Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar dalam acara Damai Negeriku yang diselenggarakan TVRI dan disiarkan langsung, Jumat (27/4) malam. Pidato Presiden itu berlangsung tiga hari menjelang berlangsungnya Sidang Pleno DPR, yang terbuka untuk menjatuhkan memorandum kedua.

Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa rakyat bangsa ini sangat merindukan kedamaian, kesejukan. Ia berharap pertemuan malam itu mampu mencairkan ketegangan yang selama ini terjadi sehingga bangsa ini kembali bersatu, negeri ini kembali jaya, dan Bumi Persada kembali berselimut damai.

Presiden Abdurrahman Wahid juga menyampaikan bahwa Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dengan tegas telah menginstruksikan kepada partainya agar menghentikan segala bentuk kekerasan.

Agar semua pihak tidak terjebak ke dalam perilaku saling menyalahkan, saling curiga, saling menghujat, dan saling menjatuhkan, Presiden memperlihatkan perjalanan sejarah bangsa ini, sejak dari pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, sampai dirinya (Kompas, 28 April 2001).

Hingga April 2001, banyak pujian disampaikan oleh Abdurrahman Wahid terhadap Megawati Soekarnoputri yang dia nilai telah menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan. Sikap Megawati Soekarnoputri dinilai oleh Abdurrahman Wahid benar-benar sesuai dengan kaidah kehidupan politik yang sangat penting, yaitu: keutuhan negara, kelestarian Pancasila dan integrasi nasional. Walaupun demikian, Abdurrahman Wahid juga mengklaim dirinya memiliki legitimasi cukup kuat, yang dia nilai sangat penting untuk menjaga keutuhan negara dan integrasi nasional. Abdurrahman Wahid mengklaim dirinya memiliki hubungan "cinta" dengan rakyat. Kalau Megawati Soekarnoputri hanya memiliki pendukung atau simpatisan partai, Abdurrahman Wahid tidak hanya merasa memiliki pendukung tetapi umat dan pengikut yang lebih dari sekadar simpatisan partai. Berikut adalah penjelasan langsung dari Abdurrahman Wahid yang menjadi penjelas terhadap pertanyaan mengapa Abdurrahman Wahid selalu merasa sebagai sosok yang sangat populis dan memiliki legitimasi untuk menjadi Presiden.

Presiden mengakui, dari hasil perhitungan suara, Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri. "Mestinya beliau yang pantas menjadi Presiden sekarang ini, karena beliau adalah pemimpin partai yang memenangkan pemilu dengan memperoleh suara jauh lebih besar dibandingkan dengan partai-partai lainnya", ujarnya.

Namun, lanjutnya, mengingat ketegangan politik pada saat itu, bangsa kita seakan berada di ambang perpecahan. Kemudian, Poros Tengah yang diprakarsai oleh Amien Rais (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat) mencari jalan keluar dari kemelut yang tengah menghimpit bangsa.

Presiden Abdurrahman Wahid pun mengaku dirinya dipilih untuk menjadi Presiden. Pada waktu itu, dirinya dipandang bisa diterima oleh segenap lapisan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi perekat bangsa.

"Dengan kata lain, saya menjadi Presiden bukan karena saya ini orang hebat, tetapi karena keadaan. Mungkin yang menjadi pertimbangan lain adalah saya punya umat, pengikut, rakyat yang bukan hanya sekadar simpatisan partai. Antara umat dengan saya dan antara saya dengan umat terjalin hubungan batin yang sangat mahabah (cinta)", jelasnya.

Namun, lebih lanjut Presiden menaruh hormat pula pada sikap Megawati Soekarnoputri yang dengan legowo memberikan kesempatan kepadanya untuk memimpin bangsa ini. Menurut Presiden, Megawati Soekarnoputri mampu meredam emosi pendukungnya yang tentu saja sangat kecewa karena orang yang dibanggakan, yang notebene menjadi pemimpin partai pemenang pemilu, harus rela untuk tidak menjadi Presiden.

Bahkan, ia menyebut Megawati Soekarnoputri telah bersikap sebagai negarawan sejati, yang di dalam tubuhnya juga mengalir darah Bung Karno. "Tidak ada yang lebih berharga dari Ibu Megawati, kecuali utuhnya Negara Kesatuan RI, lestarnya Pancasila, dan bersatunya anak bangsa", tegasnya (Kompas, 28 April 2001).

Ketika Abdurrahman Wahid semakin menyadari bahwa kinerja pemerintahannya tidak cukup bagus sebagaimana yang dia harapkan, semakin banyak "*excuse*" yang dikemukakan. Sebagian dari dalih itu memang seperti banyak dikemukakan oleh siapa pun yang merasa tidak berhasil menjalankan visi dan misi yang dibebankan kepadanya. Dengan *excuse* ini, Abdurrahman Wahid tampak berharap agar rakyat dan elit politik menyadari betapa berat tugas yang dia emban, dan betapa tidak adil bila orang lain terus-menerus mencari-cari kesalahan dirinya. Apa yang dia nilai penting adalah tidak hanya integrasi elit-massa, tetapi juga sikap kooperatif dan solidaritas antar elit politik.

Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, ternyata yang ada di depannya hanyalah puing-puing tajam, reruntuhan pemerintah masa lalu, utang luar negeri yang sedemikian besar, perekonomian yang porak-poranda, kesenjangan sosial, dan berbagai gejolak, serta tuntutan muncul di mana-mana.

"Kondisi bangsa ini sungguh sangat memprihatinkan. Sekalipun dalam satu tahun bangsa ini seratus kali ganti presiden, tidak akan ada

yang mampu memulihkan perekonomian kita yang memang sudah sangat terpuruk ini dalam waktu yang singkat", katanya.

Sebenarnya, papar Presiden, langkah-langkah awal dalam menangani berbagai masalah yang sangat sulit dan kompleks ini sedang dilakukannya. Ia meminta agar jangan terlalu cepat menilai dirinya tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, kemudian berusaha menggulingkan posisinya dengan mencari-cari kesalahan. "Kalau kesalahan yang dicari, saya ini memang manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya keliru. Kalau saya dianggap salah atau keliru, ya, saya minta dimaklumi dan dimaafkan", ujarnya.

Ia berharap, kebakuan komunikasi politik seperti sekarang ini segera mencair agar dapat tercipta kembali persahabatan, tidak saling menjatuhkan. Ketegangan politik yang terjadi pada akhir-akhir ini harus segera diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan bangsa, imbuhnya.

"Silaturahmi antara penyelenggara negara baik Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan para pemimpin partai harus lebih banyak dilakukan", ujarnya.

Presiden menyebutkan, target yang harus dicapainya adalah membangun ekonomi rakyat. Baginya, jika ekonomi rakyat tidak dibangun sedemikian rupa, kesenjangan sosial tentu akan terjadi dan benih-benih perpecahan juga akan bertumbuh (Kompas, 28 April 2001).

Selain solidaritas dan sikap kooperatif antarelit, Abdurrahman Wahid juga menekankan pada pentingnya rekonsiliasi nasional. Menurut Abdurrahman Wahid, kecenderungan untuk memisah-misah secara tegas antarorde pemerintahan mencerminkan betapa sulit bagi bangsa Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid berkenaan dengan ketiga butir muatan wacana politiknya tersebut.

Demi kelangsungan bangsa dan kelanjutan negeri ini, Presiden mengajak untuk kembali pada cita-cita proklamasi kemerdekaan, membangun bangsa, menyongsong masa depan Indonesia. "Untuk itulah", dia menandakan, "istilah Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan berbagai orde lain yang akan muncul di kemudian hari ada baiknya dihapus dan ditiadakan mulai dari sekarang".



Sebab, orde itu hanya akan mengotak-ngotakkan perjalanan bangsa. Sekali lagi ia menyebut, "Bung Karno yang populer dengan sebutan proklamator bangsa, pembuka pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, tidak mengenal dan tidak bersahabat dengan orde dari zaman, dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Baik yang sudah, sedang, dan yang akan dilalui", imbuhnya, "Bung Karno menyebutkannya sebagai perjalanan bangsa" (Kompas, 28 April 2001).

Desakan terhadap kekuasaan Abdurrahman Wahid semakin hari semakin keras. Untuk mengantisipasi desakan tersebut, telah tersiar kabar bahwa Abdurrahman Wahid akan mengeluarkan dekrit. Dekrit ini diteorikan akan mirip dengan dekrit yang pernah dibuat oleh Soekarno. Untuk itu, Abdurrahman Wahid memerlukan pimpinan TNI yang mendukung penuh terhadap kebijakan yang akan dia ambil. Tidak mengherankan bila kemudian tersiar isu bahwa pimpinan TNI akan diganti. Sebegitu jauh, Abdurrahman Wahid ternyata tidak hanya membantah isu pergantian pimpinan TNI, tetapi juga membantah isu bahwa dia akan mengeluarkan dekrit. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid sehubungan dengan upayanya mempertahankan kekuasaan melalui penggantian pimpinan TNI dan penerbitan dekrit untuk melawan upaya yang menjatuhkan dirinya.

Presiden Abdurrahman Wahid hari Sabtu (19/5) membantah akan mengganti Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Endiartono Sutarto. Presiden juga telah membantah bertemu Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri untuk membahas pergantian pimpinan di tubuh TNI. Pernyataan presiden tersebut untuk sementara menjawab berbagai kabar yang muncul sepanjang Sabtu kemarin.

"Enggak ada. Berita bohong, kok, dipercaya. Itu karangan sampeyan dhewe (Anda sendiri-Red)", kata Presiden menjawab pertanyaan pers usai rapat mingguan Partai Kebangkitan Bangsa, di Jakarta.

"Saya belum pernah bicara sepotong pun bahwa nanti akan mengeluarkan dekrit", kata Presiden (Kompas, 20 Mei 2001).

Lain penanya, lain pula jawabannya. Ketika kepada wartawan Indonesia Abdurrahman Wahid menegaskan tidak akan mengeluarkan dekrit dengan ditambahi pernyataan bahwa isu itu adalah karangan para wartawan. Sebaliknya, ketika yang mengajukan pertanyaan adalah wartawan luar negeri, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa dia pernah menawarkan pemberlakuan keadaan darurat. Berikut adalah petikan pernyataannya.

Hingga berita ini ditulis, sidang kabinet itu belum berlangsung. Kepada pers dalam negeri, Abdurrahman Wahid memang berulang kali menyatakan tak pernah berniat memberlakukan dekrit. Tapi, dalam wawancara dengan Newsweek, ia mengaku pernah menawarkan pemberlakuan keadaan darurat kepada beberapa jenderal. "Saya menawarkan itu pada mereka, tapi mereka bilang tidak", kata Gus Dur dalam wawancara itu (Gatra, 26 Mei 2001).

Di luar wacana politiknya, Abdurrahman Wahid banyak melakukan keputusan politik yang kurang disetujui oleh para pesaing politiknya. Beberapa keputusan politik tersebut menyangkut Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi (PDI-P), dan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla (Partai Golkar) dengan alasan keduanya terlibat KKN. Sebelumnya Abdurrahman Wahid juga telah mencopot Wiranto sebagai Menko Polkam. Konflik Abdurrahman Wahid dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebabkan keluarnya Memorandum I pada tanggal 2 Februari 2001. Memorandum ini berlanjut hingga terbongkarnya kasus penggunaan dana Yayasan Karyawan Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam yang mendorong DPR mengeluarkan Memorandum II pada tanggal 30 April 2001.

Tidak banyak wacana politik dihasilkan oleh Abdurrahman Wahid sehubungan dengan Memorandum I. Abdurrahman Wahid seolah tidak peduli dengan berbagai pendapat dan keputusan yang muncul di DPR. Bahkan ketika Memorandum II akhirnya juga diputuskan oleh DPR, Abdurrahman Wahid tetap bersikukuh dengan pendapatnya bahwa kedua Memorandum itu tidak memiliki landasan hukum dan politik yang memadai. Tampaknya apa yang dimaksud oleh Abdurrahman Wahid dengan sikap konstitusional, penegakan hukum, dan supremasi hukum, benar-benar berbeda dengan pemahaman para elit politik yang menjadi pesaingnya. Berikut adalah pernyataan Abdurrahman Wahid tentang ketiadaan landasan hukum dan politik bagi kedua Memorandum di atas.

"Sebenarnya ada keraguan bagi saya untuk menyampaikan respons atas memorandum kedua DPR itu karena landasan hukum dan politik DPR yang masih belum jelas bagi saya", kata Presiden Abdurrahman Wahid dalam suratnya.

"Tetapi sekarang, ketika saya menyatakan tidak akan menjawab memorandum kedua, muncul pendapat dari fungsionaris DPR atau fraksi yang lain lagi yang mengatakan bahwa DPR atau unsurnya sedang menunggu jawaban atau respons dari Presiden atas memorandum kedua. Saya menjadi ragu dan ingin tahu bagaimana sebenarnya sikap DPR secara institusional mengenai perlu atau tidaknya jawaban atas sebuah memorandum", kata Presiden.

"Namun, untuk memorandum kedua ini, saya ingin mengikuti paham sebagian anggota DPR dan pakar yang dulu mengatakan bahwa memorandum tidak memerlukan jawaban. Sikap saya ini diperkuat dengan kenyataan bahwa isi memorandum kedua masalahnya tidaklah jelas dan telah keluar dari substansi memorandum pertama yang mempersoalkan kasus Yanatera Bulog dan bantuan dana dari Brunei", kata Presiden.

"Bagaimana saya menjawab atau merespons satu pernyataan yang tidak jelas?" kata Presiden dengan nada bertanya.

"Bagaimana saya menjelaskan lagi mengenai sesuatu yang dalil atau fakta yang diajukan sebagai jawaban tidak lagi dipersoalkan?" kata Presiden lagi (Kompas, 30 Mei 2001).

Belum selesai persoalan perbedaan pemahaman tentang perlu tidaknya sebuah memorandum dijawab, yang di dalamnya terkandung perbedaan pandangan tentang sikap konstitusional, penegakan hukum dan supremasi hukum, Abdurrahman Wahid membuka pertikaian baru dengan para elit POLRI. Pernyataan Abdurrahman Wahid yang meragukan kebenaran laporan Kapuspen POLRI menunjukkan adanya perbedaan mendasar tentang prosedur kerja POLRI. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid terhadap kasus penembakan di Pasuruan.

Khusus mengenai penembakan yang terjadi di Pasuruan, kata Presiden, keterangan Kepala Pusat Penerangan Polri, bahwa itu sesuai dengan prosedur, itu adalah cara-cara Orde Baru. "Setiap tindakan apa pun dikatakan sesuai prosedur. Ini tidak bisa diterima akal sehat apa pun. Karena sebagian dari orang-orang yang ditembak itu justru duduk-duduk di dalam warung", ungkap Presiden.

"Hendaknya dihindari, adanya penembakan kepada warga negara kita atas dasar hukum. Ini yang perlu diingat. Karena itu, untuk menentukan kebenaran apakah keterangan Kepala Pusat Penerangan Polri yang benar, ataukah laporan yang sampai kepada presiden, akan dibentuk sebuah komisi khusus untuk menyelidiki itu yang berasal dari luar Kepolisian RI", demikian Presiden (Kompas, 3 Juni 2001).

Sesuai dengan pemahaman Abdurrahman Wahid terhadap konstitusi, maka POLRI harus tunduk kepada Presiden. Ini berarti bahwa segala bentuk pengabaian terhadap perintah Presiden dinilai sebagai tindakan melawan hukum. Pernyataan-pernyataan ini dijadikan landasan bagi Abdurrahman Wahid untuk memberhentikan atau mengangkat pejabat baru di lingkungan POLRI. Berikut adalah pernyataan-pernyataan Abdurrahman Wahid yang tidak saja mempertajam tetapi juga memperluas wilayah pertikannya dengan para elit lain.

Namun dalam kata pengantarnya kemarin, Presiden menyampaikan dua hal yang menurutnya perlu diklarifikasi. "Kepala Polri hari Jumat meminta kepada saya agar dinonaktifkan. Dengan demikian segala hal keterangan di luar bahwa ia tidak nonaktif, harus dianggap tidak ada. Kedua, segala jajaran Kepolisian RI harus mengindahkan perintah ini. Dan setiap yang menentang dianggap melakukan insubordinasi dan dilakukan tindakan hukum terhadapnya", kata presiden.

"Ini penting sekali, karena Kepolisian RI adalah aparat keamanan dan harus jelas, fungsi dan kedudukannya. Karena itu, ia tidak boleh ikut dalam masalah politik. Karena politik sudah menyelenggarakan dan melaksanakannya. Ini penting sekali untuk diingat dan demikian kita dapat mengembangkan kehidupan yang serba baik dan teratur", lanjut presiden (Kompas, 3 Juni 2001).

Butir wacana paling krusial dalam pertikaian Abdurrahman Wahid dengan DPR menyangkut makna konstitusi dan tindakan konstitusional. Ini telah dimulai sejak munculnya Memorandum I. Hingga Juli 2001, Abdurrahman Wahid tetap bersikukuh dengan pemahamannya tentang kedua konsep tersebut. Bila pemahaman Abdurrahman Wahid ini tidak bisa diterima, maka Abdurrahman Wahid berbeda dari pernyataan sebelumnya, akan memilih jalan pemberlakuan dekrit. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid yang sebenarnya bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa dia tidak merencanakan adanya dekrit untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya serta membekukan DPR/MPR.

"Kalau tidak dapat dicapai, maka diberlakukan negara dalam keadaan bahaya. Diumumkan oleh pemerintah hal itu, dengan ketentuan MPR/DPR akan dibekukan, pemilihan umum akan dipercepat satu tahun, dan pemilihan umum diselenggarakan dengan menggunakan sistem yang ada sekarang, bukan sistem distrik", kata Presiden, dalam jumpa pers selama 20 menit di Istana Bogor.

"Ini adalah apa yang kita pikirkan. Tapi, saya belum mau ke sana sekarang ini karena yang terpenting kita masih berusaha dengan opsi pertama tadi, yaitu mengusahakan supaya tercapai adanya penyelesaian

damai daripada masalah yang kita hadapi, yaitu pelanggaran konstitusi", kata Presiden.

Presiden menolak kemungkinan diumumkan negara dalam keadaan bahaya itu sebagai dekrit. "Tidak ada dekrit", katanya. Presiden juga menolak istilah tanggal 20 Juli itu sebagai deadline untuk keputusan mengumumkan negara dalam keadaan bahaya. "Saya tidak tahu. Belum tentu dalam keadaan bahaya. Kalau dalam beberapa hari ini mereka semua mau rekonsiliasi, bagaimana", kilahnya.

Menurut Presiden, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Ketua Partai Golkar Akbar Tandjung tidak hadir dalam pertemuan karena Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak hadir. Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PAN Amien Rais, kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan, tidak hadir tanpa memberi alasan. Akan tetapi, Presiden mengatakan, ia akan bertemu Megawati Soekarnoputri hari itu juga.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra tidak hadir dengan pemberitahuan bahwa ia sedang ke Singapura. "Saya tidak tahu apa maksudnya kata-kata itu", ujar Presiden.

Ditanya rekonsiliasi apa yang diinginkannya, Presiden mengatakan", Ya, yang tidak ada persoalan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR karena itu bertentangan dengan UUD 1945". Katanya, hal itu telah disampaikan kepada Akbar Tandjung dan disambut baik. "Karena itu, kita tidak usah perhatikan nama acara, tapi yang penting Tap (Ketetapan-red) MPR-nya jangan berbunyi tentang pertanggungjawaban Presiden sebab itu melanggar UUD 1945 dan Presiden berkewajiban untuk mempertahankan UUD 1945", lanjutnya (Kompas, 10 Juli 2001).

Abdurrahman Wahid, sosok yang pernah dinilai populis dan merasa benar-benar mengerti kehendak rakyat, ternyata justru sering membuat pernyataan yang tidak mendukung terjadinya integrasi elit-massa. Ini tidak saja ditujukan terhadap masyarakat umum, tetapi juga terhadap TNI yang secara sosial terikat hirarkhi sangat ketat.

Ketika seorang wartawan meragukan dukungan dari militer terhadap keinginan Presiden memberlakukan negara dalam keadaan bahaya, Abdurrahman Wahid mengatakan, "Siapa bilang. Itu, kan, atasannya, bawahannya lain". Kemudian Presiden mengatakan", Seandainya betul demikian, masyarakat terpaksa mengambil tindakan sendiri".

Ditanya apakah turunnya masyarakat tidak akan menimbulkan anarkhi, Presiden mengatakan", Lho, jangan tanya saya. Itu masyarakat sendiri. Saya, kan, sudah menahan sekuat-kuatnya" (Kompas, 10 Juli 2001).

Memorandum I dan II akhirnya bermuara ke Sidang Istimewa MPR. Di kalangan para elit politik di DPR/MPR berkembang wacana bahwa justru Abdurrahman Wahid yang banyak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, meskipun mendapatkan tentangan dari sejumlah anggota DPR yang mendukung Abdurrahman Wahid, sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki, mereka pun memandang bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan bangsa kecuali melalui Sidang Istimewa.

"MPR itu kalah dengan undang-undang. Fakta siapa sekarang yang punya kekuatan? Karena itu, SI bertentangan dengan undang-undang. Telah terjadi penyimpangan agenda. Mari adu kuat. Kekuatan siapa yang menang. Tetapi saya jamin tidak ada adu fisik. Saya tidak datang ke SI karena SI harus dipandang ilegal, berarti besok saya akan diturunkan oleh mereka. Belum ada sidang arahnya sudah ke sana. Oleh karena itu, tidak ada cara lain kecuali dilawan. Tetapi jangan menggunakan peluru tajam. Adu kuatnya kayak apa? Tadi kepada Panglima TNI, Pak Sabarno dan Pak Budi Harsono, saya minta mencabut dukungannya kepada SI. Kalau tidak, silahkan mundur sekarang juga. Mari adu kuat, tetapi jangan ada sedikit pun darah menetes. Saya perintahkan dilawan pakai peluru karet saja" (SCTV, 21 Juli 2002, jam 20.00 WIB).

Hingga SI sudah di ambang pintu, ternyata Abdurrahman Wahid tetap bersikukuh dengan pemahamannya tentang tindakan konstitusional dan prosedural. SI yang akan diselenggarakan oleh lembaga yang memberi mandat kepadanya, dinilai Abdurrahman Wahid sebagai akan menyelenggarakan kegiatan yang ilegal. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid yang

mempertegas betapa berbeda pemahaman antara Abdurrahman Wahid dengan para politisi di DPR/MPR.

Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan, tidak akan datang dalam Sidang Istimewa (SI) MPR yang dipercepat karena sidang itu melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan ilegal. Presiden juga menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya karena ia harus mempertahankan Undang-Undang Dasar. Meski demikian, Presiden tetap mengharapkan terjadinya kompromi politik secara damai.

Presiden mengatakan hal itu kepada wartawan di *credential room* Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/7) pagi. "Sebagaimana kita ketahui, Mas Amien Rais selaku Ketua MPR, sudah mengatakan Jumat malam akan memanggil anggota MPR untuk hadir dalam sidang paripurna untuk memutuskan SI pada hari ini (kemarin-Red). Terus terang, ini semua melanggar Tatib MPR dan UUD 1945", kata Presiden.

Menurut Presiden, Rapat Paripurna MPR yang diselenggarakan Sabtu, tidak dikenal dalam Tatib MPR. Dalam putusan MPR tentang Tatib MPR, disebutkan hanya ada tiga jenis sidang, yaitu Sidang Umum (SU), Sidang Tahunan (ST) dan Sidang Istimewa (SI).

"Sementara rapat paripurna ini tidak diketahui menjadi bagian dari sidang jenis yang mana? Sehingga karena itu dianggap tidak sah. Saya tidak akan datang dalam sebuah sidang yang tidak sah (ilegal)", ujar Presiden Abdurrahman Wahid dalam nada tenang (Kompas, 22 Juli 2001).

Keyakinan teramat besar dari Abdurrahman Wahid, bahwa dia masih sangat populer dan mendapatkan dukungan dari rakyat secara luas, termasuk di dalamnya adalah yang oleh Abdurrahman Wahid disebut bukan sekadar simpatisan partai politik tetapi lebih sebagai umat atau pengikut, mengakibatkan Abdurrahman Wahid berani mengambil risiko untuk mewacanakan dekrit atau pernyataan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Kalaupun itu dilakukan, menurut Abdurrahman Wahid, justru untuk menyelamatkan konstitusi. Jadi Abdurrahman Wahid memilih jalan non-konstitusional demi mempertahankan prinsip konstitusional menurut pemahamannya.



Apakah ada keraguan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, tanya wartawan. "O.... saya tidak mempunyai keraguan sama sekali. Ini hanya sekadar memberi jalan kepada penyelesaian secara damai yang saya yakin akan bisa dicapai", kata Presiden.

Presiden mengharapkan, kompromi dapat dicapai sebelum tanggal 31 Juni 2001. "Kalau tidak, maka ya apa boleh buat, kita tidak senang, tapi kita terpaksa. Terpaksa untuk menyelamatkan konstitusi itu sendiri. UUD kita adalah sesuatu yang sangat mulia dan kita tidak ingin diinjak-injak oleh siapa pun", katanya.

Dalam jumpa pers sore harinya, menjawab pertanyaan, Presiden menjelaskan, dalam politik, realita itu dibentuk oleh kekuatan. Kekuatan berarti pengikut. "Saya memiliki dukungan hampir semua LSM, mahasiswa, banyak organisasi sosial di luar Nahdatul Ulama (NU). Bila mereka tidak percaya, maka jangan salahkan kalau massa menyelesaikan segalanya sendiri" ujarnya.

Namun, lanjut Presiden, dirinya telah meminta pendukungnya untuk tidak datang ke Jakarta. "Saya telah berkata kepada massa di mana-mana, di Purwokerto, di Lirboyo, di Jati Lawang, di hadapan 600 kiai, di Lirboyo di hadapan 2.000 kiai, di Manado dengan begitu banyak pendeta, juga di Gorontalo, bahwa tolong jangan datang ke Jakarta. Saya anti kekerasan dan saya pengikut Mahatma Gandhi", tambahnya.

Ketika ditanya tentang sikap Fraksi TNI/Polri yang menyetujui percepatan SI MPR, Presiden mengatakan, mereka tidak mengambil sikap. "Mereka menyerahkan kepada pimpinan MPR. Itu saja", katanya.

"Sebab, ke depan ada kemungkinan Presiden kembar jika MPR memaksakan kehendak meminta pertanggungjawaban Presiden. Sementara Presiden menganggap permintaan pertanggungjawaban itu bertentangan dengan UUD karena jika ada pertanggungjawaban berarti ada pelanggaran terhadap UUD", tegasnya (Kompas, 22 Juli 2001).

Dalam batas wacana, Abdurrahman Wahid berupaya mengembangkan penalaran politik yang logik. Ini tidak hanya menyangkut konsep-konsep yang digunakan, tetapi juga proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hukum-hukum logika. Tanpa harus menyebut kesesatan dalam dalam penalaran (*fallacies in reasoning*), Abdurrahman Wahid sering mendemonstrasikan bagaimana para elit politik lain telah salah dalam menarik kesimpulan atau mengambil keputusan berdasarkan hukum logika. Berikut adalah contoh bagaimana Abdurrahman

Wahid berupaya membuktikan bahwa berdasarkan silogisme kategoris sederhana, Amien Rais dan para pendukung SI telah salah dalam proses pembuatan keputusan.

Secara panjang lebar Gus Dur mengungkapkan kejanggalan yang dilakukan MPR dalam memutuskan SI dipercepat. Salah satunya langkah Ketua MPR Amien Rais, Jumat 920/7 malam, yang menyatakan bakal memanggil sidang paripurna untuk memutuskan Sidang Istimewa.

"Bagaimana mungkin ada Sidang Istimewa ditentukan sidang paripurna, sedangkan Sidang Istimewa mempunyai bagian yang namanya sidang paripurna. Bagaimana sebuah bagian dapat menentukan sesuatu lebih besar. Jadi ini, menunjukkan kerancuan", ujar Gus Dur.

Menurutnya, kesalahan prosedur itu membuat MPR tidak berhak sama sekali menilai eksekutif, kalau memang eksekutif dianggap bersalah. "Katakanlah mau menangkap maling, ya tidak dengan maling dong. Nangkep maling harus dengan polisi", ujarnya.

Terkait alasan menggelar SI, Gus Dur mengatakan dirinya sering jadi korban pelintiran. "Materi yang diungkapkan semua hak prerogatif Presiden dan tidak ada yang dibahayakan", katanya (Surya, 22 Juli 2001).

Mempertegas kembali kecenderungan Abdurrahman Wahid untuk menggunakan pendapat rakyat atau masyarakat sebagai tolok ukur kinerjanya, dalam bidang ekonomi pun Abdurrahman Wahid merasa bahwa pemerintahannya telah menjalankan fungsinya dengan baik, yakni menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bila para anggota MPR meragukannya, maka justru MPR yang dia nilai menggunakan tolok ukur yang rancu. Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid.

Ditambahkan, ada penilaian seolah tidak ada kemajuan ekonomi. "Lihat sendirilah di masyarakat sana. Ekonominya baik atau tidak? Bahkan kemarin, tidak terjadi perubahan kurs. Bahkan, indeks harga saham gabungan naik. Jadi, dengan kata lain, kepercayaan dari dunia usaha kepada tindakan-tindakan pemerintah semakin bertambah. Dengan kata lain, MPR itu sendiri rancu", tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, harus tetap didasarkan pada Memorandum I dan II DPR, kemudian dinilai masalahnya. Namun pergantian Kapolri dan pengangkatan Chaeruddin Ismail menjadi Pjs Kapolri ikut dipakai sebagai alasan menggelar SI.

"Pengangkatan Pak Chaeruddin menjadi wewenang dan prerogatif saya. Saya lakukan demi menegakkan kewibawaan polisi yang mulai kacau-balau akibat kesalahan-kesalahan di masa lampau. Kalau dikatakan terjadi kekacauan, kekacauan apa? Semua masih berjalan kok", katanya.

Diakui ada kekacauan di beberapa daerah tetapi, tak terkait dengan persoalan di tubuh Polri. "Seperti terjadi di Kalimantan Tengah, Aceh dan Maluku, tidak bisa dipersalahkan kepada pihak eksekutif. Karena itu warisan masa lampau yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari saja", katanya (Surya, 22 Juli 2001).

Sulit untuk menemukan konsistensi atau koherensi antarpernyataan Abdurrahman Wahid, terutama ketika akhirnya dia menyatakan bahwa selaku panglima perang dia memberlakukan dekrit. Padahal banyak wacana politik Abdurrahman Wahid sebelumnya selalu menolak menggunakan atau bahkan menyebut dekrit. Berikut adalah pernyataan langsung Abdurrahman Wahid yang tidak hanya menggunakan istilah dekrit, tetapi juga memberlakukan dekrit.

Presiden juga menyerukan kepada rakyat untuk tetap tenang dan menjalankan kehidupan seperti biasa.

Sebelum isi dari dekrit dibacakan Juru Bicara Kepresidenan Yahya Staquf, Presiden mengatakan, keputusan itu dipicu pernyataan Ketua MPR Amien Rais yang menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada pemimpin nasional yang baru.

"Itu artinya mereka tidak dapat mengendalikan orang-orang yang ingin memaksa saya turun dari jabatan Presiden. Kalau saya diturunkan, maka beberapa provinsi akan melepaskan diri dari NKRI. Padahal saya disumpah untuk menjaga keutuhan teritorial. Karena itu dengan berat hati, selaku panglima tertinggi angkatan perang saya memberlakukan dekrit", kata Presiden (Kompas, 23 Juli 2001).

Ketidak-konsistenan Abdurrahman Wahid juga dapat ditengarai dari kerancuan logikanya. Sebagai Presiden yang mendapatkan mandat dari MPR,

tetapi justru membubarkan MPR. Bila digunakan kembali silogisme yang digunakan oleh Abdurrahman Wahid ketika menolak SI karena merupakan produk sidang paripurna, maka bisa diajukan pertanyaan: Bagaimana mungkin seorang presiden yang diangkat oleh MPR bisa membubarkan MPR? Berikut adalah petikan pernyataan Abdurrahman Wahid yang sebenarnya melawan logikanya sendiri.

Banyak tuntutan mundur diajukan, agar Abdurrahman Wahid tidak diberhentikan secara paksa melalui SI. Abdurrahman Wahid ternyata tidak mau mengundurkan diri. Menurut juru bicara Kepresidenan, Yahya Staquf, Abdurrahman Wahid tetap punya prinsip tidak mengundurkan diri karena tugas utamanya sebagai mandataris adalah menciptakan kebebasan bagi kelompok mana pun serta memberantas KKN. Demikian pun Abdurrahman Wahid merasa masih berjalan di atas rel konstitusi serta masih memiliki legitimasi sebagai presiden.

"Bang Amien Rais tadi telah mengatakan akan segera diperoleh Kepala Negara yang baru. Berarti besok saya akan diturunkan. Itu artinya mengajak mengadu kekuatan", kata Gus Dur pada jumpa pers di Istana Merdeka, Minggu malam.

Menurut Gus Dur, "Pernyataan Amien Rais itu tidak logis". Ia menyebutkan, para pendukungnya dijamin tidak akan melakukan tindakan kekerasan. "Karena itu saya minta TNI tidak menembak siapa pun juga. Jangan gunakan peluru tajam. Kalau diserang gunakan peluru karet", katanya.

Dalam kesempatan itu Gus Dur mengatakan telah memerintahkan Ketua Fraksi TNI/Polri MPR Hari Sabarno, untuk mencabut dukungan fraksi tersebut terhadap pelaksanaan SI MPR. "Kalau tidak mau mencabut silakan mundur", kata Gus Dur. Selain Hari Sabarno, Gus Dur juga memanggil Ketua Fraksi TNI/Polri di DPR Budi Harsono.

Pada Minggu siang Gus Dur memanggil Panglima TNI Laksamana TNI Widodo AS, sedang Ketua Fraksi TNI/Polri MPR Letjen Hari Sabarno dan Ketua Fraksi TNI/Polri DPR Mayjen Budi Harsono, dipanggil Minggu sore.

Alasan Gus Dur menuntut fraksi itu mencabut dukungan pada SI MPR karena jika satu fraksi menarik dukungan, SI tidak sah (Surya, 23 Juli 2001).

Tampak jelas, ketika Ketua MPR Amien Rais mengatakan bahwa Indonesia akan segera memiliki seorang kepala negara baru, Abdurrahman Wahid membalas dengan tidak kalah intimidatif dengan menyatakan siap adu kekuatan. Akan halnya keberanian Amien Rais memastikan akan memiliki Presiden baru, tidak bisa tidak dimungkinkan oleh kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk menggantikan Abdurrahman Wahid. Sebagaimana dimuat dalam Gatra 9 (26 Mei 2001), jauh hari Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan, "Kalau ia mundur, saya berterima kasih. Kalau tak mau, ya kita lakukan sidang istimewa".

Akhirnya SI MPR (23 Juli 2001) memberhentikan Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden, dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, serta Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Demikian perjalanan Abdurrahman Wahid dari diangkat menjadi Presiden hingga diberhentikan dari jabatannya. Tentang bagaimana Megawati, melalui gaya berwacananya berupaya mendapatkan, mempertahankan, menggunakan, atau mengendalikan kekuasaan akan tercermin dari uraian bagian berikutnya.

Ungkapan spontan-konfrontatif mungkin cocok untuk menggambarkan gaya berwacana Abdurrahman Wahid yang tidak memilih-milih kata, karena diungkapkan segala sesuatu diungkapkan dengan sangat apa adanya. Karena sifat spontan ini pula, seringkali Abdurrahman Wahid harus berkelit terus-menerus manakala wacananya mendapatkan serangan dari para pesaing politiknya. Karena

sifat konfrontatif wacana politik Abdurrahman Wahid, semakin lama keberterimaan Abdurrahman Wahid di kalangan elit politik semakin menurun.

### **B. Wacana Politik Megawati Soekarnoputri**

Dibanding Amien Rais dan Akbar Tandjung, posisi politik Megawati Soekarnoputri memang agak membingungkan. Sebagai ketua umum partai pemenang Pemilu, Megawati Soekarnoputri secara logik berpeluang lebih besar untuk menjadi Presiden. Namun demikian, sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung, membawa konsekuensi yang salah satunya tampak dari kegagalan Megawati Soekarnoputri merebut kursi kepresidenan. Kehadiran Poros Tengah yang digagas dan digerakkan oleh Amien Rais dan kawan-kawan, memaksa Megawati Soekarnoputri bersaing dengan Abdurrahman Wahid. Hasil akhirnya adalah terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, baru kemudian Megawati Soekarnoputri bersaing dengan Hamzah Haz untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden.

Tidak bisa dihindari, ada ketidak-puasan di kalangan pendukung Megawati. Salah satu kasus ketidak-puasan yang paling menonjol adalah yang terjadi di Bali, tempat Megawati Soekarnoputri mendapatkan dukungan sangat besar. Ketika itu pula Megawati Soekarnoputri semakin menunjukkan gaya berpolitiknya, yaitu: tidak banyak berwacana dan bermain di jalur konstitusional. Megawati Soekarnoputri pula yang berhasil menenangkan para pendukungnya agar menerima konsekuensi kegigihannya mengikuti konstitusi.

Hingga April 2001, berdasarkan wacana politiknya, Megawati Soekarnoputri menampilkan sikap dan perilaku yang sangat kooperatif dengan

Abdurrahman Wahid. Ketika memberikan pernyataan terkait Sidang Umum MPR Agustus 2000, yang tidak lain merupakan pernyataan persnya yang pertama sejak menjadi Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri berkali-kali menegaskan bahwa Sidang Umum tersebut tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggung-jawaban presiden. Sikap kooperatif, pendekatan konstitusional, supremasi hukum, dan kepentingan nasional, merupakan nilai-nilai yang sangat ditonjolkan dalam wacana politik Megawati. Berikut adalah petikan berita terkait pernyataan Megawati.

Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, Sidang Umum MPR bulan Agustus 2000 mendatang adalah untuk mendengarkan laporan presiden, bukan untuk meminta pertanggungjawaban presiden. "Masalah ini jangan dimanipulasi diperpolitisir karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi bangsa ini," kata Megawati Soekarnoputri kepada pers di Hotel Shangri-La, Singapura, Senin (26/6).

Menurut Megawati, bila sering dikatakan bahwa laporan Presiden dalam Sidang Umum MPR mendatang itu bisa diterima atau tidak, maka itu artinya telah memolitisir keadaan. "Itu kan artinya pertanggungjawaban. Kalau dikatakan laporan, maka itu berarti laporan tentang apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Oleh karena itu, diperlukan kematangan berpikir para elit politik saat ini," tandasnya (Kompas, 27 Juni 2000).

Megawati Soekarnoputri adalah politisi yang tidak banyak membuat pernyataan kepada publik. Dalam berbagai jumpa pers, misalnya, Megawati Soekarnoputri seringkali mewakilkan kepada juru bicara yang ditunjuk. Berikut petikan berita tentang perilaku wacana Megawati Soekarnoputri sebagaimana dikemukakan tidak hanya oleh masyarakat secara umum, tetapi juga oleh kalangan pers.

Megawati Soekarnoputri dalam jumpa pers yang baru kali ini dilakukan sejak menjadi Wakil Presiden itu, juga menepis pemberitaan yang menyatakan bahwa hubungannya dengan Presiden Abdurrahman Wahid akhir-akhir ini semakin renggang, bahkan kadang menurun ke silang pendapat. "Itu kata pers yang ingin supaya kolomnya selalu berisi," tuturnya.

"Beliau itu bisa dibilang kakak saya, bisa dibilang saudara saya, dan bisa dibilang sahabat saya," tambah Wapres. Meski demikian Megawati Soekarnoputri tetap menegaskan bahwa dia adalah Wakil Presiden atau orang kedua. "Sehingga segala keputusan tetap di tangan presiden dan saya bisa memberi saran-saran," tuturnya, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas dari Singapura semalam.

Menyinggung soal penyusunan kabinet mendatang, menjawab pers Megawati Soekarnoputri secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya cenderung akan melakukan hal itu bersama presiden. "Apakah dalam penyusunan kabinet nanti akan dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, karena partai-partai tidak akan turut campur?" tanya wartawan. "Saya kira demikian. Kita melihatnya dari keadaan yang berkembang sampai bulan Agustus tahun 2000 mendatang", jawab Mega.

Berbicara tentang penanganan masalah Maluku dan Papua, Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan itu mengemukakan perlunya ketegasan sikap, bukan kekerasan. "Ketegasan sikap untuk berbuat. Sekarang di sana itu ada gambaran kurangnya ketegasan sikap untuk memberlakukan sesuatu terhadap pelanggaran hukum yang terlalu jauh," ujarnya.

"Bagaimana orang melakukan pembunuhan itu tidak dijadikan sesuatu hal. Hukum harus ditegakkan. Bagaimana mungkin pembunuhan itu bisa ditolerir," demikian Mega. "Tidak mungkin hukum rimba bisa ditolerir seperti sekarang ini," tambahnya (Kompas, 27 Juni 2000).

Empati atau kemampuan membayangkan bagaimana bila dirinya menjadi orang lain merupakan salah satu unsur sangat penting dalam mengembangkan nilai-nilai solidaritas sosial. Rasa senasib-sepenanggungan ini pula yang sering ditonjolkan dalam sejumlah wacana politik Megawati. Sebagai sesama aktivis partai yang terpinggirkan oleh Orde Baru, Megawati Soekarnoputri dinilai tidak hanya berkenan di hati para pendukung PDIP, tetapi juga mendapatkan simpati



dari kalangan pendukung PPP. Bahkan, jauh sebelum reformasi, sempat muncul istilah "Mega-Bintang".

Rasa kesetiakawanan sosial itu pula yang tetap dipelihara Megawati Soekarnoputri ketika selaku Wakil Presiden memberikan sambutan di tengah pendukung PPP. Berikut adalah petikan pernyataan Megawati Soekarnoputri sebagaimana diberitakan oleh sebuah surat kabar nasional.

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pandangannya itu setelah mengucapkan, "Secara pribadi saya mengikuti pasang surutnya kiprah organisasi ini. Saya juga mendengar, bahwa Konferensi Nasional ini adalah yang pertama setelah Gerakan Pemuda Ka'bah bangkit kembali dari masa istirahat panjang, yang terpaksa harus dijalani di luar keinginannya sendiri. Beratnya keadaan seperti itu, mungkin hanya dapat dimengerti oleh sesama organisasi yang juga pernah memiliki pengalaman yang sama seperti yang saudara-saudara alami," ujar Wapres lanjut.

Kemudian Wapres mengutarakan pengalamannya memimpin Partai Demokrasi Indonesia yang penuh dengan kesulitan dan ujian. "Tetapi alhamdulillah, kapal yang saya pimpin dapat mencapai tujuannya," ujar Wapres (Kompas, 30 Juni 2000).

Anti-kekerasan serta pengutamaan penyelesaian politik yang tidak mengorbankan rakyat merupakan butir nilai wacana politik Megawati Soekarnoputri yang juga cukup menonjol. Kutipan berikut, selain masih menampilkan sikap kooperatif Megawati, juga menonjolkan kedua nilai tersebut di atas.

Wakil Presiden (Wapres) Megawati Soekarnoputri mengatakan, perbedaan visi, gagasan, dan pandangan di kalangan para pemimpin bangsa jangan sampai membingungkan rakyat, apalagi sampai menimbulkan perpecahan dan pertentangan. Di kalangan pemimpin, wacana untuk menyelesaikan perbedaan pandangan itu mestinya dapat berlangsung secara tenang dan canggih dan dalam suasana yang saling menghormati.

Wapres mengatakan itu saat menutup Muktamar I Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/7) malam. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKB) KH Cholil Bisri, Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Matori Abdul Djalil, sejumlah menteri, dan pejabat setempat.

Wapres menegaskan, mungkin besar manfaatnya jika dalam menangani berbagai krisis, para pemimpin tidak cepat-cepatnya melibatkan pendukungnya masing-masing. "Kita sudah menyaksikan apa akibat yang mungkin timbul jika hal tersebut tidak kita tata kembali," ujarnya.

"Para pemimpin bangsa tetap harus membuka jalur komunikasi yang lancar, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan krisis. Dalam keadaan normal, kita dapat menggunakan jalur komunikasi secara melembaga. Sedangkan dalam keadaan krisis, kita juga harus mampu membuka jalur komunikasi pribadi yang bersifat darurat. Gunanya bukan hanya untuk saling menerima, tetapi juga saling memberi informasi secara langsung," ujarnya.

Menurut Wapres, partai politik mengemban tiga tugas. "Pertama, mengakomodasikan kepentingan rakyat, sehingga menjadi masukan yang andal bagi kebijakan pemerintah. Kedua, parpol menerjemahkan berbagai peraturan perundangan serta kebijakan pemerintah ke dalam bahasa rakyat, sehari-hari, sehingga mudah dipahami, diterima, serta dilaksanakan dengan baik. Ketiga, mengemban tugas mempersiapkan kader kepemimpinan nasional yang berkualitas tinggi, yang diharapkan bukan saja memelihara, tetapi juga melanjutkan apa yang sudah dicapai saat ini, serta meningkatkan dan menyempurnakannya dalam tahun mendatang".

Dalam keadaan sulit dua tahun terakhir ini, kata Wapres, ketiga peran tadi dirasakan betapa pentingnya dalam kehidupan politik kita. Apalagi, sesuai dengan nama yang dipilihnya, PKB, justru menjadikan kebangsaan sebagai identitas dirinya. "Kita patut bersyukur bahwa wawasan kebangsaan di kalangan umat beragama sendiri sudah mempunyai akar sejarah yang tua," ujarnya.

Ketika tokoh-tokoh agama berhasil menyatukan berbagai suku bangsa, tegas Megawati, pada gilirannya wawasan kebangsaan yang mereka tanamkan telah menyatukan visi umat beragama. "Dengan memilih sebagai partai terbuka, saya berharap PKB dapat meneruskan visi perjuangan dari tokoh agama pendahulunya," ujarnya.

Kita akan sependapat, kata Wapres, saat ini kita berada pada saat-saat paling sulit dalam perjalanan panjang sejarah bangsa. Walaupun di masa lampau kita pernah digembleng dengan berbagai persoalan, kita belum pernah menghadapi ujian seberat ini.

"Sungguh memprihatinkan bahwa semangat kebangsaan dan wawasan negara kesatuan, yang beberapa tahun lalu kita pandang sebagai kewajaran, sekarang di sebagian tanah air kita telah dipertanyakan secara mendasar," ujarnya.

"Pertanyaan mendasar tersebut bukan hanya dipertanyakan para pemimpin daerah yang bersangkutan, tetapi juga dikalangan kaum muda terpelajarnya. Sebagai gantinya, telah timbul gejala semangat kesukuan dan keinginan memisahkan diri," ujarnya.

Dengan rendah hati, kata Wapres, kita harus berani mengakui kesalahan yang terjadi di semua tingkat yang tidak dapat segera teridentifikasi. "Secara khusus saya ingin mengajak kita semua untuk memandang kompleksitas kesulitan ini serta upaya mengatasi dan memulihkannya kembali sebagai tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

"Secara pribadi, saya sungguh-sungguh khawatir, kebiasaan kita untuk menumpahkan seluruh kesalahan yang pernah terjadi kepada seseorang, suatu golongan, atau suatu rezim. Saya percaya, walaupun tanggung jawab politik dan hukum dalam penyelenggaraan negara dapat ditimpakan pada seseorang, jangan kita lupakan bahwa seluruhnya merupakan komponen dari keseluruhan kebangsaan. Pada akhirnya seluruh tanggung jawab terletak pada kita semua," ujarnya (Kompas, 28 Juli 2000).

Sebagai partai yang berbasis dukungan rakyat kecil, yang secara hipotetik cenderung menggunakan kekuatan fisik untuk menyelesaikan konflik, PDIP ternyata dipimpin oleh seorang perempuan yang memiliki sikap sangat anti terhadap segala bentuk kekerasan. Nilai-nilai anti kekerasan, yang sebenarnya merupakan inti dari kegiatan politik, justru sering ditonjolkan oleh Megawati Soekarnoputri di kalangan pendukungnya sendiri. Kekerasan yang cenderung merebak di Indonesia ternyata begitu memprihatinkan Megawati. Berikut adalah petikan pernyataan Megawati Soekarnoputri di hadapan pendukungnya sendiri.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan kekerasan sebagai cara untuk memperjuangkan kepentingan sebagian kelompok. Perkembangan kekerasan di negeri ini, menurut dia, sudah pada tahap membahayakan. Sebab itu, Megawati Soekarnoputri

yang juga Wakil Presiden RI ini menyerukan agar semua bentuk kekerasan dan teror politik dihentikan.

"Marilah, mulai hari ini kita menyatakan, tidak secara terbuka, tanpa sedikit pun keraguan pada penggunaan kekerasan dan teror, sebelum kekerasan tersebut menemukan momentum untuk meluas dan mengganas. Marilah kita bebaskan bangsa ini dari jebakan kekerasan dan teror," kata Megawati Soekarnoputri dihadapan puluhan ribu warga PDI Perjuangan yang hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 PDI Perjuangan dan Haul ke-100 Bung Karno di Gelora Bung Karno (Senayan), Jakarta, Minggu (14/1).

Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan itu juga mengutuk aksi peledakan bom pada malam natal 2000. Menurut dia, aksi tersebut bukan hanya merupakan tindak kriminal atau kejahatan politik, tidak hanya mengancam stabilitas sistem ekonomi dan politik, tetapi juga mengancam seluruh sendi sosial bangsa ini. Ia menyebut aksi tersebut sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Sebagai ketua umum partai, saya serukan kepada warga PDI Perjuangan bahwa perjuangan selalu, selalu, selalu antikekerasan. Jadi yang berbuat tindak kekerasan tentu bukan PDI Perjuangan," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri mengatakan, "Dalam dunia yang sedang berlomba mempromosikan demokrasi dan kemanusiaan sebagai standar nilai tertinggi peradaban dunia, kita tidak ingin hadir sebagai bangsa aneh yang bisa tidur di tengah-tengah kekerasan dan teror. Kita tidak ingin dicatat dalam sejarah dunia sebagai bangsa barbarian yang membiarkan proses kekerasan dan teror tumbuh dengan subur. Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki kewajiban moral untuk menjamin stabilitas dan perdamaian nasional maupun internasional." Menghentikan mata rantai kekerasan dan teror di dalam negeri saat ini, lanjut Megawati, akan sangat membantu terwujudnya stabilitas dan perdamaian. "Karena itu, mari kita bersama-sama menyatakan tidak pada kekerasan dan teror. Janganlah pernah sekali-kali berdamai pada kekerasan dan teror," tandasnya (Kompas, 15 Januari 2001).

Kasus-kasus kecil yang mencerminkan sifat dasar manusia yang menghargai kemanusiaan, bagi Megawati Soekarnoputri merupakan contoh-contoh yang penting dikutip. Tidak hanya untuk menunjukkan empatinya kepada rakyat kecil, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan masih bisa dibangkitkan. Teror dan kekerasan yang merupakan penghinaan dan

pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan, menurut Megawati Soekarnoputri sebenarnya masih bisa dilawan. Ini harus dilakukan dengan belajar melalui contoh-contoh dari masyarakat kecil yang melakukan perbuatan kemanusiaan tanpa dilandasi oleh pamrih pribadi apa pun.

Di tengah pidatonya yang tegas menolak kekerasan dan teror, Megawati Soekarnoputri secara khusus menyatakan pujian terhadap tindakan penggembala ternak Ahmad Taufik yang menyelamatkan kereta api dari upaya peledakan granat. Apa yang dilakukan Taufik, katanya, dapat menumbuhkan optimisme bahwa kekerasan dan teror di Indonesia akan bisa dilawan.

"Optimisme saya berkembang. Saat dari lawatan luar negeri, membaca berita yang mungkin tak lagi istimewa, seorang anak, Ahmad Taufik, menyelamatkan kita dari bahaya kekerasan," tutur Megawati Soekarnoputri seraya meminta Taufik untuk maju dan berdiri di sampingnya. Pada saat Taufik naik ke mimbar dengan mengenakan seragam pramuka, puluhan ribu warga PDI perjuangan pun menyambutnya dengan berdiri dan bertepuk tangan. "Saat itu ia tidak ingin menjadi pahlawan. Dia meninggalkan gembalanya, berlari semampunya ke petugas. Sampai di tempat, dia pingsan. Bukan karena jarak yang jauh, tetapi karena ia melakukannya dengan segenap pikiran dan empati segenap kemanusiaannya," papar Megawati.

"Kisah Opik (Ahmad Taufik) dan Banser Mojokerto yang menyelamatkan saudara sebangsanya membuktikan kepada saya bahwa Ibu pertiwi belum berhenti mengulurkan tangannya, demi kemanusiaan, demi ke Indonesiaan. Dia merupakan ke Indonesiaan yang kita punya. Saya bersyukur kepada Allah karena di tengah kegilaan dan hasrat membunuh, Dia menghadirkannya sebagai simbol nurani bangsa," kata Megawati Soekarnoputri (Kompas, 15 Januari 2001).

Sikap kooperatif Megawati Soekarnoputri mulai memudar ketika Abdurrahman Wahid banyak melakukan berbagai tindakan dan pernyataan yang berseberangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Megawati. Ini sangat kentara sejak Abdurrahman Wahid melakukan pemberhentian terhadap dua orang menteri, yang salah satunya berasal dari PDIP. Namun demikian, hingga Mei 2001, Megawati Soekarnoputri masih menunjukkan dukungan terhadap

Abdurrahman Wahid. Terkait sikap Megawati Soekarnoputri atas banyaknya desakan agar ia mendukung pelengseran Abdurrahman Wahid, hingga akhir 2000 sikap Megawati Soekarnoputri pada Abdurrahman Wahid masih konsisten untuk mendukung Abdurrahman Wahid. Berkali-kali Megawati Soekarnoputri mengatakan "Bila itu dilakukan, republik ini akan kacau, dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya" (Gatra, 26 Mei 2001: 32).

Tetapi sejak dikeluarkannya Memorandum I oleh DPR, Megawati Soekarnoputri mulai menjauh dari Abdurrahman Wahid, dan mengizinkan Fraksi PDI-P DPR bekerja sama dengan politisi "Poros Tengah" dan Partai Golkar untuk menjatuhkan Memorandum II. Kepada Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang menghadap di kantornya tanggal 21 Mei 2001, Megawati Soekarnoputri mengatakan "Proses Sidang Istimewa tak dapat dihentikan". Berbagai sumber terpercaya mengatakan sejak dikeluarkannya Memorandum I, sikap Megawati Soekarnoputri terhadap Abdurrahman Wahid memang semakin jelas dan bahkan secara terbuka mengharapkan presiden segera mundur.

Wacana pemberhentian Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla 24 April 2000, Abdurrahman Wahid mengatakan "Laksamana Sukardi melakukan korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pengangkatan salah seorang Deputinya Benny Pasaribu dan telah menipu saya karena mengangkat sembilan "maling" pada jajaran direksi dan komisaris PT Indosat". Sebelumnya ketika ditanya wartawan atas pemberhentian kedua menteri tersebut, Abdurrahman Wahid hanya mengatakan "Keduanya tidak kompak dengan dua menteri lainnya, Menteri Keuangan Bambang Sudibyo dan Menko Ekuin Kwik Kian Gie". Ketika kedua

menteri tersebut bertanya apa kesalahannya, Abdurrahman Wahid menyatakan "Sudah, enggak usah banyak debat. Saya akan memakai hak prerogatif presiden" (Forum Keadilan, No. 5, 7 Mei 2000).

Sikap Megawati Soekarnoputri atas pemberhentian Laksamana Sukardi tampak jelas karena Megawati Soekarnoputri sangat shock dan sempat menangis mendengar pemberhentian Laksamana Sukardi karena Laksamana adalah salah seorang kader terbaiknya dan menjadi menteri atas garansi Megawati. Megawati Soekarnoputri menyatakan "kami jelas kecewa, tapi sudah menjadi komitmen kami untuk tetap mendukung Gus Dur. Karena itu, saya minta semua jajaran PDI-P bersikap tenang dan mendinginkan kepala" (Forum Keadilan, No. 5, 7 Mei 2000).

Sebulan setelah mengikuti pernyataan-pernyataan Abdurrahman Wahid yang terkesan sangat merendahkan kapasitas dirinya untuk menjadi Presiden (Tempo, 15 April 2001), Megawati Soekarnoputri benar-benar mengembangkan kontra-wacana terhadap Abdurrahman Wahid. Namun demikian, konfrontasi wacana ini tidak dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dengan cara-cara yang langsung, melainkan dengan menggunakan landasan legitimasinya untuk menjadi calon Presiden. Berikut adalah kutipan kontra-wacana Megawati Soekarnoputri terhadap wacana politik Abdurrahman Wahid yang dia nilai sangat merendahkan dirinya.

Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang sekaligus juga Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan bahwa, "amanat Kongres Bali dan Semarang seringkali disalah-artikan sehingga seolah-olah secara pribadi saya berambisi menjadi presiden". Oleh karena itu, Megawati Soekarnoputri mengatakan kongres partailah yang mengamanatkan dirinya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian pidato Megawati

Soekarnoputri melalui teleconference pada upacara penutupan hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan di Malang (Kompas, 21 Mei 2001).

Berkenaan dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri tersebut di atas, Dr Syahrir, ahli ekonomi terkemuka yang mendirikan Perhimpunan Indonesia Baru sebagai persiapan untuk terjun ke dunia politik, mengemukakan, "Mula-mula mereka memang kompak, tapi sekarang makin menjauh".

Hingga akhir tahun lalu, Megawati Soekarnoputri secara terbuka masih menolak suara-suara yang menyarankan dirinya bersedia menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid.

"Bila itu dilakukan, republik ini akan kacau, dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya lagi," kata Megawati Soekarnoputri berkali-kali ketika itu. Tapi, sejak proses dikeluarkannya memorandum I bagi Presiden, Megawati Soekarnoputri tampak menjauh dari Abdurrahman Wahid. Mega, misalnya, mengizinkan Fraksi PDI-P DPR bekerja sama dengan politisi "Poros Tengah" dan Golkar untuk menjatuhkan memorandum II.

Isyarat-isyarat politik makin hari makin menunjukkan betapa Megawati Soekarnoputri memang telah benar-benar kehilangan kepercayaan kepada presiden-sahabat yang sebelumnya ia panggil dengan sapaan "Mas Dur". Senin pekan lalu, ketika menerima Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Megawati Soekarnoputri memberikan pernyataan bak "vonis mati" bagi pemerintahan Gus Dur (Gatra, 26 Mei 2001).

Setelah kejadian tersebut, Megawati Soekarnoputri menyerahkan sepenuhnya proses politik kepada rekan-rekan PDIP di DPR/MPR. Megawati, tanpa memproduksi wacana politik lagi, kembali lebih memilih mengembangkan wacana lain yang bersentuhan dengan *human interest*. Tidak banyak berita yang memuat pernyataan langsung Megawati. Kalaupun ada, sebagaimana dikutip berikut ini, tidak mengandung unsur dengan sengaja ingin merebut, menggunakan, mempertahankan atau mengendalikan kekuasaan.



"Pemberian tanaman oleh Dubes Algeria memiliki ikatan bathin yang kuat. Makanya, saya langsung berbicara kepada Pak Taufik Abdullah dan Dedi. Tanaman pemberian itu harus tumbuh," kata Megawati dalam sambutan ringannya.

Acara peletakkan batu pertama berlangsung singkat dan santai. Tanpa ada kesan protokoler yang begitu ketat. Bahkan, ketika pembawa acara salah ucap, Megawati Soekarnoputri hanya tersenyum tipis.

Misalnya, saat MC mengatakan kepada seluruh hadirin bahwa Megawati Soekarnoputri dipersilakan untuk meletakkan batu pertama. Padahal, seharusnya saat itu Kepala LIPI Pusat Taufik Abdullah menyampaikan sambutannya. Untung, saat itu Megawati Soekarnoputri tidak langsung berdiri.

Suasana pun mencair ketika Taufik mendapat giliran berbicara. Keluwesan Taufik dalam berbicara memancing Megawati Soekarnoputri dan seluruh undangan yang hadir di tempat itu untuk tertawa lebar. Bahkan, beberapa kali Megawati Soekarnoputri menoleh ke direktur KRB sambil tertawa.

Kemarin, Megawati Soekarnoputri lebih banyak mengobrol dengan sejumlah dubes. Malahan, sesekali obrolan itu diwarnai tawa. Sepertinya hubungan Wapres dengan para dubes memang terbilang dekat.

Seusai meletakkan batu pertama, acara dipindahkan ke kafe Botanicus, yang jaraknya beberapa ratus meter dari lokasi rumah kaca. Untuk mengangkut undangan dan para dubes, panitia menyiapkan dua bus.

Di kafe milik KRB itu suasana semakin akrab. Setelah mengambil hidangan kecil yang disiapkan, Wapres mengambil meja paling luar, ditemani dubes Algeria dan beberapa Dubes lainnya.

Di tempat ini pun suasana begitu santai. Kesan protokoler sama sekali tidak terlihat. Semua undangan bebas bolak-balik di sekitar meja yang dipakai Mega, tanpa merasa canggung. Soalnya, Megawati Soekarnoputri sendiri begitu asyik ngobrol dengan sahabatnya dari Algeria itu. Satu jam berada di kafe Botanicus, sekitar pukul 11.30, rombongan Wapres meninggalkan KRB dengan menumpang VW Caravel B 8877 LO warna biru tua (Jawa Pos, 15 Juli 2001).

Ungkapan feminin-minimalis mungkin cocok untuk menggambarkan gaya berwacana Megawati. Dia tidak banyak berbicara dengan kata-kata, tetapi justru melalui itu dia berhasil menarik simpati yang begitu besar dari sebagian besar rakyat Indonesia. Gaya ini, misalnya, bisa dibandingkan dengan Abdurrahman

Wahid yang sangat produktif dalam menghasilkan wacana, sehingga pernah diselorohi oleh Amien Rais, kalau saja Abdurrahman Wahid mau berhenti bicara barang sebulan maka Indonesia akan stabil.

### **C. Kontra-Wacana Politik Amien Rais**

Berbagai pernyataan dan keputusan Abdurrahman Wahid yang sering mengundang kontroversi karena acapkali hanya merupakan spekulasi atau karena pertimbangan pribadi Abdurrahman Wahid telah menjadi pembicaraan di kalangan anggota DPR/MPR. Salah satu komentar paling menonjol adalah bahwa Abdurrahman Wahid sudah tidak sehat akal lagi. Puncaknya, salah satu Ketua DPP Partai Golkar mengusulkan agar selaku Presiden Abdurrahman Wahid diperiksa ulang kesehatannya. Ternyata, usul yang tampak janggal ini ditanggapi secara serius oleh Ketua MPR. Menurut Amien Rais sendiri, memang sudah sejak Abdurrahman Wahid sering membuat pernyataan yang berubah-ubah, tidak konsisten, dan bahkan menyelewengkan pernyataan orang lain, sehingga dia pun mengusulkan agar dibentuk Tim Dokter Independen (TDI) guna memeriksa kesehatan jiwa dan raga Abdurrahman Wahid. Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais yang pada intinya menonjolkan butir penting dalam wacana politik, yaitu: konsistensi antarpernyataan, dan konsistensi antara pernyataan dengan tindakan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais setuju MPR membentuk Tim Dokter Independen (TDI) untuk memeriksa kesehatan Presiden Abdurrahman Wahid. TDI MPR ini kelak akan melaporkan kesehatan Presiden apa adanya.

"Kalau memang bagus katakanlah bagus, kalau memang ada sesuatu yang lemah katakanlah itu lemah sehingga kita bisa berunding

bersama-sama tentang diteruskan-tidaknya kepresidenan Gus Dur ini," kata Amien, Rabu (14/6).

Menurut Amien, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), adanya TDI MPR sebagaimana diusulkan Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono sehari sebelumnya, sama sekali bukan karena masalah perorangan dan bukan karena Presiden Abdurrahman Wahid atau siapa pun. Siapa pun yang menjadi presiden, katanya, perlu diperiksa kesehatannya secara utuh oleh tim dokter independen.

Amien mengungkapkan, pihaknya sering ditanya orang soal apakah pernyataan Presiden yang selalu kontroversial selama ini bukan disebabkan karena dua kali stroke yang dialami Presiden. "Kata Sahibul Hikayat, kata dokter, kalau orang kena stroke ada beberapa syaraf memori yang tidak sempurna. Jadi, saya amat sangat setuju (pembentukan tim dokter independen) daripada kita ribut," kata Amien tokoh Poros Tengah yang pada Sidang Umum MPR Oktober 1999 mendukung Abdurrahman Wahid menjadi Presiden.

Ditanya bukankah pembentukan TDI MPR akan menampar balik dirinya dan Poros Tengah yang tidak mempertimbangkan kesehatan Abdurrahman Wahid saat pemilihan Presiden, Amien langsung menjawab, "jangan begitu, 700 anggota MPR dulu juga sudah mengiyakan, jadi menurut saya, saya sudah betul, saya dan teman-teman yang memilih Gus Dur waktu itu sudah betul."

Bahwa sekarang perkembangannya seperti ini, jelas Amien, dulu Abdurrahman Wahid yakin sekali 60 persen visi (penglihatannya) akan pulih. "Tetapi kenyataannya sekarang kan tidak. Lebih dari itu, kita berikan kepada tim dokter independen yang tidak boleh mendistorsi tentang keadaan Gus Dur supaya kita mantap. Kalau memang sehat walafiat, ya sudah," ujarnya (Kompas, 16 Juni 2000).

Konsistensi antara pernyataan, bagi Amien Rais, merupakan tolok ukur kebenaran yang sangat penting. Karena itu, dia pun menjadikannya sebagai tolok ukur utama dalam mereaksi setiap pernyataan Abdurrahman Wahid. Begitu sering, menurut Amien Rais, Abdurrahman Wahid membuat pernyataan yang tidak konsisten, sehingga dia pun mengemukakan bahwa itu merupakan kebiasaan Abdurrahman Wahid yang sulit diubah. Karenanya, pilihannya hanya ada dua,

rakyat yang senantiasa harus menyesuaikan diri dengan presidennya, atau presidennya saja diganti.

Ketua MPR Amien Rais menilai klarifikasi Presiden Gus Dur terhadap pernyataannya soal biang kerok merupakan kebiasaan Gus Dur. "... Gus Dur kan ngomongnya tiap hari berubah. Kita dipaksa beradaptasi dengan pimpinan seperti itu. Sekarang berpulang pada kita, bisa tidak beradaptasi. Kalau bisa diteruskan, kalau tidak ya digantikan (Detik.com, July 5, 2000).

Menyusul pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kontroversi di kalangan anggota DPR, Abdurrahman Wahid banyak memberlakukan keputusan yang tidak mendukung tetap utuhnya "kabinet persatuan". Salah satu keputusan Abdurrahman Wahid yang menimbulkan reaksi keras, sebagaimana juga telah mengejutkan Megawati, adalah pemecatan dua orang Menteri, yaitu: Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi. Bagi Amien Rais, keputusan demikian jelas tidak mendukung upaya rekonsiliasi dan stabilitas politik. Amien Rais menilai bahwa langkah DPR untuk mengajukan interpelasi merupakan langkah yang sudah sewajarnya. Walaupun DPR tidak mengangkat Presiden, tetapi DPR memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan dari Presiden tentang berbagai kebijakan yang telah diambil. Presiden, menurut Amien Rais, harus mengindahkan undangan DPR untuk kepentingan interpelasi tersebut. Berikut adalah petikan wacana politik Amien Rais berkenaan dengan etika politik Presiden dengan DPR.

Sedangkan Amien Rais berharap agar Presiden bisa hadir di gedung MPR/DPR memenuhi undangan DPR. "Kalau saya jadi Gus Dur tentu harus hadir. Kalau tidak hadir, itu aneh bin ajaib," kata Amien yang yakin Presiden akan hadir dan tidak akan mewakilkannya kepada menteri.

Pertemuan, menurut Amien, akan digunakan tanya jawab seperlunya, setelah itu DPR akan menilai puas atau tidak. Tetapi Amien

mengingatkan, penggunaan hak interpelasi ini tidak ada kaitannya dengan impeachment. "Saya tidak percaya ini pintu untuk impeachment," ujarnya.

Amien yang mengaku mendengar sendiri dari Presiden atas rencana kehadirannya itu mengakui, waktu yang ditetapkan tanggal 20 Juli terlalu berdekatan dengan reses karena hanya satu hari menjelang reses. Ditanya apakah arti semua ini, Amien menjawab, "Wallahualam, soal timing itu kok mengapa harus sehari sebelum reses" (Kompas, 8 Juli 2000).

Bertolak belakang dengan sejumlah pernyataan Abdurrahman Wahid yang mengemukakan bahwa kinerja pemerintahannya cukup baik, maka menurut Amien Rais kinerja Abdurrahman Wahid benar-benar tidak tertolong. Sebagai politisi yang berlatar-belakang akademisi, Amien Rais biasa menggunakan logika ilmu pengetahuan. Artinya, berdasarkan kecenderungan yang ada, Amien Rais tidak hanya biasa melakukan tetapi juga biasa melontarkan prediksinya. "Equal pay, for equal worth", orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan hasil perbuatannya. Sebaliknya, juga mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakannya. Boleh jadi prinsip ini yang menjadi pegangan Amien Rais sehingga berani memprediksi bahwa berdasarkan kinerjanya, usia kepresidenan Abdurrahman Wahid tidak akan berlangsung lama. Bagaimana pun mengecewakan MPR dia nilai sama dengan mengecewakan rakyat. Ini menunjukkan bahwa, berbeda dari Abdurrahman Wahid, Amien Rais masih berpendapat tidak ada kesenjangan antara elit dengan massa.

Ketua MPR Amien Rais meramalkan, usia politik Presiden Abdurrahman Wahid tidak bisa panjang lagi. Alasannya, Presiden belum mampu mengatasi berbagai persoalan, khususnya persoalan ekonomi.

"Tentu 210 juta bangsa Indonesia tidak boleh disandera oleh orang bernama Abdurrahman Wahid. Jadi ketukan palu (MPR-Red) itu apakah dia (Presiden) terus lengser, apa terus longsor, sepenuhnya tergantung 700 anggota MPR," kata Amien, Kamis (27/7). [3] Kepada KMI, Amien

meminta untuk melihat apa yang terjadi di masa-masa mendatang, khususnya yang terjadi di MPR. "Saya bisa memberi tahu kepada Anda bahwa sebagian terbesar anggota MPR memang sangat kritis. Jadi wait and see, nanti ketukan palu (MPR) Insya Allah bermanfaat buat bangsa kita," katanya disambut tepuk tangan. Tetapi Amien mengingatkan bahwa segala sesuatunya harus melihat kepada bagaimana proses konstitusinya. "Tetapi yang jelas, saya boleh memprediksi, memang usia politik Abdurrahman Wahid tidak bisa panjang lagi," tegas Amien (Kompas, 28 Juli 2000).

Kepentingan nasional juga merupakan nilai pokok dalam wacana politik Amien Rais. Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais, yang tidak saja menonjolkan kepentingan nasional tetapi juga kembali menegaskan bahwa terhadap seorang pejabat publik hasil pilihan (*elected officer*), maka pengambilan keputusan terhadap kelangsungan jabatannya harus didasarkan pada kinerjanya. Bagaimana pun yang institusional harus lebih dinomor-satukan daripada yang personal. Abdurrahman Wahid selain tidak boleh "menyandera rakyat Indonesia", rakyat sendiri sebagaimana direpresentasikan oleh DPR/MPR tidak boleh mengalah demi karir politik pribadi Abdurrahman Wahid.

Di Makassar, Amien Rais yang ditanya pers, Jumat, mengatakan, prediksinya tentang usia karier politik Abdurrahman Wahid itu berdasarkan pada kinerja presiden selama ini. Itu, katanya, sekaligus menjadi peringatan keras.

"Presiden Gus Dur memiliki the last chance (kesempatan terakhir) untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Saya yakin Gus Dur akan lolos dari Sidang Tahunan MPR. Beliau bisa makan enak dan tidur nyenyak hingga selesai sidang. Tetapi pasca sidang tahunan, MPR, DPR, pers dan masyarakat akan makin ketat mengawasi kinerja pemerintahan Gus Dur," katanya.

Bila pasca sidang tahunan indikator pokok pemulihan krisis seperti menguatnya kembali nilai rupiah, digalakkannya pemberantasan KKN, terciptanya keamanan dan kepastian hukum, nilai tukar rupiah kian membaik, pemberantasan KKN digalakkan, dan keamanan berhasil ditegakkan, maka usia politik Gus Dur akan panjang.

"Tapi kalau semua indikator itu jelek, masak bangsa sebesar ini mau mengalah demi karier politik satu orang saja. Itu tidak masuk akal," tandas Ketua Umum PAN ini.

Amien Rais juga merespons. Ketua MPR yang dituding Gus Dur penakut itu meminta agar hati-hati jika memberikan pernyataan (Jawa Pos, 1 September 2000).

Apa yang selalu khas dalam diri Amien Rais adalah wacana politiknya yang senantiasa segar, dan menantang para pakar ilmu sosial dan politik untuk mencermati label-label yang dia gunakan. Pernyataan-pernyataan Abdurrahman Wahid, yang sebagaimana di depan telah digambarkan menghasilkan sejumlah kontroversi dan reaksi, menurut Amien Rais seringkali tidak berdasar pada kenyataan. Abdurrahman Wahid, dalam sorotan Amien Rais sering mereka-reka peristiwa, mengemukakan seolah-olah sesuatu kejadian sedang atau telah berlangsung, padahal dalam kenyataan tidak terjadi sama sekali. Kalau orang lain mungkin melabel Abdurrahman Wahid sebagai orang yang sering "ngelantur", maka label yang digunakan oleh Amien Rais adalah bahwa Abdurrahman Wahid telah memaparkan cerita rekaan (artificial story). Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais tentang "kebohongan" Abdurrahman Wahid yang dilabel sebagai cerita rekaan.

"Akhir-akhir ini Gus Dur telah melakukan artificial story. Risikonya, yang merasa dirugikan bisa menuntut," katanya setelah menjadi khatib salat jumat di Masjid Al Ikhlas, Komplek Mabes Polri (Kompas, 29 Juli 2000).

Ketika selaku Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan dan mengangkat Kapolri, Amien Rais menyatakan bahwa hal itu sudah diatur dalam Tap MPR. Pelanggaran terhadap Tap MPR, karena itu, dianggap sebagai tindakan inkonstitusional. Berikut adalah reaksi Amien Rais terhadap keputusan Abdurrahman Wahid untuk mengganti Kapolri.

Menurut Amien Rais, Tap MPR merupakan bagian dari GBHN sehingga kedudukannya sangat tinggi. Dan dalam hal ini presiden harus betul-betul mencermati dan mematuhi Tap itu. "Dalam hal penggantian Kapolri, kami yakin tidak ada alasan yang bisa dicari-cari untuk mengatakan bahwa penggantian Kapolri itu tidak bertentangan dengan Tap MPR No VII/MPR/2000), khususnya pasal 7 ayat3," ungkap Amien (Surya, 20 September 2000).

Etika politik kembali menjadi muatan wacana politik Amien Rais. Ini tampak terutama ketika Amien Rais menanggapi wacana politik Abdurrahman Wahid yang cenderung menggunakan hak prerogatif sebagai dasar dari sebagian besar keputusannya. Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais tentang etika politik, termasuk etika Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya.

Amien -- mengacu pada putusan Rapim MPR -- mengatakan bahwa keputusan presiden melantik Bimantoro dinilai telah melanggar Tap MPR No VII/MPR/2000). Sebab dalam pasal 7 ayat 3 Tap dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan presiden atas persetujuan DPR.

Menurut Amien, dirinya tetap bertahan pada sikapnya menganggap tidak sah pelantikan Kapolri. "Pengangkatan Kapolri tetap tak sah. Itu berseberangan dengan Tap MPR yang seharusnya dijunjung tinggi," tegas Amien menjawab wartawan di sela-sela seminar nasional Reaktualisasi agenda Reformasi di Hotel Regent, Jakarta, kemarin.

Amien menilai, saat ini telah terjadi kesemrawutan pemahaman terhadap Tap MPR. Padahal, menurut dia, isi Tap itu sudah sangat jelas. "Saya heran, yang sudah jelas dibuat semrawut. Yang kurang jelas dibuat gelap."

Soal hak prerogatif presiden, Amien menyebutkan ada pembelaan-pembelaan yang begitu dahsyat. Sebab, ada yang bilang bahwa Tap MPR justru belum ada undang-undangnya, juklak, juknis, dan lain-alain. Padahal, hak prerogatif itu tak terlepas begitu saja. Artinya, masih ada kode etikanya. "Saya kira hak prerogatif itu ada kode etikanya, ada rambu-rambunya. Bukan seluruhnya bisa dilakukan atas nama hak prerogatif," sebut Amien.

Amien memberi contoh. Kalau dia punya Rp 1 juta di kantongnya, itu serta merta menjadi hak prerogatifnya. Dengan uang tersebut, dia bebas membelanjakannya. Misalnya, untuk membeli baju, almari, atau sepatu. "Tetapi, juga bisa saya bakar karena itu hak prerogatif saya. Kan



membakar uang sendiri. Tetapi, saya kira membakar uang sendiri tindakan terkutuk," jelasnya (Warta, Oktober 2000).

Walaupun banyak kritik diajukan terhadap Amien Rais, ternyata Amien Rais tetap pada pendiriannya bahwa Abdurrahman Wahid telah melanggar Tap MPR, yang berarti cukup layak untuk diajukan dalam sidang istimewa. Berikut adalah petikan kritik, sekaligus keteguhan Amien Rais terhadap pendapatnya.

Akbar acc. Malah Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menjustifikasi dengan mengatakan DPR juga kecewa dengan kerja polisi. Klop, Rusdihardjo dicopot. Tapi apa yang terjadi? Amien Rais mencak-mencak. Gus Dur dituding sumber masalah. Ia melanggar Tap MPR, karena itu harus disidang-istimewakan. "Pencopotan Rusdihardjo tidak sah," kata Amien. Beres? (Jawa Pos, 24 September 2000).

Integrasi nasional juga merupakan butir penilaian politik Amien Rais terhadap Abdurrahman Wahid yang paling penting. Ini tampak dari sejumlah pernyataan Amien Rais yang memberikan penekanan yang lebih terhadap sejumlah indikator yang menunjukkan kegagalan Abdurrahman Wahid. Berikut adalah kutipan pernyataan Amien Rais yang memberikan penekanan pada pentingnya integrasi nasional sebagai salah satu indikator kritik kinerja presiden Abdurrahman Wahid.

Ketua MPR RI Amien Rais mengancam akan benar-benar menggelar SI (Sidang Istimewa) jika Presiden Abdurrahman Wahid terus-terusan menantang MPR untuk SI. Bahkan, dalam SI itu, dirinya tidak hanya mempermasalahkan pencopotan mantan Kapolri Rusdihardjo. Tetapi, masalah lain pemerintahan Abdurrahman Wahid juga akan dibawa ke SI itu.

"Kalau Gus Dur memang menantang untuk SI, MPR bukan hanya mempermasalahkan pencopotan Kapolri, tetapi juga masalah kegagalan pemerintahan Gus Dur dalam mengatasi keamanan, KKN, dan gejala disintegrasi bangsa," ungkap Amien di sela-sela memberikan ceramah di Universitas Muhammadiyah Malang kemarin.

Menurut Amien, dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid saat ini, sangat banyak kegagalan yang secara implikasi belum disadari presiden. Kegagalan-kegagalan itu sudah mulai terasa sekarang. "Kegagalan yang terasa itu mulai masalah pemberantasan KKN, mengatasi krisis ekonomi, pengangguran, sampai masalah gejala disintegrasi bangsa."

Bahkan, soal ancaman diintegrasi ini, lanjut dia, sudah pada titik yang sangat rawan. Dia mencontohkan soal peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus lalu. Hampir tidak ada peringatan hari kemerdekaan itu di Irian Jaya maupun di Aceh. Tak hanya itu. Bendera merah putih pun sudah mulai sangat sulit ditemukan di kedua provinsi tersebut. Yang banyak terlihat hanya bendera bintang kejora di Irian Jaya dan bendera GAM di Aceh.

Kondisi semacam ini sangat tidak direspons oleh pemerintah. Dia lantas menganalogikan kondisi Irian Jaya dan Aceh seperti perang perebutan Irian Barat dari tangan Belanda oleh TNI pada 1960-an. Bedanya, kalau pada perang tahun ini, TNI dan rakyat sudah benar-benar menguasai medan sehingga hanya tinggal merebut tempat-tempat vital dan gedung pemerintahan saja.

"Tetapi, yang terjadi sekarang sebaliknya. Sepertinya masyarakat sudah bergabung dengan milisi dan hanya tinggal menunggu saat-saat perebutan gedung pemerintahan saja. Bisa dibayangkan betapa sudah kritisnya kondisi wilayah kedua provinsi itu," jelasnya.

Kalau masalah ini tidak direspons secara kongkret oleh pemerintah dan jika benar-benar digelar SI, pemerintah harus mempertanggungjawabkan. "Jadi, saya berharap dia tidak usah menantang MPR untuk SI. Sebab, kalau ada SI, saya tidak bisa menjamin Gus Dur bisa bertahan," ujarnya (Jawa Pos, 8 Oktober 2000).

Pertikaian Abdurrahman Wahid dengan Amien Rais semakin memuncak.

Apa yang dinilai oleh Abdurrahman Wahid sebagai konstitusional, oleh Amien Rais dinilai inkonstitusional. Apa yang oleh Abdurrahman Wahid dinilai tidak cukup kuat untuk menjadi dasar penyelenggaraan SI, oleh Amien Rais dinilai sebagai sangat mungkin. Dan bila SI benar-benar dilangsungkan, maka menurut Amien Rais SI tersebut akan menjadi ajang pengadilan terhadap Abdurrahman Wahid yang secara logik akan benar-benar "menendang" Abdurrahman Wahid

dari kursi kepresidenan. Berikut adalah pernyataan Amien Rais yang menentang logika politik Abdurrahman Wahid bahwa dalam SI pun dia akan menang.

Tantangan Presiden Abdurrahman Wahid kepada Ketua MPR untuk menggelar sidang istimewa ternyata mendapat reaksi balik yang keras dari Amien Rais. Kepada wartawan di Denpasar kemarin, Amien meminta Presiden tidak menantang menggelar SI. "Jika sampai SI terjadi, dia akan out selamanya," cetus Amien.

SI bisa menjadi tempat pengadilan wakil rakyat terhadap kinerja presiden selama ini. Soalnya, jika SI sampai jadi dilaksanakan, bukan hanya persoalan pergantian Kapolri yang menjadi masalah. Berbagai hal akan diungkapkan dan presiden akan kewalahan.

"Saya anjurkan Gus Dur tidak menantang lagi soal Sidang Istimewa. Sebab, bila sampai terjadi SI, tentu yang dimasalahkan bukan hanya pergantian Kapolri. Itu masalah kecil sekali," ujar Amien.

Amien menyarankan Presiden bekerja dengan baik. Sebab, dalam situasi yang membutuhkan ketenangan dalam berpikir dan bertindak seperti saat ini, semua elemen bangsa harus saling mengisi untuk menuntaskan persoalan. Bukan yang satu menantang yang lain.

"Saya minta dia tidak usah menantang-nantang seperti itu. Sebab, yang terpenting dalam keadaan seperti ini, bekerja sebaik-baiknya," kata ketua MPR itu (Kompas, 13 Oktober 2000).

Etika politik Presiden terhadap DPR kembali ditegaskan oleh Amien Rais. Ini tampak dari wacana yang dikembangkan lebih belakangan, bahwa Presiden harus hadir manakala diundang oleh DPR, lebih-lebih bila menyangkut "skandal" yang dituduhkan kepadanya. Presiden, menurut Amien Rais, juga seorang warga negara yang harus menghormati lembaga perwakilan rakyat. Pengabaian terhadap undangan DPR dinilai melanggar hak *sub-pona* DPR.

Tentang kemungkinan ketidakhadiran Presiden, Amien Rais mengingatkan Presiden bahwa saat ini adalah masa reformasi di mana eksekutif dan legislatif dalam posisi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. "Kalau Gus Dur (Presiden) diundang DPR untuk menjelaskan Bruneigate dan Buloggate atau gate-gate lainnya, maka harus hadir karena dia (Presiden) adalah juga warga negara," kata Amien (Jawa Pos, 10 Oktober 2000).

Kinerja harus menjadi dasar dari pengambilan keputusan terhadap kelangsungan jabatan publik. Karena menurut Amien Rais kinerja Abdurrahman Wahid sejak menjadi Presiden (Oktober 1999) hingga Oktober 2000 sangat mengecewakan, maka bisa dipastikan bahwa dalam SI semua bentuk wanprestasi dari Abdurrahman Wahid akan diungkap dan dipersoalkan oleh para anggota DPR dan MPR.

Dengan nada geram, Amien mengatakan, kalau terjadi Sidang Istimewa maka ia memastikan yang terjadi adalah Presiden Gus Dur pasti akan out dari jabatannya sebagai Presiden. Amien menegaskan, "MPR kalaupun akan mengadakan Sidang Istimewa maka tidak hanya mempersoalkan masalah Kapolri karena hal itu merupakan masalah kecil saja dari sekian banyak masalah yang belum diselesaikan oleh Presiden." (Tabloid Nasional, 13 - 20 Oktober 2000).

Etika Presiden sebagai pejabat publik tertinggi kembali dipersoalkan oleh Amien Rais, yaitu ketika Abdurrahman Wahid mengadakan pertemuan dengan Hutomo Mandala Putra yang berstatus sebagai terpidana. Sungguh bukan merupakan perbuatan terpuji bila seorang Presiden mengadakan pertemuan khusus dengan seorang narapidana, lebih-lebih terpidana itu dikenal sebagai orang yang mungkin saja bisa menyuap seorang Presiden. Dengan tindakan menemui narapidana, berarti Abdurrahman Wahid telah secara tidak langsung menciptakan fitnah bagi dirinya sendiri, karena pasti menimbulkan tanda-tanya baik di kalangan para anggota DPR/MPR maupun rakyat secara umum.

Ketua MPR Amien Rais berpendapat, pertemuan Presiden Abdurrahman Wahid dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang sudah berstatus terpidana, tidak seharusnya terjadi. Selain

akan memunculkan dugaan adanya deal-deal tertentu, pertemuan itu akan membuat wibawa dan martabat Presiden turun dan bahkan hancur.

"Sebagai seorang warga negara, saya tidak menerima kedudukan Presiden yang sedemikian tinggi datang kepada seorang yang terpidana katakanlah kriminal- mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita tahu apa. Saya kira wibawa Presiden sangat drop dan bahkan hancur," kata Amien saat ditemui Kompas usai menghadiri pembukaan Konferensi Ke-104 Inter-Parliamentary Union, Minggu (15/10) malam.

Amien mengaku heran dan sampai kini belum paham bagaimana seorang Presiden bisa datang menemui seseorang yang sudah dinyatakan sebagai terpidana di sebuah hotel. "Menurut saya, martabat kepresidenan itu terbanting bukan main," katanya lagi.

"Saya tidak punya sedikit pun rasa benci atau iri, tetapi bahwa Tommy sudah divonis 18 bulan tinggal menunggu masuk (bui), lantas presiden datang ke suatu tempat untuk menemuinya, itu tidak baik dan lucu," ujar Amien (Kompas, 16 Oktober 2000).

Mondok kelas. Ini adalah kiasan politik lain yang digunakan oleh Amien Rais untuk menggambarkan kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid. Terlepas dari istilah-istilah "sangat kreatif" dari Amien Rais, tetapi jelas bahwa nilai yang ingin ditonjolkan adalah bahwa seorang Presiden, lebih-lebih Presiden suatu negara yang sedang banyak dirundung masalah, harus memiliki kinerja yang istimewa. Kalau dari perspektif Amien Rais bisa ditafsir bahwa reaksinya terhadap Abdurrahman Wahid merupakan gambaran kekecewaannya terhadap kinerja Abdurrahman Wahid, maka dari sudut lain sangat rasional untuk disimpulkan bahwa Amien Rais begitu berambisi untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid. Logika lanjutan dari skenario ini adalah bahwa hanya bila Abdurrahman Wahid "lengser atau longsor" maka ada kesempatan bagi Amien Rais untuk menjadi Presiden. Walaupun demikian, dalam wacana politiknya Amien Rais juga banyak menegaskan bahwa karena pemegang kedaulatan sebenarnya adalah rakyat, maka rakyat pula yang harus berpikir dan kemudian

mengambil keputusan melalui institusi yang ada. Berikut adalah nukilan pernyataan Amien Rais tentang nilai kinerja dan kedaulatan rakyat.

Menurut Amien yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), rapor pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid selama satu tahun semuanya merah. Dia menyebut masalah keamanan yang belum mantap, rasa aman warga negara yang belum terjamin, krisis ekonomi, dan konflik horizontal yang mengarah pada disintegrasi teritorial, sebagai pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan Presiden dengan baik. Bahkan, Amien menyebut Presiden sebagai "mondok kelas" alias tidak naik kelas.

Ditanya, bukankah semua itu terpulang kepada MPR sendiri. Amien menjelaskan, sebelum sampai MPR memutuskan sesuatu, harus dirembukkan terlebih dahulu. "Jadi pemikiran ulang ini terpulang kepada rakyat, kepada politisi, kepada DPR, ulama, intelektual, dan bahkan pers. Saya hanya salah satu unsur dari masyarakat itu," katanya (Kompas, 17 Oktober 2000).

Objektivitas dalam menilai kinerja pejabat politik merupakan butir nilai lain yang ditonjolkan oleh Amien Rais. Bagi setiap bangsa yang memiliki presiden yang sedang diragukan kinerjanya, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka, kecuali melakukan penilaian ulang menuju "saat-saat kebenaran". Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais tentang perlunya penilaian kembali terhadap kinerja Presiden Abdurrahman Wahid.

Apakah Presiden Wahid masih bisa dipertahankan, Amien menjawab, "Terserah Anda, kalau Anda bilang 'masih bisa', ya apa boleh buat. Kalau Anda mengatakan 'mari berpikir ulang,' maka marilah kita berpikir ulang."

"Saya kira ini adalah moment of truth. Sekarang kita harus bertanya pada hati nurani kita masing-masing, apa betul negara ini sudah semakin bagus atau amburadul. Kalau bagus, alhamdulillah, tetapi kalau makin lepas kendali, apa boleh buat. Kita tidak ingin kapal republik kita ini karam," kata Amien lagi (Kompas, 17 Oktober 2000).

Rasional, konstitusional, beradab, dan demokratik merupakan rangkaian nilai yang cukup menonjol dalam wacana politik Amien Rais. Poros Tengah bukan pengikut (*true believers*) bagi Abdurrahman Wahid. Kalaupun diteorikan sebagai pemilih, maka para pendukung Poros Tengah adalah para pemilih rasional (*rational voters*). Mereka ini bisa diibaratkan para penari swing (*swing voters*), yang kadang serong ke kanan, tetapi kemudian serong ke kiri. Rasionalitas merupakan kekuatan pendorong bagi mereka, untuk apakah akan mendukung kiri atau kanan. Ini yang tercermin dari tanggapan Amien Rais ketika ditanya bukankah dulu yang mendukung Abdurrahman Wahid untuk menjadi Presiden adalah Poros Tengah. Jadi ketika Abdurrahman Wahid menunjukkan kinerja yang mereka nilai jauh dari yang diharapkan, maka mereka pun secara eksplisit menarik dukungannya terhadap Abdurrahman Wahid. Namun, dalam melaksanakan kehendaknya untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid, Poros Tengah memilih cara-cara yang konstitusional, beradab dan demokratik. Institusi dan proses pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan merupakan pilihan rasional bagi pendukung Poros Tengah. Berikut adalah representasi dari wacana tersebut.

"Poros Tengah memang pernah mengangkat dan memperjuangkan Abdurrahman Wahid ke puncak kursi Presiden. Tetapi, setelah melihat performance dan kinerja yang berbahaya itu, kita (Poros Tengah) tidak mendukung lagi, tetapi tidak dengan mengerahkan massa. Ngapain? Wong ada cara-cara yang sangat beradab, demokratis, dan konstitusional, yaitu cara mekanisme aturan main di MPR/DPR," kata Amien. Minggu (14/1), usai menghadiri silaturahmi DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Amien, cara-cara demokratis dan konstitusional di MPR/DPR itu di antaranya dengan cara penyampaian memorandum apabila kinerja Presiden dianggap buruk. Apabila Presiden tidak bisa juga

memperbaiki kinerjanya, memorandum itu bisa mengarah kepada pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.

"Tetapi kalau dengan memorandum Abdurrahman Wahid bisa membuat kerja bagus sekali, banting stir ke arah positif, dan dia survive, dia bisa melenggang sampai tahun 2004. Ini masalah sederhana, jangan dibayangkan bakal ada kiamat buat Indonesia," papar Amien (Kompas, 15 Januari 2001).

Tolok ukur yang digunakan oleh Amien Rais untuk menentukan apakah suatu keputusan politik di lembaga perwakilan itu baik atau tidak adalah seberapa jauh keputusan tersebut rasional dan bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Dalam ungkapan ilmu-ilmu sosial ini menunjuk pada kaidah keberterimaan sosial dan politik (*socially and politically acceptable*). Amien Rais yang cukup sering bersama-sama para demonstran berorasi di ruang publik, dalam mengambil keputusan ternyata mengandalkan lembaga yang secara legal memiliki kewenangan. Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais tentang kaidah keputusan politik yang baik dan oleh siapa seharusnya keputusan dibuat.

"Mohon kita sadari inilah ujian yang sangat krusial bagi demokrasi kita. Kalau seluruh penyelesaian Buloggate, Bruneigate, dan lainnya itu diserahkan sepenuhnya kepada DPR, insya Allah hasilnya akan mantap, akan rasional, dan bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia," kata Amien Rais.

"Wakil kita, ya, DPR itu. Bukan orang yang hanya bisanya bicara keras di pinggir jalan kemudian seolah-olah sudah menjadi wakil rakyat," katanya (Kompas, 30 Januari 2001).

Dalam menghadapi para pendukung Abdurrahman Wahid yang melakukan protes besar-besaran terhadap langkah-langkah Amien Rais dan sejumlah anggota MPR, Amien Rais lebih memilih menyelesaikan gerakan massa anarkhi dengan pendekatan konstitusional dan institusional. Ini yang tercermin dari reaksi Amien



Rais ketika mengamati gelombang besar protes pendukung Abdurrahman Wahid terhadap apa yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR/MPR. Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais.

Menanggapi gelombang besar protes para pendukung Gus Dur tersebut para elit politik, malah berang dan mengancam justru akan mempercepat SI MPR. Pada hari Senin (05/02) Amien Rais, misalnya, berkata: "Ada aksi pasti ada reaksi. Jadi reaksi saya tidak lain, kalau mereka semakin anarki dan tidak bisa menahan diri, itu pertanda SI harus dipercepat, itu saja." Lalu, mulai merebaklah isu pengumpulan tanda tangan di MPR, yang konon sempat mencapai 200 penandatanganan, untuk meminta SI MPR dipercepat.

"Bila Saudara Abdurrahman Wahid bersikukuh tidak mau mundur, memang harus ada SI MPR. Ada model memorandum. Tetapi, meski pasti dilaksanakan, itu agak lama. Saya tanya pada Pak Matori (Wakil Ketua MPR-Red), apakah mungkin DPR meminta MPR untuk SI. Ternyata, bukan hanya Pak Matori saja mengatakan, bila hal itu dimungkinkan, mengapa tidak. Kami sedang menunggu sikap partai," kata Ketua MPR Amien Rais dalam keterangan pers, Senin (12/3), usai memimpin rapat informal dengan pimpinan MPR, pimpinan partai, dan pimpinan Badan Pekerja (BP) MPR (Kompas, 13 Maret 2001).

Bertolak belakang dari pernyataan Abdurrahman Wahid yang menegaskan bahwa pengambilan keputusannya selaku presiden merupakan keputusan yang didasarkan pada kewenangan dan pertimbangan para pakar, menurut Amien Rais, Abdurrahman Wahid banyak mengambil keputusan mengikuti suara "para pembisik maut". Selanjutnya, karena para pembisik ini telah memberikan informasi yang salah, maka keputusan Abdurrahman Wahid pun banyak yang salah. Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais yang juga lebih menonjolkan persoalan substantif dibanding persoalan formalitas.

Berkaitan dengan peran para pembisik Presiden Abdurrahman Wahid, yang pernah disebutnya sebagai "pembisik maut", Amien mengakui, ada distorsi dan disinformasi dari para pembisik yang menjadikan Presiden mendapat informasi yang benar terpotong.

"Akibatnya, Presiden seperti tenang-tenang, santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Para pembisik itu seharusnya menyampaikan kebenaran," katanya.

Dalam keterangan pers sebelumnya, Amien menyatakan tidak akan ragu-ragu dirinya selaku pimpinan MPR bersikap untuk mengambil inisiatif ke arah terlaksananya SI MPR. Meski diakui bahwa partai-partai atau fraksilah yang seharusnya mengambil inisiatif. Akan tetapi bila keadaan sudah semakin terpuruk, dirinya siap mengambil inisiatif. "Tentu, tentu," jawab Amien saat ditanya apakah dirinya akan mengambil inisiatif tersebut.

"Bangsa ini sedang menangis berat, masak kita diam saja seolah-olah tidak tahu. Kita selamatkan bangsa dan negara yang sudah sangat kritis ini atau bermain-main pada formalisme" (Kompas, 13 Maret 2001).

Pengambilan keputusan secara bertahap dan prosedural merupakan ciri lain dari logika politik Amien Rais. Memorandum pertama dikeluarkan untuk tidak hanya mendapatkan tanggapan positif tetapi juga harus diikuti dengan tindakan korektif. Bila ini tidak dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, atau tanggapan Abdurrahman Wahid ditolak oleh lembaga perwakilan rakyat, maka sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan bertahap, memorandum kedua harus dikeluarkan. Berikut adalah kutipan pernyataan yang terkait dengan logika pengambilan keputusan secara bertahap dan prosedural.

Di tempat terpisah, Ketua MPR Amien Rais mengatakan, "DPR sudah lebih maju dibanding MPR dengan mendesakkan memorandum kedua sebagaimana dilakukan enam fraksi DPR. Kalau kondisi objektif masih seperti ini dan tanpa perubahan, maka jawaban memorandum pertama harus ditolak dan memorandum kedua segera dikeluarkan" (Kompas, 20 Maret 2001).

Apa pun keputusan yang diambil oleh MPR, menurut Amien Rais keputusan tersebut harus tidak mengakibatkan keguncangan yang mengganggu stabilitas nasional. Ini diungkapkan oleh Amien Rais dengan kiasan "menangkap

ikan tanpa mengeruhkan air". Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais se usai pertemuan bersama para pemimpin lembaga perwakilan rakyat.

Kubu yang beranggotakan 32 anggota dewan itu lahir dari gagasan "Curah pendapat", 11 Nopember 2000. merekalah yang menjadi bulldoser demi menggusur Gus Dur dari kursi kepresidenan. Dua pekan lalu, mereka merasa menang satu ronde, karena sidang pleno DPR menyodok Gus Dur dengan memorandum I, lewat pintu Panitia Khusus (Pansus) Buloggate dan Bruneigate.

Walau begitu, sepanjang pekan lalu, para koboi DPR ini seolah kehabisan pelor. Setelah melancarkan memorandum, tak terdengar lagi gebrakan mereka. Beberapa petinggi partai dan fraksi lantas menggelar pertemuan mendadak di ruang kerja Ketua MPR, Prof. Amien Rais, di lantai III, Kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Wartawan tak boleh menguping. Tapi, se usai pertemuan, Amien Rais sempat mengatakan bahwa mereka sedang menggodok suatu komunike bersama. Isinya, berupa imbauan tujuh partai besar kepada Gus Dur. Bagaimana bunyi imbauan, itulah yang masih dibahas. "Kami harus berhati-hati, agar ikannya tertangkap tapi airnya tidak keruh," katanya (Tempo, 1 April 2001).

Konsistensi antara pernyataan dengan tindakan politik merupakan salah satu butir muatan wacana politik Amien Rais. Pembicaraan antarpemimpin politik tidak boleh berhenti di tingkat pembicaraan, tetapi harus ditindak-lanjuti dengan tindakan untuk mewujudkan hasil pembicaraan. Amien Rais tidak mau terjebak dalam berbagai bentuk tindakan politik citra (*politics of image*). Karena itu, dia pun mengemukakan keengganannya untuk kembali diajak terlibat dalam pembicaraan dengan Abdurrahman Wahid, lebih-lebih bila agenda pembicaraan itu tidak jelas. Berikut adalah pernyataan Amien Rais ketika menanggapi ajakan untuk melakukan pertemuan bersama Abdurrahman Wahid. Selain butir tersebut, Amien Rais juga menegaskan bahwa pertemuan seperti itu harus berhasil

memecahkan permasalahan bangsa, harus membahas inti permasalahan (*the crack of problem*). Berikut adalah petikan pernyataanya.

Amien mengatakan, kita harus belajar dari pengalaman. Dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Gus Dur, seperti di keraton Yogyakarta, Ciganjur, Istana Negara, dan pernah juga di Crown Hotel menjelang sidang tahunan yang lalu.

Akan tetapi, masukan yang telah dilontarkan sepertinya tidak pernah didengarkan sama sekali. Karena itu, Amien menegaskan sekali lagi, "Saya mau (pertemuan) itu sekali ini," tetapi dengan agenda pertemuan yang sangat jelas dan tidak bisa ditebak-tebak.

"Jadi", jelasnya, "pertemuan itu mau membicarakan apa. Kalau hanya basa-basi diliput koran dan televisi, kemudian satu dua hari menjadi berita, lantas hilang lagi, dan seolah-olah masalah bangsa sudah selesai, Amien berpendapat, pertemuan itu justru akan menjadi bumerang bagi kita semua".

"Sebab", ujarnya, "kita akan dihakimi oleh orang Indonesia, seolah-olah tidak sungguh-sungguh dan sebagainya dalam memecahkan persoalan bangsa. Karena itu, hal yang terpenting dalam pertemuan tersebut adalah *the crack of the problem*. Maksudnya, kita harus menemukan apa inti permasalahannya".

Menurut Amien, "Intinya (persoalan) adalah kepemimpinan nasional Abdurrahman Wahid yang sudah tidak didukung oleh rakyat, DPR, unsur-unsur masyarakat yang begitu jelas."

Ia menambahkan, soal kepemimpinan Presiden tentu ada yang mendukung, tetapi dukungan tersebut kecil. Jadi, jelas Amien, sebuah pemerintahan yang sudah kehilangan legitimasi itu sudah tidak berfungsi lagi. Indikasinya bisa dilihat dari nilai mata uang rupiah yang tidak ada lagi bobotnya jika berhadapan dengan dollar, pembengkakan angka pengangguran, keamanan yang kacau-balau dan tidak bisa dijamin lagi, kemudian gerakan separatisme semakin mencuat di berbagai provinsi.

Amien sekali lagi mengingatkan, kalau empat tokoh bertemu, apalagi pertemuan tertutup, dan kemudian seolah-olah ada pembicaraan hendak bagi-bagi kursi atau mengapling-kaplingkan kabinet, itu sungguh tindakan yang memalukan di hadapan rakyat Indonesia (Kompas, 9 April 2001).

Kalaupun Abdurrahman Wahid diturunkan melalui SI, maka menurut Amien Rais, keputusan itu merupakan keputusan konstitusional. Menggaris-bawahi butir sikap konstitusional ini, berikut petikan pernyataan Amien Rais tentang kewajaran seorang pemimpin dalam negara demokrasi itu naik dan turun, asalkan proses naik dan turun tersebut didasarkan pada dan melalui proses konstitusional.

"Ini penting. Sebab, apa pun hasil sidang istimewa, terutama yang kita bisa prediksi kemunculan wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, harus diterima secara tulus. Sementara pendukung Abdurrahman Wahid harus legowo menerima kenyataan turunnya Presiden karena itu merupakan proses konstitusi," kata Amien Rais di Makassar.

"Biasa saja. Karena dalam demokrasi, pemimpin itu datang dan pergi. Tidak ada yang aneh dalam keadaan seperti ini," katanya (Kompas, 11 April 2001).

Persatuan dan kesatuan juga menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara. Perbedaan pendapat dan wacana tidak boleh mengganggu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini harus dicerminkan melalui integrasi antarelit. Inti pemikiran ini bisa ditemukan dalam petikan wacana politik Amien Rais berikut ini.

"Sekarang ini proses demokrasi melalui memorandum pertama DPR sudah bergulir secara alami tanpa campur tangan dari luar. Sementara pertemuan empat tokoh itu memberikan kesan perdamaian sekaligus untuk menyejukkan suasana. Dan juga untuk menggambarkan kepada bangsa Indonesia bahwa sekalipun kita berbeda pendapat mengenai masa depan Indonesia, wacana yang berbeda tentang masalah apa saja, tetapi kita adalah bangsa yang satu," demikian kata Ketua MPR Amien Rais di ruang VIP 2, Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Minggu (15/4).

Amien dalam kesempatan itu kembali mengingatkan untuk mengajak tokoh lain, misalnya Hamzah Haz (Ketua PPP) dan lain-lain.

Ia juga meminta agar pertemuan itu tidak sampai mempengaruhi proses alami yang ada di DPR yang berupa memorandum pertama dan konsekuensi lanjutannya. "Selain itu, akhir pertemuan harus memberi satu konsensus bersama bahwa apa pun yang kita tempuh itu one united nation, satu bangsa yang padu yang tidak boleh saling menjatuhkan," katanya (Tempo, 15 April 2001).

Ketika posisi Abdurrahman Wahid semakin terdesak, ada permintaan dari kubu Abdurrahman Wahid untuk menyelenggarakan pertemuan seperti yang dulu, sebelum Abdurrahman Wahid menjadi presiden, biasa dilakukan. Namun setelah berkali-kali Amien Rais dan para politisi lain merasa dikecewakan oleh Abdurrahman Wahid, maka mereka menjadi sangat pesimistis dengan setiap ajakan mengadakan pertemuan yang diinisiatifi oleh kubu Abdurrahman Wahid. Menurut Amien Rais, setiap bentuk pertemuan ternyata hanya digunakan oleh Abdurrahman Wahid untuk komoditas politik, yang substansinya kosong-melompong. Dengan ini semakin jelas, bagaimana Amien Rais sangat menuntut konsistensi antara ucapan dengan tindakan dalam dunia politik.

Anehnya, Amien Rais dan Akbar mengaku belum dikontak utusan Gus Dur. "Saya kira, itu hanya untuk komoditas politik," kata Amien Rais. Ia terkesan tak antusias. "Substansinya kosong melompong," Amien menambahkan. Seperti juga Akbar, Amien mengungkapkan, ia bersedia hadir dalam pertemuan itu asal agendanya jelas. Megawati Soekarnoputri mensyaratkan serupa. "Ibu Mega siap hadir, kapan pun, dengan siapa pun," kata Sekretaris Jenderal PDI-P, Sutjipto. "Mau empat orang, delapan orang, atau sak ombyok (banyak orang), boleh saja, asal agendanya jelas," katanya. Wakil presiden menyatakan hal itu saat rapat pimpinan PDI-P di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa pekan lalu (Gatra, 21 April 2001).

Prosedural-konstitusional kembali ditekankan oleh Amien Rais ketika menggambarkan apa yang mungkin terjadi dalam lembaga DPR. Sebagai Ketua MPR, Amien Rais tidak berani memberikan gambaran mengenai apa yang akan

terjadi. Semuanya masih merupakan teka-teki, dan hasilnya akan mengikuti perjalanan yang prosedural dan konstitusional. Di samping, sekali lagi, menggunakan istilah "aneh" seperti "kiamat politik", pokok pikiran prosedural-konstitusional tersebut tercermin dari pernyataan Amien Rais berikut.

Demikian disampaikan Ketua MPR Amien Rais dan Ketua Akbar Tandjung di Jakarta hari Rabu (16/5). Amien Rais menambahkan, terselenggaranya SI MPR itu jangan dipandang sebagai kiamat politik bagi pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid maupun karir politik bagi pribadi Presiden.

"Kalau nanti pertanggungjawaban itu objektif, sejuk, dan memberi harapan, kemungkinan besar (laporan) itu akan diterima (MPR) hingga tidak perlu ada impeachment (diberhentikan di tengah masa jabatan) kepada Presiden. Tapi kalau saja misalnya lagi-lagi MPR yang lebih besar dari DPR itu kembali dikecewakan oleh Presiden (dengan isi laporan) yang tidak ada perspektif, harapan, expectancy untuk bisa keluar dari kemelut politik-sosial-ekonomi-keamanan, mungkin saja laporan itu tidak akan diterima MPR. Semua itu masih jigsaw puzzle (teka-teki)," ungkap Amien Rais kepada pers usai menjadi nara sumber sebuah seminar di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta.

"Menurut saya, apa yang terjadi di Senayan itu tampaknya memang mengikuti aliran proses konstitusi pasca-Memorandum I-II. Mungkin akhir bulan Mei ini, Sidang Pleno DPR akan digelar dan membuat rekomendasi kepada MPR untuk minta SI. Jadi, benarlah pernyataan Ibu Megawati, memang sudah mengalir begitu," jelasnya.

Namun, pelaksanaan SI MPR itu tentu saja tetap bisa dicegah, lanjut Amien, bila belakangan tiba-tiba terjadi sebuah "gempa" politik di luar dugaan dan perhitungan normal. "Tapi sekali lagi, rasa-rasanya prosesnya memang mengalir ke arah itu yakni menuju terselenggaranya Sidang Istimewa," tandasnya.

Semua itu, kata Amien, akan berjalan amn-aman saja, karena mengikuti proses konstitusional. "Pemimpin itu setiap saat bisa come and go (datang dan pergi), tetapi bangsa dan negara ini harus tetap berdiri, sementara Amien Rais kapan-kapan pun juga bisa pergi. Ini amat-amat normal," tandasnya (Kompas, 17 Mei 2001).

Sepanjang perjalanan negara Indonesia presiden-presiden sebelumnya selalu jatuh dengan menyangdang rasa malu. Sebatas pernyataan Amien Rais,

seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Dengan ungkapan lain, proses politik sebenarnya tidak boleh mengakibatkan ada pihak-pihak yang dipermalukan. Meskipun secara politik bisa saja ditafsirkan bahwa Amien Rais sedang berusaha memperkecil kemungkinan terjadinya perlawanan oleh para pendukung Abdurrahman Wahid, secara tekstual Amien Rais tampak menegaskan semua pemain politik tidak saja harus siap untuk menang dengan cara baik, tetapi juga harus siap kalah dengan cara baik. Artinya harus siap untuk menjadi pecundang yang baik (*ready to be a good loser*).

Dalam jumpa pers bersama antara Ketua MPR Amien Rais dengan rombongan Menko Polsoskam, Amien mengisyaratkan bahwa DPR akan meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. "Besok (hari ini- red) Rapat Paripurna DPR kemungkinan akan meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa. Kita harus antisipasi jangan sampai ada pihak-pihak yang dipermalukan dengan adanya sidang istimewa ini," kata Amien (Kompas, 30 Mei 2001).

Rasionalitas dalam setiap pengambilan kebijakan politik merupakan butir tambahan dalam wacana politik Amien Rais. Karena itu tidak mengherankan manakala Amien Rais menganggap kecil Maklumat Presiden. Alasannya sederhana, selain secara substantif kurang memiliki bobot dengan implikasi politik serius, secara rasional maklumat itu juga kurang memadai. Amien Rais pun membandingkan antara Maklumat Presiden ini dengan Supersemar.

Ketua Amien Rais malah tidak reaktif seperti biasanya. "Saya anggap maklumat Presiden itu pengumuman yang biasa-biasa saja. Isinya hanya menonjolkan job description seorang Menko Polsoskam. Jadi tidak usah mendapat perhatian kita," katanya.

Amien hanya memberi catatan, bagaimana mungkin sebuah maklumat tidak berdasarkan konsideransi. Tidak ada dasar konstitusinya, tidak ada dasar Tap MPR-nya, tidak ada dasar undang-undangnya. Sebagai perbandingan dalam Supersemar masing-masing ada dua klausul di



konsideransi "mengingat" dan "menimbang". "Saya lihat saat ini Indonesia cukup aman. Jadi, kita tenang-tenang saja, kita usah gusar," ucapnya (Panji, 6 Juni 2001).

Merasa mantap dengan pendekatan institusional-konstitusional, Amien Rais memandang bahwa berbagai upaya lobi oleh kubu Abdurrahman Wahid sebagai tidak memiliki agenda yang jelas. Karena itu, Amien Rais pun meminta agar lobi-lobi yang secara "kasat mata" bertujuan memperpanjang usia kepresidenan Abdurrahman Wahid dihentikan saja. Berikut adalah petikan tanggapan Amien Rais terhadap tim lobi Presiden Abdurrahman Wahid.

Amien menganggap kerja tim lobi itu tidak jelas, sedangkan Akbar menganggap masih tetap ada artinya. Karena menganggap isi dan substansinya lobi itu tak jelas, Amien minta agar lobi politik itu dihentikan.

Ketua umum PAN ini mengaku sama sekali belum pernah dihubungi oleh tim lobi presiden ini. "Ketika saya tanya ke teman-teman partai lain, katanya lobi itu juga tidak jelas," ujar Amien (Kompas, 22 Juni 2001).

Tidak mudah percaya terhadap segala bentuk pernyataan memang merupakan salah satu sifat Amien Rais. Sangat percaya bahwa dirinya berjalan di jalur konstitusi, dan yang berjalan di jalur konstitusi pasti didukung oleh TNI, Amien Rais mengingatkan Abdurrahman Wahid bahwa mengeluarkan dekrit guna membubarkan DPR/MPR jelas-jelas merupakan tindakan anti-konstitusi. Berikut petikan pernyataan Amien Rais.

Seperti biasanya, reaksi keras justru datang dari MPR dan DPR. Ketua MPR M Amien Rais langsung mengatakan tak percaya soal klaim presiden bahwa telah mendapat dukungan dari TNI. Dia yakin bahwa pendirian pimpinan TNI dan Polri soal dekrit tidak berubah sampai saat ini.

"Saya yang di Jakarta ini juga bertemu dan berbincang-bincang dengan pimpinan TNI. Rasa-rasanya, mereka sampai detik ini tidak setuju adanya dekrit. Sebab, hal itu diyakini akan merusak suasana dan membuat bangkrut negeri ini," ungkapnya kepada wartawan di MPR kemarin.

Mengenai ancaman untuk mengeluarkan darurat sipil 1 Agustus, Amien mengingatkan presiden agar tidak melakukan tindakan melawan konstitusi. Disebutkan bahwa presiden bisa melakukan apa saja asal tetap dalam koridor konstitusi.

"Kalau misalnya seperti yang dikatakan di Australia, presiden mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR/MPR, itu jelas antikonstitusi," ucap Amien ketika dicegat wartawan sebelum memimpin rapat pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi MPR di gedung MPR/DPR, kemarin.

Dia menegaskan, meski presiden mengklaim telah mendapat dukungan sebelas menteri dan petinggi TNI/Polri, hal tersebut tetap saja pelanggaran konstitusi. Apa pun alasannya, dekrit itu tidak boleh dikeluarkan. "Saya harap baik eksekutif maupun legislatif, termasuk MPR-nya, supaya tenang-tenang saja."

Amien justru mengingatkan presiden agar lebih memfokuskan diri untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Sebab, waktu menuju 1 Agustus sudah kian dekat. "Sekali lagi, saya harap presiden Wahid menyiapkan pertanggungjawaban yang bagus. Mudah-mudahan bisa lolos." (Jawa Pos, 28 Juni 2001).

Mirip dengan Abdurrahman Wahid, Amien Rais juga menggunakan semacam logika dan jargon dalam mengembangkan wacana politiknya. Kalau Abdurrahman Wahid sering mengutip suara rakyat adalah suara Tuhan, maka sebagai sosok yang konsisten dengan konsep anti KKN, Amien Rais sering mengutip pernyataan Lord Arton, bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut, maka absolut pula korupnya. Menurut Amien Rais, kekuasaan adalah amanat, kekuasaan adalah mandat kepercayaan dari rakyat yang harus dipertanggung-jawabkan.

Selain itu, Amien Rais juga sering mengutip pernyataan bahwa dalam politik tidak ada teman atau musuh abadi, yang abadi adalah kepentingan.

Perbedaannya, kepentingan di sini diterjemahkan bukan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Nasionalisme, karena itu, merupakan butir muatan lain dari wacana politik Amien Rais.

"Presiden Abdurrahman Wahid tidak punya. Demikian juga pemimpin elit politik lainnya, termasuk Amien Rais," ujar Amien Rais saat menyampaikan pesan kepada peserta Musyawarah Nasional (Munas) VI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Surabaya, Minggu (16/7).

Amien Rais menambahkan, "Kalau mau jujur, tidak ada seorang pemimpin dari partai politik pun saat ini mempunyai visi, rencana, dan program untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Teman-teman di LSM dan adik-adik mahasiswa pun, kalau ditanya bagaimana konkret realitasnya seperti apa, juga tidak punya."

"Jadi, kalau Gus Dur (Abdurrahman Wahid -Red) bolak-balik mengatakan mau reshuffle kabinet, tetapi tidak kunjung dilakukannya, itu karena Gus Dur masih bingung," kata Amien lagi.

"Kekuasaan itu amanat, bukan kesempatan untuk mengeksploitasi pihak lain, untuk memeras, atau mengembangkan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme-Red) baru. Kekuasaan itu memang cenderung korup. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely," ujar Amien. "Kalau dulu Soeharto perlu 15 tahun untuk mengembangkan KKN, yang sekarang baru 15 minggu sudah mulai subur kembali KKN-nya. Ini indikasi bahwa kita lupa diri dan lupa pada amanat. Amanat harus ditegakkan kembali. Sebab, kalau kesempatan ini sampai hilang, kaum santri akan dianggap tidak bisa menjadi negarawan, dan hanya mampu menjadi politikus pinggiran," kata Amien.

"Ketika Bung Karno yang kehebatannya diakui dunia melepaskan jabatan presiden, Indonesia tenang-tenang saja. Soeharto mundur juga tenang. Begitu juga ketika Habibie mundur. Begitu juga kalau Gus Dur mundur, pasti Indonesia tenang-tenang saja," ujar Amien, yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan peserta Munas.

"Saya memang mengatakan, Gus Dur tidak perlu khawatir kalau dia tidak berhasil menjalankan pemerintahan. Maksudnya untuk mendorong Gus Dur berani menerima tanggung jawab tersebut, karena Gus Dur gamang sekali. Sekarang kita berpikir untuk jangka panjang, ada opini lama dan opini baru. Dulu saya mendukung Gus Dur, itu opini lama. Sekarang, opini baru bisa masih bisa mendukung, bisa juga tidak. Di dunia ini, dalam politik tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Kepentingan abadi adalah untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Amien Rais mengatakan, penyelenggaraan SI MPR telah disetujui semua fraksi MPR minus FKB dan FPKB. Mejawab pertanyaan, Amien menegaskan jika pertanggungjawaban Presiden Gus Dur ditolak Wapres Megawati Soekarnoputri akan menggantikan kedudukan orang nomor satu Indonesia itu. "Jadi begitu diberhentikan, begitu juga ditetapkan presiden baru. Tidak ada kekosongan walau sedetikpun," tegasnya (Kompas, 17 Juli 2000).

Perdebatan akan makna konstitusi dan tindakan konstitusional antara Abdurrahman Wahid dengan Amien Rais semakin tampak menjelang SI MPR. Masih dengan prinsip konsistensi dan koherensi, Amien Rais menyerang Abdurrahman Wahid bahwa apa pun hasil pembicaraan dengan Abdurrahman Wahid selalu berakhir dengan, tidak hanya misinterpretasi, tetapi sudah disinformasi. Pilihan kata disinformasi oleh Amien Rais, menegaskan bahwa silang pendapat dan pemaknaan itu bukan terjadi tanpa kesengajaan, tetapi justru terjadi karena ada kesengajaan dari Abdurrahman Wahid. Fraksi-fraksi yang mendukung SI, menurut Amien Rais, justru mereka yang sudah belajar konstitusi. Berikut adalah pernyataan Amien Rais yang menegaskan terjadinya persaingan atau pertikaian makna dengan Abdurrahman Wahid.

"Presiden tidak hadir tidak apa-apa asal ada yang mewakili. SI malah dipercepat. Sekarang SI sudah bulan. Fakta konstitusional, politik, faktual, SI sudah legitimate. Titik. Kita sudah hati-hati. Dari sebelas fraksi, sembilan sudah belajar konstitusi. Mana yang lebih konstitusional. Dalam ilmu sosial, objektif itu keputusan orang banyak. Tak sama dengan eksakta. Dekrit sudah tumpul, sudah tidak efektif. TNI/Polri hari ini amat sangat jelas. Tidak mendukung Pak Wahid. Sikap TNI jelas tadi. Sikap PKB sendiri tidak bulat. Contoh, Ketua Umum PKB diberhentikan hari ini. Tokoh-tokoh itu sudah tak tertarik bertemu dengan Presiden. Bicaranya terus bergeser. Ada keengganan bertemu. Sebab, hasil pertemuan selalu didisinformasi. Presiden agar melihat fakta ini" (SCTV 20 Juli 2002 (18.40 WIB)).

Akhirnya sidang paripurna untuk menentukan SI jadi dilaksanakan. Dalam melihat proses sidang ini, Amien Rais menegaskan perlunya setiap keputusan diambil secara kolektif. Demokratik dan terbuka juga harus berlangsung dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Berikut pernyataan Amien Rais sehubungan dengan hal ini.

Staf MPR pun telah mempersiapkan papan penghitungan suara. Sebelum voting dilakukan, Amien menawarkan 2 opsi: SI MPR tetap dilaksanakan pada 1 Agustus, atau mempercepatnya jika memungkinkan. Tapi ketika dilakukan break sekitar lima menit menjelang pelaksanaan voting, terjadi kesepakatan tersebut. "Ini keputusan yang manis. Pintu untuk percepatan SI tidak tertutup meskipun ia harus melalui lobi yang panjang dan berliku," ujar Amien.

Ketika ditanya apa ukuran keadaan memburuk itu, Amien mengatakan ukuran itu datang dari anggota MPR sendiri, dan tidak bisa ditentukan orang seorang. "Jadi, ukuran mempercepat tidak bisa dari saya, Pak Matori, Pak Ginandjar, atau yang lain, tapi atas persetujuan pimpinan MPR untuk mengundang persidangan paripurna. Ibaratnya, melihat setengah gelas ada perbedaan antara yang pesimis dan optimis. Untuk itu, keputusan harus merupakan keputusan kolektif pimpinan MPR," ujarnya (Kompas, 21 Juli 2001).

Mengikuti proses yang prosedural dan konstitusional sangat tampak dalam pernyataan-pernyataan Amien Rais Presiden harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Berikut adalah petikan pernyataan Amien Rais.

"Saya tidak bisa mendahului keputusan majelis untuk menyikapi hal tersebut. Hanya, ini pendapat pribadi, sebuah analogi, kalau seorang mahasiswa tidak mau datang menghadiri ujian, tentu ia tidak lulus," ujar Amien menjawab pers se usai rapat penetapan jadwal acara SI, Sabtu (21/7).

Menurutnya, Presiden Gus Dur bisa saja mewakilkan pembacaan pertanggungjawaban. "Apabila Presiden Abdurrahman Wahid sampai tidak datang, tentu sangat mengecewakan MPR," tandasnya.

Mengenai rencana Presiden yang ingin mengeluarkan dekrit, Amien mengatakan tidak mau berkomentar mendahului takdir. Apalagi saat ini sedang diselenggarakan SI yang membicarakan nasib politik Presiden. "Kalau dekrit dikeluarkan, katakanlah, membubarkan DPR/MPR, memberlakukan keadaan darurat sipil dan lain-lain, itu hampir-hampir tidak fungsional. Tidak efektif lagi," paparnya.

Ditegaskan, apabila Presiden Gus Dur tetap mengeluarkan dekrit, Amien yakin keputusan itu akan diabaikan TNI/Polri. "Selain akan diabaikan pula oleh partai politik dan masyarakat," tandasnya (Surya, 22 Juli 2001).

Demokratis dan konstitusional kembali ditegaskan oleh Amien Rais ketika menjelaskan langkah yang ditempuh oleh lembaga perwakilan rakyat. Berikut adalah kutipan yang terkait dengan masalah ini.

Amien mengatakan, latar belakang dilaksanakannya rapat paripurna karena adanya perkembangan situasi dan kondisi yang semakin memburuk, selain terjadinya krisis konstitusional dan adanya pemimpin yang lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan. Untuk itu MPR memandang perlu mengundang anggota majelis untuk rapat paripurna dalam rangka SI MPR. "Ini langkah demokratis dan konstitusional, sebab MPR adalah lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan rakyat. Rapat paripurna dilaksanakan akibat tindakan Presiden yang mengancam keselamatan bangsa dan negara," kata Amien (Kompas, 22 Juli 2001).

Penegakan hukum dan pemulihan ekonomi merupakan fungsi pemerintahan sangat vital. Ini tampak dari pernyataan Amien Rais berikut ini.

"Insya Allah, tidak berapa lama lagi, kita akan menyaksikan sebuah kepemimpinan nasional yang baru. Insya Allah kami semua sudah bersepakat akan memberikan dukungan, memberikan moral support kepada Ibu Megawati Soekarnoputri supaya nanti dalam pemerintahannya lebih stabil, lebih efektif, lebih produktif dan memulihkan kepercayaan rakyat yang selama ini sudah hilang dari pemerintahan sekarang," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais, yang juga Ketua MPR. Amien berdiri tepat di samping Megawati Soekarnoputri ketika memberi keterangan pers bersama sejumlah pimpinan partai politik. Keterangan pers disampaikan di depan pintu masuk rumah Megawati.

Tokoh parpol juga membicarakan masalah sangat mendesak, yakni memelihara masalah keamanan. Khusus gerakan separatisme di Aceh dan Irian Jaya akan diatasi dengan sangat bijak dan arif sambil memperhatikan seluruh masalah lainnya di daerah itu. Provinsi lain yang masih bermasalah seperti Maluku, Kalimantan Tengah, dan Poso juga akan mendapat penanganan yang sangat tinggi. "Penanganan yang kedua tentu apalagi kalau bukan recovery atau pemulihan ekonomi. Dalam hal ini tentu dibutuhkan law and order. Jadi, (penegakan) hukum juga telah menjadi kesepakatan kita bersama," ucap Amien.

Mengenai wakil presiden, semua ketua parpol sepakat akan memilihnya lewat proses konstitusional menurut alur dan mekanisme yang disepakati. Tanpa menyebut waktu, pemilihan Wakil Presiden menurut Amien akan diselesaikan tepat pada waktunya dengan kebersamaan.

"Konsentrasi kita adalah untuk besok pagi (Senin). Kita tahu, saat ini politisi, rakyat, pengusaha, dunia internasional sudah sangat letih melihat kita. Mudah-mudahan sidang istimewa ini merupakan solusi konstitusional, untuk menyelesaikan kemelut politik yang seperti tidak ada akhirnya ini," kata Amien (Kompas, 23 Juli 2001).

Bertindak konstitusional dan prosedural merupakan kaidah yang sangat ditonjolkan dalam berbagai pernyataan Amien Rais. Demi kepentingan nasional maka Abdurrahman Wahid harus turun. Masyarakat internasional dan nasional menurut Amien Rais sudah letih oleh segala tindakan Abdurrahman Wahid.

Amien Rais yang pada kesempatan itu bertindak sebagai juru bicara juga mengatakan, mereka semua berharap SI berjalan lancar. "Terus terang politisi sudah letih, rakyat letih, pengusaha letih, dunia internasional juga letih melihat kita," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Amien Rais menyatakan, usia pemerintahan Abdurrahman Wahid tinggal beberapa jam untuk kemudian digantikan Wapres Megawati. "Usia politik pemerintahan Wahid tinggal puluhan jam saja, jadi semua orang tenang saja," katanya saat menjenguk para korban peledakan bom di RS St Carolus, sekitar pukul 13.40 wib, Minggu (22/7).

Seusai pertemuan, Megawati Soekarnoputri memberi pengantar sebelum dilanjutkan dengan keterangan pers yang disampaikan Amien Rais. Amien menjelaskan, mereka sudah bersepakat akan memberikan dukungan moral kepada Megawati Soekarnoputri supaya nanti pemerintahan lebih stabil, efektif dan produktif.

Ditambahkan, mereka sepakat untuk membangun suatu kebersamaan, kerukunan dan persaudaraan untuk bersama memikirkan masalah bangsa pada masa datang. "Insya Allah kita melihat proses konstitusional lewat SI. Tidak berapa lama lagi kita akan menyaksikan sebuah kepemimpinan nasional yang baru," katanya (Surya, 23 Juli 2001).

Sebagaimana diduga, akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid diturunkan melalui SI MPR. SI ini pula juga menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Akan halnya Amien Rais, tetap menjadi Ketua MPR dan selalu berupaya bermain politik secara sangat "cantik", mengandalkan proses politik institusional, prosedural, dan konstitusional. Hal penting lain yang juga harus dicatat dari Amien Rais adalah wilayah wacananya yang konsisten di jalur "anti KKN". Amien Rais tidak tertarik, sekurang-kurangnya bila mendasarkan diri pada wacana politik yang terpublikasikan, untuk mengomentari persoalan-persoalan lain. Kritik paling tajam dan tiada henti terhadap Abdurrahman Wahid berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden telah melakukan KKN dan melanggar konstitusi.

Abdurrahman Wahid maupun Amien Rais teramat sering menggunakan konstitusi sebagai wacana pendukung keputusan masing-masing. Tetapi sangat jelas bahwa istilah konstitusional sendiri telah mereka pahami dan gunakan secara sangat berbeda. Secara hipotetik bisa dimunculkan dua alternatif penyebab. Pertama, mungkin saja perbedaan pemahaman itu terjadi karena memang konstitusi Indonesia tidak cukup memiliki koherensi. Kedua, mendasarkan diri pada kaidah hermeneutika Gadamerian, makna konstitusi sebenarnya sudah ada dalam diri masing-masing pewacana (*discourse producer*). Tentu saja, di balik makna yang dipertahankan dan diperjuangkan oleh pewacana tersebut,



tersembunyi kepentingan. Ujaran-ujaran beserta maknanya, tidak bisa tidak, digunakan sebagai alat memperjuangkan kepentingan.

Ungkapan rasional-kritis mungkin cocok untuk menggambarkan gaya berwacana Amien Rais. Dia memang banyak berbicara dengan kata-kata, tetapi justru karena itu dia sering menuai kecaman sebagai terlalu berambisi menjatuhkan Abdurrahman Wahid untuk kemudian menggantikannya. Banyak rasa antipati terhadap Amien Rais timbul karena gaya berwacananya yang rasional kritis. Sama dengan Abdurrahman Wahid, Amien Rais juga produktif dalam menghasilkan wacana. Perbedaannya, kalau wilayah wacana Abdurrahman Wahid sangat luas, Amien Rais lebih membatasi wilayahnya terutama menyangkut pemberantasan KKN.

#### **D. Kontra-wacana Politik Akbar Tandjung**

Memulai pembacaan terhadap wacana politik yang diproduksi oleh Akbar Tandjung, nampak jelas bagaimana Akbar Tandjung sangat memperhatikan nilai-nilai prosedural dan konstitusional. Akbar Tandjung menyampaikan segala sesuatu secara sangat terkendali (*unemotional*). Keputusan politik, dalam pandangan Akbar Tandjung, merupakan keputusan dalam ranah publik yang harus dipisahkan dari ranah pribadi. Hubungan-hubungan sosial Akbar Tandjung dengan para elit politik lain tampak datar dan dibingkai dalam formalitas politik. Ini pula yang tampak menonjol dalam petikan pernyataan Akbar Tandjung ketika para wartawan dengan gencar mengajukan pertanyaan yang cukup provokatif.

Jawaban Akbar Tandjung seperti yang biasa dia lakukan, datar dan nyaris tanpa emosi.

Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bersedia hadir di Gedung MPR/DPR tanggal 20 Juli 2000, memenuhi interpelasi DPR, atau sehari menjelang DPR reses. Presiden tidak dapat memenuhi undangan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari di mana Presiden menjawab interpelasi.

Pernyataan kesediaan Presiden hadir dikemukakan Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais, Jumat (7/7), di tempat terpisah. Baik Tandjung maupun Amien mengaku telah saling kontak dengan Presiden tentang kesediaannya tersebut. Saat ditanya apakah kontak dilakukan lewat telepon atau bertemu langsung, Tandjung menjawab, "Ada...lah."

Tandjung mengakui, Bamus DPR telah menjadwalkan Presiden untuk hadir di DPR 13 Juli. Sebagai Pimpinan Dewan, katanya, dirinya langsung berkirim surat kepada Presiden agar bisa hadir 13 Juli untuk memberikan keterangan terhadap materi yang terkandung dalam interpelasi.

Tetapi, lanjut Tandjung, Presiden menyatakan tidak bersedia hadir pada tanggal 13 Juli dengan alasan ada kegiatan yang sudah terjadwalkan, selain Presiden sendiri merasa perlu waktu untuk mempersiapkan diri. "Bila Presiden ingin tanggal 20 Juli, kami (DPR) coba untuk menyesuaikan waktunya," katanya.

Bukankah itu sehari menjelang reses? Tanya pers. Tandjung mengakui waktunya menjadi sangat mepet karena berdekatan dengan reses. Saat ditanya apakah ini ada unsur kesengajaan dari Presiden, Tandjung mengatakan tidak tahu penyebabnya.

"Yang penting kan Presiden bersedia untuk hadir. Presiden akan menyampaikan semacam pengantar yang mendahului penjelasan dan kelihatannya jawabannya akan disampaikan secara tertulis," kata Tandjung.

Apakah waktunya cukup? Tanya pers yang dijawab Tandjung, "Ini harus kita bicarakan dengan anggota Dewan."

Bagaimana bila Presiden menjawab dengan meminta maaf kepada anggota Dewan, lalu apakah persoalan menjadi selesai? Kejar pers lagi. Tandjung mengatakan, itu tergantung fraksi-fraksi dalam menilai jawaban Presiden.

"Tetapi kalau Presiden sadar ada kekeliruan, saya kira kita kan orang Indonesia sangat bersahabat. Tetapi kalau jawabannya masih mengandung muatan yang memerlukan klarifikasi, anggota Dewan akan menggunakan pula haknya untuk menanyakan kembali," katanya (Kompas, 8 Juli 2000).

Konsisten dengan keputusan kolektif yang mengikat juga menjadi ciri wacana politik Akbar Tandjung. Ketika MPR menetapkan bahwa setiap tahun Presiden harus memberikan laporan kemajuan (*progress report*) berkenaan dengan mandat yang diberikan kepadanya, maka secara konsisten Akbar Tandjung tetap berpegang pada keputusan tersebut. Berikut adalah petikan pernyataannya.

Sidang Tahunan MPR sebaiknya dilaksanakan setiap tahun agar DPR atau MPR dapat mengawasi kinerja Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR Matori Abdul Djalil dan Ketua DPR Akbar Tandjung di tempat terpisah, Senin (21/8), menanggapi pertanyaan perlu tidaknya Sidang Tahunan MPR Tahun 2000) dilaksanakan.

"Progress report telah menjadi putusan MPR dan akan dilaksanakan setiap tahun. Tetapi yang akan menyampaikan progress report tentu saja Presiden, sedangkan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presiden atas tugas yang diberikannya. Acuananya tetap sistem pemerintahan presidensial yang kita anut," kata Tandjung.

Ditanya soal nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepresidenan yang menurut rencana akan dibahas usai amandemen kedua UUD 1945 dilakukan, Akbar Tandjung menegaskan, meskipun amandemen kedua UUD 1945 belum tuntas, pembahasan RUU Kepresidenan tetap bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu tuntasnya amandemen UUD 1945.

Tandjung mengakui pernyataan yang pernah dikemukakannya bahwa pembahasan RUU Kepresidenan sebaiknya menunggu pembahasan amandemen kedua UUD 1945. "Tetapi secara pribadi saya merasa tidak perlu seluruh perubahan UUD 1945 selesai, RUU Kepresidenan bisa dibahas karena menyangkut hal-hal teknis tentang apa yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden," katanya (Kompas, 22 Agustus 2000).

Setiap kebijakan publik yang dibuat oleh Presiden harus dilakukan menurut rambu-rambu yang telah ditetapkan. Pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI, misalnya, merupakan kebijakan publik yang sangat strategik sehingga telah ditetapkan harus disepakati oleh DPR. Dari pengalaman pemberhentian dan pengangkatan Kapolri yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid tanpa terlebih dulu meminta persetujuan DPR, Akbar Tandjung menilai bahwa kejadian serupa berlangsung dalam kasus pengangkatan Panglima TNI, maka Abdurrahman Wahid akan direkomendasikan untuk disidang-istimewa oleh MPR. Berikut adalah pernyataan Akbar Tandjung.

Menjelang pengumuman pergantian dan mutasi jabatan di jajaran TNI yang dilakukan oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid, Ketua MPR (Amien Rais) dan Ketua DPR (Akbar Tandjung) memberikan peringatan kepada Presiden agar tidak mengulangi kasus pengangkatan Kapolri Jendral Bimantoro yang tidak melalui prosedur, yaitu persetujuan dari DPR. Akbar Tandjung mengatakan bahwa bila memang Panglima TNI Laksamana Widodo AS diganti maka presiden seharusnya meminta persetujuan DPR sebelum menggantinya. Dengan nada mengancam Akbar Tandjung, Ketua Umum DPP Golkar itu menyatakan rekomendasi Sidang Istimewa kepada MPR bila presiden melakukan pelanggaran lagi. Dan seperti telah disepakati, Amien Rais, Ketua MPR meng-amin-i pernyataan Akbar (Tabloid Nasional, 13 - 20 Oktober 2000).

Berpolitik harus konstitusional. Ungkapan yang sering dikemukakan oleh semua tokoh yang telah dibahas sebelumnya ini juga digunakan oleh Akbar Tandjung. Perbedaan mendasar dari ketiga tokoh lain dengan Akbar Tandjung adalah bahwa Akbar Tandjung lebih sering menegaskan apa arti konstitusi. Tampak dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan, Akbar Tandjung memahami konstitusi sebagai sejumlah pernyataan mengingat yang sudah ditetapkan secara tertulis. Berdasarkan undang-undang pula seorang Presiden

harus datang manakala dipanggil oleh DPR. Berikut adalah contoh bagaimana konstitusi dipahami oleh Akbar Tandjung, yakni dengan menunjuk undang-undang yang berlaku, termasuk nomor dan tahun undang-undangnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung meminta Presiden Abdurrahman Wahid hadir memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) DPR yang menyelidiki kasus penyalahgunaan Rp 35 milyar dana Yanatera Bulog dan kasus penerimaan dana dua juta dolar AS dari Sultan Brunei. Kehadiran Presiden semata-mata agar persoalan dua kasus yang dikenal dengan sebutan Buloggate dan Bruneigate cepat selesai.

"Saya kira kalau Dewan secara resmi memanggil seseorang, tidak ada alasan bagi orang yang dipanggil untuk tidak hadir. Pemanggilan itu salah satu hak yang dimiliki DPR dan diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD," kata Tandjung, Rabu (12/10).

Tandjung melihat tidak ada alasan bagi Presiden untuk tidak hadir memenuhi panggilan Pansus DPR. Sebab, kata dia, keterangan Presiden sangat diperlukan Pansus DPR untuk mendudukan persoalan pada tempat yang sebenarnya. "Kecuali pada saat yang sama yang bersangkutan (Presiden) menderita sakit yang luar biasa sehingga tidak mungkin bisa hadir. Tetapi, pada prinsipnya orang yang dipanggil DPR itu harus hadir" ujarnya (Kompas, 13 Oktober 2000).

Karena keputusan kolektif anggota lembaga perwakilan merupakan kebijakan publik, maka menurut Akbar Tandjung keputusan tersebut harus dibuat melalui jalur institusional. Pandangan institusionalisme Akbar Tandjung demikian sangat tampak ketika salah satu anggota DPR menggagas pertemuan di luar forum DPR. Secara substantif Akbar Tandjung menyatakan tidak keberatan, tetapi secara prosedural harus dilakukan secara formal-institusional. Ini merupakan salah butir muatan yang bisa diangkat dari wacana politik Akbar Tandjung. Berikut adalah petikan pernyataannya.

Terdorong kondisi bangsa kian carut-marut, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie bikin kejutan dengan menyebar undangan kepada seluruh anggota DPR/MPR untuk duduk bareng secara informal membahas persoalan bangsa. Undangan ini pun disambut oleh Ketua DPR-RI Akbar Tandjung. Namun Ketua Umum Partai Golkar ini menyarankan pertemuan dilangsungkan di Gedung DPR/MPR Senayan.

"Jangan di luar, lebih baik diformalkan saja dengan menggunakan kelembagaan yang sudah ada (di Gedung DPR/MPR), karena kalau dilaksanakan di luar, jangan membawa nama kelembagaan DPR/MPR," kata Akbar kepada wartawan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (27/10).

Akbar Tandjung mengatakan, jika mengatasnamakan kelembagaan DPR/MPR sebaiknya acara berlangsung formal dan tidak diadakan di luar, lain halnya jika mereka (anggota DPR/MPR) bertemu dalam kapasitas sebagai pimpinan partai.

"Kalau dalam kapasitas sebagai pimpinan partai dan pertemuan itu untuk mengevaluasi kinerja Gus Dur, maka hasilnya dapat diberikan kepada fungsionaris partai yang ada di DPR," tambahnya.

Akbar menilai, pemikiran Kwik yang tertuang dalam suratnya itu cukup kritis dan tajam. "Dan ini bukan menunjukkan loyal atau tidak loyal tetapi harus dilihat dalam perspektif kepentingan bangsa," ujarnya.

Akbar mengatakan, tujuan Kwik baik, namun DPR sudah memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah terjadi. Akbar juga menilai Kwik tidak memiliki agenda politik dibalik ajakannya itu. Ajakan Kwik, kata Akbar, lebih banyak berasal dari pemikiran dan pencermatan pribadi. Tapi Akbar menyarankan, sebaiknya pertemuan-pertemuan antaranggota Dewan, dilakukan secara formal melalui lembaga-lembaga yang ada di DPR (Surya, 28 Oktober 2000).

Mekanisme formal kelembagaan senantiasa ditonjol oleh Akbar Tandjung.

Terlepas dari reaksi Presiden, sebagai suatu mekanisme formal-institusional itu harus ditempuh. Bila suatu keputusan yang telah ditetapkan melalui mekanisme formal-institusional tetap saja ditolak oleh Presiden, maka menurut Akbar Tandjung telah terjadi konflik antara DPR dengan Presiden. Kendati menyatakan ada konflik, gaya berwacana Akbar Tandjung tetap terkesan sangat santun. Ini

tampak dari, misalnya, pemilihan istilah Kepala Negara, dan bukan Presiden atau malah Abdurrahman Wahid. Berikut adalah petikan pernyataan Akbar Tandjung.

Secara terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung mengatakan, tidak masalah jika Presiden menolak calon Ketua MA yang diusulkan Dewan. "Tidak apa-apa kalau beliau menolak. Setelah menerima surat resminya, nanti kita bicarakan dengan unsur pimpinan dewan dan fraksi-fraksi. Selanjutnya diserahkan kepada mekanisme Dewan untuk menanggapinya," papar Tandjung, hari Sabtu, di Purwokerto.

Dia mengatakan, sebagai Ketua DPR ia belum memastikan apa yang akan dilakukan selanjutnya apabila memang KH Abdurrahman Wahid sebagai Kepala Negara menolak kedua calon Ketua MA yang telah dipilih melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Tetapi menurut aspirasi yang ditangkapnya, tutur Tandjung, terutama dari fraksi Reformasi, mereka dengan tegas telah menyatakan tidak perlu lagi dilakukan pemilihan ulang.

"Kalau penolakan tersebut yang ditempuh Kepala Negara, berarti akan terjadi kevakuman jabatan Ketua MA. Dan ini berarti ada konflik antara Kepala Negara dengan DPR," tandas Tandjung. Dia mengatakan, Dewan perlu tahu apa sebenarnya alasan Presiden menolak kedua calon Ketua MA tersebut (Kompas, 15 Januari 2001).

Politik dalam pandangan Akbar Tandjung merupakan mekanisme penyelesaian perbedaan tanpa harus menyertakan konflik yang tidak perlu. Pengambilan keputusan secara voting dia nilai kurang memberi penghargaan terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Karena itu, yang tipikal dari Akbar Tandjung adalah selalu merasa gembira bila pengambilan keputusan di DPR dilakukan tidak dengan cara voting, melainkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Berikut adalah petikan pernyataan yang menggambarkan kecenderungan Akbar Tandjung untuk tidak melakukan konfrontasi secara terbuka.

Akbar Tandjung usai memimpin sidang langsung memberikan konfirmasi pers kepada ratusan wartawan yang sudah menyerbu masuk Ruang Nusantara V, tempat sidang berlangsung. Saat konvermasi pers, Wakil Ketua DPR yang tidak menemani Tandjung ialah Muhaimin Iskandar. Tandjung menjelaskan, pada Kamis mendatang itu fraksi-fraksi akan memberikan tanggapan dalam pemandangan umum saat berlangsung Rapat Paripurna Dewan yang sudah dijadwalkan Badan Musyawarah (Bamus). "Fraksi-fraksi akan menanggapi laporan atau hasil kerja Pansus itu," katanya.

Tandjung mengungkapkan, Rapat Paripurna DPR yang dimulai sejak pukul 09.40 itu baru mencapai kata sepakat pada pukul 20.30, setelah seluruh anggota Dewan yang hadir bisa menghindari voting yang sudah membayang-bayangi saat break dan lobi intensif dilakukan. Tandjung menyatakan, syukur voting tidak dilakukan. "Ini menggambarkan bahwa Dewan ingin mencari solusi yang sebaik-baiknya, meski itu dilakukan agak lama," katanya (Kompas, 30 Januari 2001).

Istilah kinerja oleh antara Abdurrahman Wahid dan Amien Rais sering digunakan, ternyata mendapatkan aksentuasi berbeda di tangan Akbar Tandjung. Sebagai politisi berlatar belakang pendidikan teknologi, istilah parameter lebih mengena daripada istilah yang lain. Parameter keberhasilan Abdurrahman Wahid dalam menjalankan tugas kepresidenan dia akui tidak bisa didasarkan ukuran-ukuran rasional-objektif, tetapi justru ukuran politis-inter-subjektif oleh masing-masing fraksi dalam DPR.

Ketua DPR Akbar Tandjung mengatakan, DPR tidak memiliki parameter yang pasti untuk menilai apakah Presiden Abdurrahman Wahid melakukan perbaikan, statis, atau malah semakin memperburuk keadaan selama tiga bulan ke depan. Karena sifatnya politis, parameter dilakukan oleh masing-masing fraksi. "Kami (DPR) ingin adanya kepastian. Apabila tidak ada ketidakpastian, maka proses perubahan akan berlarut-larut. Sekarang ini, (setelah memorandum disampaikan), perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak ada," kata Tandjung (Kompas, 16 Februari 2001).

Berbeda dengan Amien Rais yang kurang menanggapi berbagai persoalan pembagian kekuasaan, misalnya antara Presiden dengan Wakil Presiden, Akbar



Tandjung menaruh perhatian besar pada ranah pembagian kekuasaan ini. Rendahnya kinerja kepresidenan Abdurrahman Wahid, menurut Akbar Tandjung terjadi salah satunya karena Abdurrahman Wahid memaksakan diri untuk melaksanakan seluruh tugas kepresidenannya. Padahal, secara fisik Abdurrahman Wahid dia nilai memiliki keterbatasan. Karena itu, untuk membantu meningkatkan kinerja Presiden, Akbar Tandjung memandang perlunya pemisahan kekuasaan, antara Kepala Negara dengan Kepala Pemerintahan.

Akbar Tandjung menyambut baik keinginan untuk melakukan kompromi politik. Ia melihat bahwa salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu adalah memisahkan posisi kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemisahan kekuasaan itu, kata Tandjung, harus dilakukan melalui sidang istimewa (SI) atau sidang tahunan (ST) MPR.

"Tetapi semua itu bergantung kepada kesediaan Presiden. Beliau bersedia atau tidak. Kalau Gus Dur tidak bersedia, saya belum melihat solusi lainnya," kata Tandjung (Kompas, 4 April 2001).

Akbar Tandjung, melalui wacana pemisahan kekuasaan ini, sebenarnya menampilkan dirinya sebagai sosok yang sangat akomodatif karena memberi kemungkinan untuk mengubah format politik Indonesia berdasarkan keterbatasan Abdurrahman Wahid. Berikut adalah pernyataan Akbar Tandjung yang begitu akomodatif, termasuk membuka peluang untuk diterbitkannya undang-undang pemisahan kekuasaan antara Kepala Negara dengan Kepala Pemerintahan.

Ditanya apakah sudah ada pembicaraan konkret tentang wacana pemisahan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan partai-partai lain, kata Tandjung, memang belum ada pembicaraan resmi dengan partai lain, tetapi sebagai gagasan ia mencoba mengembangkannya menjadi wacana.

"Seandainya itu bisa dilihat sebagai solusi, kenapa tidak kita diskusikan lebih mendalam lagi," ujarnya (Kompas, 11 April 2001).

Batas pengendalian diri Akbar Tandjung ternyata bila yang dipersoalkan adalah eksistensi Partai Golkar. Akbar Tandjung bisa menggunakan wacana sangat keras manakala ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan, atau lebih-lebih mau membubarkan Partai Golkar. Begitu keras reaksi Akbar Tandjung terhadap persoalan ini, sehingga tidak hanya undang-undang yang dia rujuk, melainkan dasar negara, yakni Pancasila. Siapa pun yang berniat membubarkan Partai Golkar, menurut Akbar Tandjung, berarti tergolong anti Pancasila. Melalui wacana ini pula Akbar Tandjung membangkitkan semangat para kader partainya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengecap pihak-pihak yang ingin membubarkan Partai Golkar sebagai anti-Pancasila. Karena di dalam Pancasila terdapat sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, maka mereka yang ingin membubarkan Partai Golkar bisa disebut anti-Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Mereka yang mau membubarkan Partai Golkar adalah mereka yang anti kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada jalan lain bagi kita (Partai Golkar) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap mereka yang ingin membubarkan Partai Golkar," kata Tandjung pekan lalu di Gelanggang Olahraga Bekasi. Tandjung berpidato di atas podium pada acara konsolidasi keluarga besar partai berlambang Pohon Beringin itu sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar Kota Bekasi.

Dalam acara yang dihadiri ribuan kader partai itu "dimeriahkan" poster dukungan terhadap Partai Golkar. Salah satu poster berbunyi, "Golkar diinjak makin kuat, disuruh bubar makin tegar". Dalam poster berukuran besar yang membentang di belakang podium tertulis pesan agar Partai Golkar selalu santun dalam berpolitik. Tandjung sendiri sebelum berpidato disemati senjata dan pakaian adat setempat oleh pengurus DPD Partai Golkar

Tandjung yang juga Ketua DPR ini tidak bosan-bosan mengingatkan simpatisan partainya untuk tidak takut apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja dan sistematis mendiskreditkan Partai Golkar. "Apalagi kepada mereka yang ingin membubarkan Partai Golkar, kita harus siap menghadapinya. Apakah Saudara-saudara siap?" tanya Tandjung dengan suara lantang, yang tidak seperti biasanya kalau sedang diwawancarai atau menyampaikan keterangan pers. Hadirin pun menjawab, "Siaaaap!"

Tandjung mengakui, di beberapa tempat seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah Golkar mendapat tekanan-tekanan. Namun sekarang, kata Tandjung, dukungan pun sudah mulai mengalir kembali tanpa rasa takut lagi. Bahkan di Sulawesi Selatan, katanya, provinsi itu seakan-akan "dikuasai" panji-panji dan atribut Partai Golkar.

Tandjung mengingatkan pendukungnya, akibat merosotnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Prtesiden Abdurrahman Wahid, maka kader-kader partai harus mengambil inisiatif untuk membantu dan menyerap aspirasi rakyat ini, khususnya rakyat kecil di pedesaan. Rakyat, kata Tandjung, mendambakan situasi politik dan ekonomi yang stabil, kesejahteraan tercapai, dan keamanan terjamin menjadi milik bersama.

Tandjung mengaku sudah berkeliling Indonesia untuk jumpa dengan rakyat secara langsung. "Terus terang, rakyat sekarang mendambakan suasana saat Partai Golkar menang dalam pemilihan umum seperti dulu," katanya. Tandjung pun menekankan agar kadernya berupaya memenangkan Pemilu 2004 mandatang agar dapat memberikan kepercayaan kepada rakyat (Kompas, 16 April 2001).

Seperti Amien Rais yang berusaha agar tidak membuat kesalahan prosedural dalam menurunkan Abdurrahman Wahid, Akbar Tandjung pun menempuh prosedur institusional. Bagi dia, jawaban Presiden atas Memorandum I justru membuka kemungkinan untuk menyampaikan Memorandum II. Namun demikian, apa pun yang ditempuh oleh DPR, menurut Akbar Tandjung, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid. DPR tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Presiden. Secara proporsional, Akbar Tandjung mengemukakan bahwa MPR yang mengangkat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid.

Akbar Tandjung yang juga Ketua DPR usai rapat tertutup dengan Tim Sebelas tidak bersedia menyebut secara tegas isi konsep tanggapan fraksi tersebut. "Kesimpulannya, tungguilah nanti pada 30 April," kata Tandjung. Selain anggota Fraksi Partai Golkar, rapat tertutup itu juga dihadiri Sekjen Partai Golkar Tuswandi, Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono, Theo L Sambuaga, dan Fahmi Idris.

Tandjung menilai, "konsep yang termuat dalam draft itu sudah cukup baik, tinggal memasukkan hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan politik". Penyempurnaan dilakukan sebelum sikap fraksi itu dibacakan. Tandjung mengaku memperhatikan aspirasi yang berkembang baik di lingkungan intern Partai Golkar maupun masyarakat pada umumnya.

Salah satu substansi dalam konsep itu menurut Tandjung diktum yang menyebutkan bahwa dengan memorandum yang disampaikan DPR bukan dimaksudkan semata-mata menjatuhkan Presiden, sebab instansi yang memutuskan adalah MPR. Selain itu, respons yang diberikan Presiden dalam jawaban memorandum pertama yang mengatakan tidak bisa menerima memorandum dan mengatakan ada inkonsistensi Pansus, termasuk penilaian yang memungkinkan memorandum kedua disampaikan (Kompas, 24 April 2001).

Defensif dan tidak mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik orang lain merupakan ciri wacana politik Akbar Tandjung yang lain. Walaupun sikap defensif ini dinyatakan dengan cara-cara santun, di sisi lain Akbar Tandjung juga "menyerang" secara sangat halus kecenderungan Abdurrahman Wahid melakukan kegiatan tanpa perencanaan yang matang. Berikut adalah petikan pernyataan Akbar Tandjung, yang selain terkesan santun, juga sangat "menyerang" Abdurrahman Wahid.

Presiden Abdurrahman Wahid mengajak Ketua DPR Akbar Tandjung dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri untuk hadir bersama dalam sebuah tayangan televisi yang disiarkan secara nasional. Dalam tayangan televisi itu Presiden Abdurrahman Wahid akan menyampaikan pidato yang dibacakan Wimar Witoelar dengan materi utama soal pesan perdamaian.

Demikian diungkapkan Ketua DPR Akbar Tandjung, Selasa (24/4). Menurut Akbar Tandjung, dalam tayangan itu dirinya dan Megawati Soekarnoputri hadir. Tentang ajakan Presiden tersebut, Tandjung menyatakan belum bisa menjawabnya. "Saya berpikir apakah saya relevan untuk hadir dalam acara itu?" kata Tandjung.

Tandjung mengatakan akan menelpon Megawati Soekarnoputri untuk menanyakan apakah bersedia tampil bersama Presiden Abdurrahman Wahid. Tandjung mengaku harus mencerna ucapan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut. "Jangan-jangan Gus Dur menyatakan itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan, hanya karena bertemu saya. Kesan saya sih memang Gus Dur menyatakannya tiba-tiba," katanya sambil menyebutkan acara tersebut direncanakan untuk Jumat malam mendatang.

Menurut Tandjung, ia belum mengiyakan ajakan Presiden tersebut. Presiden menyampaikan ajakannya se usai pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum(KPU). "Sya sudah mau pulang, tetapi ajudan Presiden meminta saya kembali karena Presiden mau bicara. Saya luluskan permintaan itu. Disitulah Gus Dur menyampaikan ajakannya," katanya (Kompas, 25 April 2001).

Rasionalitas yang didasarkan pada konstitusi merupakan butir penting lain dari wacana politik Akbar Tandjung. Menurut Akbar Tandjung, sangat rasional manakala seseorang yang mendapatkan amanat dari lembaga perwakilan rakyat terbukti melakukan penyimpangan, kemudian lembaga pemberi amanat itu mencabutnya kembali. Walaupun demikian, Akbar Tandjung juga mengingatkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh anggota lembaga perwakilan rakyat pun merupakan kewenangan yang berasal dari rakyat. Karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan, para wakil rakyat, khususnya Partai Golkar, harus memperhatikan aspirasi rakyat. Berikut adalah petikan pernyataan Akbar Tandjung yang menonjolkan nilai rasionalitas, konstitusi, dan aspirasi rakyat.

Pemberian memorandum kedua oleh DPR kepada Presiden Abdurrahman Wahid bukan untuk menjatuhkan posisinya dari jabatan Presiden. DPR secara konstitusional tak berhak menjatuhkan seorang presiden dari jabatannya. Namun, dengan dikeluarkannya Memorandum Kedua, langkah Sidang Istimewa MPR sudah semakin dekat.

"Saya yakin, amanat kepada Gus Dur akan dicabut MPR kalau dinilai menyimpang dari konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden," kata Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung ketika menghadiri upacara temu kader di Tapian Daya, Medan, Sabtu (28/4). Hadir dalam acara tersebut Ketua Golkar Sumut Awahab Dalimunthe yang juga wakil Gubernur II Sumut.

Menurut Ketua DPR itu, DPR telah menempuh mekanisme dalam memberikan peringatan kepada Abdurrahman Wahid yang diawali dengan diberikannya Memorandum I. Diharapkan dengan diberikannya Memorandum I, Abdurrahman Wahid melakukan perbaikan terhadap kekeliruannya dalam menjalankan pemerintahan sebagai presiden.

Akan tetapi, ungkapan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu selama tenggang waktu yang diberikan Abdurrahman Wahid tidak menunjukkan perbaikan-perbaikan sebagaimana diharapkan, sehingga membuka pemberian Memorandum II.

"Fraksi partai Golkar secara formal belum mengeluarkan Memorandum II kepada Gus Dur. Tapi, fraksi partai Golkar tetap akan memperhatikan aspirasi rakyat dalam mengeluarkan Memorandum II," ungkapnya.

Ia mengatakan, melalui fraksi dan Tim 11 sudah disertai untuk membahas dan menggodok sikap partai untuk memberi penilaian pada sidang Paripurna DPR atas kinerja presiden dan kondisi atau situasi politik di Tanah Air.

"Dalam penyampaian tanggapan fraksi juga akan dijelaskan pengertian dan substansi tentang Memorandum II dan sistem konstitusi," ungkapnya.

Tentang masih kuatnya tuntutan pembubaran partai Golkar, Tandjung menegaskan, itu hanyalah kemauan satu partai yang pendukungnya hanya 250 ribu orang. Bubar atau tidaknya partai Golkar itu ditentukan rakyat melalui pemilihan umum. Rakyatlah yang menentukannya pada pemilu, bukan sebuah partai yang hanya didukung segelintir orang.

Kata Tandjung, jika pada Pemilu 2004 partai Golkar tak ada yang memilih lagi, dengan sendirinya Golkar akan bubar. Tapi, kenyataannya, Golkar masih didukung 25 juta rakyat, tentu saja tidak logis hanya karena 250 ribu orang, Golkar dibubarkan (Kompas, 30 April 2001).

Urutan logika (*logical sequence*) Akbar Tandjung dalam berwacana politik dibimbing oleh mekanisme konstitusional. Suatu keputusan lanjutan harus didasarkan atau merupakan implikasi dari tanggapan Abdurrahman Wahid terhadap keputusan sebelumnya. Dalam kasus pertanggung-jawaban dan kelangsungan jabatan Presiden Abdurrahman Wahid, misalnya, Akbar Tandjung mengemukakan bahwa seandainya pertanggung-jawaban Presiden ditolak MPR, maka Presiden masih punya kesempatan memberikan jawaban. Hanya bila kemudian jawaban itu ditolak lagi oleh MPR, maka "bisa" saja Presiden diberhentikan oleh MPR. Dari penggunaan kata "bisa", sekali lagi menampakkan bagaimana Akbar Tandjung memilih posisi dan bahasa sangat moderat.

Ketua DPR Akbar Tandjung mengatakan, bila pertanggungjawaban Presiden itu ditolak MPR, maka Presiden masih punya kesempatan untuk memberikan jawaban. "Namun, bila dijawab lagi tapi kemudian tetap saja ditolak, maka Presiden bisa diberhentikan oleh MPR," kata Tandjung menjawab pertanyaan peserta seminar di

Lemhaanas. "Itulah aturan permainan kita dan sistem konstitusi yang kita anut. Kita semua harus menghormati ini dan seyogianya Presiden juga menghormatinya," tambahnya di forum seminar itu. Hal itu ditegaskan lagi kepada pers di luar seminar (Kompas, 17 Mei 2001).

Harus akomodatif demi kepentingan bangsa merupakan butir wacana politik lain dari Akbar Tandjung. Bahkan ketika menjelang Sidang Istimewa, Akbar Tandjung masih melihat SI itu sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan politik. Berikut adalah petikan pernyataan Akbar Tandjung.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, sikap Partai Golkar dalam Rapat Paripurna DPR Rabu hari ini jelas, yakni DPR agar meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa. Meski demikian, dalam sidang istimewa pertanggungjawaban Presiden tidak harus diminta, tetapi dicari solusi atas kebekuan politik yang terjadi.

Menurut Tandjung, yang ditanya pers usai rapat terakhir DPP Partai Golkar, Selasa tengah malam, memorandum kedua merupakan aturan yang konstitusional. Dengan demikian, walaupun SI MPR dilaksanakan, hal itu masih dalam kerangka proses konstitusional tersebut. Alasan Partai Golkar agar DPR meminta MPR melaksanakan SI MPR karena Presiden Abdurrahman Wahid tidak sungguh-sungguh mengindahkan memorandum kedua (Kompas, 30 Mei 2001).

Berpegang pada undang-undang dan kewenangan merupakan wacana politik yang dikembangkan oleh Akbar Tandjung, lebih-lebih bila hal itu menyangkut kelangsungan jabatan Presiden. Kalau Abdurrahman Wahid harus dimintai pertanggung-jawaban, maka pertanggung-jawaban itu harus masih dalam konteks penyelenggaraan negara yang konstitusional. Berikut pernyataan Akbar Tandjung terkait masalah kemungkinan pemberhentian Abdurrahman Wahid dan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden.



Meskipun tanggapan telah banyak dilontarkan oleh kalangan PDI Perjuangan, namun kemarin Ketua DPR Akbar Tandjung meminta Wapres Megawati Soekarnoputri berbicara kepada publik mengenai sikapnya terhadap wartawan itu.

"Saya minta Ibu Mega memberi tanggapan dan sikap beliau jika tidak menerima tawaran itu. Sudah waktunya Ibu Mega berbicara ke publik. Supaya masyarakat clear, Bagaimana sikap dan pandangan beliau tentang kondisi-kondisi bagaimana yang diinginkan, supaya masyarakat bisa menilai," ujar Tandjung sebelum mengadakan Rapim DPR di Jakarta, kemarin.

Menurut Akbar Tandjung, kalau tidak ada solusi yang bisa disepakati antara Wahid dan Megawati, maka mekanisme DPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa akan berjalan. Yaitu SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden karena dianggap sungguh melanggar haluan negara. Namun, jika ada solusi kesepakatan di antara keduanya, kemudian solusi itu disepakati oleh partai-partai, maka tidak akan ada SI untuk meminta pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban ini bermula dari penyelidikan kasus dana Yanatera Bulog dan dana Sultan Brunei yang diterima Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden kemudian dinilai sungguh melanggar haluan negara, yaitu: (1) melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, dan (2) melanggar Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN.

"Kalaupun seandainya ditemukan solusi, dan solusi itu diterima dan disepakati, tetap ada sidang MPR. Namun, sidang itu tidak dalam konteks meminta pertanggungjawaban, tetapi untuk mengukuhkan solusi itu menjadi Tap MPR," ujar Tandjung.

Ia menilai, solusi yang sudah disepakati ditetapkan melalui MPR, maka proses itu konstitusional. Menurut dia, usaha mencari solusi ini bukanlah kepentingan politik semata tetapi demi kepentingan bangsa dan negara. Solusi ini diperlukan untuk menghadapi situasi sekarang dengan risiko yang paling kecil.

Diakui Tandjung, pelimpahan tugas dan wewenang penuh dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri merupakan satu solusi. Tapi pelimpahan itu jangan tanggung, artinya betul-betul Megawati Soekarnoputri diberi kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional. Seperti memimpin pemerintahan, membentuk kabinet dan mengangkat pejabat negara. "Presiden lebih menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara. Tugas-tugas pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh Wapres," katanya (Kompas, 27 Mei 2001).

Apa pun yang terminologinya tidak ada dalam konstitusi, oleh Akbar Tandjung cenderung tidak ditanggapi. Penerapan konstitusi harus dilakukan secara tekstual sebagaimana adanya, termasuk istilah-istilah yang digunakan. Demikian pun ketika Abdurrahman Wahid mendapatkan perlawanan dari kalangan DPR tentang pengangkatan Kapolri Chaeruddin Ismail menjadi Kapolri, dan kemudian kubu Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa Chaeruddin Ismail ditetapkan sebagai pejabat sementara, dengan dasar bahwa tidak ada istilah pejabat sementara dalam konstitusi, maka Akbar Tandjung pun tidak menanggapi. Dirinya pun tidak mau dicatut namanya untuk kepentingan pengangkatan Chaeruddin. Berikut adalah petikan pernyataan Akbar Tandjung berkenaan dengan pemahaman konstitusionalnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung menegaskan, dirinya selaku pimpinan DPR tidak pernah mengusulkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid agar Komisaris Jenderal (Pol) Chaeruddin Ismail ditetapkan sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bahkan, Tandjung mengaku tidak pernah menyebut kata-kata "pejabat sementara" saat berbicara dengan Sekretaris Kabinet Marzuki Darusman.

"Di tengah percakapan, Marzuki Darusman menyebut-nyebut soal digunakannya kata-kata 'pejabat sementara' terhadap penetapan Chaeruddin. Tetapi, saya tidak meresponsnya, saya tidak menanggapi, dan tidak pernah terpikir oleh saya untuk mengusulkan istilah 'pejabat sementara' itu," kata Tandjung, Sabtu (21/7), menanggapi pernyataan presiden Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa usulan 'pejabat sementara' berasal dari Tandjung.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chotibul Umam Wiranu juga menyebutkan, penggunaan istilah 'pejabat sementara' untuk Chaeruddin berasal dari Akbar Tandjung kepada Marzuki Darusman. Baik Tandjung dan Marzuki adalah Ketua Umum dan Ketua Partai Golkar.

Tandjung menyatakan keheranannya ketika Presiden Abdurrahman Wahid dan juga Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar menyebut bahwa 'pejabat sementara' terhadap Chaeruddin itu yang berasal darinya.

"Seolah-olah saya setuju 'pejabat sementara', dan seolah-olah itu datangnya dari saya. Terus terang, saya tidak pernah terpikir soal 'pejabat sementara', " katanya.

Tandjung mengaku tidak tahu mengapa kemudian ada distorsi yang sangat berlawanan. "Mungkin Marzuki yang melintir pernyataan saya," katanya (Kompas, 22 Juli 2001).

Sama dengan Amien Rais yang dalam berpolitik bertindak rasional, Akbar Tandjung pun mengakui bahwa dirinya sebelumnya juga mendukung Abdurrahman Wahid. Namun demikian, karena Abdurrahman Wahid banyak membuat pernyataan dan melakukan tindakan yang meruntuhkan legitimasi politiknya sendiri, maka Akbar Tandjung pun menarik dukungannya. Itu semua menurut Akbar Tandjung dilandasi oleh komitmen terhadap reformasi. Berikut adalah pernyataan Akbar Tandjung yang disampaikan dalam Munas Partai Golkar.

"Dalam rangka komitmen pada reformasi pula Partai Golkar menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab, pemerintahan ini memiliki cukup legitimasi karena dipilih secara bebas, demokrasi, terbuka dan konstitusional.

Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid yang semula mendapatkan dukungan dari berbagai pihak - nasional maupun internasional - sebenarnya dapat dikatakan sebagai awal dari harapan akan segera pulihnya kehidupan nasional pasca krisis. Ini semua merupakan modal utama yang luar biasa berharga bagi kita bangsa Indonesia, utamanya bagi pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian tugas utama yang dihadapi oleh pemerintahan ini tinggalah mempertahankan dan menjaga modal legitimasi politik yang sudah ada di tangan itu untuk melaksanakan amanat reformasi, khususnya pemulihan (recovery) ekonomi. Pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas utama dari pemerintahan sekarang ini karena rakyat sudah terlalu lama mengalami penderitaan. Sedangkan untuk melaksanakan pemulihan ekonomi pemerintah harus mampu menciptakan dan memelihara iklim politik dan keamanan yang kondusif serta menegakkan supremasi hukum.

Tetapi dalam perjalanannya kepemimpinan nasional yang legitimate ini ternyata tidak mampu menangkap pesan yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara. Pemerintahan ini belum mampu menerjemahkan pesan tersebut menjadi visi kepemimpinannya. Yang justru muncul adalah kebijakan-kebijakan dan statemen-statemen yang penuh kontroversi dan berpotensi untuk menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian politik yang pada gilirannya justru semakin mempersulit pemulihan ekonomi.

Presiden Abdurrahman Wahid cenderung menyia-nyiakan modal politiknya tersebut dan terkesan kurang fokus dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan program pemulihan ekonomi, sebagaimana yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia" (Pidato politik Akbar Tandjung dalam Munas Partai Golkar).

Layaknya penari *swing* yang melangkah ke kiri dan ke kanan, Akbar Tandjung pun memberikan wacananya mengapa dia bergerak ke kiri dan kemudian bergerak ke kanan. Apa yang sangat membedakan antara Akbar Tandjung dengan Amien Rais adalah bahwa Akbar Tandjung memahami konstitusi secara "membumi". Ini ditunjukkan dengan, bila perlu, menyebutkan pasal, nomor undang-undang dan sebagainya.

Begitu memperoleh informasi bahwa melalui Dekrit, Abdurrahman Wahid membubarkan Partai Golkar, maka Akbar Tandjung pun melakukan perlawanan secara terbuka dengan mencabut dukungannya kepada Abdurrahman Wahid, dan mengalihkannya kepada Megawati. Berikut adalah pernyataan akhir dari Akbar Tandjung menyikapi Dekrit yang diberlakukan oleh Abdurrahman Wahid.

"Ya, saya akan terus. Saya tak melanggar hukum. Kemarin partai saya dibubarkan Gus Dur. Alhamdulillah, MA menolak. Saya memberi dukungan penuh Mbak Mega (SCTV, 21 Juli 2001, jam 20.00 WIB).

Akhirnya, ungkapan formalis-legalistik mungkin cocok untuk menggambarkan gaya berwacana Akbar Tandjung. Walaupun dikenal bukan

sebagai orang Jawa, tetapi sifat mampu mengendalikan diri di depan umum dan berhati-hati dalam memberikan komentar sangat menonjol dalam diri Akbar Tandjung. Sebagai pemimpin partai yang paling sering mendapatkan hujatan, Akbar Tandjung menanggapi dengan rasional dan mengacu pada landasan legal. Tidak banyak menghasilkan wacana baru, sebab wacana politiknya selalu mengacu pada landasan hukum yang sudah ada. Bagaimana pun Partai Golkar pasca Orde Baru mendapat manfaat banyak dari gaya kepemimpinan dan berwacana Akbar Tandjung.

## **BAB VI**

### **REKONSTRUKSI DAN DISKUSI**

Karena dimaksudkan sebagai upaya memadukan hasil kajian ke dalam bangunan keilmuan sosial, maka sebagian besar uraian ini akan mengacu kembali, baik kepada pokok-pokok pikiran teoretik yang telah disajikan dalam tinjauan pustaka, maupun kepada hasil-hasil penelitian. Upaya ini dilakukan agar implikasi dan kesimpulan teoretik penelitian ini bisa dihadirkan secara runtut dan jernih.

#### **A. Rekonstruksi Makna Wacana Politik Abdurrahman Wahid**

Kendati tidak dikerjakan menurut metode Analisis Isi (*Content Analysis*) yang positivistik (baca: kuantitatif) (*quantitative content analysis*) seperti yang banyak dilakukan dalam penelitian media massa, tetap diterima pemikiran bahwa penonjolan suatu maksud atau pesan lazim dilakukan dengan melakukan pengulangan. Karena itu, frekuensi kemunculan suatu tema atau butir pesan yang tinggi mencerminkan intensitas perhatian seseorang terhadap tema atau butir pesan tersebut.

Dalam pendekatan kualitatif, teknik pengenalan tema utama ini sering diistilahkan pemeriksaan anggota (*member check*). Kecocokan antaranggota, yang dalam hal ini adalah satuan wacana, bisa dijadikan salah satu landasan bagi proses penarikan kesimpulan umum. Sedangkan suatu tema atau butir pesan yang tidak berkecocokan, selain mencerminkan tingkat koherensi atau konsistensi yang rendah dari wacana tersebut, juga bisa menjadi dasar untuk mengenali temuan-temuan yang bersifat unik atau bahkan merupakan kasus negatif (*negative case*).

Berdasarkan paparan realis tentang wacana dan kontrawacana politik keempat elit politik Indonesia era pemerintahan Abdurrahman Wahid, berikut disajikan hasil abtraksinya. Tabel ringkasan berikut mengetengahkan: (1) satuan wacana, yang menunjuk pada jumlah teks dengan butir-butir pesan yang menuju pada satu tema utama, (2) ranah wacana, yang menunjuk pada tema utama yang terkandung dalam sejumlah teks dimaksud, dan (3) abstraksi butir wacana, yang merupakan uraian sangat ringkas yang direkonstruksi dari sejumlah butir pesan dalam ranah wacana tertentu.

TABEL 5.1  
RINGKASAN HASIL ANALISIS  
WACANA POLITIK ABDURRAHMAN WAHID

No.	Unit Wacana	Ranah Wacana	Abstraksi Butir Wacana
1	68 unit	Kekuasaan	<p>Tema kekuasaan merupakan tema utama pertama wacana politik Abdurrahman Wahid. Kekuasaan dihayati sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain, baik karena memang didasarkan pada ketentuan formal (kewenangan), maupun karena sosok kepemimpinan seseorang (kharisma). Abdurrahman Wahid bukan hanya seorang Presiden dengan sejumlah kewenangan, tetapi juga seorang pemimpin berpengaruh (baca: punya pengikut, bukan sekadar simpatisan).</p> <p>Penggunaan kewenangan harus transparan, dan disebarakan. Kewenangan tidak boleh digunakan untuk mengendala kebebasan</p>

			<p>dan melanggar hak-hak asasi manusia. Kekuasaan pemerintah tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang karena harus mempertimbangkan dampaknya bagi kemanusiaan. Walaupun pernah digunakan sebagai semacam “ancaman”, Abdurrahman Wahid tidak pernah menggunakan pengaruhnya atas para pengikutnya untuk melakukan kekerasan. Kekuasaan kharismatik justru harus digunakan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.</p>
2	20 unit	Demokrasi	<p>Demokrasi merupakan tema utama dalam wacana politik Abdurrahman Wahid. Pemilik kedulatan adalah rakyat. Rakyat merupakan penilai paling penting bagi kinerja Presiden. Lembaga perwakilan (DPR dan MPR) dinilai sebagai tidak mewakili rakyat. Pemilu merupakan forum penilaian rakyat terhadap kinerja Presiden, serta forum pertanggung-jawaban Presiden kepada rakyat. Sebagai Presiden, Abdurrahman Wahid menyadari dirinya sangat populis, memahami kehendak rakyat. Abdurrahman Wahid tidak hanya merasa populis dan mendapat dukungan politik dari rakyat, tetapi juga merasa memiliki pengikut. Karena itu,</p>



			Abdurrahman Wahid menghayati dirinya laksana Presiden dengan legitimasi seperti hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
3	16 unit	Masyarakat sipil	Pembentukan masyarakat sipil dengan menghormati dan menghargai kebebasan warga negara merupakan tema terbesar kedua dalam wacana politik Abdurrahman Wahid. Sebagai Presiden, tugas utama Abdurrahman Wahid adalah menciptakan kebebasan bagi seluruh warga negara. Menciptakan kebebasan berarti mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia dan menegakkan hak-hak sipil masyarakat. Setiap manusia berkebebasan untuk berbicara, melakukan apa pun yang dinilai baik, berkumpul atau berorganisasi, dan berpolitik sesuai aspirasinya, serta berpartisipasi politik secara otonom.
4	11 unit	Supremasi dan penegakan hukum	Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan tema terbesar ketiga yang diwacanakan oleh Abdurrahman Wahid. Penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, menurut Abdurrahman Wahid merupakan tugas utamanya sebagai Presiden. Namun demikian, pemahaman terhadap konsep supremasi dan penegakan hukum menurut Abdurrahman Wahid berbeda dari elit politik lain. Abdurrahman

			<p>Wahid sering melontarkan tuduhan kepada pihak lain tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti, sedangkan kalau ada tuduhan terhadap dirinya, Abdurrahman Wahid selalu menantang untuk dibuktikan secara hukum. Undang-undang, menurut Abdurrahman Wahid berada di atas perumusannya, lembaga legislatif. Kasus Bulog dan bantuan Sultan Brunei harus dibuktikan secara hukum, baru diproses secara politik. Memorandum tak berlandasan hukum, Sidang Istimewa melanggar hukum, POLRI mengabaikan perintah sama dengan melawan hukum.</p>
5	11 unit	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	<p>Penyelenggaraan pemerintah yang baik (penyelenggaraan pemerintahan yang baik), tetapi tidak menyertakan pemerintahan yang bersih (clean goverment) merupakan tema terbesar keempat dalam wacana politik Abdurrahman Wahid. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berciri memiliki akuntabilitas publik, dekonsentrasi kekuasaan atau kewenangan, transparansi penggunaan kewenangan, pemisahan antara agama dan politik, pemisahan antara ranah profesional dengan personal, berdasarkan penalaran logik, berdasarkan asas profesionalisme dan kompetensi, tetapi tidak boleh terjebak dalam rutinitas</p>

			termasuk keprotokolan kantor dan pejabat pemerintah.
6	11 unit	Kepentingan Nasional	Kepentingan nasional merupakan tema terbesar kelima dalam wacana politik Abdurrahman Wahid. Politisi harus menjadi negarawan yang menjaga kelestarian dasar negara, keutuhan wilayah dan kesatuan nasional. Untuk itu kebersamaan sosial, kesediaan melakukan rekonsiliasi nasional, dan menjaga stabilitas nasional harus dilakukan oleh para politisi. Para politisi tidak boleh mementingkan golongan dan perseorangan.
7	9 unit	Humanisme	Humanisme merupakan tema terbesar keenam dalam wacana politik Abdurrahman Wahid. Humanisme berarti anti kekerasan, tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan simbolik termasuk kesediaan menghentikan kebiasaan saling menghujat, menghormati manusia karena kemanusiaannya, kesediaan melakukan dialog terus-menerus dengan siapa pun yang berbeda, memiliki toleransi tinggi terhadap setiap perbedaan, serta kesediaan hidup bersama saling menghargai kemajemukan sebagai akibat kebebasan.
8	8 unit	Elit dan Massa	Persoalan antarelit dan antara elit dengan massa merupakan tema terbesar ketujuh

			<p>dalam wacana politik Abdurrahman Wahid. Seharusnya, di antara elit harus ada jalinan hubungan kooperatif serta harus dibangun solidaritas antarelit. Namun demikian, menurut Abdurrahman Wahid, masyarakat Indonesia masih ditandai dengan disintegrasi elit-massa. Elit sering mengatasnamakan massa. Elit terlibat dalam pertikaian demi kepentingannya sendiri, sehingga harus ditarik garis tegas antara kemauan elit dan kemauan massa. Abdurrahman Wahid cenderung tidak percaya kepada elit, termasuk elit formal kepolisian.</p>
9	11 unit	Konstitusionalisme	<p>Konstitusionalisme dan kewenangan berdasarkan konstitusi merupakan tema terbesar kedelapan dalam wacana politik Abdurrahman Wahid. Begitu penting konstitusi, sehingga Abdurrahman Wahid mau menempuh jalan non-konstitusional demi menyelamatkan konstitusi. Sesuai otoritasnya, Presiden membuat keputusan otonom. Orang lain boleh dan bisa dimintai pertimbangan, tetapi kewenangan mengambil keputusan secara otonom ada di tangan Presiden. Otoritas Presiden bersifat konstitusional Karena itu, suatu tindakan melanggar konstitusi atau melawan hukum apabila pejabat di bawah Presiden membangkang terhadap otoritas</p>

			dan instruksi Presiden.
10	Semua	Sikap pribadi	Optimisme berlebih, keberanian berwacana, kecenderungan mereduksi dan menyederhanakan persoalan, kelugasan ungkapan, hingga kemasabodohan terhadap pandangan dan tanggapan pihak lain tercermin jelas dalam berbagai wacana politik Abdurrahman Wahid.
11	Semua	Gaya berwacana	Gaya berwana Abdurrahman Wahid terkesan spontan-konfrontatif. Keberanian menemui Tomy Soeharto, menyatakan demonstrasi sebagai digerakkan oleh tiga musuh politiknya, menyatakan keadaan darurat, mengeluarkan maklumat, hingga puncaknya menerbitkan dekrit untuk membekukan Partai Golkar, meminta para petinggi TNI/POLRI mengundurkan diri, membubarkan MPR, dan memerintahkan percepatan Pemilu, menggambarkan gaya berwacana-politik yang spontan-konfrontatif. Karena spontanitas ini, konsistensi antarwacana kurang terjaga. Demikian pula korespondensi antara pernyataan dengan kenyataan kurang terpikirkan. Walhasil, wacana politik Abdurrahman Wahid tak mampu lagi mendukung perjuangan politiknya. Abdurrahman Wahid tidak mampu memetik manfaat kekuatan bahasa atau

			wacana politik sebagai piranti kepentingan politik. Kelemahan wacana politik Abdurrahman Wahid berhasil dimanfaatkan oleh para pesaing politiknya.
--	--	--	--

TABEL 5.2  
RINGKASAN HASIL ANALISIS  
WACANA POLITIK MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

No.	Unit Wacana	Ranah Wacana	Abstraksi Butir Wacana
1	49 unit	Kekuasaan	Kekuasaan, atau lebih tepatnya kewenangan, sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dipatuhi. Pengakuan yang sama, tampak dari wacana politiknya, juga dia berikan dan buktikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Bisa diproyeksikan, bilamana Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden, maka siapa pun diharapkan juga mematuhi dan menghormatinya. Sama dengan Abdurrahman Wahid, Megawati juga memiliki kekuasaan kharismatik cukup besar. Kekuasaan demikian harus digunakan justru untuk mendukung stabilitas nasional.
2	8 unit	Humanisme	Megawati Soekarnoputri menempatkan kemanusiaan sebagai tema terpenting dalam wacana politiknya. Politik tidak lain merupakan cara manusiawi untuk memecahkan masalah perbedaan antarwarga

			negara. Perbedaan kepentingan harus diselesaikan dengan solusi politik, dan bukan dengan kekerasan. Karena itu, dalam berpolitik setiap orang harus anti kekerasan dan anti teror. Politik adalah proses pemanusiaan itu sendiri.
3	3 unit	Kepentingan Nasional	Kepentingan nasional merupakan tema kedua terbesar dalam wacana politik Megawati Soekarnoputri. Kepentingan individu dan golongan harus tunduk kepada kepentingan nasional. Sebagai suatu bangsa, maka masyarakat Indonesia harus mampu mengembangkan rasa solidaritas sosial atau keesetiakawanan sosial menuju solidaritas nasional.
4	2 unit	Supremasi dan penegakan hukum	Supremasi hukum dan pengindahan kaidah-kaidan konstitusional merupakan tema terbesar ketiga dalam wacana politik Megawati Soekarnoputri. Penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan konstitusi merupakan pilihan yang tidak boleh ditawar. Bahkan ketika penerapan konstitusi dan praktik hukum tidak menguntungkan dirinya, Megawati tetap mempertahankan nilai supremasi hukum ini. Abdurrahman Wahid adalah presiden yang sah, karena dipilih setelah melalui proses konstitusional.
5	1 unit	Elit dan massa	Elit harus mengemban amanat massa dan tidak menonjolkan ambisi pribadi.

			<p>Megawati Soekarnoputri secara pribadi tidak berambisi jadi presiden, tetapi kongres PDIP yang memberi amanat kepada dia untuk menjadi presiden.</p> <p>Megawati Soekarnoputri tidak menyatakan dirinya siap dan mampu jadi presiden, tetapi warga PDIP yang menilai bahwa dirinya mampu menjadi Presiden. Ini didukung oleh keputusan kongres.</p>
6	Semua	Sikap pribadi	<p>Sikap dan perilaku kooperatif merupakan sikap yang sangat ditonjolkan oleh Megawati Soekarnoputri.</p>
7	Semua	Gaya berwacana	<p>Gaya berwacana Megawati Soekarnoputri terkesan empatik, feminin dan minimalis, dengan kecenderungan mengangkat topik-topik yang menyentuh <i>human interest</i>.</p> <p>Empatik berarti mampu membayangkan diri seandainya menjadi orang lain, feminin berarti disampaikan dengan bahasa perempuan atau bahkan keibuan, dan minimalis, karena melakukan kontra-wacana hanya dengan sedikit sekali kata-kata.</p> <p>Kontra wacana juga banyak dilakukan secara tidak langsung.</p>



TABEL 5.3  
RINGKASAN HASIL ANALISIS  
KONTRA-WACANA POLITIK AMIEN RAIS

No.	Unit Wacana	Ranah Wacana	Abstraksi Butir Wacana
1	36 unit	Kekuasaan	<p>Kekuasaan formal merupakan mandat dari rakyat yang disalurkan melalui MPR. Karena yang memberikan mandat kekuasaan kepada presiden adalah MPR, maka MPR pula yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk memberhentikan presiden. Undang-undang menempatkan MPR di atas presiden, jadi presiden tidak bisa memberhentikan anggota, apalagi membubarkan MPR. Pembubaran MPR oleh presiden merupakan pelanggaran sangat serius dan menjadi alasan yang sah untuk memberhENTIKANNYA.</p>
2	24 unit	Konstitusionalisme	<p>Konstitusionalisme dan kewenangan kelembagaan perwakilan rakyat berdasarkan konstitusi merupakan tema terbesar pertama dalam kontra-wacana politik Amien Rais. Untuk menentukan apakah suatu keputusan bersifat konstitusional atau tidak, maka bukan tafsir perseorangan yang bisa digunakan sebagai acuan, melainkan tafsir intersubjektif para anggota lembaga</p>

			<p>perwakilan rakyat. Bertolak ukur demikian, Abdurrahman Wahid selain telah banyak melanggar konstitusi, juga berusaha memonopoli penafsiran konstitusi. Pendukung Abdurrahman Wahid adalah orang-orang yang belum belajar konstitusi. Karena diangkat berdasarkan konstitusi, maka tidak ada pilihan lain bagi Abdurrahman Wahid kecuali mengindahkan konstitusi. Mengindahkan konstitusi berarti mengindahkan lembaga perwakilan rakyat yang mengangkatnya. Juga karena diangkat berdasarkan konstitusi, maka pemberhentian Abdurrahman Wahid dilakukan dengan mengacu pada prosedur konstitusional yang melembaga. Apa pun yang dilakukan oleh lembaga perwakilan sudah didasarkan pada konstitusi. Sidang Istimewa adalah mekanisme konstitusional yang ditempuh untuk menghentikan tindakan inkonstitusional Abdurrahman Wahid. Dekrit Presiden untuk membekukan Partai Golkar, meminta para petinggi TNI/POLRI mengundurkan diri, membubarkan MPR, dan memerintahkan percepatan Pemilu merupakan pelanggaran konstitusi tak terampuni. Demi tegaknya konstitusi, maka Abdurrahman Wahid harus diberhentikan dari jabatannya</p>
--	--	--	--

			sebagai Presiden.
3	17 unit	Logika wacana politik	<p>Logika wacana politik Abdurrahman Wahid merupakan wilayah paling rawan dan menjadi tema terbesar kedua dalam kontra-wacana Amien Rais. Ditegakkan di atas dua teori kebenaran, koherensi dan korespondensi, Amien Rais menyerang segala ucapan Abdurrahman Wahid.</p> <p>Wacana politik Abdurrahman Wahid tidak memenuhi syarat koherensi, karena selain sering berubah-ubah juga saling bertentangan satu sama lain. Pun wacana politik Abdurrahman Wahid teramat jauh dari kriteria kebenaran korespondensi, karena pernyataan tidak didukung oleh kenyataan dan atau tindakan. Menurut Amien Rais, bagi siapa pun yang rasional dan kritis, akan banyak menemukan pernyataan Abdurrahman Wahid yang tidak didukung oleh penalaran logik-objektif. Abdurrahman Wahid tidak menyampaikan kebenaran, tetapi membenaran terhadap ucapan dan tindakannya sendiri. Kritik rasionalitas-empirik terhadap pernyataan dan tindakan Abdurrahman Wahid mewarnai seluruh kontra-wacana yang dibangun oleh Amien Rais. Kontra-wacana Amien Rais.</p>
4	16 unit	Penyelenggaraan	Kontra-wacana terkeras ketiga yang

		pemeritnah yang baik	ditujukan kepada Abdurrahman Wahid menyangkut tolok-ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, selain harus transparan, pemerintah yang baik harus mampu melaksanakan agenda reformasi. Kinerja dalam melaksanakan agenda reformasi sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid masih jauh dari yang diharapkan rakyat melalui para wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Presiden Abdurrahman Wahid tidak memiliki kinerja yang baik. Bahkan ketika diberi kesempatan melakukan perbaikan dengan memberikan Memorandum, Abdurrahman Wahid tetap saja “mondok kelas”. Dengan prinsip profesionalisme yang menghargai atau memberikan sanksi berdasarkan kinerjanya. Sedangkan dengan prinsip keadilan, orang mendapatkan ganjaran atau hukuman sesuai dengan tindakan.
5	8 unit	Demokrasi	Kontra-wacana terkeras keempat yang dibangun oleh Amien Rais untuk menyerang Abdurrahman Wahid adalah praksis demokrasi. Kebebasan dalam demokrasi adalah kebebasan yang dijamin dan diatur oleh undang-undang. Seorang demokrat juga harus tunduk pada keputusan kolektif. Kedaulatan memang ada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan

			<p>menurut undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pemikiran ini, secara institusional para anggota lembaga perwakilan rakyat memiliki legitimasi konstitusional. Demokrasi tidak mengajarkan pertanggung-jawaban jabatan Presiden melalui Pemilu. Demikian pula, Pemilu dalam negara demokrasi bukan merupakan forum bagi rakyat untuk menilai kinerja Presiden, tetapi menyalurkan aspirasi politiknya. Dengan demikian, demokrasi menurut Abdurrahman Wahid sekadar wacana demokrasi teoretik, jauh dari praktika sebenarnya yang jelas-jelas diatur oleh undang-undang.</p>
6	8 unit	Etika Politik	<p>Tidak hanya logika politik Abdurrahman Wahid yang menjadi sasaran kontra-wacana Amien Rais, tetapi juga wacana etika politik Abdurrahman Wahid. Sebagai Presiden yang mendapatkan mandat dan ditetapkan oleh MPR, Abdurrahman Wahid banyak mengeluarkan pernyataan yang menghina kehormatan MPR. Amien Rais tidak hanya mempersoalkan istilah-istilah yang digunakan oleh Abdurrahman Wahid, tetapi justru persoalan etika yang menyangkut moralitas baik-buruk, dan mulia-tercela. Dalam menjalankan hak prerogatif, Abdurrahman Wahid tidak</p>

			<p>mengindahkan kode etik politik. Etiketik baik Abdurrahman Wahid sangat diragukan, karena berkali-kali mendapatkan masukan, ternyata tidak melakukan perbaikan sebagaimana disepakati. Abdurrahman Wahid juga tidak memiliki etika politik yang baik, karena memenuhi permintaan seorang narapidana secara tidak transparan. Abdurrahman Wahid tidak mampu menjaga kehormatan dan wibawanya sebagai Presiden. Sejumlah ancaman Abdurrahman Wahid yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti warga negara akan timbulnya kekerasan manakala dirinya diturunkan juga dinilai sangat tidak etis, lebih-lebih kecenderungan Abdurrahman Wahid untuk membenturkan antara elit dengan massa.</p>
7	7 unit	Kepentingan Nasional	<p>Tema terbesar keenam dalam kontra-wacana Amien Rais terhadap Abdurrahman Wahid adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional tidak boleh kalah oleh karir politik seorang Abdurrahman Wahid. Sejumlah keputusan meresuffle kabinet tanpa memperhatikan dampak politiknya sama sekali tidak mendukung terjadinya stabilitas dan rekonsiliasi nasional. Wacana politik Abdurrahman Wahid tentang kepentingan</p>

			<p>nasional tidak berkorespondensi dengan menurunnya keamanan, merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta gejala disintegrasi bangsa. Ritual kenegaraan dan simbol-simbol negara semakin terabaikan dan luntur di Propinsi Irian Jaya dan Daerah Istimewa Aceh. Abdurrahman Wahid tidak memiliki kepekaan, atau memang tidak mengetahui, berbagai gejala disintegrasi bangsa. Walhasil Abdurrahman Wahid adalah presiden yang tidak mengindahkan kepentingan nasional.</p>
8	5 unit	Elit-massa	<p>Abdurrahman Wahid boleh saja menyatakan bahwa kecaman --- dan selanjutnya penurunan --- dirinya merupakan kehendak sekelompok elit politik. Amien Rais menilai bahwa Abdurrahman Wahid tidak mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan lembaga. Bagaimanapun, tindakan kolektif para anggota lembaga perwakilan rakyat bukan lagi merupakan tindakan pribadi, melainkan keputusan konstitusional dan institusional. Walaupun secara empirik mungkin ada kesenjangan antara elit dengan massa, sebagai institusi para elit politik di lembaga perwakilan tetap sah menjadi wakil massa rakyat. Karena itu, tidak bisa secara tegas lagi dibedakan antara kehendak elit dengan</p>

			kehendak massa.
9	3 unit	Supremasi dan penegakan hukum	<p>Abdurrahman Wahid merupakan sosok yang tidak bisa diteladani dalam menjunjung tinggi hukum karena sering melontarkan tuduhan tanpa diikuti dengan bukti yang cukup. Selain tidak mampu memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, Abdurrahman Wahid sendiri terlibat dalam kasus sejenis. Abdurrahman Wahid gagal sama sekali dalam menjalankan salah satu agenda reformasi paling penting, yaitu: supremasi dan penegakan hukum.</p>
10	3 unit	Sikap pribadi	<p>Konsisten menyuarakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan ciri menonjol sikap pribadi Amien Rais. Dia kurang memiliki perhatian pada persoalan dan hubungan antarpribadi. Mirip dengan Abdurrahman Wahid, Amien Rais juga kurang peduli terhadap tanggapan negatif atau positif dari orang lain atas pernyataan-pernyataannya. Amien Rais juga kurang peduli pada berbagai formalitas, karena yang dipentingkan adalah substansi dari suatu persoalan. Karena mampu melepaskan diri dari jaringan antarpribadi, dengan leluasa Amien Rais mengungkapkan kritiknya dengan bahasa teknis yang lugas, dan</p>



			terkadang metaforik.
11	Semua	Gaya berwacana	<p>Bila suatu istilah teknis atau jargon politik memang diperlukan dan mudah dipahami masyarakat, maka oleh Amien Rais istilah itu pun digunakan sebagai strategi berkontra-wacana. Bila kesulitan dalam menggunakan istilah teknis karena tidak mampu menegaskan nuansa makna yang ingin disampaikan, maka Amien Rais tidak ragu untuk mengadaptasi idiom-idiom kultural. Gaya berkontra-wacana Amien Rais memiliki dampak penularan sangat cepat dan meluas. Seteknis apa pun suatu istilah, bisa populer bila diucapkan oleh Amien Rais.</p>

TABEL 5.4  
RINGKASAN HASIL ANALISIS  
KONTRA-WACANA POLITIK AKBAR TANDJUNG

No.	Unit Wacana	Ranah Wacana	Abstraksi Butir Wacana
1	38 unit	Kekuasaan	Pada dasarnya makna kekuasaan Presiden bagi Akbar Tandjung sama dengan yang digunakan oleh Amien Rais. Kekuasaan formal merupakan mandat dari rakyat yang disalurkan melalui MPR. Karena yang memberikan mandat kekuasaan kepada presiden adalah MPR, maka MPR pula yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk memberhentikan presiden. Undang-undang menempatkan MPR di atas presiden, jadi presiden tidak bisa memberhentikan anggota, apalagi membubarkan MPR. Demikian pun, keberadaan Partai Golkar dijamin oleh undang-undang. Karena itu, pembubaran Partai Golkar oleh Presiden merupakan bukti kuat bahwa Presiden telah melanggar Undang-undang. Karena itu, MPR sebagai lembaga yang memberikan mandat kepada Presiden, harus memproses pemberhentian Presiden karena telah melanggar undang-undang.
2	24 unit	Konstitusionalisme	Konstitusionalisme merupakan tema besar pertama kontra-wacana politik Akbar Tandjung. Namun berbeda dari

			<p>Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, konstitusi dimaknai oleh Akbar Tandjung secara sangat sederhana, yaitu sebagaimana tertulis dalam undang-undang dan produk hukum lainnya. Konstitusi adalah undang-undang atau ketetapan nomor sekian, tahun sekian, dan pasal sekian. Bersikap konstitusional berarti bertindak berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum lainnya. Bersikap konstitusional juga berarti mengindahkan dasar hukum, mekanisme institusional, dan prosedur tetap pengambilan keputusan. Kesepakatan antardua atau lebih pihak menjadi konstitusi bagi semua pihak terkait.</p>
3	7 unit	Logika wacana politik	<p>Kontra-wacana terbesar kedua yang dikembangkan oleh Akbar Tandjung berkenaan dengan logika wacana politik Abdurrahman Wahid. Logika wacana politik harus sistematis, rasional dan objektif. Menurut Akbar Tandjung, adalah logis kalau Partai Golkar menarik dukungannya kepada Abdurrahman Wahid, karena didasarkan pada fakta objektif dan penalaran rasional. Dukungan politik Partai Golkar kepada Abdurrahman Wahid tidak diberikan tanpa <i>reserve</i>, melainkan yang kritis tetapi rasional. Abdurrahman Wahid tidak bisa dan tidak</p>

			boleh menuntut dukungan politik tanpa syarat, karena mendukung Abdurrahman Wahid bukan berarti menjadi pengikut Abdurrahman Wahid.
4	6 unit	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Ranah kontra-wacana Akbar Tandjung berikutnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemisahan kekuasaan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dinilai bisa menjadi alternatif menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena pemisahan ini pernah diusulkan, maka pemisahan kekuasaan itu harus dipandang sebagai lebih baik, dibanding bila mempertahankan ketentuan yang ada. Pemerintahan yang baik memiliki ciri tidak sentralistik, ada pembagian kekuasaan, serta ditakar keberhasilannya berdasarkan parameter kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.
5	4 unit	Demokrasi	Demokrasi merupakan tema kontra-wacana Akbar Tandjung berikutnya. Praktik demokrasi tak bisa bebas dari latar budaya masyarakatnya. Bila masyarakat lebih merasa sejuk dengan pendekatan musyawarah dan mufakat, maka pendekatan semacam ini harus lebih didahulukan dibanding pendekatan pemungutan suara.

6	1 unit	Kepentingan Nasional	Walaupun sangat kecil, kontra –wacana tentang kepentingan nasional juga disinggung oleh Akbar Tandjung.
7	Semua	Sikap pribadi	Akbar Tandjung, berdasarkan kontra-wacana politiknya, dapat dicitra sebagai sosok yang sangat mampu mengendalikan diri. Bertolak belakang dengan Abdurrahman Wahid, Akbar Tandjung menunjukkan sikap pribadi akomodatif, halus dan santun dan moderat. Pernyataan berapi-api hanya perlu bila dia harus berorasi di hadapan para kader partai yang dia pimpin. Keberapi-apian ini pun baru muncul setelah mendapatkan tantangan karena partainya akan dibubarkan.
8	Semua	Gaya berwacana	Defensif, bicara dengan nada datar, berhati-hati sambil memantau setiap peluang, merupakan gaya berwacana Akbar Tandjung. Sedangkan formalis-legalistik, merupakan ciri yang dapat ditemukan dalam hampir semua kontra-wacana politik Akbar Tandjung.

Apakah makna wacana politik Presiden Abdurrahman Wahid bagi pesaing-pesaing politiknya? Apakah makna wacana politik Abdurrahman Wahid bagi Megawati Soekarnoputri? Apakah makna wacana politik Abdurrahman

Wahid bagi Amien Rais? Apakah makna wacana politik Abdurrahman Wahid bagi Akbar Tandjung?

Abdurrahman Wahid sendiri sebenarnya memahami benar dua sumber kekuasaan yang dia miliki. Pertama, kewenangan sebagai seorang Presiden. Dia sangat meyakini bahwa sepanjang apa yang dia lakukan tetap berada pada jalur konstitusi yang memberikan dia kewenangan, maka siapa pun harus menghormati setiap keputusannya. Karena konstitusi memberikan kewenangan kepada dia, maka mengkategorikan siapa pun yang menentang kekuasaannya sama dengan melanggar konstitusi. Bahkan, lembaga yang memilih dan mengesahkan dia sebagai Presiden pun akan dia lawan manakala menyentuh persoalan yang berada dalam batas kewenangannya sebagai Presiden. Karena itu, dia pun menilai sejumlah anggota dan lembaga MPR telah melanggar konstitusi. Untuk itu, Abdurrahman Wahid berani melawannya.

Sumber kekuasaan kedua Abdurrahman Wahid adalah kharismanya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Kekuasaan jenis ini tergolong jarang digunakan oleh Abdurrahman Wahid. Hanya ketika merasa dirinya terdesak oleh para pesaingnya, Abdurrahman Wahid berniat untuk menggunakan pengaruh kharismaniknya. Ini dilakukan dengan, misalnya, memberikan “ancaman” bahwa kalau hingga ketika itu tidak ada huru-hara, itu karena dia memang melarang para pengikutnya untuk menggunakan cara-cara kekerasan atau apapun yang berdampak sosial negatif.

Sebagaimana tampak dalam abstraksi butir-butir wacana Abdurrahman Wahid, karena sifat spontanitas berwacana Abdurrahman Wahid, konsistensi antarwacana kurang terjaga. Banyak pernyataan saling bertentangan satu sama

lain. Demikian pula korespondensi antara pernyataan dengan kenyataan kurang terpikirkan. Walhasil, wacana politik Abdurrahman Wahid tak mampu lagi mendukung perjuangan politiknya. Abdurrahman Wahid tidak mampu memetik manfaat kekuatan bahasa atau wacana politik sebagai piranti kepentingan politik. Kelemahan wacana politik Abdurrahman Wahid berhasil dimanfaatkan oleh para pesaing politiknya.

Bagi Megawati Soekarnoputri, wacana politik Abdurrahman Wahid menyiratkan peluang bagi dirinya. Namun demikian, Megawati memahami kewenangan sebagai suatu pengaruh yang memiliki dasar hukum yang harus dihormati dan dipatuhi. Pengakuan ini harus diberikan kepada siapa pun yang memang memiliki kewenangan, seperti yang dia berikan dan buktikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Bilamana Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden, maka bisa diproyeksikan bahwa dia juga berharap agar siapa pun mematuhi dan menghormatinya. Seperti Abdurrahman Wahid, Megawati juga memiliki kekuasaan kharismatik cukup besar. Kekuasaan demikian harus digunakan justru untuk mendukung stabilitas nasional.

Kelemahan wacana politik Abdurrahman Wahid, secara tersirat, merupakan peluang bagi Megawati. Karena mungkin sadar akan dampak yang mungkin timbul bila dia banyak berwacana atau berkontra-wacana, maka Megawati memilih untuk seminim mungkin melontar wacana politik. Gaya berkontra-wacana yang feminin-minimalis, dan terkesan rendah hati ternyata lebih mengena tidak hanya di hati rakyat sebagaimana terbukti melalui Pemilu, tetapi juga berkenan di hati para penentangannya terdahulu.

Bagi Amien Rais, kekuasaan formal presiden merupakan mandat dari rakyat yang disalurkan melalui MPR. Karena yang memberikan mandat kekuasaan kepada presiden adalah MPR, maka MPR pula yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk memberhentikan presiden. Undang-undang menempatkan MPR di atas presiden, jadi presiden tidak bisa memberhentikan anggota, apalagi membubarkan MPR. Pembubaran MPR oleh presiden merupakan pelanggaran sangat serius dan menjadi alasan yang sah untuk memberhentikannya.

Bagi Amien Rais, wacana politik Abdurrahman Wahid merupakan wilayah paling strategis untuk diserang. Semakin banyak Abdurrahman Wahid menghasilkan wacana politik yang tidak memenuhi kriteria kelayakan logik-empirik, semakin mungkin bagi Amien Rais untuk membangun pengaruh melalui kontra-wacananya. Wacana politik Abdurrahman Wahid tidak memenuhi syarat koherensi, karena selain sering berubah-ubah juga saling bertentangan satu sama lain. Pun wacana politik Abdurrahman Wahid teramat jauh dari kriteria kebenaran korespondensi, karena pernyataan tidak didukung oleh kenyataan dan atau tindakan. Menurut Amien Rais, bagi siapa pun yang rasional dan kritis, akan banyak menemukan pernyataan Abdurrahman Wahid yang tidak didukung oleh penalaran logik-objektif. Dalam wacana politik Abdurrahman Wahid, tidak terkandung kebenaran melainkan sekadar pembenaran terhadap ucapan dan tindakannya sendiri. Kritik rasionalis-empirik terhadap pernyataan dan tindakan Abdurrahman Wahid mewarnai seluruh kontra-wacana yang dibangun oleh Amien Rais.



Gaya berkontra-wacana Amien Rais yang rasional-kritis memiliki dampak penularan sangat cepat dan meluas. Seteknis apa pun suatu istilah, bisa populer bila diucapkan oleh Amien Rais. Bila suatu istilah teknis atau jargon politik memang diperlukan dan mudah dipahami masyarakat, maka oleh Amien Rais istilah itu pun digunakan sebagai strategi berkontra-wacana. Bila kesulitan dalam menggunakan istilah teknis karena tidak mampu menegaskan nuansa makna yang ingin disampaikan, maka Amien Rais tidak ragu untuk mengadaptasi idiom-idiom kultural.

Bagi Akbar Tandjung, kewenangan presiden merupakan mandat dari rakyat yang disalurkan melalui MPR. Karena yang memberikan mandat kekuasaan kepada presiden adalah MPR, maka MPR pula yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk memberhentikan presiden. Undang-undang menempatkan MPR di atas presiden, jadi presiden tidak bisa memberhentikan anggota, apalagi membubarkan MPR. Demikian pun, keberadaan Partai Golkar dijamin oleh undang-undang. Karena itu, pembubaran Partai Golkar oleh Presiden merupakan bukti kuat bahwa Presiden telah melanggar Undang-undang. Karena itu, MPR sebagai lembaga yang memberikan mandat kepada Presiden, harus memproses pemberhentian Presiden karena telah melanggar undang-undang.

Wacana politik Abdurrahman Wahid, bagi Akbar Tandjung merupakan wilayah yang sangat penting untuk dicermati. Penarikan dukungan partainya terhadap Abdurrahman Wahid menandakan hilangnya kepercayaan Akbar Tandjung terhadap Abdurrahman Wahid. Wacana politik Abdurrahman Wahid tidak dibangun di atas logika rasional-empirik dan banyak melanggar konstitusi.

Kepentingan Akbar Tandjung untuk “bernaung” di bawah Pemerintahan Abdurrahman Wahid ternyata jauh dari yang diharapkan. Dengan gaya berkontra-wacana formalis-legalistik, Akbar Tandjung berbicara dengan nada datar, cenderung defensif, serta berhati-hati sambil memantau setiap kemungkinan. Wacana politik Abdurrahman Wahid untuk membubarkan atau membekukan Partai Golkar merupakan pembenar terpenting bagi Akbar Tandjung untuk bersama-sama Amien Rais memberhentikan Abdurrahman Wahid.

## **B. Diskusi Implikasi Teoretik**

Apakah signifikansi praktik berwacana (*discursive practice*), khususnya Abdurrahman Wahid, bagi sebagian masyarakat interpretif tertentu? Penjelasan yang diberikan oleh hermeneutika Gadamerian cukup jelas, bahwa tidak bisa ada pemahaman tunggal terhadap apa yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid. Mengapa demikian?

For Gadamer, individuals do not stand apart from texts in order to analyze and interpret them; rather, interpretation itself is part and parcel of being.

The central tenet of Gadamer’s theory is that one always understand experience from the perspective of presuppositions. Our tradition give us a way of understanding thing, and we cannot divorce ourselves from that tradition. Observation, reason, and understanding are never objectively pure; they are colored by history and community. Further, history is not to be separated from the present (Littlejohn, 1992: 221).

Sejauh mengacu pada pada pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat interpretif, yang dalam penelitian ini masyarakat interpretif yang berbeda kepentingan dengan Abdurrahman Wahid dan para pendukungnya, temuan penelitian ini mendukung tesis dasar yang diajukan oleh Gadamer. Di hadapan

masyarakat interpretif yang berbeda kepentingan, Abdurrahman Wahid sebagai produsen wacana benar-benar telah mati (*the author is dead*). Wacana apa pun yang dibangun oleh Abdurrahman Wahid ternyata telah ditafsirkan dengan begitu “semena-mena” oleh masyarakat interpretif yang tidak mendukungnya lagi.

Ada implikasi sangat penting dari penerimaan tesis dasar Gadamer ini, terutama menyangkut tesis lain tentang hubungan antara bahasa dengan kekuasaan. Artinya, Gadamer telah menyumbangkan semacam *ceteris paribus* terhadap kekuatan persuasif dan hegemonik bahasa untuk mendapatkan atau melanggengkan kekuasaan. Memang benar bahwa bahasa bisa digunakan sebagai piranti pemerolehan dan pelanggengan kekuasaan, tetapi tentu ada prasyaratnya, yaitu: sepanjang tidak terjadi persilangan kepentingan antara produsen wacana (*the author*) dengan khalayak penafsirnya (*its interpreter*).

Secara umum memang tampak bahwa dalam struktur politik elit bersaing, bahasa tidak lagi berfungsi memantapkan hubungan sosial sebagaimana digambarkan oleh sosiolinguis konvensional seperti Trudgil (1975: 14), tetapi lebih merupakan piranti untuk memenangkan persaingan politik. Perhatian para pelaku wacana politik bukan lagi mengupayakan titik temu penafsiran menuju pemahaman bersama (*shared meaning*) melainkan makna hegemonik (*hegemonic meaning*). Wacana politik tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengendalikan kekuasaan, tetapi juga berpeluang menjadi sasaran serangan bagi pihak lain untuk mendapatkan, mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan.

Namun demikian, telaah berdasar perspektif Gadamerian menegaskan bahwa persoalannya tidak sesederhana proposisi tersebut. Penggunaan bahasa sebagai piranti legitimasi kekuasaan yang ditujukan terhadap masyarakat penafsir yang berlawanan kepentingan justru bisa berbalik menjadi “senjata makan tuan”, karena akan diolah oleh masyarakat penafsirnya sehingga tampak menjadi penipuan melalui bahasa. Gadamer menyinggung persoalan ini secara tidak langsung sebagai bagian dari tanggapannya terhadap kritik yang diajukan oleh Habermas.

Insofar as these compulsions seek to legitimize themselves in and through language, the critique of ideologies (itself, of course, an act of reflection which makes use of the power of language) becomes an exposure of “deception with language” (Gadamer, 1990: 283).

Merujuk Collins (1975: 114), semua percakapan adalah negosiasi. Terdapat enam jenis percakapan, yaitu: percakapan praktis, percakapan ideologis, diskusi intelektual, percakapan hiburan, gosip dan percakapan pribadi. Sebagai percakapan paling serius dan menekan, percakapan ideologis (*ideology of legitimizing talks*) membuat orang terpilah menjadi dua kubu. Orang akan cenderung memilih untuk berbicara dengan orang lain yang memiliki kemiripan dengan dirinya, serta menghindarkan diri dari berbicara dengan orang lain yang memiliki pandangan bertentangan (Collins, 1975: 121). Dalam percakapan ideologis itu pula, ada kecenderungan untuk terjadi persaingan antarberbagai pandangan.

Disadari ataupun tidak disadari, dalam negosiasi kepentingan yang berpiranti wacana, para pelaku niscaya berupaya mengembangkan wacananya

berdasarkan sejumlah kriteria yang dinilai baik. Banyak landasan bisa digunakan, mulai dari klaim kebenaran agama, kebenaran rasional, kebenaran empirik, kebenaran legalistik, hingga kebenaran “populis”.

Apa yang menarik dari wacana dan kontra-wacana politik antarelit politik era kepresidenan Abdurrahman Wahid adalah saling bersaingnya klaim-klaim kebenaran tersebut. Abdurrahman Wahid sering menggunakan klaim kebenaran agama, klaim kebenaran empirik, dan klaim kebenaran “populis”. Walaupun tersirat Amien Rais lebih sering menggunakan klaim kebenaran rasional dan empirik, khususnya teori kebenaran koherensi dan korespondensi. Akbar Tandjung tidak bisa jauh-jauh dari klaim kebenaran legalistik dan rasional. Sedangkan Megawati Soekarnoputri, tidak begitu tampak klaim yang digunakan, tetapi --- kalau memang dimungkinkan menggunakan label ini --- lebih menggunakan kebenaran “empatik”.

Selain mendukung kesimpulan Collins tentang bahasa politik sebagai percakapan ideologis, temuan penelitian ini juga mengkategorikan tindakan politik elit sebagai tindak berwacana (*discursive action*) sebagaimana digambarkan oleh Giddens.

He (Giddens) describes it as a ‘stratification model’ because it conceives of the actor as a series of layers of consciousness. The most conscious or ‘aware’ level is that at which actors monitor the flow of their own activities (i.e. by the reflective glance) and those of others (by *verstehen*). Actors routinely maintain a theoretical understanding of action by means of language – so this consciousness can be describe as discursive (Waters, 1994: 49).

Beberapa kriteria wacana yang baik, khususnya koherensi antarpernyataan dan korespondensi antara pernyataan dengan kenyataan, menentukan tingkat

kemanfaatan wacana politik untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengendalikan kekuasaan. Pun demikian, wacana yang buruk karena tidak memenuhi syarat koherensi dan korespondensi, menentukan tingkat risiko yang harus ditanggung oleh pelaku wacana.

Melalui wacana politik bergaya spontan-konfrontatif, Abdurrahman Wahid telah mengganggu konsensus antarelit politik yang menjadi landasan bagi konsensus sosial pasca Orde Baru. Ini berarti bahwa semacam konsensus bisa terganggu apabila ada satu atau lebih orang yang melanggar struktur normatif (*breaking the normative structure*). Karena itu, siasat Abdurrahman Wahid untuk melakukan monopoli tafsir tidak hanya berpengaruh pada kelangsungan konsensus, tetapi juga berpengaruh pada kemunculan konflik-sosial. Kejadian kritis demikian cenderung diikuti oleh berbagai kejadian genting lainnya, baik yang menyumbang dan atau memicu percepatan menuju puncak konsensus sosial-politik yang menyumbang dan memicu percepatan menuju konflik sangat tajam.

Mengikuti model Boulding (1963), tindakan bersama terbentuk setelah mereka berhasil mengembangkan pemaknaan dan cara pandang bersama (*shared meaning and perspectives*). Pemaknaan dan cara pandang bersama ini pula yang secara teoretik memungkinkan tumbuh-kembangnya kesadaran akan kepentingan objektif mereka (*awareness of objective interest*). Bila proses berlangsung dalam kondisi teknik, sosial, dan politik yang kondusif, maka perkembangan kesadaran akan kepentingan objektif tidak hanya membentuk kelompok tersembunyi (*quasi group*), tetapi juga bisa membentuk kelompok konflik terbuka (*manifest conflict group*).

Pada aras kajian antarpihak bertikai, sejalan dengan pertumbuhan kesadaran akan kepentingan objektif, berlangsung polarisasi menjadi dua pihak. Setiap pihak memerjuangkan kepentingan hingga muncul aneka bentuk konflik sosial. Poros Tengah yang semula mendukung dan berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, berkembang dari sudah laten menjadi manifes kembali dengan arah gerakan berlawanan. Demikian pun kelompok Megawati Soekarnoputri yang semula sudah menerima konsensus, menjadi lebih dekat dengan kelompok Poros Tengah. Polarisasi mengarah kepada dua kelompok konflik, yaitu: pendukung Abdurrahman Wahid dan penentang Abdurrahman Wahid.

Penyelesaian perlawanan yang bersifat simbolik dan tak kentara (*symbolic and ideological form of people resistance*) mungkin dilakukan melalui semacam persaingan makna (*meanings competition*). Dalam konteks Indonesia era Pemerintahan Abdurrahman Wahid, perlawanan terhadap wacana politik Abdurrahman Wahid tidak hanya dilakukan Amien Rais dan Akbar Tandjung, tetapi kemudian juga diikuti oleh Megawati Soekarnoputri. Ini menegaskan kembali hipotesis bahwa perangkat makna pun bisa disebut sebagai salah satu piranti kepentingan (Lofland and Lofland, 1984).

Sejumlah cacat dalam wacana politik Abdurrahman Wahid terus dimanfaatkan oleh Amien Rais, Akbar Tandjung dan kemudian Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid sendiri teramat yakin dengan berbagai tindak berwacananya yang bila ditilik sebagai piranti perjuangan politik semakin tumpul. Akhirnya hegemoni makna di lembaga perwakilan rakyat benar-benar dipegang

oleh Amien Rais dan Akbar Tandjung. Kepemimpinan intelektual ini, meminjam istilah Gramsci, berakhir dengan keberhasilan Amien Rais dan Akbar Tandjung memprakarsai SI MPR.

Perjuangan bersenjata wacana politik oleh Abdurrahman Wahid tidak berhenti. Dekrit yang sebagaimana dia kemukakan sebelumnya menjadi "wacana haram", dia tempuh dengan segala resikonya. Dekrit ini pun akhirnya berhenti sebagai wacana sebagaimana maklumat sebelumnya yang juga berhenti sebagai wacana. Ketika itu pula wacana politik Abdurrahman Wahid tidak lagi mampu berfungsi sebagai piranti perjuangan politik.

Diletakkan dalam konteks teoretik piranti kekuasaan Althusser (1971), Abdurrahman Wahid telah gagal memanfaatkan baik Aparat Represif Negara (RSA) dan Aparat Ideologik Negara (ISA). Kegagalan memanfaatkan RSA terjadi karena sejak awal Abdurrahman Wahid mengembangkan wacana supremasi sipil yang tak populer di kalangan TNI/POLRI. Kegagalan memanfaatkan ISA terjadi karena sejumlah cacat dalam wacana politik Abdurrahman Wahid tak mampu menjadi arus utama di lembaga perwakilan rakyat.

Dalam perspektif teori kekuasaan Gramsci (1971), temuan penelitian ini menyumbang penghalusan dengan menambahkan jenis upaya penguasaan yang terletak di antara penguasaan koersif dan penguasaan hegemonik. Abdurrahman Wahid tidak berhasil melakukan penguasaan koersif, karena gagal memanfaatkan RSA. Abdurrahman Wahid juga gagal melakukan penguasaan hegemonik karena gagal memanfaatkan ISA. Upaya jalan alternatif yang ditempuh oleh Abdurrahman Wahid adalah mengupayakan penguasaan intimidatif yang



dilakukan dengan memberikan sejumlah ancaman akan timbulnya kekerasan dan pemberontakan. Namun demikian, upaya penguasaan intimidatif ini juga tidak berhasil karena tidak didukung oleh RSA.

Kekuasaan ideologik, menurut Galtung, dapat dibangun berdasarkan ideologi, kebudayaan, dan bahasa. Sedangkan kekuasaan punitif dibangun di atas anggaran belanja militer persenjataan militer, dan personil militer (Windhu, 1992: 40). Terkait dua sumber pokok kekuasaan ini, tampak bahwa dalam upaya mempertahankan kekuasaan, Abdurrahman Wahid telah gagal baik dalam mengerahkan sumber-sumber ideologik maupun sumber-sumber punitif.

Ditilik dari perspektif teoretik kekuasaan dan kekerasan menurut Bourdieu (1994), temuan penelitian ini menyumbang tipologi agak berbeda. Konseptualisasi dan teoretisasi kekuasaan dan kekerasan simbolik ala Bourdieu tidak berlaku manakala pihak-pihak yang terlibat menguasai sumber-sumber kekuasaan yang setara. Apa yang terjadi ketika seseorang berupaya melakukan kekerasan simbolik terhadap orang lain yang setara yang mampu melakukan perlawanan bukan lagi kekerasan simbolik, melainkan pertikaian simbolik. Kata, frase, kalimat dan bahkan keseluruhan teks, merupakan perangkat simbol verbal yang menjadi piranti bagi para pelaku untuk memenangkan persaingan dan pertikaian atau memperebutkan kepentingan.

Refleksi lebih luas terhadap keberlakuan tesis ini juga bisa dikenakan pada berbagai jargon yang dikembangkan oleh para pelaku politik. Istilah nasionalisme atau kebangsaan, sebagai wacana, misalnya, bisa dipahami secara sangat berbeda oleh masyarakat penafsir yang memiliki sejarah berbeda.

Terdjadinja persatuan rakjat jang bersifat Bangsa itu tidak dengan seketika, akan tetapi lambat-laun dengan melalui waktu yang berabad-abad, dalam waktu mana terbuktiilah persatuan perikehidupan yang tersebut di atas itu, teristimewa bersatunya nilai-nilai kebatinan, yakni tambo, bahasa, seni, agama, pengetahuan (Dewantara, 1932: 6).

Perbedaan atau bahkan pertentangan pemaknaan terhadap makna nasionalisme, sebagaimana tampak dalam kutipan tersebut bisa dijelaskan dari perspektif hermeneutika Gadamerian. Ketidak-samaan sejarah (*tambo*) dan lebih-lebih prasangka dan kepentingan antara sebagian masyarakat Indonesia dengan masyarakat Aceh, Papua, dan yang baru lalu Timor Lestee, menyulitkan usaha membangun pemahaman yang sama akan makna nasionalisme atau kebangsaan bagi masyarakat Indonesia. Menggunakan ungkapan Gadamer, masyarakat Indonesia belum cukup berhasil dalam upaya menyatukan berbagai horison pemaknaan menjadi suatu pemaknaan bersama (*shared understanding*). Konflik, baik antarelit maupun antara elit dengan massa (*elite-mass disintegration*), bila hendak dipahami menurut perspektif Gadamer, tidak lain merupakan cermin rendahnya fusi horison antarmereka.

Ada titik temu penting antara pendekatan Gadamerian dengan sosiologi Mertonian, ataupun apa yang oleh Alejandro Portes (2000) ditulis dalam “*The Hidden Abode: Sociology as Analysis of the Unexpected*”. Sebagai tindak bertujuan, praktik berwacana (*discursive practice*) tidak hanya memunculkan fungsi yang diharapkan, yang oleh Merton diistilahkan fungsi manifes, tetapi juga menghadirkan fungsi laten, serta sejumlah fenomena lain yang dikenal melalui terminologi *unfunction*, *disfunction*, dan *malfunction*.

Tugas ilmu-ilmu sosial, menurut Merton (1976: 145- 155) adalah menganalisis konsekuensi tindakan sosial yang tak terantisipasi (*the unanticipated consequences of social action*), yang selanjutnya diistilahkan oleh Portes (2000) sebagai hal yang tak diharapkan (*the unexpected*). Bila status epistemologi praktik wacana diidentikkan dengan tindakan sosial, maka justru pendekatan Gadamer yang lebih memiliki signifikansi bagi kajian ilmu sosial dibanding dengan pendekatan Hirschian. Dengan ungkapan lain, kajian terhadap makna wacana politik Abdurrahman Wahid bagi para pesaing politiknya, merupakan “pintu masuk” alternatif bagi identifikasi fungsi-fungsi laten praktik berwacana Abdurrahman Wahid.

Dari perspektif ini, tampak jelas bahwa agak sulit untuk memasukkan perspektif hermeneutika Gadamer sebagai bagian dari paradigma interpretivisme konvensional. Kalau hermeneutika intensionalis Hirschian bisa secara konsisten dimasukkan ke dalam kelompok pendekatan hermeneutika interpretivis, maka hermeneutika Gadamer lebih cenderung masuk ke dalam kelompok hermeneutika positivis, atau sekurang-kurangnya inter-subjektivis. Ini bisa disimpulkan karena baik produsen wacana maupun penafsir wacana sama-sama memiliki otonomi, termasuk untuk tidak mencapai kesepakatan makna.

Terkait dengan keteralihan temuan penelitian ini, logika hubungan praktik berbahasa dan berwacana dengan upaya pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan justru harus dilakukan secara terbalik. Praktik berbahasa dan berwacana harus lebih dilihat sebagai "bidang rentan" yang cenderung dijadikan sebagai sasaran serangan para pesaing politik daripada sebagai sarana

memperoleh kekuasaan. Keberlangsungan kekuasaan seorang pejabat publik sebagiannya ditentukan oleh praktik berbahasa dan berwacana. Dengan ungkapan lain, semakin efektif seorang pejabat publik dalam berbahasa dan berwacana, maka semakin kecil bidang rentan yang bisa diserang oleh para pesaing politiknya. Sebaliknya semakin tidak efektif seorang pejabat publik dalam berbahasa dan berwacana, maka semakin besar bidang rentan yang bisa diserang oleh para pesaing politiknya.

Ketidak-efektivan praktik berbahasa dan berwacana politik memberi peluang lebih besar kepada para pesaing politik untuk mengembangkan definisi negatif (buruk) terhadap penutur atau penulisnya. Logika linguistik di balik proposisi ini adalah adanya hubungan antara kohesi dengan koherensi. Kualitas kohesi suatu wacana yang ditampilkan oleh produsen wacana (*discourse producer*) yang dibantu oleh konteks tertentu akan membantu para penafsirnya (*discourse interpreter*) dalam mengenali koherensi wacana yang bersangkutan. Pada gilirannya, kualitas kohesi dan koherensi ini akan membentuk citra dan keyakinan masyarakat penafsir wacana terhadap produsen wacana: Apakah dia jujur atau tidak? Apakah dia cakap atau tidak? Atau apakah wacana yang disampaikan benar atau tidak?

Selanjutnya, sejauh menyangkut substansi tentang pemaknaan, temuan-temuan penelitian ini memang mengukuhkan tesis Gadamer. Namun demikian, berkenaan dengan metodologi kajian, pendekatan Gadamer tidak memberi panduan yang sebagaimana, misalnya, protokol analisis fungsional Merton. Gadamer begitu sibuk dengan pertanyaan tentang kebenaran (*the question of*

*truth*) sehingga menjadi kurang praktikal sebagai perspektif teoretik. Karena itu, diperlukan keberanian berspekulasi bagi siapa pun peneliti yang bermaksud menggunakan pemikirannya sebagai perspektif teoretik.

Bertolak dari kerangka pemikiran Gadamer yang mengandaikan ada dua pihak yang terlibat dalam penafsiran, antara wacana dengan penafsir, penelitian ini dikembangkan. Kerangka pikir demikian, ternyata tidak cukup aplikatif, sehingga peneliti harus mengembangkan sendiri metodologi kajiannya sepanjang tetap konsisten dengan kerangka pemikiran dasar Gadamer.

## **BAB VII**

### **BEBERAPA KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Merujuk kembali kepada rumusan masalah penelitian, berikut disajikan beberapa kesimpulan dan implikasi teoretiknya.

#### **A. Beberapa Kesimpulan**

Pertama, Abdurrahman Wahid memahami kekuasaan dalam dua makna. Pertama, kewenangan sebagai seorang Presiden. Dia sangat meyakini bahwa sepanjang apa yang dia lakukan tetap berada pada jalur konstitusi yang memberikan dia kewenangan, maka siapa pun harus menghormati setiap keputusannya. Karena konstitusi memberikan kewenangan kepada dia, maka mengkategorikan siapa pun yang menentang kekuasaannya sama dengan melanggar konstitusi. Bahkan, lembaga yang memilih dan mengesahkan dia sebagai Presiden pun dia lawan manakala menyentuh persoalan yang berada dalam batas kewenangannya sebagai Presiden. Dan itu pun dia lakukan. Oleh karena itu, dia pun menilai sejumlah anggota dan lembaga MPR telah melanggar konstitusi. Untuk itu, Abdurrahman Wahid berani melawannya.

Sumber kekuasaan kedua Abdurrahman Wahid adalah kharismanya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Kekuasaan jenis ini tergolong jarang digunakan oleh Abdurrahman Wahid. Hanya ketika merasa dirinya terdesak oleh para pesaingnya, maka Abdurrahman Wahid berniat untuk menggunakan pengaruh kharismaniknya. Ini dilakukan dengan, misalnya memberikan “ancaman” bahwa kalau hingga ketika itu tidak ada huru-hara, itu karena dia memang melarang para pengikutnya

untuk menggunakan cara-cara kekerasan atau apapun yang berdampak sosial negatif.

Selanjutnya, karena gaya berwacananya spontan-konfrontatif, konsistensi antar wacana politik Abdurrahman Wahid kurang terjaga. Banyak pernyataan saling bertentangan satu sama lain. Demikian pula korespondensi antara pernyataan dengan kenyataan kurang terpikirkan. Walhasil, wacana politik Abdurrahman Wahid tak mampu lagi mendukung perjuangan politiknya. Abdurrahman Wahid tidak mampu memetik manfaat kekuatan bahasa atau wacana politik sebagai piranti kepentingan politik. Kelemahan wacana politik Abdurrahman Wahid berhasil dimanfaatkan oleh para pesaing politiknya.

Megawati memaknai kekuasaan formal atau kewenangan sebagai suatu pengaruh yang memiliki dasar hukum yang harus dihormati dan dipatuhi. Pengakuan ini harus diberikan kepada siapa pun yang memang memiliki kewenangan, seperti yang dia berikan dan buktikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Bilamana Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden, maka bisa diproyeksikan bahwa dia juga berharap agar siapa pun mematuhi dan menghormatinya. Seperti Abdurrahman Wahid, Megawati juga memiliki kekuasaan kharismatik cukup besar. Kekuasaan demikian harus digunakan justru untuk mendukung stabilitas nasional.

Megawati Soekarnoputri melihat kelemahan wacana politik Abdurrahman Wahid sebagai peluang yang hampir pasti menjadi miliknya. Oleh karena itu, Megawati merasa tidak perlu banyak melontar wacana politik, termasuk memberikan kontra-wacana politik. Gaya berwacana politik Megawati bisa

dikategorikan sebagai feminin-minimalis. Feminin karena menampakkan keperempuannya, yang cenderung tidak banyak memberikan pertikaian terbuka, minimalis karena sangat hemat dalam memberikan pernyataan. Gaya yang terkesan rendah hati ini ternyata lebih berhasil sebagai piranti perjuangan politik.

Ketiga, bagi Amien Rais, kekuasaan formal presiden merupakan mandat dari rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Karena lembaga ini memberikan mandat kekuasaan kepada presiden, maka MPR pula yang berdasarkan konstitusi berwenang untuk memberhentikan presiden. Konstitusi menempatkan MPR di atas presiden, jadi presiden tidak bisa memberhentikan anggota, apalagi membubarkan MPR. Pembubaran MPR oleh presiden merupakan pelanggaran sangat serius dan menjadi alasan yang cukup untuk memberhentikannya.

Amien Rais melihat wacana politik Abdurrahman Wahid sebagai wilayah paling strategis untuk diserang. Semakin banyak Abdurrahman Wahid menghasilkan wacana politik yang tidak memenuhi kriteria kelayakan logik-empirik, semakin mungkin bagi Amien Rais untuk membangun pengaruh melalui kontra-wacananya. Wacana politik Abdurrahman Wahid tidak memenuhi syarat koherensi, karena selain sering berubah-ubah juga saling bertentangan satu sama lain. Pun wacana politik Abdurrahman Wahid teramat jauh dari kriteria kebenaran korespondensi, karena pernyataan tidak didukung oleh kenyataan dan atau tindakan. Gaya berkontra-wacana Amien Rais yang rasional-kritis memiliki dampak penularan sangat cepat dan meluas.



Keempat, bagi Akbar Tandjung kewenangan presiden merupakan mandat dari rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Karena mandat kekuasaan presiden berasal dari MPR, maka MPR pula yang berdasarkan konstitusi berwenang untuk memberhentikan presiden. Konstitusi menempatkan MPR di atas presiden, jadi presiden tidak bisa memberhentikan anggota, apalagi membubarkan MPR. Demikian pun, keberadaan Partai Golkar dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pembubaran Partai Golkar oleh Presiden merupakan bukti kuat bahwa Presiden telah melanggar Konstitusi. Oleh karena itu, MPR sebagai lembaga yang memberikan mandat kepada Presiden, harus memproses pemberhentian Presiden karena telah melanggar konstitusi.

Akbar Tandjung memaknai wacana politik Abdurrahman Wahid sebagai wilayah yang sangat penting untuk dicermati dan diantisipasi. Penarikan dukungan partainya terhadap Abdurrahman Wahid menandakan hilangnya kepercayaan Akbar Tandjung terhadap Abdurrahman Wahid. Dengan gaya berkontra-wacana formalis-legalistik, Akbar Tandjung berbicara dengan nada datar, cenderung defensif, serta berhati-hati sambil memantau setiap kemungkinan. Wacana politik Abdurrahman Wahid untuk membubarkan atau membekukan Partai Golkar merupakan pembenar terpenting bagi Akbar Tandjung untuk bersama-sama Amien Rais memberhentikan Abdurrahman Wahid.

## B. Beberapa Implikasi

Temuan penelitian ini mendukung tesis dasar yang diajukan oleh Gadamer, tidak bisa ada pemahaman tunggal terhadap apa yang dikemukakan seorang produsen wacana. Bagi masyarakat interpretif yang berbeda kepentingan, produsen wacana benar-benar telah mati (*the author is dead*). Wacana apa pun yang dibangun oleh produsen wacana niscaya ditafsirkan dengan begitu “sementana” oleh masyarakat interpretif yang tidak berkesamaan kepentingan.

Pertama, penerimaan tesis dasar ini berimplikasi pada proposisi tentang hubungan antara bahasa dengan kekuasaan. Memang benar bahwa bahasa bisa digunakan sebagai piranti pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan, tetapi tentu ada prasyaratnya, yaitu: sepanjang tidak terjadi persilangan kepentingan antara produsen wacana (*the author*) dengan khalayak penafsirnya (*its interpreter*). Dengan demikian, perspektif Gadamerian menyumbangkan semacam *ceteris paribus* terhadap kekuatan persuasif dan hegemonik bahasa untuk mendapatkan atau melanggengkan kekuasaan.

Dalam struktur politik elit bersaing, bahasa tidak lagi berfungsi memantapkan hubungan sosial sebagaimana digambarkan oleh sosiolinguistik konvensional, tetapi lebih merupakan piranti untuk memenangkan persaingan politik. Perhatian para pelaku wacana politik bukan lagi mengupayakan titik temu penafsiran menuju pemahaman bersama (*shared meaning*) melainkan makna hegemonik (*hegemonic meaning*). Wacana politik tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengendalikan kekuasaan, tetapi juga

berpeluang menjadi sasaran serangan bagi pihak lain untuk mendapatkan, mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan.

Kedua, temuan kajian berdasarkan perspektif hermeneutika Gadamerian mempertegas bahwa persoalan pemanfaatan bahasa atau wacana untuk kepentingan kekuasaan tidak sesederhana sebagaimana sering diproposisikan, termasuk oleh penulis di awal penelitian ini dilakukan. Penggunaan bahasa sebagai piranti legitimasi kekuasaan yang ditujukan terhadap masyarakat penafsir yang berlawanan kepentingan justru bisa berbalik menjadi “senjata makan tuan”, karena akan diolah oleh masyarakat penafsirnya sehingga tampak menjadi penipuan melalui bahasa.

Ketiga, refleksi lebih luas terhadap keberlakuan tesis ini juga bisa dikenakan pada berbagai jargon yang dikembangkan oleh para pelaku politik. Istilah apa pun yang dikembangkan sebagai inti suatu wacana, bisa dipahami secara sangat berbeda oleh masyarakat penafsir yang memiliki sejarah berbeda. Ketidak-samaan sejarah (*tambo*) dan lebih-lebih prasangka dan kepentingan antara sebagian masyarakat Indonesia yang menghendaki “berpisah” dari Republik Indonesia, menyulitkan usaha membangun pemahaman yang sama akan makna nasionalisme atau kebangsaan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia belum cukup berhasil dalam upaya menyatukan berbagai horizon pemaknaan menjadi suatu pemaknaan bersama. Konflik, baik antar elit maupun antara elit dengan massa, bisa dipahami sebagai cermin rendahnya fusi horizon antar mereka.

Keempat, ada titik temu penting antara pendekatan Gadamerian dengan sosiologi fungsionalis taraf menengah. Sebagai tindak bertujuan, praktik berwacana (*discursive practice*) tidak hanya memunculkan akibat yang diharapkan, tetapi juga menghadirkan sejumlah akibat yang tidak disadari dan tidak disengaja. Selanjutnya, karena tugas ilmu-ilmu sosial antara lain adalah menganalisis konsekuensi tindakan sosial yang tak terantisipasi, maka bila status epistemologi praktik wacana diidentikkan dengan tindakan sosial, justru pendekatan Gadamer yang lebih memiliki signifikansi bagi kajian ilmu sosial dibanding dengan pendekatan Hirschian. Kajian terhadap makna wacana berdasarkan perspektif hermeneutika Gadamerian bisa memberikan “pintu masuk” alternatif bagi identifikasi akibat-akibat laten dari praktik berwacana seseorang.

Kelima, agak sulit untuk memasukkan perspektif hermeneutika Gadamerian sebagai bagian dari paradigma interpretivisme konvensional. Kalau hermeneutika intensionalis Hirschian bisa secara konsisten dimasukkan ke dalam kelompok pendekatan hermeneutika interpretivis, maka hermeneutika Gadamer lebih cenderung masuk ke dalam kelompok hermeneutika positivis, atau sekurang-kurangnya inter-subjektivis. Penjelasan terhadap kesimpulan ini adalah karena baik produsen wacana maupun penafsir wacana sama-sama memiliki otonomi, termasuk untuk tidak mencapai kesepakatan makna.

Selain sejumlah implikasi teoretik langsung tersebut, temuan penelitian ini juga berimplikasi pada beberapa perspektif teoretik yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial. Pertama, tilikan berdasar pemikiran teoretik kekuasaan Althusser (1971), menunjukkan bahwa meskipun seorang penguasa berpeluang dan

berkewenangan menggunakan baik Aparat Represif Negara (RSA) dan Aparat Ideologik Negara (ISA), ternyata kedua aparat ini tidak selalu berhasil melestarikan kekuasaan. Salah satu penyebab kegagalan ini adalah sejumlah cacat dalam wacana politik, sehingga tidak berhasil menjadi arus utama di lembaga legislatif.

Kedua, temuan penelitian ini menghaluskan tipologi penguasaan menurut Gramsci (1971), dengan menambahkan satu jenis upaya penguasaan yang terletak di antara penguasaan koersif dan penguasaan hegemonik, yaitu penguasaan intimidatif. Jenis penguasaan ini ditandai oleh ancaman penggunaan perangkat represif, sambil berupaya membangun politik makna hegemonik. Terkait dua sumber pokok kekuasaan menurut Galtung, tampak bahwa dalam upaya mempertahankan kekuasaan, Abdurrahman Wahid telah gagal baik dalam mengerahkan sumber-sumber ideologik maupun sumber-sumber punitif. Kekuasaan ideologik dibangun berdasarkan ideologi, kebudayaan, dan bahasa, sedangkan kekuasaan punitif dibangun di atas anggaran belanja militer persenjataan militer, dan personil militer (Windhu, 1992: 40).

Ketiga, dari perspektif teoretik kekuasaan dan kekerasan menurut Bourdieu (1994), temuan penelitian ini menyumbang tipologi agak berbeda. Konseptualisasi dan teoretisasi kekuasaan dan kekerasan simbolik ala Bourdieu tidak berlaku manakala pihak-pihak yang terlibat menguasai sumber-sumber kekuasaan yang setara. Apa yang terjadi ketika seseorang berupaya melakukan kekerasan simbolik terhadap orang lain yang setara yang mampu melakukan perlawanan bukan lagi kekerasan simbolik, melainkan pertikaian simbolik.

Keempat, wacana sebagai bentuk paling kompleks dari bahasa, tidak hanya menggambarkan dinamika sosial-politik suatu masyarakat, tetapi juga dapat digunakan untuk berselisih atau memantapkan hubungan antar manusia. Kekacauan-kekacauan dalam hubungan sosial, termasuk dalam komunikasi politik, tertampil jelas dalam wacana-wacana yang berkembang. Membangun sebuah masyarakat yang harmonis, oleh karena itu, juga sangat bergantung pada kemampuan para elit dan anggota masyarakat dalam menggunakan bahasa secara baik. Elit politik, tidak bisa tidak, harus menghayati sungguh-sungguh bahwa makna suatu wacana tidak sama sekali bergantung pada niatan, tetapi juga partisipasi --- yang dipengaruhi oleh horison --- penafsirnya. Para ahli sociolinguistik, melalui pemaparan hasil-hasil kajiannya, diharapkan bisa mendukung peningkatan peran bahasa bagi pembangunan suatu masyarakat agar mampu menggunakan bahasa secara efektif. Bila tercapai, maka peran itu sudah merupakan sumbangan yang sangat positif bagi masyarakatnya.

Kelima, keberlangsungan kekuasaan seorang pejabat publik sebagiannya ditentukan oleh praktik berbahasa dan berwacana. Ketidak-efektivan praktik berbahasa dan berwacana memberikan "bidang rentan" yang bisa dijadikan sebagai sasaran serangan para pesaing politik. Semakin efektif seorang pejabat publik dalam berbahasa dan berwacana, maka semakin kecil bidang rentan yang bisa diserang oleh para pesaing politiknya. Sebaliknya semakin tidak efektif seorang pejabat publik dalam berbahasa dan berwacana, maka semakin besar bidang rentan yang bisa diserang oleh para pesaing politiknya.

Akhirnya, sejauh menyangkut substansi tentang pemaknaan, temuan-temuan penelitian ini memang mengukuhkan tesis Gadamer. Namun demikian, berkenaan dengan metodologi kajian, pendekatan Gadamer tidak memberi panduan yang sebagaimana, misalnya, protokol analisis fungsional Merton. Gadamer begitu sibuk dengan pertanyaan tentang kebenaran (*the question of truth*) sehingga menjadi kurang praktikal sebagai perspektif teoretik. Oleh karena itu, diperlukan keberanian berspekulasi bagi siapa pun peneliti yang bermaksud menggunakan pemikirannya sebagai perspektif teoretik.

Bertolak dari kerangka pemikiran Gadamer yang mengandaikan ada dua pihak yang terlibat dalam penafsiran, antara wacana dengan penafsir, penelitian ini dikembangkan. Kerangka pikir demikian, ternyata tidak cukup aplikatif, sehingga peneliti harus mengembangkan sendiri metodologi kajiannya sepanjang tetap konsisten dengan kerangka pemikiran dasar Gadamer. Sudah barang tentu, terkandung sejumlah kelemahan dalam metode yang digunakan dalam kajian ini. Oleh karena itu, penulis mendorong masyarakat akademik untuk mempertanyakan dan menyempurnakan metode yang telah digunakan dalam kajian ini.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. 1995. *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966-1993)*. Disertasi Doktor pada Universitas Hamburg Jerman.
- Adnan, M. Mas'ud. (Ed.) 2000. *Presiden Dur Yang Gus Itu: Anehdot-Anehdot K. H. Abdurrahman Wahid*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Affandi, Arief. 1997. *Islam Demokrasi Atas Bawah; Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agger, Ben. 1992. "Postmodernism: Ideology or Critical Theory", in *The Discourse of Domination: From Frankfurt School to Postmodernism*. Illinois: Northwestern University Press.
- Agger, Robert E. Daniel Goldrich and Bert Swanson. 1973. "Classifying Power Structure and Political Regimes", in Willis B. Hawley and Frederick M Wirth, *The Search for Community Power*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Alatas, Syed Farid. 1993. "Theoretical Perspective on the Role of State Elites in South Asian Development", in *Comparative Southeast Asia*, Volume 14, Number 4, March.
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod. 1999. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur & Amien Rais tentang Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Alhumami, Amich. 1999. "Mitos-Mitos Politik Orde Baru", dalam Frans Parera dan T, Jakob Koekerits (eds.) , *Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara: Debat Publik Seputar Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Opini Masyarakat-Dari Krisis ke Reformasi*. Jakarta: PT. Kompas Media Indonesia.
- Althusser, Louis. 1971. *Essays on Ideology*. London: Verso.
- Alvesson, Mats and Kats Kaj Skoldberg. 2000. *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- Anderson, B. R. O'G. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture" in C. Rolt (Ed.) *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anonim, 2000. *What is Phenomenology?* London: Center for Advanced Research in Phenomenology, Inc.
- Anwar, K. 1989. "Bahasa, Feodalisme, dan Egaliterisme", *Prisma*, 18 (1).
- Baert, Patrick. 1998. *Social Theory in the Twentieth Century*. Cambridge: Blackwell Publishers Ltd.



- Barton, Greg. 2002. "Gus Dur dan Relasinya dengan Kekuasaan", dalam Khamami Zada (Ed.), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*. Jakarta: LAKPESDAM.
- Barton, Greg. 2002. *GUS DUR: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Jakarta, Singapore: Equinox Publishing (ASIA) PTE. LTD.
- Baso, Ahmad. 1994. *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. 1967. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday & Company, Inc.
- Bertens, Kees. 1981. *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jil.1. Jakarta: Gramedia.
- Bhakti, Ikrar Nusa, et al. 2001. *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli*. Bandung: Penerbit Zaman.
- Birch, D. 1996. "Critical Linguistics as Cultural Process", in James, J. E. (Ed.), *The Language-Culture Connection*. Singapore: SEAMEO Regional Language Center.
- Bisri, A. Mustofa. 2000. "Prawacana: Gus Dur sebagai Pelajaran Tuhan", dalam Tim INCRES, *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan GUS DUR*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bleicher, Josef. 1980. *Contemporary hermeneutics: Hermeneutics as method, philosophy, and critique*. London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Bloomfield, Leonard. 1995. *Language*. Edisi Bahasa Indonesia oleh I. Sutikno. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Blum-Kulka, Shoshana, Menahem Blondheim and Gonen Hacohen. 2002. "Traditions of dispute: from negotiations of talmudic texts to the arena of political discourse in the media". *Journal of Pragmatics* 34 (2002) 1569-1594. Department of Communication, Hebrew University, Jerusalem 91905, Israel, UCLA, Los Angeles, CA, USA.
- Bolinger, D. 1980. *Language-The Loaded Weapon: The Use and Abuse of Language Today*. London: Longman Group Limited.
- Boulding, Kenneth E. 1962. *Conflict and Defense: A General Theory*. New York: Harper & Row, Publishers.
- Bourdieu, Pierre. 1994. "Structures, Habitus, Power: Basis for a Theory of Symbolic Power" in Nicholas B. Dirks et al. (eds.), *Culture/Power/History: A Reader in Contemporary Social Theory*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1994. *Language and Symbolic Power*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Brown, Gillian and George Yule. 1989. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Budiman, Arief, Barbara Hatley and Damien Kingsbury (eds.) 1999. *REFORMASI: Crisis and change in Indonesia*. Clayton: Monash Asia Institute, Monash University Australia.
- Budiman, Arief. 1987. "Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan?", *Prisma* No. 3, Tahun XVI, Maret.
- Cahyadi, Hari. 1993. "Telaah Negara dan Ideologi menurut Althusser", dalam Tim Redaksi Driyakarya, *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Caputo, John D. 1987. *Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Chaika, Elaine. 1982. *Language: The Social Mirror*. Rowley-London: Newbury-House Publishers Inc.
- Chanisgo, Sam Mukhtar. 2000. *Bahasa dalam Diskursus Kebijakan Publik (Kajian Hermeneutika Historis terhadap Teks Dokumen Kebijakan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) semasa Rezim Orde Baru, 1974-1982*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
- Chilton, P. 1996. *Security Metaphors: Cold War Discourse from Containment to Common House*. New York: Peter Lang.
- Collins, Randal. 1975. *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. New York: Academic Press.
- Connolly, John M. and Thomas Keutner. 1988. "Introduction: Interpretation, Decidability, and Meaning" in H.-G. Gadamer, E.K. Specht, W. Stegmuller, *Hermeneutics Versus Science: Three German Views*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
- Crouch, H. 1978. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Crystal, David. 1974. *What is Linguistics?* London: Edward Arnold (Publishers) Ltd.
- de Saussure, Ferdinand. 1966. *Course in General Linguistics*. New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln (eds.) 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1932. "Kebangsaan", dalam *Karja Ki Hadjar Dewantara, bagian IIA: Kebudayaan*. Jogjakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dilthey, Wilhelm. 1990. "The Hermeneutics of the Human Sciences", in Kurt Mueller-Vollmer (Ed.) , *The Hermeneutics Reader*. New York: The Continuum Publishing Company.

- Discourse & Society*. 1999. An International Journal for the Study of Discourse and Communication in The Social, Political and Cultural Contexts. Volume 10, Number 1, January. London: SAGE Publication.
- Dokumenta Pantja Sila Berdasarkan Adjaran Bung Karno*. 1945. Dari Lahirnya Pantja-Sila Sampai Tjamkan Pantja Sila. Djakarta.
- Duverger, Maurice. 2000. *Sosiologi Politik*. Edisi Bahasa Indonesia oleh Daniel Dhakidae. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eagleton, T. 1983. *Literary Theory: An Introduction*. London: Basil
- Easton, David. 1968. "An Approach to the Analysis of Political Systems", in Kebschull, Harvey G. (Ed.) *Politics in Transitional Societies: The Challenge of Change in Asia, Africa, and Latin America*. New York: Appleton-Century-Crofts Educational Division, Meredith Corporation.
- Easton, David. 1990. *The Analysis of Political Structure*. London: Routledge.
- Eco, Umberto. 1986. *Travels in Hyperreality*. Picador.
- Edwards, D. Clark. 1986. "Predicting Presidential Decision-Making from Presidential Language and Mass Media Reportage" in *Presidential Studies Quarterly*, Department of Communication, Duquesne University.
- Eriyanto. 2000. *Kekuasaan Otoriter: Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni. Studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*. Yogyakarta: INSIST.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LkiS.
- Fairclough, Norman and Ruth Wodak. 1997. "Critical Discourse Analysis", in Teun A. van Dijk (Ed.), *Introduction to Discourse Analysis*. London; SAGE Publication.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London and New York: Longman Group UK.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow Essex: Longman Group Limited.
- Fasya, Teuku Kemal. 2002. "Semiotika dan Martabat Sebuah Tulisan", *Kompas*, 1 November: 43.
- Fatah, Eep Saefulloh. 2000. "Hari-Hari Berkuasa", dalam E. Kosasih, *Hak Gus Dur untuk Nyleneh*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Fay, Brian. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science*. Oxford: Blackwell.
- Fealy, Greg & Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Foucault, Michel. 1972. *The Archeology of Knowledge & The Discourse on Language*. New York: Pantheon Books.

- Fowler, R. 1985. "Power", in Teun A. van Dijk, T. (Ed.) *Handbook of Discourse Analysis* Volume 4: Discourse Analysis in Society. London: Academic Press.
- Fowler, Roger. 1991. *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. London and New York: Routledge.
- Gadamer, H.-G.E.K. Specht, and W. Stegmüller. 1988. *Hermeneutics Versus Science?: Three German Views*. Translated, Edited and Introduced by John M. Connolly and Thomas Keutner. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
- Gadamer, Hans-Georg. 1975. "Hermeneutics and Social Sciences", *Cultural Hermeneutics*, Vol. 2, No.4, 307-336.
- Gadamer, Hans-Georg. 1975. *Truth and Method*. New York: The Seabury Press.
- Gadamer, Hans-Georg. 1977. *Philosophical Hermeneutics*. Translated and Edited by David E. Linge. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Gadamer, Hans-Georg. 1980. *Dialogues and Dialectic: Eight Hermeneutical Studies on Plato*, diterjemahkan dengan pendahuluan oleh P. Christopher Smith. New Heaven and London: Yale University Press.
- Gadamer, Hans-Georg. 1986. "The History of Concepts and the Language of Philosophy", in Leon J. Goldstein et al (eds.) , *International Studies in Philosophy*. Volume XVIII/3. The State University of New York at Binghamton.
- Gadamer, Hans-Georg. 1990. "Historicity of Understanding", in Kurt Mueller-Vollmer (Ed.) , *The Hermeneutics Reader*. New York: The Continuum Publishing Company.
- Gadamer, Hans-Georg. 1990. "Historicity of Understanding", in Kurt Mueller-Vollmer, *The Hermeneutics Reader: Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present*. New York: Continuum.
- Galtung, Johan. 1973. *The European Community: A Superpower in the Making*. London: George Allen & Unwin Pty Ltd.
- Gautama, Sidarta. 2000. *Megawati Soekarnoputri: Harapan & Tantangan di Kursi Wapres R.I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gibbons, Michael T. 2002. *Tafsir Politik: Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*. Edisi Bahasa Indonesia oleh Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Penerbit Kalam.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- Giglioli, Pier Paolo (Ed.) 1972. *Language and Social Context*. London: Penguin Books.
- G-Martha, Ahmaddani (Ed.) 2003. *Akbar Tandjung Menghadang Badai*. Jakarta: Brajedni Communications.

- Goffman, Erving. 1974. *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gordon, Scott. 1991. *The History and Philosophy of Social Science*. London and New York: Routledge.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from the Prison Notebooks*, (Edited by Hoare, O. and Smith, G.). London: Lawrence and Wishart.
- Grice, Paul. 1957. *Meaning: Philosophical Review*. Vol. 66.
- Grondin, Jean. 1994. *Introduction to Philosophical Hermeneutics*. London: Grounded Theory, Procedures and Techniques. New Bury Park, California: Sage Publication, Inc.
- Gumperz, J. J. 1982. *Discourse Strategies: Studies in Interactional Sociolinguistics*. Cambridge: University Press.
- Habermas, Jurgen. 1967. *The Logics of Social Sciences*. Tubingen: Iceback and Moch.
- Habermas, Jurgen. 1990. "On Hermeneutics' Claim to Universality", in Kurt Mueller-Vollmer (Ed.) , *The Hermeneutics Reader*. New York: The Continuum Publishing Company.
- Habermas, Jurgen. 1990. "A Review of Gadamer's Truth and Method", in Gayle L. Ormiston and Alan D. Schrift, *Hermeneutic Tradition: From Ast to Ricoeur*. New York: SUNNY.
- Halliday, M. A. K. 1978. *Language as Social Semiotics: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- Halliday, M. A. K. and Hasan, R. 1976. *Cohesion in English*. London: Longman.
- Halliday, M. A. K. dan Hasan, R. 1992. *Bahasa, Konteks dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, A. Zainul. 2003. "Hermeneutika Islam: Intertekstualitas, Dekonstruksi, Rekonstruksi", *Gerbang*. No. 14. Volume V. hal. 3 – 44.
- Hardiman, F. Budi. 1991. "Hermeneutik: Apa Itu?", *BASIS*, Edisi Januari -XL-No. 1.
- Hardiman, F. Budi. 1991. "Positivisme dan Hermeneutik", *BASIS*, Edisi Maret -XL-No. 3.
- Haris, Samsuddin. 2002. *Konflik Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR dalam Era Transisi Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru (1999-2001)*. Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Hasyim, Mustofa W. et al. 1997. *DR. H.M. Amien Rais: "Demi Pendidikan Politik Saya Siap Menjadi Calon Presiden"*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

- Heidegger, Martin. 1990. "Phenomenology and Fundamental Ontology: The Disclosure", in Kurt Mueller-Vollmer (Ed.). *The Hermeneutics Reader*. New York: The Continuum Publishing Company.
- Hendardi. 2001 "Prolog: Distorsi Politik Parlemen", dalam Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, *Menegakkan Kebenaran: Kesaksian Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI Tentang Dana Yanatera dan Bantuan Sultan Brunei. (Buku Putih)* Jakarta: Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Heryanto, Ariel. 1993. *Discourse and State-Terrorism: A Case Study of Political Trials in New Order Indonesia 1989-1990*. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Anthropology Monash University Australia.
- Heryanto, Ariel. 1996. "Bahasa dan Kuasa: Tatapan Postmodernisme", dalam Yudi Latif dan I.S. Ibrahim (eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Heryanto, Ariel. 1996. "Pembakuan Bahasa dan Totalitarianisme", dalam Yudi Latif dan I.S. Ibrahim (eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. "Negara dan Civil Society: Refleksi atas Pemikiran Gus Dur ", dalam Achmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim (eds.). *BERGURU KEPADA BAPAK BANGSA: Kumpulan Esai Menelusuri Jejak Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. "Bahasa dan Politik: Penghampiran "Discursive Practice", dalam Yudi Latif dan I.S. Ibrahim (eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Hikam, Muhammad AS. 2000. "Sang Pelawan Arus", dalam Tim INCReS, *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya dan INCReS.
- Hindess, Barry. 1996. *Discourses of Power: From Hobbes to Foucault*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Hirsch Jr, E. D. 2000. "Keabsahan Sebuah Interpretasi", dalam Toety Herati (Ed.). *Hidup Matinya Sang Pengarang; Esai-Esai tentang Kepengarangan oleh Sastrawan dan Filsuf*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Howard, Roy J. 2001. *Hermeneutika: Pengantar Teori-Teori Pemahaman Kontemporer. Wacana Analitis, Psikososial, & Ontologis*. Edisi Bahasa Indonesia oleh Kusmana dan M. S. Nasrullah. Ninuk Kleden-Probonegoro (eds.). Bandung: Penerbit Nuansa.
- Husserl, Edmund. 1990. "The Phenomenological Theory of Meaning and of Meaning-Apprehension", in Kurt Mueller-Vollmer (Ed.). *The Hermeneutics Reader*. New York: The Continuum Publishing Company.



- Ibrahim, Abd. Syukur. 1992. *Bentuk Direktif Bahasa Indonesia dalam Masyarakat Tutar Bilingual: Kajian Etnografi Komunikasi*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Ida, Laode. 2000. "Tanggapan atas 'Menggandeng Putri untuk Meluluhkan Hati Raja'", dalam E. Kosasih (Ed.). *Hak Gus Dur untuk Nyleneh*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Iedema, Rick and Ruth Wodak. 1999. "Introduction: Organizational Discourses and Politics", in *Discourse & Society*. An International Journal for the Study of Discourse and Communication in The Social, Political and Cultural Contexts. Volume 10, Number 1, January. London: SAGE Publications.
- Joseph, John E. and Talbot J. Taylor (eds.). 1990. *Ideologies of Language*. London and New York: Routledge.
- Kartomihardjo, Soeseno. 1993. "Analisis Wacana dan Penerapannya pada Beberapa Wacana", dalam Bambang Kaswanti Purwo (Ed.), *Pertemuan Linguistik Lembaga Atama Jaya Keenam* (PELLBA 6). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kartomihardjo, Soeseno. 2000. "Kekuasaan dalam Bahasa", dalam Bambang Kaswanti Purwo (Ed.), *Kajian Serba Linguistik*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Kosasih, E. (Ed.). 2000. *Hak Gus Dur untuk Nyleneh*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Krech, David, Richard S. Crutchfield, and Egerton L. Ballachey. 1983. *Individual in Society*. Auckland: McGraw-Hill International Book Company.
- Kridalaksana, Harimurti. 1988. "Mongin-Ferdinand de Saussure (1857-1913): Bapak Linguistik Modern dan Pelopor Strukturalisme", dalam Ferdinand de Saussure, *Pengantar Linguistik Umum*. Edisi Bahasa Indonesia oleh Rahayu S. Hidayat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lay, Cornellis. et al. 1999. *Megawati Soekarnoputri: Menolak Politik Anti Nurani*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Lechte, John. 2001. *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Postmodernisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lee, D. 1992. *Competing Discourse: Perspective and Ideology in Language*. New York: Longman Publishing.
- Lefevere, A. 1977. *Literary Knowledge: A Polemical and Programmatic Essay on Its Nature, Growth, Relevance and Transmition*. Amsterdam: Van Goreum, Assen.
- Lincoln, Yvonna S. and Egon E. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. London: SAGE Publications.
- Linge, David E. 1977. "Editor's Introduction", in Hans-Georg Gadamer, *Philosophical Hermeneutics*. London: University of California Press.
- Littlejohn, Stephen W. 1992. *Theories of Human Communication*. Belmont, California: Wadsworth publishing company.

- Lyons, John. 1968. *Introduction to Theoretical Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Machfud, MD. Moh. 2003. *Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*. Jakarta: LP3ES.
- Madison, G. B. 1988. *The Hermeneutics of Postmodernity: Figures and Themes*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandy Ibrahim. 1998. *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, Jalaluddin Rakhmat*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Maliki, Zainuddin. 2001. "Akar Budaya Kekerasan Masyarakat Indonesia", *Makalah*, Seminar dengan Topik Membedah Praktik Kekerasan dari Berbagai Sudut Pandang, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, 20 Juli 2001.
- Manuaba, Putera. 2001. "Hermeneutika dan Interpretasi Sastra", *Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, Fakultas Sastra UNTAG Surabaya, Volume 8, No. 1, Juli.
- Marijan, Kacung. 1993. "Dinamika Politik di Partai Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik* 13. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulidin. 2003. "Sketsa Hermeneutika". *Gerbang*. No. 14. Volume V. hal. 3 – 44.
- Maulidin. 2003. "Teori Kritis Civil Society", *Gerbang*, Jurnal Studi Agama dan Demokrasi. No. 13, Vol. V – Oktober – Desember 2002.
- Merton, Robert King. 1976. "The Unanticipated Consequences of Social Action", in *Sociological Ambivalence*. New York: The Free Press.
- Mietzner, Marcus. 2001. "Abdurrahman's Indonesia: Political Conflict and Institutional Crisis" in Grayson Lloyd and Shannon Smith (eds.). *Indonesia Today: Challenges of History*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Mosca, Gaetano. 1939. *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill.
- Moulton, William G. 1968. "The Nature and History of Linguistics" in Archibald, A. Hill, *Linguistics*. Washington.
- Mubarak, M. Zaki. 2002. "Gus Dur dan Pembalikan Wacana" dalam Khamami Zada (Ed.), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*. Jakarta: LAKPESDAM
- Mulkhan, Abdul Munir. 2001. *Kiai Presiden, Islam dan TNI: Di Tahun-tahun Penentuan*. Yogyakarta: UII Press.
- Munir. 1999. "Militer dan Problem HAM di Indonesia", dalam Taufiq R. Abdullah et al (ed). *Masa Transisi: Menuju Indonesia Masa Depan*. Surabaya: PW NU Jawa Timur.



- Najib, Muhammad. 1997. *Suara Amien Rais, Suara Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Najib, Muhammad. 1999. *Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Nasir, Malki Ahmad. 2004. "Hermeneutika Kritis: (Studi Kritis atas Pemikiran Habermas)". *ISLAMIA*, THN 1.NO. 1/MUHARRAM 1425.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Neuman, W. Lawrence. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: AIIYN AND BACON.
- Nicholas B. Dirks et al (eds.). 1994. *Culture/Power/History: A Reader in Contemporary Social Theory*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Oduori, Robert W. 2002. "Language and Politics in Kenya: Restricted and Elaborated Codes", in *Journal of Language and Linguistics*, Vol. 1, No. 4 2002 ISSN 1475 - 8989. [http:// www. shakespeare. uk. net/journal/I-4/Oduori I-4. htm](http://www.shakespeare.uk.net/journal/I-4/Oduori-I-4.htm).
- Oetomo, Dede. 1993. "Pelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana", dalam Bambang Kaswanti Purwo (Ed.), *Pellba 6-Analisis Wacana, Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ogden, C. K. and I. A. Richards. 1972. *The Meaning of Meaning*. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
- Pabottingi, Mochtar. 1996. "Bahasa, Politik, dan Otosentrisitas" dalam Yudi Latif dan I.S. Ibrahim (eds.). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Palmer, Richard E. 1969. *Hermeneutics*. Evanston: Northwestern University Press.
- Palmer, Richard E. 2003. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Edisi Bahasa Indonesia oleh Musnur Hery & Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. ....
- Pey, Lucian W. 1968. "The Concept of Political Development", in Harvey G. Kebschull, (Ed.), *Politics in Transitional Societies*. New York: Meredith Corporation.
- Poespoprodjo, Wasito. 1985. *Hermeneutika Filsafati: Relevansi dari Beberapa Perspektifnya bagi Kebudayaan Indonesia*. Disertasi Program Doktor Universitas Padjadjaran.
- Poespoprodjo, Wasito. 1987. *Interpretasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatinya*. Bandung: Penerbit Remadja Karya CV.
- Polanyi, Michael. 1972. *The Study of Man*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Portes, Alecandro. 2000. "The Hidden Abode: Sociology as Analysis of the Unexpected", *American Sociological Review*. Volume 65, Number 1. February 2000.
- Pour, Julius. 1998. *Jakarta Semasa Lengser Keprabon: 100 hari menjelang peralihan kekuasaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rachman, M. Fadjoel. 2000. "Revolusi Mei 1998, Media Massa, dan Penghapusan Peran Politik, Teritorial, dan Bisnis TNI/POLRI", dalam Dedy N. Hidayat et al (ed). *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. "Nabrak-Nabrak", dalam E. Kosasih (Ed.). *Hak Gus Dur untuk Nyleneh*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Rahardjo, Mudjia. 2001. *"Bahasa dan Peradaban: Sebuah Tinjauan Filsafat"*, Pidato Ilmiah, Disampaikan pada Rapat Terbuka Senat STAIN Malang dalam Rangka Wisuda Lulusan Program Diploma 2, Sarjana S1, dan Pascasarjana S2 Smt Genap Tahun Akademik 2001/2001, 27 Oktober 2001.
- Rais, Amien. 1998. *Melangkah Karena Dipaksa Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rais, Amien. 2000 "Tanggapan atas 'Presiden tanpa Kursi'", dalam E. Kosasih (Ed.). *Hak Gus Dur untuk Nyleneh*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ramage, Douglas E. 1995. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. London and New York: Routledge.
- Ricoeur, Paul. 1979. "The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text", in Rabinov & Sullivan, *Interpretive Social Sciences; A Reader*. Barkeley: University of California Press.
- Ridwan, M. Deden dan M. Muhadjirin (eds.). 2003. *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik AKBAR TANDJUNG*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Ritzer, George & Barry Smart (eds.). 2001. *Handbook of Social Theory*. London: SAGE Publications Inc.
- Ritzer, George. 2000. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill Book Co.
- Rosidi, Sakban. 2002. *Penelitian Bahasa dan Kajian Sastra: Bahan, Tujuan, Metode, dan Penyajian*. Malang: CISC STIBA Malang.
- Sadjad, Sjamsoe'oed. 2000. "Belajar Memahami Bahasa Abdurrahman Wahid", *Kompas*, 21/7/: 4.
- Samsuri. 1988. *Analisis Wacana*. Penyelenggaraan Pendidikan Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi IKIP Malang 1987/1988.
- Santoso, Anang. 2001. *Pilihan Bahasa dalam Wacana Politik*. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

- Saryono, Djoko. 1993. "Bahasa sebagai Pusat Keberadaan Manusia", *Basis* Edisi Edisi Maret 1993, hal. 1-23.
- Schudson, Michael. 1997. "Sending a Political Message: Lessons from the American 1790's", in *Media, Culture, and Society*, 19,3: 311.
- Schwarz, Adam. 1994. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990's*. St. Leonards, NSW: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Silverman, David. 1993. *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text, and Interaction*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Edisi Bahasa Indonesia oleh Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: INSIST.
- Siradj, Sa'id Agiel. 2000. "Boleh-Boleh Saja Disebut Wali", dalam Tim INCRoS, *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan GUS DUR*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya dan INCRoS.
- Smelser, Nell J and R. Stephen Warner. 1976. *Sociological Theory: Historical and Formal*. Morristown: General Learning Press.
- Snyder, Jack. 2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York-London: W. W. Norton & Company.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sparringa, Daniel T. 1997. *Discourse, Democracy and Intellectuals in New Order Indonesia: A Qualitative Sociological Study*. A Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of the Flinders University of South Australia.
- Sparringa, Daniel T. 1999. "Demokrasi: Visi Alternatif dan Pilihan Strategi", dalam St. Sularto (ed). *Visi dan Agenda Reformasi: Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sparringa, Daniel T. 1999. "Pandangan Orang tentang Langkah Gus Dur", *Aula*, Januari 1999.
- Sparringa, Daniel. 2001. *Analisis Wacana*. Kertas Kerja, FISIP Universitas Airlangga.
- Straehle, Carolyn et al. 1999. "Struggle as Metaphor in European Union Discourses on Unemployment", in *Discourse & Society*. An International Journal for the Study of Discourse and Communication in The Social, Political and Cultural Contexts. Volume 10, Number 1, January. London: SAGE: Publications.
- Strauss, Anslem and Juliet Corbin. 1990. *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures and Techniques*. New Bury Park, California: Sage Publication, Inc.
- Stubbs, Michael. 1983. *Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Sumaryono, E. 1999. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suprpto, Riga Adiwoso. 1989. "Perubahan Sosial dan Perkembangan Bahasa", *Prisma*, No. 1 Tahun XVIII.
- Suprpto, Riga Adiwoso. 2002. "Politik Bahasa dan Bahasa Politik", dalam Bambang Kaswanti Purwo (Ed.), *PELBBA 15*, Pertemuan Linguistik Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Atmajaya: Kelima Belas. Jakarta: Pusat Kajian Bahasa dan Budaya UNIKA Atma Jaya.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susanto, Budi. 1997. *Ketoprak: The Politics of the Past in the Present Day of Java*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suseno, Frans Magnis. 1999. "Gus Dur: Bangsa Mana di Dunia Mempunyai Presiden Seperti Kita", dalam Achmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim (eds.). *Berguru kepada Bapak Bangsa: Kumpulan Esai Menelusuri Jejak Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*. Jakarta; Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
- Syafe'ie, Arifan. 2001. "Parlemen di Era Gus Dur", *Bernas*, Sabtu Legi, 5/5/2001: 4.
- Tandjung, Akbar. 2000. "*Kritisisme sebagai Pelaksanaan Fungsi Partai Politik*", Naskah Pidato Politik pada Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIM) Partai Golkar, 18 Juli 2000 di Jakarta.
- Thiselton, Anthony C. 1992. *New Horizons in Hermeneutics*. Michigan: Zondervan Publishing House.
- Thomas, Linda, and Shan Wareing (eds.). 1999. *Language, Society and Power*. New York: Routledge.
- Thompson, John B. 1990. *Critical Hermeneutics: A Study in the thought of Paul Ricoeur and Jurgen Habermas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Trigg, Roger. 1985. *Understanding Social Science*. Oxford: Basic Blackwell
- Usman, Sunyoto. 1990. *Elit dalam Perspektif Sosiologi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Valdes, Mario J. (Ed.). 1991. *A Ricoeur Reader: Reflection of Imagination*. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Harvester Wheatsheaf.
- van Dijk, A. T. 1985. *Handbook of Discourse Analysis*. Volume 4. London: Academic Press.
- van Dijk. A. T. 1977. *Text and Context*. London: Longman.
- Verba, Sidney. 1974. "Sequences and Development" in Leonard Binder et al. *Crises and Sequences in Political Development*. New Jersey: Princeton University Press.

- Vollmer, Kurt Mueller (Ed.). 1990. *The Hermeneutics Reader: Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present*. New York: The Continuum Publishing Company.
- Wahid, Abdurrahman. 2003. "Pengantar: Uraian Historis, tetapi Obyektif", dalam Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*. Jakarta: LP3ES.
- Wardhaugh, Ronald. 1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: Basic, Blackwell, Inc.
- Wareing, Shan. 1999. "What is language and what does it do?", in Linda Thomas and Shan Wareing (eds.). *Language, Society and Power*. London and New York: Routledge.
- Warnke, Georgia. 1987. *Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason*. Cambridge: Polity Press.
- Waters, Malcom. 1994. *Modern Sociological Theory*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- Weedon, C. 1987. "Discourse, Power, and Resistance", in Smith, B. *Compiled Research Methodology 1: Issues and Methods in Research*, Reader Part 3. Geelong-Victoria: Deakin University.
- Weinsheima, Joel C. 1985. *Gadamer's Hermeneutics: A Reading of Truth and Method*. New Heaven and London: Yale University Press.
- Weinsheimer, Joel C. 1985. *Gadamer's Hermeneutics: A Reading of Truth and Method*. New Heaven and London: Yale University Press.
- Windhu, I. Marsana, 1992, *Kekuasaan & Kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wolff, Janet. 1975. *Hermeneutic Philosophy and the Sociology of Art*. London and Boston: Routledge & Kegan Paul.
- Yasa, I wayan Suka. 2007. *Teori Rasa: Memahami Taksu, Ekspresi, & Metodenya*. Penerbit Widya Dharma Bekerjasama dengan Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia.
- Young, Ken. 1999. "Post-Soeharto: a change of regime?", dalam Arief Budiman, Barbara Hatley dan Damien Kingsbury (eds.). *REFORMASI: Crisis and change in Indonesia*. Monash: Monash Asia Institute.
- Zada, Khamami (Ed.). 2002. *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*. Jakarta: LAKPESDAM.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2004. "Menguak Nilai Dibalik Hermeneutika", *ISLAMIA*, THN 1, NO. 1/MUHARRAM 1425.

## **Majalah**

Aula, Juni 2000

Forum Keadilan, 08 Mei 1999

Forum Keadilan, 34, 28 November 1999

Forum Keadilan, 5, 7 Mei 2000

Forum, 08, 30 Mei 1999

Forum, 11 Januari 1999

Forum, 5 September 1999

Forum, 08, 30 Mei 1999

Forum, 34, 28 November 1999

Gatra, 21 April 2001

Gatra, 26 Mei 2001

Gatra, 26 Mei 2001

Gatra, 26 Mei 2001

Gatra, 9 26 Mei 2001

Majalah D&R Edisi 21 Maret 1998

Majalah Retorika, Edisi 20 Agustus-September 2001

Panji, 06 Juni 2001

Panji, 6 Juni 2001

Tabloid Nasional, 13-12 Oktober 2000

Tabloid Nasional, 13-20 Oktober 2000

Tabloid Nasional; 13-20 Oktober 2000

Tempo, 05 Agustus 2001

Tempo, 1 April 2001

Tempo, 11 Januari 1999

Tempo, 15 April 2001

Tempo, 15 April 2001

Tempo, 15 Agustus 1998

Tempo, 15 April 2001

Tempo, 17 Oktober 1999

Tempo, 23 Juli 2000

Tempo, 23 Juli 2000

Tempo, 23 Juli 2000

Tempo, 31 Oktober 1999

Tempo, 6 Mei 2001

Warta, Oktober 2000

### **Media Elektronik**

Detik.com; July 5, 2000

SCTV 20 Juli 2002 Jam 18.40 WIB

SCTV 21 Juli 2002 Jam 20.00 WIB

### **Surat Kabar**

Jawa Pos, 1 September 2000

Jawa Pos, 10 Oktober 2000

Jawa Pos, 15 Juli 2001

Jawa Pos, 19 Agustus 2000

Jawa Pos, 23 September 2000

Jawa Pos, 24 September 2000

Jawa Pos, 24 September 2000

Jawa Pos, 28 Juni 2001

Jawa Pos, 30 Desember 1999

Jawa Pos, 8 Oktober 2000

Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2000

Kompas, 28 Oktober 2000

Kompas, 10 Juli 2000

Kompas, 10 Juli 2001

Kompas, 11 April 2001

Kompas, 11 April 2001

Kompas, 12 Juli 2000

Kompas, 12 Oktober 2000

Kompas, 13 Februari 2004

Kompas, 13 Maret 2001

Kompas, 13 Maret 2001

Kompas, 13 Oktober 2000  
Kompas, 13 Oktober 2000  
Kompas, 15 Januari 2001  
Kompas, 15 Januari 2001  
Kompas, 15 Januari 2001  
Kompas, 15 Januari 2001  
Kompas, 16 April 2001  
Kompas, 16 Februari 2001  
Kompas, 16 Juni 2000  
Kompas, 16 Oktober 2000  
Kompas, 17 Juli 2000  
Kompas, 17 Mei 2001  
Kompas, 17 Mei 2001  
Kompas, 17 November 2000  
Kompas, 17 Oktober 2000  
Kompas, 18 Maret 2001  
Kompas, 18 September 2000  
Kompas, 2 Juli 2000  
Kompas, 20 Maret 2001  
Kompas, 20 Maret 2001  
Kompas, 20 Mei 2001  
Kompas, 21 April 2003  
Kompas, 21 Juli 2001  
Kompas, 21 Juli 2004  
Kompas, 21 Mei 2001  
Kompas, 21 Oktober 1999  
Kompas, 21 Oktober 1999  
Kompas, 22 Agustus 2000  
Kompas, 22 April 2001  
Kompas, 22 Juli 2001  
Kompas, 22 Juli 2001  
Kompas, 22 Juli 2001



Kompas, 22 Juni 2001  
Kompas, 22 Oktober 1999  
Kompas, 23 April 2001  
Kompas, 23 Januari 2001  
Kompas, 23 Juli 2001  
Kompas, 23 Juli 2001  
Kompas, 23 Maret 2000  
Kompas, 24 April 2001  
Kompas, 25 April 2001  
Kompas, 27 Juni 2000  
Kompas, 27 Juni 2000  
Kompas, 27 Mei 2001  
Kompas, 28 April 2001  
Kompas, 28 Juli 2000  
Kompas, 28 Juli 2000  
Kompas, 29 Juli 2000  
Kompas, 29 Juli 2004  
Kompas, 3 Juni 2001  
Kompas, 30 April 2001  
Kompas, 30 Januari 2001  
Kompas, 30 Januari 2001  
Kompas, 30 Januari 2001  
Kompas, 30 Juni 2000  
Kompas, 30 Juni 2000  
Kompas, 30 Maret 2001  
Kompas, 30 Mei 2001  
Kompas, 30 Mei 2001  
Kompas, 30 Mei 2001  
Kompas, 31 Mei 2001  
Kompas, 4 April 2001  
Kompas, 4 Juni 2000  
Kompas, 5 Februari, 2001

Kompas, 8 Juli 2000

Kompas, 8 Juli 2000

Kompas, 9 April 2001

Surya, 19 Mei 1998

Surya, 20 September 2000

Surya, 22 Juli 2001

Surya, 22 Juli 2001

Surya, 23 Juli 2001

Surya, 23 Juli 2001

Surya, 28 Oktober 2000

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. DATA PRIBADI

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : H. Mudjia Rahardjo, Drs., M.Si   |
| 2. NIP               | : 150 244 741  |
| 3. Pekerjaan         | : Dosen pada Fakultas Humaniora dan Budaya,<br>Universitas Islam Negeri (UIN) Malang |
| 3. Tempat/Tgl Lahir  | : Blitar, 28 Desember 1959   |
| 4. Pangkat/Golongan  | : Pembina TK I/Lektor Kepala Madya/IV B  |
| 5. Agama             | : Islam  |
| 6. Status Perkawinan | : Kawin  |
| 7. Nama Istri        | : Hj. Puji Hariwati, Dra.  |
| 8. Nama Anak         | : Anita Restu Puji Raharjeng<br>Rofyka Yuli Puji Raharjeng<br>Fajar Maulana.         |
| 9. Nama Orangtua     |  |
| Ayah                 | : H. Zainuri   |
| Ibu                  | : Katiyah  |
| 10. Alamat           | : Bandulan VIIIB/308 C, Sukun, Malang.<br>Telp. (0341) 568 308                       |
| 11. Email            | : m_rahardjo2003@yahoo.com   |

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar di Blitar, 1971
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Blitar 1974
3. Sekolah Teknologi Menengah (STM) di Blitar, Jurusan Teknik Sipil 1977.
4. Akademi Bahasa Asing (ABA) Jurusan Bahasa Inggris, Belanda, di Malang 1978
5. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang), di Malang 1984
6. Program Pascasarjana (S2) Program Studi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah (UMM) Malang , 1996
7. Program Doktor (S3) Ilmu Sosial, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, di Surabaya 2005

### III. PENDIKAN TAMBAHAN

1. Education Planning and Management in School of Education  
La Trobe University, Victoria, Australia, 2001.
2. Training Program on University Management in Universiti Kebangsaan  
Malaysia, 2004.
3. Visiting Academic di Monash University, Geebsland, Victoria, Australia,  
Desember 2001

### IV. PENGALAMAN KERJA

1. Guru Bahasa Inggris di SMAK Yos Sudarso, Kepanjen Malang, 1982-1986.
2. Guru Bahasa Inggris di SMA PGRI Kepanjen Malang, 1983-1986.
3. Guru Bahasa Inggris di “Gadjah Mada English Course” Malang 1982-1986
4. Asisten Dosen Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE)  
IKIP Malang, 1984-1986.
5. Dosen Bahasa Inggris di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Universitas  
Brawijaya Malang, 1984-1986.
6. Dosen Bahasa Inggris di Akademi Bahasa Asing (ABA) Malang, 1983-1986
7. Dosen Bahasa Inggris di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
(FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB), 1986-1987.
8. Dosen Bahasa Inggris di FKIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM),  
1988- 2002.
9. Dosen Bahasa Inggris di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) IKIP  
PGRI Malang, 1987- 2001.
10. Dosen Bahasa Inggris di IKIP PGRI Blitar, 1983-1986.
11. Dosen Bahasa Inggris di STKIP PGRI Blitar, 1988-2001.
12. Dosen Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Malang  
(UNISMA), 1990-2003.
13. Dosen Bahasa Inggris di FKIP IKIP Budi Utomo Malang, 1989-2001.
14. Dosen Bahasa Inggris di Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka (UNMER)  
Malang, 1996- 2001.
15. Konsultan Bahasa pada Proyek Rencana Pengembangan Kota Malang, 2003.
16. Dosen Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Malang,  
1987- sekarang.
17. Dosen Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah Malang, IAIN Sunan Ampel  
(sekarang Uiniversitas Islam Negeri Malang) 1989- sekarang.
18. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 1999 –  
sekarang..

## V. PENGALAMAN JABATAN

1. Ketua Jurusan Bahasa Inggris STIBA Malang, 1986-1991
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik, STIBA Malang, 1991- 2000
3. Sekretaris Laboratorium Micro Teaching dan Laboratorium Bahasa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang, 1990-1994
4. Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang, 1994- 1998
5. Pembantu Ketua Bidang Kerjasama, STAIN Malang, 1998-2004
6. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 2004 – sekarang.

## VI. JABATAN SOSIAL

1. Ketua Dewan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda, Bandulan, Sukun Malang, 2001- 2004.
2. Ketua Yayasan Pendidikan Miftahul Huda, Bandulan, Sukun, Malang, 2004-sekarang

## VII. JABATAN PROFESI

1. Anggota Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), 1992 – sekarang
2. Ketua Umum Asosiasi Pembantu Rektor Bidang Kerjasama PTAIN Se-Indonesia, 2004- sekarang

## VIII. PENGALAMAN/FORUM INTERNASIONAL

1. Petugas Bahasa/Seksi Bahasa Inggris pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Non-Blok 10 di Jakarta 1992.
2. Ketua Panitia Penyelenggara “Regional Workshop for Literacy Leading Staff to Train Them in Curricula and Teaching Material Elaboration”, Kerjasama antara The Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization (ISESCO) dan Departemen Agama, di STAIN Malang, 15-19 October 2001
3. Anggota International Conference on Religion and Science, 2003-sekarang.

## IX. ORGANISASI PROFESI

1. Staf Ahli Dewan Redaksi , Jurnal Ulul Albab Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2002- sekarang
2. Redaksi Tamu Jurnal Sains dan Teknologi, Politeknik Negeri Malang, 2003-sekarang.
3. Anggota Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM), 2003-sekarang.

## X. KARYA ILMIAH

1. Relung-Relung Bahasa: Bahasa dalam Wacana Politik Indonesia Kontemporer (2002) oleh penerbit Aditya Media Yogyakarta,
2. Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Pengetahuan (2002) (Editor) oleh Penerbit Cendekia Paramulya Malang,
3. Pengantar Penelitian Bahasa (2002) oleh Penerbit Cendekia Paramulya Malang,
4. Wacana Kebahasaan: dari Filsafat hingga Sosial Politik (2004) oleh Penerbit Cendekia Paramulya Malang,
5. Pengantar Filsafat Bahasa (2003) UIN Malang Press,
6. Mengapa Orang Bermigrasi? (2004), persiapan terbit.
8. Mengapa Gus Dur Jatuh? (2004), persiapan terbit
9. Bahasa dan Wacana Politik Abdurrahman Wahid, 2004, persiapan terbit.
10. Hermeneutika: Para Tokoh dan Gagasannya, 2005, persiapan terbit.

## XI. PENULISAN JURNAL DAN MAJALAH ILMIAH

1. *BAHASA, PIRANTI PERJUANGAN POLITIK: Kajian Awal Analisis Wacana Politik Elit Politik Indonesia*, Ekspresi, Majalah Ilmiah STIBA Malang, Vol. V, Number 2, November 2000.
2. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Bahasa dan Media*, el-Harakah, Wacana Kependidikan, Keagamaan dan Kebudayaan. Nomor 56, Tahun XXII, Januari-Maret 2001.
3. *Bahasa: Antara Pikiran dan Tindakan*, Ulul Albab, Jurnal Studi Islam, Sains dan Teknologi. Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2001.
4. *Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Sosiologi Islam sebagai Sebuah Tawaran*, el-Harakah, Wacana Kependidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan. Edisi 57, Tahun XXII, Desember-Februari 2002.
5. *Moralitas dan Agama dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Antara Moralitas Privat dan Moralitas Publik*. el-Harakah, Wacana Kependidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan, Edisi 58, Tahun XXIII, Oktober-November 2002.
6. *Ferdinand de Saussure: Bapak Linguistik Modern dan Pelopor Strukturalisme*, Lingua, Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, Fakultas Humaniora dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Volume 1, Nomor 1, September 2003.
7. *Antara Intensionalisme dan Gadamerian dalam Kajian Hermeneutika: Sebuah Tinjauan Metodologis*, MOZAIK, Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga, Volume 1, Nomor 2, Edisi Juli- Desember 2003.
8. *Bahasa dan Sastra di Tengah Perubahan Sosial*, Jurnal Mahardika, Nomor 1/1/Juli 2003.
9. *Mengenal Kembali Hermeneutika: Sebuah Metode Memahami Teks*. Jurnal el-Jadid, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Vol. 1, No. 1 Mei-Oktober 2003.

10. *Wacana dan Bahasa Politik Abdurrahman Wahid*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP, Universitas Jember, Edisi Khusus Februari 2004.
11. *Komunikasi Publik dan Pemasaran Ide (Bahasa dan Pembangunan Wacana)*, Lingua, Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, Fakultas Humaniora dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Vol. 1, No2, Maret 2004.
12. *Perubahan Sosial di Mintakat Penglaju (Dampak Penglajuan terhadap Perubahan Sosial)*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP, Universitas Jember, Vol. 16 No. 2, Agustus 2004.
13. *Questions of Religions in Modernity Issues*, LORONG, Journal of Social – Cultural Studies, Vol. 1, No. 01, June-December 2004.
14. *“Marital Rape” Kampung Nelayan (Studi Sosiologis tentang Perkosaan dalam Perkawinan di Kampung Nelayan Sendang Biru, Malang*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences), Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Volume 16, Nomor 2, Agustus 2004.

## XII. KEGIATAN PENELITIAN (Empat Tahun Terakhir)

1. The Correlation between the Frequency of the Private University Students in Malang to visit libraries and Their Academic Achievement. (2000).
2. “Marital Rape” di Kampung Nelayan. (Studi Pandangan Sosiologis tentang Perkosaan dalam Perkawinan di Sendangbiru, Kabupaten Malang). (2000).
3. Students’ Behaviour toward the Japanese Teaching Program in STIBA Malang, (2001).
4. Perubahan Sosial di Mintakat Penglaju: Dampak Perubahan terhadap Perubahan Sosial di Wilayah Kecamatan Sukun, Malang. (2002)
5. Kesiapan Pondok Pesantren dalam Menghadapi Otonomi Daerah di Kabupaten Pasuruan. (2003).
6. Upaya Peningkatan Kapasitas Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Blitar. (2003).

## XIII. KEGIATAN PADA FORUM AKADEMIK (4 Tahun Terakhir)

1. 5 Mei 2001, narasumber pada Seminar Regional “Language and Violence” oleh Jurusan Bahasa dan Sastra, Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris STAIN Malang.
2. 22 Mei 2001, narasumber pada Seminar Budaya dengan tema “Mencoba Keluar dari Budaya Kekerasan Bangsa. (Sebuah Analisis Sosial Budaya Guna Menemukan Solusi Alternatif), diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa STAIN Malang.
3. 30 Mei 2001, narasumber pada Pelatihan Intensifikasi Pembelajaran Bahasa Arab bagi Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 23 Mei–1 Juni 2001 di STAIN Malang dengan Materi “Aspek Sosial-Budaya Bahasa dan Implikasi Pengajarannya”.

4. 24 Juni 2001, narasumber pada Workshop on ESP bagi Dosen Bahasa Inggris di lingkungan IAIN Yogyakarta dan STAIN Malang.
5. 29 Juni 2001, narasumber pada Seminar tentang Profil Perguruan Tinggi di Hotel Victory Batu Malang.
6. 27 Oktober 2001, penceramah Ilmiah pada Acara Wisuda Lulusan Program Diploma II, Sarjana S1 dan Pascasarjana S2 Semester Genap Tahun Akademik 2000/2001 di STAIN Malang dengan judul “Bahasa dan Peradaban: Sebuah Tinjauan Filsafat”.
7. 29 Oktober 2001, narasumber pada FOSSA (Forum Santri Ma’had Sunan Ampel Al-Aly) STAIN Malang dengan tema “Cara Berpikir Kritis”.
8. 3 November 2001, narasumber pada Launching RIC (Radar Intellectual Club) dan Orasi Antargenerasi di Universitas Muhammadiyah Malang oleh Jawa Pos Radar Malang.
9. 23 Oktober- 30 November 2001, mengikuti Short Course tentang “Education Planning and Finance” di La Trobe University, Bendigo, Victoria, Australia.
10. 5 Desember 2001, menjadi Visiting Academic di Monash University, Geesland, Victoria, Australia.
11. 18 April 2002, narasumber pada acara Bedah Skripsi dengan tema “Idioms in Jakarta Post Newspaper” oleh lembaga Studi & Pengembangan Bahasa (LSPB) STAIN Malang.
12. 2 Mei 2002, narasumber pada acara “Bedah Buku” oleh Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) STAIN Malang dengan tema “Media Massa, Kebenaran Utopis”.
13. 11 Mei 2002, narasumber pada acara “Pekan Dua Bahasa”, oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris dan Program Studi Bahasa dan sastra Arab STAIN Malang dengan tema “Bahasa dan Transformasi Sosial: Antara Realitas dan Idealitas”.
14. 21 Mei 2002, narasumber pada acara Diskusi “Unit Aktivitas Pers Mahasiswa” (UAPM) STAIN Malang dengan tema “Pers dan Dinamika Sosial Politik Bangsa” di Students Center STAIN Malang.
15. 16 Desember 2002, penceramah ilmiah pada acara Wisuda Lulusan Program Diploma III dan Sarjana S1 Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Malang dengan judul “Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan”.



16. 7 Juni 2003, narasumber pada Seminar Regional “Bahasa dan Sastra sebagai Refleksi Fenomena Sosial Budaya” oleh HMJ Bahasa dan Sastra Inggris, UIIS Malang.
17. 11 Juni 2003, narasumber pada Seminar Bahasa Inggris, “Language and Culture as the Frame-Work of Mutual Understanding” oleh Ma’had Sunan Ampel Al-Ali UIIS Malang.
18. 21 Juli 2003, narasumber pada Pelatihan Bahasa Arab Dosen PTAIN/PTAIS Se-Indonesia di UISS Malang dengan tema “Peran Sociolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa Arab”.
19. 9-17 September 2003, kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan di Republik Islam Iran.
20. 23 Oktober 2003 narasumber pada seminar regional kebahasaan yang diadakan BEM Fakultas Bahasa dan Sastra UIIS Malang dengan judul “Bahasa Indonesia di Tengah Cermin Retak Bangsa”.
21. 11 Desember 2003, narasumber pada Semiloka “Gender dalam Perspektif Agama” oleh Biro Mental Spiritual, Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Hotel Utami Surabaya.
22. 30 Desember 2003, narasumber pada “Pelatihan dan Sosialisasi tentang Gender bagi Ulama dan Da’i” oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Hotel Utami Surabaya.
23. 5 Maret 2003, narasumber pada acara “Outbond Gender Pejabat Eselon II Kabupaten Sidoarjo” di Hotel Royal Orchid Garden Batu.
24. 6 Maret 2004, narasumber pada acara “Leadership and Organization Training” oleh Himpunan Mahasiswa Malang Alumni Ponpes Bahrul Ulum (HIMMABA) Jombang di PP. Darussalam Lawang Malang
25. 25 Maret 2004, penceramah ilmiah pada Acara Kuliah Tamu, Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra Arab, UIN Malang dengan tema “Bahasa dan Perubahan Perubahan Geopolitik Bangsa”.
26. April 2004, narasumber pada Seminar Regional “Menggagas Madrasah Aliyah Negeri ke Depan” di MAN 3 Malang.
27. 22 Mei 2004, narasumber pada Diklat Penerjemahan oleh BEM Fakultas Bahasa dan Sastra UIN Malang dengan judul “Penerjemahan, Makna, Hakikat dan Jenisnya”.

28. 6 September 2004, narasumber pada acara In Country Meeting: Pertemuan Kerjasama PTAIN dengan Perwakilan Lembaga/Negara Asing, dan Tamu Asing dan Mitra Kerja di Hotel Selekt, Batu dengan tema “Peluang Kerjasama PTAIN dengan Lembaga-Lembaga Donor Baik Dalam Maupun Luar Negeri”.
29. 14 September 2004, narasumber pada Acara Pembekalan Manajemen Kepala Sekolah Se-Kota Malang dengan tema ”Analisis Kebijakan Publik” di Hotel ASIDA Batu.
30. 28-29 September 2004, narasumber pada Seminar Nasional & Lokakarya Eksternal Pengembangan Master Plan IAIN Raden Intan Bandar Lampung dengan tema “Peluang-Peluang Kerjasama Baik Dalam maupun Luar Negeri” di Hotel Nusantara Jl Bay Pass Soekarno-Hatta Bandar Lampung.
31. 11 November 2004, narasumber pada diskusi “PERANAN AGAMAWAN DALAM POLITIK” oleh KELOMPOK DISKUSI SOSIAL SEMINARI TINGGI CM UNIT GHEBRE MIKAEL, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang.
32. 23 November – 3 Desember 2004, mengikuti Training Program tentang “University Management” di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).